SALINAN

BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 6).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
20. Sasaran *(target)* adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
21. Keluaran *(output)* adalah suatu produk akhir barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
22. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026; dan
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026.

Pasal 4

Penetapan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f. BAB VI : KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NOMOR 53

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029.

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 menjadi salah satu dokumen dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2045.

Penyusunan dokumen ini juga menjadi lebih bermakna karena bertepatan dengan periode awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu terpilih untuk masa jabatan 2025–2029, yang akan menjadi penggerak utama arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses perencanaan yangterintegrasi, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendorong akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKPD Tahun 2026 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasir Pengaraian, 2 Desember 2025.
BUPATI ROKAN HULU,

Ttd

A N T O N

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**
Daftar Tabel ..... **iv**
Daftar Gambar ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-5
1.4. Maksud dan Tujuan I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-45
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-92
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-360
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2025 dan Realisasi RPJMD II-371
2.2.1.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024 ..... II-372
2.2.1.1. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan II-385
2.2.1.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan II-386
2.2.1.3. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja II-386
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-387
2.2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan II-647
2.2.2.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan II-647
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-647
2.3.1.Aspek Geografi II-648
2.3.2.Aspek Demografi II-649
2.3.3.Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-649
2.3.4.Aspek Pelayanan Umum II-652
2.3.5.Aspek Daya Saing Daerah II-663
2.3.6.Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-664
2.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .. II-666
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-2
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau III-3
3.1.3 PDRB dan Struktur Ekonomi III-4
3.1.3.1.PDRB Menurut Lapangan Usaha III-4
3.1.3.2.PDRB Menurut Pengeluaran III-6
3.1.4 Laju Inflasi III-7
3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi III-8
3.1.6 PDRB Per Kapita III-11
3.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka III-12
3.1.8 Kemiskinan III-14

3.1.9 Indeks Pembangunan Manusia III-15
3.1.10Rasio Gini III-17
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-17
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-22
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-27
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-33
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-14
4.3. Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah IV-150
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu V-6
5.2. Usulan Dana Alokasi Khusus dan APBN V-328
5.3. Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2026 ..... V-337
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-1
6.2. Indikator Kinerja Daerah VI-3
6.3. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal VI-13
BAB VII PENUTUP VII-1

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-3
Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-5
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Rokan Hulu II-8
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha) II-10
Tabel 2.5 Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2040 (ha) II-11
Tabel 2.6 Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (ha) II-13
Tabel 2.7 Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (ha) II-14
Tabel 2.8 Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha) II-17
Tabel 2.9 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Industri Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha) II-19
Tabel 2.10 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha) II-24
Tabel 2.11 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Lainnya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha) II-26
Tabel 2.12 Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha) II-30
Tabel 2.13 Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha) II-33
Tabel 2.14 Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha) II-34
Tabel 2.15 Rekapitulasi Kejadian Banjir Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2024 ..... II-36
Tabel 2.16 Rencana Pengembangan Sisem Perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu II-37
Tabel 2.17 Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha) II-40
Tabel 2.18 Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2020-2024 Kabupaten Rokan Hulu II-41
Tabel 2.19 Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur II-43
Tabel 2.20 Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan HuluTahun 2020 - 2024 ..... II-45
Tabel 2.21 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-46
Tabel 2.22 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-48
Tabel 2.23 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (milyar rupiah) II-50
Tabel 2.24 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha diKabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (milyar rupiah) II-51
Tabel 2.25 PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-52
Tabel 2.26 Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2.27 Indeks Gini Rasio Tahun 2020-2024 ..... II-55
Tabel 2.28 Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-56

Tabel 2.29 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-57
Tabel 2.30 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu II-59
Tabel 2.31 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu II-60
Tabel 2.32 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-63
Tabel 2.33 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-64
Tabel 2.34 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-65
Tabel 2.35 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-66
Tabel 2.36 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-67
Tabel 2.36 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-68
Tabel 2.37 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (Rp.000) II-69
Tabel 2.38 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-71
Tabel 2.39 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-71
Tabel 2.40 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024 ..... II-72
Tabel 2.41 Indikator Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-73
Tabel 2.42 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-74
Tabel 2.43 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.44 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2.45 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 (dalam juta) II-76
Tabel 2.46 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024 ..... II-78
Tabel 2.47 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-78
Tabel 2.48 Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2.49 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.50 Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.51 Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.52 Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel 2.53 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 II-82
Tabel 2.54 Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2.55 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2.56 Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2.57 Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-85

Tabel 2.58 Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.59 Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.60 Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 .. II-86
Tabel 2.61 Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.62 Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.63 Kontribusi Sektor Jasa lainnya terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.64 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel 2.65 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 .... II-89
Tabel 2.66 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-91
Tabel 2.67 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-91
Tabel 2.68 Perkembangan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .. II-92
Tabel 2.69 Data Fasilitas Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-92
Tabel 2.70 Jumlah PAUD, Siswa dan Guru Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2.71 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-94
Tabel 2.72 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-95
Tabel 2.73 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-95
Tabel 2.74 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-97
Tabel 2.75 Angka Putus Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-98
Tabel 2.76 Angka Kelulusan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-98
Tabel 2.77 Jumlah Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-99
Tabel 2.78 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-99
Tabel 2.79 Rasio Murid dan guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-100
Tabel 2.80 Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B dan C Dari Dapodikmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran 2021/2023 ..... II-100
Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-101
Tabel 2.82 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-104
Tabel 2.83 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-105
Tabel 2.84 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-106
Tabel 2.85 Rasio Posyandu persatuan Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-107
Tabel 2.86 Rasio posyandu persatuan balita Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-107
Tabel 2.87 Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-109
Tabel 2.88 Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-109
Tabel 2.89 Rasio Dokter persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-110
Tabel 2.90 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-110
Tabel 2.91 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-111
Tabel 2.92 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-112
Tabel 2.93 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-112
Tabel 2.94 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-113
Tabel 2.95 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-113
Tabel 2.96 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-114
Tabel 2.97 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024..... II-115
Tabel 2.98 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-116
Tabel 2.99 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-116
Tabel 2.100 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-117
Tabel 2.101 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-117
Tabel 2.102 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-118
Tabel 2.103 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-119
Tabel 2.104 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-119
Tabel 2.105 Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-120
Tabel 2.106 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025..... II-121
Tabel 2.107 Non Polio AFP rate Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-122
Tabel 2.108 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-122
Tabel 2.109 Cakupan Balita Pneumonia ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-124
Tabel 2.110 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-124
Tabel 2.111 Persentase Penderita diare yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-126
Tabel 2.112 Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024..... II-126
Tabel 2.113 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-128
Tabel 2.114 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-129
Tabel 2.115 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-129
Tabel 2.116 Cakupan pelayanan nifas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-131
Tabel 2.117 Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024..... II-132
Tabel 2.118 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-133
Tabel 2.119 Cakupan pelayanan anak balita Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-133
Tabel 2.120 Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-134
Tabel 2.121 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-135
Tabel 2.122 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-136
Tabel 2.123 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-137
Tabel 2.124 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-138
Tabel 2.125 Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-138
Tabel 2.126 Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2024 ..... II-139
Tabel 2.127 Data Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-140
Tabel 2.128 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-141
Tabel 2.129 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-162
Tabel 2.130 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-162
Tabel 2.131 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-163
Tabel 2.132 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel 2.133 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel 2.134 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2.135 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-165
Tabel 2.136 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-166
Tabel 2.137 Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-166
Tabel 2.138 Proporsi Jumlah Kepala Keluarga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-167
Tabel 2.139 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih Dan Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Akses Terhadap Air Minum Layak Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2.140 Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-169
Tabel 2.141 Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-171
Tabel 2.142 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-172
Tabel 2.143 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/dll Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-172
Tabel 2.144 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2024 ..... II-173
Tabel 2.144 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-174
Tabel 2.145 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-174
Tabel 2.146 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-175
Tabel 2.147 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) dan Rasio

Elektrifikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-175
Tabel 2.148 Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun II-176
Tabel 2.149 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024..... II-181
Tabel 2.150 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-184
Tabel 2.151 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-184
Tabel 2.152 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-186
Tabel 2.153 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-186
Tabel 2.154 Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-186
Tabel 2.155 Data Backlog Perumahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2023..... II-187
Tabel 2.156 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-188
Tabel 2.157 Cakupan petugas Linmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024..... II-189
Tabel 2.158 Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-190
Tabel 2.159 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-191
Tabel 2.160 Jumlah PPNS Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-191
Tabel 2.161 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-192
Tabel 2.162 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-192
Tabel 2.163 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-193
Tabel 2. 164 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu..... II-193
Tabel 2.165 Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 Kabupaten Rokan Hulu II-194
Tabel 2.166 Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-195
Tabel 2.167 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-200
Tabel 2.168 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024II-200
Tabel 2.169 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-201
Tabel 2.170 Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-203
Tabel 2.171 Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-205
Tabel 2.172 Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-206
Tabel 2.173 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-207
Tabel 2.174 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-212
Tabel 2.175 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024..... II-213

Tabel 2.176 Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Pelatihan Kompetensinya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2024 ..... II-214
Tabel 2.177 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-214
Tabel 2.178 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-215
Tabel 2.179 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-215
Tabel 2.180 Rasio KDRT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-216
Tabel 2.181 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-217
Tabel 2.182 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-218
Tabel 2.183 Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-218
Tabel 2.184 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-221
Tabel 2.185 Rekapitulasi Anggaran Responsive Gender (IKG) pada Perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-222
Tabel 2.186 Ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-238
Tabel 2.187 Ketersedian energi dan Protein perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-239
Tabel 2.188 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-239
Tabel 2.189 Perkembangan Produksi Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-241
Tabel 2.190 Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2024..... II-242
Tabel 2.191 Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2020-2024 ..... II-243
Tabel 2.192 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s/d 2024 ..... II-243
Tabel 2.193 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-245
Tabel 2.194 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-245
Tabel 2.195 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-246
Tabel 2.196 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-246
Tabel 2.197 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-247
Tabel 2.198 Persentase cakupan area pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-247
Tabel 2.199 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-248
Tabel 2.200 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-249
Tabel 2.201 Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-250
Tabel 2.202 Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-250
Tabel 2.203 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-251

Tabel 2.204 Cakupan penerbitan akta kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-251
Tabel 2.205 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 -2024 ..... II-252
Tabel 2.206 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024..... II-252
Tabel 2.207 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 ..... II-252
Tabel 2.208 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-253
Tabel 2.209 Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024..... II-254
Tabel 2.210 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-255
Tabel 2.211 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024..... II-256
Tabel 2.212 Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu..... II-257
Tabel 2.213 Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 s/d 2024 ..... II-262
Tabel 2.214 BUMDES dan unit usaha BUMDES potensi serta lembaga ekonomi lain di kabupaten Rokan Hulu..... II-262
Tabel 2.215 Persentase PKK aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-272
Tabel 2.216 Persentase Posyandu aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-273
Tabel 2.217 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-273
Tabel 2.218 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024..... II-273
Tabel 2.219 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-274
Tabel 2.220 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-275
Tabel 2.221 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-275
Tabel 2.222 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-275
Tabel 2.223 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-276
Tabel 2.224 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-276
Tabel 2.225 Jumlah Rasio akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-276
Tabel 2.226 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) bagi perempuan menikah usia 15- 49 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .... II-277
Tabel 2.227 Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-278
Tabel 2.228 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 s.d 2024..... II-278
Tabel 2.229 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-279
Tabel 2.230 Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-279
Tabel 2.231 Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-280
Tabel 2.232 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-281
Tabel 2.233 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-281
Tabel 2.234 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-281
Tabel 2.235 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-281
Tabel 2.236 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasisw Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-282
Tabel 2.237 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-282
Tabel 2.238 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-282
Tabel 2.239 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-283
Tabel 2.240 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi II-283
Tabel 2.241 Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-283
Tabel 2.242 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa II-284
Tabel 2.243 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-284
Tabel 2.244 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-285
Tabel 2.245 Capaian Ibangga di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 ..... II-286
Tabel 2.246 Jumlah Penumpang Angkutan Umum II-286
Tabel 2.247 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-287
Tabel 2.248 Jumlah Uji KIR Angkutan umum II-287
Tabel 2.249 Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis II-288
Tabel 2.250 Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-289
Tabel 2.251 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-290
Tabel 2.252 Pemasangan Rambu-rambu II-290
Tabel 2.253 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum II-291
Tabel 2.254 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal II-291
Tabel 2.255 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas II-292
Tabel 2.256 Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) Tahun 2020-2024 ..... II-293
Tabel 2.257 Jaringan Komunikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 .. II-294
Tabel 2.258 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-294
Tabel 2.259 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi II-295
Tabel 2.260 Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-296
Tabel 2.261 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon II-297
Tabel 2.262 Proporsi rumah tangga dengan akses internet II-297
Tabel 2.263 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Rokan Hulu II-297
Tabel 2.264 Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-298
Tabel 2.265 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot menurut Kecamatan/

Desa II-299
Tabel 2.266 Persentase Koperasi Aktif dan yang melaksanakan RAT Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-300
Tabel 2.267 Persentase Usaha Mikro dan Kecil II-300
Tabel 2.268 Jumlah Investor PMDN/PMA II-301
Tabel 2.269 Jumlah Investasi PMDN dan PMA II-302
Tabel 2.270 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja II-303
Tabel 2.271 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-304
Tabel 2.272 Persentase organisasi pemuda yang aktif II-304
Tabel 2.273 Persentase wirausaha muda II-305
Tabel 2.274 Cakupan pembinaan olahraga II-305
Tabel 2.275 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi II-306
Tabel 2.276 Cakupan pembinaan atlet muda II-306
Tabel 2.277 Jumlah atlet berprestasi II-307
Tabel 2.278 Jumlah prestasi olahraga II-307
Tabel 2.279 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab II-307
Tabel 2. 280 Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan II-308
Tabel 2.281 Bidang Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-308
Tabel 2.282 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan II-309
Tabel 2.283 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu II-310
Tabel 2.284 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Rokan Hulu II-311
Tabel 2.285 Penyelenggaraan festival seni dan budaya II-311
Tabel 2.286 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan II-312
Tabel 2.287 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi II-312
Tabel 2.288 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu II-313
Tabel 2.289 Jumlah Pengunjung Perpustakaan II-313
Tabel 2.290 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah II-314
Tabel 2.291 Rasio perpustakaan persatuan penduduk II-314
Tabel 2.292 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun II-315
Tabel 2.293 Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan II-315
Tabel 2.294 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat II-316
Tabel 2.295 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-317
Tabel 2.296 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku II-318
Tabel 2.297 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan II-319
Tabel 2.298 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindak Lanjuti II-319
Tabel 2.299 Jumlah Kunjungan Wisatawan II-320
Tabel 2.300 Lama kunjungan Wisata II-320
Tabel 2.301 PAD sektor pariwisata II-321
Tabel 2.302 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB II-321
Tabel 2.303 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB II-322
Tabel 2.304 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya II-322
Tabel 2.305 Cakupan bina kelompok petani II-323
Tabel 2.306 Luas Areal Tanam dan panen II-323
Tabel 2.307 Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija II-325
Tabel 2.308 Capaian Kinerja Bidang Peternakan II-325
Tabel 2.309 Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-329
Tabel 2.310 Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan II-329
Tabel 2.311 Data Industri Kecil Menengah (IKM) Pandai Besi II-330
Tabel 2.312 Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Protein Hewani Asal

Ikan dan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-333
Tabel 2.313 Cakupan Bina kelompok nelayan II-333
Tabel 2.314 Produksi perikanan kelompok nelayan II-334
Tabel 2.315 Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-336
Tabel 2. 316 Kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s/d 2024 ..... II-336
Tabel 2.317 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD II-338
Tabel 2.318 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD II-338
Tabel 2.319 Kinerja Pengelolaan Keuangan II-340
Tabel 2.320 Persentase SILPA terhadap APBD II-341
Tabel 2.321 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan II-342
Tabel 2.322 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal II-343
Tabel 2.323 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-343
Tabel 2.324 Diklat Struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2024 ..... II-343
Tabel 2.325 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah II-344
Tabel 2.326 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah II-345
Tabel 2.327 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan II-345
Tabel 2.328 Jumlah PPPK menurut Tingkat Pendidikan II-346
Tabel 2.329 Jumlah Pegawai Tidak Tetap menurut Tingkat Pendidikan II-347
Tabel 2.330 Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan II-347
Tabel 2.331 Jumlah Jabatan Struktural II-348
Tabel 2.332 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan II-350
Tabel 2.333 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan II-350
Tabel 2.334 Persentase Perangkat Daerah yang Difasiltasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-350
Tabel 2.335 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah II-351
Tabel 2.336 Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Berdasarkan Surat Bupati No : 000.9/Setda-Bappeda/75.05 ..... II-352
Tabel 2.337 Persentase tindak lanjut temuan II-356
Tabel 2.338 Jumlah temuan BPK II-356
Tabel 2.339 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 ..... II-357
Tabel 2.340 Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention II-358
Tabel 2.341 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-359
Tabel 2.342 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-359
Tabel 2.343 Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2020 s.d 2024 ... II-359
Tabel 2.344 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD II-360
Tabel 2.345 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran II-361
Tabel 2.346 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran II-361
Tabel 2.347 Persentase Pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas dikabupaten Rokan Hulu 2023 -2024 ..... II-363
Tabel 2.348 Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa II-364
Tabel 2.349 Angka Kriminalitas Yang Tertangani II-368
Tabel 2.350 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort II-368
Tabel 2.351 Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024 . II-370
Tabel 2.352 Rasio Lulusan S1/S2/S3 ..... II-371
Tabel 2.353 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 Berdasarkan

Permasalahan Daerah Tahun 2024 ..... II-664
Tabel 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2022–2024 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persentase) III-4
Tabel 3.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2022–2024 dan Kabupaten Rokan Hulu (persentase)..... III-6
Tabel 3.3 Laju Inflasi (%) Kabupaten Kampar (Sister City) Tahun 2022-2024..... III-7
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021–2024 dan Target 2025-2026 Kabupaten Rokan Hulu III-11
Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026 ..... III-12
Tabel 3.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021–2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026 Kabupaten Rokan Hulu III-14
Tabel 3.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2021–2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026 Kabupaten Rokan Hulu..... III-15
Tabel 3.8 Perkembangan IPM tahun 2021–2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026 Kabupaten Rokan Hulu..... III-16
Tabel 3.9 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 III-17
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2027 ..... III-19
Tabel 3.11 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2027 ..... III-22
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2027..... III-26
Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023–2027 ..... III-31
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023–2027 ..... III-36
Tabel 4.1 HubunganVisi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 ..... IV-2
Tabel 4.2 Konsistensi Tema, Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu..... IV-6
Tabel 4.3 Sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD..... IV-14
Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan IV-17
Tabel 4.5 Sinergisitas Kebijakan Provinsi Riau Dengan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025..... IV-22
Tabel 4.6 Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2025 IV-43
Tabel 5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Rokan Hulu V-5
Tabel 5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 . V-7
Tabel 5.3 Proporsi Belanja SPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 ..... V-283
Tabel 5.4 Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif dalam Penanganan stunting di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 ..... V-289
Tabel 5.5 Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026..... V-291
Tabel 5.6 Proporsi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026..... V-308
Tabel 5.7 Proporsi Anggaran Subkegiatan Mendukung Prioritas Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 ..... V-311
Tabel 5.8 Program dan Kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui APBN Tahun 2026 V-328
Tabel 5.9 Program dan Kegiatan yang diusulkan Pendanaannya melalui APBD Provinsi Tahun 2026 ..... V-337

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen PerencanaanI II-7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu II-2
Gambar 2.2 Luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu..... II-4
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu II-6
Gambar 2.4 Jumlah Curah Hujan menurut bulan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Rokan Hulu II-9
Gambar 2.5 Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu II-12
Gambar 2.6 Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu II-13
Gambar 2.7 Peta Rencana Kawasan Pertanian Kab. Rokan Hulu Kawasan Tanaman Pangan II-15
Gambar 2.8 Peta Rencana Kawasan Perikanan Kab. Rokan Hulu..... II-18
Gambar 2.9 Peta Rencana Kawasan Industri Kabupaten Rokan Hulu II-19
Gambar 2.10 Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu II-24
Gambar 2.11 Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu..... II-25
Gambar 2.12 Peta Rencana Kawasan Transportasi Kab. Rokan Hulu..... II-26
Gambar 2.13 Peta Rencana Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Rokan Hulu II-27
Gambar 2.14 Peta Rencana Kawasan Andalan Kabupaten Rokan Hulu..... II-27
Gambar 2.15 Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu..... II-31
Gambar 2.16 Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu.. II-34
Gambar 2.17 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu II-41
Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan HuluTahun 2020- 2024 (jiwa)..... II-42
Gambar 2.19 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2024 ..... II-44
Gambar 2.20 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-47
Gambar 2.21 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah) II-49
Gambar 2.22 Perkembangan Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024..... II-53
Gambar 2.23 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 Kabupaten Rokan Hulu. II-56
Gambar 2.24 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020- 2024..... II-58
Gambar 2.25 Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstream (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024..... II-62
Gambar 2.26 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-63
Gambar 2.27 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-64
Gambar 2.28 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-66
Gambar 2.29 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-67
Gambar 2.30 Umur Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-69
Gambar 2.31 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-70
Gambar 2.32 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024..... II-76
Gambar 2.33 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 (dalam juta) II-77
Gambar 2.34 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 .... II-90
Gambar 2.35 Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-102
Gambar 2.36 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-104
Gambar 2.37 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2020 s.d 2024 ..... II-106
Gambar 2.38 Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan II-161
Gambar 2.39 Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 ... II-183
Gambar 2.40 Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-189
Gambar 2.41 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-199
Gambar 2.42 Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial Tahun 2024 ..... II-211
Gambar 2.43 Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-220
Gambar 2.44 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-221
Gambar 2.45 Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu 2020– 2024 ..... II-362
Gambar 2.46 Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Tahun 2019 sd 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-364
Gambar 2,47 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort Tahun 2020 s/d 2024 di Kabupaten Rokan Hulu II-369
Gambar 2.48 Rasio Ketergantungan Tahun 2020 s/d 2024 Kabupaten Rokan Hulu ... II-370
Gambar 2.49 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2020 s/d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-371
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2021–2024 ..... III-9
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2026 ..... III-10
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2026 ..... III-13
Gambar 3.4 Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2026 ..... III-14
Gambar 3.5 Grafik Perkembangan dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026 ..... III-16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program, serta kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,Program strategis nasional dan hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional tahun 2025.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Penyusunan RKPD dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun perencanaan. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang terdapat pada tahun perencanaan. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan dana pembangunan pada tahun perencanaan, maka dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan. Oleh sebab itulah perencanaan harus dikendalikan dengan tujuan yang akan dicapai dan tidak dikendalikan oleh ketersediaan anggaran. Perencanaan yang dilakukan harus dapat memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan efesiensi, efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran atau belanja daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: tahap perumusan RKPD yang merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai

koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif dan tahap penyajian RKPD. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik,transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Karenanya sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang

akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Nomor 8);

1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Selanjutnya RKPD Tahun 2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026.

RKPD yang disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah tetap mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Disamping itu penyusunan RKPD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Rokan Hulu, RPJP Provinsi Riau, RPJP Nasional, RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, RPJMD Provinsi Riau, RPJM Nasional, serta

berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hasil akhir dari RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Tahun 2026 disusun mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029. Dalam menyusun RKPD 2026 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu politik, *teknokratik, partisipatif, bottom-up* dan *top-down.* Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan yang sinergis dan harmonis dalam penyusunannya dapat diperoleh dengan proses:

1. Pendekatan teknokratik

   Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh satuan kerja perangkat daerah yang berdasarkan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan partisipatif

   Perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki sehingga tujuan pembangunan daerah terarah dan tepat sasaran.

3. Pendekatan politik

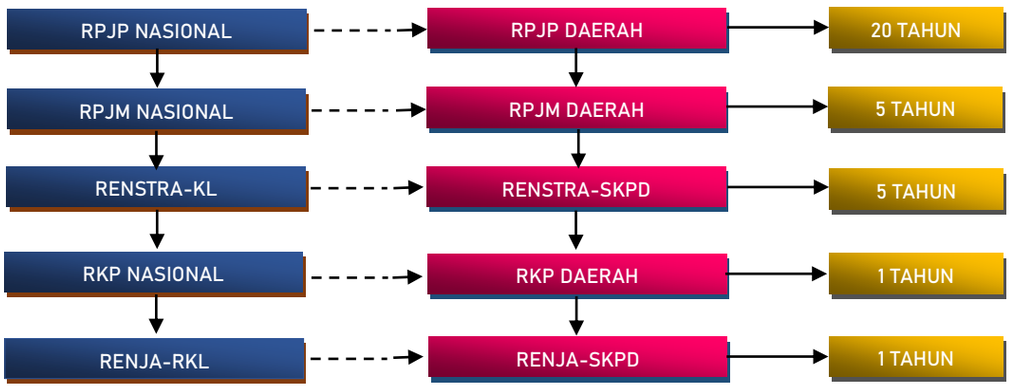
   Perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dan sistematis kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026.

4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)

   Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah

yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Gambar 1. 1
Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan



Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah dalam aspek perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang merupakan kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up planning*. Dalam konteks ini, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hul yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi baik di tingkat Daerah maupun pada tingkat Nasional, khususnya, yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
2. Renja Perangkat akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten sampai dengan Provinsi;
3. Mensinergikan program-program sektoral dan spasial dengan menguraikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja serta pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2026;
5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun-tahun berikutnya.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian penulisan Dokumen RKPD disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2025 dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026 serta kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menyajikan Program dan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026, usulan alokasi khusus dan APBN serta usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2026.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan indikator kinerja utama, indikator kinerja daearah dan indikator kinerja kunci serta indikator kinerja standar pelayanan minimal yng menjadi target pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

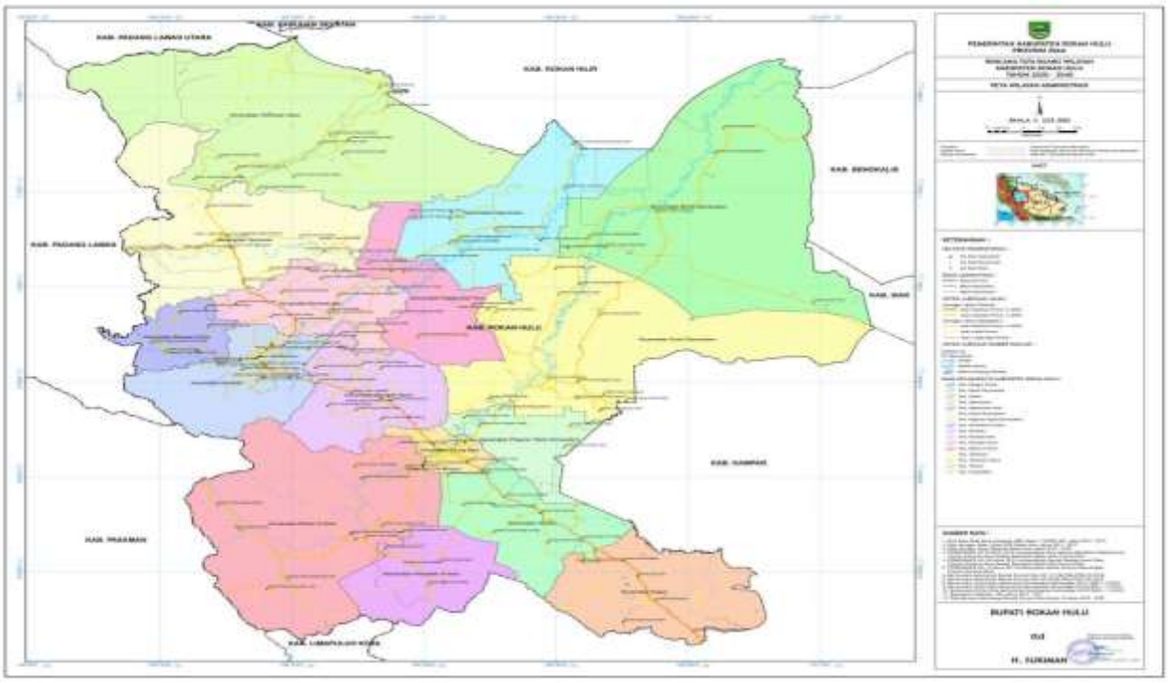
Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau yang memiliki Ibu Kota di Pasirpengaraian. Kabupaten ini terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar dan memiliki posisi strategis di wilayah Riau bagian barat. Secara yuridis formal, Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Sebagai daerah yang tergolong muda, Rokan Hulu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta kekayaan budaya dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Letaknya yang berada di perlintasan antara wilayah barat dan timur Sumatera menjadikan Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu wilayah yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Riau.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki letak geografis strategis di wilayah barat provinsi tersebut. Secara astronomis, Kabupaten Rokan Hulu berada di antara 0°25’20” hingga 1°25’41” Lintang Utara dan 100°02’56” hingga 100°56’59” Bujur Timur.

Dengan luas wilayah mencapai 7.588,13 km², Rokan Hulu dikenal sebagai daerah agraris yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 16 kecamatan, yang mencakup 139 desa definitif dan 6 kelurahan. Pembagian wilayah ini mencerminkan struktur pemerintahan daerah yang terus berkembang dalam rangka mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km² yang terbagi ke dalam 16 kecamatan. Dari keseluruhan wilayah tersebut, Kecamatan Bonai Darussalam merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu mencapai 1.119,49 km² atau sekitar 14,75 persen dari total luas Kabupaten Rokan Hulu. Sementara itu, Kecamatan Ujung Batu merupakan wilayah kecamatan yang paling kecil dengan luas 99,27 km² atau sekitar 1,31 persen dari luas wilayah kabupaten.

Dilihat dari jumlah desa dan kelurahan, Kecamatan Rambah, Rambah Samo, dan Rokan IV Koto merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, masing-masing terdiri dari 14 desa. Sebaliknya, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan wilayah dengan jumlah desa paling sedikit, yaitu hanya sebanyak 3 desa.

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak di bagian barat laut Provinsi Riau dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar,

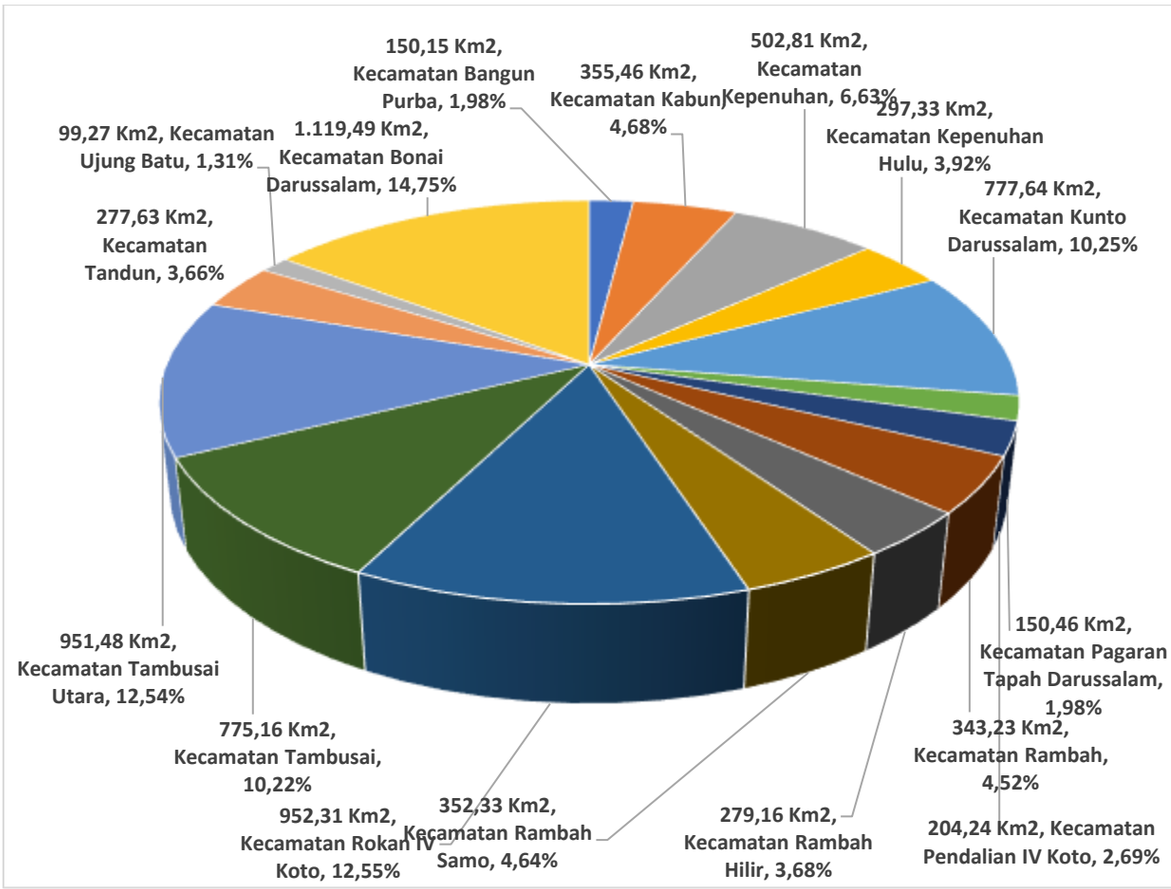
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat,
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km2/Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
1	Kecamatan Bangun Purba	Tangun	150,15	1,98
2	Kecamatan Kabun	Kabun	355,46	4,68
3	Kecamatan Kepenuhan	Kota Tengah	502,81	6,63
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92
5	Kecamatan Kunto Darussalam	Kota Lama	777,64	10,25
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	150,46	1,98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	Pendalian	204,24	2,69
8	Kecamatan Rambah	Pasir Pengaraian	343,23	4,52
9	Kecamatan Rambah Hilir	Muara Rumbai	279,16	3,68
10	Kecamatan Rambah Samo	Rambah Samo	352,33	4,64
11	Kecamatan Rokan IV Koto	Rokan	952,31	12,55
12	Kecamatan Tambusai	Dalu - Dalu	775,16	10,22
13	Kecamatan Tambusai Utara	Rantau Kasai	951,48	12,54
14	Kecamatan Tandun	Tandun	277,63	3,66
15	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu	99,27	1,31
16	Kecamatan Bonai Darussalam	Sontang	1.119,49	14,75
ROKAN HULU		Pasir Pengaraian	7.588,13	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Persentase luas Daerah menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024

Gambar 2. 2
Luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

1) Kondisi Topografi

Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu tergolong beragam, dengan rata-rata ketinggian wilayah sekitar 72 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah dataran tinggi umumnya terletak di bagian barat daya kabupaten, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi ini antara lain Rokan IV Koto, Tandun, Kabun, dan Bangun Purba. Salah satu wilayah dengan ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Pendalian IV Koto, yang berada pada ketinggian rata-rata 111 mdpl, menjadikannya satu-satunya kecamatan di Rokan Hulu dengan ketinggian di atas 100 mdpl. Sementara itu, wilayah dataran rendah terletak di bagian timur kabupaten. Beberapa di antaranya merupakan daerah rawa yang berdekatan langsung dengan aliran Sungai Rokan, seperti Kecamatan Bonai Darussalam yang memiliki ketinggian terendah dengan rata-rata 21 mdpl.

Berdasarkan kondisi topografinya, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 15 dari 16 kecamatan terletak di daerah

dataran rendah dengan ketinggian di bawah 100 mdpl. Wilayah ini mencakup area seluas kurang lebih 7.375,68 km², atau sekitar 97,20 persen dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Rokan IV Koto	97	57
2	Pendalian IV Koto	111	73
3	Tandun	70	55
4	Kabun	63	74
5	Ujung Batu	66	35
6	Rambah Samo	69	12
7	Rambah	67	-
8	Rambah Hilir	55	15
9	Bangun Purba	77	14
10	Tambusai	64	34
11	Tambusai Utara	49	64
12	Kepenuhan	29	45
13	Kepenuhan Hulu	49	32
14	Kunto Darussalam	41	55
15	Pagaran tapah Darussalam	52	40
16	Bonai Darussalam	21	111
	Kabupaten Rokan Hulu	72	

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

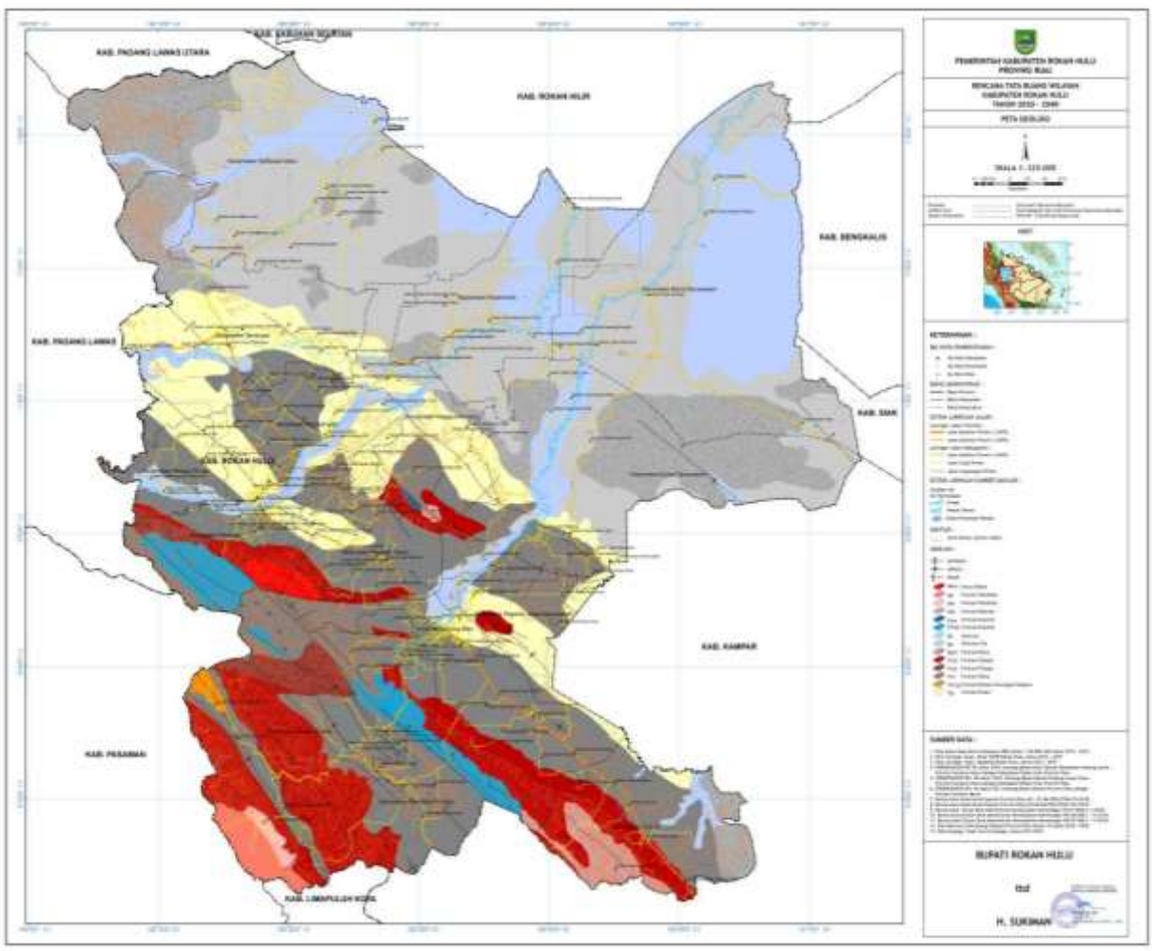
3) Kondisi Geologi

Struktur geologi yang mendominasi wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas lipatan dan patahan berupa antiklin, sinklin, serta sesar dengan orientasi umum barat laut–tenggara, searah dengan struktur geologi regional Pulau Sumatera. Pola ini mencerminkan dinamika tektonik regional yang turut membentuk morfologi dan karakteristik geologi kawasan ini.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam cakupan Peta Geologi Bersistem Indonesia skala 1:250.000, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Wilayah ini secara khusus tercakup dalam Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dan tim, 1982). Selain itu, sebagian wilayah lainnya juga tercakup dalam empat lembar peta geologi lainnya, yaitu:

- Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982),
- Lembar Lubuksikaping (Rock, N.M.S., dkk., 1983),
- Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga (Aspden, J.A., dkk., 1982),
- Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982).

Secara tektonik, Kabupaten Rokan Hulu berada dalam Cekungan Sumatera Tengah, suatu zona geologi penting yang dikenal sebagai wilayah pengendapan dan potensi sumber daya alam, khususnya hidrokarbon. Batuan dasar di wilayah ini umumnya berumur pra-Tersier, menunjukkan sejarah geologi yang panjang dan kompleks. Untuk melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu

4) Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh keberadaan air permukaan dan air tanah yang sangat dipengaruhi oleh curah hujan, sistem sungai, serta karakteristik geologi dan topografi wilayah. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini umumnya bersifat perennial (mengalir sepanjang tahun), karena didukung oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi yang bergelombang, jenis tanah yang permiabel, serta keberadaan akuifer yang cukup tebal. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tingginya aliran dasar (base

flow), yaitu aliran sungai yang berasal dari air tanah, sehingga tetap mengalir meskipun pada musim kemarau.

Pentingnya fungsi aliran dasar ini menuntut perhatian dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), terutama di kawasan hulu. Aktivitas pemanfaatan lahan di sekitar aliran sungai seperti tambak, pertanian intensif, atau aktivitas lainnya harus dikendalikan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem sungai dan mencegah kerusakan lingkungan, baik di daerah hulu maupun hilir. Oleh karena itu, perlindungan kawasan hulu menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan fungsi hidrologi secara menyeluruh.

Secara geomorfologis, pola aliran sungai di Kabupaten Rokan Hulu umumnya berbentuk dendritik, menyerupai bentuk cabang-cabang pohon atau bulu burung. Pola ini terbentuk dari pengaruh topografi perbukitan yang menyebabkan anak-anak sungai mengalir mengikuti lembah-lembah menuju sungai utama. Sungai -sungai utama yang mengalir di wilayah ini antaralain : Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato.

Selain air permukaan, air tanah juga merupakan sumber daya penting di Kabupaten Rokan Hulu. Air tanah ini umumnya berasal dari proses peresapan air hujan, peresapan dari badan sungai, serta peresapan dari sistem irigasi. Daerah tangkapan air (recharge area) tersebar di berbagai wilayah, terutama pada kawasan hutan yang masih terjaga dan memiliki daya serap tinggi terhadap air. Keberadaan kawasan hutan ini sangat berperan dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi dan perlu dilindungi dari aktivitas yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas air tanah.

5) Klimatologi

Kabupaten Rokan Hulu memiliki iklim tropis yang umumnya dipengaruhi oleh pola angin monsun dan posisi geografisnya di wilayah ekuator. Seperti wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu mengalami dua musim utama dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya terjadi apabila curah hujan bulanan berada di bawah 60 mm, sedangkan musim penghujan terjadi ketika curah hujan melebihi angka tersebut.

Karakteristik iklim di Kabupaten Rokan Hulu tercermin melalui beberapa unsur klimatologi utama, yaitu suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan curah hujan.

1. Suhu udara

Suhu udara di Kabupaten Rokan Hulu cenderung stabil sepanjang tahun

dengan rata-rata berkisar antara 22°C hingga 33°C. Suhu terendah biasanya terjadi pada dini hari, sedangkan suhu tertinggi terjadi pada siang hari, terutama saat musim kemarau.

2. Kelembapan udara

   Kelembapan relatif di wilayah ini tergolong tinggi, umumnya berada pada kisaran 75 persen hingga 90persen. Tingginya kelembapan ini dipengaruhi oleh curah hujan yang relatif tinggi dan vegetasi yang masih cukup luas, terutama di daerah perbukitan dan hutan.

3. Curah Hujan

   Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah dengan curah hujan tahunan yang tinggi. Rata-rata curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm, dengan distribusi yang bervariasi setiap bulannya. Puncak musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan Mei hingga September.

4. Kecepatan Angin

   Kecepatan angin di wilayah ini umumnya rendah hingga sedang, berkisar antara 1 hingga 20 km/jam. Angin dominan bertiup dari arah barat laut ke tenggara mengikuti pola angin musiman. Kecepatan angin dapat meningkat pada saat peralihan musim (pancaroba), meskipun secara umum tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat.

Kondisi klimatologi ini sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya pertanian, perkebunan, dan ketersediaan air. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola iklim menjadi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, mitigasi bencana hidrometeorologi, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

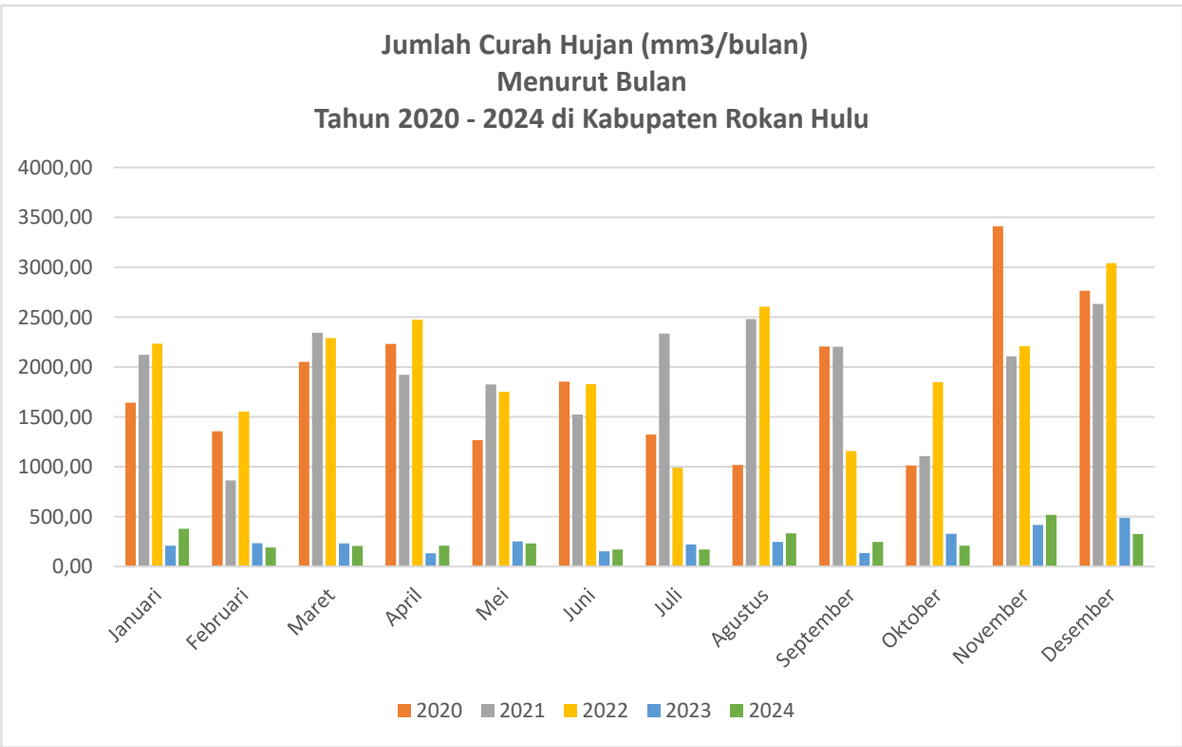
Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2020 – 2024
di Kabupaten Rokan Hulu

Bulan	Curah Hujan (mm/tahun)					Hari Hujan (hari)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	1643	2122,70	2234,50	207,72	378,28	126	130	124	16	21
Februari	1355	864,00	1553,20	234,09	190,10	116	66	117	15	14
Maret	2050	2343,00	2290,30	232,33	206,78	117	112	128	16	14
April	2231	1920,50	2475,00	132,33	209,28	120	112	254	13	14
Mei	1266	1824,50	1751,50	252,72	231,33	95	127	102	14	11
Juni	1853	1523,50	1827,00	152,72	170,78	86	79	108	11	10
Juli	1323	2334,50	989,50	221,56	170,94	103	72	75	12	8
Agustus	1018	2479,00	2603,50	246,44	333,67	76	127	133	16	16
September	2206	2203,00	1158,00	135,44	246,06	138	128	110	9	14

Bulan	Curah Hujan (mm/tahun)					Hari Hujan (hari)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Oktober	1012	1108,00	1847,50	329,00	208,61	82	85	145	16	11
November	3411	2107,00	2208,50	415,50	517,50	179	119	131	19	20
Desember	2763	2631,50	3041,50	486,94	326,00	134	158	166	23	15
Rata-Rata										

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2024, rata rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Maret (26,10o C), sedangkan terendah pada Bulan Januari dan Mei (25,10°C). Kelembapan udara tertinggi di Bulan November (90,90%) dan terendah di Bulan Juli (86,30%). Kecepatan angin tertinggi di Bulan September dan November (7,80 knot) dan terendah di Bulan Jan-uari (5,50 knot). Untuk curah hujan, tertinggi di Bulan November (517,50 mm) terendah di Bulan Juni (170,78 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di Bulan Januari (21 hari) dan terendah di bulan Juli (8 hari). Jumlah curah dan hari hujan merupakan rata-rata dari unit pengamatan pada Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai, Tandun, Rokan IV Koto, Ujung Batu, Kunto Darussalam.



Gambar 2.4
Jumlah Curah Hujan menurut bulan Tahun 2020-2024
di Kabupaten Rokan Hulu

6) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari berbagai jenis lahan seperti hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua kategori tersebut, yang paling mendominasi adalah penggunaan lahan untuk perkebunan, khususnya perkebunan sawit, dengan luas lahan mencapai 670.098,57 Ha, yang mencakup hampir 81,43% dari total luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha)

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Danau/Situ	279,60	0,03
2	Empang/Kolam	1.409,64	0,17
3	Hutan Rimba	25.965,39	3,16
4	Kebun Campuran	34.068,33	4,14
5	Perkebunan/Kebun	670.098,57	81,43
6	Permukiman	18.198,28	2.21
7	Pertambangan	119,18	0,01
8	Rawa	983,42	0,12
9	Sawah	1.854,60	0,23
10	Semak Belukar	48.100,09	5,85
11	Semak Belukar Rawa	8.137,83	0,99
12	Sungai	4.438,24	0,54
13	Tanah Terbuka	4.619,38	0,56
14	Tegalan/Ladang	4.570,73	0,56
15	Waduk	39,31	0,00
	Total	822.882,59	100

Sumber : Hasil Analisis Citra Spot 2017, RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan diwilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan guna memenuhi kebutuhan industri, sekaligus berfungsi melindungi kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Kawasan budidaya hutan produksi dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) — kawasan hutan yang secara spasial diperuntukkan bagi kegiatan budidaya hutan alam.

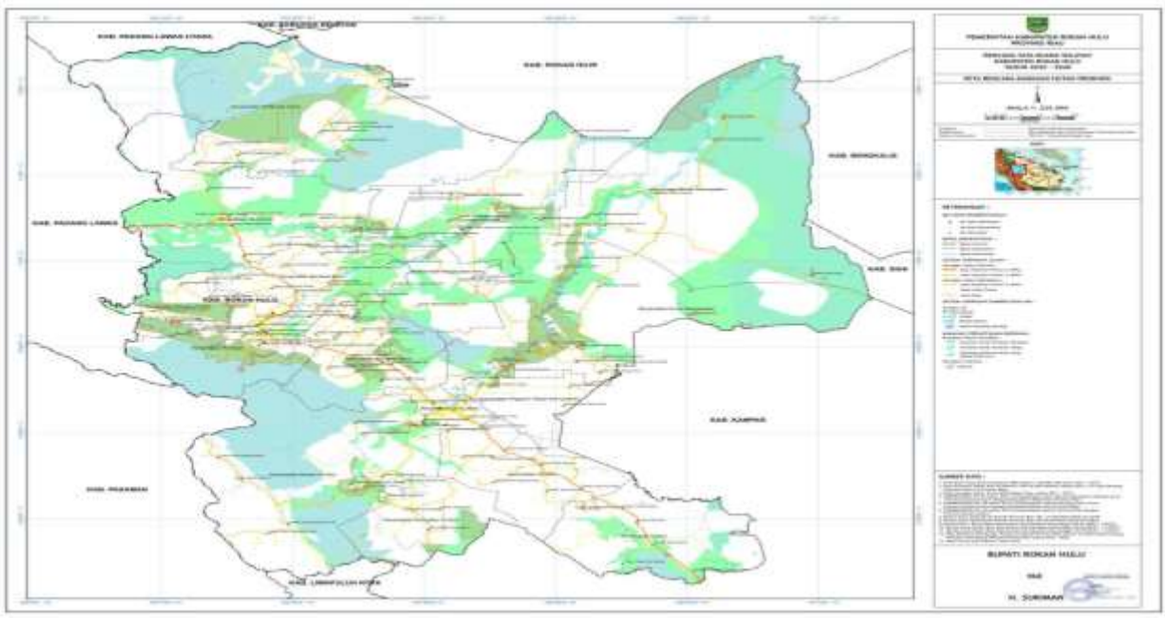
2. Hutan Produksi Tetap (HP) — kawasan hutan yang digunakan untuk budidaya hutan alam maupun hutan tanaman.
3. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) — kawasan hutan yang secara spasial dicadangkan untuk kegiatan di luar kehutanan, seperti pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain sebagainya

Adapun rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi di Kabupaten Rokan Hulu adalah 349.595,4 ha yang tersebar di 16 kecamatan.

Tabel 2.5
Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA				
		Kawasan Hutan Produksi				
		Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	121	764	5.287	6.172	1,77
2	Kecamatan Kabun	2.432	1.468	7.578	11.478	3,28
3	Kecamatan Kepenuhan	891	712	12.619	14.222	4,07
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	636		9.333	9.969	2,85
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.009	10.562	29.801	43.372	12,41
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	69		860	930	0,27
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	2.869		3.837	6.706	1,92
8	Kecamatan Rambah	14.620		7.092	21.712	6,21
9	Kecamatan Rambah Hilir	72	483	7.421	7.976	2,28
10	Kecamatan Rambah Samo	8.831		8.066	16.897	4,83
11	Kecamatan Rokan IV Koto	35.198		8.351	43.549	12,46
12	Kecamatan Tambusai	1.694	7.589	22.708	31.991	9,15
13	Kecamatan Tambusai Utara	41.616	3.055	15.873	60.544	17,32
14	Kecamatan Tandun			331	331	0,09
15	Kecamatan Ujung Batu			339	339	0,10
16	Kecamatan Bonai Darussalam	6.468	55.556	11.385	73.409	21,00
	ROKAN HULU	118.525,6	80.189,1	150.880,7	349.595,4	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.5
Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu

Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat:

1. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
2. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
3. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
4. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat disekitar hutan;
5. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan meningkatkan ekspor;
6. Mendorong perkembangan usaha danperan masyarakat sekitar hutan.

b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat, atau yang juga dikenal dengan sebutan hutan milik, adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik atau hak ulayat (adat), baik secara perseorangan, kelompok atau badan hukum. Kawasan ini mencakup keseluruhan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya, yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan ekosistem. Rencana sebaran

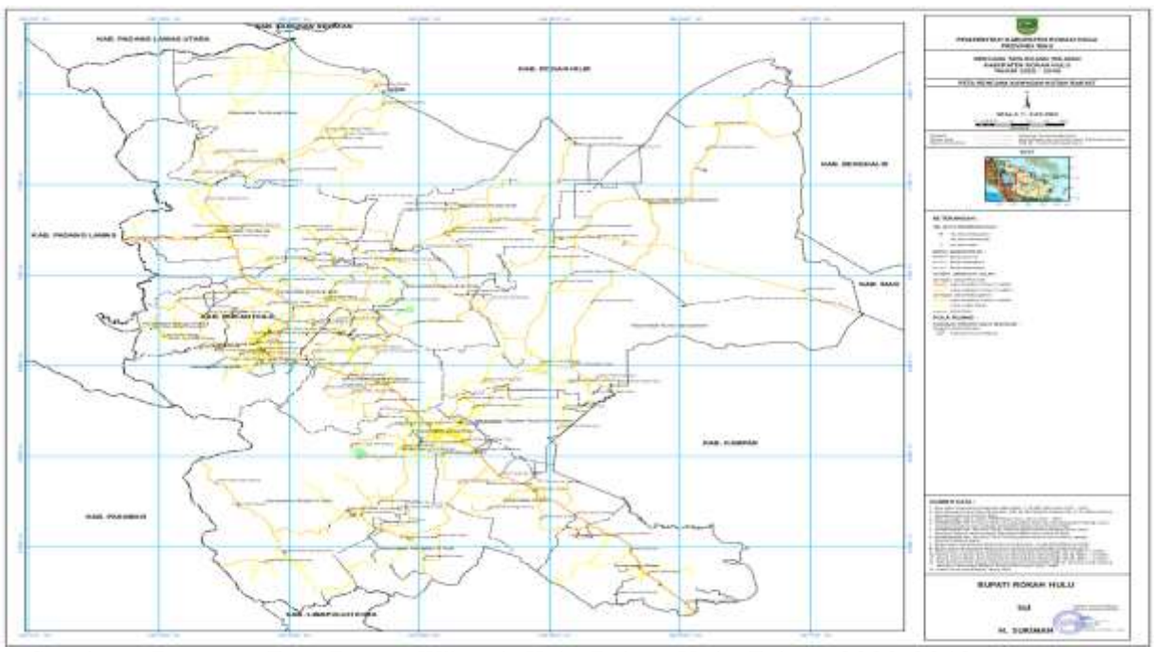
kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki potensi untuk pengembangan. Pemanfaatan lahan dalam kawasan ini dapat diarahkan pada kegiatan hutan rakyat, yang memungkinkan untuk berlokasi di peruntukan lahan seperti kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan, maupun kawasan pertanian holtikultura. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.

Di Kabupaten Rokan Hulu, luas kawasan hutan rakyat mencapai 658 hektare, yang tersebar di tiga kecamatan: Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, dan Kecamatan Rokan IV Koto. Potensi pengembangan kawasan ini sangat besar untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Tabel 2.6
Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Hutan Rakyat (Ha)	Persentase(%)
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	319	48,4
2	Kecamatan Rambah Hilir	80	12,1
3	Kecamatan Rokan IV Koto	260	39,5
TOTAL KABUPATEN		658	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.6
Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

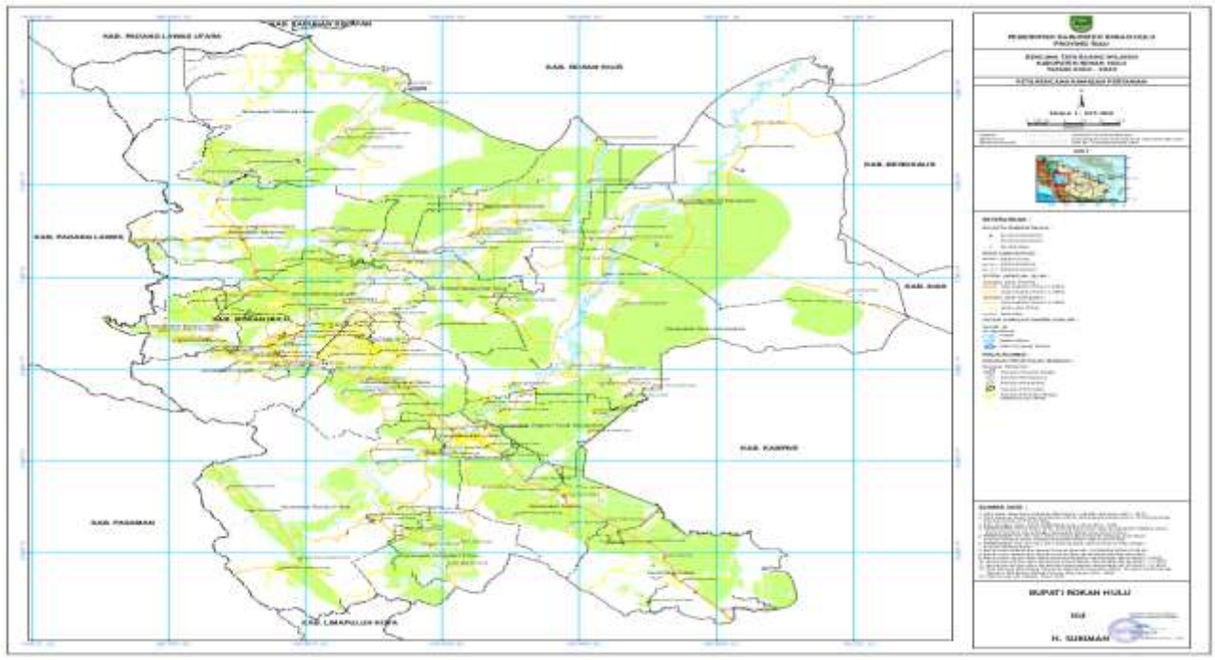
c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel 2.7
Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA					
		Kawasan Pertanian					
		Kawasan Hortikultura (Ha)	Kawasan Perkebunan (Ha)	Kawasan Peternakan (Ha)	Kawasan Tanaman Pangan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	337	5.472	130	907	6.845	2,1
2	Kecamatan Kabun	139	17.762		671	18.572	5,8
3	Kecamatan Kepenuhan	384	23.108	48	3.900	27.440	8,5
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	524	15.514		1.844	17.881	5,6
5	Kecamatan Kunto Darussalam	321	43.482		803	44.607	13,9
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	64	15.471		61	15.595	4,9
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	3.948	10.370		639	14.957	4,7
8	Kecamatan Rambah	579	2.692	12	2.868	6.151	1,9
9	Kecamatan Rambah Hilir	491	13.586		1.513	15.590	4,9
10	Kecamatan Rambah Samo	258	9.181		5.148	14.587	4,5
11	Kecamatan Rokan IV Koto	3.426	17.922		1.782	23.130	7,2
12	Kecamatan Tambusai	232	18.576		216	19.025	5,9
13	Kecamatan Tambusai Utara	725	33.338	299	263	34.626	10,8
14	Kecamatan Tandun	381	21.132		271	21.784	6,8
15	Kecamatan Ujung Batu	147	1.922		189	2.259	0,7
16	Kecematan Bonai Darussalam	331	36.630		1.395	38.355	11,9
ROKAN HULU		12.288	286.157	489	22.470	321.404	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.7
Peta Rencana Kawasan Pertanian
Kab. Rokan Hulu Kawasan Tanaman Pangan

Pada dasarnya kawasan peruntukan pertanian pangan mencakup kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (holtikultura) dan peternakan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan;
3. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
4. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumberdaya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
5. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan daerah;
7. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
8. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
9. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Sebaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana lebih kurang 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) hektar. Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi Kecamatan Rambah Samo lebih kurang5.148 (lima ribu seratus empat puluh delapan) hektar, Kecamatan Kepenuhan lebih kurang 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) hektar, diikuti oleh Kecamatan Rambah lebih kurang 2.868 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan) hektar, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu lebih kurang 1.844 (seribu delapan ratus empat puluh empat) hektar

- Kawasan Holtikultura

Untuk pengembangan kawasan holtikultura, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luasan mencapai 12.288 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar. Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Rokan IV Koto merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan holtikultura terbesar, yaitu kurang lebih masing-masing 3.948 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan)hektar dan 3.426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam) hektar.

- Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri dan kawasan permukiman.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan diarahkanpada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan lebih kurang mencapai 286.157(dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) hektar. Luasan terbesar untuk rencana pengembangan kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas lebih kurang 43.482 (empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar, dan Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas lebih kurang 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh)hektar.

Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada. Kawasan peternakan diarahkan di Kecamatan Tambusai utara, Bangun Purba, Kepenuhan dan Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang489 (empat ratus delapan puluh sembilan) hektar.

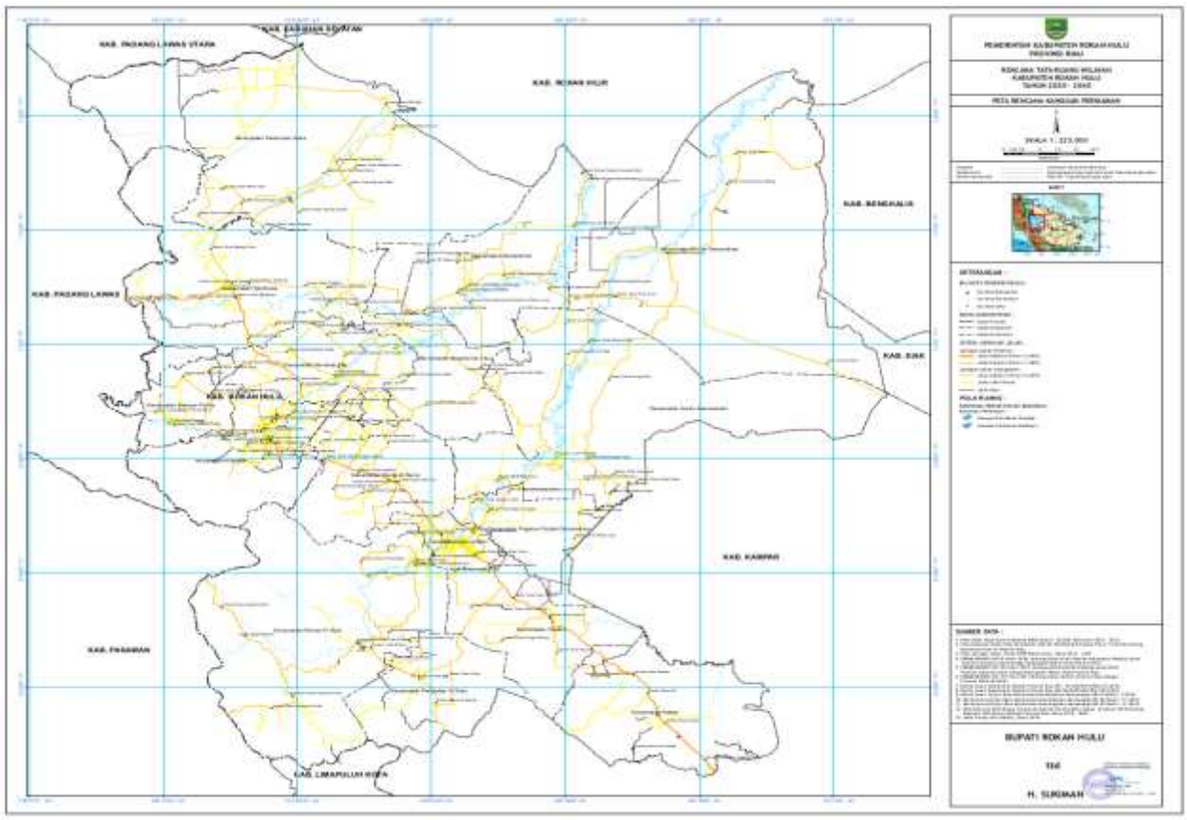
d. Kawasan Perikanan

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, danau,telaga, kolam dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antaralain ikan patin, lele, mas, nila kalui, bawal, baung, gabus, sepat, selais dan sebagainya. Kawasan perikanan tangkap berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan kawasan perikanan budidaya berada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Rencana luas kawasan perikanan darat adalah 33 ha yang tersebar di Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang 24 ha, Kecamatan Rokan IV Koto dengan luas lebih kurang 6 ha dan Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan luas lebih kurang 3 ha.

Tabel 2.8
Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Perikanan	
		Kawasan Perikanan Budidaya (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	3	9,9
2	Kecamatan Rambah	24	71,8
3	Kecamatan Rokan IV Koto	6	18,3
ROKAN HULU		33	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.8
Peta Rencana Kawasan Perikanan Kab. Rokan Hulu

e. Kawasan Industri

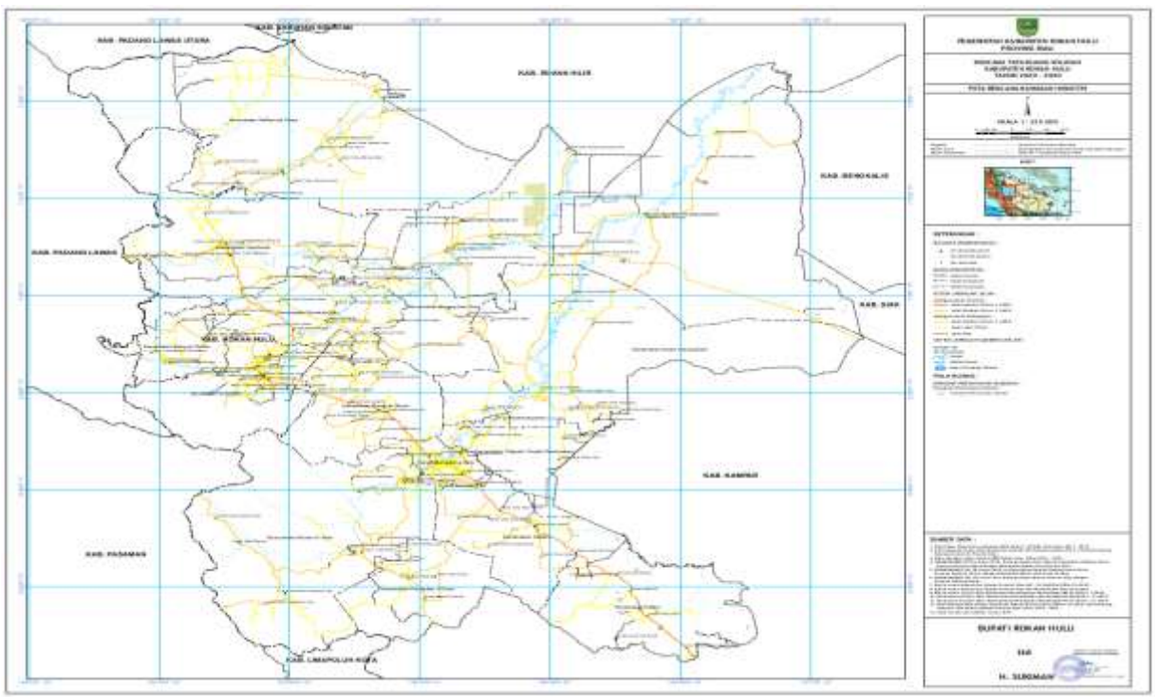
Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumberdaya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan dengan luasan wilayah lebih kurang 3.578 ha. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri besar, menengah dan kecil/mikro. Kawasan industri besar sebagaimana diarahkan berada di Kecamatan Kepenuhan dengan luas lebih kurang 2.072 ha dankecamatan Ujung Batu dengan luas lebih kurang 599 ha. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar di seluruh Kecamatan.

Tabel 2.9
Rencana Luas Kawasan Peruntukan Industri Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Peruntukan Industri (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Kabun	93	2,6
2	Kecamatan Kepenuhan	2.072	57,9
3	Kecamatan Kepenuhan Hulu	57	1,6
4	Kecamatan Kunto Darussalam	161	4,5
5	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	71	2,0
6	Kecamatan Rambah Hilir	35	1,0
7	Kecamatan Tambusai	102	2,9
8	Kecamatan Tambusai Utara	149	4,2
9	Kecamatan Tandun	149	4,2
10	Kecamatan Ujung Batu	599	16,8
11	Kecamatan Bonai Darussalam	90	2,5
ROKAN HULU		3.578	100

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.9
Peta Rencana Kawasan Industri Kabupaten Rokan Hulu

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 411.633 ha terletak menyebar diseluruh kecamatan. Kawasan pertambangan meliputi:

- Kawasan pertambangan mineral Kawasan pertambangan mineral baik logam maupun non logam diarahkan di diarahkan di seluruh kecamatan.

- Kawasan pertambangan batubara Kawasan pertambangan batubara diarahkan di:
  1. Kecamatan Rokan IV Koto;
  2. Kecamatan Rambah Samo;
  3. Kecamatan Ujung Batu;
  4. Kecamatan Bangun Purba;
  5. Kecamatan Kunto Darussalam;
  6. Kecamatan Rambah Hilir;
  7. Kecamatan Tambusai Utara;
  8. Kecamatan Kabun;
  9. Kecamatan Rambah.
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
  Kawasan peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kabupaten Rokan Hulu sangat beruntung memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona alam yang membentang di daerah bukit barisan serta tempat-tempat bersejarah di wilayah kabupaten Rokan Hulu. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Rokan Hulu.

Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kawasan pariwisata alam
   Kabupaten Rokan Hulu yang beriklim tropis mempunyai objek wisata alam yang indah dan menarik bagi wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jenis kegiatan wisatayang tepat adalah wisata alam (ecotourism) sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah Rokan Hulu tanpa merusak lingkungan. Wisata alam yang indah dan memiliki potensi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu antara lain Air Panas Hapanasan, Danau Cipogas, Air Terjun Aek Mertua, Air Terjun Tolang, Gua

Tujuh Serangkai, dan lain-lain. Secara rinci objek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Air Panas Hapanasan berada di Desa Kaiti-Pawan Kecamatan Rambah;
- Goa Mata Dewa berada di Desa Pawan;
- Air Panas Suaman berada di Desa Pawan;
- Danau Cipogas berada di Desa Sialang Jaya;
- Air Terjun Aek Martua berada di Tangun;
- Air Terjun dan Pemandian alami Rura Limbat berada di Sei Limbat Desa Langgarpayung Kecamatan Bangun Purba;
- Danau Kembang berada di Pagaran Tapah Darussalam;
- Danau Kobu berada di Muara Musu;
- Pantai Rengas berada di Lubuk Bendahara Timur;
- Danau Puar berada di Desa Bunga Tanjung;
- Air Terjun Berseri berada di Cipang Hulu;
- Air Terjun Sungai Tolang berada di Rokan IV Koto;
- Rumah Batu Serombow berada di Tanjung Botong, Sempurna Alam;
- Danau Ombak berada di Kota Lama;
- Gua Tujuh Serangkai berada di Tandun;
- Bukit Suligi Hill di Aliantan;
- Arung Jeram berada di Sungai Rokan Kiri bagian hulu;
- Huta Sikapir dan beberapa guanya di berada di Desa Pawan;
- Air Terjun Rura Pamontasan berada di Sei Bungo;
- Air Terjun Bukik Paninjauan berada di Hulu Pawan;
- Air Panas Rokan berada di Rokan IV Koto;
- Air Terjun Hujan Lobek berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Air Terjun Landasan berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Geopark Sungai Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
- Gua Sei Nigi berada di Desa Kabun;
- Gua Sei Puo berada di Desa Kabun.

2. Kawasan pariwisata buatan

Kawasan wisata buatan di Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

- Taman Simare berada di Komplek Perkantoran Perkebunan Hutahean Tambusai;
- Arena Terbang Layang berada di Rokan IV Koto;
- Pemandian Bongkaran berada di Kecamatan Rambah;
- Pasar Agro Wisata berada di Danau Sati;

- Pasar Wisata/Pujasera berada di Pasir Pengaraian;
- Komplek Islamic Center dan Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu;
- Pawan Resort berada di Pawan;
- Kampung Seni Tradisional Suku Sakai Bonai Ulak Patian berada di Ulak Patian;
- Desa Wisata Sungai Bungo berada di Sungai Bungo, Sialang Jaya;
- Taman Bungo berada di Sungai Bungo.

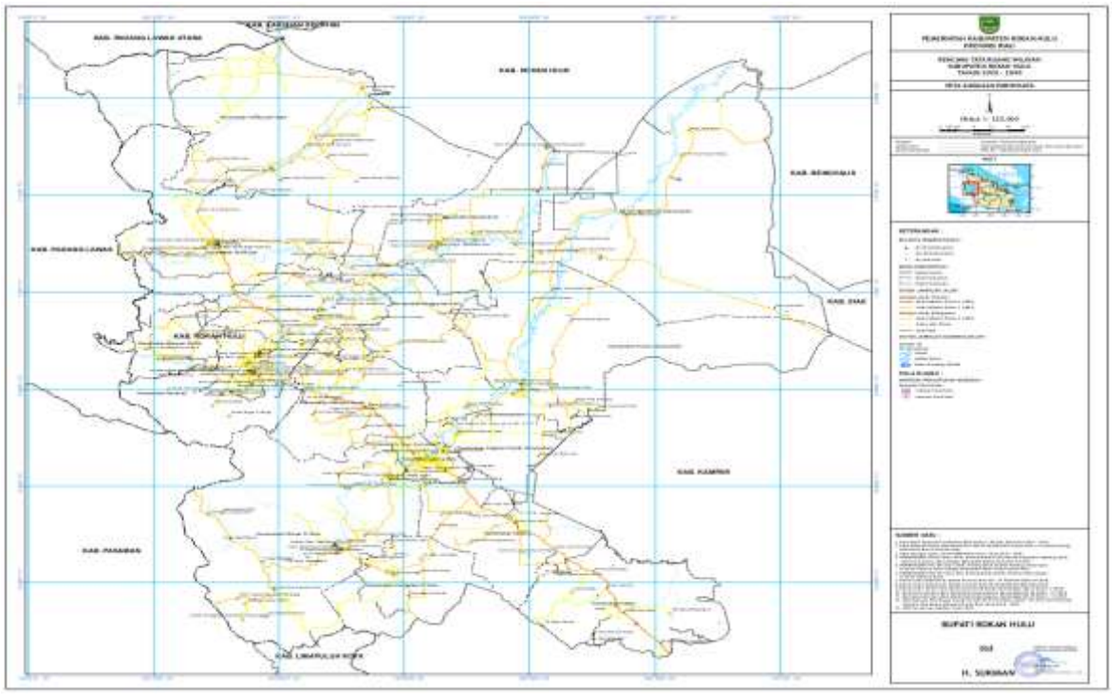
3. Kawasan pariwisata budaya

Pengembangan kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Rokan Hulu menurut lokasi kecamatan, diantaranya meliputi:

- Luhak Rokan IV Koto dengan pusat wisata budaya Istana Raja Rokan sebagai Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rokan IV Koto serta makam raja-raja Kerajaan Rokan IV Koto berada di Desa Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto;
- Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, benteng serta surau Syekh Abdul Wahab Rokan beserta makam guru-guru dan Raja Rantau Binuang berada di Bunga Tanjung;
- Surau Suluk Naqsambandiyah berada di Surau Gading;
- Benteng Tujuh Lapis berada di Kecamatan Tambusai;
- Luhak Tambusai dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Tambusai berada di Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai;
- Luhak Rambah dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah berada di Nogor Kecamatan Rambah;
- Jembatan Batang Lubuh I dan II sebagai tempat Potang Balimau atau festival Sungai Rokan berada di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah;
- Rumah peninggalan Sultan Zainal Abidin berada di Kecamatan Tambusai Utara;
- Nogori Tingga berada di kecamatan Kota Tengah;
- Komplek Kerajaan dan Makam Raja-Raja Rambah berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
- Komplek Surau Suluh Ismailiyah berada di Desa Surau Gadiang dan Surau Teluk Aur berada di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah;

- Luhak Kepenuhan dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan berada di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan;
- Luhak Kuntodarussalam dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kuntodarussalam berada di Kecamatan Tambusai;
- Kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo terdiri dari Makam Tengku Joman beserta kubunya, 5 (lima) rumah tua berarsitektur tradisional berada di kecamatan Rokan IV Koto;
- Rumah Harangan dan Makam Suri Andung Jati, termasuk di dalamnya Makam Sutan Laut Api berada di Kaiti III kecamatan Rambah;
- Istana Kerajaan Kunto Darussalam berada di kecamatan Kunto Darussalam;
- Komplek Istana dan Masjid Tuo Kunto bersama Makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat berada di Kecamatan Kunto Darussalam;
- Prosesi Pemandian Mayat berada di kecamatan Pendalian IV Koto;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu;
- Rumah berarsitektur tradisional berada di Jalan Melati Kecamatan Ujung Batu;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Tandun berada di Kecamatan Tandun;
- Rumah Sopo Godang sebagai pusat kegiatan budaya Napitu Huta di Luhak Rambah berada di Kecamatan Bangun Purba;
- Tugu Janji Raja berada di Janjiraja Kecamatan Bangun Purba;
- Situs Kerajaan Bukit Langgak berada di Kecamatan Ujung Batu; dan

- Istana Kersik Putih berada di Kersik Putih Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.10
Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu

h. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 2.10
Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha)

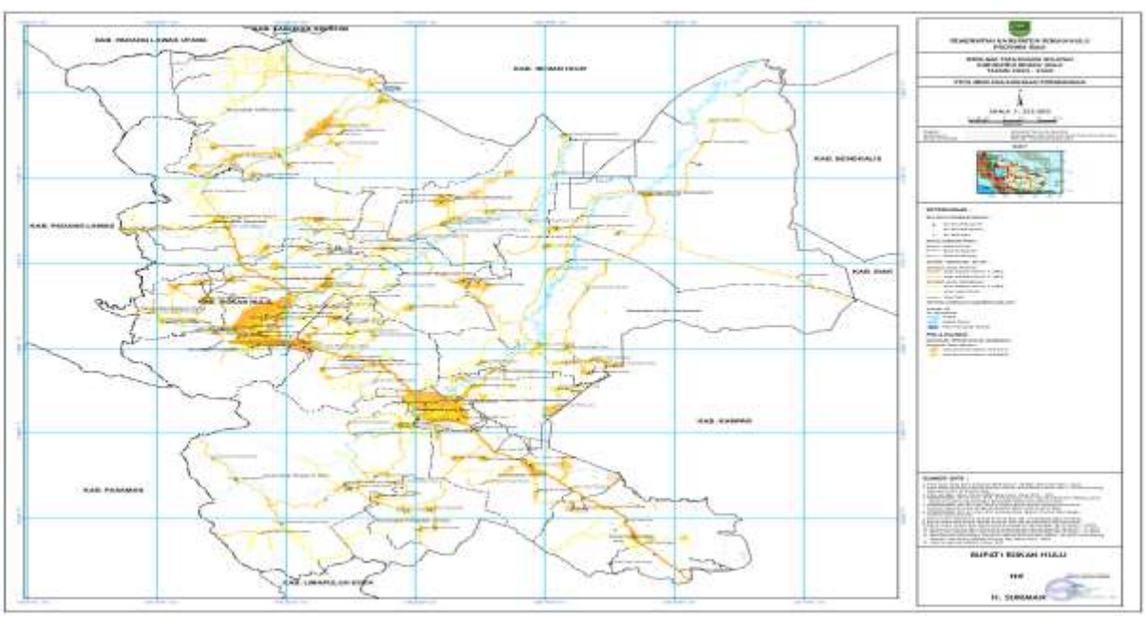
NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	1.280	149	1.429	3,4
2	Kecamatan Kabun	1.498	295	1.793	4,2
3	Kecamatan Kepenuhan	1.566	314	1.880	4,4
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	828	161	989	2,3
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.285	183	3.468	8,2

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.488	314	1.802	4,3
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	766	113	879	2,1
8	Kecamatan Rambah	282	6.200	6.483	15,3
9	Kecamatan Rambah Hilir	2.107	1.044	3.151	7,4
10	Kecamatan Rambah Samo	2.069	465	2.534	6,0
11	Kecamatan Rokan IV Koto	1.115	176	1.291	3,1
12	Kecamatan Tambusai	2.101	215	2.316	5,5
13	Kecamatan Tambusai Utara	4.881	938	5.819	13,8
14	Kecamatan Tandun	2.444	553	2.996	7,1
15	Kecamatan Ujung Batu	97	4.387	4.484	10,6
16	Kecematan Bonai Darussalam	829	172	1.001	2,4
ROKAN HULU		26.636	15.679	42.316	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar sebagaimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 42.316 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam belas) hektar.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.11
Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu

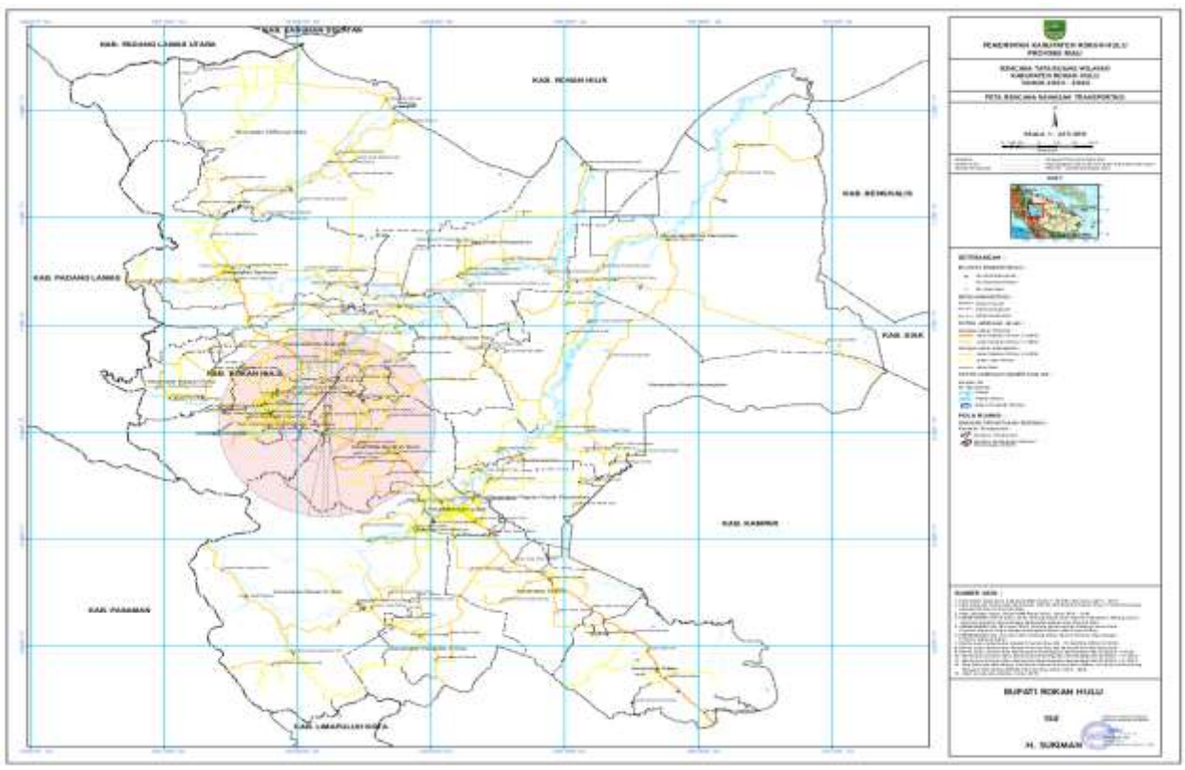
i. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan transportasi yang luasan secara keseluruhan lebih kurang 161 hektar.

Tabel 2.11
Rencana Luas Kawasan Peruntukan Lainnya Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha)

No.	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Peruntukan Lainnya	
		Kawasan Transportasi (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Kecamatan Rambah Samo	161	100
ROKAN HULU		161	100

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

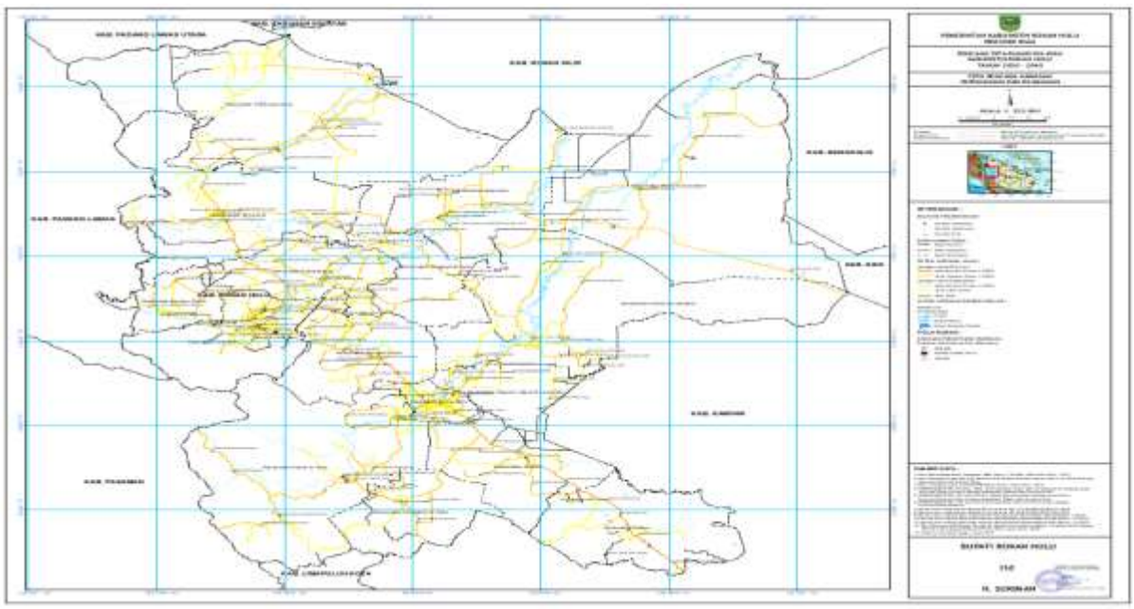


Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.12
Peta Rencana Kawasan Transportasi Kab. Rokan Hulu

j. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Koramil 0313-02 berada di Kecamatan Rambah, Koramil 0313-08 berada di Kecamatan Tandun, Koramil 0313-10 berada di Kecamatan Kunto Darussalam, Koramil 0313-11 berada di Kecamatan Tambusai, Koramil 0313-13 berada di Kecamatan Rokan IV Koto, Koramil 0313-14 berada di Kecamatan Kepenuhan, Kepolisian Resor berada di Kecamatan Rambah dan Kepolisian Sektor tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

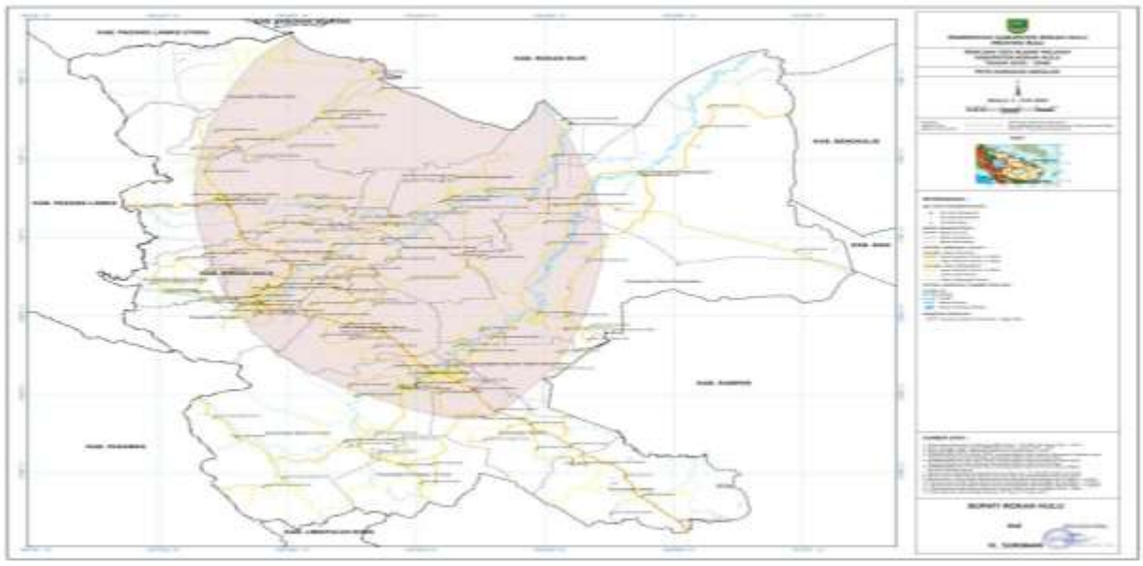
Gambar 2.13
Peta Rencana Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Rokan Hulu

k. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Kecamatan Rambah, dimana kawasan ini difungsikan sebagai pusat perkatoran pemerintah daerah.

l. Kawasan Andalan

Kawasan andalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu meliputi wilayah yang berada di sepanjang koridor Ujungbatu sampai dengan perbatasan di Kecamatan Tambusai Utara. Kawasan andalan ini meliputi perkebunan, pertanian, pertambangan, industri serta perdagangan dan jasa.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.14
Peta Rencana Kawasan Andalan Kabupaten Rokan Hulu

- Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasanlindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi kawasan hutan lindung dan resapan air serta kawasan lindung gambut.

- Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, definisi dari Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan permukaan. Pada aspek pengendalian kawasan lindung, terdapat ketentuan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Dalam menentukan alokasi ruang untuk peruntukan rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu, mempertimbangkan acuan penetapan luas dan sebaran kawasan hutan lindung dalam RTRWN dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MenLHK/Setjen/ pla:/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Penilaian ulang terhadap hutan lindung didasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Kawasan hutan yang memiliki faktor kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah hasil perkalian bobotnya ≥ 175;
2. Kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng ≥ 40%; dan/atau
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian ≥ 2.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu lebih

kurang seluas 86.666 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) hektar.

- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan lindung gambut merupakan kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Kawasan lindung gambut di Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang seluas 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan.

- Kawasan resapan air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan, kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Beberapa tempat di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kemampuan untuk menyerap air tanah dengan baik, dimana lokasi tersebut sebagai hulu dari sungai-sungai. Saat ini, kawasan tersebut sedang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan pertanian (lahan budidaya). Sebagian besar di lahan ini terjadi kegiatan intensif masyarakat sehingga terjadi pengolahan-pengolahan tanah yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Bahkan beberapa jenis tanaman yang ditanam tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air tanah. Akibatnya adalah berkurangnya debit air yang dialirkan melalui sungai-sungai.

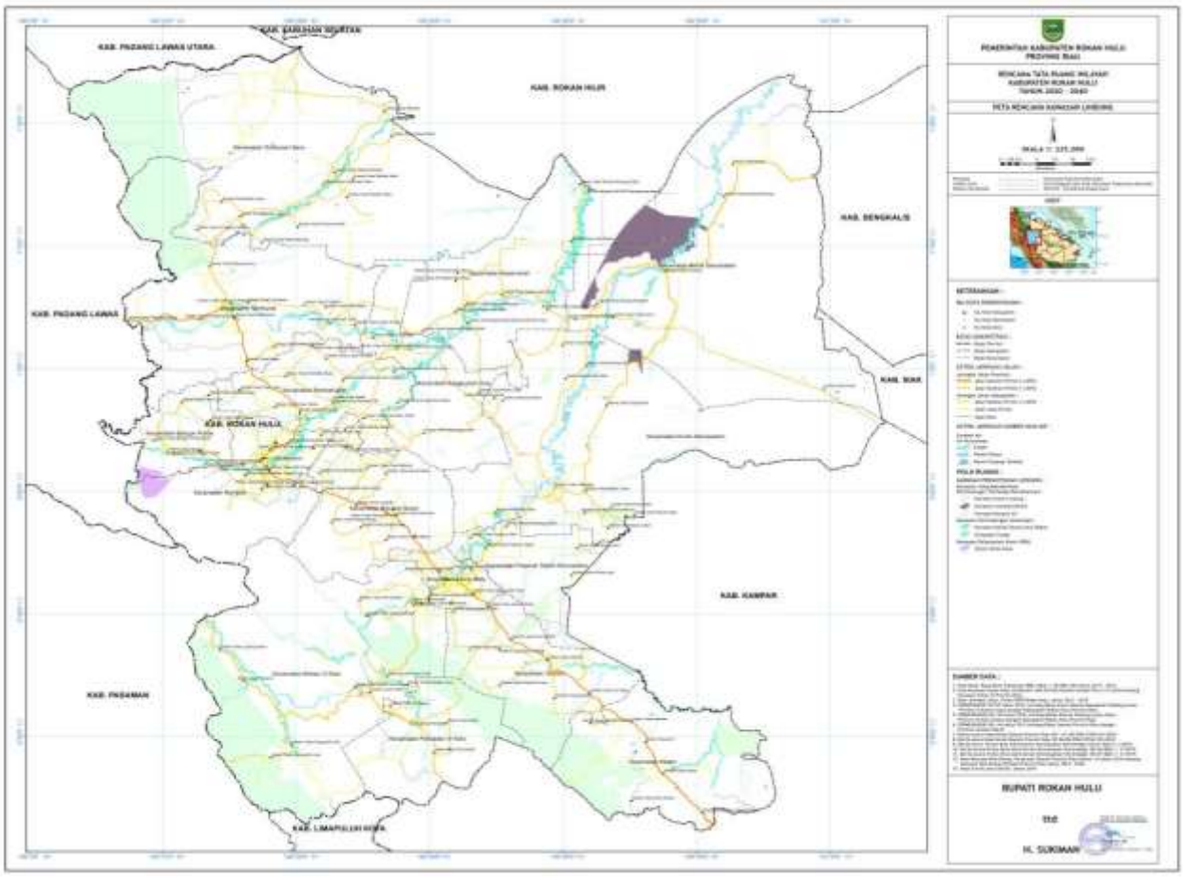
Dari pengamatan lapangan kawasan resapan air tanah umumnya berada pada daerah hutan lindung, hal ini sangat baik karena alih fungsi lahan di wilayah tersebut akan sangat sulit sehingga kelestariannya akan mudah terjaga. Litologi atau batuan penyusun kawasan ini dominannya berupa batuan gunung api tua dan muda, sedimen dan metamorfik,

retakan, tanah pelapukan dari kelompok batuan tersebut akan mampu menjadi resapan air tanah dan mata air yang berada di bawahnya. Berdasarkan kondisi ini maka kawasan resapan air tanah meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lebih kurang 6.081 (Enam ribu delapan puluh satu) hektar.

Tabel 2. 12
Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG				
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya				
		Kawasan Hutan Lindung (Ha)	Kawasan Lindung Gambut (Ha)	Kawasan Resapan Air (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	100			100	0.12
2	Kecamatan Kabun	8,132		2,581	10714	12.36
3	Kecamatan Kepenuhan		26	486	512	0.59
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu			13	13	0.02
5	Kecamatan Kunto Darussalam	612	329	400	1342	1.55
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	61		789	850	0.98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	5,514		0	5514	6.36
8	Kecamatan Rambah	355			355	0.41
9	Kecamatan Rambah Hilir			68	68	0.08
10	Kecamatan Rambah Samo			0	0	0.00
11	Kecamatan Rokan IV Koto	23,422		146	23568	27.19
12	Kecamatan Tambusai	12,258		0	12258	14.14
13	Kecamatan Tambusai Utara	15,306		21	15328	17.69
14	Kecamatan Tandun	7,179		1,516	8695	10.03
15	Kecamatan Ujung Batu			16	16	0.02
16	Kecamatan Bonai Darussalam		7,289	45	7334	8.46
ROKAN HULU		72,941	7,644	6,081	86666	100

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.15
Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Menurut klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten, kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk atau kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kawasan perlindungan setempat diarahkan pada kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk.

- Kawasan Sempadan Sungai

  Untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai sebagai sumberdaya alam maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan bahwa kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

  Kriteria sempadan sungai adalah

  (1) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;

(2) untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter;

(3) daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggul lebar sempadan minimal 100 meter dari tepi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Bagi kawasan perkotaan perlu dilakukan perubahan persepsi masyarakat yang selama ini menjadikan sungai merupakan daerah belakang rumah, sehingga sungai sampai saat ini masih dianggap identik dengan tempat sampah, menjadikan sungai sebagai beranda depan dari rumah sehingga akan selalu dapat diawasi.

Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 11.498 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:

1. Kecamatan Pendalian IV Koto berupa Sungai Siasam yang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
2. Kecamatan Rokan IV Koto meliputi:
   a. Sungai Mentawai merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   b. Sei Pakis merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   c. Sei Pusu merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   d. Sei Piang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
3. Kecamatan Bonai Darussalam meliputi:
   a. Sungai Kuti merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   b. Sungai Rangau merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
4. Kecamatan Rambah berupa Sungai Kaiti yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
5. Kecamatan Rambah Samo berupa Sungai Dua yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
6. Kecamatan Tambusai meliputi:
   a. Sungai Kumu merupakan anak sungai Rokan Kanan;
   b. Sungai Batang Sosah merupakan anak sungai Rokan Kanan;
7. Kecamatan Tambusai Utara berupa Sungai Mahato yang merupakan anak sungai Rokan Kanan.

- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

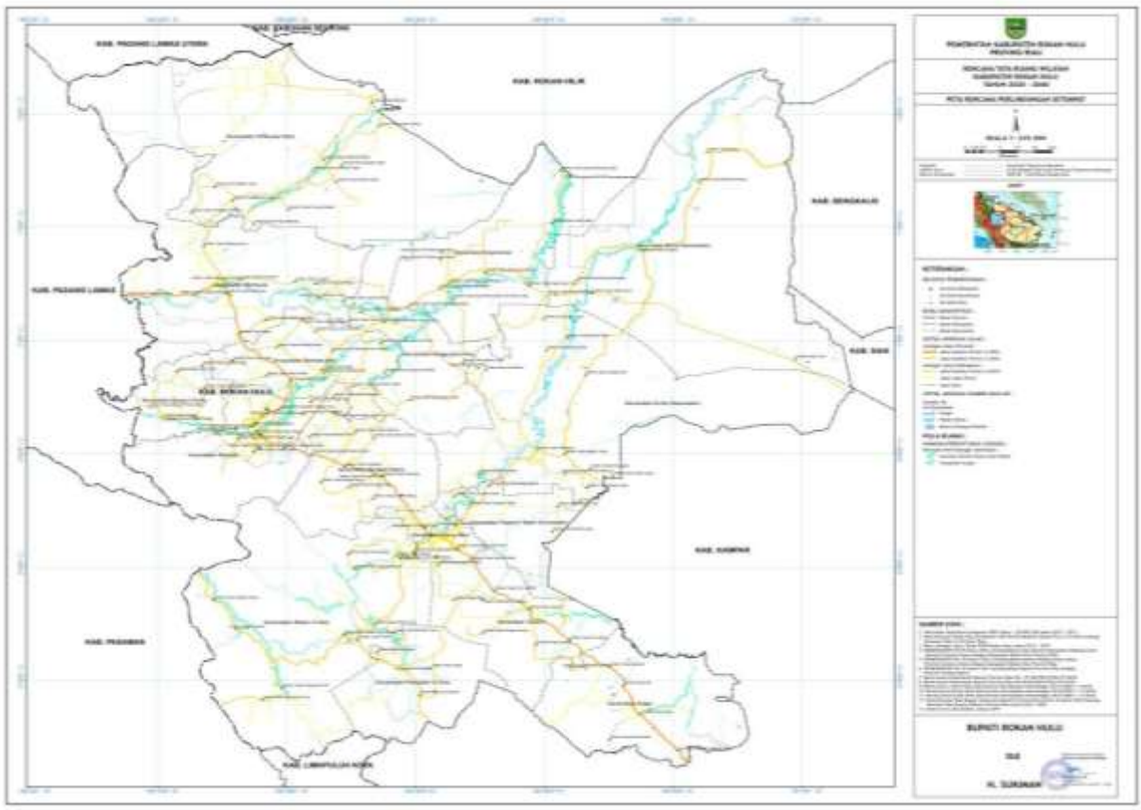
Penetapan kawasan lindung sekitar danau atau waduk dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau atau waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau atau waduk serta pengamanan dari kegiatan budidaya dan permukiman. Danau yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar merupakan Danau Oxbow yang terbentuk karena proses alami. Kriteria penetapan kawasan sempadan sekitar danau atau waduk adalah :

1. Daratan dengan jarak 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi air danau atau waduk; atau
2. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau atau waduk.

Tabel 2.13
Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG			
		Kawasan Perlindungan Setempat			
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba		284	284	2
2	Kecamatan Kabun		732	732	6
3	Kecamatan Kepenuhan	452	1,064	1,516	12
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	123	896	1,019	8
5	Kecamatan Kunto Darussalam	23	775	798	6
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		479	479	4
7	Kecamatan Pendalian IV Koto		423	423	3
8	Kecamatan Rambah	166	569	736	6
9	Kecamatan Rambah Hilir	70	728	799	6
10	Kecamatan Rambah Samo	1	154	156	1
11	Kecamatan Rokan IV Koto	2	1,854	1,856	15
12	Kecamatan Tambusai	54	915	969	8
13	Kecamatan Tambusai Utara	32	991	1,023	8
14	Kecamatan Tandun	3	655	658	5
15	Kecamatan Ujung Batu		102	102	1
16	Kecematan Bonai Darussalam	33	878	911	7
ROKAN HULU		961	11,498	12,459	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.16
Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu

c. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi hanya meliputi kawasan pelestarian alam. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu Kawasan Taman Hutan Raya memiliki luas kurang lebih 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah.

Tabel 2.14
Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha)

No.	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	
		Kawasan Pelestarian Alam	
		Taman Hutan Raya (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	425	32
2	Kecamatan Rambah	922	68
ROKAN HULU		1,347	100

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan rawan banjir.

Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana:

- Rawan longsor: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kabun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan,Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Kecamatan Tandun.
- Kawasan sempadan patahan; Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, dan Kecamatan Pendalian IV Koto (sumber data KSP BIG). Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1:250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi. Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru, Lembar Lubuksikaping, Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga dan Lembar Pematangsiantar. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pratersier. Struktur geologi yang ada berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya memiliki arah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Untuk kondisi Gejala sesar dapat dikenali dari adanya urat-urat kuarsa yang mengisi retakan-retakan pada batuan tersebut, serta adanya pelurusan bentuk morfologi dan sungai, disamping ditemukannya beberapa gawir-gawir yang cukup curam.

Sesar-sesar ini diperkirakan merupakan bagian dari segmen-segmen patahan yang membentuk Patahan Besar Sumatera

- Rawan banjir: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rambah samo dan Kecamatan Tandun.

Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara offline, bahwa kejadian banjir pada Pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Rekapitulasi Kejadian Banjir Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2024

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN (KECAMATAN)
1	2020	27	Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kunto Darussalam Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Rokan IV Koto
2	2021	22	Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan , Rambah Samo, Tandun
3	2022	17	Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kabun,Tambusai, Bangun Purba
4	2023	23	Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan Hulu, Kepenuhan, Tambusai, Rokan IV Koto, Ujung batu, Kunto Darussalam, Bonai Darussalam, Pagaran Tapah, Rambah Samo,
5	2024	19	Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kepenuhan Hulu, Kepenuhan, Rokan IV.Koto Ujung batu, KuntoDarussalam, Tambusai, Tandun, Kabun

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

e. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan sempadan mata air dan bentang alam gua. Untuk mempertahankan dan menjaga ketersediaan air serta menjaga keunikan alam yang ada.sebanyak 3 (tiga) mata air dengan luas kurang lebih 12,92 hektar meliputi Mata air Hapanasan dan Mata air panas Pawan berada di Kecamatan Rambah serta Mata air panas berada di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto.

f. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan Konservasi Arwana untuk mempertahankan dan menjaga habitat serta fauna arwana di Kawasan Hutan Produksi Mahato Kanan dengan luas kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar dan 145 ha sebagai kawasan penyangga berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Perwujudan pengembangan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel 2.16
Rencana Pengembangan Sisem Perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu

PKW	PKL	PPK	PPL
1. Pasir Pengaraian	1. Ujungbatu (Kecamatan Ujungbatu)	1. Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto	1. Sikeubau Jaya 2. Lubuk Bendahara 3. Cipang Kiri Hilir 4. Cipang Kanan
		2. Pendalian (Kecamatan Pendalian IV Koto)	1. Suligi
		3. Tandun di Kecamatan Tandun	1. Dayo
		4. Kabun di Kecamatan Kabun	1. Aliantan
			1. Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu
		5. Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo	1. Sungai Kuning 2. Rambah Utama
		6. Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir	1. Rambah 2. Rambah Muda
		7. Tangun di Kecamatan Bangun Purba	1.Bangun Purba Timur Jaya 2. Rambah Jaya
		8. Rantau Kasai di Kecamatan Tambusai Utara	1. Mahato 2. Bangun Jaya
		9. Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu	1. Muara Jaya
		10. Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan	1. Desa Kepenuhan Timur 2. Desa Kepenuhan Baru
		11. Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam	1. Muara Dilam
		12. Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1. Rimba Jaya
		13. Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam	1. Bonai 2. Kasang Mungkal
		14. Koto Tengah berada di Kecamatan Kepenuha	1. Kepenuhan Timur 2. Kepenuhan Baru
		15. Dalu-dalu di Kecamatan Tambusai	1. Desa Batang Kumu 2. Desa SukaMaju

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Pasir Pangaraian sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
   Kota Pasir Pangaraian sebagai PKW memiliki fungsi sebagai:
   - Pusat pelayanan pemerintahan kabupaten
   - Pusat perdagangan
   - Pusat perhubungan
   - Pusat pendidikan
   - Pusat pengetahuan teknologi dan industri
   - Pusat permukiman

b. Penetapan Kota Ujung Batu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
   Kota Ujung Batu sebagai PKL memiliki fungsi sebagai:
   - Pusat perdagangan regional
   - Pusat pendidikan
   - Pusat perdagangan dan jasa
   - Pusat permukiman
   - Pusat Kegiatan Industri

c. Penetapan 14 (empat belas) ibukota kecamatan lainnya sebagai PPK yaitu:
   1. PPK Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
   2. PPK Pendalian di Kecamatan Pendalian IV Koto;
   3. PPK Tandun di Kecamatan Tandun;
   4. PPK Kabun di Kecamatan Kabun;
   5. PPK Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo;
   6. PPK Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir;
   7. PPK Tangun di Kecamatan Bangun Purba;
   8. PPK Dalu-dalu di Kecamatan Tambusai;
   9. PPK Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
   10. PPK Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam;
   11. PPK Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
   12. PPK Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam;
   13. PPK Rantau Kasai berada di Kecamatan Tambusai Utara;
   14. PPK Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan.

d. Rencana sistem perdesaan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu penetapan 27 desa sebagai PPL.

1. Desa Sikeubau Jaya, Desa Lubuk Bendahara, Desa Cipang Kiri Hilir, dan Cipang Kanan di Kecamatan Rokan IV Koto;
2. Desa Suligi di Kecamatan Pendalian IV Koto;
3. Desa Dayo di Kecamatan Tandun;
4. Desa Aliantan di Kecamatan Kabun;
5. Desa Pematang Tebih di Kecamatan Ujung Batu;
6. Desa Sungai Kuning dan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo;
7. Desa Rambah dan Desa Rambah Muda di Kecamatan Rambah Hilir;
8. Desa Bangun Purba Jaya Timur dan Desa Rambah Jaya di Kecamatan Bangun Purba;
9. Desa Batang Kumu dan Desa Suka Maju di Kecamatan Tambusai;
10. Desa Mahato dan Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara;
11. Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Baru di Kecamatan Kepenuhan;
12. Desa Muara Jaya di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
13. Desa Muara Dilam di Kecamatan Kunto Darussalam;
14. Desa Rimba Jaya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
15. Desa Bonai dan Desa Kasang Mungkal di Kecamatan Bonai; dan
16. Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan di Kecamatan Rambah.

3. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Bencana banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Hampir setiap tahun sungai Rokan, mengalami banjir, bahkan dalam beberapa tahun terakhir frekuensi dan volume banjir cenderung meningkat, sehingga menimbulkan banyak kerugian baik secara fisik maupun non fisik, antara lain keresahan penduduk meningkat, rusaknya bangunan infrastruktur serta rusaknya lahan pertanian dan perikanan.

Tabel 2.17
Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana			
		Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Kawasan Rawan Longsor (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Rokan IV Koto	4,320.83	17,432.85	21.753.68	23.59
2	Tandun	829.22	1,444.67	2.273,89	2.47
3	Kabun	443.33	1,453.27	1.896.6	2.06
4	Ujung Batu	1,922.80		1.922.8	2.09
5	Rambah Samo		742.83	742.83	0.81
6	Rambah	2,326.03	7,014.88	9.340.91	10.13
7	Rambah Hilir	2,553.99	17.96	2.571.95	2.79
8	Bangun Purba	1,236.22	38.15	1.274.37	1.38
9	Tambusai	5,644.01		5.644.01	6.12
10	Tambusai Utara	8,201.53		8.201.53	8.89
11	Kepenuhan	11,245.09	0.25	11.245.34	12.20
12	Kunto Darussalam	7,657.47		7.657.47	8.30
13	PagaranTapah Darussalam	3,771.50	12.25	3.783.75	4.10
14	Bonai Darussalam	10,202.30		10.202.3	11.06
15	Kepenuhan Hulu	2,576.16	96.1	2.672.26	2.90
16	Pendalian IV Koto		1,024.35	1.024.35	1.11
Kab. Rokan Hulu (Ha)		62,930.48	29,277.56	92.208.04	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Berdasarkan data potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kecamatan Kepenuhan adalah wilayah kawasan rawan banjir terbesar dengan luas 11.245,09 ha dan Kecamatan Rokan IV Koto menjadi wilayah terbesar berpotensi rawan longsor dengan luas 17.432,85 ha. Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara offline, bahwa kejadian banjir cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 23 kejadian banjir dan turun kembali menjadi 19 kejadian banjir pada tahun 2024. Selain faktor curah hujan cukup tinggi dan perubahan iklim, angka kejadian banjir dapat dikarenakan penebangan hutan- hutan secara liar didaerah aliran sungai

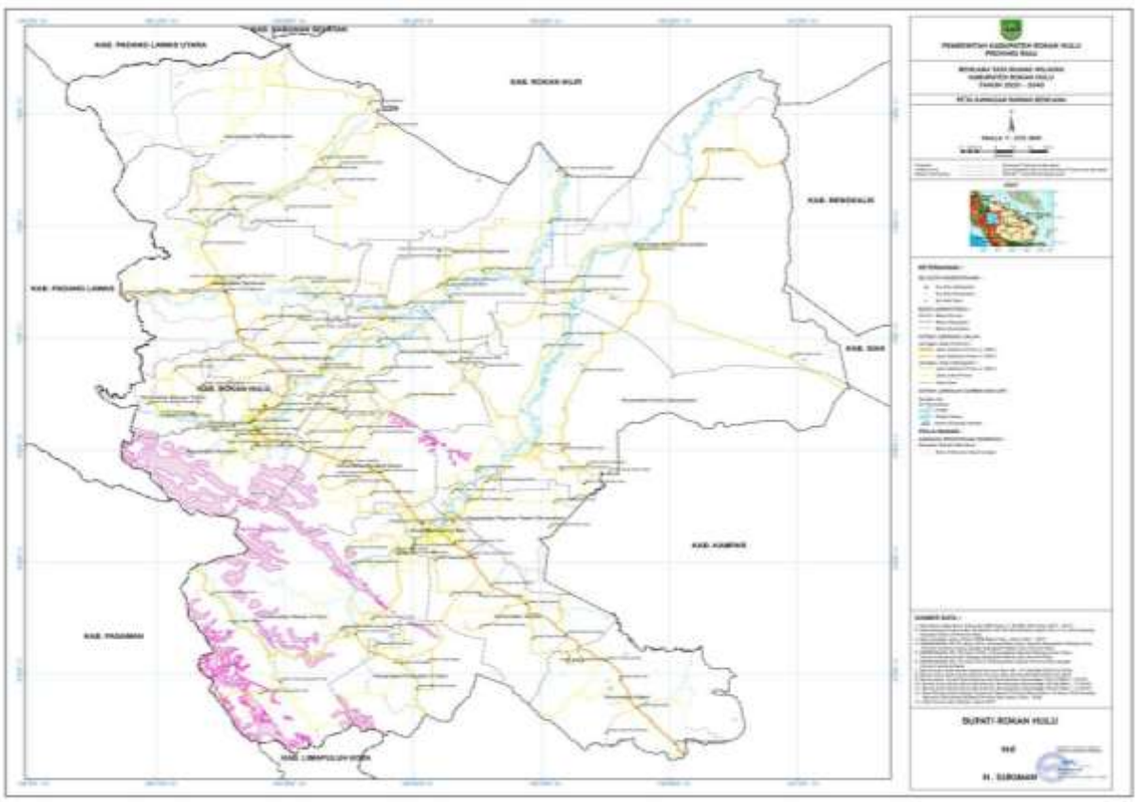
Selanjutnya potensi bencana yang besar di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana kebakaran dari 29 kejadian kebakaran pada tahun 2020, menjadi 47 kejadian kebakaran pada tahun 2024. Diikuti oleh bencana kebakaran rumah dari 9 kejadian pada tahun 2020, menjadi 24 kejadian kebakaran rumah pada

tahun 2024. Berikut adalah data rekapitulasi peristiwa bencana (kejadian) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024, yaitu

Tabel 2.18
Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2020-2024
Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kebakaran	29	28	40	30	47
2	Kebakaran Hutan dan lahan	9	-	19	24	5
3	Kebakaran rumah	9	20	16	23	24
4	Kebakaran pabrik	1	2	1		1
5	Kebakaran bangunan	11	5	3	5	
6	Kebakaran gedung kantor	7	5	3		4
7	Kebakaran rumah toko	5	3	3	3	2
8	Kebakaran kios pasar	-	-	-	1	4
9	Kebakaran Rumah Makan	-	-	-		1
10	Angin puting beliung	2	8	3	4	12
11	Banjir	27	22	17	23	19
12	Tanah longsor	-	-	-	-	
13	Orang tenggelam	3	4	3	1	3
Jumlah		74	97	108	114	122

Sumber: BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025



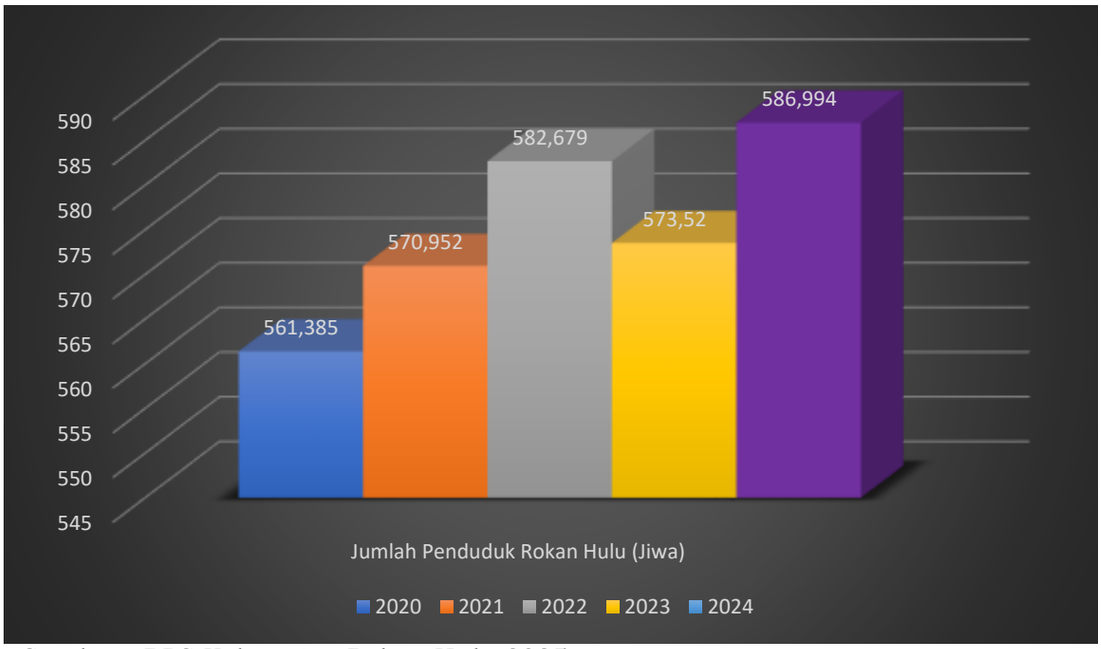
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.17
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu

4. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar).

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 tercatat sebesar 561,385 jiwa, meningkat menjadi 570.952 ribu jiwa pada tahun 2021, dan meningkat kembali menjadi 582.679 ribu jiwa pada tahun 2022. sempat turun menjadi 573,520 ribu jiwa pada tahun 2023, namun kembali naik pada tahun 2024 menjadi 586,994 ribu jiwa. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024, yaitu:



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2025

Gambar 2.18
Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan HuluTahun 2020-2024 (jiwa)

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur bersekolah di Kabupaten Rokan Hulu sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk dari kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 63.704 jiwa atau 10,85 persen. Sedangkan kelompok umur 5 - 9 tahun sebanyak 58.432 jiwa atau 9,95 persen.

Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,01persen, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 31,99 persen. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (dependency

ratio) sebesar 47,03 persen, yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun), terdapat sekitar 47 orang yang berada di luar usia produktif, yaitu penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.19
Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur

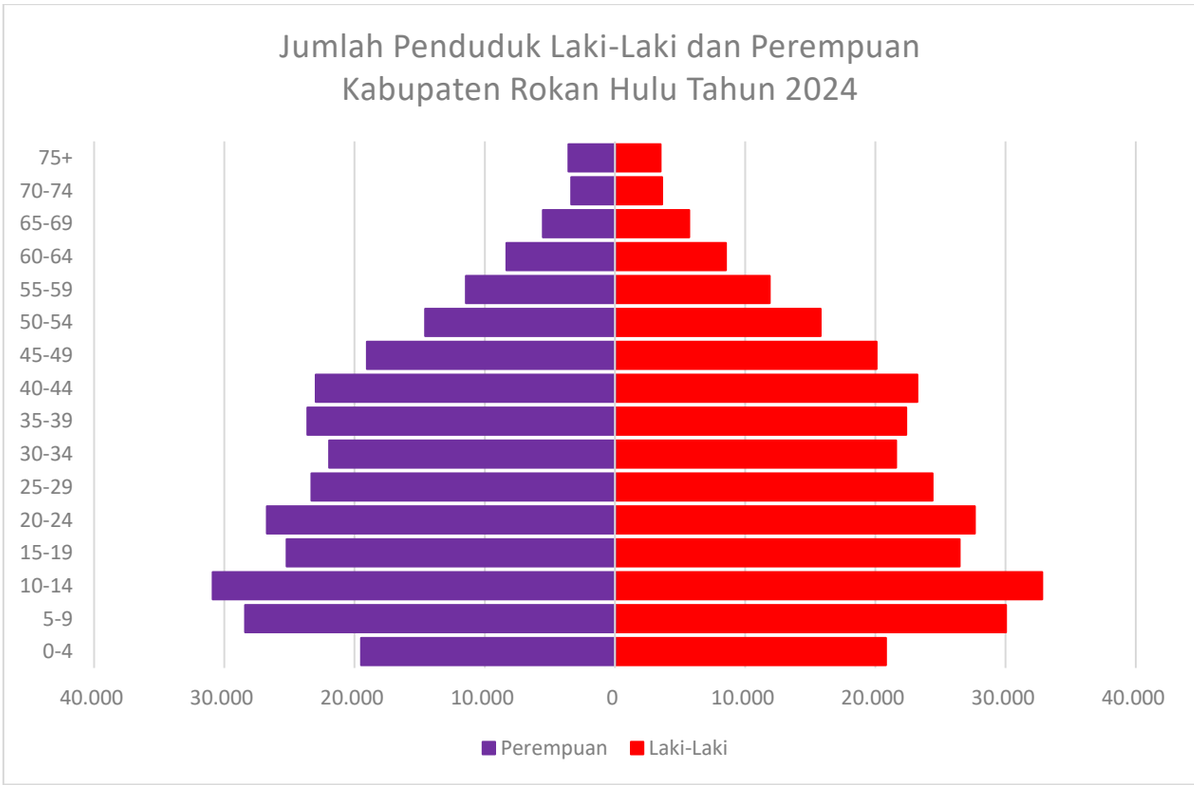
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
	2022	Persen	2023	Persen	2024	Persen
0-4	44.889	7,70	39.968	6,97	40.314	6,87
5-9	57.318	9,84	58.604	10,22	58.432	9,95
10-14	57.974	9,95	63.820	11,13	63.704	10,85
15-19	57.393	9,85	48.254	8,41	51.698	8,81
20-24	52.767	9,06	52.402	9,14	54.385	9,27
25-29	49.228	8,45	46.298	8,07	47.703	8,13
30-34	49.585	8,51	43.466	7,58	43.540	7,42
35-39	46.479	7,98	46.614	8,13	45.996	7,84
40-44	41.817	7,18	46.309	8,07	46.207	7,87
45-49	35.054	6,02	36.944	6,44	39.138	6,67
50-54	28.006	4,81	29.563	5,15	30.380	5,18
55-59	22.771	3,91	22.094	3,85	23.324	3,97
60-64	16.552	2,84	15.957	2,78	16.864	2,87
65-69	11.13	1,91	10.667	1,86	11.240	1,91
70-74	6.195	1,06	6.072	1,06	6.988	1,19
75+	5.521	0,95	6.488	1,13	7.081	1,21
Rokan Hulu	582.679	100	573.520	100	586.994	100

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2025

Komposisi penduduk dari aspek rasio jenis kelamin (sex ratio), secara umum masih didominasi jumlah penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin pada tahun 2020 sebesar 105, turun menjadi 103 pada tahun 2024 yang artinya pada setiap 103 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 orang jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,85 persen dan perempuan sebesar 49,15 persen.

Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk muda (expansive). Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki tingkat

kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2025

Gambar 2.19
Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan pertumbuhan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu sebesar 561.385 jiwa lalu mengalami Pertumbuhan sebesar 2,28 persen 570.952 jiwa pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,80 persen menjadi 582.679 jiwa. Terakhir, pada tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 2,35 persen menjadi 586.994 jiwa.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Rokan Hulu juga ikut meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 73,98 jiwa/km2. Selanjutnya pada tahun 2021 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 75,24 jiwa/km2. Kemudian, pada tahun 2022 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 76,79 jiwa/km2. Hingga tahun 2023 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mencapai 75,58 jiwa/km2. Terakhir tahun 2024 tingkat kepadatan penduduk

Kabupaten Rokan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 77,36 jiwa/km2.

Tabel 2.20
Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan HuluTahun 2020 - 2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
-Laki-Laki	286.928	291.560	297.286	291.470	298.478
-Perempuan	274.457	279.392	285.393	282.050	288.516
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,87	2,28	1,80	0,97	2,35
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km^2)	73,98	75,24	76,79	75,58	77,36
Rasio Jenis kelamin	104,54	104,36	104,17	103,34	103

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, , penduduk miskin. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan.

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan kontribusi tahunan yang relatif stabil, yaitu antara 54,22 persen hingga 55,61 persen. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, dominasi sektor ini menegaskan bahwa perekonomian daerah sangat bergantung pada aktivitas pertanian dan sumber daya alam hayati.

Dari sisi pertumbuhan, sektor pertanian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 54,29 persen, sebelum kembali naik menjadi 54,70 persen pada 2024, yang menunjukkan adanya upaya stabilisasi dan pemulihan setelah

kemungkinan adanya tekanan produksi atau perubahan harga komoditas di tahun sebelumnya.

Sektor industri pengolahan, sebagai sektor sekunder, menunjukkan tren pertumbuhan positif secara keseluruhan. Dari kontribusi 25,06 persen pada 2021, meningkat menjadi 26,15 persen di tahun 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 25,70 persen di tahun 2024. Ini menandakan adanya upaya peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor primer, meski tantangan efisiensi dan daya saing masih perlu diperkuat.

Sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dari 4,28 persen di tahun 2020 menjadi 4,88 persen pada 2022, sebelum mengalami sedikit koreksi menjadi 4,45 persen pada 2024. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas serta regulasi pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu, beberapa sektor menunjukkan tren penurunan, seperti jasa keuangan dan asuransi serta informasi dan komunikasi, yang mengalami penurunan kontribusi berturut-turut sejak 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor-sektor digital dan keuangan masih memerlukan perhatian lebih.

Sektor konstruksi mencatat dinamika yang fluktuatif, sempat menurun hingga 3,20 persen di 2022, namun kembali naik menjadi 3,53 persen di 2023, menandakan adanya pergerakan proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan daerah yang kembali berjalan pasca pandemi.

Tabel 2.21
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

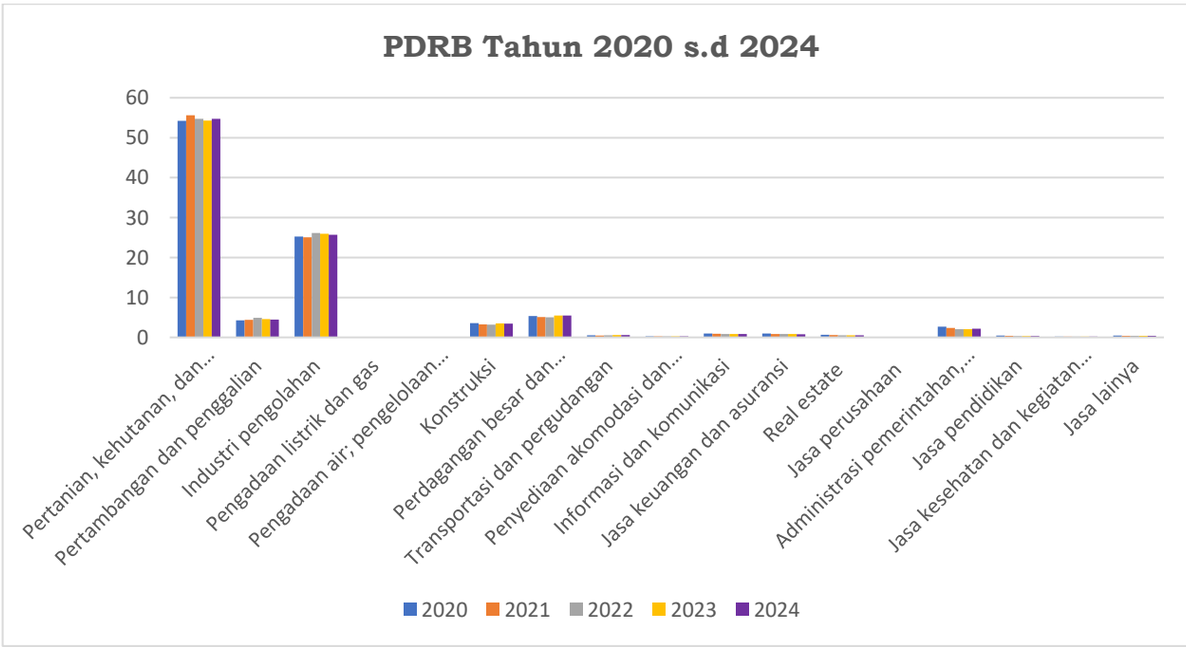
No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	54,22	55,61	54,70	54,29	54,70
2	Pertambangan dan penggalian	4,28	4,38	4,88	4,59	4,45
3	Industri pengolahan	25,25	25,06	26,15	25,97	25,70
4	Pengadaan listrik dan gas	0,10	0,09	0,08	0,09	0,09
5	Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	3,55	3,28	3,20	3,53	3,46
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	5,35	5,06	5,05	5,48	5,45
8	Transportasi dan pergudangan	0,55	0,49	0,52	0,56	0,58
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27
10	Informasi dan komunikasi	0,99	0,90	0,82	0,84	0,83
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,94	0,87	0,83	0,84	0,81
12	Real estate	0,66	0,59	0,53	0,54	0,53

No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Jasa perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,70	2,37	2,03	2,04	2,18
15	Jasa pendidikan	0,46	0,41	0,36	0,36	0,35
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,23	0,22	0,20	0,21	0,21
17	Jasa lainnya	0,44	0,40	0,38	0,39	0,39
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor-sektor utama PDRB Kabupaten Rokan Hulu mencerminkan struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor primer, namun menunjukkan upaya pengembangan sektor sekunder seperti industri pengolahan. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan juga menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi lokal yang lebih dinamis.

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Rokan Hulu perlu mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan daya saing sektor-sektor sekunder dan tersier, serta mengoptimalkan potensi ekonomi digital dan jasa.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2025

Gambar 2.20
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010,nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan PDRB Rokan Hulu atas harga konstan 2010, mencapai 30.042.437,62 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 29.250.575,96 juta rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,71 persen. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,12 persen. Hal ini dipengaruhi oleh melambatnya aktivitas ekonomi disebagian besar lapangan usaha, terutama lapanga usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

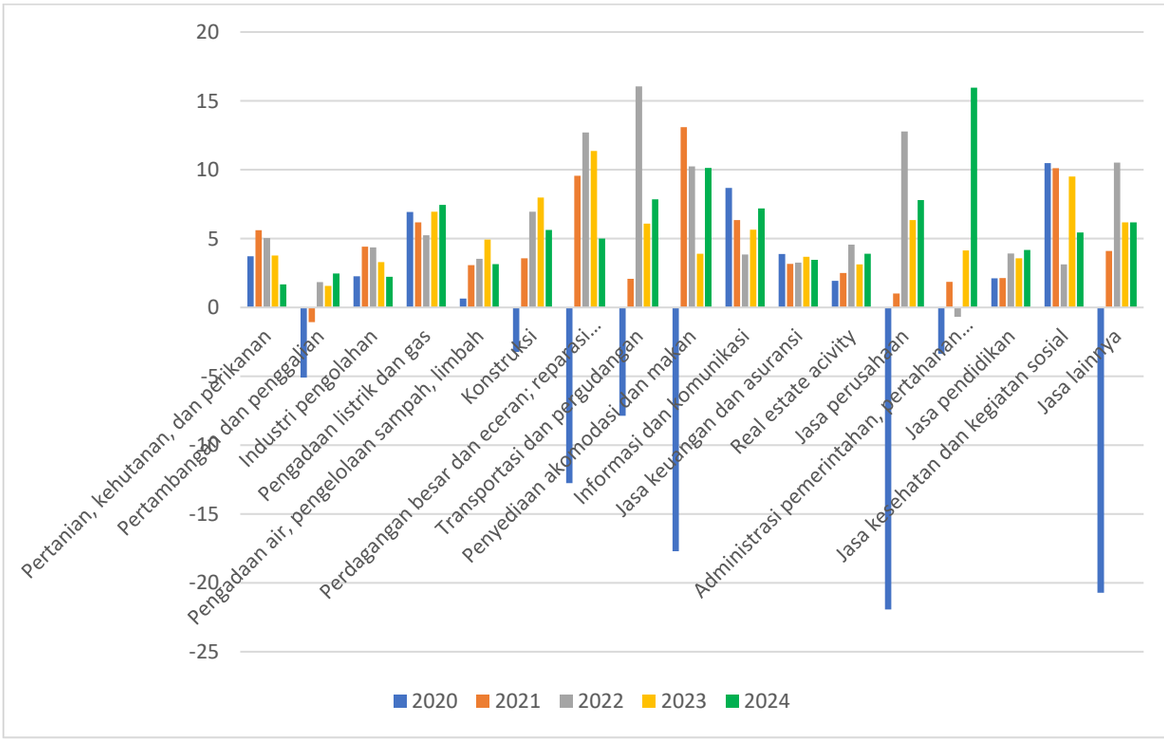
Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,71	5,60	5,03	3,77	1,68
2	Pertambangan dan penggalian	(5,09)	(1,07)	1,84	1,57	2,46
3	Industri pengolahan	2,27	4,41	4,35	3,29	2,22
4	Pengadaan listrik dan gas	6,94	6,17	5,24	6,96	7,44
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	0,65	3,08	3,53	4,93	3,15
6	Konstruksi	(3,23)	3,57	6,96	7,98	5,63
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	(12,75)	9,57	12,70	11,36	5,00
8	Transportasi dan pergudangan	(7,87)	2,08	16,05	6,09	7,85
9	Penyediaan akomodasi dan makan	(17,70)	13,10	10,24	3,89	10,14
10	Informasi dan komunikasi	8,68	6,34	3,84	5,65	7,19
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,88	3,17	3,26	3,68	3,46
12	Real estate acivity	1,93	2,51	4,56	3,13	3,90
13	Jasa perusahaan	(21,93)	1,01	12,78	6,35	7,79
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	(3,36)	1,86	(0,67)	4,14	15,96
15	Jasa pendidikan	2,11	2,14	3,91	3,57	4,18
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,48	10,11	3,12	9,51	5,45
17	Jasa lainnya	(20,71)	4,11	10,51	6,18	6,17
	PDRB	1,52	4.98	5,02	4,12	2,71

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023. Hal ini merupakan efek berlanjut dari el

nino yang terjadi pada tahun 2023. Selain itu, terdapat beberapa Perusahaan Perkebunan sawit yang melakukan replanting sehingga produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami penurunan. Pengurangan penggunaan pupuk oleh petani sawit akibat mahalnya harga pupuk juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya TBS yang dihasilkan. Yang mengakibatkan perlambatan disejumlah kategori lapangan usaha seperti kategori industry pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran: Reparasi mobil.



Gambar 2.21
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)

3) PDRB per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 56.646,72 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 30.042.44 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52.156,58 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 29.250,58 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tabel 2.23
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,566,35	23.454,97	26.629,58	28.315,49	30.985,12
2	Pertambangan dan Penggalian	1,543,78	1.849,41	2.419,45	2.391,45	2.519,75
3	Industri Pengolahan	9,113,03	10.568,20	12.974,19	13.545,54	14.560,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	35,36	37.47	40.84	45,64	49,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	2.22	2.32	2.51	2,65
6	Konstruksi	1,280,26	1381,52	1.587,32	1.841,53	1.962,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,929,02	2.132,63	2.506,40	2.859,83	3.085,23
8	Transportasi dan Pergudangan	198,79	208.11	257,59	292,07	325,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97,56	112,16	127,15	135,70	154,53
10	Informasi dan Komunikasi	357,00	381,11	408.53	438,60	472,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	338,76	367,75	412,43	438,82	457,28
12	Real Estate	239,72	248,37	265,38	282,39	298,32
13	Jasa Perusahaan	1,51	1,52	1,74	1,94	2,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	973,31	999,65	1.008,24	1.062,11	1.233,72
15	Jasa Pendidikan	166,65	171.41	180.44	189,84	200,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,41	92.78	97.56	109,94	118,79
17	Jasa lainnya	160,33	168.18	187.91	203,16	218,50
	Produk Domestik Regional Bruto	36,087,00	42.177.46	49,107,08	52.156,58	56.646,72

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu telah bergeser dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan kekategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada tahun 2023 dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian, dan konstruksi.

Sedangkan struktur perekonomian pada Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan juga terlihat pergeseran dari kategori pertanian,kehutanan dan perikanan kekategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada tahun 2024 juga dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15.975,77 miliar rupiah kemudian kategori industri pengolahan sebesar 8.225,97 miliar rupiah, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 1.597,33 miliar rupiah serta pertambangan dan penggalian sebesar 998,95 milyar rupiah.

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha diKabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,652,02	14,416,17	15,141,34	15.712,23	15.975,77
2	Pertambangan dan Penggalian	952,75	942,53	959,88	974,96	998,95
3	Industri Pengolahan	7,151,20	7,466,45	7,791,43	8.047,50	8.225,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,39	20,59	21,67	23,18	24,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,72	1,77	1,83	1,92	1,99
6	Kontruksi	749,89	776,66	830,72	896,97	947,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,106,29	1,212,16	1,366,08	1.521,25	1.597,33
8	Transportasi dan Pergudangan	120,90	123,38	143,29	152,01	163,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,46	61,60	67,91	70,55	77,70
10	Informasi dan Komunikasi	308,90	328,49	341,10	360,39	386,29

No	Lapangan Usaha PDRB	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	229,56	236,84	244,56	253,56	262,33
12	Real Estate	164,17	168,29	175,96	181,48	188,55
13	Jasa Perusahaan	0,96	0,97	1,09	1,16	1,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	719,30	732,68	727,77	757,89	878,81
15	Jasa Pendidikan	98,70	100,81	104,75	108,49	113,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,68	56,91	58,68	64,26	67,77
17	Jasa lainnya	100,50	104,63	115,63	122,78	130,36
	Produk Domestik Regional Bruto	25,482,41	26,750,94	28,093,71	29.250,58	30.042,44

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya dapat diukur dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada akitifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

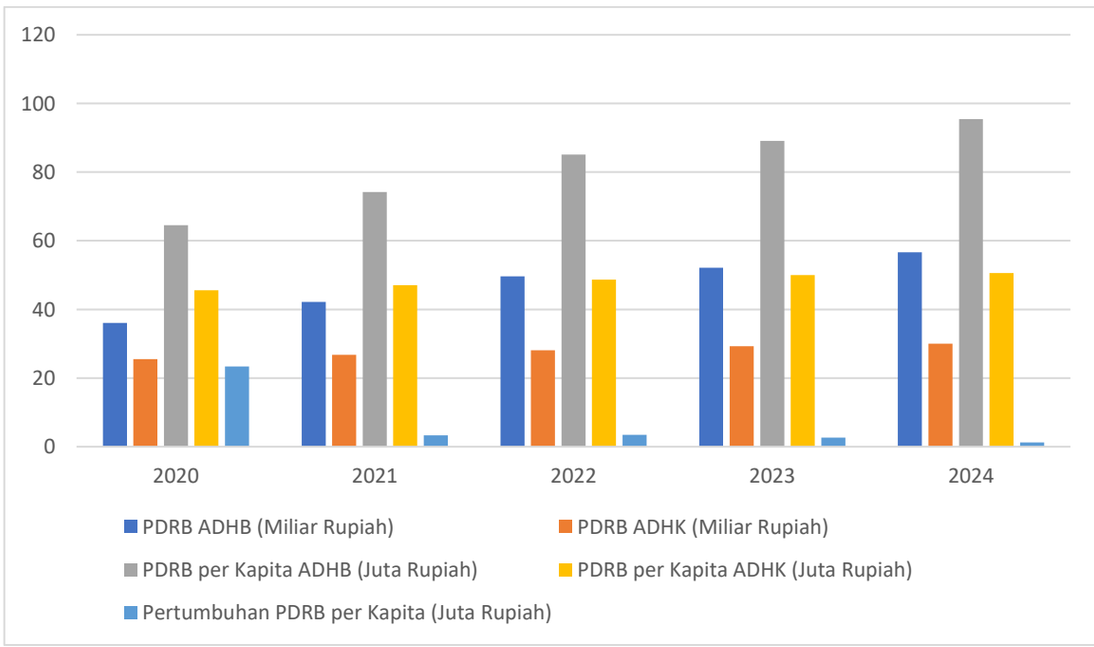
Tabel 2.25
PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)						
No	**Uraian**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	PDRB ADHB	36.087,00	42.177,46	49.614,38	52.156,58	56.646,72
2	PDRB ADHK	25.482,41	26.750,94	28.093,71	29.250,58	30.042,44
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
1	PDRB perkapita ADHB	64,53	74,22	85,14	89,13	95,45
2	PDRB perkapita ADHK	45,56	47,07	48,71	49,99	50,62
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita	23,37	3,32	3,47	2,62	1,27
4	Jumlah penduduk (orang)	559.267	568.268	576.766	585.183	586.994

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pertumbuhan jumlah penduduk (persen)	(17,71)	1,61	1,50	1,46	1,42

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 nilai PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 64,53 juta. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 74,22 juta. Selanjutnya pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 85,14 juta, pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 89,13 juta, selanjutnya pada tahun 2024 PDRB perkapita kabupaten Rokan Hulu juga mengalami peningkatan menjadi 95,45 Juta.



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Gambar 2.22
Perkembangan Nilai PDRB dan PDRB Perkapita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

4) Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memerlukan pengendalian, kareana berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi dan kebuthan produksi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk

menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemandekan dalam perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi dapat disebabkan dari dorongan konsumsi maupuan dorongan dari produksi. Untuk memahami gejolak kenaikan harga di Provinsi Riau, inflasi diukur di tiga kota, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Namun, sejak tahun 2024, Kampar juga masuk dalam perhitungan inflasi di provinsi tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Rokan Hulu dan sebagian besar kabupaten/kota di Riau umumnya dipengaruhi oleh inflasi di Kota Pekanbaru, yang berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau.

Tabel 2.26
Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Laju Inflasi	2020	2021	2022	2023	2024
Riau	2,42	1,54	6,81	2,50	2,50
Tembilahan	3,30	1,09	4,82	1,53	2,45
Pekanbaru	2,24	1,55	7,04	2,50	1,89
Dumai	2,88	1,66	6,46	2,78	2,68
Kampar					3,25

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Selain itu, Kampar merupakan wilayah pengukuran inflasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan tingkat inflasi Kampar, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga di Kampar lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hulu juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Untuk itu, pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hulu agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat.

5) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut.Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah

harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30 - 0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2.27
Indeks Gini Rasio Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini	0,314	0,296	0,268	0,259	0,272

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Selama periode 2020-2024, angka Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu berkisar antara 0,314-0,272 dengan trend fluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel diatas. Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori ketimpangan rendah. Klasifikasi kategori ketimpangan rendah perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan agar dapat ditingkatkan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangkan perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

6) Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi dalam tingkat kemiskinan. Meskipun persentase masyarakat miskin menunjukkan tren penurunan, jumlah absolut penduduk miskin mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,31 persen. Angka ini sempat naik tipis menjadi 10,40 persen pada tahun 2021,

kemungkinan besar sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, tren persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan yang konsisten yaitu sebesar 9,95 persen pada 2022, 9,72 persen pada 2023 dan 9,62 persen pada 2024. penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara relatif, termasuk berbagai program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

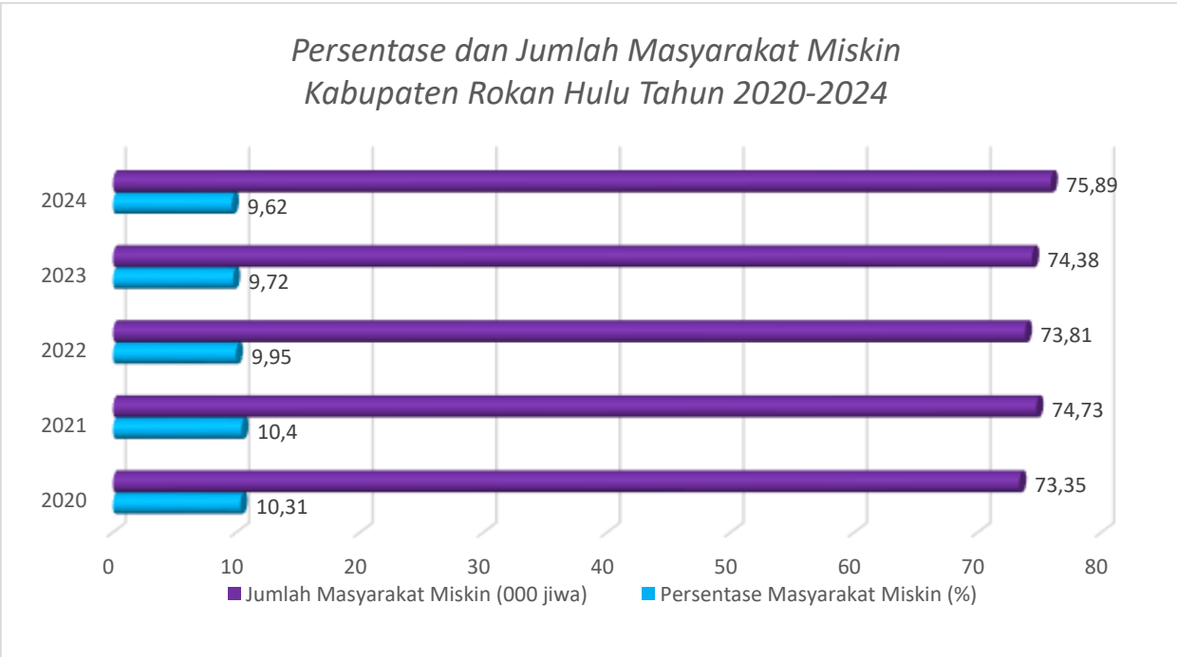
Tabel 2.28
Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

URAIAN		TAHUN			
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Masyarakat Miskin (%)	10,31	10,40	9,95	9,72	9,62
Jumlah Masyarakat Miskin (000 jiwa)	73,35	74,73	73,81	74,38	75,89

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Jika dilihat dari sisi jumlah absolut (dalam ribuan jiwa), data menunjukkan fluktuasi yang berbeda. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 73,35 ribu jiwa, meningkat menjadi 74,73 ribu jiwa pada 2021. Walaupun sempat menurun sedikit pada 2022 (73,81 ribu jiwa), angka ini kembali meningkat menjadi 74,38 ribu jiwa pada 2023 dan 75,89 ribu jiwa pada 2024

Peningkatan jumlah ini terjadi meskipun persentasenya menurun, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan.



Gambar 2.23
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Rokan Hulu

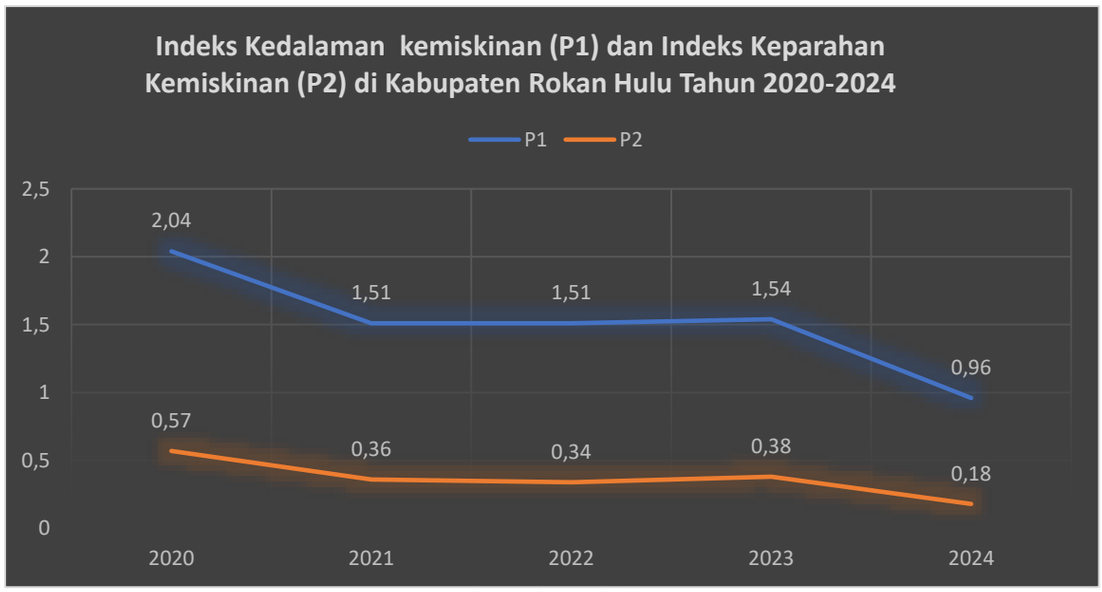
7) Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan dari 2,04 pada 2020 menjadi 0,96 pada 2024, yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Demikian pula, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,57 pada 2020 menjadi 0,18 pada 2024, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang. Garis Kemiskinan, yang mencerminkan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengalami peningkatan dari Rp 532.643 pada 2020 menjadi Rp 699.018 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya inflasi dan peningkatan biaya hidup yang mempengaruhi standar minimum kebutuhan dasar masyarakat. selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
2020	73,35	10.31	2,04	0.57	532,643	89,69
2021	74,73	10.40	1,51	0.36	551,351	89.60
2022	73,81	9,95	1,51	0.34	585,225	90.05
2023	74,38	9,72	1,54	0.38	647.599	90,28
2024	75,89	9,62	0,96	0.18	699.018	90,38

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025



Gambar 2.24
Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

8) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kabupaten rokan hulu strategi yang telah dilaksanakan adalah :

A. Mengurangi Beban Pengeluaran

Terkait pengurangan kemiskinan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran ini Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Tabel 2.30
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)					Sumber Dana					OPD
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	PENGURANGAN PENGELUARAN											
1	BLT-DD	16096	9541									DESA
2	PKH	11760	13068	12.630	15.726	22.719	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN	DINSOS
3	BPNT	24630	25113	24.017	21.914	25.093	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN	DINSOS
4	PBI-JK	33212	33255	34.607	35.108	84.536	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	DINKES
5	JAMPERSAL	1125	1225	118			APBN	APBN	APBD			DINKES
6	PBI-JK		73138	207.116	211.726	264.128	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN	DINKES
7	PIP											
	PIP SD	12717	10901	20.532			APBN	APBN	APBN			DISDIK
	PIP SMP	4915	4071	1409			APBN	APBN	APBN			DISDIK
	PIP Paket A	10	6	2			APBN	APBN	APBN			DISDIK
	PIP Paket B	10	10	28			APBN	APBN	APBN			DISDIK
	PIP Paket C	3	9	14			APBN	APBN	APBN			DISDIK
8	SANIMAS											
	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1135 KK	672 KK	600 KK	10 KK	90 KK	DAK	DAK	DAK	APBD KAB	APBD KAB	PERKIM
9	RUMAH LAYAK HUNI	18	266	157	70	15	PROV/BANKEU	PROV/BANKEU	PROV/BANKEU	PROV/BANKEU	PROV/BANKEU	PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI	54	0	0			DAK	DAK				PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI	17	26				BAZNAS	BAZNAS				PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI			16					CSR			
	RUMAH LAYAK HUNI				2	11				APBD KAB	APBD KAB	PERKIM
	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI				7	12				APBD	APBD	PERKIM
	BSPS	150	40	336	416	3	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN	PERKIM
	BSPS	45	0	0			DAK	DAK				PERKIM

Sumber: Perangkat Daerah Terkait Tahun 2025

B. Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan

Pada strategi ini pemerintah kabupaten rokan hulu telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Tabel 2.31
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)				Sumber Dana				OPD
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	PENINGKATAN EKONOMI DAN PENDAPATAN									
1	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan Dan Sayuran	50 RT	570 RTP	205 RTP	500 RTP	APBD	APBD	APBD	APBD	DKPP
2	Sarana Pembudidayaan Ikan (Kolam Terpal, Bibit, Pakan)	14 KLPK	6 KLPK	20 KLPK	18 KLPK	DAK	DAK	APBD	APBD	DKPP
3	Pembangunan Lumbung Pangan Didaerah Rawan Pangan		12 GAPOKTAN				DAK			DKPP
4	Pengadaan Operasional Lumbung Pangan Daeah Rawan Pangan			8 LUMBUNG	5 LUMBUNG			APBD	APBD	DKPP
5	Pengadaan Rumah Bibit Kelompok		19 KWT	5 KWT	15 KWT		DAK	APBD	APBD/ DAK	DKPP
6	Sarana Penangkapan Ikan (Perahu Dan Alat Tangkap)		2 KUB NELAYAN	7 KUB NELAYAN	12 KUB NELAYAN		APBD	APBD	APBD	DKPP
7	Pelatihan Sablon		5 ORANG				APBD			DISPERINDAG
8	Pelatihanpengolahan Makanan Ringan		20 ORANG				APBD			DISPERINDAG
9	Bantuan Alat Peraut Lidi Sawit		1 KLPK				APBD			DISPERINDAG
10	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi		58 ORANG				DAK			DISKOPNAKERTRANS
11	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Usaha Mikro		59 ORANG				DAK			DISKOPNAKERTRANS
12	Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Mendukung Hortikultura	3 KLPK				DAK				DTPH
13	Pembangunan Long Strorage Mendukung Pertanian	1 KLPK				DAK				DTPH

Sumber: Perangkat Daerah Terkait Tahun 2024

9) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim

Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari $ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $. ada 3 (tiga) hal penyebab kemiskinan ekstrim yaitu (1).Kondisi sosial budaya; (2).Keterbatasan sumber daya (3).Keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Tingkat Kemiskinan Ekstrim mengukur 2 hal, yakni persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional dan persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan).

Pada tahun 2022 Kab. Rokan Hulu dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem nomor 4 di Provinsi Riau setelah Kab. Kep Meranti, Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir.

Pada tahun 2023 estimasi tingkat kemiskinan ekstrem adalah sebesar 1,39 persen, nomor 3 terbesar setelah Kabupaten Indragiri Hulu. Secara jumlah ke miskinan ekstrem di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 10.65 (ribu jiwa) nomor 1 terbesar di Provinsi Riau.

Untuk menindaklanjuti dalam bentuk intervensi terhadap masyarakat miskin ekstrem maka Kabupaten Rokan Hulu telah menganggarkan sebesar Rp.290.142.724.600 dengan rincian sesuai dengan strategi yang dialokasikan pada 15 (lima belas) OPD, yaitu untuk Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perpustakaan dan Arsip, sedangkan untuk Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan ,Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Gambar 2.25
Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstream (%)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin ekstrem di kabupaten Rokan Hulu sebanyak 10.65 (ribu jiwa) atau setara dengan 1,39 persen sedangkan Provinsi Riau sebanyak 48.73 (ribu jiwa) atau setara 0,67 persen. Secara peringkat Kabupaten Rokan Hulu menduduki peringkat ke 3 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja terhadap fokus kesejahteraan sosial dilakukan melalui pengamatan pada sejumlah indikator strategis yang mencerminkan kualitas hidup dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. indikator-indikator tersebut meliputi: angka melek huruf, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kematian bayi, angka kematian ibu, persentase balita gizi buruk.

1) Indeks Pembangunan Manusia

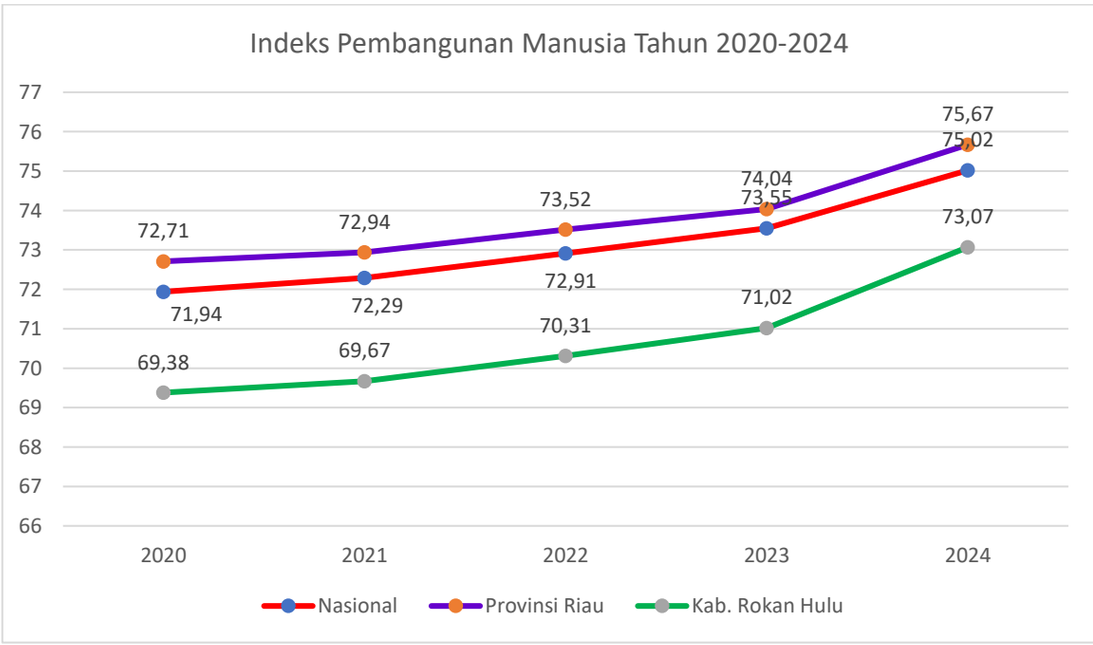
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di Kabupaten Rokan Hulu, capaian IPM selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara bertahap.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Rokan Hulu	70,95	71,19	71,70	72,28	73,07
2	Prov. Riau	73,67	73,89	74,45	74,95	75,67
3	Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun,BPS Prov.Riau dan BPS 2025

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 70,95, kemudian meningkat menjadi 71,19 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 71,70, dan kembali naik menjadi 72,28 pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, IPM Kabupaten Rokan Hulu mencapai 73,07. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebesar 2,12 poin selama lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau dan nasional, Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah rata-rata. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Riau mencapai 75,67, sedangkan IPM nasional sebesar 75,02. Meskipun demikian, laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan arah positif dan menjanjikan, yang mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

2) Angka melek huruf

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Salah satu indikator penting yang mencerminkan hal ini adalah Angka Melek Huruf (AMH), yang mencerminkan persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis.

Pada tahun 2020, AMH di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa seluruh penduduk yang menjadi sasaran survei telah memiliki kemampuan dasar literasi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi sedikit fluktuasi dalam angka tersebut.

Pada tahun 2021, AMH mengalami penurunan menjadi 99,37 persen, yang kemudian meningkat sedikit menjadi 99,43 persen pada tahun 2022. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan angka masing-masing sebesar 98,82 persen dan 98,21 persen.

Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan tingkat literasi di masyarakat. Faktor-faktor seperti akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan ketersediaan fasilitas belajar dapat mempengaruhi angka melek huruf ini.

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka melek huruf	100	99,37	99,43	98,82	98,21

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dan BPS Kab. Rokan Hulu Tahun 2025



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dan BPS Kabupaten Rokan Hulu 2025

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

3) Angka rata-rata Lama Sekolah

Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat antara lain dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Rokan Hulu dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan.

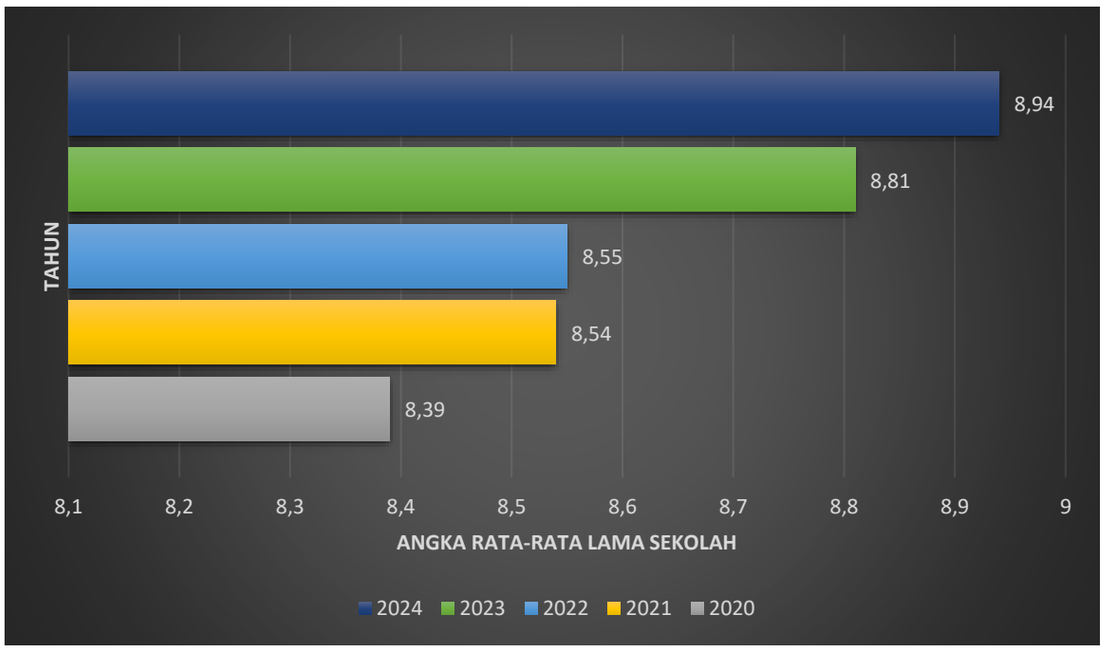
Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.39 tahun	8.54 tahun	8.55 tahun	8.81 tahun	8,94 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,39 tahun. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021 dan sedikit naik menjadi 8,55 tahun pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan RLS mencapai 8,81 tahun, dan terus meningkat menjadi 8,94 tahun pada tahun 2024. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,94 tahun. Jika dikonversikan ke jenjang pendidikan formal, angka ini setara dengan pencapaian hingga kelas IX SMP, namun belum sepenuhnya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat Rokan Hulu telah menamatkan pendidikan dasar dan sebagian besar telah melanjutkan ke jenjang SMP. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun demikian, angka RLS yang belum mencapai 9 tahun menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mendorong masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di tingkat pendidikan menengah dan atas.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.28
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

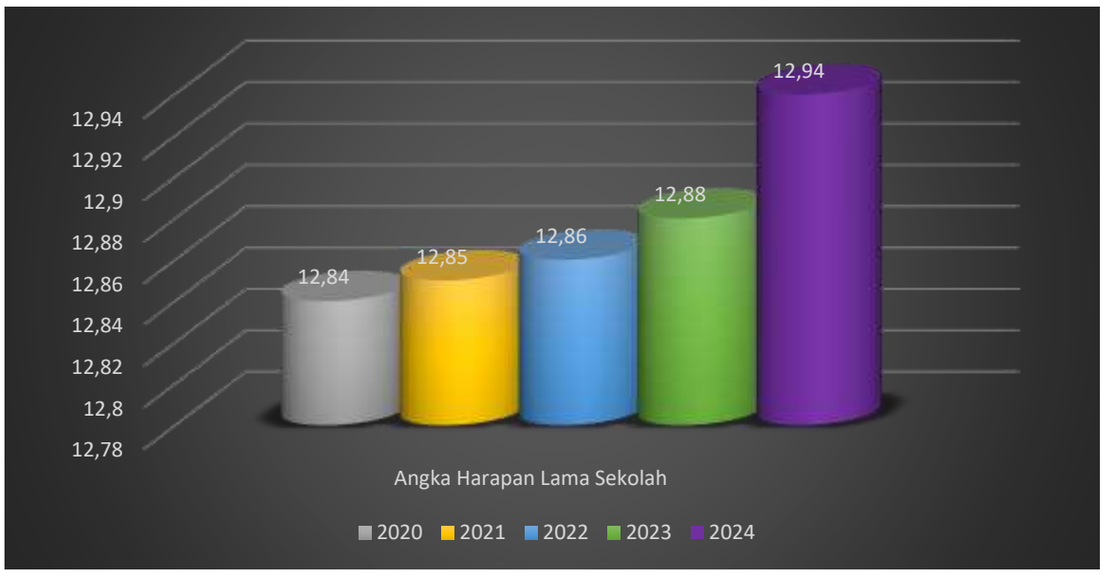
4) Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan BPS bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan diketahuinya HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12.84 tahun	12,85 tahun	12,86 tahun	12,88 tahun	12,94 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.29
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, AHLS tercatat sebesar 12,84 tahun, kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 12,85 tahun pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut dengan pencapaian 12,86 tahun di tahun 2022, 12,88 tahun di tahun 2023, dan mencapai 12,94 tahun pada tahun 2024. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.94 tahun atau setara dengan Diploma I.

5) Literasi Membaca dan Numerasi Tingkat SD dan SMP

Literasi membaca dan numerasi saat ini sudah menjadi standar kompetensi yang dituangkan dalam assesment pendidikan secara nasional. Adapun persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional di Kabupaten Rokan Hulu dan Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

Uraian		2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional				
A	Literasi membaca SD	54,03	57,1	63,96
	Numerasi SD	29,33	40,67	52,46
B	Literasi membaca SMP	49,64	63,42	63,1

Uraian		2022	2023	2024
	Numerasi SMP	33,43	38,85	58,92
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum				
C	Literasi membaca SD	51,39	54,23	54,93
	Numerasi SD	27,68	39,21	46,2
D	Literasi membaca SMP	46,03	56,49	48,83
	Numerasi SMP	31,31	31,96	34,28

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dan 2025

6) Umur Harapan Hidup

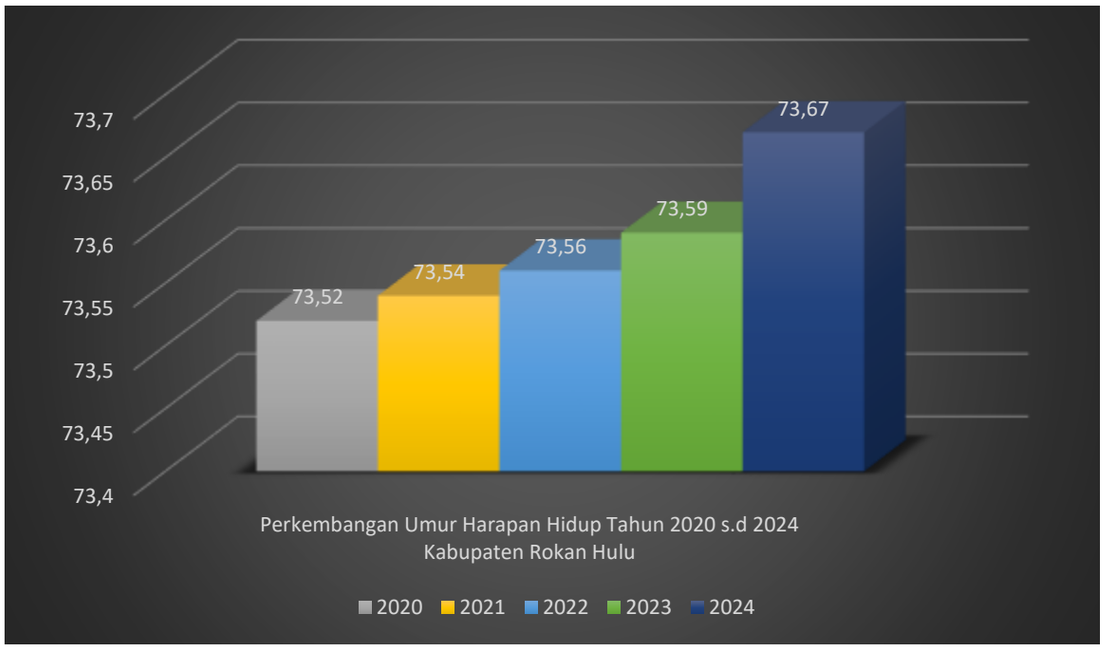
Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, UHH pada tahun 2020 tercatat sebesar 73,52 tahun. Angka ini terus meningkat signifikan menjadi 73,54 tahun pada tahun 2021, dan mengalami kenaikan yang konsisten pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 73,56 tahun di tahun 2022, 73,59 tahun pada tahun 2023, dan mencapai 73,67 tahun pada tahun 2024.

Tabel 2.37
Perkembangan Umur Harapan Hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	UHH	73,52 tahun	73,54 tahun	73,56 tahun	73,59 tahun	73,67 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Peningkatan UHH ini mencerminkan membaiknya kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat dikaitkan dengan perbaikan di sektor kesehatan, gizi, lingkungan hidup, serta akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Tren positif ini juga menjadi indikator keberhasilan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.30
Umur Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

7) Pengeluaran Per Kapita

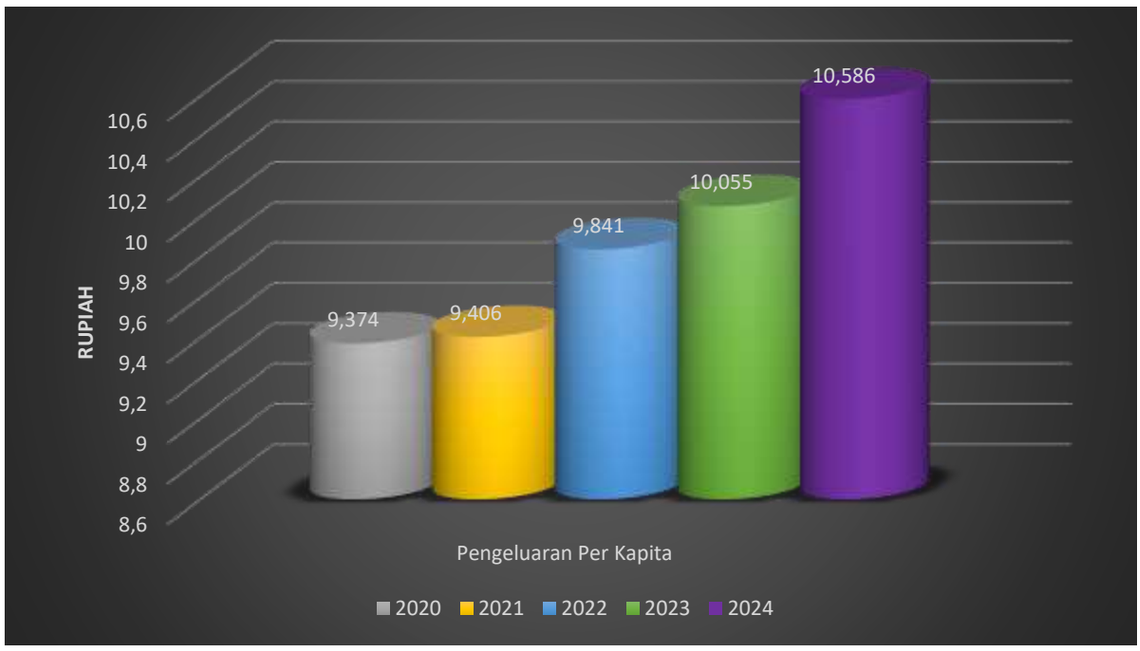
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d. 2024 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp9.374 ribu, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp9.406 ribu di tahun 2021. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, yakni mencapai Rp9.841 ribu, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp10.055 ribu. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana pengeluaran per kapita mencapai Rp10.586 ribu.

Tabel 2.38
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (Rp.000)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp.9.374	Rp.9.406	Rp.9.841	Rp.10.055	Rp.10.586

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Peningkatan pengeluaran per kapita ini mencerminkan adanya pertumbuhan daya beli masyarakat serta peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir. Meski peningkatannya relatif stabil, tren ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat cenderung membaik dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.31
Perkembangan Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

8) Prevalensi balita gizi buruk

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, prevalensi tercatat sebesar 0,07 persen dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 30 orang dari total 42.071 balita. Angka ini menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 0,02 persen, dengan hanya 6 balita yang mengalami gizi buruk dari total 36.935 balita. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup mencolok, di mana prevalensi meningkat menjadi 0,2 persen dengan 68 balita yang mengalami gizi buruk dari total 40.836 balita. Peningkatan ini menjadi perhatian khusus dalam upaya penanggulangan masalah gizi buruk di wilayah tersebut.

Tahun 2023 menunjukkan penurunan kembali ke angka 0,07 persen, dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 36 orang dari 47.103 balita. Sementara itu, pada tahun 2024 prevalensi kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,10 persen, dengan 53 balita yang mengalami gizi buruk dari 50.617 balita. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika tantangan dan Perlu adanya upaya berkelanjutan yang lebih intensif dalam pemantauan status gizi, edukasi masyarakat, serta perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi untuk mencegah terjadinya peningkatan kembali kasus gizi buruk di masa mendatang. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.39
Prevalensi Balita Gizi Buruk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk (orang)	30	6	68	36	53
2	Jumlah balita (orang)	42,071	36,935	40.836	47.103	50.617
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0.07	0.02	0.2	0.07	0.10

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

9) Cakupan desa siaga aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pencapaian yang sangat baik sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Jumlah desa siaga yang dibentuk dan aktif setiap tahunnya konsisten sebanyak 139 desa, yang mencerminkan cakupan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan program Desa Siaga Aktif secara optimal selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 2.40
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa siaga aktif	139	139	139	139	139
2	Jumlah desa siaga yang dibentuk	139	139	139	139	139
3	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

10) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 65,26 persen, meningkat menjadi 66,50 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan ke angka 64,07 persen, yang kemudian kembali naik menjadi 66,73 persen di tahun 2023 dan mencapai 68,13 persen pada tahun 2024. Peningkatan TPAK di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam daya serap pasar kerja terhadap penduduk usia kerja

Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami perubahan yang cukup mencolok. Di tahun 2020, sebanyak 301.675 orang tercatat bekerja, dan jumlah ini meningkat menjadi 327.296 orang pada 2021. Meski sempat sedikit menurun pada 2022 menjadi 323.597, angka ini menurun drastis pada 2023 menjadi 277.332, sebelum kembali meningkat ke 291.157 orang pada 2024. Penurunan

tajam di tahun 2023 dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi atau dampak lanjutan dari pandemi.

Dari sisi persentase penduduk yang bekerja, angka ini tetap relatif tinggi dan stabil, menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja terserap dalam lapangan kerja. Pada tahun 2020, persentase ini berada di angka 95,58 persen, dan meningkat menjadi 97,75 persen di tahun 2021. Setelah sedikit menurun menjadi 96,38 persen pada 2022, kembali naik menjadi 96,55 persen di 2023 dan 97,26 persen di tahun 2024.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan tren yang membaik. Di tahun 2020, TPT berada di angka 4,42 persen, dan menurun tajam menjadi 2,25 persen pada 2021. Meski kembali naik menjadi 3,62 persen pada 2022, tingkat pengangguran kembali menurun menjadi 3,45 persen di 2023 dan 2,73 persen di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terdampak, sektor ketenagakerjaan secara bertahap mulai pulih.

Dari sisi jumlah pengangguran, data menunjukkan penurunan dari 13.958 orang di tahun 2020 menjadi 7.537 orang pada 2021. Angka ini sempat naik kembali menjadi 12.164 orang pada 2022, sebelum turun lagi menjadi 9.899 orang pada 2023 dan 8.184 orang pada 2024. Ini sejalan dengan perubahan TPT dan menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Adapun jumlah angkatan kerja meningkat dari 315.633 orang di tahun 2020 menjadi puncaknya 335.761 pada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan cukup signifikan di tahun 2023 menjadi 287.231, sebelum naik kembali menjadi 299.341 di tahun 2024.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan dalam beberapa indikator ketenagakerjaan, Kabupaten Rokan Hulu berhasil menunjukkan pemulihan dan peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang mulai membuahkan hasil.

Tabel 2.41
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	TPAK (persen)	65.26	66.50	64,07	66,73	68,13
2	Bekerja	301.675	327.296	323.597	277.332	291.157
3	Persen penduduk bekerja	95,58	97,75	96,38	96,55	97,26
4	TPT persen	4,42	2,25	3,62	3,45	2,73

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pengangguran	13.958	7.537	12.164	9.899	8.184
6	Angkatan kerja	315.633	334.833	335.761	287.231	299.341
7	UMP (Rupiah)	2.888.564	2.888.563	2.938.564	3.191.662	3.294.625
8	UMK (Rupiah)	2.960.855	2.960.855	2.986.863	3.248.333	3.360.920

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun, 2025

11) Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka

Indikator ketenagakerjaan merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui kualitas dan dinamika pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Beberapa indikator utama yang digunakan antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Setengah Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).

Berikut perbandingan indikator ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu dengan rata-rata Provinsi Riau dan Nasional pada tahun 2024:

Tabel 2.42
Indikator Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Indikator	Capaian		
		Rokan Hulu	Provinsi	Nasional
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,73	3,70	4,91
2	Setengah pengangguran	-	9,12	7,99
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,13	66,33	70,63
4	Tingkat kesempatan kerja	97,26	65,75	95,80

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,73 persen, jauh lebih rendah dibandingkan provinsi (3,70 persen) dan nasional (4,91persen). Ini menunjukkan kondisi pasar kerja lokal yang lebih stabil. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Rokan Hulu sebesar 68,13 persen, berada di atas rata-rata provinsi namun sedikit di bawah nasional. Artinya, proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi cukup tinggi. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Rokan Hulu mencapai 97,26 persen, menandakan bahwa sebagian besar penduduk yang masuk dalam angkatan kerja telah bekerja. Ini juga lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi (96,30 persen) dan nasional (95,80 persen). Data setengah pengangguran untuk Kabupaten Rokan Hulu belum tersedia, namun angka provinsi dan nasional yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa masih ada banyak pekerja yang belum bekerja secara penuh waktu atau produktif.

12) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas

Pada tahun 2024, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat sebanyak 291.157 orang, dari total angkatan kerja sebanyak 299.341 orang. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja mencapai 97,26 persen. Tingginya tingkat kesempatan kerja mencerminkan ketersediaan lapangan kerja yang relatif baik di masyarakat. Tingkat kesempatan kerja sebesar 97,26 persen berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja (yaitu mereka yang secara aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan), sebanyak 97 orang telah memperoleh pekerjaan. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja mampu terserap dalam kegiatan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa.

13) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Tabel 2.43
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Uraian	2024	Persentase
1	Berusaha sendiri	65.970	22,65
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	41.557	14,27
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	21.609	7,42
4	Buruh/karyawan/pegawai	90.210	30,98
5	Pekerja bebas	26.345	9,04
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	45.466	15,61
Jumlah		291.157	100.00

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel diatas terlihat bahwa proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri mencapai 22,65 persen, diikuti oleh tenaga kerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 14,27 persen, dan yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebesar 7,42 persen. Sementara itu, proporsi tenaga kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 30,98 persen. Tenaga kerja dengan status pekerja bebas tercatat sebesar 9,04 persen, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar mencapai 15,61 persen. Distribusi ini menunjukkan bahwa selain sektor formal, sektor informal masih menjadi tumpuan penting dalam penyediaan lapangan kerja di kabupaten Rokan hulu.

14) Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dan II

Data kesejahteraan keluarga merupakan indikator penting untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengukur jumlah keluarga yang masih berada pada kategori pra sejahtera dan sejahtera I dan II. Indikator ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

Tabel 2.44
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Keluarga pra sejahtera	9,200	9,350	5.062	4.376	3.848
2	Keluarga sejahtera I dan II	71.600	72.150	70.125	8.458	15.949
3	Total	80,800	81,500	75.187	12.834	19.797
4	Jumlah keluarga	159,500	116,389	115.625	12.660	130.093
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II	50.66	70,02	65,03	10,13	15,21

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020–2022, jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I & II cukup tinggi, dengan persentase berada di atas 50 persen. Tahun 2023, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam total jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I & II (hanya 12.834 keluarga dari 12.660 keluarga total), yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode pendataan atau klasifikasi baru. Tahun 2024, jumlahnya kembali meningkat menjadi 19.797 keluarga, namun persentasenya masih tergolong rendah yaitu 15,21 persen, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

15) Indeks kepuasan masyarakat

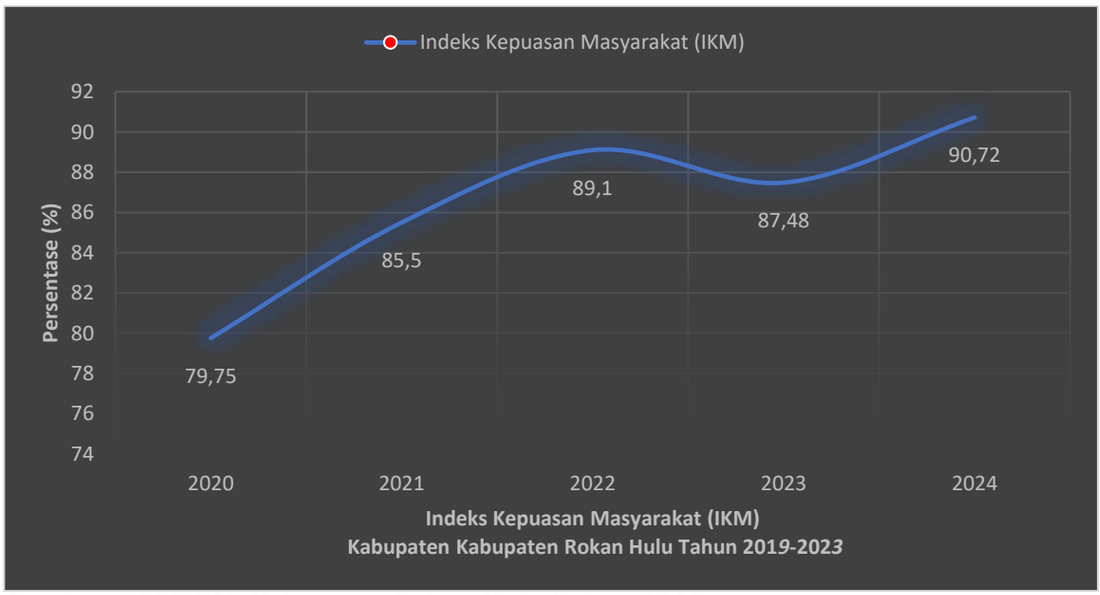
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM diperoleh melalui pengukuran kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat yang membandingkan antara harapan dan kebutuhan mereka terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Pengukuran ini penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Di Kabupaten Rokan Hulu, Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 tercatat sebesar 90,72 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 87,48 persen. Peningkatan ini mencerminkan upaya dan komitmen pemerintah dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah tren perkembangan IKM Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ke tahun.

Tabel 2.45
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	79,75	85,50	89,10	87,48	90,72

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.32
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

16) Persentase PAD terhadap pendapatan

Perhitungan terhadap jumlah pendapatan daerah mencakup berbagai sumber, tidak hanya terbatas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD sendiri terdiri dari beberapa jenis penerimaan, antara lain: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 2.46
Persentase PAD terhadap Pendapatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 (dalam juta)

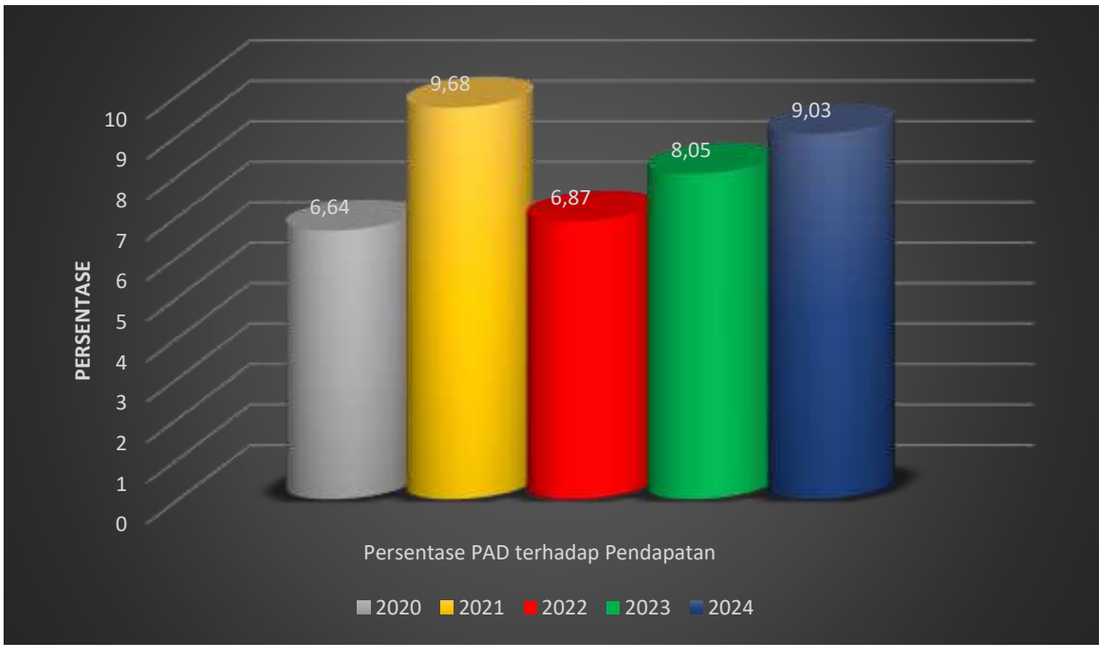
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD	101,038,192,579.64	160,860,260,332.49	108,322,526,723.15	148.540.528.998,22	161,472,410,101.49
2	Pendapatan daerah	1,521,847,391,961.56	1,662,295,506,060.49	1,577,337,109,474.15	1.845.813.897.701,22	1.787.804.179.223,49
3	Persentase PAD	6.64	9.68	6,87	8,05	9,03

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	terhadap Pendapatan					

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, persentase PAD mengalami penurunan menjadi 6,87 persen, atau turun sebesar 2,81 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 9,68 persen. Namun, pada tahun 2023, persentase PAD terhadap pendapatan kembali meningkat menjadi 8,05 persen.

Kemudian, di tahun 2024, persentase PAD kembali naik menjadi 9,03 persen, setelah sebelumnya sempat menurun pada tahun 2022. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh dinamika penerimaan seluruh komponen pendapatan daerah. Peningkatan pada tahun 2024 disebabkan oleh naiknya seluruh sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh dari Rp 148,54 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 161,47 miliar pada tahun 2024. Adapun peningkatan PAD ini tidak terlepas dari mulai pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kontribusi dari sumber-sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi, serta pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024.



Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.33
Persentase PAD terhadap Pendapatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 (dalam juta)

17) Opini BPK terhadap laporan keuangan

Secara umum, kondisi keuangan Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020 hingga 2024 berada dalam kategori yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar sesuai dengan kriteria penilaian BPK. Upaya tersebut mencakup pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan ini juga didukung melalui pelaksanaan berbagai program strategis, seperti program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah serta program pengelolaan barang milik daerah, yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Tabel 2.47
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

18) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan terhadap PDRB

Nilai tambah yang diberikan oleh lapangan usaha ini selalu meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Meskipun melambat di tahun 2024 sebesar 1,68 persen. Meskipun demikian, kontribusinya dalam perekonomian Rokan Hulu meningkat menjadi 54,70 persen. salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan harga pupuk yang menyebabkan masyarakat jarang menggunakan pupuk. Selain itu banjir yang cukup parah menjadi kendala petani dalam memanen kelapa sawit.

Tabel 2.48
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	19.566,35	23.454,97	26.629,58	28.315,49	30.985,12
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	13.652,02	14.416,17	15.141,34	15.712,23	15.975,77
3	Distribusi (persen)	54,22	55,61	54,23	54,29	54,70

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
4	Laju Pertumbuhan (persen)	3,71	5.60	5.03	3,77	1,68
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	8,84	13,52	8,10	2,47	7,62

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

19) Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Kategori pertambangan dan penggalian dirinci menjadi 4 sub kategori, antara lain: sub kategori pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, sub kategori pertambangan batubara dan lignit,sub lapangan usaha pertambangan bijih logam, dan sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Rokan Hulu hanya ada 2 sub kategori yaitu pertambangan minyak, gas dan panas bumi dan pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 2.49
Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.543,78	1.849,41	2.419,45	2.391,45	2.519,75
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	952,75	942,53	959,88	974,95	998,95
3	Distribusi (persen)	4,28	4,38	4,93	4,59	4,45
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(5,09)	(1,07)	1,84	1,57	2,46
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	(16,91)	21,10	28,46	(2,69)	2,83

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Kontribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu berada di peringkat keempat yakni sebesar 4,45 persen tahun 2024. Pada tahun 2024 laju pertumbuhannya mencapai 2,46 persen seiring banyaknya permintaan akan bahan bangunan yang berasal dari pertambangan lainnya.

20) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan tahun 2024 masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2024, Kontribusi lapangan usaha ini sedikit turun hanya sebesar

25,70 persen. Seirama dengan laju pertumbuhan melambat dari semula 3,29 persen ditahun 2023 menjadi 2,22 persen di tahun 2024. Hal ini juga sangat di pengaruhi oleh melambatnya usaha perkebunan kelapa sawit.

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	9.113,03	10.568,20	12.974,19	13.545,54	14.560,94
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	7.151,20	7.466,45	7.791,43	8,047.50	8.225,97
3	Distribusi (persen)	25,25	25,05	26,15	25,97	25,70
4	Laju Pertumbuhan (persen)	2,27	4,41	4,35	3,29	2,22
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	4,86	11,07	17,65	1,08	5,16

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020-2024 nilai tambah industri pengolahan menurut harga berlaku terus meningkat. Hal ini dikarenakan harga rata-rata TBS kelapa sawit yang menjadi bahan baku CPO juga meningkat.

21) Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB

Pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi yang terbilang kecil bagi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, namun peranannya sangat vital bagi kelangsungan lapangan usaha lainnya. Kegiatan pada kategori ini didominasi oleh kegiatan produksi listrik oleh PLN maupun pembangkit listrik swasta, sedangkan kegiatan pengadaan gas dan produksi es masih sangat kecil kontribusinya.

Tabel 2.51
Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	35,36	37,47	40,84	45,64	49,05
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	19,39	20,59	21,67	23,18	24,90
3	Distribusi (persen)	0,10	0,09	0,08	0,09	0,09
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,94	6,17	5,24	6,96	7,44

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,55	(0,20)	3,58	4,47	0,04

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Kontribusi kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 49,05 Miliar Rupiah atau sekitar 0,09 persen terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun 2020-2024.

22) Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Kategori ini juga mencakup pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2.52
Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	2,15	2,22	2,32	2,51	2,65
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1,72	1,77	1,83	1,92	1,99
3	Distribusi (persen)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4	Laju Pertumbuhan (persen)	0,65	3,08	3,53	4,93	3,15
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,22	(0,08)	0,76	3,44	2,06

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2024 relatif kecil, yaitu kurang dari 0,01 persen atau sebesar 2,65 miliar rupiah. Pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,15 persen. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah pelanggan BPAB (Badan Pengelola Air Bersih) dan pengelolaan sampah seiring bertambah padatnya pemukiman dan industri.

23) Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB

Pada tahun 2024 kontribusi kategori konstruksi mencapai 1.962,39 Miliar Rupiah atau sebesar 3,46 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan

Hulu. Selesainya beberapa proyek perbaikan infrastruktur seperti Pembangunan jalan, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan jembatan dan boxculvert mendorong pertumbuhan kategori ini. Selain itu permintaan yang tinggi akan properti juga mendorong peningkatan kontribusi kategori konstruksi.

Tabel 2.53
Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.280,26	1.381,52	1.587,32	1.841,53	1.962,39
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	749,89	776,66	830,72	896,97	947,50
3	Distribusi (persen)	3,55	3,27	3,20	3,53	3,46
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(3,23)	3,57	6,96	7,98	5,63
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,38	4,19	7,42	7,45	2,74

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2020 – 2024 yaitu berkisar 3 persen. Dengan perhitungan atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan 5,63 persen ditahun 2024. Hal ini akibat meningkatnya kegiatan konstruksi yang di tandai dengan banyaknya pembangunan proyek jembatan, jalan dan gedung baik dari pihak sipil maupun swasta.

24) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

Selama 4 tahun terakhir kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 5 persen. pada tahun 2024 Kontribusi kategori ini mencapai 3.085,23 Miliar Rupiah atau sekitar 5,45 persen.

Tabel 2.54
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.929,02	2.132,63	2.506,40	2.859,83	3.085,23
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1.106,29	1.212,16	1.366,08	1.521,25	1.597,33
3	Distribusi (persen)	5,35	5,06	5,05	5,48	5,45

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(12,75)	9,57	12,70	11,36	5,00
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	4.37	0,90	4,28	2,46	2,74

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020-2024 laju pertumbuhannya sempat mengalami kontraksi ditahun 2020 hingga -12,75 persen. kemudian tumbuh kembali ditahun 2021 dan 2024. Meskipun pada tahun 2024 mengalami perlambatan dikarenakan produksi kelapa sawit yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mengalami perlambatan produksi.

25) Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB

kategori transportasi dan pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 3 (tiga) subkategori yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Angkutan Darat, Angkutan udara serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir.

Tabel 2.55
Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	198,79	208,11	257,59	292,07	325,96
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	120.90	123,38	143,29	152,01	163,95
3	Distribusi (persen)	0,55	0,49	0,52	0,56	0,58
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(7,87)	2,05	16,14	6,09	7,85
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	5.49	2,59	6,58	6,88	3,48

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Kontribusi kategori ini mencapai 325,96 Miliar Rupiah atau sekitar 0,58 persen terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024. Laju pertumbuhan kategori ini sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 yaitu sebesar -7,87 persen. Dibandingkan tahun 2023, kategori transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan dikarenakan sudah semakin meningkat mobilitas masyarakat baik itu di dalam daerah maupun antar daerah. Sehingga pertumbuhannya di tahun 2024 sebesar 7,85 persen.

26) Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB

Tahun 2024 kategori penyediaan Akomodasi dan makan minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 154,53 Miliar Rupiah atau 0,27 persen.

Tabel 2.56
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	97,56	112,16	127,15	135,70	154,53
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	54,46	61,60	67,91	70,55	77,70
3	Distribusi (persen)	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(17,70)	13,10	10,24	3,89	10,14
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,87	1,65	2,83	2,73	3,39

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, terjadi kenaikan penyediaan akomodasi dan makan minum signifkan. Hal ini dikarenakan peningkatan occupation rate. Selain itu juga pembukaan sewa lahan dan ruko baru untuk usaha penyedian makan minum semakin banyak. Adanya sentralisasi penyedia makan minum dibeberapa titik dipusat kota juga turut berpengaruh.

27) Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi dan industri 4.0 peranan kategori ini sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah.

Tabel 2.57
Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	356,99	381,11	408,53	438,60	472,13
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	308,90	328,49	341,10	360,39	386,29
3	Distribusi (persen)	0,99	0,90	0,82	0,84	0,83
4	Laju Pertumbuhan (persen)	8.68	6,34	3,84	5,65	7,19
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	(0,09)	0,39	3,23	1,62	0,43

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Meskipun begitu, peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2020-2024 hanya kurang dari 1 (satu) persen. Pada

tahun 2024 pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023 yakni sebesar 5,65 persen menjadi 7,19 persen ditahun 2024. Hal ini dikarenakan kebutuhan Informasi dan Komunikasi seperti penggunaan telepon seluler dan pemasangan wifi menunjukkan pertumbuhan.

28) Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB

Pada tahun 2024 kategori jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi sebesar 0,81 persen bagi total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengindikasikan bahwa jasa keuangan dan asuransi menyumbang peranan yang kecil terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Selama 5 tahun terakhir kategori ini mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2024 perekonomian kategori ini mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 3,46 persen ditahun 2024.

Tabel 2.58
Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	338,76	367,75	412,43	438,82	457,28
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	229,56	236,84	244,56	253,56	262,33
3	Distribusi (persen)	0,94	0,87	0,83	0,84	0,81
4	Laju Pertumbuhan (persen)	3,88	3,17	3,26	3,68	3,46
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	(0,40)	5,22	8,61	2,62	0,72

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

29) Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB

Kategori Real estate memberikan kontribusi yang relatif kecil bagi PDRB Kabupaten Rokan Hulu dengan peranan sebesar 0,53 persen pada tahun 2024. Sumbangan kategori ini ditahun 2024 sebesar 298,32 miliar rupiah.

Tabel 2.59
Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	239,72	248,37	265,38	282,39	298,32
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	164,17	168,29	175,96	181,48	188,55
3	Distribusi (persen)	0,66	0,59	0,53	0,54	0,53
4	Laju Pertumbuhan (persen)	1,93	2,51	4,56	3,13	3,90
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,36	1,07	2,19	3,18	1,68

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cenderung naik setiap tahunnya meskipun sedikit melambat pada tahun 2023.

30) Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB

Kontribusi kategori jasa perusahaan sangat kecil terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu yakni kurang dari 1 (satu) persen untuk tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jasa profesional, ilmiah maupun teknis seperti jasa hukum, konsultan, arsitektur, akuntan dan penelitian.

Tabel 2.60
Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1,51	1,52	1,74	1,94	2,12
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	0,96	0,97	1,09	1,16	1,25
3	Distribusi (persen)	0,66	0,59	0,53	0,54	0,00
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(21,93)	1,01	12,78	6,35	7,79
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,69	(0,51)	1,77	4,98	1,08

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang sebesar 7,79 persen. Pada Tahun 2024, kegiatan persewaan alat pesta dan sejenisnya mengalami kenaikan. Kemudian semakin banyak masyarakat yang juga menggunakan jasa agen perjalanan umroh.

31) Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh adminitrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 2.61
Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	973,31	999,65	1.008,24	1.062,11	1.233,72
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	719,30	732,68	727,77	757,89	878,81
3	Distribusi (persen)	2,70	2,37	2,03	2,04	2,18
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(3,36)	1,86	(0,67)	4,14	15,96

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	3,07	0,83	1,54	1,16	0,17

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhanya signifikan sebesar 15,96 persen. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya kenaikan belanja pegawai akibat bertambahnya jumlah ASN hasil pengangkatan PPPK. Sehingga kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu yang semula 2,04 persen ditahun 2023 menjadi sebesar 2,18 persen ditahun 2024.

32) Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB

Kontribusi kategori pendidikan terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu relatif stagnan yakni dibawah satu persen. Sumbangan kategori ini ditahun 2024 sebesar 200,26 miliar rupiah.

Tabel 2.62
Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	166,65	171,41	180,44	189,84	200,26
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	98,70	100,81	104,75	108,49	113,03
3	Distribusi (persen)	0,46	0,41	0,36	0,36	0,35
4	Laju Pertumbuhan (persen)	2,11	2,14	3,91	3,57	4,18
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,05	0,70	1,31	1,59	1,25

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan kategori ini mengalami kenaikan sebesar 4,18 persen di tahun 2024. Hal ini dikarenakan jasa pendidikan seperti kursus maupun bimbingan belajar semakin banyak seiring adanya rekrutmen besar-besaran PPPK.

33) Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB

Kategori ini mencakup kegiatan penyedian jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2024 lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 5,45 persen. perubahan cuaca yang cukup ekstrim seperti fenomenan el-nino dan banjir parah yang terjadi dikabupaten Rokan Hulu menyebabkan meningkatnya jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.63
Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	83,41	92,78	97,56	109,94	118,79
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	51,68	56,91	58,68	64,26	67,77
3	Distribusi (persen)	0,23	0,22	0,20	0,21	0,21
4	Laju Pertumbuhan (persen)	10,48	10,11	3,12	9,51	5,45
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,12	1,02	1,97	2,90	2,46

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020-2024 peranan jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB Kabupaten Rokan hulu relatif stabil, berada di kisaran angka 0,20 sampai 0,23 persen.

34) Kontribusi Sektor Jasa Lainnya terhadap PDRB

Cakupan aktivitas dari kategori jasa lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa organisasi, jasa reparasi jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Perkembangan dari kategori ini biasanya terkait erat dengan kondisi pariwisata karena mencakup kegiatan kesenian hiburan dan rekreasi. Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 relatif kecil yaitu 218,50 miliar rupiah atau 0,39 persen.

Tabel 2.64
Kontribusi Sektor Jasa lainnya terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	160,34	168,18	187,92	203,16	218,50
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	100,50	104,63	115,63	122,78	130,36
3	Distribusi (persen)	0,44	0,40	0,38	0,39	0,39
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(20,71)	4,11	10,51	6,18	6,17
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,57	0,75	1,11	1,82	1,30

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Kontribusi jasa lainnya sejak 2020-2024 relatif stabil dibawah satu persen. Pada tahun 2024 berhasil tumbuh sebesar 6,17 persen. Hal ini dikarenakan semakin menigkatnya jumlah wisatawan yang datang ketempat-tempat rekreasi di Rokan Hulu, aktivitas jasa reparasi, laundry dan jasa lainnya.

35) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Tabel 2.65
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Yang Bekerja	301.675,00	327.296,00	323.597,00	277.332,00	291.157,00
2	Jumlah Penduduk	561.385,00	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio Penduduk Yang Bekerja	53,74	57,32	55,54	48,36	49,60

Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2020-2024

Pada tabel diatas dapat dilihat rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk cendrung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 rasio penduduk yang bekerja tercatat sebesar 48,36 persen meningkat menjadi sebesar 49,60 persen di tahun 2024.

36) Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 2.66
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

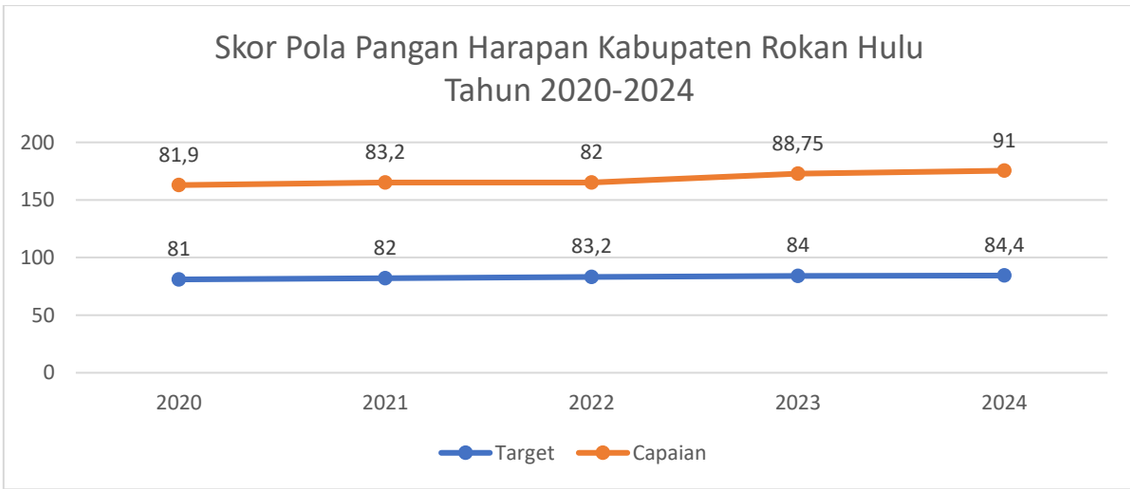
No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan	81.00	81,90	82.00	83.20	83.20	82,00	84,00	88,75	84,4	91

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2025

Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan tingkat keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah. Semakin beragam konsumsi pangan masyarakat, maka semakin baik pula kualitas gizi dan kesehatan yang dapat dicapai. Pada akhirnya, hal ini menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data pada tabel di atas, skor PPH di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan, dari 81,90 persen pada tahun 2020 menjadi 91 persen pada tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa hal yang mendukung peningkatan keragaman konsumsi pangan secara umum adalah;

a. Tersedianya pangan di tingkat pasar dan rumah tangga sudah lebih merata sehingga tersedia untuk di konsumsi;

b. Semakin tingginya kesadaran konsumsi rumah tangga untuk mengkonsumsi makanan beragam seimbang dan aman;
c. Semakin beragam ketersediaan pangan di tengah masyarakat karena sebagian pangan sudah tersedia di halaman rumah;
d. Meningkatnya pendapatan penduduk untuk mejangkau komoditas pangan



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2025

Gambar 2.34
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian.

1) Kebudayaan

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan upaya untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat. Inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian dan pembinaan kelompok akan mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu, terihat dalam kurun waktu tahun 2020-2024, jumlah grup kesenian cendrung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 348 grup kesenian meningkat menjadi 450 grup kesenian di tahun 2024. Meskipun aktivitas seni dan budaya trendnya meningkat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya menggali potensi seni dan budaya serta mendukung dan mengembangkan kelompok-kelompok seni dan budaya tersebut agar tetap lestari.

Tabel 2.67
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	348	347	434	445	450
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Adapun jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan tahun 2024 terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.68
Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

m	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
1	Rambah	102	10
2	Rambah Hilir	107	
3	Rambah Samo	23	
4	Kepenuhan	35	
5	Kepenuhan Hulu	29	
6	Tambusai	32	1
7	Tambusai Utara	15	
8	Rokan IV Koto	18	
9	Pendalian IV Koto	9	
10	Bonai Darussalam	9	
11	Kunto Darussalam	14	
13	Tandun	8	
14	Kabun	2	
15	Bangun Purba	14	
16	Ujungbatu	33	1
Jumlah		450	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Olahraga

Perkembangan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu, terihat dalam kurun waktu tahun 2020-2024, jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk terus bertambah ditahun 2020 sebanyak 937 klub olahraga menjadi 940 klub olahraga di tahun 2024. Seiring bertambahnya klub olahraga perlu dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai oleh pemerintah daerah. Adapun gedung olah raga yang telah dibangun sampai tahun 2024 sebanyak 40 unit.

Tabel 2.69
Perkembangan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	937	937	937	940	940
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	40	40	40	40	40

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel 2.70
Data Fasilitas Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	Lokasi	Pengelola
I.	Yang dikelola Pemerintah Daerah			
1	Lapangan Panjat Tebing	1	Pasir Pengaraian	KONI Rokan Hulu
2	Lapangan Tenis Lapangan	1	Pasir Pengaraian	PUPR
3	Lapangan Basket	1	Pasir Pengaraian	PUPR
II.	Yang dikelola oleh Masyarakat			
1	Lapangan Atletik	1	Ujung Batu	Masyarakat
2	Lapangan Sepak Bola	130	Tersebar di 130 Desa/Kelurahan	Masyarakat
3	Lapangan Bola Voli	25	Tersebar di 25 Desa/Kelurahan	Masyarakat
4	Lapangan Futsal	8	Tersebar di 8 Desa/Kelurahan	Masyarakat
5	Lapangan Badminton	15	Tersebar di 15 Desa/Kelurahan	Masyarakat
6	Lapangan Basket	16	Tersebar di 16 Desa/Kelurahan	Masyarakat

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan (1) pendidikan;(2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman; (5)ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

1) Pendidikan

- Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Pembinaan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak, sehingga mereka memiliki kesiapan optimal dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Pada bagian ini akan diuraikan data mengenai jumlah paud, jumlah siswa dan jumlah guru pada jenjang Taman kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB).

Tabel 2.71
Jumlah PAUD, Siswa dan Guru Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lembaga TK/KB	516	527	534	501	503
2	Jumlah murid TK/KB	134.667	15.193	11.308	16.801	16.906
3	Jumlah guru TK/KB	8,571	8.771	1.063	1.029	1.075

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Berikut tabel angka partisipasi kasar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.72
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	76.435	73.382	75.924	76.459	71.404
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76.849	75.336	75.336	74.070	74.693
	APK SD/MI	99.46	97,41	100,78	100,32	102,33
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	31.630	32.014	32.501	32.739	22.688
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	36.770	37.970	37.971
	APK SMP/MTs	85,83	87,07	88,39	87,92	88,67
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					Provinsi
	APK SMA/MA/SMK					Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup baik, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).

Pada tahun 2020, APK untuk jenjang SD/MI tercatat sebesar 99,46 persen, sementara untuk jenjang SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Tahun berikutnya, yakni 2021, APK SD/MI mengalami sedikit penurunan menjadi 97,41 persen, namun APK SMP/MTs meningkat menjadi 87,07 persen. Tren positif terus berlanjut di tahun 2022, dengan APK SD/MI mencapai 100,78 persen dan APK SMP/MTs sebesar 88,39 persen. Pada tahun 2023, APK jenjang SD/MI tercatat sebesar 100,23 persen dan APK SMP/MTs sebesar 87,92 persen. Terakhir, pada tahun 2024, APK SD/MI meningkat menjadi 102,33 persen, sedangkan APK SMP/MTs mencapai 88,67 persen. Meskipun capaian APK untuk jenjang SD/MI sudah melampaui 100 persen—yang mengindikasikan adanya partisipasi dari anak usia di luar kelompok umur resmi sekolah dasar—namun APK jenjang SMP/MTs masih berada di bawah 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah menengah pertama yang belum atau tidak lagi

bersekolah, yang dapat diartikan sebagai adanya kasus tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah pada jenjang tersebut di Kabupaten Rokan Hulu.

- Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah. Selama kurun waktu 2020 – 2024 jumlah penduduk yang lulus SD/MI relatif terus meningkat dan berfluktuatif. Angka pendidikan yang ditamatkan sampai akhir tahun 2024 jumlah lulusan SD/MI sebanyak 11.315 siswa, lulusan SMP/MTs sebanyak 7.257 siswa dan lulusan SMA/SMK/MA data tersedia di Provinsi.

Tabel 2.73
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	11,617	11.315	11.315	11.315	11.315
2	SMP/MTs	7.256	7.257	7.257	7.257	7.257
3	SMA/SMK/MA	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Rendahnya angka penduduk tamat SD/MI disebabkan oleh banyaknya penduduk yang masih berpendidikan SD/MI tidak mengikuti ujian persamaan dan belum optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian persamaan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

- Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partispasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu dan merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.74
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	76.435	76.597	77.231	64.567	65.404
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76.849	75.336	75.336	74.681	74.693

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
	APM SD/MI	99,46	101,67	102.52	100.27	94,33
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	31.630	32.654	33.206	18.943	19.348
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	36.770	37.390	37.971
	APM SMP/MTs	85,83	88,81	90,31	77,14	80,99
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	APM SMA/MA/SMK					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Pada tahun 2020, APM untuk jenjang SD/MI tercatat sebesar 99,46 persen, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Di tahun 2021, APM SD/MI meningkat signifikan menjadi 101,67 persen, sementara APM SMP/MTs juga mengalami peningkatan menjadi 88,81 persen. Pada tahun 2022, APM SD/MI kembali meningkat menjadi 102,52 persen dan APM SMP/MTs mencapai 90,31 persen. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan APM SD/MI menjadi 100,27 persen dan penurunan tajam pada APM SMP/MTs menjadi 50,66 persen. Pada tahun 2024, APM SD/MI tercatat sebesar 99,33 persen dan APM SMP/MTs kembali meningkat menjadi 80,99 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi murni pada jenjang SD/MI relatif stabil dan cukup tinggi, namun partisipasi murni pada jenjang SMP/MTs masih belum optimal. Pada tahun 2024, sekitar 19,01 persen anak usia sekolah jenjang SMP/MTs belum memanfaatkan fasilitas pendidikan formal. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan untuk angka partisipasi murni SMA/MA/SMK data tersedia di provinsi.

- Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah

yang bersesuaian. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur

Tabel 2.75
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah(APS)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	jumlah murid usia 7-12 tahun	76.500	76.502	72.477	76.499	65.404
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76,840	75.336	75.336	74.070	74.693
	APS SD/MI	99,56	101,55	96,21	103,28	102,33
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun	31.662	32.127	22.449	32,739	19.348
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	36.770	37.390	37.971
	APS SMP/MTs	85,92	87,37	61,05	87,54	99,12
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	APS SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap kelompok umur pendidikan seluruh jenjang pendidikan cenderung berfluktuatif dari tahun ketahun. Untuk angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun 2020 sebesar 99,56 persen mengalami peningkatan menjadi 101,55 persen di tahun 2021. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2020 sebesar 85,92 persen naik menjadi 87,37 persen ditahun 2021. Selanjutnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 96,21 persen di tahun 2022 dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 102,28 ditahun 2023. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2022 sebesar 61,05 persen naik menjadi 87,54 persen ditahun 2023. Terakhir tahun 2024 Angka Partisipasi. Sekolah (APS) Kabupaten Rokan Hulu

untuk tingkat SD/MI sebesar 102,33 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 99,12 persen. Sementara Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 data tersedia di Provinsi.

- Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS selama kurun waktu 2020 -2024 cenderung meningkat dan berfluktuatif. Hal ini karena pengaruh kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sedangkan Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2020-2024 data tersedia di provinsi. Lebih rinci realisasi capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.76
Angka Putus Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	486	485	486	489	267
2	SMP/MTs	408	402	406	409	241
3	SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2025

- Angka Kelulusan

Sementara itu indikator lain dalam urusan Pendidikan adalah angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTS yang sudah mencapai 100 persen selama lima tahun terakhir Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran di sekolah dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik dalam memberikan suasana belajar yang nyaman dan sesuai dengan target.

Tabel 2.77
Angka Kelulusan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100	100
3	SMA/MA/SMK	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2025

- Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. Selama kurun

waktu tahun 2020 ketersediaan gedung sekolah diseluruh jenjang pendidikan tercatat sebanyak 740 unit dan mengalami peningkatan ditahun 2024 menjadi 1015 unit.

Tabel 2.78
Jumlah Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Gedung Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD/TK	236	236	261	253	505
2	SD/MI	372	373	370	373	374
3	SMP/MTs	135	137	134	132	136
4	SMA/MA/SMK	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov
Jumlah		740	743	765	758	1015

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2025

- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.79
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	369	368	370	380	374
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76,849	75.336	74.681	74.681	74.693
	Rasio	48,02	48,85	49,54	50,88	50,77
2	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	131	134	135	138	136
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	37.390	37.390	37.971
	Rasio	35,55	36,44	36,11	36,90	35,81
3	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	Rasio					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 51 fasilitas pendidikan sekolah dasar, artinya tiap satu fasilitas pendidikan sekolah dasar menampung 374 siswa. Setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 36 fasilitas pendidikan menengah pertama, artinya tiap satu fasilitas pendidikan SMP menampung 136 siswa.

- Rasio guru terhadap murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada diKabupaten Rokan Hulu, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.80
Rasio Murid dan guru Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	Jumlah guru	4,150	4.038	5.044	4.038	4.713
	Jumlah murid	72.959	72.477	71.563	76.456	71.404
	Rasio murid per guru	17,58	17,95	14,19	18,93	15,15
2	SMP/MTs					
	Jumlah guru	2.138	1.613	2.191	1.602	1.960
	Jumlah murid	21.420	22.449	22.584	32.739	22.688
	Rasio murid per guru	10,02	13,92	10,31	20,43	11,58

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI adalah 15,15 artinya satu guru melayani 16 murid, menurun dibandingkan tahun 2023. Sementara rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 11,58 tahun 2024, artinya satu guru melayani 23 murid, juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023.

- Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM)

Tabel 2.81
Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B dan C Dari Dapodikmas
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran 2021/2023

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Terakreditasi	Program Kesetaraan		
					Paket A	Paket B	Paket C
1	P9962967	SPNF SKB Rokan Hulu	Rambah Hilir	B	-	Ada	Ada
2	P9959995	PKBM Zaliyah	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
3	P9908421	PKBM Intan Gumalo	Kabun	B	Ada	Ada	Ada
4	P9908862	PKBM Maju Bersama	Tambusai Utara	B	Ada	Ada	Ada
5	P9908420	PKBM Bina Insan Mandiri	Bangun Purba	B	Ada	Ada	Ada

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Terakreditasi	Program Kesetaraan		
					Paket A	Paket B	Paket C
6	P9908722	PKBM Jannatul Makwa	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
7	P9908851	PKBM Giat Mitra	Tambusai	B	Ada	Ada	Ada
8	P2970207	PKBM Bina Karya	Pendalian	B	Ada	Ada	Ada
9	P9934286	PKBM Damai Sejahtera	Ujungbatu	B	Ada	Ada	Ada
10	P9926316	PKBM Maju Cendikia Gemilang	Rambah	C	Ada	Ada	Ada
11	P9908422	PKBM Bina Ilmu	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
12	P9908419	PKBM Bangun Karya Mandiri	Bangun Purba	C	-	Ada	Ada
13	P9970440	PKBM Tunas Baru Al-Hikmah	Ujungbatu	C	Ada	Ada	Ada
14	P9970093	PKBM Ibu Pertiwi	Kunto Darussalam	B	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari tiga indikator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar (Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), dan pemenuhan SPM pendidikan pada Pendidikan kesetaraan.

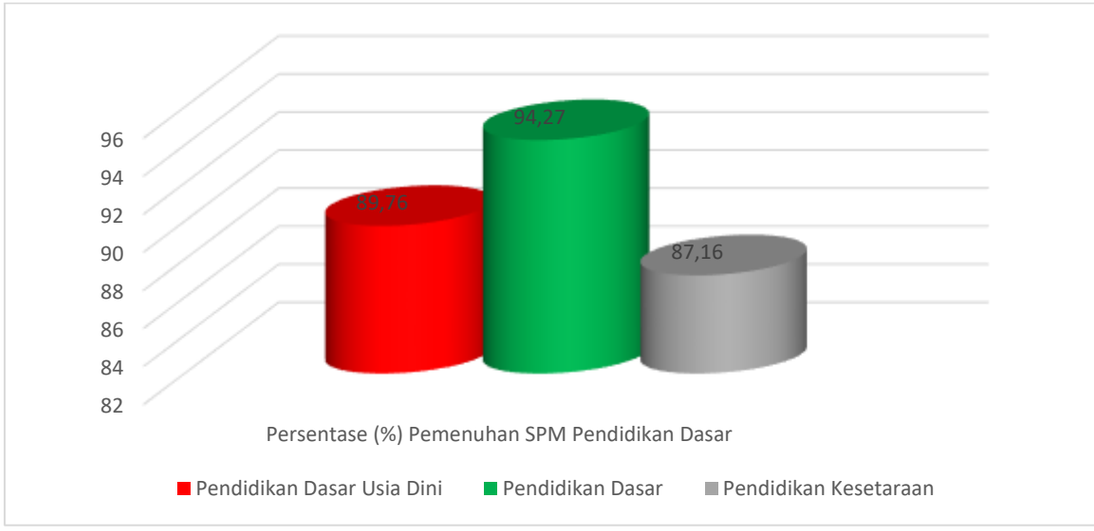
Target pencapaian SPM oleh daerah untuk Bidang Pendidikan di tahun 2024 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Pendikan Dasar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,87%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	71,34%	Setiap Tahun (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang	Indikator minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
		Rata Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	59,61%	Setiap tahun			akan terpenuhi)	dann sumber daya manusia sesuai dengan yang di tetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	87,16%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	35,81%	Setiap Tahun (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan terpenuhi)	
		Rata Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	64,97%	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89,76%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	48,79	Setiap Tahun (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan terpenuhi)	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.35
Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2) Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata, Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Angka Kematian Bayi (AKB).

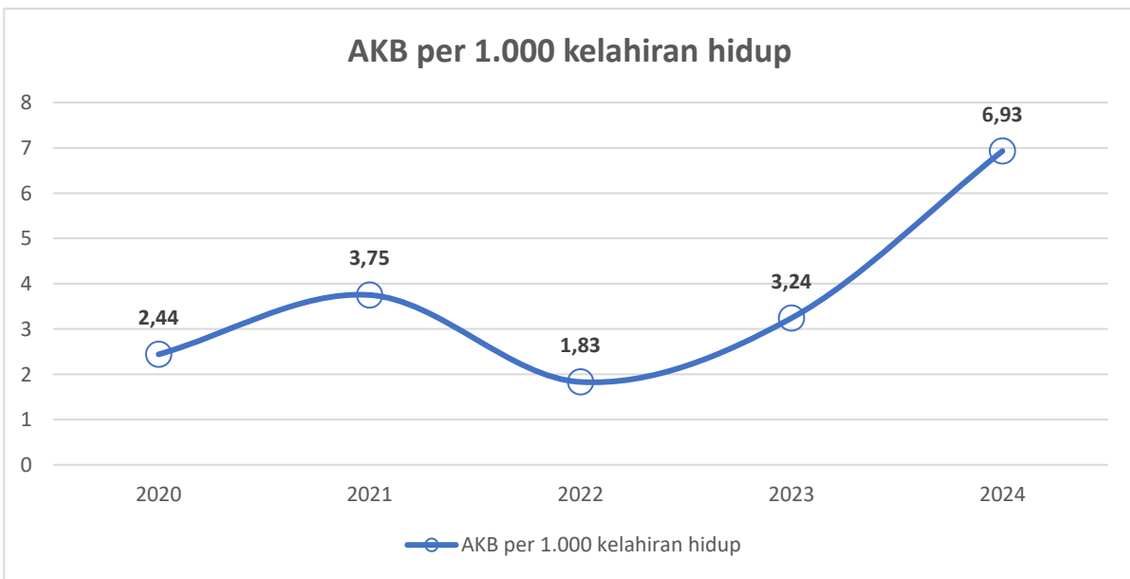
Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun yang dinyatakan dari 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan disuatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua sibayi. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, angka kematian bayi (AKB) mengalami fluktuatif. Data kematian bayi diperoleh dari survei Dinas Kesehatan dipuskesmas dan RSUD Kabupaten Rokan Hulu dengan melibatkan para kader posyandu. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan AKB menjadi 37 orang dari 15.177 kelahiran hidup atau 2,44 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2021 terjadi peningkatan AKB sebesar 41 orang dari 10.939 kelahiran hidup atau 3,75 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan AKB sebesar 20 orang dari 10.941 kelahiran hidup atau 1,83 per 1.000 kelahiran hidup. selanjutnya pada tahun 2023 meningkat kembali dengan AKB sebesar 35 orang dari 10.792 kelahiran hidup atau 3,24 per 1.000 kelahiran hidup. Terakhir tahun 2024 terjadi peningkatan kembali dengan AKB sebesar 68 orang dari 9.814 kelahiran hidup atau 6,93 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.83
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	37	41	20	35	68
2	Kelahiran hidup (orang)	15.177	10.939	10.941	10.792	9.814
3	AKB per 1.000 kelahiran hidup	2,44	3,75	1,83	3,24	6,93

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Bila dilihat dari gambar di atas, AKB per 1000 kelahiran hidup mengalami fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2024, dimana pada tahun 2024 sebesar 6,93 meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 3,24. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi mengalami fluktuatif, dimana tercatat 9.814 di tahun 2024 menurun dari tahun 2023 sebesar 10.792. angka ini mencerminkan kinerja Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai adanya pemerataan status gizi dan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil serta ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan kesehatan, dan upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. dengan meningkatnya derajat kesehatan ibu dapat berdampak terhadap penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).



Gambar 2.36
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

- Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Indikator lain yang menjadi tolak ukur dalam urusan wajib di bidang kesehatan adalah Angka Kematian Neonatal (AKN). Angka kematian Neonatal di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 tercatat lebih tinggi dibanding dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir belum sepenuhnya optimal. Meskipun begitu pada tahun 2022 angka kematian Neonatal mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berkut.

Tabel 2.84
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi(berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	36	31	17	35	64
2	jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	15.177	10.939	10.941	10.792	9.814
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	2,37	2,83	1,55	3,24	6,52

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas tanpa memperhitungkan lama kelahiran per 100.000 kelahiran hidup (tidak termasuk kasus insidentil atau kecelakaan).

Angka kematian ibu menggambarkan status kesehatan secara umum, gizi, pendidikan dan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. AKI sampai saat ini diperoleh dari berbagai pelaporan bidan – bidan desa dan dari pelayanan kesehatan yang melibatkan para kader posyandu diwilayah kerja masing – masing puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu melalui survei kohort dan autopsi verbal.

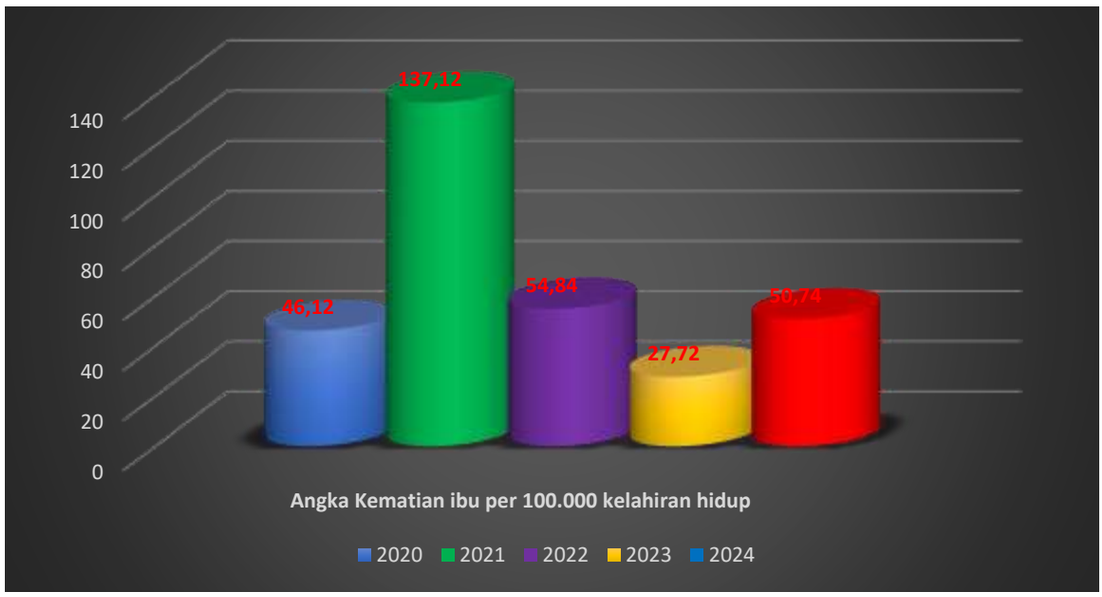
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.85
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	7	15	6	3	5
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	15.177	10.939	10.941	10.823	9.854
3	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	46,12	137,12	54,84	27,72	50,74

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Indikator selanjutnya dalam urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu sebesar 46,12 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan menjadi 137,12 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2023 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu secara signifikan menjadi 27,72 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Terakhir tahun 2024 terjadi kenaikan Angka Kematian Ibu secara signifikan menjadi 50,74 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kematian ibu hamil.



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025
Gambar 2.37
Perkembangan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

- Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah rasio posyandu per satuan balita. Rasio posyandu per satuan balita tercatat pada tahun 2020 sebesar 4,83 per seribu balita. Rasio posyandu per satuan balita kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 10,50 per seribu balita. Terakhir pada tahun 2024 peningkatan jumlah balita yang diikuti dengan kenaikan jumlah posyandu membuat pelayanan posyandu meningkat menjadi 12,09 posyandu per seribu balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Rasio Posyandu persatuan Balita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu	472	454	472	594	594
2	Jumlah balita	97.762	43.223	56.310	55.560	49.117
3	Rasio posyandu persatuan balita (1000)	4,83	10,50	8,38	10,69	12,09

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Jika dilihat untuk rasio posyandu per satuan balita kecamatan pada tahun 2024 dapat diketahui bahwa Rasio posyandu per satuan balita pada puskesmas Rambah Samo I kecamatan Rambah Samo adalah yang tertinggi Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 18,81. Atau dapat diartikan bahwa puskesmas Rambah Samo I memiliki layanan posyandu lebih banyak untuk melayani balita. Sedangkan puskesmas Tambusai Utara I kecamatan Tambusai Utara memiliki Rasio posyandu yang lebih sedikit per satuan balita yaitu sebesar 6,62 persen. Dengan kata lain, pada kecamatan Tambusai Utara sedikit posyandu melayani lebih banyak balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Rasio posyandu persatuan balita Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita
1	Rambah	Rambah	45	3.596	12,51
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	37	2.111	17,53
		Rambah Hilir II	16	1.455	11,00
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	36	1.914	18,81
		Rambah Samo II	20	1.091	18,33
4	Kepenuhan	Kepenuhan	27	2.098	12,87
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	16	1.759	9,10
6	Tambusai	Tambusai I	38	4.280	8,88
		Tambusai II	15	1.530	9,80

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	33	4.984	6,62
		Tambusai Utara II	32	2.671	11,98
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	28	1.585	17,67
		Rokan IV Koto II	11	601	18,30
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	16	1.102	14,52
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	17	1.083	15,70
11	Ujungbatu	Ujungbatu	36	4.434	8,12
12	Tandun	Tandun I	22	1.752	12,56
		Tandun II	14	867	16,15
13	Bangun Purba	Bangun Purba	23	1.730	13,29
14	Kabun	Kabun	40	2.431	16,45
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	29	2.366	12,26
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	30	2.437	12,72
		Kunto Darussalam II	12	1.240	9,68
	Jumlah		594	49.117	12,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kecamatan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan Kabupaten / Kota. Pada tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu jumlah Puskesmas sebanyak 23 unit dengan rincian puskesmas perawatan 11 unit dan non perawatan 12 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 4 per 100.000 penduduk. Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 25.522 penduduk atau setiap 100.000 penduduk ada + 4 -5 puskesmas. Hal ini berarti sarana puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencukupi sesuai target nasional yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk, semakin tinggi rasio puskesmas terhadap penduduk, makin rata penyebaran dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Berdasarkan data pada tabel dibawah menggambarkan rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 2.88
Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah puskesmas	21	22	22	23	23
2	Jumlah puskesmas pembantu	78	78	78	78	80
3	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
4	Rasio puskesmas persatuan penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Rasio pustu persatuan penduduk	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2024 hal ini menyebabkan meningkatnya rasio rumah sakit perjumlah penduduk menjadi 0,010. Berikut rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.89
Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah sakit umum (pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah rumah sakit swasta	4	4	5	5	5
3	Jumlah seluruh rumah sakit	5	5	6	6	6
4	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
5	Rasio rumah sakit per jumlah penduduk	0,007	0,009	0,010	0,010	0,010

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terlihat belum mengalami peningkatan yang berarti selama periode 2020-2024. Rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2020 sebanyak 0,05 mengalami peningkatan menjadi 0,18 pada tahun 2024. Peningkatan rasio ini ditenggarai karena jumlah dokter yang terus bertambah

pada tahun 2020 hingga 2024. Untuk lebih rinci rasio dokter per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Rasio Dokter persatuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dokter	26	33	35	40	109
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio dokter persatuan penduduk (1000)	0.05	0,06	0,06	0,07	0,18

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis dan tenaga kesehatan seringkali diartikan memiliki makna yang sama. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab III Pasal 11 butir 2, Tenaga medis adalah bagian dari Tenaga Kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2024 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,68 meningkat cukup besar dibanding tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan rasio sebesar 0,05, 0,06, 0,10 dan 0,13. Ini berarti bahwa pada tahun 2024 hanya terdapat sekitar 0,68 tenaga medis per seribu penduduk atau dengan kata lain ada sekitar tujuh tenaga medis yang melayani seribu penduduk pada tahun 2024. Lebih rinci Rasio tenaga medis per satuan penduduk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga medis	26	33	58	75	401
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio tenaga medis persatuan penduduk (1000)	0,05	0,06	0,010	0,13	0,68

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2020-2024 terakhir terlihat mengalami penurunan secara signifikan. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan telah mencapai 7,8 persen dari total komplikasi kebidanan yang terjadi pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan

adanya penurunan kinerja dalam menangani komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di Kabupaten Rokan Hulu	100	376	414	849	177
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu	1771	2.567	5,073	2.510	2.259
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	5,64	14,65	8,16	33,8	7,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat sudah baik. Dimana pada tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 78,24 persen. Namun, pada tahun 2021 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami kenaikan menjadi 91,91 persen. Terakhir pada tahun 2022, 2023 dan 2024 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan menjadi 90,12, 90,07 dan 87,69 persen. Hal ini menandakan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan kurang baik. Lebih jelas mengenai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	14.457	11.799	10.909	10.807	9.854
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	18.478	12.837	12.105	11.998	11.237
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	78,24	91,91	90,12	90,07	87,69

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan desa/kelurahan UCI

Indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan salah satu target keberhasilan program imunisasi yang menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata di seluruh desa/kelurahan. Adapun target dari Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ini adalah sebesar 80 persen dari total keseluruhan desa/kelurahan. Maka dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa pada tahun 2024 target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum tercapai, karena baru 86,9 persen dari total 145 desa/kelurahan yang terkategori UCI. Artinya, dibanding tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan kinerja dalam mencapai target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI.	82	88	102	95	126
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	145	145	145	145	145
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI	56.6	60,7	70,3	65,5	86,9

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Balita gizi buruk menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum sejahtera hidup. selain itu tentunya masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Oleh sebab itu penanganan gizi buruk terutama perawatan

menjadi lebih utama dalam pelayanan kesehatan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.95
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat prevalensi gizi buruk yang mendapat perawatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dicapai 100,00 persen dengan kata lain balita yang menderita gizi buruk seluruhnya mendapat perawatan.

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacteriumtuberculosis. sebagian besar kuman TB menyerang paru tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau ekstra paru yaitu antara lain TB Tulang, kulit dan kelenjar, penyakit ini menyebar dan ditularkan melalui udara (Droplet Infeksi). Jumlah semua kasus TB pada tahun 2024 yaitu 1.192 kasus. sedangkan Pada tahun 2023 perkiraan penemuan kasus baru BTA positif untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah 580 kasus.

Tabel 2.96
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	799	839	527	580	1.192
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu	2.204	2.474	8.522	2.679	1.654
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	36,25	33,91	6,18	21,6	72,1

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 kasus TBC per 100.000 penduduk sebanyak 60 kasus. Pada tahun 2021 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) meningkat drastis menjadi

sebanyak 142 kasus penderita TBC per seratus ribu penduduk, dan kemudian mengalami penurunan menjadi 90 kasus TBC per 100.000 penduduk dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) menjadi 101 kasus. Terakhir tahun 2024 Tingkat prevalensi Tuberkulosis meningkat kembali menjadi 242 kasus TBC per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.97
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya kasus penderita TBC	381	809	527	580	1.422
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	68	142	90	101	242

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 terlihat pada beberapa kecamatan terdapat jumlah kasus TBC yang cukup tinggi, sementara pada beberapa kabupaten lain jumlah kasus TBC sudah rendah. Kecamatan Rambah menjadi kecamatan dengan kasus TBC terbanyak pada tahun 2024 mencapai 494 kasus baru dan lama. Banyaknya jumlah kasus TBC ini membuat Kecamatan Rambah menjadi kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling tinggi, yaitu mencapai 905 penderita TBC per 100.000 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling rendah adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah kasus sebanyak 14 kasus per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.98
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Puskesmas	Kecamatan	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk
1	Rambah	Rambah	494	54584	905,0
2	Rambah Hilir I	Rambah Hilir	33	24757	133,3
3	Rambah Hilir Ii		16	17686	90,5
4	Rambah Samo I	Rambah Samo	23	22429	102,5
5	Rambah Samo II		10	12726	78,6
6	Kepenuhan	Kepenuhan	29	28729	100,9
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	27	19123	141,2
8	Tambusai I	Tambusai	67	45122	148,5
9	Tambusai II		24	17875	134,3
10	Tambusai Utara I	Tambusai Utara	86	58482	147,1
11	Tambusai Utara II		62	31323	197,9
12	Rokan Iv Koto I	Rokan IV Koto	20	18564	107,7
13	Rokan Iv Koto II		9	6368	141,3
14	Pendalian Iv Koto	Pendalian IV Koto	15	12919	116,1
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	14	12691	110,3
16	Ujungbatu	Ujungbatu	321	51989	617,4
17	Tandun I	Tandun	23	20543	112,0
18	Tandun II		9	12949	69,5
19	Bangun Purba	Bangun Purba	39	20325	191,9
20	Kabun	Kabun	16	28506	56,1
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	30	28720	104,5
22	Kunto Darussalam I	Kunto Darussalam	36	28587	125,9
23	Kunto Darussalam II		19	18489	102,8
		Jumlah	1.422	586.994	242

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Untuk Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Rokan Hulu pada kurun waktu lima tahun terakhir cendrung berfluktuatif dan menurun. Hal ini terlihat dari jumlah pasien TB yang meninggal tahun 2024 sebesar 8 kematian dalam seratus ribu penduduk. Lebih jelas

mengenai Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	18	16	18	12	8
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3,21	2,80	3,09	2,09	1,36

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Mengoptimalkan dan mempertahankan kualitas Directly Observe Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan salah satu strategi yang paling ampuh dalam penanganan dan penurunan jumlah kasus baru Tuberkulosis. Dimana Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2020 sudah mulai membaik, yaitu mencapai 36,25 persen. Ini artinya peran DOTS sudah mulai optimal dalam penanganan TB di Rokan Hulu. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi kenaikan Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menjadi 72,07 persen. Lebih jelas mengenai Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	799	534	527	580	1.192
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	2.204	3.677	8.522	2.679	1.654
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	36,25	14,52	6,18	21,65	72,07

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Pada tahun 2024 proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS tercatat sebanyak 1.191 pasien, dengan proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh 99,92 persen terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2020 dengan tingkat kesembuhan sebanyak 460 pasien atau 57,57 persen Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.101
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	460	324	173	180	1.191
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	799	534	527	580	1.192
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	57,57	60,67	32,83	31,03	99,92

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020-2024 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terbukti dari jumlah penanganan DBD yang sudah mencapai 100 persen dari total kasus yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	162	86	230	139	218
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah	162	86	230	139	218
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Tujuan umum JPKMM adalah terselenggaranya jaminan pemeliharaan masyarakat miskin secara berhasil guna dan berdaya guna. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan khusus yang meliputi: (i) terlaksananya registrasi masyarakat miskin; (ii) terlaksananya pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pemanfaatan dan taraf kesehatan masyarakat miskin; (iii) terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020-2024 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal Ini terbukti dari pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.103
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100.00 persen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi merujuk pada persentase bayi yang menerima perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang diberikan oleh dokter, bidan, atau perawat dengan kompetensi klinis di suatu wilayah kerja setidaknya sebanyak 4 kali dalam periode tertentu. Kunjungan bayi ini mencakup pelayanan kesehatan rutin seperti tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI eksklusif dan dini, serta pencegahan infeksi melalui perawatan mata, tali pusat, kulit, dan imunisasi. Cakupan kunjungan bayi ini mencakup bayi yang berusia antara 29 hari hingga 11 bulan, dan dapat dilakukan di berbagai tempat seperti sarana pelayanan kesehatan (seperti polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit), atau melalui kunjungan petugas ke rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan, dan sejenisnya.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian mendekati 100 persen pada tahun 2024. Peningkatan cakupan kunjungan bayi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.104
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	13.654	10.939	10.941	10.784	9.627
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	17.132	10.977	12.106	10.792	9.813
3	Cakupan kunjungan bayi	79.70	99,65	90,38	99,93	98,10

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu

Cakupan puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Peningkatan cakupan puskesmas perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap layanan Kesehatan. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 Cakupan puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,37 persen, meningkat menjadi 1,44 persen pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 masih pada angka 1,44 persen. Ini artinya setiap kecamatan sudah memiliki setidaknya satu puskesmas, dan ada beberapa kecamatan yang memiliki dua puskesmas.

Tabel 2.105
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah puskesmas	22	22	22	23	23
2	Jumlah puskesmas pembantu	84	84	84	84	80
3	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
4	Jumlah desa/kelurahan	145	145	145	145	145
5	Cakupan puskesmas	1,37	1,37	1,37	1,44	1,44
6	Cakupan puskesmas pembantu	57.93	57,93	57,93	57,93	55,17

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sedangkan cakupan pembantu puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa. Cakupan pembantu puskesmas merujuk pada jumlah penduduk atau wilayah yang mendapat pelayanan dari seorang tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan dokter untuk melaksanakan tugas medis di puskesmas. Cakupan puskesmas pembantu dalam kurun waktu 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebesar 57,93 persen dan menurun menjadi 55,17 pada tahun 2024, dimana dari total 145 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baru 80

desa/kelurahan yang memiliki Puskesmas pembantu pada tahun 2024. Lebih rinci mengenai cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu diKabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel diatas.

- Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat sudah sebanyak 79,10 persen dari total 13.429 anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Persentase ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 47,62 persen, dan pada tahun 2022 kenaikan cukup jauh dibanding tahun 2020, yaitu hanya sebanyak 85,17 persen anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Kemudian tahun 2023 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami penurunan menjadi 78,67 persen. Terakhir pada tahun 2024 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat secara signifikan menjadi 101,94 persen. Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya peningkatan ini antaralain meningkatnya kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi campak terhadap anak untuk mencegah penularan sehingga terhindar dari komplikasi dan telah tersedianya vaksin campak gratis difasilitas kesehatan. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.106
Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	13.429	8.024	12.481	11.890	10.881
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	16.976	16.849	14.654	15.113	10.780
3	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	79.1	47,62	85,17	78,67	100,94

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Terlihat persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak telah mencapai 100,94 persen. Ada beberapa kecamatan yang pemberian

imunisasi campaknya sangat tinggi diatas 90 persen diantaranya kecamatan Tambusai Utara. Sedangkan kecamatan dengan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak paling rendah adalah Kecamatan Kabun dengan persentase pemberian imunisasi campak sebesar 74,52 persen dari total anak usia 1 tahun di wilayah kecamatan tersebut. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.107
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
1	Rambah	Rambah	947	991	95,56
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	388	450	86,22
3		Rambah Hilir II	282	321	87,85
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	459	407	112,78
5		Rambah Samo II	196	231	84,85
6	Kepenuhan	Kepenuhan	851	820	103,78
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	327	325	100,62
8	Tambusai	Tambusai I	974	1062	91,71
9		Tambusai II	657	569	115,47
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	653	522	125,10
11		Tambusai Utara II	427	347	123,05
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	340	337	100,89
13		Rokan IV Koto IV	79	116	68,10
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	530	519	102,12
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	412	336	122,62
16	Ujungbatu	Ujungbatu	228	231	98,70
17	Tandun	Tandun I	982	944	104,03
18		Tandun II	377	373	101,07
19	Bangun Purba	Bangun Purba	179	235	76,17
20	Kabun	Kabun	275	369	74,53
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	426	518	82,24
22	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	662	522	126,82
23		Kunto Darussalam II	230	235	97,87
	Jumlah		10.881	10.780	100,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Non polio AFP rate per 100.000 penduduk

AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat pada kelumpuhan. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio.

Pada tahun 2020 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk sebesar 0 kasus per seratus ribu penduduk. Kemudian Pada tahun 2021 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebesar 1,15 kasus per seratus ribu penduduk. Terakhir pada tahun 2024 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebesar 7,36 kasus per seratus ribu penduduk. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.108
Non Polio AFP rate Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus AFP Non polio yang dilaporkan	0	2	13	14	17
2	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	0	173.088	169.854	165.961	231.113
3	Non Polio AFP rate	0	1,15	7,65	8,44	7,36

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024 jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan hanya pada beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Tambusai, Tambusai Utara, Rokan IV Koto, Tandun, Bangun Purba, Bonai Darussalam dan Kunto Darussalam. Selebihnya pada 7 kecamatan lain tidak ada kasus SFP polio yang dilaporkan. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.109
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	jumlah penduduk < 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
1	Rambah	Rambah	2	21.256	9,41
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	0	9.641	0,00
3		Rambah Hilir II	0	6.887	0,00
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	0	8.734	0,00
5		RAMBAH SAMO II	1	4.956	20,18
6	Kepenuhan	Kepenuhan	0	11.188	0,00
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	7.446	0,00

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	jumlah penduduk < 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
8	Tambusai	Tambusai	2	17.571	11,38
9	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	5	6.961	71,83
10		TAMBUSAI UTARA II	0	22.772	0,00
11	Rokan Iv Koto	Rokan IV Koto I	1	12.198	8,20
12		ROKAN IV KOTO II	1	7.229	13,83
13	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	0	2.480	0,00
14	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	0	5.031	0,00
15	Ujungbatu	Ujungbatu	0	4.942	0,00
16	Tandun	Tandun I	1	20.245	4,94
17		Tandun II	1	8.000	12,50
18	Bangun Purba	Bangun Purba	1	5.043	19,83
19	Kabun	Kabun	0	7.915	0,00
20	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	1	11.101	9,01
21	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1	11.184	8,94
		Kunto Darussalam II	0	11.133	0,00
	Jumlah		17	231.113	7,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Indikator selanjutnya yang terdapat dalam urusan wajib kesehatan adalah Cakupan balita pneumonia yang ditangani. Pada tahun 2020 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan sebesar 14,9 persen. Pada tahun 2021 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan menurun menjadi 12,01 persen. Lalu pada tahun 2022 turun menjadi 2,99 persen. Dan pada tahun 2023 penanganan balita yang terkena pneumonia naik menjadi 3,80 persen. Terakhir pada tahun 2024 turun kembali balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan menjadi 1,65 persen. Jumlah penangan balita yang terkena pneumonia jelas masih belum optimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berbagai penyebab yang mungkin menjadi kendala adalah fasilitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan yang belum memadai, kendala biaya dari pasien hingga rendahnya kesadaran/pengetahuan pasien untuk membawa penderita pneumonia ke fasilitas kesehatan yang memadai. Terlepas dari semua

itu dibutuhkan kerja sama yang aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus pneumonia balita ini. Lebih jelas mengenai Cakupan balita pneumonia yang ditangani dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.110
Cakupan Balita Pneumonia ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Balita Pneumonia yang ditangani	284	229	57	76	35
2	Jumlah Balita perkiraan penderita pneumonia	1.904	1.906	1.904	2001	2.122
3	Cakupan Balita Pneumonia ditangani	14.9	12,01	2,99	3,80	1,65

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk cakupan balita pneumonia yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 terlihat masih banyaknya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita dikecamatan yang belum ditangani. Dimana hanya 8 kecamatan jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani yang mencapai 1,65 persen. Padahal pada 8 kecamatan lainnya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita cukup tinggi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.111
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
1	Rambah	Rambah	0	178	0,00
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	0	84	0,00
3		RAMBAH HILIR II	0	54	0,00
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	0	84	0,00
5		Rambah Samo II	1	34	2,95
6	Kepenuhan	Kepenuhan	1	152	0,66
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	75	0,00
8	Tambusai	Tambusai	1	225	0,44
9			0	123	0,00
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	0	99	0,00
11		TAMBUSAI UTARA II	0	65	0,00
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	0	66	0,00
13		Rokan IV Koto II	0	22	0,00
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	0	114	0,00

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	15	86	17,38
16	Ujungbatu	Ujungbatu	5	49	10,24
17	Tandun	Tandun I	2	233	0,86
18		Tandun II	0	68	0,00
19	Bangun Purba	Bangun Purba	7	36	19,50
20	Kabun	Kabun	0	60	0,00
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	92	0,00
22	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	0	84	0,00
		Kunto Darussalam II	3	39	7,62
	Jumlah		35	2122	1,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Penderita diare yang ditangani

Penyakit Diare adalah perubahan konsistensi feses selain dari frekwensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya atau bila BAB lembek atau cair bahkan dapat berupa air saja (tiga kali atau lebih dalam satu hari), adapun penyebab terjadinya diare antara lain bakteri, virus, parasit (jamur, cacing, protozoa), keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia, kurang gizi, Alergi terhadap susu dan Immunodefisiensi. Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terjadi penurunanan yang signifikan dari tahun ketahun. Dimana, pada tahun 2020 Persentase Penderita diare yang ditangani sebesar 11,10 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada tahun 2021 Persentase Penderita diare yang ditangani turun menjadi sebesar 0,6 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2022 Persentase Penderita diare yang ditangani meningkat signifikan menjadi sebesar 7,1 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2023 Persentase Penderita diare yang ditangani meningkat menjadi sebesar 8,4 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Terakhir pada tahun 2024 Persentase Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,9 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih

rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Persentase Penderita diare yang ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	2.086	122	1.377	1.625	837
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	18.795	18.794	19.270	19.427	21.455
3	Persentase Penderita diare yang ditangani	11,1	0,6	7,1	8,4	3,9

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk persentase penderita diare yang ditangani per kecamatan secara rata-rata masih rendah, yaitu rata-rata 3,90 persen saja. Di beberapa puskesmas terdapat pelayanan yang sangat rendah, yaitu pada Kecamatan Tambusai (Puskesmas Tambusai II), Rokan IV Koto (Puskesmas Rokan IV Koto I), Kecamatan Tandun (Puskesmas Tandun I) dan Kecamatan Rambah Hilir (Puskesmas Rambah Hilir II). Padahal jumlah perkiraan penderita diare di beberapa kecamatan ini ada yang mencapai 2.354 orang yaitu di Kecamatan Tandun (Puskesmas Tandun I). Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	PersentasePenderita diare yang ditangani
1	Rambah	Rambah	54	1.795	3,01
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	28	849	3,29
3	0	Rambah Hilir II	4	545	0,73
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	68	851	7,99
5	0	Rambah Samo II	47	343	13,7

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	PersentasePenderita diare yang ditangani
6	Kepenuhan	Kepenuhan	76	1.539	4,94
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	51	758	6,73
8	Tambusai	Tambusai I	59	2.280	2,59
9		Tambusai II	1	1.242	0,08
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	13	999	1,3
11	0	Tambusai Utara II	30	660	4,55
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	2	665	0,3
13	0	Rokan IV Koto Ii	22	222	9,91
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	58	1.157	5,01
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	67	873	7,68
16	Ujungbatu	Ujungbatu	47	494	0,81
17	Tandun	Tandun I	10	2.354	0,42
18	0	Tandun II	31	687	4,51
19	Bangun Purba	Bangun Purba	79	363	21,76
20	Kabun	Kabun	20	603	3,32
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	26	933	2,79
22	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	27	845	3,2
	0	Kunto Darussalam II	17	398	4,27
	Jumlah		837	21.455	3,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Tingkat kematian akibat malaria

Berdasarkan data dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta Pengendalian Lingkungan (PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, angka kejadian malaria per 1.000 penduduk (Annual Parasite Incidence/API) tercatat sebesar 0,090 pada tahun 2022 dan menurun menjadi 0,070 pada tahun 2023. Angka kesakitan malaria tercatat 0 per 1.000 penduduk. Selain itu, selama periode tahun 2022 hingga 2024, tidak ditemukan kasus kematian akibat malaria (Case Fatality Rate/CFR malaria = 0) di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terus dilakukan untuk menjaga agar angka kejadian malaria tetap rendah. Langkah-langkah tersebut meliputi deteksi dini kasus dan

penatalaksanaan yang cepat dan tepat, sehingga penyebaran dan komplikasi penyakit dapat dicegah secara efektif.

- Prevalensi HIV/AIDS

Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Rokan Hulu jika dibanding dengan total populasi telah berada dalam kategori sangat tinggi. Dimana sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 prevalensi HIV/AIDS cendrung berfluktuatif. Secara jumlah penderita menunjukkan adanya tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah pasien HIV dan AIDS berjumlah 6 orang, kemudian mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 122 orang penderita HIV/AIDS pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 18 orang penderita HIV/AIDS dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 30 orang penderita HIV/AIDS. Terakhir pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 41 orang penderita HIV/AIDS . Lebih rinci mengenai Persentase Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.114
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6	122	18	30	41
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi.	0.0008	0.021	0.003	0.005	0.007

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun lima tahun terakhir sudah menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hingga tahun 2020 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 80,31 persen dari total sasaran sebanyak 15.394 ibu hamil. Pada tahun 2024 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 meningkat menjadi 88,14 persen dari total sasaran. Menurunnya cakupan kunjungan Ibu Hamil pada tahun 2021-2023 ditenggarai salah satunya karena menurunnya jumlah posyandu di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan

kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.115
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	15.394	12.024	11.590	11.428	9.955
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	19.169	12.837	12.683	12.550	11.294
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4.	80,31	93,7	91,4	91,06	88,14

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sementara itu untuk Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 terlihat masih belum merata. Kecamatan dengan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 paling tinggi adalah kecamatan Tambusai Utara (Puskesmas Tambusai Utara I) dengan cakupan mencapai 100 persen dari total sasaran. Selain itu kecamatan Rokan IV koto (Puskesmas Rokan IV Koto I) dan kecamatan Bangun Purba (Puskesmas Bangun Purba) juga menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 sangat tinggi dangan capaian sebesar 99,72 dan 99,74 persen dari total sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, pada kecamatan Bonai Darussalam cakupan kunjungan ibu hamil K4 hanya sebesar 51,88 persen dari total sasaran. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.116
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
1.	Rambah	Rambah	1005	1.052	95,53
2.	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	429	476	90,13
3.	0	Rambah Hilir II	271	337	80,42
4.	Rambah Samo	Rambah Samo I	389	427	91,10
5.	0	Rambah Samo II	173	244	70,90

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
6.	Kepenuhan	Kepenuhan	517	548	94,34
7.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	268	362	74,03
8.	Tambusai	Tambusai	775	862	89,91
9.	Tambusai II		284	342	83,04
10.	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1110	1.110	100,00
11.	0	Tambusai Utara II	541	593	91,23
12.	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	352	353	99,72
13.	0	Rokan IV Koto II	102	122	83,61
14.	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	197	244	80,74
15.	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	225	241	93,36
16.	Ujungbatu	Ujungbatu	984	995	98,89
17.	Tandun	Tandun I	367	389	94,34
18.	0	Tandun II	160	245	65,31
19.	Bangun Purba	Bangun Purba	388	389	99,74
20.	Kabun	Kabun	372	540	68,89
21.	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	276	532	51,88
22.	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	465	541	85,95
23.	0	KUNTO DARUSSALAM II	305	350	87,14
	Jumlah		9.955	11.294	88,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan pelayanan nifas

Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari. 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan, dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Diupayakan kunjungan nifas ini dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan di posyandu dan dilakukan bersamaan pada kunjungan bayi.

Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu. 2) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya. 3) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan. 4) pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2 x 24 jam), dan 5) pelayanan KB pasca persalinan.

Untuk Cakupan pelayanan nifas di kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selama 2020-2024 tidak ada cakupan pelayanan dibawah 75 persen. Cakupan pelayanan nifas yang baik ini menunjukkan adanya pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan pasca persalinan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.117
Cakupan pelayanan nifas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	14.457	11.799	10.909	10.823	9.854
2	seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	18.478	12.261	12.105	12.105	11.236
3	Cakupan pelayanan nifas	78.2	96,23	90,12	90,21	87,70

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tidak jauh berbeda, Cakupan pelayanan nifas per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan merata antar kecamatan. Tidak ada kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 60 persen, sehingga boleh dikatakan cakupan pelayanan nifas di kecamatan cukup merata. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.118
Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jumlah total ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas
1.	Rambah	Rambah	994	1.047	94,94
2.	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	368	473	77,80
3.	0	Rambah Hilir II	287	335	85,67
4.	Rambah Samo	Rambah Samo I	385	425	90,59
5.	0	Rambah Samo II	178	243	73,25
6.	Kepenuhan	Kepenuhan	519	545	95,23
7.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	356	360	98,89
8.	Tambusai	Tambusai	741	858	86,36
9.		Tambusai II	291	340	85,59
10.	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1.065	1.105	96,38
11.	0	Tambusai Utara II	531	589	90,15
12.	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	350	352	99,43
13.	0	Rokan IV Koto II	112	121	92,56
14.	Pendalian IV Koto	Pendalian Iv Koto	185	243	76,13
15.	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	225	240	93,75
16.	Ujungbatu	Ujungbatu	984	990	99,39
17.	Tandun	Tandun I	315	387	81,40
18.	0	TANDUN II	177	244	72,54
19.	Bangun Purba	Bangun Purba	387	387	100,00
20.	Kabun	Kabun	356	537	66,29
21.	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	409	529	77,32
22.	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	344	538	63,94
23.	0	Kunto Darussalam II	295	348	84,77
	Jumlah		9.854	11.236	87,70

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian.

Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksisepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gr, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 4,39 persen dari total keseluruhan neonatus dengan komplikasi. Setiap tahun kinerja penanganan neonatus dengan komplikasi terus menunjukkan perbaikan kinerja hingga menjadi 100 persen neonatus berkomplikasi yang ditangani pada tahun 2024. Lebih rinci mengenai Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	100	109	49	365	101
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	2.277	1.641	825	365	101
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	4,39	6,64	5,94	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan pelayanan anak balita

Setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun, pemberian vitamin A 2 kali dalam setahun, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024 cakupan pelayanan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 37.078 dengan persentase 75,49 persen mengalami penurunan di bandingkan dari tahun 2023 sebesar 39.124 atau 108,14 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penurunan jumlah anak balita yang terjangkau oleh layanan kesehatan.

Tabel 2.120
Cakupan pelayanan anak balita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	41.871	36.731	40.836	39.124	37.078

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	84.765	57.206	56.310	36.178	49.117
3	Cakupan pelayanan anak balita	49.4	64.21	72.52	108,14	75,49

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sudah termasuk dalam kategori baik dengan cakupan sebesar 75,49 persen. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada beberapa kecamatan Cakupan pelayanan anak balita masih terkategori sangat rendah. Misalnya pada puskesmas Kecamatan Kepenuhan yang memiliki Cakupan pelayanan anak balita hanya sebesar 19,35 persen dari total jumlah balita yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pelayanan kesehatan, yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar seluruh anak balita di Kabupaten Rokan Hulu dapat terlayani dengan optimal. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Puskesmas	Kecamatan	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jumlah seluruh anak balita	Cakupan pelayanan anak balita.
1	Rambah	Rambah	3.195	3.596	88,85
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	1.861	2.111	88,16
3		Rambah Hilir II	1.293	1.455	88,87
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	1.923	1.914	100,47
5		Rambah Samo II	768	1.091	70,39
6	Kepenuhan	Kepenuhan	406	2.098	19,35
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	1.588	1.759	90,28
8	Tambusai	Tambusai I	3.239	4.280	75,68
9		Tambusai II	1.530	1.530	100,00
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	3.283	4.984	65,87
11		Tambusai Utara II	2.382	2.671	89,18
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	1545	1.585	97,48
13		ROKAN IV KOTO II	335	601	55,74
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	801	1.102	72,69

No	Puskesmas	Kecamatan	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jumlah seluruh anak balita	Cakupan pelayanan anak balita.
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	1.011	1.083	93,35
16	UJUNGBATU	UJUNGBATU	4.365	4.434	98,44
17	TANDUN	TANDUN I	1.601	1.752	91,38
18		TANDUN II	608	867	70,13
19	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	872	1.730	50,40
20	KABUN	KABUN	1.560	2.431	64,17
21	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	732	2.366	30,94
22	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	972	2.437	39,89
23		KUNTO DARUSSALAM II	1.208	1.240	97,42
	Jumlah		37.078	49.117	75,49

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah upaya memberikan tambahan makanan dan untuk menambah asupan gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik. Makanan memegang peranan penting untuk tumbuh kembang anak, karena anak yang sedang tumbuh kebutuhannya berbeda dengan orang dewasa. Pemberian makanan tambahan merupakan suatu program untuk mencegah semakin memburuknya status kesehatan dan gizi masyarakat terutama keluarga miskin yang diakibatkan adanya krisis ekonomi. Tujuan dari PMT tersebut mempertahankan dan meningkatkan status gizi anak balita terutama dari keluarga miskin, meringankan beban masyarakat serta memotivasi ibu-ibu untuk datang ke posyandu. Untuk disarankan pemberian makanan tambahan diberikan secara terus menerus hingga kelompok sasaran dinyatakan berstatus gizi yang baik sesuai aturan kesehatan.

Tabel 2.122
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 6-59 bulan yang mendapat MP-ASI	440	761	56.309	4.881	6.528

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah seluruh anak usia 6-59 bulan	440	761	56.309	5.024	6.804
3	Cakupan pemberian makanan pada pendamoingan ASI pada anak usia 6-59 bulan	100.0	100.0	100.0	97,15	95,94

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat di Kabupaten Rokan Hulu cukup berfluktuasi. Dimana pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat tercatat sebesar 60,5 persen. Pada tahun 2021 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat meningkat menjadi sebesar 97,0 persen. Pada tahun 2022 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat mengalami penurunan sebesar 71,7. Pada tahun 2023 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat meningkat kembali menjadi 89,84 persen. Terakhir pada tahun 2024 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat meningkat secara signifikan menjadi 95,29 persen dari total keseluruhan siswa SD/sederajat. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta optimalisasi peran tenaga kesehatan dan sekolah dalam pelaksanaan program penjaringan kesehatan. Lebih rinci mengenai Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.123
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	15.620	324	31.407	19.642	32.710
2	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	25.839	334	43.791	21.864	34.328
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	60,5	97,0	71,7	89,84	95,29

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dimana pada tahun 2024 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sudah mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2021-2023 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) menurun menjadi 50 persen. Hal ini disebabkan jumlah pelayanan gawat darurat level 1 hanya terjadi penambahan sebesar 1 unit, jika dibandingkan dengan jumlah sarana kesehatan (RS) yang penambahannya 4 unit. Lebih rinci Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.124
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan gawat darurat level 1	2	3	3	3	6
2	Jumlah RS	2	6	6	6	6
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	50	50	50	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan desa/kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam adalah desa/kelurahan yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan <24 jam oleh Kabupaten terhadap KLB pada periode/kurun waktu tertentu. Pada tahun 2020 tidak terdapat desa/kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam. Pada tahun 2021 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu terdapat 1 kasus dan Pada tahun 2022 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu meningkat menjadi 4 kasus. Dan pada tahun 2023 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu menurun menjadi 3 kasus. Terakhir pada tahun 2024 Jumlah

KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu turun kembali menjadi 1 kasus.

Tabel 2.125
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	0	1	4	3	1
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0	1	4	3	1
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang baik. Dimana Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 79,70 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 99,65 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 90,38 persen. Dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 98,93 persen. Terakhir pada tahun 2024 cakupan kunjungan bayi sedikit menurun menjadi 98,61 persen. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Rokan Hulu terus menunjukkan perbaikan dan konsistensi yang baik. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.126
Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	13.654	10.939	10.941	10.784	9.677
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	17.132	10.977	12.106	10.792	9.813
3	Cakupan kunjungan bayi	79.70	99,65	90,38	99,93	98,61

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Prevalensi Stunting Balita

Berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2018 prevalensi stunting balita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 27,3 persen. Sedangkan prevalensi stunting Rokan Hulu berdasarkan data Studi Status

Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tingkat prevalensi stunting sebesar 24,37 jika dibanding data sebelumnya maka terjadi penurunan sebesar 2,93 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu naik sebesar 1,43 menjadi 25,8 persen (Akibat pandemi covid-19) dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022 data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) turun 3,8 persen menjadi 22 persen, Sementara itu, berdasarkan hasil dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 tercatat sebesar 21,4 persen. Angka tersebut masih berada dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 20,1 persen.

Tabel 2.127
Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Prevalensi stunting Balita	24,37	25,80	22	15,9	21,4

Sumber: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) dan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2024

Sejalan dengan hal tersebut, penilaian kinerja konvergensi stunting, yang didasarkan pada implementasi 8 aksi konvergensi oleh Pemerintah Kabupaten dan dinilai oleh Tim Provinsi Riau, memperlihatkan fluktuasi dalam pencapaian:

- Tahun 2019 (untuk aksi tahun 2018), Kabupaten Rokan Hulu memperoleh nilai C.
- Tahun 2020 (aksi tahun 2019), nilai meningkat menjadi 70, dari dua kabupaten yang dinilai.
- Tahun 2021 (aksi tahun 2020), memperoleh nilai 76, dan berada di peringkat ketiga dari lima kabupaten.
- Tahun 2022 (aksi tahun 2021), peringkat ketujuh dari 12 kabupaten/kota.
- Tahun 2023 (aksi tahun 2022), kinerja meningkat signifikan dengan nilai 94 dan peringkat keempat dari 12 kabupaten/kota.
- Namun, tahun 2024 (aksi tahun 2023), peringkat menurun menjadi peringkat ke-12 dari 12 kabupaten/kota.

Meskipun terdapat penurunan dalam peringkat kinerja pada tahun 2024, capaian prevalensi stunting yang terus menurun menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan masih cukup efektif.

Anak stunting di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 berjumlah 273 anak, dengan rincian per kecamatan lokus stunting sebagai berikut:

Tabel 2.128
Data Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Anak
1	Kecamatan Rambah	Desa Tanjung Belit	12
2	Kecamatan Rambah Hilir	Desa Muara Musu	16
3	Kecamatan Bangun Purba	Desa Bangun Purba Desa Bangun Purba Barat Desa Bangun Purba Timur Jaya	21 29 39
4	Kecamatan Tambusai	Desa Tambusai Timur	30
5	Kecamatan Rokan IV Koto	Desa Cipang Kiri Hulu Desa Cipang Kanan	62 8
6	Kecamatan Kunto Darussalam	Desa Pasir Indah	10
7	Kecamatan Bonai darussalam	Desa Bonai	16
8	Kecamatan Pendalian IV koto	Desa Suligi	12
9	Kecamatan Kabun	Desa Bencah Kesuma	18
Jumlah			273

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Standart Pelayanan Minimal Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar teknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal .Dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan target capaian SPM bidang kesehatan 100% untuk setiap indikatornya. Target pencapaian SPM oleh daerah untuk bidang kesehatan di tahun 2024 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2.129
Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Kesehatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			80.16 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					77.59 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	62.46 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	11296	8819	2477	78.07 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.14 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani (1)	Jumlah Total Yang Terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	75.68%
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	11296	8819	2477	78.07 %
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	11296	8819	2477	78.07 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	11296	8819	2477	78.07 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	11296	8819	2477	78.07 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	11296	8819	2477	78.07 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil :	Paket	11296	551	10746	4.88 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	Pemeriksaan Glukoprotein Urin					
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	11296	4626	6670	40.95 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	11296	8819	2477	40.95 %
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		11296	8819	2477	78.07 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	11 . Gel USG	Botol	310	50	260	16.13 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	367	367	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	425	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	115	115	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	72	0	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua,	Orang	1129	8819	2477	78.07%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	Dua kali pada trimester ketiga)					
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					89.30 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.15 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	11237	9854	1383	87.69 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.15 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	95.74 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	11296	9854	1442	87.23 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	11296	9854	1442	87.23 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11296	9854	1442	87.23 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	367	367	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	425	425	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	115	115	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	9 .Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	72	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	Orang	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					86.86 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayan	Yang Belum Terlayani	68.13 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	10959	9333	1626	85.16 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.73 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	85.16 %
	1 . Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10959	9333	1626	85.16 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	10959	9333	1626	85.16 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10959	9333	1626	85.16 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	10959	9333	1626	85.16 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Blita Muda (MTBM)	Orang	10959	9333	1626	85.16 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10959	9333	1626	85.16 %
	7 . Media Promosi Komunikasi	Paket	23	23	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	Informasi dan Edukasi (KIE)					
	8 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	367	367	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	425	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	115	115	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	95	95	0	100.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					76.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.65 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	50617	37111	13506	73.32 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.19 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	90.96 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	23	23	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	50617	37111	13506	73.32 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	50617	37111	13506	73.32 %
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	2772	2684	88	96.83 %
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	38235	38235	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	10959	10447	512	95.33 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	10780	10497	283	97.37 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang	10780	10258	522	95.16 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	10780	8845	1935	82.05 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	10780	10780	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	15113	8050	7063	53.27 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	15113	11044	4069	73.08 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	84305	59424	24881	70.49 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	23	23	0	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	23	23	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	367	367	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	425	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	72	72	0	100.00 %
	20 . Tenaga kesehatan : Guru PAUD	Orang	50	50	0	100.00 %
	21 . Tenaga Non kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	150	150	0	100.00 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					58.28 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	42.30 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	21874	11566	10308	52.88 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.98 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	79.91 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	21874	11566	10308	52.88 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	21874	11566	10308	52.88 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	21874	11566	10308	52.88 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	21874	1695	20179	7.75 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	21874	4800	17074	21.94 %
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	14699	7349	7350	50.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb	Alat	23	23	0	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	240	240	0	100.00 %
	9 . Media promosi kesehatan	Paket	23	23	0	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	9680	9680	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	313	313	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	425	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	14 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	72	72	0	100.00 %
	15 . Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	115	115	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	95	95	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Guru	Orang	50	50	0	100.00 %
	18 . Tenaga Non kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	150	150	0	100.00 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					69.04 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	50.86 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	394047	250532	143515	63.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.18 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani (3)	90.90 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	45	45	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	45	45	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	144	144	0	100.00 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	394047	250532	143515	63.58 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	394047	250532	143515	63.58 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	23	223127	131774	62.87 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	45	223127	131774	62.87 %
	9 . Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	23	223127	131774	62.87 %
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	150	150	0	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	11294	11294	0	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	288	288	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	425	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	72	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga	Orang	95	95	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	Kesehatan Masyarakat					
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	150	150	0	100.00 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					93.83 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.13 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	150382	141230	9152	93.91 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.70 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani(2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	93.48 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	23	23	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	23	23	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	23	23	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	23	23	0	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	151	23	128	15.23 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	1	1	0	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	288	288	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	425	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	72	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	95	95	0	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	150	150	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					60.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	41.19 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	119180	61368	57812	51.49 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.19 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	95.96 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	3	3	0	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	119180	61368	57812	51.49 %
	3 . Tensimeter	Unit	45	45	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1	1	0	0 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	288	288	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	425	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	72	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	50	50	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	115	115	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	95	95	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5258	5258	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	5258	5258	0	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	144	144	0	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)	Unit	5258	5258	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet					
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	23	23	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	288	23	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	425	23	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	23	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Kefarmasian	Orang	115			
	10 . Tenaga kesehatan : Kesehatan Masyarakat	Orang	95	23	0	100.00 %
	11 . Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	23	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi	Orang	85	0	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Laboratorium Medik (ATLM)					
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					89.12 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.42 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	892	774	118	86.77 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.71 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	98.53 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Jenus	892	774	118	86.77 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	23	23	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	23	23	0	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Media	23	23	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	288	288	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	23	23	0	100.00 %
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	23	23	0	100.00 %
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	23	23	0	100.00 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	8930	8930	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum	100.00 %

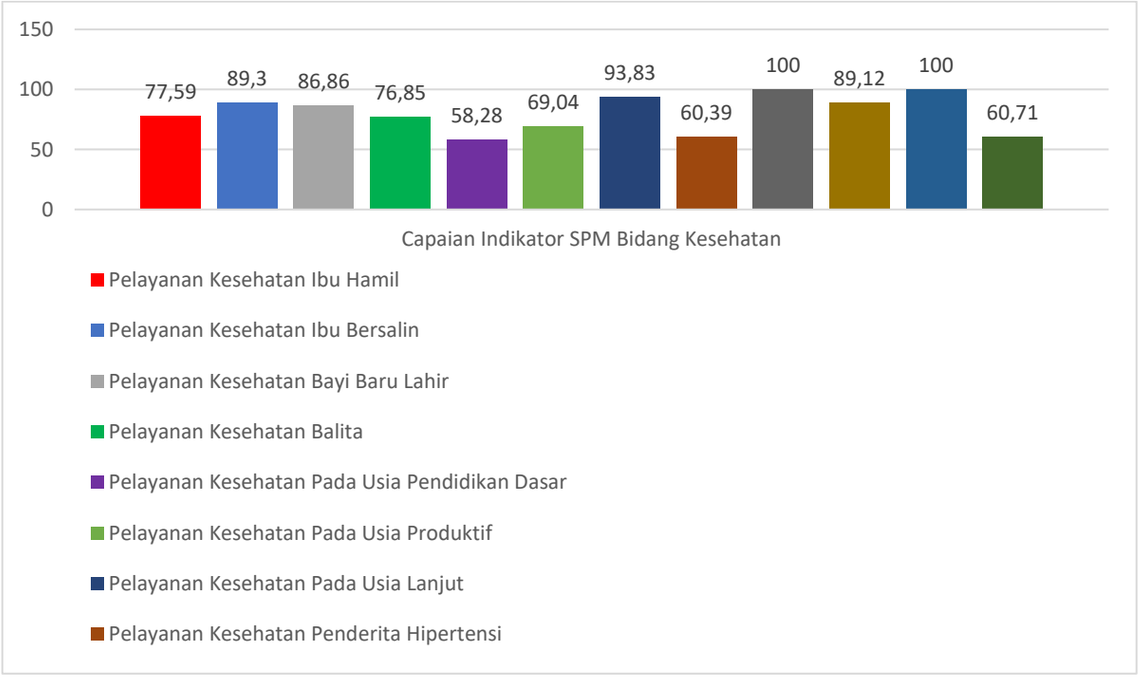
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			dilayani (1)		terlayani (3)	
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	23	23	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	60	60	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	1337	1337	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	8930	8930	0	100.00 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Test	8930	8930	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	23	23	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	8 . Tuberkulin	Vial	200	200		
	9 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	288	288	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	361	361	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	115	115		100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	95	95		100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	85	85	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	6	6	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	150	150	0	100.00 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					60.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	42.50 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	20602	10944	9658	53.12 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.22 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	91.08 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Media KIE (Lembar Balik,	Paket	31	31	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	Leaflet, Poster, Banner)					
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test	15575	10944	4631	70.27 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	15575	10944	4631	70.27 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	15575	10944	4631	70.27 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	288	288	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	425	425	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	361	361	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	85	85	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	95	95	0	100.00 %
	10 . Tenaga nonkesehatan	Orang	23	23	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.38
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan

3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan berkondisi baik

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal. Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, meliputi: jalan arteri primer, jalan

kolektor primer, dan jalan lokal primer. Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu adalah 1.875,41 km, Jenis permukaan jalan kabupaten, mayoritas memiliki jenis permukaan kerikil dengan panjang 949,568 km, permukaan aspal sepanjang 467,785 km yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jalan dengan jenis permukaan tanah sepanjang 413,024 km dan permukaan lainnya sepanjang 45,033 km.

Tabel 2.130
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Jenis Permukaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal	395,94	433,76	427,75	439,08	467,785
2	Kerikil	1.687,77	975,08	1.167,26	1.054,12	949,568
3	Tanah	65,65	370,2	179,52	280,89	413,024
Panjang jalan (km)		2.140,36	1.818,28	1.818,28	1.818,28	1.875,41
1	Kayu	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit
2	Beton	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit
3	Besi	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit
4	Semi Permanen	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
Jumlah jembatan (unit)		267	267	267	267	267

Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025 dan Dinas PUPR

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Adapun kondisi jalan mayoritas berada pada kondisi rusak berat (1.240,52 km). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu cenderung menurun terlihat dari berkurangnya panjang jalan yang berada pada kondisi baik dari 339,37 km menjadi hanya 334 km, diikuti juga dengan pertambahan panjang jalan yang berada pada kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahalnya biaya transportasi. Rendahnya persentase jaringan jalan dalam kondisi baik pada akhirnya akan mempengaruhi investasi di Rokan Hulu. Perusahaan akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya logistik yang tinggi.

Tabel 2.131
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kondisi baik	357,53	368,94	355,43	347,23	334
2	Panjang jalan seluruhnya	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86	1.875,41

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025 dan Dinas PUPR

- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Indikator kondisi jalan kabupaten yang masuk dalam kategori mantap ditunjukkan oleh ruas jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: Kpts.600/BMP/134/2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hulu, dengan total panjang jalan kabupaten mencapai 2.140,356 km. Pada tahun 2024, persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 75,98 persen, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 60,55 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan infrastruktur jalan yang cukup pesat, baik melalui pembangunan jalan baru maupun peningkatan kualitas jalan yang sudah ada. Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan sarana transportasi darat yang lebih baik dan layak.

Tabel 2.132
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	1.015,38	989,404	707,694	717,394	450,473
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap (km)	1.124,99	828,880	1.110,590	1.100,890	1.424,937
3	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.140,37	1.818,28	1.818,28	1.818,28	1.875,41
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	47,44	54,414	38,921	39,454	24,02
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap	52,56	45,59	61,08	60,55	75,98

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu,2025

- Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Tabel 2.133
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Jenis Permukaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panjang jalan	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86	1.875,41
2	Jumlah penduduk	718.321	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1 : 309	1 : 245	1 : 250	1 : 247	1: 313

Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024 dan Dinas PUPR

Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.875,41 km. Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk menunjukkan perbandingan antara panjang jalan yang tersedia dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar beban aksesibilitas infrastruktur jalan terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, semakin banyak jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap kilometer jalan, yang berarti tingkat keterjangkauan infrastruktur semakin rendah. Pada tahun 2024, ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mencapai rasio 1 : 313, yang berarti bahwa setiap 1 km jalan melayani sekitar 313 penduduk.

- Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Tabel 2.134
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	81,44	88,85	90,10	89,49	90,64

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dan BPS Provinsi Riau

- Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan,

menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan.Sampai tahun 2024 panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 35.193,57 meter,yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan.

Tabel 2.135
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	19.401,75	18.431,66	18.431,66	23.094,06	35.193,57

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) lokasi irigasi di Kabupaten Rokan Hulu dan Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada, Sampai dengan tahun 2020-2024 panjang saluran irigasi dikabupaten Rokan Hulu 29.790,00 km yang terdiri atas saluran irigasi primer, irigasi skunder,dan tersier dan luas lahan pertanian budidaya seluas 320,90 Ha dengan rasio 92,83 persen.

Tabel 2. 136
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang saluran irigasi	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00
2	Luas lahan budidaya pertanian	320.90	320.90	320.90	320.90	320.90
3	Rasio Jaringan Irigasi	92.83	92.83	92.83	92.83	92.83

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Indikator lain yang cukup penting dalam menggambarkan kondisi urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah persentase irigasi dalam

kondisi baik. Irigasi sebagai sumber pengairan utama lahan pertanian tentu harus selalu dijaga dalam kondisi baik, agar dapat mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2020-2021 tercatat sebesar 69,81 persen, tahun 2022 persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 78,90 persen dan pada tahun 2023 kondisi irigasi dalam kondisi baik meningkat kembali menjadi 80,90 persen.

Terakhir, pada tahun 2024 kondisi irigasi dalam kondisi baik jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 82,6 persen.

Tabel 2.137
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	3.251	3.251	1.036	1.062,26	1.084,58
2	Luas irigasi kabupaten	4.657	4.657	1.313	1.313	1.313
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69.81	69.81	78.90	80,90	82,6

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Salah satu indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang adalah indikator Rasio bangunan ber -IMB persatuan bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah bangunan ber -IMB tahun bersangkutan dibagi jumlah bangunan pada tahun bersangkutan.

Tabel 2.138
Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bangunan ber – IMB	581	96	35	25	120
2	Jumlah bangunan	16.768	16.768	16.768	16.768	16.768
3	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Air Minum

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, sebanyak 134.884 KK telah memperoleh akses air minum dari total 169.810 KK, atau sebesar 79,43 persen. Angka ini meningkat pada 2021

menjadi 142.475 KK (80,85 persen), namun sedikit menurun secara persentase pada 2022 menjadi 78,15 persen, meskipun jumlah KK berakses air tetap hampir sama.Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam proporsi akses, mencapai 89,41persen, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah total KK dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada 2024, persentase tersebut kembali turun ke 80,64 persen seiring bertambahnya jumlah KK menjadi 170.292 dan menurunnya jumlah KK berakses air menjadi 137.317.

Tabel 2.139
Proporsi Jumlah Kepala Keluarga Yang Mendapatkan Akses Air Minum
Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan akses air minum	134.884	142.475	142.549	146.517	137.317
2	Jumlah kepala keluarga	169.810	176.215	182.415	163.862	170.292
3	Persentase kepala keluarga berakses air minum	79,43	80,85	78,15	89,41	80,64

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel 2.140
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih
Dan Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Akses Terhadap
Air Minum Layak Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	74,81	77,84	80,30	84,30	96,38
2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak	85,32	92,17	91,12	90,75	93,45

* Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau

Berdasrkan tabel diatas selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan dalam hal kualitas dan akses terhadap air minum bagi rumah tangga. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih terus meningkat dari 74,81persen pada tahun 2020 menjadi 84,30 persen pada tahun 2023. Sementara itu, akses rumah tangga terhadap air minum layak mengalami kenaikan yang relatif stabil. Dari 85,32 persen pada tahun 2020, angka ini melonjak menjadi 92,17 persen pada 2021, dan meskipun sempat sedikit menurun pada 2022 dan 2023 (masing-

masing 91,12 persen dan 90,75 persen), akses kembali meningkat pada 2024 mencapai 93,45 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, cakupan pelayanan air bersih dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Saat ini, Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) telah dibangun di 16 kecamatan dengan kapasitas terpasang sebesar 425 liter per detik (l/d). Namun, terdapat 4 SPAM IKK di 4 kecamatan yang tidak berfungsi. 3 SPAM IKK sama sekali belum operasional yaitu di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 10 l/d, Kecamatan Bonai Darussalam sebesar 20 l/d, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu sebesar 20 l/d. Sementara 1 SPAM IKK lainnya yakni Kecamatan Kabun tidak menunjukkan adanya pertumbuhan sambungan rumah (SR) dengan kapasitas sebesar 10 l/d. Akibatnya, terjadi idle capacity (kapasitas menganggur) sebesar total 60 l/d di tingkat kabupaten. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih melalui berbagai strategi, antara lain: peningkatan kapasitas dan cakupan layanan, pembangunan prasarana air bersih khususnya di wilayah pedesaan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air yang tersedia dengan mengaktifkan kembali kapasitas terpasang yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.141
Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu

No.	IKK	Kelurahan/Desa	Kapasitas IPA (L/det)					Jumlah Air (M3/Tahun)				Jlh SR yang dilayani
			Terpasang	Berfungsi	Tidak Berfungsi	Produksi	Idle	Terproduksi	Terdistribusi	Terjual	Kehilangan Air	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKK RAMBAH	Desa Pematang Berangan	70	70	0	70	0	410	373	287	86	1883
		Desa Pawan	20	20	0	20	0					
2	SPAM IKK TANDUN I	Desa Tandun	10	10	0	10	0	97	89	74	15	741
		Desa Bono Tapung	20	20	0	15	5					
3	SPAM IKK UJUNG BATU I	Kelurahan Ujung Batu	10	10	0	10	0	87	79	63	16	461
		Desa Ngaso	50	50	0	35	15					
4	SPAM IKK TAMBUSAI	Kelurahan Tambusai Tengah	25	10	15	10	15	162	147	123	25	763
5	SPAM IKK RAMBAH HILIR	Desa Rambah	30	30	0	20	10	75	68	57	11	963
6	SPAM IKK KEPENUHAN	Desa Kepenuhan Tengah	20	20	0	10	10	8	7	6	620	34
7	SPAM IKK RAMBAH SAMO	Desa Rambah Samo Barat	20	20	0	10	10	6	5	5	459	119
8	SPAM IKK BANGUN PURBA	Desa Bangun Purba Timur Jaya	20	20	0	12	8	18	16	14	2	200
9	SPAM IKK PAGARAN TAPAH	Desa Pagaran Tapah	10	0	10	0	10	-	-	-	-	
10	SPAM IKK KUNTO DARUSSALAM	Desa Kota Lama	20	20	0	10	10	11	10	9	874	105
11	SPAM IKK KABUN	Desa Kabun	10	10	0	6	4	2	2	2	82	0
12	SPAM IKK PENDALIAN IV KOTO	Desa Pendalian	10	10	0	8	2	10	9	9	859	58
13	SPAM IKK ROKAN IV KOTO	Desa Koto Ruang	20	20	0	10	10	16	15	13	1	91
14	SPAM IKK TAMBUSAI UTARA	Desa Tambusai utara	20	20	0	12	8	69	63	52	10	295

No.	IKK	Kelurahan/Desa	Kapasitas IPA (L/det)					Jumlah Air (M3/Tahun)				Jlh SR yang dilayani
			Terpasang	Berfungsi	Tidak Berfungsi	Produksi	Idle	Terproduksi	Terdistribusi	Terjual	Kehilangan Air	
15	SPAM IKK BONAI DARUSSALAM	Desa Sontang	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
16	SPAM IKK KEPENUHAN HULU	Desa Pekan Tebih	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
	T O T A L		425	360	65	268	157	970.616	882.376	713,016	3060.466	5713

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024 jumlah pelanggan air bersih adalah sebanyak 28.565 pelanggan, Kecamatan Rambah menjadi kecamatan dengan jumlah terbanyak diantara kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah pelanggan dari Kecamatan Rambah adalah sebesar 9.415 pelanggan. Sementara itu Kecamatan Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam dan Kabun selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggan dari kecamatan tersebut. Kemudian dari besaran volume air yang disalurkan, selama tahun 2024 Kecamatan Rambah menjadi kecamatan terbanyak dengan jumlah volume air yang disalurkan sebesar 753 m3. Sementara itu dikarenakan tidak adanya pelanggan di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam dan Kabun, maka volume air juga tidak ada disalurkan pada ketiga kecamatan tersebut. Total jumlah volume air yang disalurkan selama tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 2.285 m3. Lebih rinci untuk realisasi capaian indikator kinerja jumlah pelanggan dan air yang disalurkan menurut kecamatan tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142
Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp)
1	Rambah	9415	753	2.636.200
2	Rambah Hilir	4815	385	1.348.200
3	Rambah Samo	595	48	166.600
4	Kepenuhan	170	14	47.600
5	Kepenuhan Hulu	-	-	-
6	Tambusai	3815	305	1.068.200
7	Tambusai Utara	1475	118	413.000
8	Rokan IV Koto	455	36	127.400
9	Pendalian IV Koto	290	23	81.200
10	Bonai Darussalam	-	-	-
11	Kunto Darussalam	525	42	147.000
12	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-
13	Tandun	3705	296	1.037.400
14	Kabun	-	-	-
15	Bangun Purba	1000	80	280.000
16	Ujungbatu	2305	184	645.400
Jumlah		28.565	2.285	7.998.200

* Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang memiliki tingkat proporsi rumah tangga dengan air minum layak yang keenam terendah di Provinsi Riau, dengan proporsi sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum,

mandi, cuci dan lain lain tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.143
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Karakteristik	Air Kemasan Bermerk/ Air Isi Ulang/ Leding	Sumur Bor/ Pompa/ Sumur Terlindung/ Mata Air Terlindung/ Air Hujan	Lainya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin KRT				
Laki-Laki	50,77	47,18	2,04	100
Perempuan	38,12	57,31	4,58	100
Kelompok Pengeluaran				
40 % Terbawah	46,25	51,54	2,21	100
40 % Tengah	51,59	45,67	2,74	100
20 % Teratas	50,64	47,69	1,67	100
Pendidikan Tertinggi KRT				
SD Kebawah	44,71	52,72	2,58	100
SD Keatas	53,42	44,52	2,06	100
Kab. Rokan Hulu	**49,54**	**48,17**	**2,29**	**100**

* Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2.144
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/dll
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Karakteristik	Air Kemasan Bermerk/ Air Isi Ulang/ Leding	Sumur Bor/ Pompa/ Sumur Terlindung/ Mata Air Terlindung/ Air Hujan	Lainya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin KRT				
Laki-Laki	NA	62,43	7,37	100
Perempuan	NA	92,78	NA	100
Kelompok Pengeluaran				
40 % Terbawah	NA	92,83	6,76	100
40 % Tengah	NA	90,33	9,51	100
20 % Teratas	NA	95,46	3,85	100
Pendidikan Tertinggi KRT				
SD Kebawah	NA	91,45	7,71	100
SD Keatas	NA	93,27	6,73	100
Kab. Rokan Hulu	**NA**	**92,46**	**7,16**	**100**

* Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2.145
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	8,10	9,37	9,10	14,17	9,70

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan/atau area yang mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka dan menjadi tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri atas dua kategori, yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah atau kota dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum. Contoh RTH publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau di sepanjang jalan, bantaran sungai, dan kawasan pantai. Sementara itu, RTH privat mencakup kebun atau halaman rumah serta lahan milik swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam konteks penataan ruang perkotaan, proporsi ruang terbuka hijau yang ideal adalah paling sedikit 30 persen dari total luas wilayah kota, dengan rincian 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen merupakan RTH privat. Untuk mendukung penyediaan fasilitas umum, khususnya taman pemakaman umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan 48 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman umum selama periode 2020 hingga 2022 di beberapa kecamatan. Hingga akhir tahun 2019, luas RTH publik yang telah dibangun dan dipelihara oleh dinas tersebut tercatat sebesar 117,25 hektare. Pada tahun 2020 hingga 2021, kegiatan terkait RTH publik hanya difokuskan pada pemeliharaan tanpa penambahan luasan.

Selain itu, pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), khususnya drainase lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu, telah mencapai total panjang 64.482,11 meter selama kurun waktu 2017 hingga 2020. Sementara itu, panjang jalan lingkungan yang telah dibangun dalam periode yang sama tercatat sepanjang 93.180,17 meter.

- Persentase penanganan sampah

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu cakupan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada

lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2020, Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 18,83 persen, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 18,43 persen dan tahun 2022 turun menjadi sebesar 16,32 persen. Kemudian tahun 2023 turun menjadi sebesar 15,85 persen dan terakhir pada tahun 2024 meningkat menjadi 23,32 persen. Penanganan sampah ini ditenggarai karena cakupan area pelayanan persampahan yang masih rendah, yaitu 6,37 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang ditangani	24.039,69	23.533,80	21,642.97	21.833,27	24.061,61
2	Jumlah volume produksi sampah	127.685,10	127.685,10	132,613.80	137.732,69	103.202,06
3	Persentase	18,83	18,43	16,32	15,85	23,32

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel 2.147
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan
Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Rasio
1	Rambah	7.251,09	11.768,4	0,62
2	Tandun	295,96	5.957	0,05
3	Kabun	295,96	5.007	0,06
4	Ujungbatu	10.623,69	17.732,5	0,60

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah volume produksi sampah terbanyak adalah di TPA Ujungbatu. Pada daerah ini jumlah volume sampah sebanyak 17.732,5 m3 sementara kapasitas daya tampung adalah 10.623,69 m3 sehingga masih dibutuhkan TPA yang ramah lingkungan untuk menampung sampah yang ada serta pengembangan sarana dan prasarananya.

- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tabel 2.148
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Jumlah Bangunan Ibadah	Jumlah Pemeluk agama	Rasio
1	Mesjid dan musholla	1.351	514.133	1 : 380
2	Gereja	236	71.808	1 : 304
3	Pura	0	111	1 : 0
4	Vihara	2	198	1 : 99
5	Klenteng dan Lain-lain	0	1	1 : 0
Jumlah		1.587	586.251	1 : 369

* Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Sarana peribadatan yang tidak ada di kabupaten rokan hulu adalah pura dan klenteng. Rasio ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama paling besar adalah ketersediaan Mesjid dan Mushola. Rasio Mesjid dan mushola pada tahun 2024 sebesar 1 : 380. Dimana tahun 2024 jumlah rasio tempat ibadah secara keseluruhan sebesar 1 : 369 artinya 1 rumah ibadah bisa menampung 369 jemaah.

- Rumah Tangga Pengguna Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung menurun seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.149
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) dan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	118.782	78.715	83.399	87.450	186.479
2	Jumlah Pelanggan	126.174	83.673	88.864	93.454	202.478
3	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)	94.14	94,07	93,85	93,58	92,10
4	Rasio Elektrifikasi	88,14	88,27	88,34	91,41	91,93

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun, 2024, Dinas ESDM Prov. Riau dan PLN

Pada tahun 2024, jumlah pelanggan listrik tercatat sebanyak 202.478 pelanggan, dengan pelanggan rumah tangga sebagai kelompok terbesar, yaitu 186,479 pelanggan setara dengan 92,10 persen dari total pengguna

Tabel 2.150
Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
1	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Samo	Marga Mulya	475.000.000	1	UNIT	2016	50	250
2	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
3	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Giti	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
4	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Ujung Batu	Suka Damai	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
5	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Alahan	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
6	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Dayo	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
7	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara	425.000.000	1	UNIT	2017	50	250
8	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah Hilir	Pasir Utama	425.000.000	1	UNIT	2017	50	250
9	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
10	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Maju	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
11	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Ujung Batu	Pematang Tebih	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
12	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Tambusai	Tambusai Tengah	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
13	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Hilir	Rambah Muda	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
14	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Hilir	Serombou Indah	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Samo	Lubuk Bilang	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Suka maju	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Koto Tinggi	425,000,000	1	UNIT	2018	50	250
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	425,000,000	1	UNIT	2019	50	250
19	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara Timur	475,000,000	1	UNIT	2019	50	250
20	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Pendalian IV Koto	Pendalian	475,000,000	1	UNIT	2019	50	250
21	SPALD Setempat Skala Individual	Tambusai Utara	Bangun Jaya	250,000,000	50	UNIT	2019	50	250

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
22	SPALD Setempat Skala Individual	Rambah	Sialang Jaya	150,000,000	25	UNIT	2019	25	125
23	SPALD Setempat Skala Individual	Kepenuhan	Kepenuhan Baru	250,000,000	50	UNIT	2019	50	250
24	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto (Swakelola)	Rokan IV Koto	Alahan	450,000,000	10	UNIT	2020	10	50
25	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kabun Kec. Kabun (Swakelola)	Kabun	Kabun	315,000,000	7	UNIT	2020	35	175
26	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ngaso Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
27	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
28	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Pasir Maju Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Pasir Maju	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
29	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sungai Dua Indah Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sungai Dua Indah	225,000,000	5	UNIT	2020	25	125
30	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Muara Musu	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
31	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sejati Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	225,000,000	5	UNIT	2020	25	125
32	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Ulak Patian	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
33	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Rantau Binuang Sakti Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	360,000,000	8	UNIT	2020	40	200
34	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepayang	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
35	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kota Lama Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Kota Lama	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
36	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ujungbatu Timur Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
37	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Marga Mulya Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
38	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Menaming Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Menaming	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
39	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK	Rambah	Koto Tinggi	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
	Desa Koto Tinggi Kec. Rambah (Swakelola)								
40	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Rambah Hilir Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
41	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai (Swakelola)	Tambusai	Tambusai Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
42	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Hilir	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
43	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu	520,500,000	1	UNIT	2020	50	250
44	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Tengah (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	520,500,000	1	UNIT	2020	50	250
45	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Tandun Kecamatan Tandun (Swakelola)	Tandun	Tandun	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
46	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Rambah Utama	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
47	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)	Bangun Purba	Bangun Purba	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
48	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
49	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) -Tematik Stunting Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai (Swakelola)	Tambusai	Tambusai Timur	600,000,000	10	UNIT	2021	50	250
50	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (Swakelola)	Tambusai Utara	Mahato	600,000,000	10	UNIT	2021	50	250
51	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	540,000,000	9	UNIT	2021	45	225

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
52	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	714,000,000	102	UNIT	2021	102	510
53	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	595,000,000	85	UNIT	2021	85	425
54	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Karya Mulya	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
55	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
56	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
57	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Muara Dilam	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
58	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)	Bangun Purba	Bangun Purba Barat	980,000,000	140	UNIT	2021	140	700
59	Pembangunan WC Individual	Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	200,000,000	25	UNIT	2021	25	125
60	-Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Lubuk Napal Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
61	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sei Kuning Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Sei Kuning	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
62	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ngaso Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
63	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sei. Salak Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Sei Salak	420,000,000	60	UNIT	2022	50	250
64	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Masda Makmur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Masda Makmur	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
65	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
	Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo (Swakelola)								
66	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Langkitin Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Langkitin	399,000,000	57	UNIT	2022	50	250
67	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
68	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Rambah Tengah Hilir	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
69	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Pasir Luhur Kec. Bonai Darussalam (Swakelola)	Bonai Darussalam	Pasir Luhur	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
70	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Jaya	600,000,000	1	UNIT	2022	50	250
71	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Kota Raya	600,000,000	1	UNIT	2022	50	250
72	Pembangunan Tanki Septik Individual Desa Rambah Muda Kec. Rambah Hilir	Rambah Hilir	Rambah Muda	100,000,000	10	UNIT	2023	10	50
73	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Bangun Purba	Bangun Purba Timur Jaya	100,000,000	10	UNIT	2024	10	50
74	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Rambah Hilir	Muara Musu	100,000,000	10	UNIT	2024	10	50
75	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Kunto Darussalam	Desa Pasir Indah	100,000,000	10	UNIT	2024	10	50
76	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Rambah	Tanjung Belit	100,000,000	10	UNIT	2024	10	50
77	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 12 KK (Penurunan Stanting)	Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu	100,000,000	12	UNIT	2024	12	60
78	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 12 KK (Penurunan Stanting)	Tambusai	Tambusai Timur	100,000,000	12	UNIT	2024	12	60
79	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 13 KK (Penurunan Stanting)	Bangun Purba	Bangun Purba	100,000,000	13	UNIT	2024	13	65
80	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 13 KK (Penurunan Stanting)	Kabun	Bencah Kesuma	100,000,000	13	UNIT	2024	13	65
	JUMLAH YANG DILAYANI							3.657	18.285

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat jumlah rumah tangga yang sudah mendapat akses sanitasi layak sebesar 15.862 KK yang telah dibangun. Sedangkan jumlah rumah tangga yang harus dilayani berdasarkan STBM sebesar 130.419 KK dan persentase rumah tangga yang sudah terlayani melalui pembangunan sampai tahun 2022 sebesar 12.16 persen, sedangkan yang dibangun masyarakat sendiri 64,91 persen. sehingga persentase rumah tangga yang terlayani seluruhnya sampai dengan tahun 2022 sebesar 77,07 persen.

- SPM Bidang Pekerjaan Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun.

Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.151
Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100.00 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/chat_form	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/chat_form	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/chat_form	Yang Belum Terlayani	80.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	239360	239360	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.00 %
			Jumlah mutu yang harus dilayani / Dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/Terpenuhi	Jumlah mutu yang belum terlayani / Terpenuhi	50.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	250	250	0	100.00 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	250	250	0	100.00 %
	3 . Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	50	50	0	100.00 %
	4 . Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	50	50	0	100.00 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	239360	239360	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100.00 %
	1 . Penyediaan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	90	90	0	100.00 %
	2 . penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan	Rumah Tangga	90	90	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM			INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN
	sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T					
	3 .Penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	90	90	0	100.00 %

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu Tahun 2025



* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.39
Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Rasio rumah layak huni

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah rasio rumah layak huni, dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan, sehingga didapatkan rasio rumah layak huni sebesar 0,09 persen tahun 2020. Terakhir pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 0,22 persen. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sebanyak 125.568 unit yang berasal dari Dana APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.152
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah layak huni	61.828	64.179	98.336	124.066	125.568
2	Jumlah penduduk	718.321	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio Rumah Layak Huni	0,09	0,11	0,16	0,22	0,22

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan tingginya angka capaian pada indikator "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan indikator yang telah ditetapkan secara Nasional, dengan perhitungan angka yang dikeluarkan oleh BPS. Angka ini diperoleh dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria yaitu : Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita; Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan Ketahanan bangunan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk disewa. Pada tabel berikut ini akan disajikan data Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau tahun 2020-2024.

Tabel 2.153
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau	63,33	77,76	75,92	74,40	81,89

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

❖ Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dmiliki dan dikelola oleh

Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan dimana 20%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kebutuhan fasilitas umum untuk taman pemakaman umum telah melakukan beberapa kegiatan di Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun pada tahun 2020 s.d 2022 dan dapat dilihat dari table berikut:

Luasan RTH Publik kabupaten Rokan Hulu yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2019 seluas 117, 25 ha, sedangkan pada tahun 2020 2021 Kegiatan RTH Publik hanya bersifat pemeliharaan dengan luasan yang sama.

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) drainase di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2007-2018 telah terbangun 76.083 m. Di tahun 2016 kabupaten rokan hulu mendapatkan bantuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan rokan iv koto 300 m, kecamatan rambah 500 m,kecamatan rambah hilir 337m, kecamatan tambusai utara 425 m. Ditahun 2017 kabupaten rokan hulu mendapatkan banuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan tambusai 231 m. Pada tahun 2019 pembangunan darinase di kabupaten rokan hulu 25816,16 m. Dan ditahun 2020

- Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi, pada tahun 2020 persentase lingkungan pemukiman kumuh hanya sebesar 2,88 persen. Tahun 2021-2022 luas lingkungan permukiman kumuh 262,67 dengan Persentase lingkungan pemukiman kumuh meningkat menjadi 3,52 persen. Terakhir tahun 2024 Persentase lingkungan pemukiman kumuh mengalami penurunan menjadi 2,13 persen. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai.

Tabel 2.154
Persentase lingkungan pemukiman kumuh
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	214.66	262.87	262.87	244,78	159,09
2	Luas wilayah	7,462,18	7,462,18	7,462,18	7,462,18	7,462,18
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	2,88	3,52	3,52	3,28	2,13

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase luasan pemukiman kumuh dikawasan perkotaan

Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 meningkat secara signifikan mencapai 263,25 persen. Kemudian pada tahun 2022 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menurun secara drastis menjadi 1,60 persen. Kemudian tahun 2023 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan meningkat kembali menjadi 4,35 persen. Terakhir pada tahun 2024 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan meningkat kembali mengalami penurunan drastis menjadi 0,01 persen. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan melalui sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Tabel 2.155
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	53	692	4,2	10,66	0,012
2	Luas pemukiman kumuh	214,66	262,87	262,87	244,78	159,1
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	24,69	263,25	1,60	4,35	0,01

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts. 100.3.3.2/ BAPPEDA/ 650/ 2024, tanggal 17 Juli 2024 maka data luasan dan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.156
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Dusun	Luas kawasan (Ha)	Tingkat kekumuhan
1	Bangun Purba	Tangun	Dusun I Tangun	10,13	Kumuh Ringan

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Dusun	Luas kawasan (Ha)	Tingkat kekumuhan
		Bangun purba	Dusun I Bangun Purba	3,72	Kumuh Ringan
2	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	Danau Dipo Boncah Balong	35,56	Kumuh Ringan
3	Rambah	Babussalam	Babussalam	2,24	Kumuh Ringan
		Koto Tinggi	Koto Tinggi	11,99	Kumuh Ringan
		Pasir Pengaraian	Pasar Bawah	1,43	Kumuh Ringan
			Tanjung Harapan	5,52	Kumuh Ringan
			Pasir Pengaraian	2,83	Kumuh Ringan
			Tanjung Belanti	7,22	Kumuh Ringan
		Pematang Berangan	Tulang Gajah	10,05	Kumuh Ringan
			Pasir Putih	1,04	Kumuh Ringan
			Pematang Baih	4,99	Kumuh Ringan
		Rambah Tengah Utara	Kampung Padang	3,37	Kumuh Ringan
4	Rambah Hilir	Rambah Hilir	Tanjung Pura Indah	6,36	Kumuh Ringan
5	Tambusai	Tambusai Tengah	Kuro-Kuro Sei Taulan	26,76	Kumuh Ringan
6	Ujung Batu	Suka Damai	Petakur Bawah	11,69	Kumuh Ringan
		Ujung Batu	Kampung Baru Barat	12,15	Kumuh Ringan
Jumlah Luas kawasan				**159,09**	

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2.157
Data Backlog Perumahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2023

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah	Unit	72.606	98.336	124.066
2	Jumlah RTLH	Unit	8.427	8.427	8.427
3	Jumlah RTLH dalam Kawasan Kumuh	Unit	936	936	936
4	Backlog Kepemilikan	Unit	12.524	23.521	34.518
5	Backlog Penghunian	Unit	103.609	60.789	17.969

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- SPM bidang Perumahan Rakyat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 1 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 2 indikator dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahunnya.

Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.Target Capaian Indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 2.158
Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			89,81 %
1 .	Penyediaan & RehabiitasiRumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					95.00 %
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2	2	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75.00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2	2	0	100.00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.	Rumah	0	0	0	100.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota					84,62 %

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Rokan Hulu Tahun 2025



* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.40
Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

4) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Tabel 2.159
Cakupan petugas Linmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah linmas	2.413	2.413	1.187	666	666
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Cakupan petugas Linmas	42,98	42,26	20,37	11,61	11,35

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu, 2025

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari keberadaan petugas linmas di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,35 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 11,61. Hal ini disebabkan tidak adanya pengukuhan satlinmas dan tidak adanya kegiatan pendukung pada tahun 2024.

- Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Tabel 2.160
Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka konflik	5 kali	4 kali	7 kali	4 kali	4 kali
2	Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat	5 kali	4 kali	7 kali	8 kali	8 kali
3	Pembinaan politik daerah	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	11 parpol
4	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10 anggota LSM,ormas dan OKP	10 LSM,ormas dan OKP	16 LSM,ormas dan OKP	25 LSM,ormas dan OKP	25 LSM,ormas dan OKP

* Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Kondusifitas daerah di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain terjadi konflik sosial dan unjuk rasa. Kondisi politik di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2020 - 2024 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

- Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi Pamong Praja pada tahun 2020 sebanyak 356 orang pegawai, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022 sebanyak 395-397 orang pegawai. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah personil polisi Pamong Praja sebanyak 370 orang pegawai. Terakhir tahun 2024 terjadi penurunan jumlah personil polisi Pamong Praja sebanyak 363 orang pegawai. Berdasarkan tabel dibawah ini, Jumlah personil polisi Pamong Praja dalam lima

tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2020, rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 63, pada tahun 2021 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat menjadi 69. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 61, artinya pada tahun 2024 terdapat sebanyak 61 satpol PP untuk melayani sekitar 10.000 penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat lebih rinci pada dibawah ini ini.

Tabel 2.161
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah polisi pamong praja	356	395	397	370	363
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	6,3	6,92	6,81	6,45	6,18

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada satpol PP dan Damkar

Tabel 2. 162
Jumlah PPNS Pada Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

NO	NAMA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPNS	3	3	4	4	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyedikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No 43 Tahun 201, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyedik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dari tabel di atas, dapat dilihat Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Rokan Hulu selama periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah PPNS tercatat tetap sebanyak 3 orang. Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah menjadi 4 orang dan kondisi ini bertahan hingga tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah PPNS kembali mengalami penurunan menjadi 3 orang, sama seperti dua tahun awal periode pengamatan. Perubahan

ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan sumber daya aparatur penegak peraturan daerah di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu.

- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 semuanya mencapai 100 persen. Pelangggaran K3 sampai pada tahun 2024 dapat diselesaikan karena ditangani dengan cepat oleh personil dari Satpol Pamong Praja. Dengan jumlah pelanggaran k3 yang terselesaikan sebanyak 21 kasus di tahun 2024. Pencapaian indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.163
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelanggaran k3 yang terselesaikan	123	27	46	68	21
2	Jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol pp	123	27	46	65	21
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	95,59	100

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran

Sedangkan untuk indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 18 persen pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2020-2021 sebesar 30 persen. Pencapaian indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.164
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran	2.281 (8 Kecamatan)	2.281 (8 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)
2	Luas wilayah kabupaten/kota	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30	30	18	18	18

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Untuk meningkatkan pelayanan kebakaran, pada tahun 2018 telah bertambah 1 (satu) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran untuk menjangkau 2

kecamatan, sehingga jumlah pos sampai pada tahun 2021 menjadi 3 (tiga) Pos. Tingkat waktu tanggap daerah layanan ditargetkan sampai kelokasi kejadian kebakaran selama 15 menit. Adapun untuk indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2020-2024 tercatat sebesar 100 persen. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan personil damkar yang telah mendapat pelatihan merupakan faktor pendukung meningkatnya rasio tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK.

Tabel 2.165
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	29	28	24	22	47
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	29	28	24	22	47
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100

*Sumber:Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase penegakan perda

Selama kurun waktu lima tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini tercermin dari persentase penegakan PERDA yang secara konsisten mencapai angka 100 persen setiap tahunnya. Artinya, seluruh pelanggaran PERDA yang tercatat dalam periode tersebut berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan. Adapun jumlah pelanggaran dan penyelesaiannya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan peningkatan tajam pada tahun 2022 yang mencapai 415 kasus, sebelum kemudian menurun di tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024. Meskipun terdapat dinamika dalam jumlah kasus, tingkat respons dan penyelesaian tetap optimal tanpa ada satu pun kasus yang tidak ditindaklanjuti.

Tabel 2. 166
Persentase Penegakan PERDA Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	57	160	415	143	280
2	Jumlah pelanggaran PERDA	57	160	415	143	280
3	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Penanganan dan penangulangan bencana

Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat kabupaten maupun masyarakat di dalam upaya pengurangan risiko bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna meminimalkan kerentanan yang dimiliki, serta pemetaan terhadap segala ancaman yang mungkin dapat terjadi. Upaya tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya peningkatan jumlah penetapan desa siaga bencana dan layanan informasi rawan bencana. Tahun 2024, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 100 persen sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100 persen. Hal ini menandakan bahwa aktifitas. pelayanan informasi dan sosialisasi pada beberapa daerah rawan bencana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen.

Dilain pihak jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100 persen. Selanjutnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100 persen.

Tabel 2.167
Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana
Tahun 2020-2024 Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	46	25	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	36	200	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	211	130,21	96	100	100
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	207	200	100	100	100

Sumber: Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu,2025

- SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang SPM yang masuk dalam kategori prioritas nasional. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Target Capaian Indikator SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 2.168
Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

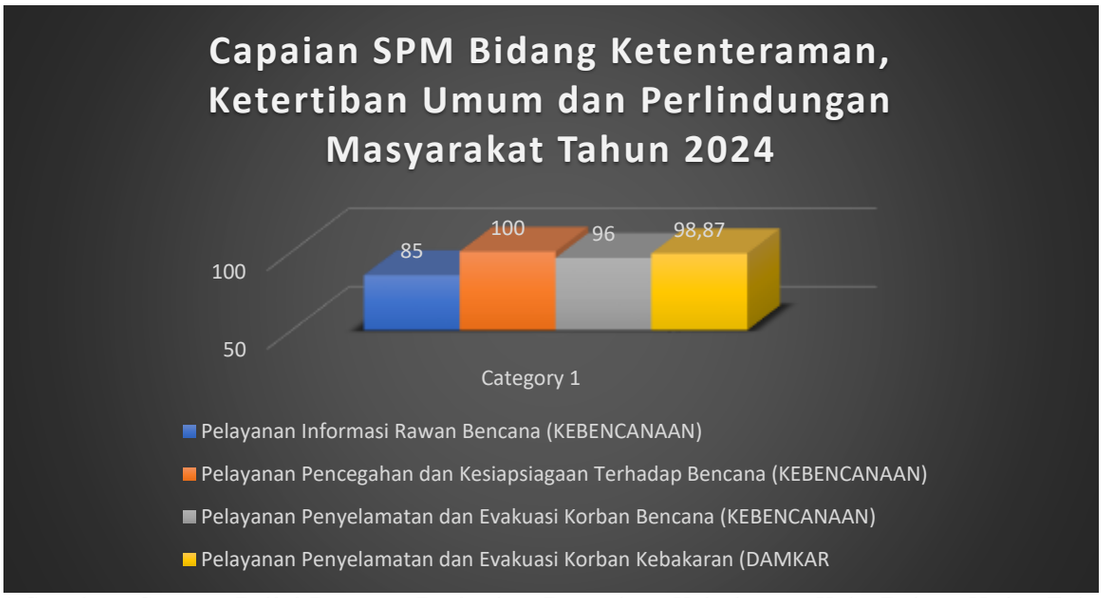
TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.02 %						
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			96,67 %
1 .	Pelayanan Ketentraman danKetertiban Umum (TRANTIBUM)					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		280	280	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16,67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83,33 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	22	22	0	100 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	Dokumen	1	1	0	100.00 %

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.02 %						
	dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	11	11	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	100 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			90,33 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					85.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7	7	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00 %

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.02 %						
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	0	0	0	0.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	100	100	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	0	0	0	0.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,700	1,700	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit	0	0	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	25	25	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,265	1,265	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/chat_form	Orang)	0	0	0	0.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0 %

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.02 %						
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	10	10	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			98,87 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					98,87 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		188	188	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18,87 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani	Jumlah Mutu yang belum terlayani/	96.91 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	47	31	16	65,96 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan (httpdasn:/e/svapkmua.sbi a(hneglmdap.ektuegmasePned nayeglarmi.gaota.nid, j/a2k0e2t,1…/hdoll.m) e/chat_form	uinit	182	182	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	13	13	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	188	188	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	0	100.00 %

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025



* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar 2.41
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

5) Sosial

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

- Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial

Kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 2.169
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	33.340	39.232	22.489	42.209	18.517
2	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	51.872	51.872	51.872	52.766	18.517
3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	64,27	75,63	43,35	79,99	100,00

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pembinaan terhadap PPKS dari tahun ke tahun, jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2024 yaitu 18.517 orang dan yang diberikan bantuan 18.517 orang atau 100,00 persen menurun dibandingkan PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2023 yaitu 52.766 orang dan yang diberikan bantuan 42,209 atau 79,99 persen.

- Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian pada tahun 2021 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya meningkat kembali menjadi sebesar 25,4 persen. Namun tahun 2022-2024 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Perkembangan indikator urusan sosial secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.170
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat	0	160	0	0	0

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis					
2	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	0	631	0	0	0
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usahabersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	25,4	0	0	0

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan

Penanganan PPKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Di Kabupaten Rokan Hulu saat ini baru hanya tersedia sarana sosial yaitu panti asuhan. Terdapat 5 (lima) panti asuhan yaitu (1) Al-Khoiriyah yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 34 orang; (2) Budi Mulya yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 30 orang; (3) Teriak Putri Tujuh yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 35 orang; (4) Hidayatul Muslim yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 36 orang; dan (5) Ar-Royyan yang berlokasi di Kecamatan Kabun dengan jumlah penghuni 62 orang. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 100 persen.

Tabel 2.171
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
3	Persentase panti sosialyang menyediakan sarana prasaranapelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Permasalahan sosial khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PPKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Pada tahun 2024 Anak Terlantar 378 orang, Anak yang Berhadapan dengan Hukum 62 orang, Anak Jalanan 0, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 72 orang, Lanjut Usia Telantar 3.911 orang, Penyandang Disabilitas 2.421 orang, Korban Tindak Kekerasan 81 orang, Korban Bencana Alam 1.600 orang, Korban Bencana Sosial 31 orang, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 6.294, Fakir Miskin 86.483.

Sementara itu jumlah PPKS yang diberikan bantuan pada tahun 2024 pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum 62 anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 71 anak, Penyandang Disabilitas 1.749 orang ,Gelandangan 0 orang, Korban Tindak Kekerasan 81 orang, Korban Bencana Alam 1.600 orang, Korban Bencana Sosial 31 orang, Fakir Miskin 86.483 orang.

Tabel 2.172
Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Anak Terlantar	Anak dengan Kedisabilitasan	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Lanjut Usia Telantar	Penyandang Disabilitas	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UJUNG BATU	31	5	4	0	4	272	71	4	86	2	240	6099
ROKAN IV KOTO	18	13	4	0	5	160	58	6	377	2	155	5166
RAMBAH	16	20	7	0	7	111	113	8	208	5	305	8502
TAMBUSAI	25	11	9	0	9	94	72	4	97	3	162	8160
KEPENUHAN	18	19	7	0	4	207	229	3	712		146	3792
KUNTO DARUSSALAM	22	4	4	0	3	161	120	8	120	2	333	6382
RAMBAH SAMO	17	3	2	0	6	60	24	9	0	1	86	6521
RAMBAH HILIR	17	2	4	0	7	71	14	5	0	4	137	7947
TAMBUSAI UTARA	35	17	0	0	8	475	87	4	0	3	697	10493
BANGUN PURBA	58	27	7	0	0	573	376	5	0	2	736	4373
TANDUN	16	10	8	0	3	329	412	6	0	0	599	5314
KABUN	16	13	6	0	2	317	220	7	0	3	495	3907
BONAI DARUSSALAM	33	11	0	0	6	245	161	8	0	4	658	3002

Kecamatan	Anak Terlantar	Anak dengan Kedisabilitasan	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Lanjut Usia Telantar	Penyandang Disabilitas	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	24	30	0	0	4	313	89	4	0	0	815	1764
KEPENUHAN HULU	16	9	0	0	3	299	237	0	0	0	300	2841
PENDALIAN IV KOTO	16	14	0	0	1	224	138	0	0	0	430	2220
JUMLAH	378	208	62	-	72	3.911	2.421	81	1.600	31	6.294	86.483

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2. 173
Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Penyandang Disabilitas	Gelandangan	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Fakir Miskin
1	2	3	4	5	6	7	8
62	71	2.629	0	56	1.600	31	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

- Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Indikator lain dari Kinerja Sosial adalah pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Komunitas Adat Terpencil merupakan kelompok masyarakat dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, serta tergolong miskin, terpencil, dan/atau rentan secara sosial ekonomi.

Tujuan dari program pemberdayaan sosial terhadap KAT adalah untuk mewujudkan:

1. Perlindungan hak-hak warga negara;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Integrasi KAT ke dalam sistem sosial yang lebih luas; dan
4. Kemandirian sebagai warga negara.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, kriteria Komunitas Adat Terpencil mencakup:

1. Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
2. Bersifat tertutup, homogen, dan bergantung pada sumber daya alam;
3. Terpinggirkan baik di perdesaan maupun perkotaan; dan/atau
4. Bertempat tinggal di wilayah perbatasan antarnegara, daerah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau terluar.

Di Kabupaten Rokan Hulu, sebanyak 231 kepala keluarga (KK) yang termasuk dalam kategori KAT telah diberdayakan sejak tahun 2015 hingga 2019. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui relokasi ke pemukiman baru serta pemberian bantuan biaya hidup selama satu tahun, dengan pendanaan bersumber dari APBN dan APBD. Khusus untuk KAT Bonai, Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD telah membangun perumahan di dua lokasi, yaitu Dusun Tanjung Pauh dan Dusun Kasang Salak, Desa Bonai.

Sesuai dengan Surat Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor: 467.1/Dinsos/2020/239 tanggal 3 April 2020 perihal Review Database KAT 2020–2024, disebutkan bahwa data KAT periode 2015–2019 harus diperbarui dengan menghapus atau mengurangi data lokasi KAT yang telah diberdayakan selama kurun waktu tersebut. Berdasarkan kriteria KAT sebagaimana diatur dalam regulasi serta merujuk pada surat resmi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini tidak terdapat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu, karena seluruh komunitas yang memenuhi kriteria tersebut telah diberdayakan.

- Pembentukan PUSKESOS di Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan PUSKESOS dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kab. Rokan Hulu dimulai pada tahun 2022 melalui bantuan dari Kemensos berupa Pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan bantuan sarana dan prasarana, serta pembentukan PUSKESOS Kabupaten dengan sarana dan prasarana melalui APBD Kabupaten tahun 2022. Pada Tahun 2023 melalui APBD tahun 2023, telah dianggarkan juga pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan sarana parasarananya.

- Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2.174
Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO.	JENIS PSKS	ROKAN HULU	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	29	21
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	36	16
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	31	6
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	105	121
5	Karang Taruna (KT)	54	6
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	4
7	Keluarga Poineer	-	1
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis Masyarakat (HKSKBM)	0	0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	0	0
10	Penyuluh Sosial	0	1
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	0
12	Dunia Usaha	0	0
13	Family Care Unit (FCU)	0	0
TOTAL		235	160

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Standart Pelayanan Minimal Sosial

Pada tahun 2024 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian SPM oleh daerah untuk Bidang Sosial di tahun 2024 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.Rincian capaian indikator pelayan Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.175
Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.50 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					97.49 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		244	244	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.49 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	84.62 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	188	188	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	6	6	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	70	70	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	28	2	26	7,14 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	244	244	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	244	244	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	244	244	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	Orang	244	244	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	penyandang disabilitas terlantar					
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	244	244	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	244	244	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	17	5	12	29,41 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		378	378	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	378	378	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	6	6	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	122	122	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	378	378	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	378	378	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	378	378	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	378	378	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	378	378	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	378	378	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluargaa/Bukti keberadaan keluarga	Orang	378	378	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	2	2	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		310	310	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	310	310	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	310	310	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	54	54	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	310	310	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	310	310	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	310	310	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	310	310	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	310	310	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	310	310	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					85.00 %
	Tidak Ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		28	0	28	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	25.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Harus Dilayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1631	1631	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan ermakanan	Orang	1600	1600	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	31	31	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	5	5	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1631	1631	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1631	1631	0	0.00 %

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024



* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2. 42
Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial Tahun 2024

2.1.3.2. Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Seiring dengan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ketenagakerjaan dan memperluas lapangan kerja, tantangan di dunia kerja tidak hanya berhenti pada persoalan penciptaan kesempatan kerja, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan yang terjadi di lingkungan kerja. Dalam hal ini, penyelesaian hubungan industrial menjadi salah satu aspek penting yang turut memengaruhi iklim kerja yang kondusif.

Salah satu bentuk penyelesaian perselisihan yang banyak diupayakan adalah melalui mekanisme Perjanjian Bersama (PB), yakni proses penyelesaian secara musyawarah antara pekerja dan pengusaha dengan difasilitasi oleh pihak yang berwenang. pada periode tahun 2020 hingga 2024, penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, besaran kasus yang diselesaikan melalui PB tercatat sebesar 34,69 persen dari total kasus yang dicatatkan. Angka ini sempat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 56,52 persen, menandakan adanya upaya penyelesaian secara damai yang lebih intensif. Pada tahun 2024, besaran kasus yang diselesaikan melalui PB menurun kembali menjadi 44,37 persen, meskipun jumlah absolut kasus yang diselesaikan sama dengan tahun 2020. Penurunan persentase ini disebabkan oleh jumlah kasus yang dicatatkan pada tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun tetap menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh kasus masih berhasil diselesaikan secara damai. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2020-2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

- Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Tabel 2.176
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	17	13	12	34	17
2	kasus yang dicatatkan	49	23	25	50	38

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	34,69	56,52	48,00	68,00	44,37

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

- Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Tabel 2.177
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak/Belum pernah Sekolah atau tidak/Belum tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar/ No. Schooling or not yet completed primary school or primary school	26	45	188	165	88
2	Sekolah Menengah Pertama/ Junior High School	19	41	63	33	23
3	Sekolah Menengah Atas/ Senior High School	587	429	372	303	343
4	Sekolah Menengah Kejuruan/ Vocational Senior High School	-		352	364	387
5	Diploma I/II/III/Akademi/ Diploma I/II/III/Academy	28	22	25	24	34
6	Universitas/University	147	207	201	154	237
	Jumlah	807	744	1201	1043	1112

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas selama periode 2020 hingga 2024, jumlah pencari kerja di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 807 pencari kerja, kemudian mengalami penurunan pada 2021 menjadi 744 orang. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 1.201 orang. Jumlah ini kembali menurun menjadi 1.043 orang pada tahun 2023, dan sedikit meningkat di tahun 2024 menjadi 1.112 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, pencari kerja dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) selalu mendominasi setiap tahunnya. Disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama sejak data SMK mulai dicatat pada tahun 2022. Jumlah pencari kerja lulusan perguruan tinggi (universitas dan diploma) juga menunjukkan tren yang cukup stabil dan cenderung meningkat di tahun 2024.

Sementara itu, pencari kerja dengan pendidikan rendah (tidak sekolah atau hanya tamat SD) menunjukkan lonjakan drastis pada tahun 2022, namun jumlahnya menurun secara signifikan dalam dua tahun terakhir. hal

ini menggambarkan bahwa pencari kerja di Rokan Hulu sebagian besar berasal dari kalangan lulusan menengah atas dan kejuruan.

Tabel 2.178
Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Pelatihan Kompetensinya
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	212	400	176	173

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

jumlah PNS perempuan yang memegang jabatan strategis eselon II-IV pada tahun 2024 sejumlah 143 orang. Menurut jenis kelamin penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari laki-laki berjumlah 298.478 orang atau 50,85 persen sedangkan perempuan berjumlah 288.516 orang atau 49,15 persen. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan dan hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Pada tabel dibawah dapat dilihat jumlah tenaga kerja perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2024 sebesar 3.142 orang dari 97.301 orang pekerja perempuan atau masih sekitar 3,23 persen.

Tabel 2.179
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II/ pimpinan tinggi pratama	1	1	1	1	1
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III/ administrator	22	25	29	29	30
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV/ pengawas	143	152	160	160	112
4	Pekerja PNS perempuan di pemerintah	3.391	3.309	3.333	3.333	3.142

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah pekerja perempuan	100.362	112.091	103.354	89.063	97.301
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3,38	2,95	3,22	3,74	3,23

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

- Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPRD

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan pada pasal 55 berbunyi keterwakilan perempuan memuat paling sedikit 30 persen. Untuk Kabupaten Rokan Hulu periode 2024-2029 berjumlah 45 (empat puluh lima orang) yang terdiri dari 42 orang laki-laki dan 3 orang perempuan atau hanya 6,66 persen keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.180
Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPR
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRD yang dididuduki perempuan	2	2	2	2	3
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45
3	Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPR	4,44	4,44	4,44	4,44	6,66

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

- Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Tabel 2.181
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	96.971	108.782	100.021	85.822	91.661
2	Jumlah pekerja perempuan	100.362	112.091	103.354	89.063	97.301
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	96,62	97,05	96,78	96,36	94,20

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan data dari Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025, partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah perempuan yang bekerja di sektor ini tercatat sebanyak 96.971 orang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 108.782 orang, yang merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, setelah tahun 2021, terjadi penurunan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta, yakni menjadi 100.021 orang pada tahun 2022, kemudian turun lebih lanjut menjadi 85.822 orang di tahun 2023. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali meningkat menjadi 91.661 orang.

- Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selama periode 2020 hingga 2024, rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren yang relatif rendah namun sempat mengalami lonjakan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio KDRT tercatat sebesar 0,003, kemudian menurun menjadi 0,001 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio ini berada di angka 0,002. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan jumlah kasus KDRT, dari 2 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 14 kasus. Meskipun jumlah kasus KDRT tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di Rokan Hulu, tren kenaikan pada tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk mencegah potensi peningkatan di masa mendatang.

Tabel 2.182
Rasio KDRT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT	4	2	2	2	14
2	Jumlah rumah tangga	133.426	176.215	159.125	145.812	145.812
3	Rasio KDRT	0.003	0.001	0.002	0.002	0,010

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mengoptimalkan kinerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PPA dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2020, cakupan penanganan baru mencapai 71,43 persen. Namun, angka ini meningkat tajam menjadi 96,55 persen pada tahun 2021, dan kemudian mencapai 100 persen sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memastikan bahwa seluruh pengaduan ditangani oleh tenaga yang kompeten.

Tabel 2. 183
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	20	28	48	61	81
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	28	29	48	61	81
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	71,43	96,55	100	100	100

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, cakupan layanan berada pada angka 7,14 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 10,34 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 6,25 persen, yang sedikit membaik pada tahun 2023 menjadi 6,56 persen. Di tahun 2024, cakupan layanan kembali mengalami peningkatan

menjadi 7,41 persen. Meskipun jumlah korban yang mendapatkan layanan pemulangan meningkat, peningkatan jumlah korban secara keseluruhan menyebabkan persentase cakupan tidak menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas layanan agar lebih banyak korban mendapatkan akses layanan pemulangan.

Tabel 2.184
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	2	3	3	4	4
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	28	29	48	61	81
3	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7,14	10,34	6,25	6,56	7,41

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

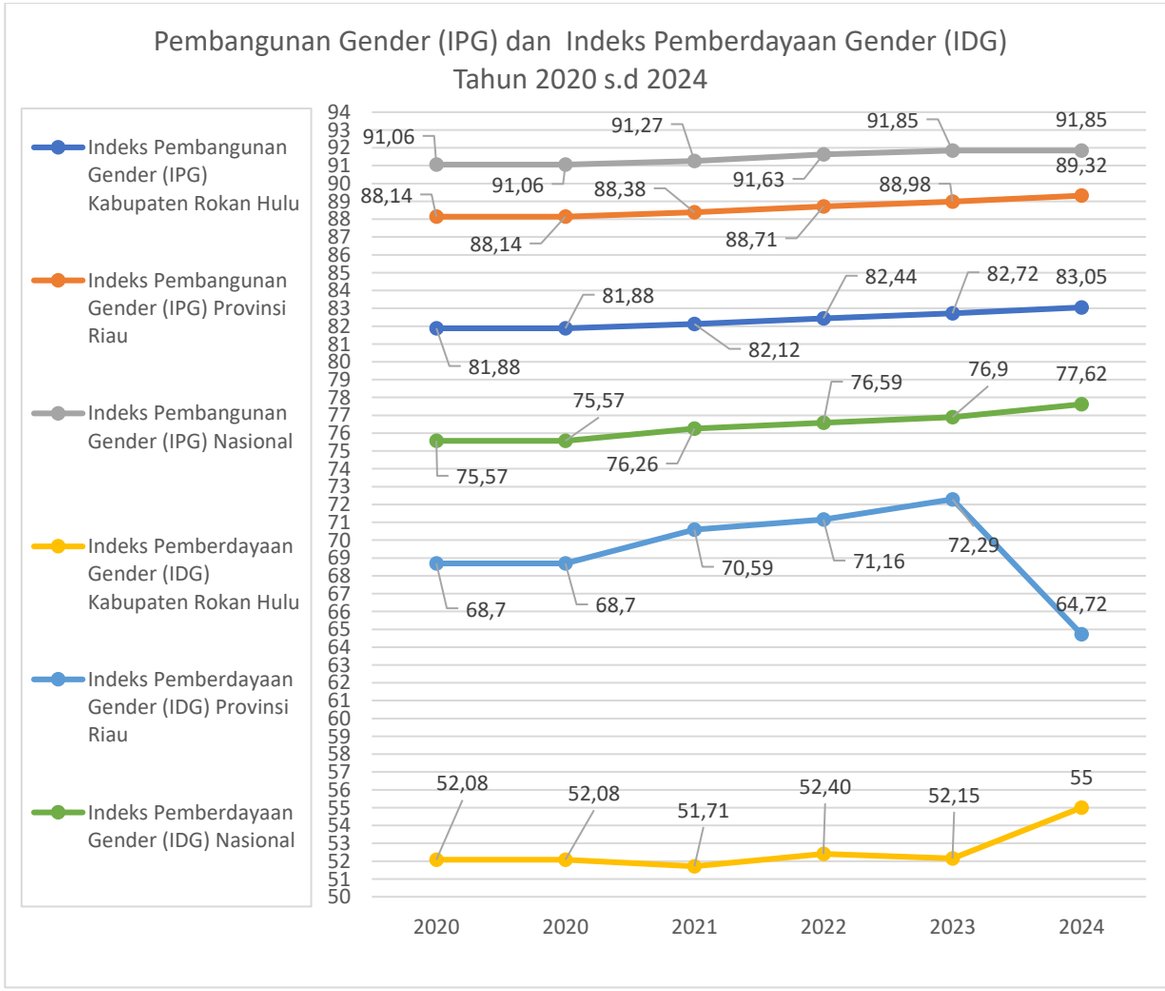
Tabel 2. 185
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)Kabupaten Rokan Hulu	81,88	82,12	82,44	82,72	83,05
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)Provinsi Riau	88,14	88,38	88,71	88,98	89,32
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu	52,08	51,71	52,40	52,15	55,00
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau	68,70	70,59	71,16	72,29	64,72
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

* Sumber: BPS Rokan Hulu,BPS Prov,Riau dan BPS Tahun 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren yang positif dalam hal Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 81,88 dan mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 83,05 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meskipun demikian, IPG Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau maupun angka nasional. Sementara itu, perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pada tahun 2020, IDG berada di angka 52,08, sempat mengalami sedikit fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, dan akhirnya mengalami lonjakan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 55,00. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, meskipun angka IDG tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.



* Sumber: BPS Rokan Hulu,BPS Prov,Riau dan BPS Tahun 2024

Gambar 2.43
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2020 s.d 2024

- Indeks Ketimpangan Gender

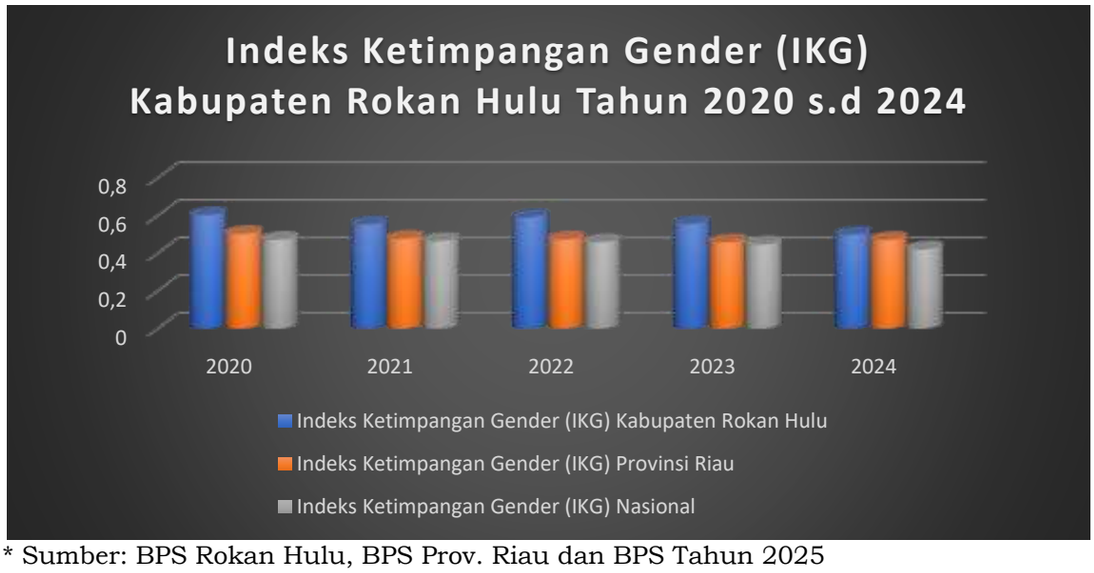
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren penurunan, yang menandakan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Rokan Hulu. Nilai IKG pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,603, yang mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan. Pada tahun 2021, IKG menurun menjadi 0,554, lalu sempat meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 0,590. Namun, tren positif kembali terlihat pada tahun 2023 dengan penurunan IKG menjadi 0,556, dan pada tahun 2024, nilai IKG berhasil ditekan hingga mencapai 0,498. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait mulai berhasil mengurangi ketimpangan gender, melalui program-program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan Perempuan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau (0,471) dan nasional (0,421) pada tahun 2024, IKG Kabupaten Rokan

Hulu masih tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender perlu terus diperkuat, baik melalui perluasan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan partisipasi dalam dunia kerja dan politik.

Tabel 2.186
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu	0,603	0,554	0,590	0,556	0,498
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Riau	0,503	0,477	0,473	0,458	0,471
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

* Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Prov. Riau dan BPS Tahun 2025



* Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Prov. Riau dan BPS Tahun 2025

Gambar 2.44
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Rekap Anggaran Responsive Gender

Tabel 2.187
Rekapitulasi Anggaran Responsive Gender (IKG) pada Perangkat daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.300.000.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.530.079.800
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	611.771.780
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	54.980.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.726.662.800
2	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.993.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.640.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakteristik Bangsa	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika	1.279.321.900
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.154.847.036
5	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.520.805.000
				Pembangunan Peustakaan Sekolah	2.353.800.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.170.244.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	130.418.750
				Pengadaan Mebel Sekolah	1.600.000.000
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.305.305.400
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.000.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	67.898.865.203

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25.532.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	17.932.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	17.532.000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.532.000
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17.532.000
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.814.145.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	164.229.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	124.800.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.542.263.250
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	397.000.000
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	570.000.000
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	989.000.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Pembangunan Peustakaan Sekolah	200.000.000
				Pembangunan Laboratorium	3.879.201.830
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.530.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.282.914.170
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	70.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Peustakaan Sekolah	530.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	607.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	640.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.381.873.590
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.427.260.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.057.500.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	247.580.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12.000.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56.000.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26.464.658.619
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	11.960.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	12.000.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	12.000.000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.000.000
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.000.000
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.060.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.199.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.606.148.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	389.711.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	521.979.200
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	280.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	389.220.300
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.399.600.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	15.500.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15.500.000
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15.500.000
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	400.000.000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.500.000
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	200.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.473.586.800
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.500.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	159.084.500
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	261.300.000
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	971.215.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Kabupaten/Kota	858.460.950
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	265.331.500
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	424.800.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	478.760.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000
6	SATPOL PP DAN DAMKAR	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	734.655.800
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	53.982.800
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.395.200
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.974.500
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.524.507.640
7	DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kewirausahaan	354.913.400

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	melalui Pendidikan dan Pelatihan	
8	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.635.000
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	76.100.000
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.620.000
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Teknisi atau Analis	311.577.700
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program pencatatan sipil	penyelenggaraan pencatatan sipil	sosialisasi terkait pencatatan sipil	20.852.000
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pawai MTQ Tingkat Provinsi)	279.105.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (Penampilan Kesenian)	90.000.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Destinasi Pariwisata Air Panas Hapanasan)	398.232.500
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan Bujang Dara Kabupaten dan Provinsi)	140.107.400
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ROGRAM PENGEDALIAN PENDUDUK	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	138.300.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Keakrifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000
				Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000
			Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Seta Organisasi Kemasyarakatan Tongkat daerah kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan	Sub Kegiatan Integritas Pembanguna Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengolahan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	412.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb,BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	239.933.000
13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	129.234.100
			KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	279.530.800
			KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	140.725.000
			PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	256.053.000

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	90.322.100
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	340.543.750
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
15	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	7.349.600
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	130.946.000,00
				Penyediaan Sandang	14.000.000,00
				Penyediaan Alat Bantu	230.396.000,00
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.500.000,00
				Pemberian Layanan Kedaruratan	13.007.000,00

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	189.431.200,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	187.012.000,00
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	462.139.000,00
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	254.000.000,00
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	891.570.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	57.710.400,00
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	61.682.400,00
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	271.485.000,00

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	86.335.000,00
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.926.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.918.000,00
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.668.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18.347.600,00
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	11.518.800,00

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	99.335.000,00
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.013.000,00
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195.257.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	55.750.000,00
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	190.562.000,00
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	49.352.000,00
TOTAL ANGGARAN					209.049.139.068

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Pangan

- Ketersediaan pangan utama

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Pada tahun 2020-2024 rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama cenderung turun dan berfluktuasi. Berfluktuasinya ketersediaan pangan tersebut dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Beberapa wilayah pertanian melalui fasilitasi dari pemerintah daerah telah mengadopsi teknik penanggulangan organisme pengganggu tanaman yang telah berhasil dikembangakan di daerah lain secara partisipatif. Upaya pengendalian lain melalui perizinan pertanahan juga secara intensif terus dilakukan sehingga alih fungsi lahan pertanian secara illegal sebagai salah satu faktor penurun produksi pertanian dapat ditekan. Perkembangan kondisi pangan Kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.188
Ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (ton)	28.706.10	26.037.32	23.476.64	25.883,46	26.100,00
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio	5,11	4,56	4,03	4,51	4,44

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Ketersediaan energi dan protein perkapita

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Sedangkan berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr. Jika dilihat ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir sudah

memenuhi standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari.

Tabel 2.189
Ketersedian energi dan Protein perkapita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan energi (kkal/ kapita/ hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD	3.042	2.970	2.480	2.437	2.468
2	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD	72,87	69,38	69,72	74,02	74,96

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Rokan Hulu sedikit di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2024 ketersediaan energi mencapai 2.468 kal/kap/hr di atas standar nasional yaitu 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan protein mencapai 74,96 gram/kapita/hari di atas standar nasional yaitu 63 gr/kap/hari. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein per kapita di Kabupaten Rokan Hulu sedikit lebih mandiri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.

- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Tabel 2.190
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	10	10	4	10	10
2	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	10	10	4	10	10
3	Rasio	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2025

Pada tahun 2024 terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu cukup stabil, yaitu sebanyak 10 kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Hal ini ditunjukkan oleh

beberapa indikator ketahanan pangan, antara lain; (1) produksi beberapa komoditas penting cendrung meningkat; (2) pergerakan harga-harga pangan masih stabil, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar Nasional (Puasa, Idul Fitri dan Tahun Baru); (3) Pendapatan masyarakat pada umumnya meningkat yang diukur dari nilai upah (baik upah buruh tani maupun pekerja informal di sektor industri); (4) rata-rata nilai tukar petani meningkat; (5) kualitas konsumsi masyarakat meningkat; (6) proporsi penduduk rawan pangan dan penduduk miskin semakin menurun; (7) terjadinya perbaikan infrastruktur jalan menuju desa-desa yang sebelumnnya terisolir; (8) pasokan bahan pangan yang tidak dapat diproduksi hingga saat ini tetap lancar.

- Pertumbuhan produksi bahan pangan

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Rokan Hulu mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam sektor produksi pangan. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang mencerminkan berbagai tantangan dan peluang di sektor pertanian dan perikanan. Beberapa komoditas utama yang menjadi tumpuan pangan pokok menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Produksi beras, sebagai sumber pangan utama, mengalami penurunan rata-rata sebesar (39,66) persen per tahun, dari 27.224 ton pada 2020 menjadi hanya 3.609 ton pada 2024. Jagung juga mengalami penurunan signifikan (39,45 persen), meskipun sempat melonjak pada 2022. Kedelai, yang penting sebagai sumber protein nabati, menurun drastis hingga (66,46) persen, menunjukkan potensi krisis produksi yang perlu diantisipasi. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan kurangnya teknologi budidaya yang mendukung produktivitas. Berbeda dengan komoditas pangan pokok, beberapa komoditas hortikultura mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Produksi buah-buahan tumbuh rata-rata 26,49 persen per tahun, dan sayuran meningkat 21,03 persen, mencerminkan potensi besar sektor hortikultura untuk mendukung ketahanan dan diversifikasi pangan daerah. Pertumbuhan ini juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan konsumsi sehat serta peluang pasar lokal dan regional. Komoditas ikan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil 1,24 persen, yang mencerminkan keberlangsungan produksi perikanan di Rokan Hulu, baik dari tangkapan alam maupun budidaya.

Tabel 2.191
Perkembangan Produksi Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Komoditi	TAHUN					Pert (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Beras	27.224,14	19,418.27	12,817.61	7.947.82	3.609,00	(39.66)
2	Jagung	6.374.84	4.004.55	42.018.00	426.49	856,76	(39.45)
3	Kedelai	434.67	193.25	875	133	5,5	(66.46)
4	Kacang Tanah	96.66	117.78	176.03	117.780	87,77	(2.38)
5	Kacang Hijau	60.9	77.07	6.87	37.97	26,53	(18.76)
6	Ubi Jalar	504.93	444.07	390.5	528,92	543,65	1.86
7	Ubi Kayu	4,730.63	5,147.84	3556.6	2.429,96	2.060,85	(18.76)
8	Buah – buahan	13,636.40	675,605.79	119879.5	89.970	34.911,441	26.49
9	Sayuran	17,540.90	15,885.81	9036.3	9.344,94	37.635,741	21.03
10	Daging	1,475.46	1,475.46	1952.63	888,63	1060,4	(7.93)
11	Telur	628.16	628.16	645.31	61,52		
12	Ikan	8,902.05	9,020.03	9.297.75	9.306,96	9,352,62	1.24
Rata-rata pertumbuhan							

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2025

Komoditas seperti ubi jalar mengalami pertumbuhan stabil sebesar 1,86 persen, sedangkan ubi kayu justru menurun (18,76) persen, yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dan penurunan lahan tanam. Sedangkan Daging mengalami penurunan moderat (7,93persen).

- Desa Rawan Pangan dan Rentan Pangan

Desa rawan pangan dan desa rentan rawan pangan adalah istilah yang digunakan dalam konteks keamanan pangan untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik tertentu dari suatu wilayah pedesaan. Desa rawan pangan merujuk pada wilayah pedesaan di mana terdapat risiko tinggi terhadap ketidakstabilan pangan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, perkembangan status desa rawan pangan dan rentan rawan pangan pada periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024, tidak terdapat desa yang masuk dalam kategori rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu berada dalam keadaan stabil dan terkendali, tanpa adanya wilayah yang mengalami kekurangan pangan yang bersifat kronis atau ekstrem. Sementara itu, jumlah desa yang tergolong rentan rawan pangan mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2021, tercatat

sebanyak 10 desa yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Jumlah ini sempat meningkat menjadi 13 desa pada tahun 2022. Namun, dengan berbagai intervensi kebijakan dan program yang dijalankan, jumlah tersebut berhasil ditekan drastis menjadi hanya 1 desa pada tahun 2023, dan tetap bertahan di angka yang sama pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengidentifikasi, memetakan, serta menangani potensi kerawanan pangan sejak dini melalui pendekatan terpadu dan program yang berkelanjutan. Adapun Desa Rawan Pangan dan Desa Rentan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.192
Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Desa Rawan Pangan	0	0	0	0
2	Desa Rentan Rawan Pangan	10	13	1	1

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2025

4) Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Selama periode 2020 hingga 2024, terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan pertanahan, yaitu persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. dalam hal persentase luas lahan bersertifikat, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,019 persen. Namun, setelahnya terjadi penurunan yang signifikan, yaitu hanya 0,119 persen pada tahun 2022, sedikit meningkat menjadi 0,473 persen pada 2023, dan kembali menurun tipis menjadi 0,459 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi peningkatan lahan bersertifikat dari tahun ke tahun. terkait penyelesaian kasus tanah negara, selama lima tahun terakhir tercatat tidak ada kasus yang diselesaikan (Nihil). Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat kasus tanah negara yang masuk atau diselesaikan, atau bisa juga mencerminkan adanya hambatan dalam proses penyelesaiannya. untuk penyelesaian izin lokasi, terdapat tren yang cenderung meningkat. Dari 10 berkas

yang diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021, angka ini meningkat menjadi 11 pada tahun 2022, dan mencapai 14 pada tahun 2023 serta tetap stabil di angka yang sama pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan administrasi pertanahan khususnya dalam penyelesaian berkas izin lokasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel 2.193
Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	1,137	2,019	0,119	0,473	0,459
Penyelesaian kasus tanah Negara	Kasus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Penyelesaian izin lokasi	Izin Lokasi (Berkas)	10	10	11	14	14

* Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

Rekapitulasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.194
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s/d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,99	67,27	62,82	65,31
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,33	62	50	52,73
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,33	90,67	91,05	93,11
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	31,72	33,03	32,64	35,49

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 mencapai 65,31 poin yang termasuk kategori Cukup Baik. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,49 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 62,82 poin. Namun, capaian tahun 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencatat nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir, yakni sebesar 67,27 poin.

Secara rinci, peningkatan IKLH tahun 2024 dipengaruhi oleh perbaikan pada tiga komponen utama, yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) naik dari 50,00 pada tahun 2023 menjadi 52,73 pada tahun 2024. Meski terjadi peningkatan, angka ini masih tergolong rendah dan belum kembali ke kondisi tahun 2022 (62,00), bahkan lebih rendah dibanding tahun 2021 (53,33).
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) terus menunjukkan tren positif, meningkat dari 91,05 pada tahun 2023 menjadi 93,11 pada tahun 2024, yang merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) juga menunjukkan perbaikan, dari 32,64 pada tahun 2023 menjadi 35,49 pada tahun 2024, melampaui capaian tahun 2022 (33,03) dan 2021 (31,72).

Peningkatan kualitas udara terutama didorong oleh berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2024. Sementara itu, kualitas air dan tutupan lahan masih menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan serta pembuangan limbah domestik dan industri ke badan sungai

Terkait hal ini perlu adanya peningkatan pengelolaan/ peningkatan luas maupun kualitas tutupan hutan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta intervensi kebijakan alih fungsi lahan terhadap tutupan lahan yang ada.

- Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH da PUU LH yang diterbitkan oleh pemda

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 399 entitas, dan jumlah ini meningkat secara bertahap hingga mencapai 475 entitas pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa cakupan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah semakin luas dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Lebih penting lagi, tingkat pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha selama lima tahun terakhir tercatat berada pada tingkat 100 persen setiap tahunnya. Artinya, seluruh penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah telah mendapatkan pembinaan serta dipantau ketaatannya secara konsisten. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.195
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditangani	399	445	446	461	475
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	399	445	446	461	475
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Pada tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) yang dilatih dan/atau dibina, namun belum memiliki sarana dan prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 196
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	1	1	1	1	1
2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	-	-	-	-	-

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup menunjukkan frekuensi pelaksanaan yang sangat terbatas. Selama lima tahun tersebut, kegiatan ini hanya tercatat terlaksana pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024, tidak terdapat kegiatan pemberian penghargaan serupa.

Tabel 2.197
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Sedangkan untuk pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 100 persen mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.198
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	14	3	3	8	4
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	14	3	3	8	4
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan di Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana terlihat dari masih adanya fenomena tumpukan sampah di beberapa lokasi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengganggu kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara lebih luas. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengambil langkah strategis dengan membangun 2 unit Tempat Pemrosesan

Akhir (TPA), 5 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), serta mendirikan 3 unit bank sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari kecenderungan meningkatnya jumlah sampah yang berhasil dikurangi melalui prinsip 3R dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Perkembangan Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.199
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuangke lingkungan	5,31	5,34	5,15	5,13	7,1

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase cakupan area pelayanan

Salah satu Indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah cakupan pelayanan penanganan sampah. Dikabupaten Rokan Hulu Persentase cakupan area pelayanan persampahan pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 tercatat relatif tetap, yaitu sebesar 3,73 persen dengan Luas areal pelayanan pengelolaan sampah kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 283 Km2/Ha dari total wilayah kabupaten. Meskipun persentasenya masih tergolong rendah, data ini memberikan gambaran awal mengenai skala layanan persampahan yang telah dijangkau, serta pentingnya peningkatan cakupan pelayanan untuk mendukung kebersihan dan kualitas lingkungan secara menyeluruh di masa mendatang

Tabel 2.200
Persentase cakupan area pelayanan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km2/Ha)	283	283	283	283	283
2	Luas area kabupaten (km2/ha)	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Persentase cakupan area pelayanan	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase jumlah sampah yang tertangani

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, khususnya di kawasan permukiman perkotaan yang menjadi sumber utama timbulan sampah dan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan serta kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2020, Persentase sampah yang berhasil tertangani tercatat sebesar 18,83 persen, Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 18,43 persen, kemudian turun lebih tajam pada tahun 2022 menjadi 16,32 persen, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 15,85 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 23,32 persen, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan meskipun belum merata.

Tabel 2.201
Persentase jumlah sampah yang tertangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	24.040	23.533,80	21.642,97	21.833,27	24.061,61
2	Total jumlah timbulan sampah (ton)	127.685,15	127.685,15	132.613,8	137.732,69	103.202,06
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	18,83	18,43	16,32	15,85	23,32

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi:

1) Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;

2) Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.

- Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik dan pelayanan dari pemerintah daerah juga sudah baik.

Pada tahun 2020 Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 92,62 persen. Pada tahun 2021, Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 97,11 persen, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 97,55 persen pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 99,31 persen dan terakhir pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan penerbitan KTP di Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat baik.

Tabel 2.202
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	353,079	367.647	374.550	385.532	398.987
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	381,196	378.590	383.976	388.210	397.006
3	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	92.62	97.11	97,55	99,31	99,50

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio bayi ber akte Kelahiran

Salah satu Indikator dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio bayi berakte kelahiran. Dimana pada tahun 2020-2024 Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 100 persen. Namun jumlah bayi berakte kelahiran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hingga terakhir pada tahun 2024 jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 11.552 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte kelahiran menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.203
Rasio bayi berakte kelahiran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	7.971	10.218	14.493	11.422	11.552
2	Jumlah bayi	8.013	10.247	14.525	11.422	11.552
3	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio pasangan berakta Nikah

Indikator lain dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio pasangan berakta nikah. Dimana pada tahun 2020 Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,40 persen. Jumlah ini setiap tahun mengalami peningkatan, hingga terakhir pada tahun 2024 Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,58 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah. Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akta nikah menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.204
Rasio pasangan berakta nikah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	103.535	125.800	126.108	149.596	161.789
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	257,672	260.961	261.269	269.809	276.922
3	Rasio pasangan berakta nikah	0,40	0,48	0,48	0,55	0,58

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu , 2025

- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 – 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.205
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	353,079	367.647	374.550	385.532	398.987
2	Jumlah penduduk wajib KTP	381,196	378.590	383.976	388.210	397.006
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP	92.62	97.11	97,55	99,31	99,50

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2025

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu meningkat dari tahun ketahun. tercatat tahun 2020 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 92,62. Pada tahun 2021, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 97,11 jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 97,55 persen pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 99,31 persen dan terakhir pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,50 persen, Hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi antaralain perekaman jemput bola (Disdukcapil datang kedesa/kelurahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat).

- Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan. Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.206
Cakupan penerbitan akta kelahiran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun	187,512	190.919	186.111	187.531	189.850

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	bersangkutan (0 - 18 Tahun)					
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (0 - 18 Tahun)	201,858	203.670	193.512	192.690	194.178
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	92.89	93.74	96.18	97,32	97,77

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tabel 2.207
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Penerapan KTP Nasional brbasis NIK

Penerapan e-KTP dilakukan secara serentak secara Nasional dan begitu juga di Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan SIAK secara on-line di 16 kecamatan serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan peralatan pendukung.

Tabel 2.208
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel 2.209
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Jenis disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	28	11	39
2	Disabilitas Fisik dan Mental	40	56	96
3	Disabilitas Netra/Buta	37	38	75
4	Disabilitas Mental / Jiwa	195	138	333
5	Disabilitas Rungu / Wicara	4	6	10

No	Jenis disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6	Disabilitas Lainnya	19	36	55
	Total	303	196	499

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2023

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemadirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakat dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.

- Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 145 desa/kelurahan yang terdiri dari 139 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan umum yang baik salah satunya adalah kondisi kantor desa sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu 88 desa telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa dengan kondisi baik dengan rata-rata mencapai 63,31 persen. Bahkan ada kecamatan, seperti Kecamatan Ujung Batu. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sudah mencapai 100 persen. Lebih rinci untuk Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.210
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
1	BangunPurba	4	7	57,14
2	Bonai Darussalam	4	7	57,14
3	Kabun	4	6	66,67
4	Kepenuhan	2	9	22,22
5	Kepenuhan Hulu	4	5	80
6	Kunto Darussalam	6	9	66,67

No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
7	PagaranTapah Darussalam	2	3	66,67
8	Pendalian IV Koto	2	5	40
9	Rambah	9	13	69,23
10	Rambah Hilir	9	13	69,23
11	Rambah Samo	13	14	92,86
12	Rokan IV Koto	6	13	46,15
13	Tambusai	9	11	81,82
14	Tambusai Utara	7	11	63,64
15	Tandun	3	9	33,33
16	Ujung Batu	4	4	100
	Rokan Hulu	88	139	63,31

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Rokan Hulu tercatat tetap stabil, yaitu sebesar 10,15 kelompok per PKK. Angka ini menunjukkan tidak adanya fluktuasi dalam jumlah rata-rata kelompok binaan yang dibina oleh setiap PKK di tingkat desa atau kelurahan. Kestabilan angka ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program pembinaan oleh PKK, serta adanya sistem dan struktur kerja yang telah berjalan baik dan merata di seluruh wilayah kabupaten dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.211
Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sementara itu bila dilihat dari sebaran jumlah kelompok binaan PKK per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antar kecamatan. Pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kepenuhan dan Rambah Hilir memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat tinggi. Sementara beberapa kecamatan lain memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Kecamatan Kepenuhan memiliki rata-rata jumlah kelompok binaan PKK paling banyak,

dengan rata-rata 34,5 kelompok binaan PKK, sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah belum memiliki kelompok binaan PKK sama sekali. Lebih rinci untuk Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.212
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1	Bangun Purba	22	8	2,8
2	Bonai Darussalam	4	8	0,5
3	Kabun	3	7	0,4
4	Kepenuhan	345	10	34,5
5	Kepenuhan Hulu	2	6	0,3
6	Kunto Darussalam	34	10	3,4
7	Pagaran Tapah Darussalam	0	4	0,0
8	Pendalian IV Koto	12	6	2,0
9	Rambah	58	14	4,1
10	Rambah Hilir	440	14	31,4
11	Rambah Samo	304	15	20,3
12	Rokan IV Koto	50	14	3,6
13	Tambusai	2	12	0,2
14	Tambusai Utara	29	12	2,4
15	Tandun	129	10	12,9
16	Ujung Batu	139	5	27,8
Rokan Hulu		1573	155	10,15

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu, 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan desa. Kelembagaan tersebut mencakup berbagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, LPM dan PKK. Masing-masing lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Sedangkan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Lembaga Kerapatan Adat yang tersebar di seluruh Kecamatan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.213
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga
Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan											
			RT		RW		K. TARUNA		POS YANDU		LPM		PKK	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Ujung Batu	1	4	47	87	13	34	1	4	1	38	1	4	1	4
Rokan IV Koto	1	12	11	174	4	82	1	13	1	36	1	13	1	13
Rambah	1	11	30	259	14	121	1	13	1	42	1	13	1	13
Tambusai	1	3	31	206	15	93	1	11	1	44	1	11	1	11
Kepenuhan	1	7	32	122	10	61	1	9	1	23	1	9	1	9
Kunto Darussalam	1	2	90	172	16	56	1	9	1	23	1	9	1	9
Rambah Samo		8		235		91		14		59		14		14
Rambah Hilir		8		288		113		13		55		13		13
Tambusai Utara		2		340		125		11		67		11		11
Bangun Purba		4		143		59		7		23		7		7
Tandun		5		173		62		9		38		9		9
Kabun		5		105		43		6		45		6		6
Pagaran Tapah		2		70		24		3		17		3		3
Bonai Darussalam		6		117		53		7		21		7		7
Kepenuhan Hulu		3		89		39		5		17		5		5
Pendalian IV Koto		1		65		31		5		19		5		5
Jumlah	6	83	241	2645	72	1087	6	139	6	567	6	139	6	139

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu,2025

- Indeks Desa Membangun (IDM)

Pembangunan desa merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembanguan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”.

Untuk mengukur perkembangan desa, Kabupaten Rokan Hulu menggunakan indeks desa membangun (IDM), yang dibangun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. IDM merupakan status yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi(IKE) dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan (IKL). Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, berdasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. IDM

memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial. Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi dengan ambang batas sebagai berikut yaitu: (1) Desa sangat tertinggal : IDM< 0,4907 (2) Desa tertinggal: 0,4907< IDM< 0,5989 (3) Desa berkembang : 0,5989< IDM < 0,7072 (4) Desa maju: 0,7072 < IDM < 0,8155 dan (5) Desa mandiri :IDM>0,8155.

Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022 pada aplikasi http//: idm.kemendesa.go.id, menunjukkan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 5 (lima) desa status IDM mandiri. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 30 desa mandiri, 49 desa maju, 60 desa berkembang, 0 desa tertinggal, dan 0 desa sangat tertinggal. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.214
Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	UJUNG BATU	SUKA DAMAI	'0.9486	'0.8667	'0.7333	'0.8495	MANDIRI
		NGASO	'0.9200	'0.9167	'0.8000	'0.8789	MANDIRI
		UJUNG BATU TIMUR	'0.9886	'0.9333	'0.7333	'0.8851	MANDIRI
		PEMATANG TEBIH	'0.8514	'0.8000	'0.8000	'0.8171	MANDIRI
2	ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	'0.7200	'0.7000	'0.8667	'0.7622	MAJU
		CIPANG KIRI HULU	'0.7314	'0.6167	'0.8000	'0.7160	MAJU
		CIPANG KIRI HILIR	'0.8229	'0.5333	'0.6000	'0.6521	BERKEMBANG
		TANJUNG MEDAN	'0.7486	'0.6500	'0.8000	'0.7329	MAJU
		LUBUK BENDAHARA TIMUR	'0.9314	'0.8833	'0.9333	'0.9160	MANDIRI
		LUBUK BENDAHARA	'0.8857	'0.8667	'0.8000	'0.8508	MANDIRI
		SIKEBAU JAYA	'0.8286	'0.6667	'0.9333	'0.8095	MAJU
		ROKAN KOTO RUANG	'0.8857	'0.7833	'0.9333	'0.8675	MANDIRI
		ROKAN TIMUR	'0.8171	'0.7167	'0.8667	'0.8002	MAJU
		LUBUK BETUNG	'0.8229	'0.7667	'0.8667	'0.8187	MANDIRI
		PEMANDANG	'0.6743	'0.6000	'0.9333	'0.7359	MAJU
		ALAHAN	'0.8743	'0.8667	'0.8667	'0.8692	MANDIRI
		TIBAWAN	'0.8114	'0.6333	'1.0000	'0.8149	MAJU

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
	RAMBAH	RAMBAH TENGAH UTARA	'0.9029	'0.9333	'0.8000	'0.8787	MANDIRI
		RAMBAH TENGAH HILIR	'0.9657	'0.8000	'0.9333	'0.8997	MANDIRI
		RAMBAH TENGAH HULU	'0.7886	'0.8333	'0.8000	'0.8073	MAJU
		RAMBAH TENGAH BARAT	'0.8800	'0.8333	'0.8667	'0.8600	MANDIRI
		MENAMING	'0.8686	'0.8167	'0.6000	'0.7617	MAJU
		PASIR BARU	'0.8400	'0.8167	'1.0000	'0.8856	MANDIRI
		SIALANG JAYA	'0.7657	'0.8667	'0.9333	'0.8552	MANDIRI
		TANJUNG BELIT	'0.7943	'0.7333	'0.9333	'0.8203	MANDIRI
		KOTO TINGGI	'0.9086	'0.8833	'0.9333	'0.9084	MANDIRI
		SUKA MAJU	'0.8343	'0.8667	'1.0000	'0.9003	MANDIRI
		PEMALANG BERANGAN	'0.9200	'0.9000	'0.8667	'0.8956	MANDIRI
		BABUSSALAM	'0.9029	'0.8333	'0.7333	'0.8232	MANDIRI
		PASIR MAJU	'0.8171	'0.8167	'1.0000	'0.8779	MANDIRI
4	TAMBUSAI	TAMBUSAI BARAT	'0.8114	'0.6167	'0.4667	'0.6316	BERKEMBANG
		TAMBUSAI TIMUR	'0.7543	'0.6667	'0.6667	'0.6959	BERKEMBANG
		BATAS	'0.9200	'0.9000	'0.9333	'0.9178	MANDIRI
		TALIKUMAIN	'0.9086	'0.8833	'1.0000	'0.9306	MANDIRI
		RANTAU PANJANG	'0.7771	'0.6167	'0.6667	'0.6868	BERKEMBANG
		SUNGAI KUMANGO	'0.8971	'0.7667	'0.8667	'0.8435	MANDIRI
		BATANG KUMU	'0.8286	'0.7667	'0.9333	'0.8429	MANDIRI
		SIALANG RINDANG	'0.8857	'0.8833	'1.0000	'0.9230	MANDIRI
		SUKA MAJU	'0.9429	'0.9000	'1.0000	'0.9476	MANDIRI
		LUBUK SOTING	'0.8171	'0.5333	'0.9333	'0.7613	MAJU
		TINGKOK	'0.8457	'0.6500	'0.6000	'0.6986	BERKEMBANG
5	KEPENUHAN	KEPENUHAN BARAT	'0.7714	'0.7000	'0.7333	'0.7349	MAJU
		KEPENUHAN HILIR	'0.7600	'0.7500	'0.7333	'0.7478	MAJU
		KEPENUHAN TIMUR	'0.8686	'0.6833	'0.8667	'0.8062	MAJU
		KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	'0.7543	'0.7000	'0.7333	'0.7292	MAJU
		KEPENUHAN RAYA	'0.8514	'0.7500	'0.7333	'0.7783	MAJU
		KEPENUHAN BARU	'0.9200	'0.8167	'1.0000	'0.9122	MANDIRI
		KEPENUHAN BARAT MULYA	'0.7714	'0.8167	'0.8667	'0.8183	MANDIRI

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
		ULAK PATIAN	'0.7714	'0.6500	'0.6667	'0.6960	BERKEMBANG
		RANTAU BINUANG SAKTI	'0.6914	'0.5833	'0.8000	'0.6916	BERKEMBANG
6	KUNTO DARUSSALAM	KOTA INTAN	'0.8000	'0.7333	'0.8000	'0.7778	MAJU
		MUARA DILAM	'0.7943	'0.6333	'1.0000	'0.8092	MAJU
		KOTA RAYA	'0.8971	'0.8333	'1.0000	'0.9102	MANDIRI
		KOTA BARU	'0.8914	'0.6167	'0.9333	'0.8138	MAJU
		SUNGAI KUTI	'0.8286	'0.6500	'0.8667	'0.7817	MAJU
		PASIR INDAH	'0.8000	'0.5500	'0.9333	'0.7611	MAJU
		PASIR LUHUR	'0.7886	'0.5667	'1.0000	'0.7851	MAJU
		BUKIT INTAN MAKMUR	'0.8343	'0.7333	'1.0000	'0.8559	MANDIRI
		BAGAN TUJUH	'0.7829	'0.6333	'1.0000	'0.8054	MAJU
7	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	'0.9657	'0.9167	'0.9333	'0.9386	MANDIRI
		RAMBAH SAMO BARAT	'0.9029	'0.8833	'1.0000	'0.9287	MANDIRI
		RAMBAH BARU	'0.8514	'0.6000	'0.8667	'0.7727	MAJU
		RAMBAH UTAMA	'0.8800	'0.7167	'0.9333	'0.8433	MANDIRI
		PASIR MAKMUR	'0.8229	'0.5833	'0.9333	'0.7798	MAJU
		KARYA MULYA	'0.8914	'0.8333	'1.0000	'0.9083	MANDIRI
		MARGA MULYA	'0.8800	'0.8667	'1.0000	'0.9156	MANDIRI
		LANGKITIN	'0.8286	'0.8667	'0.9333	'0.8762	MANDIRI
		MASDA MAKMUR	'0.8343	'0.7167	'0.8667	'0.8059	MAJU
		LUBUK NAPAL	'0.8629	'0.8333	'0.7333	'0.8098	MAJU
		TELUK AUR	'0.8400	'0.9000	'0.8667	'0.8689	MANDIRI
		SEI SALAK	'0.7314	'0.7667	'0.6667	'0.7216	MAJU
		SEI KUNING	'0.8971	'0.8333	'0.9333	'0.8879	MANDIRI
		LUBUK BILANG	'0.8229	'0.6833	'0.9333	'0.8132	MAJU

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
8	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR	'0.8114	'0.8667	'0.6667	'0.7816	MAJU
		RAMBAH HILIR TENGAH	'0.7143	'0.7333	'0.7333	'0.7270	MAJU
		RAMBAH HILIR TIMUR	'0.7543	'0.5667	'0.8000	'0.7070	BERKEMBANG
		PASIR UTAMA	'0.8000	'0.7167	'0.6667	'0.7278	MAJU
		PASIR JAYA	'0.8171	'0.7500	'0.6667	'0.7446	MAJU
		RAMBAH MUDA	'0.8514	'0.7833	'0.6000	'0.7449	MAJU
		SUNGAI SITOLANG	'0.8114	'0.6667	'0.9333	'0.8038	MAJU
		LUBUK KERAPAT	'0.8514	'0.7167	'0.6000	'0.7227	MAJU
		RAMBAH	'0.8914	'0.9667	'0.9333	'0.9305	MANDIRI
		SEROMBOU INDAH	'0.7371	'0.5333	'0.8000	'0.6902	BERKEMBANG
		SUNGAI DUA INDAH	'0.7657	'0.6833	'0.4000	'0.6163	BERKEMBANG
		MUARA MUSU	'0.7657	'0.7000	'0.7333	'0.7330	MAJU
		SEJATI	'0.7029	'0.7333	'0.8000	'0.7454	MAJU
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	'0.8857	'0.7167	'0.8667	'0.8230	MANDIRI
		MAHATO	'0.8286	'0.7167	'0.6667	'0.7373	MAJU
		BANGUN JAYA	'0.8571	'0.9667	'0.6667	'0.8302	MANDIRI
		SIMPANG HARAPAN	'0.8114	'0.6167	'0.6000	'0.6760	BERKEMBANG
		PAGAR MAYANG	'0.8343	'0.5167	'1.0000	'0.7837	MAJU
		PAYUNG SEKAKI	'0.8286	'0.4667	'0.6000	'0.6317	BERKEMBANG
		MEKAR JAYA	'0.7829	'0.6833	'0.6667	'0.7110	MAJU
		TANJUNG MEDAN	'0.9371	'1.0000	'0.8000	'0.9124	MANDIRI
		SUKA DAMAI	'0.7200	'0.6167	'0.6667	'0.6678	BERKEMBANG
		RANTAU SAKTI	'0.8400	'0.8667	'0.8667	'0.8578	MANDIRI
		MAHATO SAKTI	'0.8514	'0.7833	'0.8667	'0.8338	MANDIRI
10	BANGUN PURBA	PASIR AGUNG	'0.9029	'0.6667	'0.8667	'0.8121	MAJU
		PASIR INTAN	'0.8400	'0.6333	'0.8667	'0.7800	MAJU
		RAMBAH JAYA	'0.8343	'0.6833	'0.8667	'0.7948	MAJU
		BANGUN PURBA	'0.7943	'0.7667	'0.8000	'0.7870	MAJU
		BANGUN PURBA TIMUR JAYA	'0.8114	'0.8167	'0.6667	'0.7649	MAJU
		BANGUN PURBA BARAT	'0.8057	'0.6667	'0.5333	'0.6686	BERKEMBANG
		TANGUN	'0.8629	'0.6500	'0.6000	'0.7043	BERKEMBANG
11	TANDUN	TANDUN	'0.9029	'0.8500	'0.8000	'0.8510	MANDIRI
		KUMAIN	'0.8229	'0.9167	'1.0000	'0.9132	MANDIRI
		BONO TAPUNG	'0.8000	'0.8667	'0.9333	'0.8667	MANDIRI
		DAYO	'0.9486	'0.7167	'0.9333	'0.8662	MANDIRI

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
		TAPUNG JAYA	'0.8629	'0.8000	'0.8667	'0.8432	MANDIRI
		PUO RAYA	'0.7600	'0.9000	'1.0000	'0.8867	MANDIRI
		SEI KUNING	'0.8000	'0.6833	'1.0000	'0.8278	MANDIRI
		KOTO TANDUN	'0.9086	'0.7833	'0.7333	'0.8084	MAJU
		TANDUN BARAT	'0.8000	'0.8167	'1.0000	'0.8722	MANDIRI
12	KABUN	KABUN	'0.9429	'0.8500	'0.8667	'0.8865	MANDIRI
		ALIANTAN	'0.8571	'0.7500	'0.8667	'0.8246	MANDIRI
		KOTO RANAH	'0.8057	'0.6000	'0.7333	'0.7130	MAJU
		BONCAH KESUMA	'0.8000	'0.7833	'0.9333	'0.8389	MANDIRI
		BATU LANGKAH BESAR	'0.7886	'0.6667	'0.8000	'0.7517	MAJU
		GITI	'0.8743	'0.7833	'0.7333	'0.7970	MAJU
13	BONAI DARUSSALAM	TELUK SONO	'0.7886	'0.6667	'0.7333	'0.7295	MAJU
		SONTANG	'0.8800	'0.8833	'0.8000	'0.8544	MANDIRI
		BONAI	'0.8286	'0.7000	'0.8000	'0.7762	MAJU
		RAWA MAKMUR	'0.8400	'0.6500	'0.6667	'0.7189	MAJU
		PAUH	'0.7829	'0.8333	'0.8000	'0.8054	MAJU
		KASANG PADANG	'0.7143	'0.7667	'0.6000	'0.6937	BERKEMBANG
		KASANG MUNGAL	'0.8171	'0.5833	'0.8000	'0.7335	MAJU
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH	'0.8400	'0.7167	'0.8667	'0.8078	MAJU
		KEMBANG DAMAI	'0.8514	'0.7500	'0.8000	'0.8005	MAJU
		SANGKIR INDAH	'0.8343	'0.6333	'0.9333	'0.8003	MAJU
15	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	'0.8171	'0.7167	'0.8000	'0.7779	MAJU
		PEKAN TEBIH	'0.8800	'0.7167	'0.8000	'0.7989	MAJU
		KEPAYANG	'0.7943	'0.5167	'0.8000	'0.7037	BERKEMBANG
		MUARA JAYA	'0.8400	'0.6667	'0.6667	'0.7244	MAJU
		KEPENUHAN JAYA	'0.7257	'0.5167	'0.8667	'0.7030	BERKEMBANG
16	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN	'0.9371	'0.6833	'0.6667	'0.7624	MAJU
		BENGKOLAN SALAK	'0.7314	'0.5667	'0.8667	'0.7216	MAJU
		SULIGI	'0.8286	'0.6500	'0.8667	'0.7817	MAJU
		AIR PANAS	'0.8514	'0.6333	'0.6667	'0.7171	MAJU
		SEI KANDIS	'0.8114	'0.6500	'0.6667	'0.7094	MAJU

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu,2025

- Lembaga ekonomi desa

Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa yag terus dikembangkan di Kabupaten Rokan Hulu adalah program BUMDes yang merupakan pengembangan kreatif yang dilakukan atas program UED-SP.

Dengan program ini diharapkan perekonomian masyarakat sektor kecil dan menengah dapat terus tumbuh. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah membentuk 153 BUMDes. Sebagai lembaga keuangan mikro, BUMDes pada dasarnya dibentuk untuk melengkapi wadah perekonomian desa dan berperan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa.

Tabel 2.215
Badan Usaha Milik Desa
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Modal
1	2017	153	Rp. 95.765.578.000
2	2018	153	Rp.101.192.942.518
3	2019	153	Rp.698.487.334.759
4	2020	153	Rp.765.900.921.659
5	2021	153	Rp.155.049.796.424
6	2022	153	Rp.160.163.841.485
7	2023	153	Rp.163.052.227.408
8	2024	153	Rp.172.008.626.485
Jumlah			

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah memiliki 153 Badan Usaha di Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik Kelurahan (BUEK) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Badan Usaha Ekonomi Desa Bersama (BUMDESMA) yang ada sudah sebanyak 7 (tujuh) badan usaha yang berdiri dari Tahun 2022 dan merupakan transformasi eks-PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang terdapat pada 7 (tujuh) Kecamatan. BUMDesa, BUEK dan BUMDESMA mempunyai unit-unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi Desa masing-masing yang sampai saat ini telah mencapai 461 Unit Usaha. Adapun potensi desa di Kabupaten Rokan Hulu didominasi perkebunan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.216
BUMDES dan unit usaha BUMDES potensi serta lembaga ekonomi lain di kabupaten Rokan Hulu

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
1	Damai Mandiri	Sukadamai/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. BNI Link 3. Pertanian 4. saprotan	PERDAGANGAN, JASA, BATU KALI, GALIAN C, KULINER	PT, SAI

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
2	BUMDes Ngaso Mandiri	Ngaso / Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Unit Rental Mobil 3. Unit Cucian Hidrolik 4. Budidaya Cacing Sutra	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN,	Nihil
3	Timur Sejahtera	Ujungbatu Timur/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi (Pupuk) 3. BRIlink 4. Sewa Kios	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	PUAP
4	BUMDesa TEBIH MANDIRI	Pematang Tebih/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Pupuk 3. Gas LPG 4.Destinasi wisata	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN, PERKEBUNAN	PT, SAI, PT UKL, PT BRJ, PT Syuhada, PT Reval
5	Berkat Yakin	Cipang Kanan/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Edc BRIlink	WISATA AIR TERJUN, PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
6	Mentawai Hulu Sepakat	Cipang Kiri Hulu/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Wifi 5. Sewa Alat Pertanian 6. Saprotan	PERKEBUNAN, PERTANIAN,HASIL HUTAN	Nihil
7	Titian Barokah	Cipang Kiri Hilir/ Rokan Iv Koto	1.Simpan Pinjam 2. Mobil Angkutan L300 3. Depot Air Minum 4. Wifi 5. Penjualan Gas Elpiji 6. Sarana Pertanian 7. Sewa Tenda dan Pelaminan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
8	BUMDesa Berkat Usaha	Tanjung Medan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan dan BNI 46	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
9	BUMDesa Luberti Jaya	Lubuk Bendahara Timur/ Rokan IV Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Transaksi Online 4. Perikanan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Setia, PT SAI
10	Lubend Karya Mandiri	Lubuk Bendahara/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2.Perikanan	WISATA BUDAYA DAN AIR TERJUN, PERKEBUNAN	Kebun YPLI, PT KCN
11	Jaya Mandiri	Sikebau Jaya/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan 3. Pasar 4. Kolam Pancing	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Karya ssepakat, Kube Tunas merapi Manunggal
12	BUMDesa Tuah Bosamo	Rokan Koto Ruang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan 3. Wisata	PERTANIAN SAWAH, WISATA KERAJAAN ROKAN, DAN PERKEBUNAN	Nihil
13	BUMDesa Rotim Jaya	Rokan Timur/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
14	BUMDesa Betung Mandiri	Lubuk Betung/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Grosir Eceran Barang Harian 3. Serbuk kendang Ayam Pedaging	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan Istiqomah, PUAP mandiri
15		Pemandang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
	BUMDesa Pemandang Indah		3. Wifi Desa		
16	BUMDesa Alahan Mandiri	Alahan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. BRIlink		
			3.Pasar Karet Tender		
			4.Kedai Sembako 5.Ayam petelur		
17	BUMDesa Setia Amana	Tibawan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam	WISATA SPORT PARAHLAYANG, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. Wifi dan ATK		
			3. Pengolahan Makanan		
18	BUMDes Ratu Jaya	Rambah Tengah Utara/ Rambah	1. Konveksi	PERDAGANGAN, JASA DAN KULINER	Pusar Kota
			2. Simpan pinjam		
19	BUM Desa Bina Usaha	Rambah Tengah Hilir/ Rambah	1. Simpan Pinjam	WISARA DANAU, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Gapoktan
			2. Unit Dagang Sarana Pertanian		
			3. Unit Wisata Danau		
			4. Unit Pasar		
			5. Unit TPS 3 R (Tempat Pengelolaan Sampah)		
20	Maju Bersama	Rambah Tengah Hulu/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. Saprodi		
21	BUMDes Haiti Karya	Rambah Tengah Barat/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN AREN, KARET DAN SAWIT	Nihil
			2. Unit Fotocopy ATK		
			2. Unit Serbuk Gula Aren		
22	BUMdes Mekar Jaya	Menaming/ Rambah	1. Simpan Pinjam	SAWAH, POTENSI AIR, LAHAN PETERNAKAN LUAS, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani dan PUAP
			2. Sembako		
			3. Kredit Barang		
			4. Bangunan		
			5. Perikanan		
23	BUMDes Mitra Mandiri	Pasir Baru/ Rambah	1. Simpan Pinjam	SAWAH, PERTANIAN, PETERNAKAN	KUD Daya Mak mur, Kopwan Tunas Baru
			2. Unit Toko Bangunan		
			3. Unit Usaha Saprodi		
24	BUMDes Cipta Karya Bersama	Sialang Jaya/ Rambah	1. Simpan Pinjam	WISATA , PERKEBUNAN, PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Unit LPG 3 Kg		
			3. Unit Saprotan		
25	Tanjung Mandiri	Tanjung Belit / Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. Gas LPG		
			3. Keramba Ikan		
26	Jaya Bersama	Koto Tinggi / Rambah	1.Simpan Pinjam	PERDAGANAGAN DAN JASA	Pusat kota
			2.Pasar dan Pariwisata		
27	Maju Bersama	Suka Maju / Rambah	1. Unit Simpan Pinjam	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	Koperasi Dei Tunggal
			2. Toko Bangunan		
28	BUMDesa Pematang Jaya	Pematang Berangan/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PUSAT KOTA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
			2. Perkreditan Barang		
			3. LPG		
			4. Papan Bunga		
29	BUMDes Babussalam Sejahtera	Babussalam/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
			2. Kredit Barang		
			3. Pariwisata		
30	BUMDes Maju Lestari	Pasir Maju/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERTANIAN, SAWAH, PERKEBUNAN	KUD Daya Makmur, Kopwan Mekar Bersemi
			2. Saprodi		
			3. Brilink		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			4. Taman Hiburan		
31	BUM Desa Maju Jaya	Tambusai Barat/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN, BATAS KABUPATEN DAN PROVINSI	Koperasi Hati Nurani,PT Genk, Pt Jabal Perkasa, Kopwan
			2. Unit BRIlink		
			3. Unit Transfortasi		
			4. Unit Abu Senator		
32	BUMDesa Amanah	Tambusai Timur/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	KUD Kepertam, KUD Siaga Makmur
			2. Saprodi		
			3. Kantin		
33	BUMDes Usaha Sepakat Jaya	Batas/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETANIAN DAN PERDAGANGAN	Koptan Sialang Sakti
			2. Sewa Molen		
			3. Leasing Syariah		
			4. Sewa Tenda		
34	BUM Desa Bertuah	Talikumain / Tambusai	1. Unit BUMDesmart	PERDAGANGAN, DEKAT PUSAT KECAMATAN, JASA	Nihil
			2. Unit Simpan Pinjam dan BRIlink		
			3. Unit Futsal		
35	Bina Usaha	Rantau Panjang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT GSM
			2. Saprotan		
36	BUMDesa D.Lima Saroha	Sungai Kumango/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. ATK		
			3. Transportasi		
			4. Edc BRIlink		
			5. Pangkalan LPG 3 Kg		
37	BUMDes Maju Bersama	Tambusai/ Batang Kumu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNANA	Nihil
			2. Jasa Angkutan		
			3. Unit LPG Belum di Gunakan		
38	BUMDes Usaha Bersama Sialang Rindang	Sialang Rindang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan dan Gapoktan
			2. Unit Resto		
			3. Unit Lele		
			4. Unit Ubi Casesa		
39	BUM Desa Sumber Rezeki	Suka Maju/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	Kelompok Tani
			2. Wahana Permainan		
			3. Papan Bunga		
			4. Jual Beli Tbs		
40	BUM Desa SAROHA	Lubuk Soting/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN	KUD Sawit Perkasa, KUD Siaga Makmur
			2. Saprotan		
			3. Kebun Sawit		
41	BUMDesa Tingkok Bersatu Insan Lubis	Tingkok/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Saprotan		
			3. Kebun		
42	BUMDesa Bina Usaha	Kepenuhan Barat / Kepenuhan	1. Simpan Pnjam	PERKEBUNAN	Kelompok Tani
			2. PB Sawit		
			3. Saprodi		
43	BUMDes Maju Bersama	Kepenuhan Hilir/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN	Koperasi Kasimang, Koperasi Karya nyata
			2. Unit Dagang		
44	BUM Desa Timur Makmur	Kepenuhan Timur/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Koperasi Sawit Mekar Sari,Kopsatimja, PT Sji
			2. Unit Dagang Sarana Pertanian		
			3. Unit Toko Bangunan		
			4. Penambahan Modal Usaha Perdagangan		
45	Karya Bina Mulya	Kepenuhan Barat Seroja/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN DAGANG	
			2. Pangkalan Elpiji 3 Kg		
46	Makmur Sejahtera	Kepenuhan Raya / Kepenuhan	1. Simpan Pinjam		
			2. Saprodi		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
47	BUM Desa Maju Lancar	Kepenuhan Baru/Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN DAN DAGANG	KUD Sumber Makmur
48	BUMDes Karya Bina Mulia	Kepenuhan Barat Mulya/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Gas	PERKEBUNAN	KUD Barat Myulya, PT Era sawita
49	BUMDesa ULPA Jaya	Ulak Patian/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Pertamini 3. Toko Bangunan	PERKEBUNAN, PERIKANAN	Koperasi BBL, PT Piss 2, PT Sji Coy
50	BUMDesa Bunga Tanjung Jaya	Rantau Binuang Sakti/Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Wisata Religi 3. Gas Pengecer	WISATA RELIGI, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Kapsa Muda
51	BUMDes Kota Intan	Kota Intan/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Sarana Produksi Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD kota Intan
52	BUMDesa Bina Usaha	Muara Dilam/Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa	PERKEBUNANA DAN PERDAGANGAN	KUD elok Busamo, Kopwan, PT CBA,PT SIS, PT Hutayan, PT SAM, PT DBC,PT CSA, Pertashop
53	BUM Desa Sumber Rezeki	Kota Raya/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun 3. Ternak Sapi 4. Usaha Kredit Barang 5. Tapak Hunian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN	KUD Sido Muncul, PT Edi, PT CBA, PT EMA
54	BUMDesa Sumber Makmur	Kota Baru/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel + Sperpark	PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
55	BUMDes Karya Mulia	Sungai Kuti/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun Sawit 3. Unit Penyewaan Tenda	PERKEBUNAN	
56	BUMDesa Syari'ah Mitra Mandiri	Pasir Indah / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Pertanian 4. BRIlink	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	KUD, Kelompok tani 3, kopwan
57	BUMDesa Sri Rejeki	Pasir Luhur / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Depot Air Minum 4. Penggemukan Sapi 5. Kebun Sawit 6. Kantin Gor	PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN DAGANG	KUD Usaha Bersama, Kopwan
58	BUMDesa Usaha Makmur	Bukit Intan Makmur/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Intan Makmur
59	BUMDes Permata Jaya	Bagan Tujuh/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Kebun Kelapa Sawit 4. Saprotan	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN, JASA	KUD Tujuh Permata, PT SJI
60	BUM Desa Maju Berkah	Rambah Samo/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kredit Barang 3. Unit TBS Sawit 4. Unit Dagang Sarana Pertanian	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Gapoktan Makmur Bersama
61	BUMDes Mitra Usaha Mandiri	Rambah Samo Barat / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BUMserda 3. Puyuh Petelur	PERKEBUNAN, REKLAME, LAPANGAN PESAWAT	
62	BUMDes Mekar Sari	Rambah Baru/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Perkreditan Barang 3. Perdagangan Beras 4. Bahan Bangunan 5. Pasar Desa	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan
63		Rambah Utama/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink	SAWAH, PETERNAKAN ,	KUD Sri Rezeki

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
	BUMDes Rambah Utama		3. Pasar Desa 4. Unit Toko Bangunan	PERCETAKAN BATU BATA, PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
64	BUMDesa Sarana Makmur	Pasir Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel dan Sperpark 3. Budidaya Ikan	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
65	BUMDesa Karya Usaha Bersama	Karya Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Jasa Transportasi 4. Air Masak	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
66	BUMDes Mitra Usaha Mulya	Marga Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang & Layanan BRIlink 3. Transportasi 4. Peternakan	SAWAH PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan Tani Mulya
67	BUMDesa Langkitin	Langkitin/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bus Anak Sekolah 3. Bengkel dan Sperpark	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	
68	BUMDes Masda Mandiri	Masda Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Depot Air Masak 4. Sewa Alat Pertanian 5. Alat Pertanian 6 Unit	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
69	Suka Maju	Lubuk Napal/ Rambah Samo	1.Kredit Barang 2.Dagang Kelontong	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
70	BUM Desa Aur Sejahtera	Teluk Aur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Wisata Embung 4. Unit Angkutan Hasil Pertanian Dan Perkebunan	WISATA BENDUNGAN, PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan Korojo Busamo, PT KSM
71	BUMDesa Sei Salak Bersatu	Sungai Salak/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Ternak Lele 3. Pengelohan Pakan Ternak	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
72	BUMDesa Maju Jaya	Sei Kuning/ Rambah Samo	1. Perkreditan Barang 2. Transportasi 3. Gas LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	PT SAI, PT Agro Jaya
73	BUMDesa Cahaya Baru	Lubuk Bilang/Rambah Samo	1. Saprodi 2. Galon	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT SAI, PT Agro Lestari,
74	BUMDesa Rambah Hilir	Rambah Hilir/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Mini Market 3. Edc	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN, GALIAN C	
75	Karya Muda Mandiri	Rambah Hilir Tengah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Harian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Muman
76	BUMDesa Bersatu	Ranbah Hilir Timur/Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi	PERKEBUNANAN DAN PERDAGANGAN	
77	BUMDesa Jaya Utama	Pasir Utama / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Saprodi,Kredit Barang dan Penggemukan Sapi		
78	BUMDes Karya angun	Pasir Jaya/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Usaha Gas 3. Unit Usaha Jasa Listrik	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			4. Unit Usaha Saprodi		
79			1. Simpan Pinjam		KUD, Gapoktan

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
	BUMDes Rambah Muda Jaya	Rambah Muda/ Rambah Hilir	2.Kredit Barang Syariah 3.BRIlink 4.Penanaman Semangka	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	
80	BUMDesa Bina Usaha	Sungai Sitolang/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. ATK 3. Tenda Pelaminan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
81	BUMDesa Berkah Mandiri	Lubuk Kerapat/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Air Isi Ulang 3. Tenda Dan Dekorasi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUBE
82	BUMDesa Kumu Jaya Bersama	Rambah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Usaha Distributor Beras 3. Unit Usaha Kredit Barang 4. Unit Usaha Mandirilink 5. Mesin Produksi	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	
83	BUM Desa Tuah Serombou Jaya	Serombou Indah / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Air Bersih 3. Unit Penyewaan Molen	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
84	BUMDesa Rezki Bersama	Sungai Dua Indah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2 Toko Bangunan	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Gapoktan
86	Tuah Negeri	Muara Musu / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Pangkalan LPG 3kg	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
86	BUM Desa Rahmat Sejati	Sejati / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Pupuk Subsidi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
87	BUMDes Rantau Kasai	Tambusai Utara/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Pangkalan Gas LPG 3. Penyewaan Alat Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Hati Nurani
88	BUMDesa Arwana	Mahato/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Pangkalan LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Persukuan,KUD Mahato Bersatu, KUD Karya Bakti, KUD Rumpun Melayu
89	BUMDes Mitra Jaya Mandiri	Bangun Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Dwi Tunggal
			2. Penggaduhan Sapi		
90	BUMDesa Harapan Jaya Lesatari	Simpang Harapan/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Ternak Sapi 4. Pertanian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan
91	BUMDes Sumber Makmur	Pagar Mayang/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang/Gas LPG 3. Unit Peternakan Ayam 4. Unit Peternakan Sapi	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
92	BUMDes Sumber Mulya	Payung Sekaki/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit Saprotan 3. Unit LPG 4. Ternak Sapi	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
93	BUMDes Maju Jaya	Mekar Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Peternakan Sapi 3. Giling Jenang	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
94	BUM Desa Syariah Kembang Setanjung	Tanjung Medan/ Tambusai Utara	1. Simpanan Dan Pembiayaan Syariah 2. Brilink 3. Gas LPG (Subsidi dan Non Subsisdi)	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi CU Mandiri
95	BUM Desa Syariah Nur Amanah	Suka Damai/Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Agen BRI Link 3. Perkreditan Barang 4. Sewa Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Koperasi Karya Bakti
96	BUMDes Sumber Rejeki	Rantau Sakti/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit LPG 3. Depot Air Minum	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sumber Ayu, PUAP
97	BUMDesa Syariah Usaha Bersama	Mahato Sakti / Tambusai Utara	1.Pembiayaan Syariah 2. Pangkalan Gas elpiji 3 kg 3. Suplayer TBS Sawit 4. Mini ATM EDC BRIlink	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Nihil
98	Karya Agung Mandiri	Pasir Agung / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit BRIlink 3. Pasar Desa 4. Sembako 5. Penggemukan Sapi 6. Kantin	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Gapoktan
99	BUMDes Intan Makmur	Pasir Intan/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit Sapi 3. Wisata Air 4. Digital Aplikasi	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Kopwan
100	BUMDesa Jaya Bersama	Rambah Jaya/ Bangun Purba	1.Simpan Pinjam 2.Kolam Renang	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Gapoktan Bina Usaha
101	BUMDes Satahi	Bangun Purba/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	
			2. Toko Bangunan		
102	BUMDes Mekar Serumpun	Bangun Purba Timur Jaya / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit Ternak Kerbau 3. Unit Kebun Desa	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	
103	BUMDes Tunas Muda	Bangun Purba Barat/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Pupuk 3. Alat Pertanian	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Sari Utama dan Kelompok Tani
104	BUMDes Harapan Baru	Tangun/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Ayam Potong	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
105	BUMDesa Tandun Mandiri	Tandun/ Tandun	1.Simpan Pinjam 2. Ram 3. Pengetaman Kayu	PERDAGANGAN, PASAR, PERKEBUNAN, JASA	KUD Tansba, PKS PTPN
106	BUMDes Lestari	Desa Kumain /Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Pembiayaan 3. Edc 4. Toko Bangunan 5. Depot Air Minum 6. Pangkalan Gas	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	KUD Mekar Jaya, Kopwan Amanah
107	BUMDesa Bono Tapung	Bono Tapung/ Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Ayam Potong 3. Permainan Anak Anak	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	KUD Tani Sejahtera
108	BUMDes Dayo Sejahtera	Dayo/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	KUD Dayo Mukti
109	BUMDesa Bunga Sari	Tapung Jaya / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Wifi	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	KUD Karya Mukti

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			4. Perikanan & Peternakan		
110	BUMDesa Tunas Harapan Jaya	Puo Raya/Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Toko Saprotan 4. Toko Bangunan	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	
111	BUMDesa Makmur Jaya	Sei Kuning/ Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Ternak Ayam Potong	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	
112	BUMDesa Kotan Mandiri	Koto Tandun / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Edc BRIlink 3.Pemgelolaan Pasar Kaget 4. Ternak Ayam Pedaging 5.Penyewaan Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	
113	Padura Lestari	Tandun Barat / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. ATK (Alat Tulis Kantor) 3. Gedung Serbaguna 4. Penggaduhan Sapi	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	Nihil
114	BUMDesa Kabun Sejahtera	Kabun / Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	KUD Bumi Asih
115	BUM Desa Aliantan Sepakat	Aliantan/ Kabun	1. Sp Ditutup 2. Kredit Brg Ditutup 3. Bahan Bangunan 4. Unit Wisata	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	PT Padasa, PT FAA
116	BUMDes Maju Bersama	Koto Ranah/ Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Unit Potocopy & ATK 3. Kebun Kelapa Sawit 4. Sewa Alat Camping 5. Mandiri Link	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani
117	BUMDesa Artha Mitra Kesuma	Boncah Kesuma/ Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Air Galon 3.Toko Saprodi 4. Toko Bangunan 5. Pasar 6. Sewa Tenda 7. Online BRIlink 8. Posfin	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Bangkit Usahan Makmur, dan Kopwan
118	BUMDesa Barokah Jaya	Batu Langkah Besar/ Kabun	1. Toko Saprotan	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	
119	BUMDesa Perdana Bakti	Giti/Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Online Transfer	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	
120	BuUMDesa Anugrah Sejahtera	Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Dagang 4. Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	Kopwan, PT SAM, PT utayan, Pt Andika
121	TUAH KAMPUNG	Sontang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Adc- BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Sontang Bertuah, PT RAS, PT GPH, PT SSP, PT APSL, PT BDB
122	BUMDesa Kualo Bonai	Bonai/ Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Fotokopi dan ATK 3. EDC BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	
123	Mandiri Jaya Makmur	Rawa Makmur / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. ATK & Foto Copy 3. Depot Air Minum	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			4. Gas elpiji		
124	BUMDesa Mahligai Sri Pauh	Pauh/ Bonai Darussalam	1. Siman Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Cepron, PT Alim Desa, PT Parna, PT Raka
			2. Depot Air Minum Isi Ulang		
125	BUMDesa Kasang Padang Mandiri	Kasang Padang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Edc BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan
126	Mekar Bersama	Kasang Mungkal / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Lele	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sungai 2 Cemerlang, Kopwan, PT PIS 2
127	BUMDes Patap Mandiri	Pagaran Tapah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	KUD panca Usaha, PTPN 5 Sei Rokan
128	BUM Desa Kembang Damai	Kembang Damai/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2.BRIlink 3.Perkreditan 4.Spare Park 5.Molen	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	
129	BUMDes Sangkir Sejahtera	Sangkir Indah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air "Ro" 3. Lumbung Jeruk	PERKEBUNAN JERUK, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD, PT SAI, Kelompok Tani 3 klp
130	BUM Desa Tangkerang Jaya	Kepenuhan Hulu/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Wisata Kuliner & Edukasi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
131	BUMDesa Pekan Tebih	Pekan Tebih/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Kebun Sawit 3. Quari	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
132	Kepayang Abadi	Kepayang / Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Gas LPG 3. Depot Air 4. Kebun Desa	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
133	BUMDesa Muara Jaya	Muara Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Minum 3. Gas LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
134	BUMDes Sinar Gemilang	Kepenuhan Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Galon	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sari Mukti, PT Eka Dura
135	Pendalian Mandiri	Pendalian/Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Penyewaan Sarana Dan Prasarana Lapangan Sepak Bola	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD Tapak Sakti, PT MCM, PTPN V Sei Asam
136	Mitra Bersama	Bengkolan Salak/ Pendalian Iv Koto	1.Perikanan 2.BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Hasta Utama, PTPN V sia sam
137	BUMDes Suligi Mandiri	Suligi / Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Pinjaman Barang 3. Unit Pengelolaan Pasar 4.Unit Kredit Candak Kulak 5. Unit Perdagangan Skala Mikro 6. Unit Peternakan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
138	Usaha Madani	Air Panas/Pendalian IV Koto	1.Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Doorsmeer Hidrolik 4. Kebun 5. Peternakan Kambing	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Wisma Tani dan 25 Kelompok Tani

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
139	Maju Jaya Sejahtera	Sei Kandis/ Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi Pertanian 3. Lebah Kelulut 4.Kebun 5.Kredit barang 6. Toko bangunan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Mekar Bersama

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu, 2024

- Lembaga swadaya masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi jasa sukarelawan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk melakukan sinergi dengan lembaga pemerintah. Oleh sebab itulah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk LSM di setiap desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi masalah sosial yang ada di Kabupaten Rokan Hulu

- Persentase PKK aktif

Selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Rokan Hulu tercatat dalam kondisi aktif. Jumlah PKK yang ada di setiap tahunnya mencapai 155 kelompok, dan seluruhnya aktif menjalankan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. Hal ini tercermin dari persentase keaktifan PKK yang mencapai 100 persen setiap tahunnya.

Tabel 2. 217
Persentase PKK aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKK aktif	155	155	155	155	155
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase Posyandu aktif

Indikator lain dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah persentase posyandu aktif. Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan pelayanan yang sangat baik pada periode 2020-2024. Hal ini dilihat dari persentase posyandu yang sudah aktif mencapai 100 persen dalam memberikan pelayanan kesehatan di desa.

Tabel 2.218
Persentase Posyandu aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu aktif	564	564	614	564	595
2	Total posyandu	564	564	614	564	595
3	Persentase Posyandu aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel 2.219
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
2	Total program pemberdayaan masyarakat	2	2	1	1	1
3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	50	50	100	100	100

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel 2. 220
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	1	1	1	1	1
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
3	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya di Indonesia adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan

keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak.

- Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercatat sebesar 17,24 persen dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dikampung KB sebanyak 5 perangkat daerah dibandingkan jumlah semua Perangkat Daerah (Dinas/Badan). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.221
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	5	5	5	5	5
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Indikator lain dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Kurun waktu tahun 2020- 2024 perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk sebanyak 4 Perangkat Daerah atau 13,79 persen.

Tabel 2.222
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan
Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	4	4	4	4	4
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	13.79	13,79	13,79	13,79	13,79

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah kebijakan Perda/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Tabel 2.223
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	0

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Sedangkan untuk sektor yang memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tercatat sebesar 5 sektor pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.224
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sektor	5	5	5	5	5

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Tabel 2.225
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	1	1	1	3	3

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tabel 2.226
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak	253.650	265.065	258.353	105.879	149,326
2	Jumlah keluarga	159,500	116.389	117.443	126.660	130,093
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, program Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu solusi yang efektif. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program KB di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan hasil yang sangat positif pada periode 2020–2024, ditandai dengan rata-rata jumlah anak per keluarga yang mencapai angka ideal, yakni dua orang. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan usia subur, mengenai pentingnya perencanaan keluarga demi menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

- Rasio akseptor KB

Prevalensi akseptor KB (KB aktif) persentasenya cendrung menurun dan berfluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan bertambahnya akseptor KB, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.227
Jumlah Rasio akseptor KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah aseptor KB	52.298	55.280	20.952	44.159	55,311

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah pasangan usia subur	70.359	73.828	41.853	75.179	86,292
3	Rasio akseptor KB	74,33	74,87	50,06	58,74	64,09

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi pencapaian akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 mencapai 64,09 persen mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian akseptor KB pada tahun 2023 sebesar 58,74 persen. Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan berfluktuatif. Pada tahun 2024 pasangan usia subur sebesar 86,292 dan jumlah peserta KB sebesar 55,311 PUS (64,09%) dan yang tidak ber-KB PUS (35,01%).

- Indeks Kualitas Keluarga

Tabel 2.228
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) bagi perempuan menikah usia 15- 49 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif	52,298	55.280	21.323	43.575	54.047
2	Jumlah pasangan usia subur	70,359	73.828	41.853	75.179	86.292
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	74.33	74.87	50.95	57,96	62,63

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan indikator ASFR merupakan dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Manfaat lain adalah untuk mengetahui jumlah kelahiran menurut kelompok umur tertentu sehingga diketahui apakah kelahiran pada kelompok umur tertentu tersebut beresiko atau tidak. Khusus untuk ASFR usia 15-19 tahun juga dapat dimanfaatkan untuk melihat keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan dan juga untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja khususnya perempuan usia di bawah 20 tahun.

Tabel 2.229
Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	1,675	1,662	406	250	276
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	27,100	26,970	27.782	28.850	23.628
3	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	61,80	61,62	14,61	44,20	11,68

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Tabel 2.230
Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	125	634	515	450	167
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	25.950	26.970	27.782	28.250	22.305
3	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	0.48	2,35	1,85	1,59	0,13

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Unmet Need (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya penting dalam pengendalian kepadatan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan program KB adalah rendahnya angka unmet need, yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun belum mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Rokan Hulu, terlihat fluktuasi pada jumlah PUS yang ingin ber-KB namun tidak terlayani. Pada tahun 2020, terdapat 15.420 PUS yang tidak terlayani, kemudian angka ini menurun secara signifikan menjadi 10.936 di tahun 2021 dan 9.326 pada tahun

2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan kembali menjadi 16.140, sebelum akhirnya turun drastis menjadi 9.920 di tahun 2024

Dari sisi persentase unmet need, juga terlihat penurunan yang cukup signifikan dari 21,92 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 11,50 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas program KB dalam menjangkau pasangan usia subur.

Tabel 2.231
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	15.420	10.936	9.326	16.140	9.920
2	Jumlah pasangan usia subur	70.359	73.828	41.853	75.179	86.292
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	21,92	14,81	22,28	21,46	11,50

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (Intra Uterine Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 20 persen dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Tabel 2.232
Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	2.850	13.395	5.938	7.348	7.834
2	Jumlah akseptor KB	19.950	55.280	20.952	44.159	54.679
3	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14.29	24,23	28,34	16,63	14,33

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang menurun secara signifikan, mencerminkan tantangan dalam mempertahankan penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan di kalangan pasangan usia subur. Pada tahun 2020, tingkat keberlangsungan tercatat sangat tinggi, yaitu 90,30 persen, menandakan bahwa hampir seluruh akseptor KB saat itu mampu mempertahankan penggunaan kontrasepsi secara konsisten. Namun, memasuki tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 74,87 persen, yang meskipun masih tergolong cukup tinggi, mulai menunjukkan adanya penurunan komitmen atau kendala dalam kesinambungan pemakaian alat kontrasepsi. Tren penurunan ini berlanjut pada 2022, di mana persentase keberlangsungan turun drastis menjadi 50,06persen. Penurunan ini menjadi indikator penting bahwa intervensi program perlu ditingkatkan untuk mengatasi kemungkinan kendala dalam akses, edukasi, atau preferensi metode KB. Pada 2023, tercatat sedikit pemulihan dengan meningkatnya tingkat keberlangsungan menjadi 58,74 persen, menandakan bahwa ada upaya perbaikan yang mulai membuahkan hasil. Namun, sayangnya, pada 2024 terjadi penurunan sangat tajam hingga ke angka 18,14 persen, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pemakaian kontrasepsi menghadapi hambatan serius, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi, maupun kesadaran masyarakat.

Tabel 2.233
Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	18.060	10.936	2.053	12.969	9.920
2	Jumlah akseptor KB	20.000	55.280	20.952	44.159	54.679
3	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	90,30	74,87	50,06	58,74	18,14

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Tabel 2.234
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	53	53	68	1.365	685
2	Jumlah anggota kelompok BKB	53	53	68	4.113	4.235
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	33,26	16,17

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tabel 2.235
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	24	24	37	411	1.136
2	Jumlah anggota kelompok BKR	24	24	37	1.643	2.506
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	100	100	100	25,01	45,33

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Tabel 2.236
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	24	80	271
2	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	24	80	2.102
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	100	100	100	100	12,89

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Tabel 2.237
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS	8	8	8	9	11
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	50	50	50	56,25	68,75

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Tabel 2.238
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasisw
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PIK R/M	52	52	52	40	40
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	325	325	325	250	250

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk

Tabel 2.239
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	2	2	2	3	195
2	Jumlah PKB/PLKB	2	2	2	3	353
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk	100	100	100	100	55,24

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2.240
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	16	16	20	93	195
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	16	16	16	269	353
3	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	34,57	55,24

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Cakupan Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Tabel 2.241
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	148	148	145	145	145
2	Jumlah desa/kelurahan	148	148	145	145	145
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Tabel 2.242
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	26.993	22.708	22.622	20.457	21,557
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	9.500	10.799	12.635	16.665	17,895
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2841,4	210,3	179,04	122,75	120,464

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Tabel 2.243
Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	28	31	35	50	49

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Faskes dan jejaring	28	31	35	72	78
3	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	69,44	62,82

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa

Tabel 2.244
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi data mikro kelurga yang tersedia	4	4	4	4	4
2	Jumlah Aseluruh infirmasi data mikro keluarga	4	4	4	4	4
3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2.245
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	3	3	4	4	4
2	Jumlah Kelompok kegiatan	3	3	4	4	4
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.246
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	0	0	1.003.893.582	1.811.545.210	269.494.000
2	Jumlah APBD dan APBDes	663.790.660	3.708.345.574	4.141.161.547	4.968.698.358	6.207.805.939
3	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0	0	24.2	36,5	4,34

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan untuk semua wilayah di Indonesia. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, capaian Ibangga tercatat sebesar 53,67, yang kemudian meningkat menjadi 56,63 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan keluarga, seperti ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dengan capaian Ibangga sebesar 63,27, atau turun sebesar 0,10 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022, menunjukkan bahwa secara umum arah pembangunan keluarga di Kabupaten Rokan Hulu tetap berada dalam jalur yang positif.

Tabel 2.247
Capaian Ibangga di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

NO	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	53,67	56,63	63,37	63,27

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

8) Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai berperan penting dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa antarwilayah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan perlu terus ditingkatkan agar mobilitas barang, jasa, dan masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan berkelanjutan.

- Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksud adalah total penumpang angkutan umum yang masuk atau keluar dari suatu daerah melalui pelabuhan, bandar udara, atau terminal selama satu tahun.

Tabel 2.248
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penumpang bis	105.521	117.838	134.037	152.989	132.477
2	Jumlah penumpang pesawat udara	407	0	1159	1066	2.147
3	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	105.928	117.838	135.196	154.055	134.624

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 105.928 penumpang, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 154.055 penumpang. Namun, pada tahun 2024 jumlah penumpang menurun menjadi 134.624. Pergerakan ini mencerminkan dinamika mobilitas masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pemulihan pascapandemi serta perkembangan layanan transportasi umum di kabupaten Rokan Hulu.

- Rasio ijin trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan

angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk pedesaan. Ijin trayek di Kabupaten Rokan Hulu dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah ijin trayek yang ada di Rokan Hulu tidak ada penambahan, tetap berjumlah 25 trayek yang tersebar di wilayah perkotaan

Tabel 2.249
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin trayek perkotaan	25	25	25	0	0
2	Izin trayek perdesaan	0	0	0	0	0
3	Jumlah izin trayek	25	25	25	0	0
4	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
5	Rasio izin trayek	4,45	4,38	4,29	0	0

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah uji KIR angkutan umum

Tabel 2.250
Jumlah Uji KIR Angkutan umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

No	Angkutan Umum	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mobil penumpang umum					
	Jumlah unit	8	8	12	10	62
	KIR	0	0	12	6	14
	Persentase	0.00	0	100	60,00	22,58
2	Mobil bus					
	Jumlah unit	239	243	245	245	259
	KIR	83	47	44	90	64
	Persentase	34.73	19.34	17.96	36,73	24,71
3	Mobil barang					
	Jumlah unit	14.307	14.457	15.030	13.954	16.293
	KIR	8.844	5.654	5.690	5.788	4.853
	Persentase	61.82	39.11	37,86	41,48	29,79
4	Kereta tempelan					
	Jumlah unit	3	3	3	3	3
	KIR	1	0	0	1	2
	Persentase	33,33	0	0	33,33	66,67

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui, jumlah kendaraan angkutan umum yang menjalani uji KIR di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2020, sebagian besar kendaraan angkutan umum masih belum menjalani uji KIR, dengan hanya 0 persen kendaraan mobil penumpang yang terdaftar untuk uji KIR, dan 34,73 persen untuk mobil bus, serta 61,82 persen untuk mobil barang. Pada 2021, jumlah kendaraan yang menjalani uji KIR mengalami penurunan untuk beberapa jenis angkutan umum. Mobil penumpang umum dan bus mengalami penurunan jumlah uji KIR, namun mobil barang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada 2022, terjadi lonjakan signifikan pada mobil penumpang umum yang menjalani uji KIR, mencapai 100 persen dari total kendaraan yang terdaftar, meskipun jumlah unit kendaraan penumpang umum masih relatif sedikit. Uji KIR untuk mobil bus dan mobil barang menunjukkan variasi yang berbeda, dengan bus mencapai 36,73 persen pada tahun 2023 dan mobil barang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024, hanya tercatat 29,79 persen kendaraan yang menjalani uji KIR.

- Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis

Tabel 2.251
Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
2	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
3	Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis	4	4	4	4	4

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, terdapat 1 (satu) pelabuhan udara yaitu Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian yang berdiri tahun 1980an sebagai Bandara Perintis dan kemudian menjadi Bandara keberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Rokan Hulu dari dan kebandar udara embarkasi sejak tahun 2007. Bandara Tuanku Tambusai memiliki landasan pacu sepanjang 1300 x 23 meter dengan arah 18/36, pada elevasi 38 meter diatas permukaan laut (MSL/124,67 FT) serta koordinat $10^{0}07'08{,}00$" lintang utara/$104^{0}06'51{,}00$" bujur timur. Kemudian di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 3 (tiga) terminal bis tipe C yaitu Terminal Pematang Puti (Kecamatan Ujungbatu, Teminal Pasir Pengaraian (Kecamatan Rambah) dan Terminal Rantau Kasai (Kecamatan Tambusai Utara).

- Persentase layanan angkutan darat

Transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Pada tahun 2020, persentase layanan angkutan darat tercatat sebesar 0,16 persen, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,25 persen. Namun, pada tahun 2022, persentase tersebut sedikit menurun menjadi 0,22 persen, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 0,17 persen. Meski demikian, pada tahun 2024, persentase layanan angkutan darat kembali meningkat menjadi 0,24 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan dan pengembangan layanan transportasi darat di Kabupaten Rokan Hulu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan jumlah angkutan darat dan penumpang.

Tabel 2. 252
Persentase layanan angkutan darat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan darat	278	293	297	255	321
2	Jumlah penumpang angkutan darat	105,521	117.858	134.037	152.989	132.477
3	Persentase layanan angkutan darat	0.16	0.25	0.22	0.17	0.24

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terlihat cendrung berfluktuatif. Pada tahun 2020, hanya 15,67 persen angkutan umum yang telah memiliki KIR. Persentase ini meningkat bertahap pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 21,88 persen dan 21,90 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, mencapai 58,57 persen, namun kembali menurun drastis pada tahun 2024 menjadi 16,76 persen. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya penguatan pengawasan dan kesadaran terhadap kewajiban uji KIR bagi angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.253
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan umum yang tidakmemiliki KIR pada Tahun n	314	381	254	1.760	208
2	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	2,004	1.741	1.160	3.005	1.241
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	15.67	21,88	21,90	58,57	16,76

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Pemasangan Rambu-rambu

Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di ruas-ruas jalan Kabupaten Rokan Hulu dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas serta memenuhi kebutuhan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas, khususnya pada jalan-jalan kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan;
b. Menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor;
c. Menyediakan dan memasang perlengkapan jalan pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan serta wilayah yang membutuhkan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) LLAJ.

Tabel 2. 254
Pemasangan Rambu-rambu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	0	0	0	85	62
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	296	296	296	296	296
3	Pemasangan Rambu-rambu	0.00	0.00	0.00	28,72	20,95

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2022, tidak terdapat kegiatan pemasangan rambu-rambu sama sekali, meskipun kebutuhan ideal mencapai 296 unit. Kondisi ini dipengaruhi oleh pergeseran dan pengurangan anggaran daerah akibat pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 hingga 2021. Dampaknya, alokasi anggaran

untuk sektor perhubungan, termasuk pengadaan rambu lalu lintas, mengalami pemangkasan. Baru pada tahun 2023 kegiatan pemasangan kembali dilaksanakan dengan jumlah 85 unit, dan pada tahun 2024 dilanjutkan dengan pemasangan sebanyak 62 unit. Meskipun telah terjadi pemulihan, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang ditetapkan.

- Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2.255
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	105.521	117.838	135.196	154.055	134.624
2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	3,55	0	8,97	8,58	10,89

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penumpang dan barang yang diangkut oleh angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren yang relatif meningkat, meskipun terdapat fluktuasi. Jumlah orang/barang yang terangkut meningkat dari 105.521 pada tahun 2020 menjadi puncaknya di tahun 2023 sebanyak 154.055, sebelum menurun menjadi 134.624 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah barang yang terangkut mengalami variasi signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 3,55 ton, turun menjadi 0 ton di tahun 2021, namun kemudian meningkat kembali menjadi 8,97 ton pada 2022, sedikit menurun menjadi 8,58 ton di 2023, dan mencapai angka tertinggi 10,89 ton pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan dan peningkatan aktivitas transportasi umum pasca-pandemi, baik dalam hal pergerakan orang maupun distribusi barang.

- Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal

Tabel 2.256
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal
per tahun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang melalui dermaga per tahun	0	0	0	0	0
2	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	0	0	0	0	0

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah orang melalui bandara per tahun	407	0	1159	1066	2147
4	Jumlah barang melalui bandara per tahun	3,55	0	8,97	8,58	10,89
5	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	105,928	117.838	134.037	154.055	134.624
6	Jumlah barang melalui terminal per tahun	0	0	0	0	0

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pergerakan orang dan barang di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar masih mengandalkan transportasi darat dan udara, Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, tercatat tidak ada aktivitas pergerakan orang maupun barang melalui dermaga. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki dermaga yang beroperasi. sebaliknya, pergerakan melalui bandara mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jumlah penumpang yang melalui bandara sempat menurun hingga nol pada tahun 2021, kemungkinan akibat pembatasan mobilitas selama masa pandemi. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan peningkatan dari 407 orang pada 2020 menjadi 2.147 orang pada tahun 2024 dan Volume barang juga meningkat dari 3,55 ton pada tahun 2020 menjadi 10,89 ton pada tahun 2024, menandakan bahwa angkutan udara mulai dimanfaatkan lebih optimal.

- Jumlah kecelakaan lalu lintas

Tabel 2.257
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun	96	86	107	85	88

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 96 kasus kecelakaan, kemudian mengalami penurunan menjadi 86 kasus pada 2021. Namun demikian, jumlah kecelakaan kembali meningkat menjadi 107 kasus pada 2022, yang merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka kecelakaan turun kembali menjadi 85 kasus, lalu sedikit meningkat menjadi 88 kasus pada tahun 2024.

Tren ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi upaya pengendalian dan peningkatan keselamatan lalu lintas, angka kecelakaan masih berfluktuasi dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten.

- Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL)

Tabel 2.258
Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL)
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) per tahun	45	58	228	148	31

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 45 kasus pelanggaran, meningkat menjadi 58 kasus pada tahun 2021. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan 228 pelanggaran, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023 jumlah pelanggaran menurun menjadi 148 kasus, dan kembali menurun secara signifikan menjadi 31 kasus pada tahun 2024. Penurunan jumlah pelanggaran di tahun 2023 dan 2024 dapat menjadi indikator awal keberhasilan penguatan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL.

Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) terjadi ketika kendaraan melampaui batas dimensi atau beban yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada kendaraan-kendaraan besar seperti truk atau tanki yang melebihi kapasitas atau dimensi yang diizinkan.

9) Komunikasi dan Informatika

- Jumlah jaringan komunikasi

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada permintaan akan sambungan rumah tangga serta sambungan untuk fasilitas umum dan layanan publik. Seiring dengan pertumbuhan wilayah yang cukup pesat dari tahun ke tahun, kebutuhan akan infrastruktur jaringan komunikasi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan

Dalam upaya memperluas cakupan layanan informasi dan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun 29 unit Base Transceiver Station (BTS). BTS tersebut berfungsi sebagai infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi nirkabel

antara perangkat pengguna dengan jaringan operator, dan telah tersebar di 16 kecamatan. Pada tahun 2024, jumlah jaringan komunikasi yang tersedia di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebanyak 3 (tiga) unit, yang terdiri dari 2 (dua) jaringan telepon genggam dan 1(satu) jaringan telepon kabel (stasioner). Penyediaan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung akses informasi yang lebih merata serta meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.259
Jaringan Komunikasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jaringan telepon genggam	4	4	8	2	2
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	5	5	9	3	3

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio swara Lima luhak dan Radio islamic center, sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan LPPL Rokan Hulu Tv , UB TV dan Madani TV dan Ginta Vixion.

Tabel 2.260
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyiaran radio lokal	5	5	4	2	2
2	Jumlah penyiaran TV lokal	2	2	3	4	4
3	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2)	7	7	7	6	6

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah siaran radio lokal berkurang dari 5 siaran radio pada tahun 2020 menjadi 2 siaran radio tahun 2024 dan siaran tv lokal bertambah semula 2 stasiun tv lokal menjadi 4 stasiun tv lokal hingga 2024.

- Website Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif, khususnya dalam menjalankan peran diseminasi

informasi kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menyampaikan berbagai program, kebijakan, serta capaian kinerja secara terbuka, transparan, dan akuntabel melalui berbagai media komunikasi. Pola komunikasi yang diusung pun telah bergeser menjadi komunikasi dua arah yang lebih interaktif, melibatkan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Penggunaan media siber/online terbukti lebih efektif secara waktu, efisien dari sisi anggaran, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan cepat dan mudah. Media ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, baik dalam menyampaikan kebijakan yang akan diberlakukan, maupun dalam menyampaikan informasi penting secara real-time.

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan dalam era pemerintahan modern. Akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan daerah harus dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki portal resmi yang dapat diakses melalui laman www.rokanhulukab.go.id, yang dikelola oleh Bagian Pendataan Data Elektronik. Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah memiliki situs web masing-masing yang dikelola secara mandiri dan menyajikan profil serta data yang akurat dan diperbarui secara berkala.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, Kelompok informasi masyarakat (KIM) yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan menunjukkan angka yang konstan, yaitu 31,25 persen dari total kecamatan. Ini berarti, dari 16 kecamatan yang ada, hanya sekitar 5 kecamatan yang telah terlibat dalam program pengembangan dan pemberdayaan KIM setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan cakupan agar informasi pembangunan dapat tersebar secara lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah.

Tabel 2.261
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KIM	5	5	5	5	5

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	16	16	16	16	16
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan Layanan Telekomunikasi

Demikian pula halnya dengan cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu, yang telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara merata. Pada periode tahun 2020 hingga 2024, luas wilayah yang telah terlayani oleh jaringan telekomunikasi mencapai 7.326 km², mencakup seluruh kecamatan. Pemerataan akses ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keterhubungan dan kemudahan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah kecamatan.

Tabel 2.262
Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	7,326	7,326	7,326	7,326	7,326
2	Luas Wilayah Keseluruhan	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Berdasarkan data periode 2020 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang menggunakan telepon seluler mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah pengguna tercatat sebanyak 369.961 orang, dan meningkat menjadi 375.930 orang pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan secara absolut, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler justru mengalami penurunan, yakni dari 65,90 persen pada tahun 2020 menjadi 64,04 persen pada tahun 2024. Penurunan persentase ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah pengguna tidak sebanding dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan dalam periode yang sama.

Tabel 2.263
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/ telepon	369.961	369.961	369.961	375.930	375.930
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	65,90	64,80	63,50	65,55	64,04

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Tabel 2.264
Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	170,928	170,928	170,928	170,928	170,928
2	Jumlah rumah tangga	176,215	176,215	176,215	176,215	176,215
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Nilai keterbukaan informasi publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.265
Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Kabupaten Rokan Hulu

No	Kualifikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ketebukaan Informasi Publik	-	Menuju informatif (80-89)	Informatif (90-100)	Informatif (90-100)	Informatif (90-100)

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elhektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu mencapai 3,46 dari skala 5. Ini menunjukkan peningkatan yakni 0,82 dari indeks sebelumnya yaitu 2,64 pada tahun 2023. Dan ditahun 2022 nilai keterbukaan informasi publik dan indeks SPBE sebesar 2,38.

Tabel 2.266
Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	1,17	1,78	2,38	2,64	3,46

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot menurut Kecamatan/Desa di Kabupaten Rokan

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 dari 9 (sembilan) Kecamatan/23 (dua puluh tiga) Desa yang masih terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data kecamatan/Desa yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.267
Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot menurut Kecamatan/Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	sinyal	Koordinat Tower Existing	Kuat Sinyal (dBm)
TAMBUSAI UTARA	MAHATO	1.391389	100.198333	Blankspot	mahato	0
TAMBUSAI UTARA	MAHATO SAKTI	1.349056	100.151333	Blankspot	batang kumuh	0
RAMBAH SAMO	SUNGAI KUNING	0.767389	100.479917	4G	sungai kuning	-109
RAMBAH SAMO	SUNGAI SALAK	0.784611	100.414694	4G	rambah samo	-110
RAMBAH SAMO	LUBUK BILANG	0.748972	100.430222	4G	sungai kuning	0
KEPENUHAN	ULAK PATIAN	1.161472	100.666833	4G	ulak patian	-115
KEPENUHAN	RANTAU BINUANG SAKTI	1.249861	100.687972	Blankspot	mahato	
KEPENUHAN HULU	KEPAYANG	1.080639	100.449222	Blankspot	kepayang	
KEPENUHAN HULU	MUARA JAYA	0.964528	100.568139	4G	muara jaya	-110
RAMBAH	SIALANG JAYA	0.822167	100.282833	Blankspot	rambah	
RAMBAH	PEMATANG BERANGAN	0.899417	100.302361	4G	rambah	-115
ROKAN IV KOTO	PEMANDANG	0.698056	100.421806	Blankspot	lubuk bendahara timur	
ROKAN IV KOTO	TANJUNG MEDAN	0.663333	100.427361	Blankspot	lubuk bendahara timur	
ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	0.614250	100.246444	Blankspot	cipang kanan	
ROKAN IV KOTO	CIPANG KIRI HULU	0.464528	100.306528	Blankspot	cipang kanan	
RAMBAH HILIR	SUNGAI DUA INDAH	0.950444	100.452417	4G	sungai dua indah	-105
RAMBAH HILIR	SOROMBU INDAH	0.929722	100.439083	Blankspot	masda makmur	
RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR TENGAH	0.992444	100.400056	4G	aur betung	-115
KEPENUHAN	SONTANG	1.137917	100.754000	3G	sontang	
BONAI DARUSSALAM	KASANG PADANG	1.238028	100.87275	Blankspot	kasang padang	
KEPENUHAN	KASIMANG	1.079972	100.647028	Blankspot	pasir pandak	
RAMBAH	SUNGAI BUNGO	0.789500	100.267111	Blankspot	rambah	
PAGARAN TAPAH	SANGKIR INDAH	0.773028	100.546167	3G	pagaran tapah	

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi sepanjang periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat koperasi

aktif berada pada angka 67,90 persen, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana persentase koperasi aktif turun menjadi 50,15 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas dan keberlanjutan usaha koperasi. tahun 2022, terjadi sedikit perbaikan dengan meningkatnya persentase koperasi aktif menjadi 53,65 persen, kemudian naik lagi menjadi 54,70 persen pada tahun 2023. Terakhir Pada tahun 2024, persentase koperasi aktif kembali mengalami peningkatan dan mencapai 56,68 persen. meskipun persentase koperasi aktif belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum pandemi. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.268
Persentase Koperasi Aktif dan yang melaksanakan RAT Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif	220	171	191	198	212
2	Jumlah koperasi	324	341	356	362	374
3	Persentase koperasi aktif	67,90	50,15	53,65	54,70	56,68
4	Koperasi yang melaksanakan RAT	80	62	60	60	38

* Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu, 2025

- Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pada tahun 2024 jumlah usaha mikro tercatat sebesar 37.845 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah pelaku UMKM dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.454. Hal ini disebabkan adanya program pendataan pelaku UMKM melalui Sistem I Formasi data tinggal yang dibiayai KemenkopUmkm RI. Target yg ditetapkan untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 44.000 data (Selain UMKM Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pedagang Asongan). Pendataan dilakukan oleh 110 Enumerator di 16 Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 269
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha mikro dan kecil	1.454	2.159	2.498	37.476	37.845
2	Jumlah seluruh UKM	15.604	21.918	23.958	37.476	37.845
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	9,32	9.85	10,43	100	100

* Sumber: Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu, 2025

12) Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor.

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah investor berskala nasional pada pada tahun 2020 sebanyak 1.135 investor, pada tahun 2021 sebanyak 1.822 investor dan pada tahun 2021 sebanyak 1.822 investor, pada tahun 2022 sebanyak 4.327 investor. kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah investor sebesar 8.352 hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendaftar usahanya dan pelaku usaha yang migrasi Perizinan usahanya, yang mana sistem OSS 1.1 telah migrasi ke OSS RBA sebagai yang di amanatkan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dari implementasi PP tersebut, di tahun 2023 terdapat banyak pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang mendominasi pendaftaran Perizinan Berusaha di daerah kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi walaupun pelaku usaha banyak mendaftar usahanya di tahun 2023 yang dibuktikan dengan data NIB 8.352, jumlah investasi masih tergolong sedikit dikarenakan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar masih sedikit yang mendaftarkan usahanya di tahun 2023, sementara pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil sudah mematuhi sebagai mana amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

Tabel 2.270
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA	1.135	1.822	4.327	8.352	6.660

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun2025

- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai Investasi diperoleh dari nilai modal suatu usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha ketika memasukkan permohonan izin usahanya melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Nilai Investasi berdasarkan jumlah modal yang terdapat dari jumlah izin yang didaftarkan melalui Aplikasi OSS tersebut.

Nilai investasi di Kabupaten Rokan Hulu Selama periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2020, total investasi tercatat sebesar Rp452,44 miliar. Angka ini mengalami kenaikan menjadi Rp562,18 miliar pada tahun 2021, menunjukkan adanya pertumbuhan investasi di tengah pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Peningkatan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2022, di mana total investasi melonjak menjadi Rp1,06 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai Rp2,63 triliun, dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2024, dengan total investasi menembus angka Rp4,74 triliun. Pertumbuhan investasi yang pesat ini mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.271
Jumlah Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	452.441.461.514	562.178.673,212	1.059.722.327.643	2.626.240.533.402	4.735.944.822.299

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio daya serap tercatat sebesar 1,70, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 2,92 pada tahun 2021. Meskipun sempat menurun menjadi 2,22 pada tahun 2022, rasio ini kembali menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 3,00 di tahun 2023 dan 3,04 pada tahun 2024. Peningkatan rasio ini mencerminkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja seiring dengan bertambahnya jumlah investasi dan proyek usaha di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 272
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	3.533 Orang	5.321 orang	9.598 orang	25.043 orang	25.217 TKI
2	PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN	OSS : 2.083	OSS : 1.822	OSS : 4.327	OSS : 8.352	OSS : 6.660
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1,70	2,92	2,22	3,00	3,04

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Kenaikan dan penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebesar 113,98 persen, dibandingkan dengan nilai realisasi PMDN pada tahun 2023 yang mencapai 147,82 persen. Sementara itu, pada tahun 2020, nilai investasi mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sebesar (-91,30) persen. Penurunan tajam ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan memengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk arus investasi. Namun, jika dilihat dari perkembangan dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024, terdapat tren peningkatan nilai investasi. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim investasi di Kabupaten Rokan Hulu mulai membaik dan menunjukkan pemulihan yang positif, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan potensi ekonomi daerah.

Tabel 2. 273
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	(4.750.411.532.434)	109.741.211.698	497.543.654.431	1.566.518.205.759	2.993.491.145.850
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	5.202.852.993.948	452.437.461.514	562.178.673.212	1.059.722.327.643	2.626.240.533.402
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(91.30)	24.26	88.50	147.82	113,98

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk mewujudkan manajemen kepemudaan dan olahraga yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dan mengembangkan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis.

- Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Rokan Hulu dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Mencermati data tabel dibawah terlihat selama kurun tahun 2020-2024 terdapat 12,5 persen organisasi pemuda yang aktif.

Tabel 2.274
Persentase organisasi pemuda yang aktif
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4	4	4	4	4
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	32	32	32	32	32
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesbangpol Kab. Rokan Hulu,2025

- Persentase wirausaha muda

Keberadaan wirausaha muda juga sangat berperan di dalam proses pembangunan, tercatat persentase wirausaha muda sebesar 16,6 persen di tahun 2020 hingga 2024. Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial, diperlukan program kegiatan yang mampu mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi secara lebih luas dan aktif yang memiliki jiwa wira usaha. Terkait hal tersebut Kabupaten Rokan Hulu perlu menyediakan prasarana pendukung sebagai wadah bagi penggiat ekonomi kreatif terutama para pemuda untuk menuangkan ide-ide usaha secara kolaboratif serta responsif terhadap tuntutan kebutuhan masa kini.

Tabel 2. 275
Persentase wirausaha muda
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah wirausaha muda	80	80	80	80	80
2	Jumlah seluruh wirausaha	480	480	480	480	480
3	Persentase wirausaha muda	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan pembinaan olahraga

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Mulai tahun 2020 hingga 2024, cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 100 persen dengan jumlah cabang olah yang dibina dan terdaftar sebanyak 23 cabang.

Tabel 2.276
Cakupan pembinaan olahraga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	23	23	23	23	23
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yangada/terdaftar	23	23	23	23	23
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu, 2025

- Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Cakupan pelatih bersertifikat di Kabupaten Rokan Hulu Pada periode tahun 2020 hingga 2023, tercatat stabil, yaitu sebanyak 138 orang setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan 43 persen. dari total seluruh pelatih yang berada di angka 325 orang. Stabilitas ini mencerminkan adanya konsistensi dalam upaya sertifikasi pelatih selama empat tahun berturut-turut. Namun, pada

tahun 2024 terjadi perubahan signifikan. Jumlah keseluruhan pelatih meningkat cukup tajam menjadi 425 orang. Di sisi lain, jumlah pelatih yang telah bersertifikasi justru menurun menjadi 123 orang. Kondisi ini menyebabkan cakupan pelatih bersertifikat menurun drastis menjadi 28,94 persen. Penurunan persentase ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah pelatih dengan upaya sertifikasi.

Tabel 2.277
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	138	138	138	138	123
2	Jumlah seluruh pelatih	325	325	325	325	425
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	43	43	43	43	28,94

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Cakupan pembinaan atlet muda

Pembinaan terhadap atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu cabang olah raga, untuk peningkatan prestasi. Oleh sebab itu pembinaan terhadap atlet muda merupakan hulu dari prestasi olahraga yang harus dilakukan. Semakin banyak atlet muda yang berpotensi dibina semakin besar peluang untuk meraih prestasi kedepannya. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 20,7 persen dengan jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 215 atlet dari 1.040 atlet sampai tahun 2024. Perkembangan indikator cakupan pembinaan atlet muda secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.278
Cakupan pembinaan atlet muda
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	215	215	215	215	215
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	1040	1040	1040	1040	1040
3	Cakupan pembinaan atlet muda	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu,2025

- Jumlah atlet berprestasi

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023, jumlah atlet Kabupaten Rokan Hulu yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional menunjukkan konsistensi, yaitu sebanyak 3 orang setiap tahunnya. Pencapaian ini mencerminkan adanya kesinambungan dalam

pembinaan atlet berprestasi di daerah. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana sebanyak 6 atlet berhasil menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kualitas dan daya saing atlet Rokan Hulu di tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 2.279
Jumlah atlet berprestasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	3	3	3	3	6

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu,2025

- Jumlah berprestasi olahraga

Jumlah cabang olahraga yang berhasil menyumbangkan prestasi bagi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 hingga 2023 tercatat stabil sebanyak 2 cabang olahraga setiap tahunnya. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan dengan bertambahnya jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi menjadi 3 cabang. Kenaikan ini menjadi indikator positif atas semakin meluasnya distribusi potensi dan prestasi di berbagai cabang olahraga. Perkembangan indikator Jumlah atlet berprestasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.280
Jumlah prestasi olahraga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	2	2	2	2	3

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu 2025

- Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab

Tabel 2.281
Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	22.625	22.441	22.441	22,441	22,441

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu,2025

- Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 282
Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota	625	670	670	670	44

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2025

14) Statistik

Dalam melakukan aktivitas pembangunan di segala bidang yang dimulai dari tahap penyusunan perencanaan penganggaran sampai pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya, maka dibutuhkan data statistik yang lengkap, akurat dan terpercaya. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Buku statistik yang tersedia adalah Rokan Hulu Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Kecamatan Dalam Angka, Statistik Daerah dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.283
Bidang Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Produk Domestik Regional Bruto”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

15) Persandian

Fungsi Persandian adalah untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Adapun yang menjadi tugas dari Lembaga Sandi pada tingkat Kabupaten adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan program

persandian tersebut dengan kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfatan persandian di pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah dan penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023-2024 persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi Perangkat Daerah baru sebesar 100 persen dari total keseluruhan Perangkat Daerah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,67 persen.

- Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Tabel 2.284
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan
Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	2	2	3	45	45
2	jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	4.44	4.44	6,67	100	100

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

16) Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah Rokan Hulu sehingga kebudayaan Rokan Hulu akan tetap hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi serta bisa menjadi tuan rumah di daerahnya. Upaya yang dilakukan adalah inventarisasi budaya-budaya Rokan Hulu dan menyelenggarakan event-event budaya Rokan Hulu sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan kebudayaan Rokan Hulu di tingkat regional maupun nasional. Ajang promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian dalam daerah, festival budaya, event budaya dan pawai budaya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan pendataan dan pembuatan data benda cagar budaya bergerak.

Sektor seni dan budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hulu, terutama di bidang kebudayaan. Sebab sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya Melayu, Kabupaten Rokan Hulu memiliki keunikan tersendiri, sebab mempunyai perbauran budaya. Selain kebudayaan Melayu, di Rokan Hulu juga hidup dan berkembang Kebudayaan lain, seperti Mandailing, Minangkabau, Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Keberadaan kebudayaan-kebudayaan di luar kebudayaan melayu ini semakin menambah khasanah kekayaan budaya melayu itu sendiri.

- Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan Kabupaten berpedoman pada Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten. Dokumen PPKD Kabupaten telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor Kpts. 431/DISPARBUD/743/2018 dan diperbarui dengan Keputusan Bupati terbaru dengan Nomor Kpts. 100.3.3.2/DISPARBUD/328/2025. 10 (Sepuluh) objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, ritus dan 1 (satu) objek cagar budaya dapat disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.285
Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah berdasarkan SK Bupati No. Kpts.431/DISPARBUD/743/2018	Jumlah berdasarkan SK Bupati No. Kpts.100.3.3.2/DISPARBUD/328/2025
1	Tradisi Lisan	80	117
2	Manuskrip	5	8
3	Adat Istiadat	15	24
4	Ritus	46	57
5	Pengetahuan Tradisional	148	200
6	Teknologi Tradisional	36	59
7	Seni	31	33
8	Bahasa	11	11
9	Permainan Rakyat	25	25
10	Olahraga Tradisional	14	14
11	Cagar Budaya	350	350
	Total	**761**	**898**

* Sumber: PPKD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2025

Tabel 2.286
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Rokan Hulu

No	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	Tahun
1	Koba dan Tari Cegak	2015
2	Bodewo Bonai dan Tari Kwayang Mahato	2016
3	Sastra Lisan Onduo Rokan dan Tari Balai Proco	2017
4	Silek Tigo Bulan, Ratik Togak, Lukah Gilo dan Tari Makan Bokancah	2018
5	Burong Kwayang dan Tari cegak	2019
6	Upah-upah	2020
7	Gondang Berogong	2022
8	Bo'onou Rokan Hulu	2024

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik dapat meningkatkan daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2024, jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan tercatat sebanyak 47 kali, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 96 kali. Penurunan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2024 disebabkan keterbatasan anggaran dan dampak dari penyesuaian kebijakan pascapandemi yang masih mempengaruhi aktivitas sosial dan budaya di masyarakat. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.287
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	10 Kali	13 Kali	35 Kali	96 Kali	47 Kali

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pelestarian bermakna pada upaya untuk memanfaatkan, melindungi dan mengembangan. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya untuk memanfaatkan cagar budaya, melindungi dari kemusnahan dan mengembangannya. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan

nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kurun waktu periode 2020-2024, situs dan kawasan cagar budaya yang tercatat di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 381 unit. Sedangkan Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 20 unit (5,25 persen) dari 381 unit benda cagar budaya yang tercatat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pelestarian cagar budaya di kabupaten Rokan Hulu belum optimal dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.288
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	20	20	20	20
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	381	381	381	381	381
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Bentuk lainnya pelestarian budaya melayu adalah melakukan inventarisasi dan revitalisasi karya dan budaya melayu. Upaya revitalisasi dan inventarisasi sudah dilakukan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Adapun jumlah revitalisasi dan inventarisasi yang dilakukan selama kurun tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2. 289
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	0	5	6	7

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2025

- Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Salah satu strategi dalam upaya pelestarian budaya yang lebih terarah dengan penggelolan cagar budaya terpadu. Selama lima tahun terakhir pengelolaan cagar budaya secara terpadu tidak berubah hanya berjumlah 13 cagar budaya. Untuk kedepannya pengelolan cagar budaya secara terpadu sangat diharapkan dalam menjamin ke efektivitasaan dalam mengelola cagar budaya pada Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator

Kinerja Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.290
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	13	13	13	13	13

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

16) Perpustakaan

- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan

Tabel 2. 291
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	2.287	3.092	12.990	7.014	11.132
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	556.199	560.747	563.419	573.520	586.994
3	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan	0,004	0,006	0,023	0,012	0,019

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. pada tahun 2020, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 2.287 orang, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 3.092 orang. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah pengunjung melonjak hingga 12.990 orang, menandai antusiasme yang tinggi terhadap layanan perpustakaan. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan kunjungan menjadi 7.014 orang, Meskipun demikian, pada tahun 2024 jumlah kunjungan kembali meningkat menjadi 11.132 orang. menunjukkan adanya pemulihan minat masyarakat terhadap aktivitas literasi di perpustakaan.

- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Tabel 2. 292
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	8.978	8.990	8.864	8.866	9.229
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	49.319	49.400	48.318	48.696	50.116
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18,20	18,20	18,35	18,21	18,42

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berkomitmen untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam dan berkualitas di perpustakaan daerah. Penambahan koleksi judul buku menjadi indikator penting dalam memperluas akses bahan bacaan bagi masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebanyak 9.229 judul, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Namun demikian, rasio koleksi buku terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani menunjukkan tren yang cenderung berfluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, dengan total penurunan sekitar 18,20 persen.

- Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga diharapkan tumbuh budaya baca dikalangan masyarakat dengan cara menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan. Jumlah perpustakaan dikabupaten Rokan Hulu sampai tahun 2024 sebanyak 332 pustaka yang terdiri dari 1 (satu) perpustakaan milik pemerintah daerah dan 331 milik non pemerintah daerah. Rasio perpustakaan persatuan penduduk per tahun di Kabupaten Rokan Hulu cenderung berfluktuasi dari tahun 2023 s/d 2024.

Tabel 2. 293
Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	32	168	265	365	332
2	Jumlah penduduk	561.390	570.950	563.419	573.520	586.994
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,06	0,3	0,5	0,6	0,6

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 294
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun	2.287	3.092	12.990	7.014	11.132

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Jumlah pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun tahun 2020-2024 cendrung berfluktuatif dari 2.287 pengunjung tahun 2020 menjadi 11.132 pengunjung tahun 2024. Rata-rata pengunjung yang terbanyak berada pada tahun 2022 sebesar 12.990 pengunjung yang tersebar diseluruh kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain disebabkan oleh metode layanan pustaka keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber AC dan suasana nyaman.

- Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu cenderung meningkat dari 8.978 tahun 2020 menjadi sebanyak 9.229 tahun 2024. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.295
Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku	8.978	8.990	8.864	8.866	9.229

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 1 orang tahun 2021 menjadi sebanyak 66 orang tahun 2022 dan 2023. Terakhir pada tahun 2024 meningkat secara signifikan menjadi 173 orang. Hal ini disebabkan adanya pelatihan/pemagangan pustakawan dan tenaga teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu. Secara lebih jelas jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.296
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	2	1	66	66	173
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	2	1	66	66	173
3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Secara etimologi dan terminologi Indeks pambangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kemampuan individu dalam membaca, menulis dan memahami infromasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. IPLM mencakup berbagai aspek literasi seperti literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya dan literasi ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi wilayah yang perlu ditingkatkan dalam upaya menungkatkan literasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM juga mencakup Upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat beberapa kategori penilaan dalam skor IPLM yaitu sangat rendah berada pada rentang 0 - 29,9, rendah pada rentang 30- 49,9, sedang berada rentang 50 – 79,9, tinggi berada pada rentang 80 - 89,9, dan sangat tinggi berada pada rentang 90-100.

IPLM Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 sebesar 52,69 masuk kedalam kategori sedang dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 66,88. Selanjutnya pada tahun 2024 IPLM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 32,99 masuk kedalam kategori sedang dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 69,24. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.297
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	UPLM 1	UPLM 2	UPLM 3	UPLM 4	UPLM 5	UPLM 6	UPLM 7	Skor IPLM
1	Kabupaten Rokan Hulu								
	IPLM Tahun 2022	0,0013	1,8569	0,0011	0,4040	1,4672	0,2672	0,6271	66,07
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2022	0,0017	1,6199	0,0029	0,4520	1,8885	0,3232	0,6804	70,98
2	Kabupaten Rokan Hulu								
	IPLM Tahun 2023	0,2608	0,2457	0,1416	0,0402	1,0000	1,0000	1,0000	52,69
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2023	0,3518	0,2753	1,0000	0,0543	1,0000	1,0000	1,0000	66,88
3	Kabupaten Rokan Hulu								
	IPLM Tahun 2024	0,2016	0,159	0,2521	0,0449	1,0000	0,2281	0,3631	32,99
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2024	0,3503	0,4176	1,0000	0,0787	1,0000	1,0000	1,0000	69,24

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

17) Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan

informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya

- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu secara baku dari Tahun 2020 - 2024 sudah dilakukan sesuai dengan norma dan standar tapi masih belum tercapai. Sampai tahun 2024 sudah 6 Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku dari 45 Perangkat Daerah atau 13,33 persen. pada tahun 2020-2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dampak merebaknya wabah pandemi Covid-19 di Rokan Hulu.

Tabel 2.298
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	0	0	1	4	6
2	Jumlah Perangkat Daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	0	0	2,22	8,89	13,33

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan yang tertata dan sesuai dengan standar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan sumber daya manusia (arsiparis) yang kompeten dan memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang kearsipan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan arsip yang efektif, tertib, dan berkelanjutan. Persentase

perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku, serta jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip selama kurun waktu 2020 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel terlampir.

Tabel 2.299
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti

Untuk Kinerja Kearsipan Jumlah Rekomendasi Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti, yang Indikatornya pada Kab/Kota adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Kab. Rokan Hulu sebanyak 64 rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Tabel 2.300
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindak Lanjuti
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	2	5	32	64

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6.1.3.1. Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan

1) Pariwisata

Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan di daerah ini adalah untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu sangat besar, terutama untuk wisata alam maupun wisata budaya dan wisata buatan. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah telah berusaha semaksimal mungkin mengembangkanpotensi wisata yang ada, serta melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana objek wisata yang ada.

Selain Air Panas Hapanasan dan Danau Cipogas, Air Panas Suaman dan Aek Martua, Pemerintah Daerah terus melakukan pemeliharaan terhadap objek wisata dan budaya. Diantaranya adalah Benteng Tujuh Lapis, Makam Raja Rambah dan Objek Wisata Religi Rantau Binuang Sakti. Pemerintah Daerah juga merencanakan pengembangan terhadap Daya Tarik Wisata diantaranya Objek

Wisata Hapanasan, Danau Sipogas dan Desa Wisata Sungai Bungo serta melakukan promosi objek-objek wisata tersebut.

- Kunjungan wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.

Tabel 2.301
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan wisatwan	876.535 orang	543.585 orang	1.036.635 orang	967.402 orang	1.088.084 orang

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan klasifikasi destinasi. Pada tahun 2020 Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebanyak 876.535 orang. Meningkatnya jumlah wisatawan di tahun 2024 menjadi 1.088.084 orang disebabkan tingginya angka kunjungan wisata religi ke Mesjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.

- Lama kunjungan wisata

Lama kunjungan wisata di Kabupaten Rokan Hulu selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, rata-rata lama kunjungan wisatawan setiap tahunnya tercatat selama 2 hari. Konsistensi ini mencerminkan pola kunjungan yang relatif tetap dalam lima tahun terakhir, yang dapat mengindikasikan kestabilan dalam minat dan kebiasaan wisatawan saat menikmati berbagai destinasi wisata. Peningkatan lama kunjungan wisata sangat penting untuk meningkatkan perekonomian pariwisata, karena semakin lama wisatawan tinggal, maka akan semakin banyak uang yang mereka habiskan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.302
Lama kunjungan Wisata
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama kunjungan wisata	2	2	2	2	2

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- PAD sektor pariwisata

Peningkatan PAD sektor pariwisata selain dapat ditingkatkan dengan lama kunjungan wisata, dapat pula ditingkatkan dengan penyelenggaraan festival budaya dan pelestarian benda dan situs budaya. Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari sektor pariwisata cendrung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PAD sektor ini tercatat sebesar Rp 2,49 miliar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 mencatat kenaikan menjadi Rp 3,12 miliar, kemudian naik signifikan pada tahun 2022 mencapai Rp 4,33 miliar. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan PAD sebesar Rp 4,72 miliar, dan meningkat lebih lanjut menjadi Rp 5,66 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui pelestarian budaya, penyelenggaraan event seni, serta peningkatan promosi destinasi wisata lokal. Meskipun jumlah festival seni dan budaya pada tahun 2024 mengalami penurunan, namun dampaknya terhadap pendapatan tetap signifikan. Secara lebih jelas, PAD sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.303
PAD sektor pariwisata
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD sektor pariwisata	2.497.825.021	3.118.937.816	4.329.058.642	4.721.987.634	5.656.878.552
2	Total PAD	101.038.192.579.64	159.349.414.319	108.322.526723.15	193.270.150045.51	154.878.407.686,00
3	PAD sektor pariwisata	2,47	1,96	4,08	2,44	3,65

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Pertanian

- Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2. 304
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan (Miliaran Rupiah)	19,566,35	23.454,97	27.136,88	28.315,49	30.985,12
2	Jumlah PDRB (Miliaran Rupiah)	36,087,00	42.177,51	49.614,31	52.156,58	56.446,72

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	54.22	55,61	54,70	54,29	54,89

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Tabel 2.305
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n	45,381,64	33.040,35	21.493,42	21.145,22	17.501,73
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n	45,381,64	33.040,35	21.493,42	21.145,22	17.501,73
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100,00	100,00	100	100	100

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami peningkatan dari 39,72 kw/ha menjadi 42,34 kw/ha di tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 46,55 kw/ha di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, produktivitas mengalami penurunan menjadi 44,78 kw/ha. Terakhir, di tahun 2024, produktivitas kembali meningkat menjadi 44,95 kw/ha. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas benih yang digunakan, teknik budidaya yang diterapkan, ketersediaan pupuk dan air, kondisi iklim, serta dukungan penyuluhan dan pendampingan kepada petani.

Tabel 2.306
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
per hektar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton/Ha)	45,381.64	33.040,35	21.797,31	21.145,22	17.501,73
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)	7.930,75	5.006,75	4.854,50	4.137,50	3.553,68
3	Produktivitas padi atau bahan	39,72	42,34	46,55	44,78	44,95

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	pangan utama lokal lainnya (Kw/Ha)					

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu,2025

- Cakupan bina kelompok petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan hanya 0,40 persen dan sempat menurun menjadi 0,30 persen di 2021. Namun, sejak 2022 terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 10,85 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperluas pembinaan terhadap kelompok tani guna mendorong produktivitas pertanian di daerah.

Tabel 2. 307
Cakupan bina kelompok petani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	9	7	30	79	259
2	jumlah kelompok tani	2.232	2.330	2.388	2.419	2.388
3	Cakupan bina kelompok petani	0,40	0,30	1,26	3,27	10,85

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Luas areal tanam dan panen

Tabel 2.308
Luas Areal Tanam dan panen
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas areal tanam dan panen padi (ha)					
	a. Tanam	7,931	5.006.75	4.854,50	4.137,02	3.553,68
	b. Panen	11,427	7.804.25	4.682,50	4.722,25	3.893,27
2	Luas areal tanam dan panen palawija (ha)					
	a. Tanam	2,571	2.023.10	537.80	669	540,7
	b. Panen	2,727	2.074.70	322.90	588,15	574,25
3	Luas areal tanam dan panen buah-buahan (ha)					
	a. Tanam	10.193	9.540	9316,39	3.767,63	5.248,48
	b. Panen	4.008	4832,17	7827,12	4.804,79	2.361,16
4	Luas areal tanam dan panen biofarmaka (m^2)					
	a. Tanam	808.934	7.655	82.934	52.852	103.445

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	b. Panen	1.390	1.479,50	1.393	12.444	24.497
5	Luas areal tanam dan panen hias (m^2)					
	a. Tanam	0,02	1	20	103	225
	b. Panen	0,01	1	22	64	226
6	Luas areal tanam dan panen sayur-sayuran (ha)					
	a. Tanam	1798	1.644	1.644	1.637,14	
	b. Panen	43.537	43.589	2.618	25.912,97	

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa sejak tahun 2020-2024 luas areal tanam padi cenderung mengalami pasang surut. Pada tahun 2020 Luas areal tanam padi seluas 7.931 ha dan menurun menjadi 3.553 ha pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian beralih kepada lahan perkebunan kelapa sawit. Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Sementara untuk komoditas palawija secara umum menunjukkan trend yang menurun cukup tajam.

- Produktivitas dan produksi pertanian

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi pada produktivitas dan produksi padi maupun palawija di Kabupaten Rokan Hulu. Produktivitas padi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 39,72 kw/ha, mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 46,55 kw/ha. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 44,78 kw/ha dan angka ini tetap stabil hingga tahun 2024. Sebaliknya, produksi padi mengalami penurunan signifikan dari 45.381,64 ton pada tahun 2020 menjadi 17.501,73 ton pada tahun 2024. Penurunan produksi ini disebabkan berkurangnya luas lahan tanam atau faktor eksternal lainnya seperti kondisi iklim atau perubahan pola pertanian. Sementara itu, produktivitias palawija mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022 sebesar 88,50 kw/ha, naik dari 51,44 kw/ha pada tahun 2021. Namun, setelah itu menurun kembali ke angka 62,11 kw/ha pada 2023 dan 61,97 kw/ha pada 2024. Produksi palawija juga mengalami penurunan tajam dari 12.275,55 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 3.571,06 ton pada tahun 2024. Rendahnya produksi palawija disebabkan adanya pengurangan lahan tanam atau berkurangnya minat petani untuk menanam palawija.

Perkembangan produktivitas dan produksi pertanian di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.309
Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas padi (kw/ha)	39.72	42.34	46.55	44,78	44,78
2	Produktivitas palawija (kw/ha)	45.01	51.44	88.50	62,11	61,97
3	Produksi padi (ton)	45.381.64	33.040.35	21.797,36	21.145,22	17.501,73
4	Produksi palawija (ton)	12.275.55	10.677.07	4.557,74	3.653,01	3.571,06
5	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	54,22	55,61	54,70	54,29	54,89

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

♦ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Rokan Hulu sudah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 dengan ketentuan mengatur perencanaan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan.

Untuk luas lahan sawah yang digunakan melalui data ATR BPN seluas 1.683,64 Ha

- Konsumsi dan pendapatan petani

Berdasarkan perkembangan data 3 (tiga) tahun terakhir jumlah produksi peternakan/populasi ternak dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.310
Capaian Kinerja Bidang Peternakan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s/d 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Jumlah Produksi Perternakan Populasi ternak	Ekor	68.438	68.241	69.114	48.835	69.114	50.131
	- Sapi & Kerbau	Ekor	50,402	49,988	50.906	30.250	50.906	31.464
	- Kambing & Domba	Ekor	18,036	18,253	18.208	18.585	18.208	18.667

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	Ton/Tahun	775,620	777,390	776.396	1.653.526	776.396	844.453
	- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	694,074	695,965	694.768	1.618.520	694.768	810.660
	- Karet	Ton/Tahun	81,530	81,410	81.612	34.990	81.612	33.779
	- Aren	Ton/Tahun	15,65	15,62	15,67	15,62	15,67	14,31
3	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	Persentase	4.75	10.71	4,51	-8,88	4,51	26,27

* Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Kawasan sentra peternakan dan perkebunan meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hulu merupakan kabupaten yang mempunyai keunggulan komoditas ternak pada ternak sapi potong dengan nilai Location Question (LQ) sebesar 1,36. Kawasan peternakan di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau N0. Kpts.2045/XII/2020 Tentang Penetapan Sentra Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dibagi menjadi beberapa sentra pengembangan komoditas peternakan, meliputi:

a. Sapi Potong meliputi Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai Utara, KuntoDarussalam, Tandun dan Rambah Samo;
b. Kerbau meliputi Kecamatan Bangun Purba dan Rambah;
c. Kambing meliputi Kecamatan Tambusai Utara, Bangun Purba, Rambah Samo, Rambah dan Rambah Hilir;

Sedangkan kawasan perkebunan terdiri dari:

a. Karet, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih80.338Ha,terdiridari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 2.670 Ha,Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 67.806 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 9.862 Ha .
b. Produksi karet kurang lebih 81.367,30 Ton, produktifitas kurang lebih 1.200 Kg/Ha Ton dengan petani sebanyak 22.567 KK.
c. Kelapa Dalam, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 986 Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 855 Ha dan Tanaman Tua Replanting(TTR)seluas 131 Ha.
d. Produksi kelapa dalam kurang lebih 473,04 Ton, produktifitas kurang lebih 553 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 4.464 KK.
e. Kelapa Sawit, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 264.942,41 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas

29.344 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 229.977 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 5.620,88 Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Nasional (PBN) seluas kurang lebih 35.055Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 784 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 34.271 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas kurang lebih180.667.84Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 180.667,84 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0 Ha. Total Luas Areal Perkebunan Besar Swasta(PBS)seluas kurang lebih 480.665,25Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 30.128 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM)seluas 444.915,89 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas5.620,88Ha.

f. Produksi kelapa sawit rakyat kurang lebih 689.931,15 Ton, produktifitas kurang lebih 3.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 71.111KK. Kelapasawit Perusahaan Besar Negara (PBN) kurang lebih 141.279,00 Ton, produktifitas kurang lebih 3.900,00 Ton, dengan petani sebanyak 0KK.Kelapa sawit Perusahaan Besar Swasta (PBS) kurang lebih 409.312,00Ton, produktifitas kurang lebih 4.100,00 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 0KK. Total Produksi Kelapa sawit kurang lebih 1.240.522,15 Ton produktifitas kurang lebih 11.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak71.111KK.
g. Kakao, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 194,77 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 60,06 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 134,69 Ha.
h. Produksi kakao kurang lebih 37,03 Ton, produktifitas kuranglebih617Kg/Ha, dengan petani sebanyak 492 KK.
i. Kopi, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 184,00 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 4Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 129,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting(TTR)seluas 51 Ha.
j. Produksi kopi kurang lebih 94,61 Ton, produktifitas kurang lebih733Kg/Ha, dengan petani sebanyak 414 KK.
k. Pinang, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 119,00Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0 Ha,Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 71,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 48 Ha.

l. Produksi Pinang kurang lebih 29,02 Ton, produktifitas kurang lebih 409 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 526 KK.
m. Enau, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 279,13 Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 267,01 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 10,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 2,12 Ha.
n. Produksi Enau kurang lebih 15,62 Ton, produktifitas kurang lebih1.562 Ton, dengan petani sebanyak 441 KK.
o. Gambir, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 30,00 Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0,00 Ha,Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 30,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0,00 Ha.
p. Produksi Gambir kurang lebih 6,90 Ton, produktifitas kurang lebih 230 Ton, dengan petani sebanyak 58 KK.

3) Perindustrian dan Perdagangan

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, meskipun sempat mengalami penurunan pada awal periode. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 5,35 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2021 dan kembali sedikit turun menjadi 5,05 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, kontribusi sektor perdagangan meningkat signifikan, mencapai Rp3.085,23 miliar atau sekitar 5,45 persen terhadap total PDRB.

Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung berfluktuatif selama periode yang sama. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar 25,25 persen, lalu mengalami penurunan menjadi 25,06 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, sektor ini kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 26,42 persen. Namun, pada tahun 2023 kontribusinya sedikit menurun menjadi 25,06 persen, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 25,70 persen.

Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan kontribusi PDRB dari sektor perdagangan selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.311
Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta)	9.113.030,88	10.568.202,22	12.974.185,93	13.545.540,46	14.560.937,66
		25,25	25,06	26,42	25,97	25,70
2	Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga	850	981	995	1020	1065
3	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam Juta)	1.929.000	2.132.630,33	2.506.400,08	2.859.833,72	3.085,232,70
		5,35	5,06	5,05	5,48	5,45
4	Ekspor Bersih Perdagangan (dalam juta)	5.406.361,10	0	0	0	0

Sumber BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sementara itu, untuk indikator jumlah kelompok pengrajin yang menerima bantuan pembinaan dari Pemerintah Daerah pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1(satu) kelompok pengrajin. Kelompok ini mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan dan bantuan peralatan, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan serta kualitas dan kuantitas hasil produksi kerajinan mereka. Adapun jumlah total pengrajin pada tahun 2024 mencapai 35 orang, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kelompok pengrajin sebanyak 3 kelompok dibandingkan dengan tahun 2023.

Sedangkan, jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah bertanda tera sah dan masih berlaku pada tahun 2024 mencapai 965 unit, meningkat sebanyak 89 unit dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran pemilik UTTP akan pentingnya legalitas dan akurasi alat ukur mereka melalui proses tera.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.065 unit, meningkat sebanyak 45 unit dari tahun 2023 yang berjumlah 1.020 unit. Lebih rinci untuk Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

- Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.312
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	0	1	2	3	1
2	Jumlah kelompok pengrajin	24	25	28	32	35

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	508	351	761	876	965
4	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	850	981	995	1020	1065
5	Jumlah Pasar Tradisional	97	97	96	100	100

* Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dalam proses produksi komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, terutama pada saat masa panen, para petani menggunakan berbagai jenis alat panen yang umumnya terbuat dari besi. Di perkebunan kelapa sawit, alat panen yang biasa digunakan meliputi dodos (chisel) dan egrek (sickle). Selain itu, untuk kegiatan pembersihan lahan perkebunan, para petani juga memanfaatkan alat-alat seperti parang, golok, tajak, cangkul, sabit, serta alat berat lainnya. Sementara itu, di perkebunan karet, alat utama yang digunakan dalam proses penyadapan adalah pisau deres/sadap, dengan jenis alat pembersih kebun yang relatif sama seperti di kebun kelapa sawit.

Kebutuhan terhadap alat-alat produksi tersebut terutama pada saat panen dan pembersihan kebun dipenuhi oleh para pandai besi, yang tergolong sebagai pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pandai Besi. Para pelaku IKM ini berasal baik dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu sendiri maupun dari luar daerah. Lebih rinci, jumlah IKM Pandai Besi per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.313
Data Industri Kecil Menengah (IKM) Pandai Besi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambah	16	25	25	26	26
2	Rambah Samo		4	2	2	2
3	Bangun Purba	1	2	4	4	4
4	Rambah Hilir	2	3	3	3	3
5	Tambusai	3	4	5	5	5
6	Pagaran Tapah		1	1	1	1
7	Kabun	1	4	4	4	4
8	Tandun	2	2	2	2	2
9	Rokan IV Koto	1	4	4	4	4
10	Pendalian IV Koto	2	6	6	6	6
11	Kunto Darussalam		1			
12	Kepenuhan Hulu					
13	Kepenuhan		1	1	1	1
14	Tambusai Utara	2	4	4	4	5
15	Bonai Darussalam					
16	Ujung Batu	1	1	2	2	2
	Jumlah	31	62	63	64	65

* Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan terobosan agar produk yang dihasilkan oleh pelaku IKM Pandai Besi dapat bersaing dengan produk dari daerah lain dengan kualitas sesuai standar, dan berkesinambangun. Untuk itu perlu dibangun suatu Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Pandai Besi di Kabupaten Rokan Hulu yang tentu saja dipusatkan dimana pelaku usaha tersebut banyak berdomisili.

Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) Pandai Besi direncanakan dibangun di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.530/DISPERINDAG/738/2022 Tentang Penetapan Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah Pandai Besi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.Luas Tanah yang tersedia untuk Pembangunan SIKIM seluas 5,021 Ha. Dengan adanya SIKIM ini diharapkan Produk Pandai Besi yang di Produksi dapat memenuhi Standar (SNI) sehingga IKM Pandai Besi dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan – Perusahaan Kelapa Sawit yang ada dan dapat menjual produknya ke daerah lain.

4) Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu telah menerima transmigran sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2004 dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Sebagian besar daerah transmigrasi sudah ditingkatkan menjadi desa definitif, sampai dengan saat ini hanya tinggal 3 desa transmigrasi yang belum ditngkatkan menjadi desa definitif yakni SP3, SP4 dan SP5 di Kecamatan Kepenuhan.

- Transmigrasi swakarsa

Transmigran swakarsa adalah penduduk yang melakukan transmigrasi atas keinginan sendiri tanpa dorongan dari pihak lain. Transmigran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu merupakan transmigran swakarsa mandiri yaitu masyarakat secara perorangan maupun kelompok yang sudah mampu mengembangkan diri dan ingin meningkatkan mutu kehidupannya. Lokasi transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu terdapat di 14 (empat belas) kecamatan dan 55 (lima puluh lima) desa/penempatan. Jumlah transmigran swakarsa sebanyak 13 desa/penempatan atau sebesar 23,64 persen.

- Penerbitan sertifikat lahan transmigrasi per desa

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan percepatan proses pembuatan sertifikat tanah hak milik transmigran untuk memperjelas status kepemilikan tanah secara sah dan diakui sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif transmigran. Pada tahun 2015 Sampai dengan tahun 2019, penerbitan sertifikat tanah dikawasan transmigrasi telah berhasil menerbitkan sebanyak 5.359 persil dari 24.878 persil atau 21,54 persen. Sedangkan pada tahun 2020 akan diterbitkan sertifikat sebanyak 5.697 persil. selanjutnya realisasi penerbitan SHM pada tahun 2021 sebanyak 72.408 persil yang terdiri dari sertifikat hak milik masyarakat, fasum dan fasos.

5) Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (meliputi sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan sumberdaya lainnya) serta mengoptimalkan kerjasama stakeholder terkait bidang kelautan dan perikanan, berupaya mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

- Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Protein Hewani Asal Ikan dan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan

Perkembangan jumlah produksi perikanan, konsumsi protein hewani asal ikan dan kelompok/jumlah rumah tangga petani ikan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 314
Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Protein Hewani Asal Ikan dan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi protein hewani asal ikan (kg/kapita/tahun)	41,38	41.10	41.09	42,7	43,60
2	Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton)	8.902,08	9,020.93	9,306.73	9.317,70	9.352,62
	Perikanan tangkap	1.944,24	1,964.90	1.982.52	1.964,8	2.002,59
	Perikanan budidaya	6.957,84	7,056.03	7.324.206	7.352,85	7.350,03
3	Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan	6.269	6.255	18,22	8,6	9,9
4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	54,22	55,61	54,70	54,29	54,89

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada table diatas dapat dilihat, jumlah produksi perikanan meningkat dari 8.902,08 ton pada tahun 2020 menjadi 9.352,62 ton pada tahun 2024, yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya. Seiring dengan peningkatan produksi, konsumsi protein hewani asal ikan juga mengalami tren naik, dari 41,38 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 43,60 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah kelompok atau rumah tangga petani ikan sempat mengalami fluktuasi, namun menunjukkan upaya perbaikan dan pemulihan.

♦ Cakupan bina kelompok nelayan

Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 315
Cakupan Bina kelompok nelayan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	0	2	6	6	3
2	Jumlah kelompok nelayan	26	26	32	42	45
3	Cakupan Bina kelompok nelayan	0	7,7	18,75	8,6	13,5

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Produksi perikanan kelompok nelayan

Peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Rokan Hulu diduga turut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok nelayan. Pada tahun 2020, produksi perikanan kelompok nelayan tercatat sebesar 1.944,24 ton, kemudian mengalami kenaikan menjadi 1.964,90 ton pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, produksi kembali meningkat menjadi 1.982,52 ton. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 1.964,85 ton, sebelum akhirnya kembali naik pada tahun 2024 menjadi 2.002,59 ton. secara keseluruhan, fluktuasi produksi perikanan mencerminkan adanya dinamika dalam aktivitas perikanan kelompok nelayan, yang tetap menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Lebih rinci, capaian indikator kinerja perikanan di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.316
Produksi perikanan kelompok nelayan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	1,944.24	1,964.90	1.982,52	1.964,85	2.002,59
2	Jumlah produksi ikan di daerah	8,902.08	9,020.93	9.306,73	9.317,70	9.352,62
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	21,84	21.78	21,30	21,10	21,40

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Komoditas Unggulan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

Komoditas unggulan perikanan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari empat jenis ikan utama yaitu:

1 Lele
2 Nila
3 Patin
4 Baung

Ikan Lele dipilih sebagai komoditas unggulan yang pertama dengan rencana lokasi pengembangan Kecamatan Ujung Batu, Rokan IV Koto, dan Rambah karena tingginya permintaan terhadap komoditas Lele baik dalam bentuk segar maupun olahan belum tercukupi sepenuhnya. Pertimbangan lainnya karena usaha budidaya ikan Lele sudah sangat berkembang pada daerah tersebut, bisa dibudidayakan dengan teknologi sederhana dan sumberdaya air yang terbatas serta siklus produksi yang cepat.

Sedangkan komoditas unggulan Nila permintaan juga cukup tinggi, namun potensi kolam yang umumnya tadah hujan menjadi kendala dalam pengembangannya selain dari harga pakan yang terus meningkat. Adapun lokasi pengembangannya mencakupi Recamatan Rambah, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai dan Tambusai Utara.

Untuk komoditas Patin dan Baung dijadikan komoditas unggulan pelengkap pengembangan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu karena permintaan pasar terhadap komoditas tersebut tidak sebesar permintaan komoditas Lele dan Nila, akan tetapi pembudidaya ikan tetap melakukan usaha pembudidayaan ikan tersebut, karena harga komoditasnya yang lumayan tiggi dibandingkan dengan ikan Lele.

6.1.3.2. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1) Perencanaan pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-Government menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Rokan Hulu telah disusun tepat waktu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tabel 2.317
Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Dokumen	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009	Ada	Ada	Ada	Ada	
RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024					Ada
RPJMD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Restra Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020	Ada				
	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021					
	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022					
	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023					
	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024					
RTRW Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu 2025

Pada tabel berikut disajikan kinerja Bappeda didalam meningkatkan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan sehingga terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan. Indikator kinerja perencanaan dapat dilihat dari IKU Bappeda selaku Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang Perencanaan. Indikator kinerja semula terdiri dari 10 indikator, namun dengan adanya perubahan RPJMD 2021-2026, dirumuskan menjadi 6 indikator.

Tabel 2. 318
Kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s/d 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2022	2023	2024
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	100 persen	100 persen
2	Persentase E-database yang dimanfaatkan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	100 persen
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang disusun tepat waktu	7 dokumen	8 dokumen	9
4	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	72 persen	80 persen	85 persen

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2022	2023	2024
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	99 persen	99 persen	100 Persen
6	Persentase kebijakan inovasi yang diterapakan didaerah	100 persen	100 Persen	100 Persen

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Dokumen penetapan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pada Tanggal 25 Februari 2020, Badan Informasi Geospasial Mengeluarkan Surat Rekomendasi Hasil Supervisi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2020 – 2040 Nomor : RTRW-7/BIG/IGT/PTRA/2/2020

Tepat Pada Tanggal 06 Maret 2020 diterbitkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 526/III/2020 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040. Dimana Bupati Rokan Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, selanjutnya menyampaikan kembali Hasil Perbaikan dan Penyempurnaan Ranperda tersebut ke Gubernur Riau untuk mendapatkan Nomor Register, dan setelah mendapatkan nomor Register Bupati Rokan Hulu segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan hulu Tahun 2020 – 2040 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan hulu Tahun 2020 – 2040.

Setelah mendapatkan Nomor Registrasi Perda oleh Gubernur Riau Nomor : 4.07.D/2020, Bupati Rokan Hulu tepat pada Tanggal 30 Maret 2020 Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 31 Maret 2020 dengan lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor : 1. Untuk sekarang ini proses penetapan sudah selesai, sehingga dapat dimasukkan kinerja penetapan revisi RTRW Kab. Rokan Hulu yaitu 100 .

- Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Tabel 2.319
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	118	79	99	106	116
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	178	176	112	146	123
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	66.29	44,89	88,39	72,60	94,31

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Tabel 2.320
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	118	79	99	106	116
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	178	176	112	146	123
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	66.29	44,89	88,39	72,60	94,31

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data diatas bahwa Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD serta program RKPD dalam APBD pada tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKPD, adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan, serta adanya kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD.

- Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang jika dibandingkan dengan dokumen RTRW kesesuaiannya hanya berkisar 80 persen, hal ini disebabkan masih adanya pembangunan yang belum sesuai peruntukan tata ruang.

2) Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan

uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundangundangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Riau) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah

serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Tabel 2.321
Kinerja Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase silpa terhadap APBD	0,44 persen	5,46 persen	2,75 persen	4,04 persen	0,54 persen
3	Persentase program/kegiatan/Sub kegiatan yang tidak terlaksana	0,11 persen	0,12 persen	0,03 persen	0,02 persen	0,12 persen
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	32.25 persen	34.84 persen	36,28 persen	27,06 persen	33,43 persen
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	17.40 persen	18.25 persen	12,19 persen	12,31 persen	11,72 persen
6	Perbandingan antara:					
7	Belanja tidak langsung	59.71 persen	-	-	-	-
8	Belanja langsung	40.29 persen	-	-	-	-
9	Belanja Operasi		84,45 persen	68,60 persen	65,80 persen	65,25 persen
10	Belanja Modal		13,87 persen	15,10 persen	19,64 persen	16,72 persen
11	Belanja Tidak terduga		1,29 persen	1,64 persen	0,50 persen	0,04 persen
12	Belanja Transfer		0,40 persen	14,66 persen	14,05 persen	13,98 persen
13	Dana bagi hasil	12.80 persen	11,67 persen	12,81 persen	19,82 persen	17,52 persen
14	Penyusunan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
15	Persentasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	6.64 persen	9.68 persen	6,87 persen	8,05 persen	9,03 persen

* Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Kondisi keuangan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah. Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang cenderung turun dari tahun ke

tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun 2021 kategori rekening belanja langsung dan belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi.

Komponen belanja di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 didominasi oleh belanja Operasi sebesar 65,25 persen dan belanja bagi hasil sebesar 17,52 persen.

- Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

Tabel 2.322
Persentase SILPA terhadap APBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total SILPA	6.750,283,379,10	160,860,260,332.49	44,440,071,941.81	73.324.610.531,08	10,048,998,328.32
2	Total APBD	1,684,410,168,163	1,662,295,506,060.49	1,616,530,239,903.71	1.815.923.804.111,95	1,850,380,791,427.25
3	Persentase SILPA terhadaP APBD	0,40	9.68	2.75	4,04	0,54

* Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas tahun 2020 hingga 2024, persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap APBD Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan variasi yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020, persentase SILPA tercatat sangat rendah yaitu sebesar 0,40 persen, yang menandakan realisasi anggaran yang hampir sepenuhnya digunakan. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 9,68 persen, yang mengindikasikan adanya sisa anggaran yang cukup besar tidak terserap. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan penurunan persentase menjadi 2,75 persen. Tren peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan SILPA mencapai 4,04 persen dari total APBD. Sementara itu, pada tahun 2024, terjadi penurunan drastis ke angka 0,54 persen, mendekati tingkat efisiensi seperti tahun 2020. Fluktuasi ini dapat mencerminkan berbagai faktor

seperti efektivitas perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan perubahan kebijakan fiskal daerah.

3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melihat gambaran kinerja pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

- Rata – rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan data rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Rokan Hulu selama periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir. Selama periode tersebut, rata-rata lama pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh pegawai tercatat konsisten sebesar 0,1 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan masih tergolong sangat minim.

Tabel 2.323
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap berada pada angka yang sangat rendah. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,25 persen, sementara tahun terendah tercatat pada 2020 dan 2023 sebesar 0,11persen. Hal ini mencerminkan masih terbatasnya partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal, yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas aparatur.

Tabel 2.324
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	10	13	6	13
2	Jumlah total ASN	5,575	5.486	5.452	5.265	5.076
3	persentase	0,11	0,18	0,24	0,11	0,25

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Secara kumulatif, jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7 orang, atau setara dengan 1,3 persen dari total 531 jabatan yang ada. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana persentasenya tercatat sebesar 1,2 persen dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang. Meningkatnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya dorongan dari instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas manajerial pejabat melalui program pengembangan kompetensi, serta penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi yang menuntut kesiapan pejabat dalam menghadapi tantangan birokrasi yang dinamis.

Tabel 2.325
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1	2	13	6	7
2	Jumlah total Jabatan	778	796	523	520	531
3	persentase	0.1	0.3	2,5	1,2	1,3

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Tabel 2.326
Diklat Struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklatpim Tk.II (orang)	1	1	6	1	1
2	Diklatpim Tk.III (orang)	0	1	5	2	5
3	Diklatpim Tk.IV (orang)	0	0	2	3	1
4	Jumlah	1	2	13	6	7

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) pada tahun 2024 terdiri dari 1 orang untuk Diklatpim Tingkat II, 5 orang untuk Diklatpim Tingkat III, dan 1 orang untuk Diklatpim Tingkat IV. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada Diklatpim Tingkat III. Meningkatnya jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2024 disebabkan tersedianya alokasi anggaran dan kuota pelatihan dari lembaga pelatihan pemerintah.

- Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 835 jabatan, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.244 jabatan. Peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan organisasi dan restrukturisasi birokrasi yang bertujuan untuk memperkuat fungsi administrasi dan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah.

Tabel 2.327
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	744	762	489	835	1244

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, 2025

- Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu (JFT) pada instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah pemangku JFT tercatat sebanyak 3.676 orang, dan terus mengalami pertambahan setiap tahunnya menjadi 4.566 orang pada tahun 2024. Peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi, yang mendorong peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, serta sebagai bentuk penguatan peran teknis ASN di berbagai bidang pelayanan publik.

Tabel 2.328
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.676	3.796	4.050	4.420	4.566

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

Tabel 2.329
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024

NO	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	11	0.20	10	0,19	8	0,01
2	Sekolah Menengah Pertama	14	0.26	24	0,46	28	0,05
3	Sekolah Menengah Atas	834	15,30	860	16,34	808	0,15
4	Diploma I	7	0.13	25	0,48	11	0,02
5	Diploma II	162	2,97	84	1,60	104	0,020
6	Diploma III	584	10,71	624	11,65	551	0,10
7	Diploma IV/ S1	3,533	64,80	3.422	65	3.182	0,61
8	S2/S	307	5,63	216	4,11	384	0,07
9	S3	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	5,452	100.00	5.265	100	5.076	100

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu dari 5.452 orang pada 2022 menjadi 5.076 orang pada 2024. Mayoritas PNS memiliki tingkat pendidikan Diploma IV/S1, yang konsisten menjadi kelompok terbesar dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, jumlah PNS dengan pendidikan pascasarjana (S2) menunjukkan peningkatan pada tahun 2024, menandakan adanya tren peningkatan kualifikasi akademik aparatur sipil di Kabupaten Rokan Hulu.

- Jumlah PPPK menurut tingkat pendidikan.

Tabel 2.330
Jumlah PPPK menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024

NO	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar						
2	Sekolah Menengah Pertama						
3	Sekolah Menengah Atas	12	0,1	55	0,2	0	0
4	Diploma I						
5	Diploma II						
6	Diploma III	14	0,2	408	0,16	0	0
7	Diploma IV/ S1	656	0,96	2.078	0,81	0	0
8	S2/S	0	0	1	0,03	0	0
9	S3						
	Jumlah	682	1,26	2.542	1,2	0	0

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, terutama pada jenjang pendidikan Diploma III dan Sarjana (S1). Pada tahun 2022, jumlah PPPK dengan latar belakang pendidikan S1 mencapai 656 orang (0,96 persen), dan meningkat menjadi 2.078 orang (0,81 persen) pada tahun 2023. Demikian pula, lulusan Diploma III meningkat tajam dari 14 orang (0,2 persen) menjadi 408 orang (0,16 persen) pada periode yang sama. Namun, pada tahun 2024, belum tercatat adanya PPPK di semua jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya rekrutmen baru pada tahun tersebut.

- Jumlah Pegawai Tidak Tetap menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2024 Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Rokan Hulu Pada tahun 2022 sebanyak 5.282 orang, didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 3.533 orang dan lulusan SMA sebanyak 834 orang. Pada tahun 2023, jumlah PTT menurun menjadi 3.947 orang, namun lulusan SMA meningkat menjadi 1.884 orang, sementara lulusan S1 turun menjadi 1.281 orang. Tren penurunan berlanjut di tahun 2024, dengan jumlah total PTT sebesar 3.132 orang. Lulusan SMA tetap mendominasi (1.803 orang), diikuti oleh lulusan S1 (772 orang) dan

Diploma III (191 orang). Meskipun secara total mengalami penurunan, komposisi tingkat pendidikan menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah dan tinggi masih menjadi mayoritas dalam formasi PTT.

Tabel 2.331
Jumlah Pegawai Tidak Tetap menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024

NO	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	11	0,01	204	0,5	204	0,05
2	Sekolah Menengah Pertama	13	0,02	123	0,3	123	0,3
3	Sekolah Menengah Atas	834	0,15	1884	0,47	1803	0,57
4	Diploma I			2	0,05	1	0,03
5	Diploma II			25	0,06	23	0,07
6	Diploma III	584	0,11	410	0,10	191	0,60
7	Diploma IV/ S1	3.533	0,66	1.281	0,32	772	0,24
8	S2/S	307	0,05	18	0,04	15	0,04
9	S3	0		0	0	0	0
	Jumlah	5.282	1,0	3.947	1,84	3.132	2,35

- Jumlah PNS menurut golongan kepangkatan

Tabel 2.332
Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024

NO	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	16	0.29	14	0,27	12	0,98
	I/a (Juru Muda)	2	0.04	2	0,04	2	0,16
	I/b (Juru Muda Tingkat I)	4	0.07	3	0,06	2	0,16
	I/c (Juru)	6	0.11	6	0,12	4	0,33
	I/d (Juru Tingkat I)	4	0.07	3	0,06	4	0,33
2	Golongan II	993	18,21	905	17,19	677	0,03
	II/a (Pengatur Muda)	34	0.62	26	0,5	23	0,03
	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	88	1,61	77	1,47	72	0,10
	II/c (Pengatur)	307	5,63	297	5,65	259	0,38
	II/d (Pengatur Tingkat I)	564	10,34	505	9,6	323	0,47
3	Golongan III	3,400	62,36	3.379	64,18	3475	0,97
	III/a (Penata Muda)	873	16,01	850	16,15	997	0,28
	III/b (Penata Muda Tingkat I)	596	10,93	588	11,17	541	0,15
	III/c (Penata)	918	16,84	785	14,91	794	0,22
	III/d (Penata Tingkat I)	1.013	18,58	1156	21,96	1143	0,32

NO	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
4	Golongan IV	1,043	19,13	967	18,37	912	1,8
	IV/a (Pembina)	496	9,10	464	8,82	444	0,48
	IV/b (Pembina Tingkat I)	504	9.24	439	8,34	383	0,41
	IV/c (Pembina Utama Muda)	43	0.79	64	1,22	84	0,9
	IV/d (Pembina Utama Madya)	0	0.00	0	0	1	0,01
	Jumlah	5,452	100.00	5.265	100	912	100

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, Golongan III tetap menjadi kelompok terbesar selama tiga tahun berturut-turut, dengan proporsi di atas 60 persen pada 2022 dan 2023. Diikuti oleh Golongan II dan Golongan IV. Sementara itu, Golongan I terus mengalami penurunan jumlah, mencerminkan semakin sedikitnya PNS dengan kualifikasi pendidikan yang lebih rendah. Penurunan jumlah pada Golongan II dan III di tahun 2024 cukup signifikan, meskipun Golongan IV menunjukkan sedikit peningkatan pada beberapa sub-golongan. Perubahan data ini mencerminkan dinamika kepegawaian, seperti pensiun, rekrutmen terbatas, reformasi struktural di lingkungan pemerintah daerah.

- Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Tabel 2.333
Jumlah Jabatan Struktural
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2024

NO	Uraian Jabatan Struktural	2021	2022	2023	2024
1	Eseleon II	34	34	34	21
2	Eselon III	171	167	166	158
3	Eselon IV	591	322	322	251
	Jumlah	796	523	522	430

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat Jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 796 jabatan struktural, dan terus menurun menjadi 430 jabatan pada tahun 2024. Penurunan paling tajam terjadi pada jenjang Eselon IV, dari 591 jabatan pada 2021 menjadi hanya 251 jabatan pada 2024, mencerminkan adanya perampingan struktur organisasi atau transformasi ke jabatan fungsional.

4) Penelitian dan pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai salah

satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan terobosan yang dihasilkan oleh kelitbangan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi dasar pentingnya peran kelitbangan untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sebagai salah satu upaya penting untuk mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Rokan Hulu adalah melalui penelitian sebagai pintu awal kemajuan daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu amanat di dalam Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan, alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau komersialisasi teknologi. Invensi dan inovasi tersebut juga ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan daerah dan/atau menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kegiatan utama kelitbangan terdiri dari Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya yang merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Kegiatan penelitian harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan

pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan penerapan yang dapat memanfaatkan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk melihat kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

- Persentase implementasi rencana kelitbangan

Tabel 2.334
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	2	1	1	6	2
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	2	2	2	5	2
	Rasio	100	50	50	120	100

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Tabel 2.335
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	0	1	1	6	2
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	2	1	1	6	2
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	100	100	100	100

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi didaerah

Tabel 2.336
Persentase Perangkat Daerah yang Difasiltasi Dalam Penerapan Inovasi
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitasi	5	24	16	15	26
2	Jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Rasio	11.11	53,33	35,55	33,33	57,78

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah

Tabel 2. 337
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	5	25	16	16	26
2	Jumlah inovasi yang diusulkan	18	66	42	23	36
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	27,78	37,88	38,09	69,56	72,22

* Sumber: Rekap data PPI tahun Tahun 2025

Dari empat indikator yang digunakan masih ada indikator yang belum menemui target pada tahun 2024 yaitu pada Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capain yang masih jauh dari harapan.

Peningkatan persentase penerapan inovasi di daerah sangat penting guna meningkatkan daya saing daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa Inovasi Daerah yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diciptakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

5) Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, maupun masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah provinsi Riau maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kondisi kultural/budaya agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Kerjasama tersebut salah satunya adalah memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unsur Perguruan Tinggi untuk mendorong pengembangan inovasi masyarakat. Hal ini penting karena program pengabdian kepada masyarakat memberikan banyak manfaat baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat antara lain:

- Mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi.
- Dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan.
- Tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan.

Gambaran pengembangan inovasi daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2.338
Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Berdasarkan Surat Bupati No : 000.9/Setda-Bappeda/75.05

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH		NAMA INOVASI TAHUN 2021		NAMA INOVASI TAHUN 2022		NAMA INOVASI TAHUN 2023		ıMA INOVASI TAHUN 2024
1.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	APLIKASI "ASET BOS"	1.	APLIKASI "ASET BOS"
2.	KECAMATAN UJUNG BATU	1.	Siler	1.	Pelobang Mulsa Gampil (Gampang, Pintar, Terampil)	1.	NIHIL		
3.	PUSKESMAS UJUNG BATU	1.	PUTRI MEWA (Putuskan Antrian Melalui WA	1.	GERDU JELITA (Gerakan Peduli Jentik di Sekitar Kita	1.	MASAK PTM (Masyrakat Sadar Skrining Penyakit Tidak Menular)	1	MUKA IMOET (Temukan Kasus HIV Melalui Mobile VCT)
4.	DINAS KESEHATAN	1.	GERMES BERBUDI	1.	GERMES BERBUDI	1.	GERMES BERBUDI		
		2.	PSC	2.	PSC	2.	PSC		
						3.	Klinik Layanan Berhenti Merokok		
5.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.	NIHIL	1.	PUSKESOS CERDIK (10 Lokus)	1.	PUSKESOS CERDIK (10 Lokus)		
6.	KECAMATAN KEPENUHAN	1.	Gerakan Pelayanan Keliling Administrasi Kecamatan terpadu (GPKAKT)	1.	Lahir Langsung Dapat Akta Kelahiran (LALDAKTA)	1.	Kumpulan Layanan Inovasi Kecamatan (KLIK)	1	Kumpulan Layanan Inovasi Kecamatan (KLIK)
		2.	PAPERLES	2.	DIRECT ANSWER				
7.	PUSKESMAS KEPENUHAN							1	KAPTEN (Kelas Atasi Penyakit Hipertensi)

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI TAHUN 2021		NAMA INOVASI TAHUN 2022		NAMA INOVASI TAHUN 2023		ıMA INOVASI TAHUN 2024
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.	PECEL DESA	1.	PECEL DESA	1.	PECEL DESA		
				2.	SESULI BANJA	2.	SESULI BANJA		
						3.	KAMU NANYA		
9.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Siskeudes	1.	Siskeudes	1.	Siskeudes		
10.	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA					1.	PENTAS (Pelayanan Tak Terbatas)	1	Pelayanan Tanpa Batas
11.	PUSKESMAS RAMBAH SAMO II	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	Sehari CERIA		
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN IFORMATIKA								
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.	GERCEP LKPM	1.	KLINIK LKPM	1.	OK BOS		
		2.	JELITA ON CALL						
		3.	SOSIALISASI OSS DAN SICANTIK						
		4.	PELAYANAN PERIZINAN DI JAM ISTIRAHAT						
14.	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	ada	1	Konftuntas (Penyelesaian Konflik Lahan di Kecamatan Bonai Darussalam)
15.	PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II	1.	BEKAZI (Bekal Gizi Sehari)	1.	BEKAZI (Bekal Gizi Sehari)	1.	BEKAZI (Bekal Gizi Sehari)		
16.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata		
17.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	Simperang (Sistem Informasi Pelayanan Tera-Tera Ulang		
18.	PUSKESMAS TAMBUSAI I	1.	NIHIL	1.	ANJELI	1.	NIHIL	1	Laskar TB (Laksanakan dan Kejar Penyakit TB di Wilayah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI TAHUN 2021		NAMA INOVASI TAHUN 2022		NAMA INOVASI TAHUN 2023		ıMA INOVASI TAHUN 2024	
									Puskesmas Tambusai)
19.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.	e-Bangkit	1.	E-SEMBAKO (SistemInformasiPemantauan Harga Komoditas Kabupaten Rokan Hulu Plus)
								2	SRIGALA MERAJUT RUSA (Stategi Penaggulangan Kemiskinan Melalui Kolaborasi Menuju Kabupaten Rokan Hulu yang Sejahtera
20.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.	SIMPATDA	1.	Hot To Host (Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah)	1.	SIRETDA (Sistem Retribusi DaeraH)		
21.	PUSKESMAS PAGARAN TAPAH	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	ORALIT SEHAT (Obrolan lima menit seputar Kedsehatan		
22.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	SIPENGGALI		
23.	SEKRETARIAT DAERAH	1.	Elektronik RFK	1.	Elektronik RFK	1.	Elektronik RFK	1	SIPORMAT (Sistem Informasi dan Pelaporan Kecamatan Terintegrasi)
				2.	e-Fopi (Sistem Aplikasi Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	2.	Sistem Informasi dan Pelaporan Kecamatan Terintegrasi (SIPORMAT)		
						3.	Aplikasi e-Sakip		
24.	PUSKESMAS TANDUN II	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	Program Pangkat Tinggi	1	PANGKAT TINGGI (Bapak Angkat Stunting dan Gangguan Gizi)
25.	INSPEKTORAT	1.	SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai)	1.	SIAUDIT (Sistem Informasi Audit)	1.	E-KINERJA (Elektronik Kinerja)		SIDAPEG (Sistem Informasi Data Kepegawaian)

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI TAHUN 2021		NAMA INOVASI TAHUN 2022		NAMA INOVASI TAHUN 2023		ıMA INOVASI TAHUN 2024	
26.	PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I	1.	NIHIL	1.	BASMI PELAKOR (Bersama Kami Petugas Lacak Kesehatan Rokan Satu)	1.	PESAN TERBUKTI (Pelayanan Kesehatan Enam Desa Trerpadu Lubuk Bendahara Timur)	1	GERAKAN BTS (Bawa Tumler Sendiri)
								2	Puskesdes Terpadu Desa Lubuk Bendahara
27.	PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO	1.	Pertolongan Persalinan 4 Tangan	1.	NIHIL	1.	Gemas Janda (TB)		
28.	PUSKESMAS RAMBAH							1	JAWARA BILAS (Jaga Kesehatan Warga Binaan Lapas Pasir Pengaraian)
29	PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM							1	OSSELA (One Stop Service Lansia)
30	PUSKESMAS KEPENUHAN HULU							1	GEMA DENTING (Gerakan Bersama Demi Pencegahan Stunting)

*Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem e-government

Penerapan TIK dan E-Government di Kabupaten Rokan Hulu ternyata telah menjadi inspirasi bagi daerah lainya, kita harapkan kedepan, penerapan TIK dapat lebih di tingkatkan sehingga sistem ini dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan penerapan TIK dan E-Government di Rokan Hulu memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini di buktikan dengan meningkatnya rangking Rokan Hulu dalam sistem perangkingan E-Government baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Jika pada tahun 2012 lalu, Rokan Hulu menduduki peringkat ke 5 penerapan TIK dan E-Government di Riau, maka tahun 2014 Rokan Hulu sudah menduduki peringkat 1 tingkat Riau dalam penerapan TIK dan E-Government. Keberhasilan ini tentunya berkat kerjasama dari seluruh OPD yang mau bersinergi dengan PDE dalam Pengelolaan data elektroniknya, saat ini seluruh OPD dan kecamatan Sudah terhubung dengan server utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan kedepan kita akan upayakan untuk mengkoneksikan seluruh UPTD OPD, baik melalui internet ataupun wireless.

6) Pengawasan

Dari segi akuntabilitas keuangan dan kinerja, ketepatan waktu dan kedisiplinan merupakan fondasi utama yang harus dikedepankan. Hal ini mencerminkan integritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Komitmen tersebut dibuktikan dengan konsistensi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja (PENJA) secara tepat waktu setiap tahunnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Langkah ini merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga secara konsisten melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

- Persentase tindak lanjut temuan

Pada tahun 2024, persentase tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat mengalami penurunan signifikan, yakni sebesar 49,62 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 79,24 persen. Sementara itu, jumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) justru mengalami peningkatan, dari 15 temuan pada tahun 2023 menjadi 53 temuan pada tahun 2024. Perkembangan indikator pengawasan ini mencerminkan perlunya peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan. Informasi lebih rinci mengenai perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 339
Persentase tindak lanjut temuan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	99	132	174	187	131
2	Jumlah total temuan	161	162	200	236	264
3	Persentase tindak lanjut temuan	61.49	81,48	87,00	79,24	49,62

* Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Jumlah temuan BPK

Tabel 2.340
Jumlah temuan BPK
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan BPK	15	10	13	15	53

* Sumber: Inspektorat Kab. Rokan Hulu dan Rekap matrik BPK Tahun 2025

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pedoman penilaian SPIP telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP.

Tabel 2.341
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas SPIP	3.000 (level 3)	3.212 (level 3)	3.217 (level 3)	3.141 (level 3)

* Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;

3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.342
Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for prevention (MCP) KPK	90	84	76	75,42

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6.) Sekretariat DPRD

Sebagai Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat Dewan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran operasional legislatif. Dalam rangka menjalankan peran tersebut, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan untuk setiap alat kelengkapan DPRD secara terstruktur. Program-program kerja DPRD yang mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah (Perda), dan fungsi anggaran telah dirancang secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu, program-program tersebut juga telah diselaraskan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD, sehingga mendukung keselarasan antara perencanaan legislatif dan eksekutif. Keberhasilan pencapaian sasaran yang didukung oleh berbagai program dan kegiatan diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil capaian kinerja tersebut disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.343
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Target	Capaian	Capaian
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	persen	87,5	87,5	90	94,76
2	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	persen	82,5	82,5	85	72,76
3	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	persen	97,5	97,5	100	100
4	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persen	87,5	87,5	90	85,33
5	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	persen	87,5	87,5	90	80

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD

Tabel 2.344
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD

Tabel 2.345
Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Terintegrasinya program-program DPRD

Tabel 2.346
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing di Kabupaten Rokan Hulu, yang berfokus pada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, Pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan per kapita dan Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa.

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu secara makro dapat digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK),serta pertumbuhan pada total PDRB. Pada tahun 2023, komponen-komponen pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan positif.

Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar 36.087,00 miliar rupiah (2020); 42.177,46 miliar Rupiah (2021); 49.614,38 miliar rupiah (2022); 52.156,58 miliar rupiah (2023): dan 56.646,72 miliar rupiah (2024) Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Dari sisi demand, hingga saat ini ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, disusul dengan PMTB, net ekspor, konsumsi pemerintah,konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Sedangkan komponen pengeluaran yang

mengalami peningkatan terbesar di tahun 2024 masih dipegang oleh komponen net ekspor. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan permintaan CPO (Crude Palm Oil) di pasar dunia tahun 2022 meskipun sempat terhambat di triwulan II dikarenakan adanya larangan eksport CPO dan turunannya namun kembali meningkat setelah larangan eksport CPO dicabut dan adanya pembebasan tarif pungutan eksport CPO.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.347
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 -2024

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi rumah tangga	23.669,45	25.084,64	27.905.73	30.319,68	32.594,11
2	Konsumsi LNPRT	335.04	329,92	369,84	409,45	474,11
3	Konsumsi Pemerintah	1.451,14	1.328,12	1.362,78	1.423.97	1.544,35
4	Pembentukan modal tetap bruto	9.021,33	10.029,21	11.418,61	12.057,57	12.693,23
5	Perubahan inventori	556,26	77,79	65,41	86,77	51,95
6	Net Ekspor	1.053,77	5.327,79	8.492,00	7.859,15	9.288,97
	PDRB	36.087,00	42.177,46	49.614,38	52.156,58	56.646,72

* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.348
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 -2024

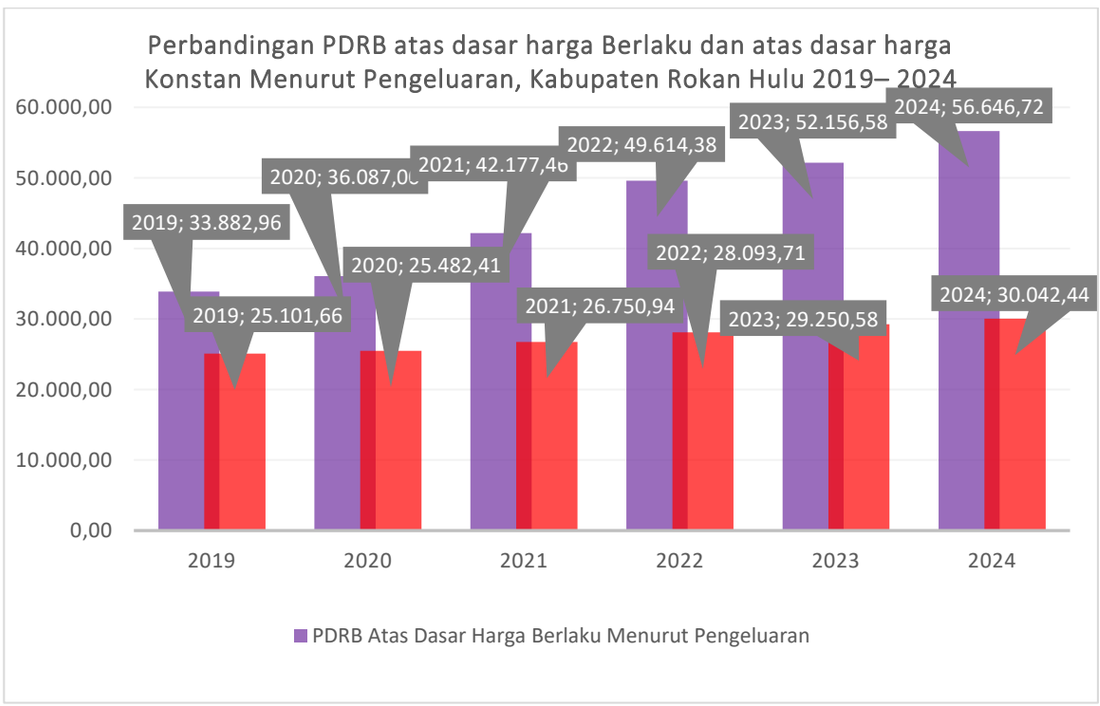
No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi rumah tangga	13.918,37	14.387,01	15.104,39	15.814,02	16.515,53
2	Konsumsi LNPRT	200,24	193,82	202,33	214,25	242,25
3	Konsumsi Pemerintah	877,85	830,27	839,24	838,89	885,08
4	Pembentukan modal tetap bruto	4.819,31	5.090,93	5.436,01	5.690,61	5.870,67
5	Perubahan inventori	219,55	46,80	38,65	47,90	26,23
6	Net ekspor	5.447,09	6.202,11	6.473,08	6.644,89	6.502,67
	PDRB	25.482,41	26.750,94	28.093,71	29.250,58	30.042,44

* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan atau berbagai produk barang dan jasa yang

dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan volume barang dan jasa yang digunakan atau secara kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Komponen PDRB pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2020-2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel ..... diatas. Dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan yang positif dengan kontribusi terbesar adalah pada komponen konsumsi rumah tangga hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu dan pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat seiring pulihnya sektor-sektor ekonomi industri perdagangan.

Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah di tiadakan. Gambar berikut ini menunjukkan perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Rokan Hulu menurut pengeluaran tahun 2020-2024.



* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Gambar 2. 45
Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu 2020– 2024

2) Pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan per kapita

Terjadi peningkatan pengeluaran untuk Makanan dari 55,33 persen pada tahun 2023 menjadi 58,06 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan proporsi yang lebih besar dari pengeluaran mereka untuk kebutuhan konsumsi pokok. Sedangkan Pengeluaran untuk barang tahan lama menurun signifikan dari 5,04 persen menjadi 3,03 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya penundaan dalam pembelian barang-barang besar atau penurunan daya beli masyarakat.

Tabel 2.349
Persentase Pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas dikabupaten Rokan Hulu 2023 -2024

No	Komponen Pengeluaran	2023	2024
1	Makananan, minuman dan rokok	55,33	58,06
	Jumlah makanan	55,33	58,06
2	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	3,49	3,30
3	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	22,08	22,05
4	Aneka barang dan jasa	9,66	8,90
5	Barang tahan lama	5,04	3,03
6	Pajak, pungutan, dan asuransi	2,50	2,86
7	Keperluan pesta dan upacara	1,89	1,81
	Jumlah bukan makanan	44,67	41,94
	Total	100.00	100.00

* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 - 2024

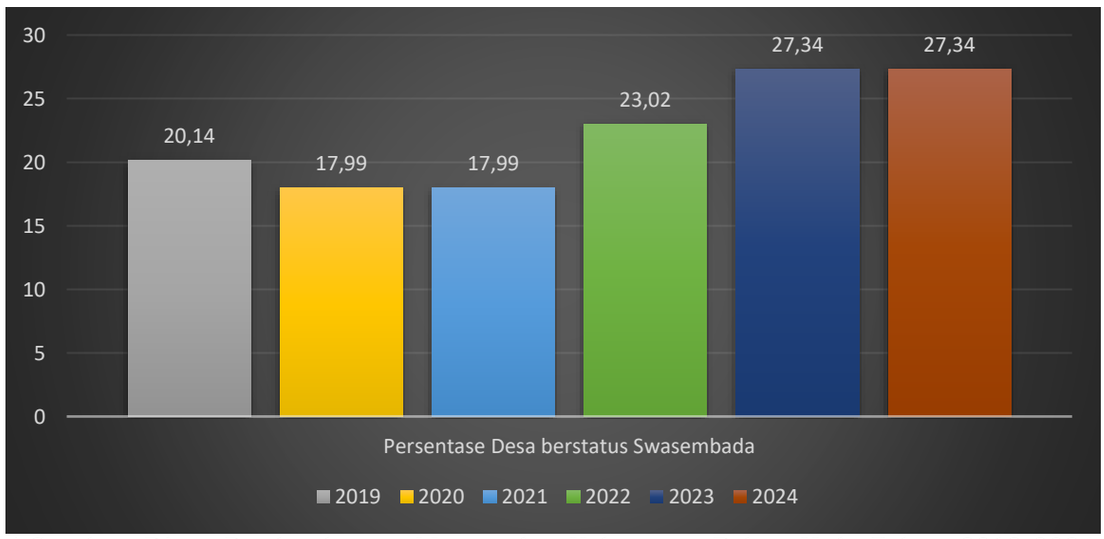
3) Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Berdasarkan data yang dihimpun selama periode 2019 hingga 2024, Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren peningkatan dalam jumlah desa yang berstatus swasembada. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 28 desa atau 20,14 persen dari total 139 desa telah mencapai status swasembada. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan dan stagnasi, dengan jumlah desa swasembada menurun menjadi 25 desa atau setara dengan 17,99 persen. Memasuki tahun 2022, upaya peningkatan kapasitas desa mulai menunjukkan hasil yang positif. Jumlah desa swasembada meningkat menjadi 32 desa atau 23,02 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana tercatat 38 desa atau 27,34 persen dari total desa telah mencapai status swasembada. Peningkatan ini merupakan hasil dari pelaksanaan program pembangunan desa yang berkesinambungan, serta dukungan kebijakan yang berfokus pada penguatan kelembagaan, ekonomi lokal, dan kemandirian desa.

Tabel 2.350
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2024

TAHUN	SWASEMBADA	JUMLAH DESA	RASIO DESA SWASEMBADA
2019	28	139	20.14
2020	25	139	17,99
2021	25	139	17,99
2022	32	139	23,02
2023	38	139	27,34
2024	38	139	27,34

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2024



* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2024

Gambar 2. 46
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Tahun 2019 sd 2024
Kabupaten Rokan Hulu

2.1.4.2. Fokus Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan tentunya tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 –2040. Kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah.

1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

A. Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan dengan strategi:
   - Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal;
   - Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada;
   - Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota; dan
   - Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

B. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan dengan strategi:
   - Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara, serta keterpaduan intra dan antar moda;
   - Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
   - Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal;
   - Pengembangan sistem jaringan jalan antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten (pengembangan multi akses dari dan ke pusat kegiatan/pusat pelayanan);
   - Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, ruang terbuka hijau dan non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana.

2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan pola ruang di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

A. Kebijakan dan Strategi Untuk pola Ruang Kawasan Lindung

Mempertahankan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten dengan strategi :

a) Mempertahankan kawasan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP;
b) Mengembalikan fungsi lindung untuk kawasan lindung yang telah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP yang telah mengalami perubahan pemanfaatan non lindung, sepanjang syarat dan ketentuan sebagai kawasan lindung terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
c) Mengembangkan kawasan lindung skala kabupaten sesuai dengan potensi fungsi yang ada pada kawasan;
d) Mengusahakan terjaganya kawasan hutan minimal 30 persen dari setiap DAS dalam keseluruhan wilayah Kabupaten.

Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Lindung, dengan strategi pencapaian melalui Penetapan kembali kawasan lindung strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan lindung sebagai kawasan strategis kabupaten aspek Lingkungan Hidup.

Kebijakan dan Strategi Untuk Ruang Kawasan Budidaya

Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan. Strategi untuk mencapai kebijakan tersebut, diantaranya:

a) Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitasi dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi);
b) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan;
c) Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi dengan mengembangkan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan stimulan daerah potensi disekitarnya serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan;
d) Penjaminan keberadaan sumber daya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem;
e) Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan untuk penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan

Internasional serta penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan;

f) Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan

3) Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Budidaya, melalui penetapan kembali kawasan budidaya strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai kawasan strategis kabupaten pada aspek Ekonomi dan Aspek Sosial Budaya.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas yang terjadi sehingga bisa menjadi faktor penghambat investasi.Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan upaya pencegahan sehingga iklim investasi di Rokan Hulu dapat terus meningkat.

1) Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang krusial, yang umumnya berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomi seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan upah yang tidak memadai. Di Kabupaten Rokan Hulu, upaya penanganan kriminalitas terus dilakukan dari tahun ke tahun, meskipun hasilnya belum menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, tingkat penyelesaian kasus kriminalitas mencapai 77,69 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,76 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, meskipun tantangan tetap ada. Untuk terus menekan angka kriminalitas, berbagai langkah strategis telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, memperkuat fungsi pengamanan dan pelayanan, serta memberikan imbauan langsung kepada masyarakat. Selain itu, program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) terus didorong sebagai sarana untuk membangun kewaspadaan bersama dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan melalui partisipasi aktif warga.

Tabel 2.351
Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk	718.321	570.952	476,032	573.520	586,994
2	Jumlah kejahatan dilaporkan	725	709	956	945	1.058
3	Jumlah kerjahatan yang diselesaikan	502	469	669	716	822
4	Rasio	76,03	66,14	70,00	75,76	77,69

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

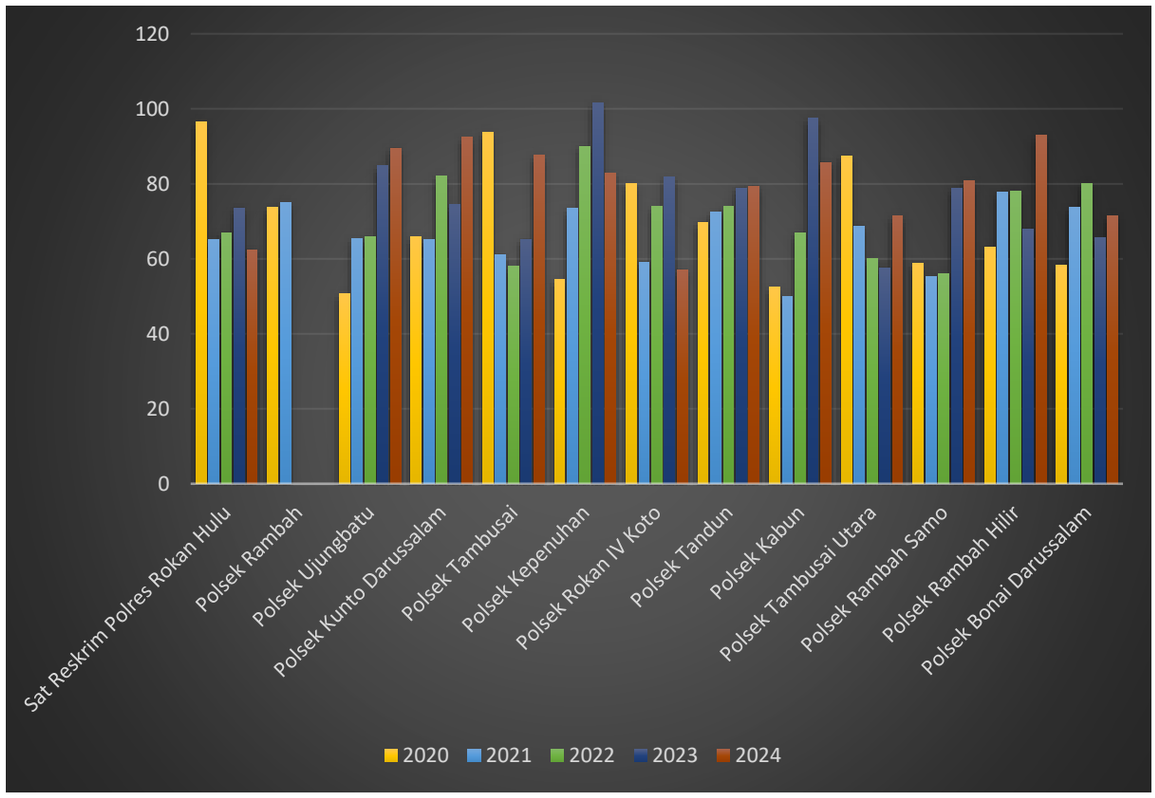
Pada tabel di atas terlihat bahwa angka kriminalitas yang ditangani menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam situasi keamanan di masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena mencerminkan potensi gangguan terhadap rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan terukur untuk menekan angka kriminalitas.

Tabel 2.352
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Kepolisian Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sat Reskrim Polres Rokan Hulu	96,42	65,08	67,00	73,59	62,44
2	Polsek Rambah	73,68	75,00	-	-	-
3	Polsek Ujungbatu	50,70	65,38	66,00	84,93	89,47
4	Polsek Kunto Darussalam	65,85	65,00	82,00	74,40	92,38
5	Polsek Tambusai	93,61	61,11	58,00	65,21	87,58
6	Polsek Kepenuhan	54,41	73,52	90,00	101,60	82,72
7	Polsek Rokan IV Koto	80,00	59,09	74,00	81,81	57,14
8	Polsek Tandun	69,76	72,50	74,00	78,87	79,34
9	Polsek Kabun	52,38	50,00	67,00	97,50	85,71
10	Polsek Tambusai Utara	87,50	68,75	60,00	57,62	71,42
11	Polsek Rambah Samo	58,82	55,26	56,00	75,80	80,80
12	Polsek Rambah Hilir	63,15	77,77	78,00	68,00	92,85
13	Polsek Bonai Darussalam	58,33	73,68	80,00	65,62	71,42
Rokan Hulu		76,03	69,33	70,00	75,76	77,69

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024 yang tercatat di polisi resort Rokan Hulu, terdapat 1.058 kasus tindak pidana, dengan 77,69 persen



Gambar 2, 47
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort Tahun 2020 s/d 2024 di Kabupaten Rokan Hulu

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk < 15 tahun atau 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk > 64 tahun atau penduduk 65 tahun ke atas dimana keduanya disebut bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun yang merupakan angkatan kerja, Berdasarkan data tahun 2024, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 47,03 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi, Rasio sebesar lebih kurang 47,03 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 29,6 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 17,43 Rasio Ketergantungan ini tergolong tinggi, khususnya karena dominasi jumlah penduduk muda, Namun hal ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang, Di sisi lain, pada tahun 2025 akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang semakin tinggi, Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha.

Tabel 2.353
Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	157.559	158.548	160,181	162.392	162.450
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	19.280	20.974	22.846	23.227	25.309
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	176.839	179.522	183,027	185.619	187.759
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	384.544	391.430	399.652	387.901	399.235
5	Rasio ketergantungan	45,99	45,86	45,80	47,85	47,03

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024



* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2. 48
Rasio Ketergantungan Tahun 2020 s/d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

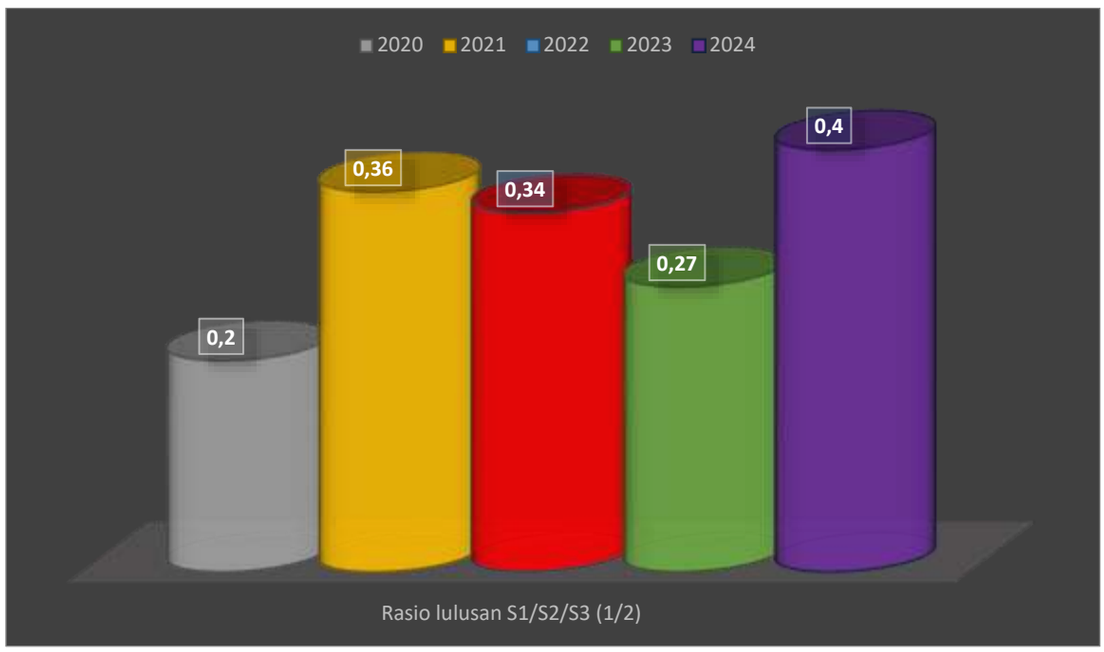
- Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Rokan Hulu (2020-2024) menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio lulusan per 1.000 penduduk tercatat sebesar 0,20, kemudian meningkat menjadi 0,36 pada 2021. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 (0,34) dan 2023 (0,27), rasio kembali melonjak pada tahun 2024 menjadi 0,40. Peningkatan di tahun 2024 mencerminkan adanya perkembangan positif dalam sektor pendidikan tinggi di kabupaten Rokan Hulu, dengan lebih banyak penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi.

Tabel 2.354
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	147	207	201	154	237
2	Jumlah penduduk	718,321	570,952	582,679	573.520	586.994
3	Rasio lulusan per 1000 penduduk	0,20	0,36	0,34	0,27	0,40

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025



* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Gambar 2.49
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2020 s/d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2025 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan melalui evaluasi terhadap kinerja pembangunan secara umum sampai dengan tahun 2024.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- Pendidikan

Pada Urusan Pendidikan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Pendidikan	100,00%	90,94%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100,00%	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	95,47%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Kesehatan

Pada urusan Kesehatan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	65,31%	58,03%
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	60,56%	45,61%
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	33,33%	33,15%
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	86,03%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	64,80%	55,71%
	Predikat kinerja	R	R

- Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pada urusan Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	93,62%	37,87%
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	100,00%	86,92%
3	Program penyelenggaraan jalan	90,25%	79,16%
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100,00%	88,32%
5	Program penyelenggaraan penataan ruang	26,72%	25,37%
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	81,77%	81,81%
7	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	99,71%	93,04%
8	Program penataan bangunan gedung	86,95%	85,68%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	84,88%	72,27%
	Predikat kinerja	T	S

- Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengembangan perumahan	45,55%	46,07%
2	Program kawasan pemukiman	73,33%	56,10%
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	28,16%	28,16%
4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	76,75%	71,70%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	55,95%	50,51%
	Predikat kinerja	R	R

- Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	99,78%	98,22%
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100,00%	85,14%
3	Program Penanggulangan Bencana	56,25%	36,98%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	85,34%	73,45%
	Predikat kinerja	T	S

- Sosial

Pada urusan Sosial capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pemberdayaan sosial	77,27%	89,41%
2	Program rehabilitasi sosial	61,11%	64,34%
3	Program perlindungan dan jaminan sosial	74,24%	96,58%
4	Program penanganan bencana	49,46%	48,82%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	65,52%	74,79%
	Predikat kinerja	S	S

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

- Pangan

Pada urusan Pangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00%	86,49%
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0,00%	0,00%
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100,00%	91,09%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	66,67%	59,19%
	Predikat kinerja	S	R

- Tenaga Kerja

Pada urusan Tenaga Kerja capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	100,00%	100,00%
2	Program hubungan industrial	100,00%	94,05%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	97,03%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	60,00%	64,77%
2	Program perlindungan perempuan	100,00%	83,83%
3	Program peningkatan kualitas keluarga	82,65%	90,43%
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	95,66%	99,06%
5	Program perlindungan khusus anak	95,83%	98,53%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	86,83%	87,32%
	Predikat kinerja	T	T

- Pertanahan

Pada urusan Pertanahan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0,00%	0,00%
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100,00%	99,29%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00%	49,65%
	Predikat kinerja	SR	SR

- Lingkungan Hidup

Pada urusan Lingkungan Hidup capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	98,68%
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	72,17%	58,08%
3	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100,00%	99,09%
4	Program Pengelolaan Persampahan	99,47%	92,36%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	92,91%	87,05%
	Predikat kinerja	ST	T

- Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Pendaftaran Penduduk	100,00%	82,50%
2	Program Pencatatan Sipil	100,00%	77,56%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50,00%	28,64%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	83,33%	62,90%
	Predikat kinerja	T	R

- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program penataan desa	100,00%	100,00%
2	Program administrasi pemerintahan desa	100,00%	91,00%
3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100,00%	95,00%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	95,33%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengendalian penduduk	75,00%	73,70%
2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	83,00%	77,79%
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	97,45%	80,85%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	85,15%	77,45%
	Predikat kinerja	T	T

- Perhubungan

Pada urusan Perhubungan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	75,00%	60,35%
2	Program Pengelolaan Pelayaran	100,00%	58,77%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	87,50%	59,56%
	Predikat kinerja	T	R

- Komunikasi Dan Informatika

Pada urusan Komunikasi dan Informatika capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program informasi dan komunikasi publik	100,00%	99,80%
2	Program Aplikasi Informatika	100,00%	87,57%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	93,69%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	0,00%	0,00%
2	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	100,00%	100,00%
3	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	100,00%	96,39%
4	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	100,00%	99,17%
5	Program pengembangan UMKM	100,00%	98,91%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	80,00%	78,89%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Penanaman Modal

Pada urusan Penanaman Modal capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengembangan iklim penanaman modal	100,00%	100,00%
2	Program promosi penanaman modal	100,00%	99,75%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	100,00%	100,00%
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	88,12%	81,53%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	97,03%	95,32%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Kepemudaan Dan Olahraga

Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100,00%	96,75%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100,00%	94,92%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00%	99,98%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	97,22%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Statistik

Pada urusan Statistik capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan statistik sektoral	100,00%	41,69%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	41,69%
	Predikat kinerja	ST	SR

- Persandian

Pada urusan Persandian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100,00%	72,21%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	72,21%
	Predikat kinerja	ST	S

- Kebudayaan

Pada urusan Kebudayaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengembangan kebudayaan	87,50%	95,57%
2	Program pengembangan kesenian tradisional	23,00%	23,04%
3	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	100,00%	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	70,17%	72,87%
	Predikat kinerja	S	S

- Perpustakaan

Pada urusan Perpustakaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pembinaan perpustakaan	99,77%	98,96%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	99,77%	98,96%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Kearsipan

Pada urusan Kearsipan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengelolaan arsip	99,99%	91,60%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	99,99%	91,60%
	Predikat kinerja	ST	ST

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Pada urusan Kelautan dan Perikanan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	100,00%	100,00%
2	Program pengelolaan perikanan budidaya	85,20%	81,19%
3	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	79,05%	64,96%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	88,08%	82,05%
	Predikat kinerja	T	T

- Pariwisata

Pada urusan Pariwisata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	68,52%	70,77%
2	Program pemasaran pariwisata	50,00%	43,94%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	59,26%	57,36%
	Predikat kinerja	R	R

- Pertanian

Pada urusan Pertanian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	95,84%	91,03%
2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	83,38%	54,10%
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	67,58%
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00%	97,24%
	Program Perizinan Usaha Pertanian	100,00%	48,89%
4	Program Penyuluhan Pertanian	83,34%	70,92%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	93,76%	71,63%
	Predikat kinerja	ST	S

- Kehutanan

Pada urusan Kehutanan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	100,00%	79,20%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	79,20%
	Predikat kinerja	ST	T

- Perdagangan

Pada urusan Perdagangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	100,00%	78,30%
2	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00%	99,97%
3	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	85,52%	92,37%
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75,00%	63,62%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	90,13%	83,57%
	Predikat kinerja	T	T

- Perindustrian

Pada urusan Perindustrian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program perencanaan dan pembangunan industri	100,00%	23,33%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	23,33%
	Predikat kinerja	ST	SR

D. Unsur Pendukung

- Sekretariat Daerah

Pada urusan Sekretariat Daerah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95,68%	97,98%
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	93,61%	90,77%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	94,65%	94,38%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Sekretariat DPRD

Pada urusan Sekretariat DPRD capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74,28%	55,17%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	74,28%	55,17%
	Predikat kinerja	S	R

E. Unsur Pengawasan

- Inspektorat Daerah

Pada urusan Inspektorat Daerah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	79,12%	63,81%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	74,38%	62,29%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	76,75%	63,05%
	Predikat kinerja	T	R

F. Unsur Penunjang

- Perencanaan

Pada urusan Perencanaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	98,67%	86,04%
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	94,96%	83,92%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	96,82%	84,98%
	Predikat kinerja	ST	T

- Keuangan

Pada urusan Keuangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program pengelolaan pendapatan daerah	100,00%	90,35%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	89,22%	88,30%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	77,02%	72,94%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	88,75%	83,86%
	Predikat kinerja	T	T

- Kepegawaian

Pada urusan Kepegawaian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program kepegawaian daerah	76,12%	74,79%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	76,12%	74,79%
	Predikat kinerja	T	S

- Pendidikan dan Peleatihan

Pada urusan Pendidikan dan Pelatihan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00%	99,37%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	99,37%
	Predikat kinerja	ST	ST

- Penelitian dan Pengembangan

Pada urusan Penelitian dan Pengembangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	97,05%	88,44%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	97,05%	88,44%
	Predikat kinerja	ST	T

- Pengelolaan Perbatasan

Pada urusan Pengelolaan Perbatasan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Perbatasan	100,00%	99,32%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	99,32%
	Predikat kinerja	ST	ST

G. Unsur Pemerintahan Umum

- Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00%	89,27%
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100,00%	100,00%
3	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100,00%	100,00%

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	
		K	Rp
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100,00%	99,75%
5	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100,00%	97,94%
	Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	97,39%
	Predikat kinerja	ST	ST

2.2.1.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:
  1. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan.
  2. Terlambatnya dana transfer pusat ke daerah.
  3. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
  4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pada perangkat daerah dalam menunjang pembangunan.
  5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
  6. Kondisi cuaca buruk dan bencana alam yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan fisik.
  7. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan.
  8. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
  9. Adanya perubahan regulasi mengenai kewenangan pelaksanaan kegiatan.
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:
  1. Kebijakan perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
  2. Adanya dukungan anggaran APBD provinsi dan dana transfer pusat (DAK Fisik dan Non Fisik) untuk menunjang program prioritas.
  3. Adanya dukungan dari opd terkait/opd teknis serta pemilihan pihak ketiga yang berkompenten dibidangnya.
  4. Adanya dukungan masyarakat dan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pembangunan.

5. Tingginnya komitmen dari setiap OPD untuk meningkatkan kinerja.
6. Adanya inovasi dan teknologi yang efektif dan efisien.
7. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan lintas OPD dalam mengawal pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

- Faktor penyebab melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah adanya tuntutan dan kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.2.1.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Implementasi program untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan telah dijumpai beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya dukungan dana yang memadai dari APBD Kabupaten Rokan Hulu sementara target atau beban kerja yang diemban cukup tinggi.
2. Tingginya proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam RPJMD dibandingkan dengan pendapatan dan belanja yang tertuang dalam RKPD.
3. Tingginya target kinerja yang ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
4. Regulasi yang menjadi acuan teknis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran selalu berubah-ubah dan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan.

2.2.1.3 Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Berdasarkan analisa dari beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi alokasi belanja.
2. Penyesuaian target kinerja pada tahun anggaran 2025.
3. Penajaman program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan.
4. Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan.
5. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap Hasil RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 bertujuan untuk: (1) menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) konsistensi antara dokumen perencanaan; (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan; 4) memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan; (5) mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan (6) merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi meliputi seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I tahun 2025 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi keuangan dan kinerja.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang tersaji dalam tabel TC-19:

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				**2.740.991.017**		**1.797.371.185**		**718.768.646**		**95.942.337**				**1.893.313.522**			
						URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				**2.720.985.308**		**1.787.375.315**		**715.454.449**		**95.942.337**				**1.883.317.651**			
	1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**2.022.902.588**	**60**	**1.234.768.858**	**100**	**568.538.175**		**93.951.071**	**0%**	**17%**	**60**	**1.328.719.928**	**60,00%**	**65,68%**	**Disdikpora**
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**		**65**		**80**				**0%**		**65**		**65,00%**		
	1	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**45.089**		**9.710**		**-**		**-**				**9.710**			**Disdikpora**
	1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	4.820	1	4.820			-	-	0%	0%	1	4.820	100,00%	100,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	40.269	1	4.890			-	-	0%	0%	1	4.890	20,00%	12,14%	Disdikpora
	1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.898.624.737**		**1.175.119.510**		**562.153.819**		**93.180.818**				**1.268.300.328**			**Disdikpora**
	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	1.898.444.737	28	1.175.119.510	14	562.153.819	4	93.180.818	29%	17%	32	1.268.300.328	45,71%	66,81%	Disdikpora
	1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	60.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	60.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	60.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**5**	**200.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			**Disdikpora**
	1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	80.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5	120.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**		**9.304.565**		**3.836.704**		**915.565**		**-**				**3.836.704**			**Disdikpora**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	500	183.092	426	77.310	226	14.310	-	-	0%	0%	426	77.310	85,20%	42,22%	Disdikpora
	1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85	2.434.622	51	1.325.900	17	432.042	-	-	0%	0%	51	1.325.900	60,00%	54,46%	Disdikpora
	1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	66.535	754.258	15.531	198.826	2204	77.000	-	-	0%	0%	15.531	198.826	23,34%	26,36%	Disdikpora
	1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.000.000	3.042.951	1.924.035	1.214.775	73619	152.214	-	-	0%	0%	1.924.035	1.214.775	32,07%	39,92%	Disdikpora
	1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.000	27.500	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10.500	2.862.142	3590	1.019.892	570	240.000	-	-	0%	0%	3.590	1.019.892	34,19%	35,63%	Disdikpora
	1	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**		**2.580.000**		**438.587**		**-**		**-**				**438.587**			**Disdikpora**
	1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	180.000	5	338.949	0		-	-	0%	0%	5	338.949	3,33%	188,31%	Disdikpora
	1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	400.000	0	-				-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	1.000.000	10	99.638				-	0%	0%	10	99.638	10,00%	9,96%	Disdikpora
	1	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000	0	-				-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**109.697.601**		**53.880.969**		**5.030.900**		**770.253**				**54.651.222**			**Disdikpora**
	1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.813	57.717	2503	24.510	456	4.560	-	-	0%	0%	2.503	24.510	43,06%	42,47%	Disdikpora
	1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	90	841.531	39	415.391	3	323.340	-	42.153	0%	13%	39	457.544	43,33%	54,37%	Disdikpora
	1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	648.954	45	128.954	30	50.000	-	-	0%	0%	45	128.954	100,00%	19,87%	Disdikpora
	1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7.051	108.149.400	2534	53.312.114	576	4.653.000	-	728.100	0%	16%	2.534	54.040.214	35,94%	49,97%	Disdikpora
	1	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**2.450.595**		**1.483.378**		**437.890**		**-**				**1.483.378**			**Disdikpora**
	1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	213.920	4	168.323	1	52.479	-	-	0%	0%	4	168.323	80,00%	78,68%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	1.571.746	32	1.120.611	9	185.411	-	-	0%	0%	32	1.120.611	71,11%	71,30%	Disdikpora
	1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	500	264.929	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	200.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000	2	194.445	1	200.000	-	-	0%	0%	2	194.445	100,00%	97,22%	Disdikpora
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									2,20%	3,48%			28,42%	32,50%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
	1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD**	**Persen**	**100**	**692.585.740**	**195**	**552.590.957**	**95**	**146.916.274**		**1.991.266**	**0%**	**1%**	**195,00**	**554.582.223**	**100%**	**80,07%**	
							Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	**Persen**	**95**		**187,77**		**95**				**0%**		**187,77**		**100%**		
							Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	**Persen**	**90**		**173,74**		**87,5**				**0%**		**173,74**		**100%**		
							Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	**Persen**	**25**		**99,35**		**20**				**0%**		**99,35**		**100%**		
							Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	**Persen**	**99**		**160,66**		**93**				**0%**		**160,66**		**100,00%**		
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	**Persen**	**109,12**		**211,31**		**109,41**				**0%**		**211,31**		**100%**		
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	**Persen**	**100,79**		**187,87**		**100**				**0%**		**187,87**		**100%**		
							Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	**Persen**	**100**		**100,59**		**99**				**0%**		**100,59**		**100,00%**		
	1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persen**	**100**	**392.188.482**		**347.027.750**	**100**	**84.822.122**		**0**				**347.027.750**			**Disdikpora**
	1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	4	5.000.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	47	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	90	17.900.000	81	15.327.654	33	4.800.000	-	-	0%	0%	81	15.327.654	90,00%	85,63%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	6	1.200.000	17	7.866.755	11	200.000	-	-	0%	0%	17	7.866.755	100,00%	655,56%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	1.171.472			-	-	0%	0%	1	1.171.472	20,00%	146,43%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	23	6.209.157	12	200.000	-	-	0%	0%	23	6.209.157	100,00%	620,92%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	7.703.000	102	57.203.045	86	4.400.000	-	-	0%	0%	102	57.203.045	100,00%	742,61%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	200.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	44	10.540.000	81	19.013.913	64	600.000	-	-	0%	0%	81	19.013.913	100,00%	180,40%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	43	4.375.000	4	473.748	1	200.000	-	-	0%	0%	4	473.748	9,30%	10,83%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	40	2.000.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	42	4.100.000	0	-	1	200.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	20	2.000.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	5.765	3.126.750	1160	1.597.196	0		-	-	0%	0%	1.160	1.597.196	20,12%	51,08%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	90	500.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3.500	500.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
						Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidik Sekolah Dasar	Jumlah ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan						1	4.104.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	44	600.000	7	26.435.941	2	104.000	-	-	0%	0%	7	26.435.941	15,91%	4405,99%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	363.495	2.250.000	72949	249.600	250	50.000	-	-	0%	0%	72.949	249.600	20,07%	11,09%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.300	2.150.000	0	-	46	76.628	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	833	4.000.000	276	1.061.993	250	1.915.000	-	-	0%	0%	276	1.061.993	33,13%	26,55%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	394.750	310.754.337	443	66.479.008	373	65.336.364	-	-	0%	0%	443	66.479.008	0,11%	21,39%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	3.690	949.395	74207	133.874.043	70517	2.117.442	-	-	0%	0%	74.207	133.874.043	100,00%	14100,98%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	44	10.540.000	19	9.699.114			-	-	0%	0%	19	9.699.114	43,18%	92,02%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan			80	25.532	80	83.828	-	-	0%	0%	80	25.532	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kegiatan			40	17.932			-	-	0%	0%	40	17.932	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	17.532			-	-	0%	0%	40	17.532	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan			1	17.532	1	97.428	-	-	0%	0%	1	17.532	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.01	43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan			1	17.532	1	141.088	-	-	0%	0%	1	17.532	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	01	02	2		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Unit			1	269.050			-	-	0%	0%	1	269.050	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	01	02	2	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						1	91.417			0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
						Perlengkapan dasar BukuTeks Dan Non teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan dasar buku teks dan non teks yang tersedia						1	104.927			0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
						Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Jumlah Paket perlengkapan yang tersedia																
	1	01	02	2	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																
	1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persen**	**100**	**219.992.365**		**165.034.052**		**45.872.656**		**1.991.266**				**167.025.317**			**Disdikpora**
	1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	5	4.200.000	3	1.579.041			-	-	0%	0%	3	1.579.041	60,00%	37,60%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	12	2.400.000	10	2.189.495	4	1.000.000	-	-	0%	0%	10	2.189.495	83,33%	91,23%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	3	534.853	0		-	-	0%	0%	3	534.853	60,00%	53,49%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	6	1.321.620	0		-	-	0%	0%	6	1.321.620	100,00%	165,20%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	2	1.095.764	0		-	-	0%	0%	2	1.095.764	40,00%	136,97%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	13	12.132.247	1	200.000	-	-	0%	0%	13	12.132.247	100,00%	1516,53%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.800.000	0	-			-		0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	600.000	0	-			-		0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	500	3.800.000	30	16.966.065	28	3.300.000	-	-	0%	0%	30	16.966.065	6,00%	446,48%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	900.000	4	399.428			-		0%	0%	4	399.428	80,00%	44,38%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	27	3.765.000	50	9.170.729	35	200.000	-	-	0%	0%	50	9.170.729	100,00%	243,58%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang telah di rehabilitasi sedang/berat	Ruang	4	400.000	19	1.036.914			-	-	0%	0%	19	1.036.914	100,00%	259,23%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	400.000	1	63.729	0		-	-	0%	0%	1	63.729	25,00%	15,93%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	600.000	4	717.620	0		-	-	0%	0%	4	717.620	80,00%	119,60%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	700.000	4	563.515	4	200.000	-	-	0%	0%	4	563.515	66,67%	80,50%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	4	400.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	300.000	2	199.576			-	-	0%	0%	2	199.576	100,00%	66,53%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	20	400.000	15	1.206.252	0		-	-	0%	0%	15	1.206.252	75,00%	301,56%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3.731	2.828.000	1275	966.762			-	-	0%	0%	1.275	966.762	34,17%	34,19%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	180	1.000.000	68	69.321			-	-	0%	0%	68	69.321	37,78%	6,93%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	322	33.880.002	525	17.007.771	150	5.934.944	35	1.399.266	23%	24%	560	18.407.037	100,00%	54,33%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	185	999.800	84	4.094.270	15	731.050	-	-	0%	0%	84	4.094.270	45,41%	409,51%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	113.495	750.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	1.000.000	0	-	39	78.694	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	375	28.807.000	211	13.897.350	75	5.931.600	19	592.000	25%	10%	230	14.489.350	100,00%	50,30%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	562	3.384.000	126	193.254	110	155.461	-	-	0%	0%	126	193.254	22,42%	5,71%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	532	400.000	1	12.000	1	89.703	-	-	0%	0%	1	12.000	0,19%	3,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	90.955	120.310.989	22840	26.687.137	22.705	26.492.454	-	-	0%	0%	22.840	26.687.137	25,11%	22,18%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.350	967.574	23474	52.559.036	22124	883.605	-	-	0%	0%	23.474	52.559.036	100,00%	5432,04%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	400.000	0	-	0		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	400.000	1	95.825	0		-	-	0%	0%	1	95.825	12,50%	23,96%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	80	800.000	1	214.518	0		-	-	0%	0%	1	214.518	1,25%	26,81%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan			70	11.960	70	79.414	-	-	0%	0%	70	11.960	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kegiatan			40	12.000	0		-	-	0%	0%	40	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	12.000	0		-	-	0%	0%	40	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Kegiatan			1	12.000	1	75.914	-	-	0%	0%	1	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			1	12.000			-	-	0%	0%	1	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	1	2	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							1	76.628	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							1	76.628	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02		Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta didik							1	166.561	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	63	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah							1	200.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persen**	**100**	**65.635.030**		**34.607.359**		**14.025.269**		**-**				**34.607.359**			**Disdikpora**
	1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	24	4.800.000	9	878.511			-	-	0%	0%	9	878.511	37,50%	18,30%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					2	400.000			-	-	0%	0%	2	400.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru					1	199.731			-	-	0%	0%	1	199.731	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					1	196.795			-	-	0%	0%	1	196.795	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	29	6.050.000	16	2.714.962	8	400.000	-	-	0%	0%	16	2.714.962	55,17%	44,88%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	66	6.450.000	5	876.090	0		-	-	0%	0%	5	876.090	7,58%	13,58%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	450.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	40	300.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	28	70.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	26.250	792.000	2	399.784	1	50.000	-	-	0%	0%	2	399.784	0,01%	50,48%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	104.000	4.800.000	24455	667.184	21.000	266.879	-	-	0%	0%	24.455	667.184	23,51%	13,90%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik Dan tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD							1	120.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	84.132	2.475.196	28564	1.232.879	20	3.649.693	-	-	0%	0%	28.564	1.232.879	33,95%	49,81%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik			1	100.000			-	-	0%	0%	1	100.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500	1.192.332	314	1.242.762	100	389.337	-	-	0%	0%	314	1.242.762	62,80%	104,23%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	140	200.000	43	61.790	50	76.628	-	-	0%	0%	43	61.790	30,71%	30,90%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	61.193	36.979.184	33.763	25.534.881	527	8.628.305	-	-	0%	0%	33.763	25.534.881	55,17%	69,05%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	2.208	676.318	99	30.000	250	76.628	-	-	0%	0%	99	30.000	4,48%	4,44%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	80	400.000	16	9.990			-	-	0%	0%	16	9.990	20,00%	2,50%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kegiatan			1	15.500	0		-	-	0%	0%	1	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	15.500	0		-	-	0%	0%	40	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							1	76.628	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	15.500	1	76.628	-	-	0%	0%	40	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.03	29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Kegiatan			1	15.500	1	214.543	-	-	0%	0%	1	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persen**	**100**	**14.769.863**		**5.921.797**		**2.196.228**		**-**				**5.921.797**			**Disdikpora**
	1	1	2	2.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	6	1.800.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	5	500.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	450.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.04	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	750.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	100	90.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	25	250.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	9.816	10.929.863	4227	5.921.797	15	2.119.600	-	-	0%	0%	4.227	5.921.797	43,06%	54,18%	Disdikpora
	1	1	2	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0	-	1	76.628	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,94%	0,65%			36,22%	422,37%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	ST	
	1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal**	**Satuan Pendidikan**	**100**	**3.696.980**	**17**	**-**	**98**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**17**	**-**	**17,00%**	**0,00%**	
							Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	**Satuan Pendidikan**	**499**		**714**		**489**				**0%**		**714**		**143**		
	1	**1**	**3**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Tercapainya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persen**	**100**	**1.500.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			**Disdikpora**
	1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	500	1.500.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	**1**	**3**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persen**	**100**	**2.196.980**		**0**		**-**		**0**				**0**			**Disdikpora**
	1	1	3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	400	1.000.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	400	1.000.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	3	2.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	Buku	5.628	196.980					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan**	**Persen**	**100**	**200.000**	**182**	**15.500**	**100**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**182**	**15.500**	**182,00%**	**7,75%**	
							Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**1718**		**2233**		**1664**				**0%**		**2.233**		**129,98%**		
							Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**4311**		**8800**		**4311**				**0%**		**8.800**		**100,00%**		
							Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**1942**		**3962**		**1942**				**0%**		**3.962**		**100,00%**		
							Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**252**		**293**		**229**				**0%**		**293**		**116,27%**		
	1	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Persen**	**100**	**200.000**		**15.500**		**-**		**-**				**15.500**			**Disdikpora**
	1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	4	200.000	1	15.500			-	-	0%	0%	1	15.500	25,00%	7,75%	Disdikpora
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							25,00%	7,75%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	1	**1**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin**	**Lembaga**	**516**	**1.600.000**	**1021**	**-**	**516**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**1.021**	**-**	**197,87%**	**0,00%**	
	1	**1**	**5**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persen**	**100**	**800.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			**Disdikpora**
	1	1	5	2.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40	400.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40	400.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	**1**	**5**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Terlaksananya Jumlah lembaga izin PAUD Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat**	**Persen**	**100**	**800.000**		**0**		**-**		**0**				**0**			**Disdikpora**
	1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	200.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	200.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	5	2.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2.088	400.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)													0,00%	0,00%	
								Predikat Kinerja													SR	SR	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**20.005.709**		**9.995.870**		**3.314.197**		**-**				**9.995.870**			
	2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**20.005.709**		**9.995.870**		**3.314.197**		**-**				**9.995.870**			
	2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**Persen**	**0,061**	**9.452.481**	**0,079**	**1.665.848**	**0,053**	**453.657**		**-**	**0%**	**0%**	**0,08**	**1.665.848**	**129,51%**	**17,62%**	
							Persentase wirausaha muda	**Persen**	**80**	**-**	**200**	**-**	**80**	**-**		**-**	**0%**		**200**	**-**	**100,00%**		
	2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**7.154.223**	**100**	**1.467.758**		**153.657**		**-**				**1.467.758**			**Disdikpora**
	2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	200	600.000	50	159.085			-	-	0%	0%	50	159.085	25,00%	26,51%	Disdikpora
	2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	201	750.000	50	252.021			-	-	0%	0%	50	252.021	24,88%	33,60%	Disdikpora
	2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	4	1.728.321	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Kader Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	4	1.728.321	50	226.872			-	-	0%	0%	50	226.872	100,00%	13,13%	Disdikpora
	2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	450	2.347.580	90	829.780			-	-	0%	0%	90	829.780	20,00%	35,35%	Disdikpora
	2	19	2	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota							1	67.780	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	19	2	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							1	85.877	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disdikpora
	2	**19**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**2.298.258**	**0**	**198.090**		**300.000**		**-**				**198.090**			**Disdikpora**
	2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	4	400.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	500	1.898.258	41	198.090			-	-	0%	0%	41	198.090	8,20%	10,44%	Disdikpora
	2	19	2	2.02	3	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota							1	300.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			29,68%	19,84%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**Medali**	**40**	**9.373.102**	**35**	**6.658.564**	**30**	**2.160.540**		**-**	**0%**	**0%**	**35**	**6.658.564**	**87,50%**	**71,04%**	
	2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**560.000**	**0**	**-**		**-**		**-**				**-**			**Disdikpora**
	2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	4	330.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	230.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	**19**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1.021.060**	**0**	**1.491.927**		**347.645**		**-**				**1.491.927**			**Disdikpora**
	2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	9	450.000	2	969.703	1	347.645	-	-	0%	0%	2	969.703	22,22%	215,49%	Disdikpora
	2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3	230.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	4	341.060	4	522.224			-	-	0%	0%	4	522.224	100,00%	153,12%	Disdikpora
	2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	**19**	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**		**1.957.613**	**0**	**3.640.000**		**1.337.220**		**-**				**3.640.000**			**Disdikpora**
	2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	orang	3	231.613	0	-	1	437.220	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	112	260.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	433	866.000	702	3.640.000	2	900.000	-	-	0%	0%	702	3.640.000	100,00%	420,32%	Disdikpora
	2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	150	300.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	60	300.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	02:03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																	
	2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persen**		**1.500.000**	**0**	**251.434**		**-**		**-**				**251.434**			**Disdikpora**
	2	19	3	2.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	3	300.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	10	800.000	64	251.434			-	-	0%	0%	64	251.434	100,00%	31,43%	Disdikpora
	2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	200.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.04	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	4	200.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**4.334.430**	**0**	**1.275.203**		**475.675**		**-**				**1.275.203**			**Disdikpora**
	2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	300.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	200.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Unit	4	700.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	5	2.434.430	3	1.275.203			-	-	0%	0%	3	1.275.203	60,00%	52,38%	Disdikpora
	2	19	3	2.05	7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Unit	4	700.000	0	-	1	475.675	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			21,23%	48,49%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan**	**Persen**	**50**	**1.180.126**	**190**	**1.671.458**	**50**	**700.000**		**-**	**0%**	**0%**	**190**	**1.671.458**	**100,00%**	**141,63%**	
	2	**19**	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**		**1.180.126**	**0**	**1.671.458**		**700.000**		**-**				**1.671.458**			
	2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	3	80.000	0	-	1	700.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	850	180.000	120	478.536			-	-	0%	0%	120	478.536	14,12%	265,85%	Disdikpora
	2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	5	210.000	3	1.192.922			-	-	0%	0%	3	1.192.922	60,00%	568,06%	Disdikpora
	2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	315.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	25	180.500	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	850	214.626	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
	1	**2**				**KESEHATAN**				**1.004.389.486**		**618.508.125**		**291.388.141**		**26.247.121**		**9%**		**644.755.246**			
1	**1**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**800.698.354**	**192**	**462.992.826**	**100**	**204.571.792**		**25.916.621**	**0%**	**13%**	**192**	**488.909.447**	**100,00%**	**61,1%**	
	1	**02**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persen**	**100**	**65.752**		**26.032**		**10.000**		**-**				**26.032**			
	1	02	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	16.438	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	16.438	2	26.032	1	10.000	0	-	0%	0%	2	26.032	40,00%	158,4%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	32.876	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**402.183.689**		**240.167.959**		**124.756.491**		**24.560.153**				**264.728.112**			**dinkes**
	1	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	4.937	402.126.156	2.738	240.146.959	1508	124.748.991	297	24.560.153	20%	20%	2.738	264.707.112	55,46%	65,8%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	16.438	3	14.500	2	7.500	0	-	0%	0%	3	14.500	100,00%	88,2%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	41.095	3	4.000			0	-	0%	0%	3	4.000	20,00%	9,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	203	1	penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	0	-	1	2.500			0	-	0%	0%	1	2.500	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**319.380**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	1	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	300	155.000	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	125	164.380	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.934.156**		**1.033.282**		**669.907**		**-**				**1.033.282**			**dinkes**
	1	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	32.876	9	8.322	5	5.742	0	-	0%	0%	9	8.322	45,00%	25,3%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	630.123	5	304.760	5	75.990	0	-	0%	0%	5	304.760	50,00%	48,4%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	821.899	6	96.305	3	90.250	0	-	0%	0%	6	96.305	60,00%	11,7%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2,06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	504.098	5	192.667	13	102.570	0	-	0%	0%	5	192.667	50,00%	38,2%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	27.397	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	1.917.764	7	431.228	2	395.355	0	-	0%	0%	7	431.228	46,67%	22,5%	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.525.230**		**16.615**		**205.658**		**-**				**16.615**			
	1	02	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	780.000	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	800.215	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	500	639.904	12	16.615	15	76.918	0	-	0%	0%	12	16.615	2,40%	2,6%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	362.612	-	-	21	128.740	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	307.500	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	635.000	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**76.303.397**		**41.234.069**		**8.555.760**		**1.356.468**				**42.590.536**			**dinkes**
	1	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	60.000	6	24.500	1	12.000	0	-	0%	0%	6	24.500	60,00%	40,8%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	6.100.000	9	3.429.112	3	1.200.000	0	222.908	0%	19%	9	3.652.020	60,00%	59,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	193.397	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	69.950.000	3	37.780.456	1	7.343.760	0	1.133.560	0%	15%	3	38.914.016	60,00%	55,6%	Dinas Kesehatan
	1	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**4.874.027**		**1.011.464**		**673.977**		**-**				**1.011.464**			**dinkes**
	1	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	175.338	3	44.493	1	63.876	0	-	0%	0%	3	44.493	100,00%	25,4%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	2.465.697	72	682.616	23	358.281	0	-	0%	0%	72	682.616	100,00%	27,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	315	205.641	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	246.570	29	284.355	56	51.820	0	-	0%	0%	29	284.355	58,00%	115,3%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	958.882	-	-	1	200.000	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	821.899	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**1**	**1**	**2,10**		**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD**	**Unit Kerja**		**309.492.722**		**179.503.406**		**69.700.000**		**-**				**179.503.406**			**dinkes**
	1	1	1	**2,10**	1	Pelayanan dan penunjang pelayan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	2	309.492.722	2	179.503.406	2	69.700.000	0	-	0%	0%	2	179.503.406	100,00%	58,0%	Dinas Kesehatan
													Rata-rata capaian kinerja (%)				1,09%	2,98%			32,50%	27,53%	
													Predikat kinerja				SR	SR			SR	SR	
	1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil**	**Persen**	**100**	**198.764.670**	**265,09**	**150.782.207**	**100**	**83.865.193**		**330.500**	**0%**	**0%**	**265,09**	**151.112.707**	**100%**	**76%**	
							Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin	**Persen**	**100**		**269,51**		**100**				**0%**		**269,51**		**100%**		
							Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	**Persen**	**100**		**271,86**		**100**				**0%**		**271,86**		**100%**		
							Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	**Persen**	**100**		**228,85**		**100**				**0%**		**228,85**		**100%**		
							Cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	**Persen**	**100**		**221,28**		**100**				**0%**		**221,28**		**100%**		
							Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**Persen**	**100**		**171,58**		**100**				**0%**		**171,58**		**100%**		
							Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	**Persen**	**100**		**250**		**100**				**0%**		**250**		**100%**		
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	**Persen**	**100**		**146,39**		**100**				**0%**		**146,39**		**100%**		
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	**Persen**	**100**		**300**		**100**				**0%**		**300**		**100%**		
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	**Persen**	**100**		**229,36**		**100**				**0%**		**229,36**		**100%**		
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	**Persen**	**100**		**254,82**		**100**				**0%**		**254,82**		**100%**		
							Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	**Persen**	**100**		**171,34**		**100**				**0%**		**171,34**		**100%**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	**Persen**	**100**		**206**		**90**				**0%**		**206**		**100%**		
							Persentase peningkatan pendapatan BLUD RSUD	**Persen**	**5**		**17**		**5**				**0%**		**17**		**100%**		
							peningkatan pendapatan BLUD Puskesmas	**Persen**	**5**		**40**		**5**				**0%**		**40**		**100%**		
	1	**2**	**2**	**2,01**		**Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota**	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Persen**		**93.427.357**		**64.885.445**		**18.522.800**		**-**				**64.885.445**				**dinkes**
	1	02	02	201	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	11.603.150	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	3	12.434.665	3	3.036.468	1	6.000	0	-	0%	0%	3	3.036.468	100,00%	24,4%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	5	2.631.711	-	-	1	6.000	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	5	1.579.026	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	5	1.579.026	2	3.399.949	1	10.000	0	-	0%	0%	2	3.399.949	40,00%	215,3%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	521.850	6	7.986.184	3	3.129.718	0	-	0%	0%	6	7.986.184	100,00%	1530%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	500.000	119	1.813.375	2	300.000	0	-	0%	0%	119	1.813.375	100,00%	362,7%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Unit	5	1.579.026	-	168.767	2	9.209.913	0	-	0%	0%	-	168.767	0,00%	10,7%	Dinas Kesehatan
		2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas		Unit	7	4.139.893	2	767.155	2	400.000	0	-	0%	0%	2	767.155	28,57%	18,5%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	2.210.637	25	3.692.109	6	1.200.000	0	-	0%	0%	25	3.692.109	100,00%	167,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	5	2.473.808	-	-	1	6.000	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	3.131.736	12	6.049.827			0	-	0%	0%	12	6.049.827	100,00%	193,2%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	14	pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	24	7.153.919	336	21.067.306	70	160.278	0	-	0%	0%	336	21.067.306	100,00%	294,5%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	02	02	201	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	8	1.447.441	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	16	Pengadaan obat dan vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	15	20.720.448	6	6.328.362			0	-	0%	0%	6	6.328.362	40,00%	30,5%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	10	15.143.950	4	4.253.121			0	-	0%	0%	4	4.253.121	40,00%	28,1%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	26	Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumalah Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket			2	5.891.794	8	3.959.961	0	-	0%	0%	2	5.891.794			
	1	2	2	2,01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket			1	208.500	2	34.930	0	-	0%	0%	1	208.500			
	1	2	2	2,01	18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Unit			-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	260	2.491.177	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	850	2.085.894	285	222.528	150	100.000	0	-	0%	0%	285	222.528	33,53%	10,7%	Dinas Kesehatan
	1	**2**	**2**	**2,02**		**Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kab/kita**	**Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**104.193.507**		**85.422.553**		**65.148.525**		**330.500**				**85.753.053**			**dinkes**
	1	02	02	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	68.153	1.768.202	37.897	311.635	14.207	1.402.017	-	-	0%	0%	37.897	311.635	55,61%	17,6%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	65.095	1.933.971	30.430	942.343	13.398	73.051	0	-	0%	0%	30.430	942.343	46,75%	48,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	61.867	1.815.170	19.715	119.708	12.734	158.655	0	-	0%	0%	19.715	119.708	31,87%	6,6%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	202	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	364.371	1.837.825	124.769	884.552	74.995	31.226	-	-	0%	0%	124.769	884.552	34,24%	48,1%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	374.018	1.517.338	209.094	350.535	76.980	846.142	0	-	0%	0%	209.094	350.535	55,90%	23,1%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.864.675	961.460	1.067.855	122.415	383.788	30.720	-	-	0%	0%	1.067.855	122.415	57,27%	12,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 tahun keatas)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	190.869	918.360	104.494	106.033	39.285	528.614	-	-	0%	0%	104.494	106.033	54,75%	11,5%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	559.105	1.201.825	305.791	56.020	115.075	27.675	-	-	0%	0%	305.791	56.020	54,69%	4,7%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	02	02	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24.666	813.373	13.380	1.103.344	5.077	547.765	-	-	0%	0%	13.380	1.103.344	54,24%	135,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4.460	788.784	997	60.816	918	649.020	0	-	0%	0%	997	60.816	22,36%	7,7%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosisi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	70.728	1.217.849	40.398	2.251.771	14.557	2.080.754	-	-	0%	0%	40.398	2.251.771	57,12%	184,9%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	95.448	864.485	32.819	54.020	19.645	32.758	-	-	0%	0%	32.819	54.020	34,38%	6,2%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	5	663.076	-	-	1	4.340	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	5	710.044	1	1.080			0	-	0%	0%	1	1.080	20,00%	0,2%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	703.965	7	12.024.773	2	5.442.266	0	-	0%	0%	7	12.024.773	100,00%	1708,1%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	10	3.113.693	-	-	1	466.040	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	25	1.555.797	12	698.452	1	1.591.750	0	-	0%	0%	12	698.452	48,00%	44,9%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	10	414.422	6	3.366.558	2	1.555.213	0	300.000	0%	19%	6	3.666.558	60,00%	884,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	10	484.045	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	430.999	1	232.494	10	1.826.262	0	-	0%	0%	1	232.494	20,00%	53,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	8707	359.166	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	265	313.303	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	23	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	5	1.038.426	2	353.458			0	-	0%	0%	2	353.458	40,00%	34,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	5	663.076	-	-	1	29.470	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	2.699.898	6	5.021.990	3	1.807.898	0	-	0%	0%	6	5.021.990	60,00%	186,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	56.265.947	3	23.502.668	8	40.526.991	0	-	0%	0%	3	23.502.668	60,00%	41,8%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	02	02	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	6.371	828.845	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	550	2.055.535	14	37.889	1	32.256	0	-	0%	0%	14	37.889	2,55%	1,8%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	29	Penyelenggaraan kab/kota sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5	414.422	1	312.020	1	20.485	0	-	0%	0%	1	312.020	20,00%	75,3%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	20	484.598	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	5	663.547	-	-			0		0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	914.492	3	30.526.451	5	3.618.335	0	-	0%	0%	3	30.526.451	60,00%	3338,1%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten - Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	23	7.595.475	45	1.432.996	23	63.311	0	-	0%	0%	45	1.432.996	100,00%	18,9%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	5	276.282	1	112.220	3	60.651	0	-	0%	0%	1	112.220	20,00%	40,6%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5	2.013.833	3	162.764	2	63.247	0	-	0%	0%	3	162.764	60,00%	8,1%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	38	penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	3	3.891.981	3	1.273.546	1	406.646	1	30.500	100%	8%	3	1.304.046	100,00%	33,5%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen					2	539.779									
	1	2	2	2,02	45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						3	47.058									
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak						1	638.132									
	1	**2**	**2**	**2,03**		**Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara integrasi**	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persen**		**950.409**		**474.209**		**151.193**		**-**				**474.209**			**dinkes**
	1	02	02	203	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	10	193.397	2	45.700				-	0%	0%	2	45.700	20,00%	23,6%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	2	2	2,03	2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	15	287.333	6	428.509	5	151.193	0	-	0%	0%	6	428.509	40,00%	149,1%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	203	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	80	469.679	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**02**	**204**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**	**Persen**	**100**	**193.397**		**-**		**42.674**		**-**				**-**				
	1	02	02	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	3	193.397	-	-	5	42.674										
														Rata-rata capaian kinerja (%)			2,17%	0,58%			37,45%	173,04%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
	1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi**	**Persen**	**100**	**1.292.573**	**190**	**2.735.361**	**100**	**1.283.421**		**-**	**0%**	**0%**	**190**	**2.735.361**	**100,00%**	**211,6%**	
	1	**02**	**03**	**201**		**Pemberian izin praktik tenaga kesehatan diwilayah kabupaten/kota**	**Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**191.776**		**16.580**		**12.115**		**-**				**16.580**			
	1	02	03	201	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	5	191.776	2	16.580	1	12.115	0	-	0%	0%	2	16.580	40,00%	8,6%	Dinas Kesehatan
	1	**2**	**3**	**202**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota**				**233.967**		**210.793**		**178.633**		**-**				**210.793**			**dinkes**
	1	02	03	202	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	233.967	3	210.793	1	178.633	0	-	0%	0%	3	210.793	60,00%	90,1%	Dinas Kesehatan
	1	**2**	**3**	**2,03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**				**866.829**		**2.507.988**		**1.092.672**		**-**				**2.507.988**			**dinkes**
	1	**2**	**3**	**2,03**	**1**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1.100	866.829	457	2.507.988	60	1.092.672	0	-	0%	0%	457	2.507.988	41,55%	289,3%	Dinas Kesehatan
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			47,18%	129,36%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
	1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman**	**Persen**	**100**	**1.628.456**	**214,30**	**418.098**	**100**	**744.979**		**-**	**0%**	**0%**	**214,30**	**418.098**	**100,00%**	**25,7%**	
	1	**02**	**04**	**201**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Dokumen**		**246.570**		**75.295**		**159.618**		**-**				**75.295**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	02	04	201	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	246.570	4	72.535	2	159.618	0	-	0%	0%	4	72.535	80,00%	29,4%	Dinas Kesehatan
	1	02	04	201	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Sarana			12	2.760			0	-	0%	0%	12	2.760	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**202**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Dokumen**	**5**	**191.776**		**-**		**18.497**		**-**				**-**			
	1	02	04	202	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	5	191.776	-	-	2	18.497	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**2**	**4**	**2,03**		**Penerbitann Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga**				**178.078**		**342.803**		**276.734**		**-**				**342.803**			**dinkes**
	1	02	04	203	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	5	178.078	1	338.813	2	276.734	0	-	0%	0%	1	338.813	20,00%	190,3%	Dinas Kesehatan
	1	2	4	2,03	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Unit			12	3.990			0	-	0%	0%	12	3.990	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**204**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Dokumen**	**5**	**559.987**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	02	04	2,04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	5	559.987	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**205**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Dokumen**	**5**	**95.888**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	1	02	04	205	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	5	95.888	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**206**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Unit**		**356.156**		**-**		**290.131**		**-**				**-**			**dinkes**
	1	02	04	206	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	204	356.156	-	-	30	290.131	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	04	206	02	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga		Dokumen			-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
													Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00%	0,00%			16,67%	36,61%	
													Predikat kinerja				SR	SR			SR	SR	
	1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)**	**Persen**	**100**	**2.005.433**	**288**	**1.579.634**	**100**	**922.756**		**-**	**0%**	**0%**	**288**	**1.579.634**	**100,00%**	**78,8%**	
	1	**2**	**5**	**2,01**		**Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaaten/kota**	**Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dokumen**		**41.095**		**798.754**		**922.756**		**-**				**798.754**			
	1	2	5	2,01	1	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	10	41.095	6	798.754	2	922.756	0	-	0%	0%	6	798.754	60,00%	1943,7%	Dinas Kesehatan
	1	**2**	**5**	**2,02**		**Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tinkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dokumen**		**1.452.021**		**780.880**		**-**		**-**				**780.880**			
	1	2	5	2,02	1	Penyelengaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	10	1.452.021	1	780.880			0	-	0%	0%	1	780.880	10,00%	53,8%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	**02**	**05**	**203**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen	**5**	**512.317**		**-**		**-**		**-**				**-**				
	1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5	512.317	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			23,33%	665,82%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	ST	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**0,65%**	**0,71%**			**31,43%**	**206,47%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**ST**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**541.936.529**		**439.491.168**		**125.838.970**		**14.021.416**				**453.512.584**			
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**541.936.529**		**439.491.168**		**125.838.970**		**14.021.416**				**453.512.584**			
	1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**88.173.829**	**200**	**51.932.499**	**100%**	**19.192.855**		**3.799.972**	**0,00%**	**19,80%**	**200**	**55.732.472**	**100,00%**	**63,21%**	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**		**200**		**100%**				**0,00%**		**200**		**100,00%**		
	1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**104.759**		**44.830**		**29.963**		**-**				**44.830**			
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.000	2	11.034	1	8.243	-	-	0,00%	0,00%	2	11.034	50,00%	110,34%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.01	06	Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	84.759	3	28.478	1	16.070	-	-	0,00%	0,00%	3	28.478	60,00%	33,60%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Laporan	4	10.000	2	5.318	1	5.650	-	-	0,00%	0,00%	2	5.318	50,00%	53,18%	Dinas PUPR
	1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**33.202.077**		**21.514.106**		**9.211.238**		**1.678.153**				**23.192.260**			
	1	03	01	2.02	01	Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	6.356,00	33.182.077	41	21.498.160	13	9.199.938	3,00	1.678.153	23,08%	18,24%	44	23.176.313	0,69%	69,85%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan	1	10.000	2	7.973	1	5.650	-	-	0,00%	0,00%	2	7.973	100,00%	79,73%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Jumlah laporan bulanan dan laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Laporan	1	10.000	2	7.973	1	5.650	-	-	0,00%	0,00%	2	7.973	100,00%	79,73%	Dinas PUPR
	1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**245.000**		**102.650**		**50.000**		**-**				**102.650**			
	1	03	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	300	50.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	195.000	22	102.650	10	50.000	-	-	0,00%	0,00%	22	102.650	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**9.717.940**		**5.549.234**		**1.738.004**		**244.906**				**5.794.140**			
	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	25	223.760	12	87.068	5	22.341	-	-	0,00%	0,00%	12	87.068	48,00%	38,91%	Dinas PUPR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25	558.242	12	385.880	5	136.423	1,20	26.048	24,00%	19,09%	13	411.928	52,80%	73,79%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	15	4.549.107	8	2.576.826	3	726.366	0,70	170.653	23,33%	23,49%	9	2.747.479	61,33%	60,40%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	14	404.500	12	168.817	3	53.500	0,70	8.244,00	23,33%	15,41%	13	177.061	90,71%	43,77%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Examplasr	6.665	65.992	9	28.755	3	14.999	0,70	3.443	23,33%	22,95%	9	32.198	0,14%	48,79%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Org/Hari	10.835	3.916.339	900	2.301.888	300	784.375	76	36.519	25,33%	4,66%	976	2.338.407	9,01%	59,71%	Dinas PUPR
	1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**9.556.000**		**2.207.318**		**29.898**		**-**				**2.207.318**			
	1	03	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	unit	1	800.000	1	529.900		-	-	-	0,00%	0,00%	1	529.900	100,00%	66,24%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	21	3.650.000	3	1.314.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	1.314.300	14,29%	36,01%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	unit	1	4.500.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	Unit	61	256.000	15	158.697	-		-	-	0,00%	0,00%	15	158.697	24,59%	61,99%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	5	100.000	18	204.421	9	29.898	-	-	0,00%	0,00%	18	204.421	360,00%	204,42%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	14	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**19.557.477**		**13.485.952**		**4.418.406**		**737.079**				**14.223.031**			
	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	6.500	65.000	36	43.350	12	13.000	3,00	3.000	25,00%	23,08%	39	46.350	0,60%	71,31%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	10	1.004.977	6	505.119	2	240.206	0,50	38.479	25,00%	16,02%	7	543.598	65,00%	54,09%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	18.487.500	37	12.937.483	13	4.165.200	3,20	695.600	24,62%	16,70%	40	13.633.083	67,00%	73,74%	Dinas PUPR
	1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**15.790.577**		**9.028.409**		**3.715.346**		**1.139.834**				**10.168.243**			
	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	5	193.382	3	127.718	1	54.820	0	5.310	15,00%	9,69%	3	133.028	63,00%	68,79%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	295	14.203.195	177	8.315.858	59	3.366.726	21	1.119.124	35,59%	33,24%	198	9.434.982	67,12%	66,43%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	22	394.000	65	219.010	9	93.800	2	15.400	24,44%	16,42%	67	234.410	100,00%	59,49%	Dinas PUPR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	5	1.000.000	3	365.823	1	200.000	-	-	0,00%	0,00%	3	365.823	60,00%	36,58%	Dinas PUPR
								Rata-rata capaian kinerja (%)									13,91%	10,43%			57,20%	57,44%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	R	
	1	**03**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**Persen**	**78,59**	**62.164.200**	**161**	**41.316.022**	**75,85%**	**14.957.968**		**117.986**	**0,00%**	**0,79%**	**161**	**41.434.008**	**100,00%**	**66,65%**	
							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	**Persen**	**76,80**		**120**		**76,50%**				**0,00%**		**120**		**100,00%**		
	1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**39.150.000**		**37.455.030**		**13.664.720**		**-**				**37.455.030**			
	1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Yang Disusun	Dokumen	5	450.000	4	494.135	1	800.000	-	-	0,00%	0,00%	4	494.135	80,00%	109,81%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengamanan Pantai Yang Disusun	Dokumen	8	800.000	7	596.806	2	100.000	-	-	0,00%	0,00%	7	596.806	87,50%	74,60%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	Unit	4	14.800.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing	Terpeliharanya Pembangunan Tanggul Sungai	Meter	950	8.500.000	400	10.809.234	200	5.284.670	-	-	0,00%	0,00%	400,22	10.809.234	42,13%	127,17%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Direhabilitasi	unit	4	2.000.000	1	326.257		-	-	-	0,00%	0,00%	1	326.257	25,00%	16,31%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Direhabilitasi	Unit	4	2.000.000	2	388.734	1	100.050	-	-	0,00%	0,00%	2	388.734	50,00%	19,44%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Direhabilitasi	Meter	400,0	2.400.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Ditingkatkan	Meter	400,0	2.000.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	45	Revitalisasi Danau	Terpeliharanya Revitalisasi Danau	Unit	16	800.000	1	199.756	1	500.000	-	-	0,00%	0,00%	1	199.756	6,25%	24,97%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpeliharanya Normalisasi/Restorasi Sungai	Meter	52.500	4.200.000	57.238	24.591.398	100	6.780.000	-	-	0,00%	0,00%	57.238	24.591.398	100,00%	585,51%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	16	800.000	-	-	1,0	100.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	4	400.000	31	48.710			-	-	0,00%	0,00%	31	48.710	100,00%	12,18%	Dinas PUPR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**23.014.200**		**3.860.992**		**1.293.248**		**117.986**				**3.978.978**			
	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terpeliharanya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	7	1.400.000	3	421.239			-	-	0,00%	0,00%	3	421.239	42,86%	30,09%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Cakupan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan	Ha	200	3.000.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.02	14	Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Ha	1.233	14.800.000	40	1.693.700	2	650.000	-	-	0,00%	0,00%	40	1.693.700	3,24%	11,44%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Ha	2.644	3.814.200	39	1.746.053	1	600.000	0,28	117.986	28,00%	19,66%	39	1.864.039	1,49%	48,87%	Dinas PUPR
	1	03	02	2.02	30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga			-	-	10	43.248	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
														Rata-rata capaian kinerja (%)			2,80%	1,97%			33,65%	66,27%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	S	
	1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**13.348.500**	**300**	**20.639.774**	**100%**	**15.100.000**		**96.891**	**0,00%**	**0,64%**	**300**	**20.736.665**	**100,00%**	**155,35%**	
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**13.348.500**		**20.639.774**		**15.100.000**		**96.891**				**20.736.665**			
	1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	5	1.000.000	1	194.250			-	-	0,00%	0,00%	1	194.250	20,00%	19,43%	Dinas PUPR
	1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan	Tersedianya Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan	Meter	7.000	9.748.500	5.755	19.545.697	100	14.600.000	-	-	0,00%	0,00%	5.755	19.545.697	82,21%	200,50%	Dinas PUPR
	1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Direhabilitasi	Meter	2.000	1.600.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tersedianya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Meter	500	1.000.000	300	899.827	100	500.000	21	96.891	21,00%	19,38%	321	996.718	64,20%	99,67%	Dinas PUPR
														Rata-rata capaian kinerja (%)			10,50%	9,69%			41,60%	79,90%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat pemantapan jalan Kabupaten**	**Persen**	**63,43**	**357.470.000**	**115**	**323.234.352**	**61,44%**	**75.472.683**		**9.983.531**	**0,00%**	**13,23%**	**115**	**333.217.884**	**100,00%**	**93,22%**	
	1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**357.470.000**		**323.234.352**		**75.472.683**		**9.983.531**				**333.217.884**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya DokumenPenyusunan Rencana, Kebijakan , dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	dokumen	47	4.700.000	25	2.583.605	10	250.000	-	-	0,00%	0,00%	25	2.583.605	53,19%	54,97%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	04	Surfey kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Surfey kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen	10	4.600.000	5	1.470.525	2	450.000	-	-	0,00%	0,00%	5	1.470.525	50,00%	31,97%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tersedianya Pembangunan Jalan	Km	100	15.000.000	37	4.295.400	20,00	450.000	-	-	0,00%	0,00%	37	4.295.400	37,00%	28,64%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Km	1	10.000.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Rekonstruksi Jalan	Km	50	150.000.000	24	118.429.191	10,00	30.181.224	2,30	7.150.874	23,00%	23,69%	26	125.580.065	51,86%	83,72%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tersedianya Rehabilitasi Jalan	Km	150	30.000.000	170	72.298.873	30	20.700.000	-	-	0,00%	0,00%	170	72.298.873	100,00%	241,00%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	20	35.000.000	11	17.765.396		6.384.000	-	-	0,00%	0,00%	11	17.765.396	56,00%	50,76%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	2.000	40.800.000	858	36.626.553	400	9.076.000	140	2.103.732	35,00%	23,18%	998	38.730.284	49,90%	94,93%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pembangunan Jembatan	Meter	332	44.820.000	394	63.869.092	75	5.790.000	-	-	0,00%	0,00%	394	63.869.092	100,00%	142,50%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi Jembatan	unit	9	1.800.000	33	498.859	1	200.000	-	-	0,00%	0,00%	33	498.859	100,00%	27,71%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jembatan	unit	5	2.500.000	49	1.398.235	24	500.000	16	307.987	66,67%	61,60%	65	1.706.222	100,00%	68,25%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	unit	24	9.000.000	6	1.196.425			-	-	0,00%	0,00%	6	1.196.425	25,00%	13,29%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan Yang Terehabilitasi/ Terkonstruksi akibat Bencana	Kegiatan	4	4.000.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Kali	25	250.000	1	28.381	1,00	49.975	-	-	0,00%	0,00%	1	28.381	4,00%	11,35%	Dinas PUPR
	1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan	Tersedianya Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan	Dokumen	50	5.000.000	40	2.773.819	10	1.441.484	3	420.939	33,00%	29,20%	43	3.194.758	86,60%	63,90%	Dinas PUPR
														Rata-rata capaian kinerja (%)			13,14%	11,47%			54,24%	60,87%	
														Predikat kinerja			SR	SR			R	R	
	1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Persen**	**91**	**7.810.000**	**77,21**	**1.153.112**	**80**	**475.495**		**18.310**	**0,00%**	**3,85%**	**77,21**	**1.171.422**	**84,85%**	**15,00%**	
	1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				**3.745.000**		**905.934**		**283.380**		**-**				**905.934**			
	1	03	11	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau analis	Jumlah Dokumen Sertifikasi Tenaga Kerjai						1	73.316	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Kali	4	600.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/ yang di ikuti	Orang	4	600.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Pelatihan Tenaga Konstruksi yang di susun	dokumen	4	120.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	Tahun	5	825.000	2	354.803			-	-	0,00%	0,00%	2	354.803	40,00%	43,01%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah MOU bidang jasa konstruksi	Laporan	4	200.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tahun	4	600.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tahun	4	400.000	41	280.557	40	66.464	-	-	0,00%	0,00%	41	280.557	100,00%	70,14%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan	4	400.000	1	35.210			-	-	0,00%	0,00%	1	35.210	25,00%	8,80%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.01	08	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi				75	235.364	75	143.600	-	-	0,00%	0,00%	75	235.364	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi**			**2.965.000**		**197.178**		**50.000**		**-**				**197.178**			
	1	03	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jasa						1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tahun	4	400.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Jasa Konstruksi	Unit	5	150.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kegiatan	2	40.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Dokumen	5	225.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Resiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	5	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	5	250.000	1	50.000			-	-	0,00%	0,00%	1	50.000	20,00%	20,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	JUmlah Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	5	650.000	1	47.300			-	-	0,00%	0,00%	1	47.300	20,00%	7,28%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.02	13	Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Dokumen			1	99.878	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	1	99.878	0,00%	0,00%	Dinas PUPR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**			**250.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Laporan	5	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**			**850.000**		**50.000**		**142.115**		**18.310**				**68.310**			
	1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP Jasa Konstruksi Yang Disusun	Dokumen	5	250.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis Tertib Usaha, Tertib Penyelengaaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Diikuti	Kali	4	400.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Penyelenggaraan						1	49.975	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.04	05	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Pemanfaatan Produk						1	46.070	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.04	07	Penawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha Jasa Konstruksi						1	46.070	-	18.310	0,00%	39,74%	-	18.310	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha, Tertib Penyelengaaraan, dan Tertib Pemanfaatan yang diawasi	Dokumen	4	200.000	1	50.000			-	-	0,00%	0,00%	1	50.000	25,00%	25,00%	Dinas PUPR
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	4,97%			10,00%	7,58%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW**	**Persen**	**80,26**	**12.970.000**	**176,03**	**1.215.408**	**77,93**	**639.969**		**4.725**	**0,00%**	**0,74%**	**176**	**1.220.133**	**100,00%**	**9,41%**	
							Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	**Ada/Tidak Ada**	**Ada**		**Ada**		**Ada**				**0,00%**		**Ada**		**100,00%**		
							Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Ada/Tidak Ada**	**Ada**		**Tidak Ada**		**Ada**				**0,00%**		**Tidak Ada**		**0,00%**		
	1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**			**11.200.000**		**544.639**		**357.587**		**-**				**544.639**			
	1	03	12	2.01	05	Pelaksanaan Peretujuan Subtansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Subtansi RTRW Kabupaten yang di Revisi						1	96.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.01	06	Pelaksanaan Peretujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Subtansi RDTR Kabupaten yang di Revisi						1	96.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten yang di Revisi	Dokumen	1	1.000.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR/RDTR Yang Disusun	Dokumen	9	9.000.000	3	542.375			-	-	0,00%	0,00%	3	542.375	33,33%	6,03%	Dinas PUPR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang ditetapkan	Dokumen	5	500.000	1	2.264	1	110.487	-	-	0,00%	0,00%	1	2.264	20,00%	0,45%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Kali	14	700.000	-	-	3	55.100	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana**			**900.000**		**378.072**		**110.000**		**-**				**378.072**			
	1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Revisi Penyusunan RTRW Kabupaten	Kali	4	200.000	1	25.358			-	-	0,00%	0,00%	1	25.358	25,00%	12,68%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Kali	9	450.000	2	263.541			-	-	0,00%	0,00%	2	263.541	22,22%	58,56%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Penataan Ruang	Kali	5	250.000	2	89.173	1	110.000	-	-	0,00%	0,00%	2	89.173	40,00%	35,67%	Dinas PUPR
	1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkrinisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**530.000**		**167.849**		**50.000**		**4.725**				**172.574**			
	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kali	5	250.000	2	136.984		-	-	-	0,00%	0,00%	2	136.984	40,00%	54,79%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	Unit	8	280.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.03	05	Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang	Jumlah Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang	Dokumen			1	30.865	1	50.000	0	4.725	23,00%	9,45%	1	35.590	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**340.000**		**124.848**		**122.382**		**-**				**124.848**			
	1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Operasional bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang disediakan	Tahun	3	90.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Penataan Rung pada Forum Penataan Ruang Daerah	Kali	5	250.000	2	124.848	1	122.382	-	-	0,00%	0,00%	2	124.848	47,40%	49,94%	Dinas PUPR
																	3,29%	1,35%			20,72%	19,83%	
																	SR	SR			SR	SR	
																	7,27%	**6,65%**			**36,24%**	**48,65%**	
																	SR	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				392.778.208		195.964.188		103.280.314		2.927.311				198.891.500			Dinas PKP
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				199.499.145		83.623.280		24.680.205		-				83.623.280			Dinas PKP
1	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku Yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	5	5.097.342	1	258.416	1	400.000		-	0%	0%	1	258.416	20%	5%	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Intake Air Baku Yang Terbangun dan Terpelihara	Unit	3	5.097.342		258.416		400.000		-				258.416			
	1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Dibangun	KM	3	3.097.342					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	02	2.01	23	Reheabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Drehabilitasi	Unit	5	2.000.000	1	258.416	1	400.000	0	-	0%	0%	1	258.416	20%	13%	Dinas PKP
													Rata-rata capian kinerja (%)				0,00%	0,00%			10,00%	6,46%	
													Predikat kinerja				SR	SR			SR	SR	
1	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	78,98	59.652.400	80,64	15.160.463	74,00	10.514.271		-	-	-	80,64	15.160.463	100%	25%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	SR	3664	59.652.400		15.160.463		10.514.271		-				15.160.463			Dinas PKP
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun	SR	112	4.124.000			671	340.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	40	9.780.000			2	850.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP
						Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	4	300.000			1	50.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	10	4.858.000			5	2.369.904	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan Dipelihara	Unit	32	3.300.000			16	1.630.614	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimallisasi	Unit	32	900.000			1	200.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasikan	Unit	32	500.000			56	5.073.753	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	SR	100	7.650.000					0	-	0	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani Melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis Masyarakat	SR	280	4.200.000	627	1.817.013	0	-	-	-	0%	0%	627	1.817.013	100%	43%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	03	2,01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	100	4.450.000					0	-			-	-	100%	0%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan IPA SPAM Perdesaan yang ditingkatkan	SR	1.175	5.875.000	235	198.396			0	-	0%	0%	235	198.396	20%	3%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	1.215	6.075.000	216	9.226.206			0	-	0%	0%	216	9.226.206	18%	152%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diperbaiki	Kegiatan	18	1.800.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	Kegiatan	30	750.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	Kegiatan	30	750.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah SDM pengelolaan SPAM yang dikembangkan	Kegiatan	5	250.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Dokumen					0	-									
	1	03	03	2,01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Mendapatkan operasi dan Pemeliharaan	Unit	80	7.872.400	25	2.821.899			-	-	0%	0%	25	2.821.899	31%	36%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan perdesaan yang dibangun	SR	243	12.150.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diadakan Perluasan	SR	738	6.930.000	199	1.096.949	0		0	-	0%	0%	199	1.096.949	27%	16%	Dinas PKP
	1	03	03	2,01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM perpipaan di kawasan perkotaan yang diperbaiki	Kegiatan	10	900.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
														Rata-rata capian kinerja (%)			0,00%	0,00%			22,77%	19,25%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara**	**Unit**	**4**	**6.150.000**	**1**	**-**	**1**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**1**	**-**	**25%**	**0%**	
	1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota**	**Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara**	**Unit**	**4**	**6.150.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	2	5.000.000						-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit	2	1.150.000						-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
														Rata-rata capian kinerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
	1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak**	**Persen**	**96,32**	**91.149.403**	**90,64**	**6.180.903**	**91,3**	**1.169.263**		**-**	**0%**	**0%**	**90,64**	**6.180.903**	**100%**	**7%**	**Dinas PKP**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak**	**SR**	**3.996**	**91.149.403**		**6.180.903**		**1.169.263**		**-**				**6.180.903**			**Dinas PKP**
	1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	500.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala kota yang dibangun dan disediakan	SR	80	52.800.000	19	5.070.550			0	-	0%	0%	19	5.070.550	24%	10%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota yang direhabilitasi dan ditingkatkan	SR	14	1.500.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	3.750	30.000.000	845	994.505	0		0	-	0%	0%	845	994.505	23%	3%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	25	500.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan SPALD yang disosialisasikan	Kegiatan	100	250.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	9	2.100.000	4	115.848	0		0	-	0%	0%	4	115.848	44%	6%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang dibangun	Unit	10	600.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkatan Sumur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Sumur Tinja	Unit	2	1.178.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang dibangun dan disediakan	Unit	5	1.721.403					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	Unit	5	2.500.000			1	500.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	1.080.000			1	189.263	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	05	2.01	039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	10	1.080.000			10	480.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
														Rata-rata capian kinerja (%)			0,00%	0,00%			9,07%	1,84%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik**	**Persen**	**75**	**14.300.000**	**74,61**	**13.976.355**		**-**		**-**	**0%**	**0%**	**75**	**13.976.355**	**99%**	**98%**	
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Yang dilaksanakan**	**Meter**	**4844**	**14.300.000**		**13.976.355**		**-**		**-**				**13.976.355**			
	1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	4	200.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	3.140	13.345.000	36	13.976.355			-	-	0%	0%	36	13.976.355	1%	105%	Dinas PKP
	1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	1.700	255.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	1	500.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
														Rata-rata capian Kinerja (%)							0,29%	26,18%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik**	**Persen**	**78,81**	**23.150.000**	**186,52**	**48.047.144**	**76,89**	**12.596.671**		**-**	**0%**	**0%**	**187**	**48.047.144**	**100%**	**208%**	
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Unit**	**22**	**23.150.000**		**48.047.144**		**12.596.671**		**-**				**48.047.144**			**Dinas PKP**
	1	03	08	2.01	01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Dokumen	401	573.000	2	142.121	0	-	0	-	0%	0%	2	142.121	0%	25%	Dinas PKP
						Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung					0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	3.450.000	4	38.280.509	31	12.432.881	0	-	0%	0%	4	38.280.509	100%	1110%	Dinas PKP
	1	03	08	2,01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Peyelenggaraan	Orang	8	350.000			5	83.690	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	7	350.000			4	80.100	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20	760.000	4	9.612.264			0	-	0%	0%	4	9.612.264	20%	1265%	Dinas PKP
							Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangung	Unit	10	7.761.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	4	150.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan Sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	2	800.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	08	2.01	09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan	Unit	515	500.000	1	12.250			0	-	0%	0%	1	12.250	0%	2%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Unit	280	280.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	11	4.166.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	11	4.010.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
								Rata-rata capian kinerja (%)									0,00%	0,00%			13,41%	266,84%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	ST	
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**193.279.064**		**112.340.908**		**78.600.109**		**2.927.311**				**115.268.219**			**Dinas PKP**
	1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Persen**	**100**	**110.031.333**		**39.183.049**	**100**	**21.171.822**		**2.927.311**	**0%**	**14%**	**-**	**42.110.361**	**0%**	**38%**	
	1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**50.000**		**24.507**		**7.784**		**-**				**24.507**			**Dinas PKP**
	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	25.000	4	7.005	2	4.982	0	-	0%	0%	4	7.005	40%	28%	Dinas PKP
	1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	25.000	2	17.502	1	2.802	0	-	0%	0%	2	17.502	40%	70%	Dinas PKP
	1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**22.967.390**		**9.904.733**		**6.625.841**		**1.198.961**				**11.103.694**			**Dinas PKP**
	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	70	22.829.390	26	9.897.698	14	6.619.899	3	1.198.961	18%	18%	29	11.096.659	41%	49%	Dinas PKP
	1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	78.000	1	3.436	1	2.901	0	-	0%	0%	1	3.436	20%	4%	Dinas PKP
	1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	60.000	1	3.599	1	3.041	0	-	0%	0%	1	3.599	20%	6%	Dinas PKP
	1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**590.200**		**75.016**		**195.000**		**-**				**75.016**			
	1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130	65.000	65	75.016	1	145.000	0	-	0%	0%	65	75.016	50%	115%	Dinas PKP
	1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	525.200			6	50.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**23.418.947**		**5.287.111**		**1.842.505**		**-**				**5.287.111**			**Dinas PKP**
	1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	30.000	5	13.600	5	6.000	0	-	0%	0%	5	13.600	20%	45%	Dinas PKP
	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	875.078	10	358.144	1	90.533	0	-	0%	0%	10	358.144	40%	41%	Dinas PKP
	1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	20.329.456	2	3.674.548	2	1.255.504	0	-	0%	0%	2	3.674.548	21%	18%	Dinas PKP
	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Paket	35	106.038	14	124.180	7	34.927	-	-	0%	0%	14	124.180	40%	117%	Dinas PKP
	1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	30.000	0	-	2	2.925	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.635	2.048.375	1050	1.116.639	527	452.616	0	-	0%	0%	1.050	1.116.639	40%	55%	Dinas PKP
	1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**60**	**9.727.192**		**1.406.305**		**904.840**		**-**				**1.406.305**			**Dinas PKP**
	1	04	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Unit	3	720.000	1	466.600		-	0	-	0%	0%	1	466.600	33%	65%	Dinas PKP
	1	04	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	Unit	4	5.140.000	1	230.000	1	270.000	0	-	0%	0%	1	230.000	25%	4%	Dinas PKP
	1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	975.000	1	54.600	41	195.234	0	-	0%	0%	1	54.600	20%	6%	Dinas PKP
	1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	192.192	23	456.555	50	439.606	0	-	0%	0%	23	456.555	70%	42%	Dinas PKP
	1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	2.100.000	3	198.550	0	-	0	-	0%	0%	3	198.550	21%	9%	Dinas PKP
	1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	600.000	0	-	0	-	0	-			-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**48.669.840**		**20.231.606**		**10.392.591**		**1.728.350**				**21.959.957**			**Dinas PKP**
	1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.551	11.350	1.576	15.000	866	5.300	0	-	0%	0%	1.576	15.000	44%	132%	Dinas PKP
	1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	15	9.080.945	6	4.576.454	3	2.767.591	1	529.400	19%	19%	7	5.105.855	44%	56%	Dinas PKP
	1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	15	136.694	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	2.045	39.440.851	850	15.640.152	424	7.619.700	66,71585	1.198.950	16%	16%	917	16.839.102	45%	43%	Dinas PKP
	1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**4.607.765**		**2.253.771**		**1.203.262**		**-**				**2.253.771**			**Dinas PKP**
	1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	1.062.912	6	207.498	4	47.896	0	-	0%	0%	6	207.498	30%	20%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	3.093.353	24	1.882.454	12	921.299	0	-	0%	0%	24	1.882.454	40%	61%	Dinas PKP
	1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	206	51.500	41	163.818	50	134.067	0	-	0%	0%	41	163.818	20%	318%	Dinas PKP
	1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	400.000	0	0	1	100.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
								Rata-rata capian kinerja (%)									2,30%	2,30%			28,31%	48,31%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah**	**Unit**	**55**	**3.235.000**	**18**	**210.988**	**13**	**820.000**		**-**	**0%**	**0%**	**18**	**210.988**	**33%**	**7%**	**Dinas PKP**
	1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah yang Didata**	**Unit**	**20**	**725.000**		**44.884**		**140.000**		**-**				**44.884**			
	1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah rumah korban bencana pada kejadian sebelumnya yang belum ditangani untuk didataTertangani	Laporan	5	300.000	1	17.299	1	40.000	0	-	0%	0%	1	17.299	20%	6%	Dinas PKP
	1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah kerusakan rumah akibat bencana yang didata	Laporan	5	75.000	0	-	1	30.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten yang didata	Laporan	5	250.000	1	27.585			0	-	0%	0%	1	27.585	20%	11%	Dinas PKP
	1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa yang didata	Laporan	5	100.000	0	-	1	40.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	02	2.01	010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terverifikasi	Dokumen	2	45.000			1	30.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sosialisasi Persiapan Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah**	**Kegiatan**		**350.000**		**43.128**		**40.000**		**-**				**43.128**			
	1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	300	150.000	59	26.938	40	40.000	0	-	0%	0%	59	26.938	20%	18%	Dinas PKP
	1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Orang	200	100.000	0	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	02	2.02	06	Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi penyediaan unit dan pelayanan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	100.000	101	16.190	0		0	-	0%	0%	101	16.190	100%	16%	Dinas PKP
	1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah**	**Unit**		**2.060.000**		**92.976**		**620.000**		**-**				**92.976**			
	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	52	546.000			5	100.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	39	858.000	4	92.976	4	320.000	0	-	0%	0%	4	92.976	10%	11%	Dinas PKP
	1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	10	256.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliaraan	Unit Rumah	25	400.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2	152.000			2	200.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	**04**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah**			**100.000**		**30.000**		**20.000**		**-**				**30.000**			**Dinas PKP**
	1	04	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5	100.000	1	30.000	1	20.000	0	-	0%	0%	1	30.000	20%	30%	Dinas PKP
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan			1	8.765	0		0	-	0%	0%	1	8.765	0%	0%	Dinas PKP
														Rata-rata capian kinerja (%)			0,00%	0,00%			13,57%	6,56%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau**	**Persen**	**74,99**	**1.980.000**	**133,44**	**340.458**	**73,52**	**240.000**		**-**	**0%**	**0%**	**133,44**	**340.458**	**100%**	**17%**	**Dinas PKP**
	1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman yang Disediakan**	**Dokumen**		**1.000.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	1	04	03	2.01		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview atau Terlegalisasi	Dokumen	1	1.000.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat**			**200.000**		**125.812**		**-**		**-**				**125.812**			**Dinas PKP**
	1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	50.000	1	125.812			0	-	0%	0%	1	125.812	100%	40%	Dinas PKP
	1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	3	150.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditingkatkan**	**Hektar**	**34**	**780.000**		**214.646**		**240.000**		**-**				**214.646**			
	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	26	260.000	1	9.558	6	240.000	0	-	0%	0%	1	9.558	4%	4%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Hektar	1	200.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	4	20.000	2	19.100	0		0	-	0%	0%	2	19.100	50%	96%	Dinas PKP
	1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	5	300.000	1	185.988	0		0	-	0%	0%	1	185.988	20%	62%	Dinas PKP
								Rata-rata capian kinerja (%)									0,00%	0,00%			24,84%	28,70%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani**	**Hektar**	**6,66**	**3.000.000**	**6,932**	**10.172.400**	**1,14**	**536.287**		**-**	**0%**	**0%**	**7**	**10.172.400**	**20%**	**29%**	
	1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan Dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani**	**Persen**	**150**	**3.000.000**		**10.172.400**		**536.287**		**-**				**10.172.400**			
	1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Humi Untuk Pencegahan Terrhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	150	3.000.000	36	10.172.400	13	136.287	0	-	0%	0%	36	10.172.400	24%	339%	Dinas PKP
						Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan			1	68.766			0	-	0%	0%	1	68.766	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	10	880.000			5	400.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			24,00%	339,08%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	ST	
	1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**Persen**	**62**	**73.282.730**	**132,56**	**62.434.013**		**55.832.000**		**-**	**0%**	**0,00%**	**133**	**62.434.013**	**100%**	**85%**	**Dinas PKP**
	1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**Kegiatan**	**38.182**	**73.282.730**		**62.434.013**		**55.832.000**		**-**				**62.434.013**			**Dinas PKP**
	1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	5	500.000	1	76.129	0		0	-	0%	0%	1	76.129	20%	15%	Dinas PKP
							Jumlah Dokumen Perencanaan dan Supervisi PSU yang Disiapkan	Dokumen	21	1.100.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	17	25.904.000	273	62.357.884	294	55.832.000	-	-	0%	0,00%	273	62.357.884	100%	241%	Dinas PKP
							Jumlah Ruang Terbuka Hijau untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Ditata	Hektar	36	13.255.930					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
							Jumlah Pagar Pemakaman yang Dibangun	Meter	16.700	14.227.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
							Jumlah Pembangunan dan Rehebilitasi Drainase untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Dibangun	Meter	30.622	18.295.800					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
																	0,00%	0,00%			20,00%	42,66%	
																	SR	SR			SR	SR	
	2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**1.750.000**		**-**	**100**	**-**		**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**1.750.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	125	250.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan dan disingkronisasikan	Dokumen	30	1.500.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
																					0,00%	0,00%	
																					SR	SR	
																	0,26%	**0,26%**			**13,85%**	**65,49%**	
																	SR	**SR**			**SR**	**S**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1					**UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR**				**121.911.036**		**56.650.329**		**22.443.279**		**3.161.117**				**59.811.446**			
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**121.911.036**		**56.650.329**		**22.443.279**		**3.161.117**				**59.811.446**			
1	1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**40.441.296**	**100**	**20.634.082**	**100**	**10.978.663**		**1.717.580**	**0%**	**16%**	**100**	**22.351.662**	**100%**	**55%**	
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**		**100**		**100**				**0%**		**100**		**100%**		
	1	05	01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**10.151**		**4.007**		**2.381**		**-**				**4.007**			Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4.060	2	2.202	1	1.401	0	-	0%	0%	2	2.202	50%	54%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2.030	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.060	3	1.805	1	980	0	-	0%	0%	3	1.805	75%	44%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23.620.864**		**15.616.785**		**7.928.806**		**1.568.701**				**17.185.486**			Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3150	23.612.337	2490	15.615.902	812	7.928.100	416	1.568.701	51%	20%	2.906	17.184.602	92%	73%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	8.527	4	883	2	706	0	-	0%	0%	4	883	50%	10%	Satpol PP dan Damkar
	1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**3.461.823**		**292.250**		**1.002.890**		**-**				**292.250**			
	1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1552	2.339.471	613	249.500	2	866.550	0	-	0%	0%	613	249.500	39%	11%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	6.091	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	164	1.116.261	2	42.750	4	136.340	0	-	0%	0%	2	42.750	1%	4%	Satpol PP dan Damkar
	1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.633.350**		**1.913.584**		**812.568**		**39.968**				**1.953.552**			Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	27.530	17	12.081	1	5.084	0	-	0%	0%	17	12.081	38%	44%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	245	289.721	111	127.060	5	51.588	0	-	0%	0%	111	127.060	45%	44%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	85.051	12	59.396	6	59.594	0	-	0%	0%	12	59.396	50%	70%	Satpol PP dan Damkar

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	85	130.324	22	67.409	2	21.213	0	-	0%	0%	22	67.409	26%	52%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	24.728	1	2.160	1	3.240	0	-	0%	0%	1	2.160	7%	9%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.883	0	-		-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	538	3.070.113	344	1.645.477	139	671.849	20	39.968	14%	6%	364	1.685.445	68%	55%	Satpol PP dan Damkar
	1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.279.100**		**120.995**		**289.670**		**-**				**120.995**			Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	450.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	2.240.902	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38	245.248	0	-	20	139.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	598.648	21	120.995	24	150.670	0	-	0%	0%	21	120.995	47%	20%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	603.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	141.302	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.322.947**		**1.735.255**		**562.420**		**86.481**				**1.821.736**			Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4400	30.528	1660	13.600	624	6.240	0	-	0%	0%	1.660	13.600	38%	45%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	325.239	47	78.156	4	65.380	1	4.881	25%	7%	48	83.037	100%	26%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	2.967.181	81	1.643.499	24	490.800	24	81.600	100%	17%	105	1.725.099	100%	58%	Satpol PP dan Damkar
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.113.061**		**951.206**		**379.927**		**22.430**				**973.636**			Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	299.883	3	180.020	1	57.617	1	8.010	100%	14%	4	188.030	80%	63%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	175	1.317.454	105	763.326	33	315.110	5	14.420	15%	5%	110	777.746	63%	59%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	220	33.498	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	35.883	119	7860	20	7.200	0	-	0%	0%	119	7.860	100%	22%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	426.342	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
																Rata-rata capaian kinerja (%)			15,29%	3,42%			36,85%	26,25%	
																Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	**1**	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**persen**	**100**	**46.325.729**	**200**	**27.297.384**	**100**	**9.399.651**		**1.314.378**	**0%**	**14%**	**200**	**28.611.762**	**100%**	**62%**	Satpol PP dan Damkar
							Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	**persen**	**100**		**200**		**100**				**0%**		**200**		**100%**		
	1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**44.642.550**		**26.350.524**		**8.853.033**		**1.269.252**				**27.619.776**			Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.370.638	1	243101	1	277.061	0	-	0%	0%	1	243.101	17%	18%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	64	74.638	0	-	16	150.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	1735	38.860.513	1031	21.644.358	336	7.142.568	334	1.170.800	99%	16%	1.365	22.815.158	79%	59%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	8	7.471	2	87.610	2	234.974	1	44.072	50%	19%	3	131.682	38%	1763%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	4	178.658	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	253	1.021.964	188	2.320.917	26	218.332	9	33.325	35%	15,26%	197	2.354.242	78%	230%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	60	2.568.495	58	951.662,70	24	148.272	7	14.212	29%	9,59%	65	965.875	100%	38%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	470	337.013	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	40	223.160	36	1.102.875	124	681.826	3	6.843	0%	0%	39	1.109.718	98%	497%	Satpol PP dan Damkar
	1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**				**1.331.549**		**946.860**		**546.617**		**45.126**				**991.986**			Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	80	534.643	38	236096	16	149.999	0	-	0%	0%	38	236.096	48%	44%	Satpol PP dan Damkar

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	05	02	2.02	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	650	633.741	1096	605.790	600	346.681	41	39.666	7%	11%	1.137	645.456	100%	102%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.02	12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	163	163.166	116	104.974	24	49.938	4	5.460	17%	11%	120	110.434	74%	68%	Satpol PP dan Damkar
	1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**				**351.631**		**-**		**-**		**-**				**-**			Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	8	351.631	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
																Rata-rata capaian kinerja (%)			23,67%	8,24%			48,41%	216,77%	
																Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
3	**1**	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)**	**Persen**	**100**	**35.144.010**	**200**	**8.718.863**	**100**	**2.064.965**		**129.159**	**0%**	**6%**	**200**	**8.848.022**	**100%**	**25%**	Satpol PP dan Damkar
							Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	**Persen**	**89,70**		**36,12**		**74,46**				**0%**		**36**		**40%**		
							Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	**Persen**	**100**		**200**		**100**				**0%**		**200**		**100%**		
	1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**31.824.608**		**8.609.547**		**2.018.470**		**129.159**				**8.738.706**		**1**	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	4	519.731	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	144	14.285.622	103	6.439.750	38	1.009.689	13	129.159	34%	13%	116	6.568.909	81%	46%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	120	254.993	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	99.342	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Dokumen	4	1.218.120	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya peningkatan kapasitas aparatur	Orang	268	613.121	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	12	81.208	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Unit	267	14.631.833	127	2.169.797	107	1.008.781	0	-	0%	0%	127	2.169.797	48%	15%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	18	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	4	120.638	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	**05**	**04**	**2.02**	**04**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**				**213.923**		**109.316**		**46.495**		**-**				**109.316**			
	1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	80	166.469	48	88.276	12	34.845	0	-	0%	0%	48	88.276	60%	53%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	4	47.454	2	21.040	1	11.650	0	-	0%	0%	2	21.040	50%	44%	Satpol PP dan Damkar
	1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**				**55.696**		**-**		**-**									
	1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	4	55.696	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**				**1.520.713**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	1280	487.248	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	16	487.248	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	20	546.217	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**				**1.529.070**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	32	136.673	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	4	771.476	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	4	487.248	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.05	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	20	133.672	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8,55%	3,20%			12,53%	8,33%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**15,84%**	**4,95%**			**32,60%**	**83,78%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**T**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah						**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**34.073.450**		**16.705.072**		**6.439.254**		**631.049**				**17.325.296**			
	1.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**34.073.450**		**16.705.072**		**6.439.254**		**631.049**				**17.325.296**			
	1.	**05.**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**34.073.450**		**16.705.072**		**6.439.254**		**631.049**				**17.325.296**			
	1.	**05.**	**1.**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**14.238.452**	**200**	**8.919.780**	**100**	**5.621.962**		**631.049**	**0,00%**	**11,22%**	**200**	**9.550.829**	**100,00%**	**67,08%**	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**-**	**200**	**-**	**100**	**-**		**-**	**0,00%**		**200**		**100,00%**		
	1.	**05.**	**01.**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**15**	**23.685**		**7.164**	**0**	**2.199**	**0**	**-**				**7.164**		**0,30**	
	1.	05.	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	15.790	2	3.889	1	1.389	0	0	0,00%	0,00%	2	3.889	20,00%	24,63%	BPBD
	1.	05.	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.895	2	3.275	1	810	0	0	0,00%	0,00%	2	3.275	40,00%	41,48%	BPBD
	1.	**05.**	**01.**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.214.093**		**4.580.157**	**100**	**3.955.508**		**537.874**				**5.118.031**			BPBD
	1.	05.	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan/tahun	700	5.193.791	484	4.572.907	140	3.954.053	16	537.874	11,43%	13,60%	500	5.110.782	71,43%	98,40%	BPBD
	1.	05.	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8	10.151	2	3.597	1	1.455	0	0	0,00%	0,00%	2	3.597	25,00%	35,44%	BPBD
	1.	05.	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	10.151	2	3.653			0	0	0,00%	0,00%	2	3.653	25,00%	35,98%	BPBD
	1.	**05.**	**01.**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100.000**		**-**		**32.000**		**-**			**0**	**-**			**BPBD**
	1.	05.	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	40.000					0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	01.	2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	60.000			4	32.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	**05.**	**01.**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**0**	**1.841.337**		**919.954**	**0,05**	**561.248**	**0**	**-**			0	**919.954**			BPBD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1.	05.	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	44.739	4	12.839	2	9.593	0	0	0,00%	0,00%	4	12.839	20,00%	28,70%	BPBD
	1.	05.	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	157.903	10	54.072	2	27.283	0	0	0,00%	0,00%	10	54.072	40,00%	34,24%	BPBD
	1.	05.	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	78.951	8	37.914	3	104.577	0	0	0,00%	0,00%	8	37.914	53,33%	48,02%	BPBD
	1.	05.	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	150.008	15	59.180	5	20.806	0	0	0,00%	0,00%	15	59.180	60,00%	39,45%	BPBD
	1.	05.	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	10.527	0	-	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.250	1.399.209	706	755.949	245	398.989	0	0	0,00%	0,00%	706	755.949	56,48%	54,03%	BPBD
	1.	**05.**	**01.**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**387.400**		**306.328**	**100**	**335.979**	**100**	**-**				**306.328**			
	1.	05.	01.	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	97.100	10	86.328	2	104.354	0	0	0,00%	0,00%	10	86.328	100,00%	88,91%	BPBD
	1.	05.	01.	2.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							1	160.624	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	01.	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	230.000	3	220.000	1	71.000	0	0	0,00%	0,00%	3	220.000	100,00%	95,65%	BPBD
	1.	05.	01.	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	60.300					0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	**05.**	**01.**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**3.992.686**		**2.370.272**		**534.630**		**83.174**				**2.453.446**			
	1.	05.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.575	33.065	22	9.396	10	2.800	0	0	0,00%	0,00%	22	9.396	0,85%	28,42%	BPBD
	1.	05.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	548.688	16	194.107	2	88.800	0	9.574	100,00%	10,78%	16	203.681	100,00%	37,12%	BPBD
	1.	05.	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	185	3.410.933	61	2.166.769	12	443.030	2	73.600	16,67%	16,61%	63	2.240.369	34,05%	65,68%	BPBD
	1.	**05.**	**01.**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.679.251**		**735.904**	**100**	**200.398**	**100**	**10.000**				**745.904**			
	1.	05.	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	1.390.445	58	516.014	25	200.398	1	10.000	4,00%	4,99%	59	526.014	49,17%	37,83%	BPBD
	1.	05.	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	181.806	20	20.000			0	0	0,00%	0,00%	20	20.000	100,00%	11,00%	BPBD
	1.	05.	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.107.000	1	199.890			0	0	0,00%	0,00%	1	199.890	33,33%	18,06%	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	7,77%	2,71%			42,21%	37,41%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
Meningkatkan penanggulangan bencana	**1.**	**05.**	**03.**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas**	**Persen**	**100**	**12.909.376**	**300**	**1.134.355**	**100**	**817.292**		**0**	**0,00%**	**0,00%**	**300**	**1.123.531**	**100,00%**	**8,70%**	
							Persentase Respon cepat darurat bencana	**Persen**	**100**	**-**	**300**	**-**	**100**	**-**		**-**	**0,00%**		**300**	**-**	**100,00%**		
							Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**Orang**	**36.350**		**21550**		**100**				**0,00%**		**21.550**		**59,28%**		
	1.	**05.**	**03.**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Persen**	**100**	**2.340.201**		**212.124**	**100**	**71.600**	**100**	**-**				**212.124**			
	1.	05.	03.	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.320.000	0	-			0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	03.	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	500	1.020.201	7300	212.124	1	71.600	0	0	0,00%	0,00%	7.300	212.124	100,00%	20,79%	BPBD
	1.	**05.**	**03.**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Persen**	**100**	**5.752.918**		**413.927**	**100**	**297.515**	**100**	**-**				**413.927**			
	1.	05.	03.	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.320.000	1	102.917			0	0	0,00%	0,00%	1	102.917	50,00%	7,80%	BPBD
	1.	05.	03.	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	500	604.510	250	50.051	20	50.638	0	0	0,00%	0,00%	250	50.051	50,00%	8,28%	BPBD
	1.	05.	03.	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	1.258.515	0	-	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	03.	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang di Tingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan			6	71.604	16	97.243	0	0	0,00%	0,00%	6	71.604	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	03.	2.02	07	Koordinas Penyusunan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	Tahun	5	1.239.250	1	39.911			0	0	0,00%	0,00%	1	39.911	20,00%	3,22%	BPBD
	1.	05.	03.	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	40	283.805	0	-	10	65.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	03.	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	2.000	1.046.838	683	149.444	400	84.634	0	0	0,00%	0,00%	683	149.444	34,15%	14,28%	BPBD
	1.	**05.**	**03.**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Persen**	**100**	**3.602.707**		**385.857**	**100**	**347.964**	**100**	**-**				**385.857**			
	1.	05.	03.	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	5	263.171	1	14.290			0	0	0,00%	0,00%	1	14.290	20,00%	5,43%	BPBD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1.	05.	03.	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	5	947.000	2	215.470	1	224.126	0	0	0,00%	0,00%	2	215.470	40,00%	22,75%	BPBD
	1.	05.	03.	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	48	1.398.336	16	106.069	10	102.614	0	0	0,00%	0,00%	16	106.069	33,33%	7,59%	BPBD
	1.	05.	03.	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	5	994.200	1	50.028	1	21.224	0	0	0,00%	0,00%	1	50.028	20,00%	5,03%	BPBD
	1.	**05.**	**03.**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persen**	**0**	**1.213.550**		**122.446**		**100.214**		**-**				**111.622**			
	1.	05.	03.	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	400.000	1	79.554			0	0	0,00%	0,00%	1	79.554	25,00%	19,89%	BPBD
	1.	05.	03.	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	5	813.550	1	32.068	1	51.224	0	0	0,00%	0,00%	1	32.068	20,00%	3,94%	BPBD
	1.	05.	03.	2.04	07	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen			1	10.824	1	48.990	0	0	0,00%	0,00%	1	10.824	0,00%	0,00%	BPBD
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			29,46%	8,50%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	1.	**05.**	**04.**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran**	**Persen**	**100**	**6.925.623**	**200**	**6.650.937**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**200**	**6.650.937**	**100,00%**	**96,03%**	
	1.	**05.**	**04.**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Parsentase Jumlah Kegiatan pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**5.486.268**		**4.310.075**	**100**	**-**	**100**	**-**				**4.310.075**			
	1.	05.	04.	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	50	309.228	121	1.311.045			0	0	0,00%	0,00%	121	1.311.045	100,00%	423,97%	BPBD
	1.	05.	04.	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	10	4.333.172	84	2.479.549			0	0	0,00%	0,00%	84	2.479.549	100,00%	57,22%	BPBD
	1.	05.	04.	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan *Real Time* yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Keluraha n	145	783.868	1	469.925			0	0	0,00%	0,00%	1	469.925	0,69%	59,95%	BPBD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1.	05.	04.	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	60.000	1	49.556			0	0	0,00%	0,00%	1	49.556	100,00%	82,59%	BPBD
	1.	**05.**	**04.**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**Kegiatan**	**1**	**179.460**		**196.971**		**-**	**0**	**-**				**196.971**			
	1.	05.	04.	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	179.460	1	196.971			0	0	0,00%	0,00%	1	196.971	100,00%	109,76%	BPBD
	1.	**05.**	**04.**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**0**	**1.259.895**		**2.143.891**		**-**		**-**				**2.143.891**			
	1.	05.	04.	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	100	1.198.185	220	2.007.406			0	0	0,00%	0,00%	220	2.007.406	100,00%	167,54%	BPBD
	1.	05.	04.	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	100	61.710	3	136.485			0	0	0,00%	0,00%	3	136.485	3,00%	221,17%	BPBD
																					71,96%	160,31%	
																					S	ST	
																	3,89%	**1,35%**			**47,88%**	**68,74%**	
																	SR	**SR**			**SR**	**S**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	**6**	**2**	**8**		**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**57.913.637**		**17.180.732**		**8.445.358**		**870.023**				**18.050.756**			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**47.763.866**		**15.674.901**		**7.732.693**		**870.023**				**16.544.924**			
	1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**47.763.866**		**15.674.901**		**7.732.693**		**870.023**				**16.544.924**			
	1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**23.439.282**		**7.784.713**	**100**	**5.271.846**		**705.347**	**0%**	**13%**	**-**	**8.490.060**	**0,00%**	**36,22%**	
	1	**6**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja**	**Persen**	**100**	**22.332**		**4.378**		**5.580**		**-**				**4.378**			
	1	6	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	11.166	1	1.192	1	2.790	-	-	0%	0%	1	1.192	25,00%	10,68%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	11.166	2	3.186	1	2.790	-	-	0%	0%	2	3.186	25,00%	28,53%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13.188.445**		**4.963.325**		**3.310.501**		**545.422**				**5.508.747**			
	1	6	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	14	13.188.445	14	4.963.325	14	3.310.501	3	545.422	21%	16%	14	5.508.747	100,00%	41,77%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**80.400**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	1	6	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	100	80.400					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.357.310**		**891.576**		**520.880**		**9.805**				**901.381**			
	1	6	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	34	91.760	8	15.877	4	4.251	1	-	25%	0%	9	15.877	26,47%	17,30%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	128	437.153	25	229.418	20	80.688	5	-	25%	0%	30	229.418	23,44%	52,48%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	139	203.020	16	10.000	16	15.000	-	-	0%	0%	16	10.000	11,51%	4,93%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	239.977	3	39.876	2	16.448	1	-	50%	0%	4	39.876	33,33%	16,62%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	349.732	7	128.986	5	32.244	1	-	20%	0%	8	128.986	29,63%	36,88%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	22.467	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	162	121.812	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	6	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6.374	1.891.389	1.398	467.419	1.215	372.249	183	9.805	15%	3%	1.581	477.224	24,80%	25,23%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1.022.500**		**40.783**		**574.320**		**-**				**40.783**			
	1	6	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	155.000	16	40.783	1	82.140	-	-	0%	0%	16	40.783	40,00%	26,31%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	105.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	63	157.500	-	-	1	200.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	63	105.000	-	-	1	292.180	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.395.432**		**1.184.530**		**591.000**		**93.895**				**1.278.426**			
	1	6	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24.599	12	6.420	12	6.000	4	-	33%	0%	12	6.420	100,00%	26,10%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	320.559	2	82.445	1	63.600	-	6.995	0%	11%	2	89.440	100,00%	27,90%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	3.050.274	61	1.095.666	12	521.400	3	86.900	25%	17%	64	1.182.566	100,00%	38,77%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.372.863**		**700.121**		**269.565**		**56.225**				**756.346**			
	1	6	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	198.011	1	76.495	1	43.339	1	8.100	100%	19%	1	84.595	100,00%	42,72%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1.290.080	14	560.561	9	210.726	1	48.125	11%	23%	15	608.686	100,00%	47,18%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	81.000		-	1	10.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	153	57.890	55	13.153	31	5.500	-	-	0%	0%	55	13.153	35,95%	22,72%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	375.000	1	49.912			-	-	0%	0%	1	49.912	50,00%	13,31%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	245.882	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	6	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	125.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									17,15%	4,65%			34,26%	17,76%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
	1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif**	**Persen**	**90**	**6.223.157**	**142**	**1.766.235**	**70**	**721.578**		**102.840**	**100%**	**14%**	**142**	**1.869.075**	**100%**	**30,03%**	
	1	**6**	**2**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**466.946**		**7.350**		**-**		**-**		**-**		**7.350**			
	1	6	2	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	100	466.946	19	7.350			-	-	0%	0%	19	7.350	19,00%	1,57%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**5.756.210**		**1.758.886**		**721.578**		**102.840**				**1.861.726**			
	1	6	2	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	128	531.857	23	199.130	27	50.526	-	-	0%	0%	23	199.130	17,97%	37,44%	DINSOSPPPA
	1	6	2	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	484.228	6	461.708	3	20.326	-	2.085	0%	10%	6	463.793	37,50%	95,78%	DINSOSPPPA
	1	6	2	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	14.739	4.171.670	8.960	1.073.529	2.879	630.390	379	100.755	13%	16%	9.339	1.174.284	63,36%	28,15%	DINSOSPPPA
	1	6	2	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	250	284.228	30	18.398	38	20.336	-	-	0%	0%	30	18.398	12,00%	6,47%	DINSOSPPPA
	1	6	2	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	284.228	1	6.120			-	-	0%	0%	1	6.120	100,00%	2,15%	DINSOSPPPA
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									3,29%	6,56%			41,64%	28,59%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
	1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)**	**Pesen**	**100**	**5.302.472**	**200**	**3.519.645**	**100**	**485.671**		**22.500**	**0%**	**5%**	**200**	**3.542.145**	**100%**	**66,80%**	
	1	**6**	**4**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS yang tertangani**	Persen	**100**	**2.942.404**		**3.332.437**		**253.405**		**19.500**				**3.351.937**			

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	6	4	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.522	677.422	387	160.050	360	126.739	-	-	0%	0%	387	160.050	25,43%	23,63%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	88	81.175	9	6.531	19	14.000	-	-	0%	0%	9	6.531	10,23%	8,05%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	221	1.072.998	62	478.193	55	112.666	-	19.500	0%	17%	62	497.693	28,05%	46,38%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	165	827.080	2	6.000			-	-	0%	0%	2	6.000	1,21%	0,73%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	370	202.521	74	2.674.419			-	-	0%	0%	74	2.674.419	20,00%	1320,56%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	60.906	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20.302	1	7.243			-	-	0%	0%	1	7.243	5,00%	35,68%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**4**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**2.360.068**		**187.208**		**232.266**		**3.000**				**190.208**			
	1	6	4	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20.302					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.569	1.855.335	1.033	187.208	1.224	217.266	-	-	0%	0%	1.033	187.208	18,56%	10,09%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	162.619					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	40.604					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	81.208			10	15.000	-	3.000	0%	0%	-	3.000	0,00%	3,69%	DINSOSPPPA
	1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	200.000					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
																	0,00%	3,46%			8,34%	111,45%	
																	SR	SR			SR	ST	
	1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial**	**Persen**	**100**	**5.486.173**	**122,03**	**2.284.282**	**100**	**1.133.648**		**39.336**	**100%**	**3%**	**122**	**2.323.618**	**100%**	**42,35%**	
	1	**6**	**5**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	Persen	**90**	**726.004**		**206.768**		**147.540**		**-**				**206.768**			
							Persentase ODGJ yang tertangani	Persen															
	1	6	5	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.535	609.470	74	206.768	258	147.540	-	-	0%	0%	74	206.768	4,82%	33,93%	DINSOSPPPA
	1	6	5	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	56	116.534					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	**6**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.760.170**		**2.077.514**		**986.109**		**39.336**				**2.116.850**			
	1	6	5	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	145	1.960.861	100	961.047	46	287.109	2	39.336	4%	14%	102	1.000.383	70,34%	51,02%	DINSOSPPPA
	1	6	5	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	145	609.060	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	5	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	57	1.703.000	12	252.050	12	490.000	-	-	0%	0%	12	252.050	21,05%	14,80%	DINSOSPPPA
	1	6	5	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	487.248	14	864.417	15	209.000	-	-	0%	0%	14	864.417	23,33%	177,41%	DINSOSPPPA
																	1,09%	3,43%			19,93%	46,19%	
																	SR	SR			SR	SR	
	1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)**	**Persen**	**100**	**7.312.782**	**159**	**320.026**	**100**	**119.950**		**-**	**0%**	**0%**	**159**	**320.026**	**100%**	**4,38%**	
	1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**4.324.327**		**320.026**		**99.950**		**-**				**320.026**			
	1	6	6	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20.885	2.953.942	2.961	320.026	2.596	99.950	-	-	0%	0%	2.961	320.026	14,18%	10,83%	DINSOSPPPA
	1	6	6	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.442	1.370.385					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	**6**	**6**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**				**2.988.455**		**-**		**20.000**		**-**				**-**			
	1	6	6	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	4	2.233.221					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	6	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	755.235			1	20.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			3,54%	2,71%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.149.772**		**1.505.831**		**712.665**		**-**				**1.505.831**			
	2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**10.149.772**		**1.505.831**		**712.665**		**-**				**1.505.831**			
Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	**2**	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**Persen**	**6**	**2.283.094**	**11,5**	**334.552**	**5,8**	**178.284**		**-**	**0%**	**0%**	**11**	**334.552**	**190,86%**	**14,65%**	
	2	**8**	**2**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**1.267.993**		**98.887**		**17.137**		**-**				**98.887**			
	2	8	2	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	29	1.267.993	29	98.887	1	17.137	-	-	0%	0%	29	98.887	100,00%	7,80%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**406.040**		**61.682**		**49.944**		**-**				**61.682**			
	2	8	2	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	406.040	8	61.682	10	49.944	-	-	0%	0%	8	61.682	50,00%	15,19%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**609.060**		**173.983**		**111.204**		**-**				**173.983**			
	2	8	2	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	609.060	1	173.983	1	111.204	-	-	0%	0%	1	173.983	25,00%	28,57%	DINSOSPPPA

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
																	0,00%	0,00%			58,33%	17,19%	
																	SR	SR			R	SR	
	2	8	3			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**Rasio**	**0,002**	**966.375**	**20,102**	**178.695**	**0,003**	**75.993**		**-**	**100%**	**0%**	**20,102**	**178.695**	**100,00%**	**18,49%**	
	2	**8**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**468.976**		**114.351**		**40.555**		**-**				**114.351**			
	2	8	3	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	400	468.976	104	114.351	36	40.555	-	-	0%	0%	104	114.351	26,00%	24,38%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**3**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**294.379**		**44.676**		**35.438**		**-**				**44.676**			
	2	8	3	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	1	294.379	1	9.736			-	-	0%	0%	1	9.736	100,00%	3,31%	DINSOSPPPA
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	34.940	1	35.438	-	-	0%	0%	1	34.940	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**203.020**		**19.668**		**-**		**-**				**19.668**			
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	19.668			-	-	0%	0%	1	19.668	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	2	8	3	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	100	203.020					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
																	0,00%	0,00%			42,00%	9,23%	
																	SR	SR			SR	SR	
	2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga**	**Persen**	**100**	**3.674.663**	**150**	**26.544**	**100**	**12.080**		**-**	0%	0%	150	**26.544**	100%	0,72%	

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**8**	**4**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1.035.402**		**26.544**		**12.080**		**-**				**26.544**			
	2	8	4	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	16	487.248	2	15.348			-	-	0%	0%	2	15.348	12,50%	3,15%	DINSOSPPPA
	2	8	4	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	330	345.134	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	2	8	4	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	200	203.020	32	11.197	49	12.080	-	-	0%	0%	32	11.197	16,00%	5,52%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**4**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**2.639.261**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	8	4	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	609.060					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	2	8	4	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.201					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			5,70%	1,73%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)**	**Dokumen**	**1**	**210.000**		**-**	**-**	**-**	**0**	**-**				**-**			
	2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**210.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	8	5	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	175.000					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA
	2	8	5	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	35.000					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pemenuhan hak anak**	**Persen**	**95**	**1.611.038**	**185**	**415.014**	**90**	**311.679**		**-**	**100,00%**	**0%**	**185**	**415.014**	**100,00%**	**25,76%**	

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**8**	**6**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**115.000**		**141.047**		**88.180**		**-**				**141.047**			
	2	8	6	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	3	115.000	2	141.047	1	88.180	1	-	100%	0%	3	141.047	100,00%	122,65%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**6**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**1.496.038**		**273.967**		**223.499**		**-**				**273.967**			
	2	8	6	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	328.892	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	2	8	6	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	406.040	2	36.013	2	36.033	-	-	0%	0%	2	36.013	12,50%	8,87%	DINSOSPPPA
	2	8	6	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	121	761.105	37	237.954	30	187.466	1	-	3%	0%	38	237.954	31,40%	31,26%	DINSOSPPPA
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			34,45%	0,00%			35,98%	40,70%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani**	**Persen**	**100**	**1.404.602**	**200**	**551.026**	**100**	**134.630**		**-**	**0%**	**0%**	**200**	**551.026**	**100,00%**	**39,23%**	
	2	**8**	**7**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**446.644**		**103.905**		**-**		**-**				**103.905**			
	2	8	7	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	343	446.644	179	103.905			-	-	0%	0%	179	103.905	52,19%	23,26%	DINSOSPPPA
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**842.958**		**397.769**		**134.630**		**-**				**397.769**			

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	8	7	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	335.408	2	115.000	1	134.630	-	-	0%	0%	2	115.000	100,00%	34,29%	DINSOSPPPA
	2	8	7	2.02	02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	150	507.550	41	282.769			-	-	0%	0%	41	282.769	27,33%	55,71%	DINSOSPPPA
	2	**8**	**7**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**115.000**		**49.352**		**-**		**-**				**49.352**			
	2	8	7	2.03	01	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	20	115.000	4	49.352			-	-	0%	0%	4	49.352	20,00%	42,91%	DINSOSPPPA
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																	0,00%	0,00%			49,88%	39,04%	
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																	**5,60%**	**1,81%**			**27,24%**	**28,60%**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**42.259.383**		**22.427.400**		**9.343.505**		**785.969**				**23.213.369**				
	2	**09**				**UNSUR PEMERINTAH BIDANG PANGAN**				**23.550.158**		**10.916.244**		**4.849.945**		**737.436**				**11.653.680**				
1	**2**	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**23.550.158**	**300**	**10.916.244**	**100**	**4.849.945**	**100**	**737.436**	**100%**	**15%**	**400**	**11.653.680**	**100%**	**49%**	
	2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**			**27.404**		**5.423**		**2.000**		**-**				**5.423**			**DKPP**
	2	9	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	16.000	1	664	1	1.000	0	-	0%	0%	1	664	25%	4%	
	2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	11.404	3	4.759	1	1.000	0	-	0%	0%	3	4.759	60%	42%	**DKPP**
	2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		**14.407.541**		**7.398.097**		**3.348.437**		**586.698**				**7.984.794**			**DKPP**
	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	14.407.541	42	7.398.097	14	3.348.437	4	586.698	29%	18%	46	7.984.794	66%	55%	**DKPP**
	2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4.387.352**		**1.022.904**		**630.904**		**37.494**				**1.060.397**			**DKPP**
	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	45	56.951	25	15.959	70	10.300	17	2.510	24%	24%	42	18.469	93%	32%	**DKPP**
	2	09	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	329	268.014	183	138.576	55	150.198	3,5	9.522	6%	6%	187	148.098	57%	55%	**DKPP**
	2	09	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	37	129.460	26	56.588	8	27.010	1,9	3.648	24%	14%	28	60.236	75%	47%	**DKPP**
	2	09	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan disediakan	paket	97	228.207	49	104.485	14	43.400	3,4	7.504	24%	17%	52	111.989	54%	49%	**DKPP**
	2	09	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	27.137	0	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	**DKPP**
	2	09	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1740	3.677.583	1153	707.296	400	399.996	45	14.310	11%	3,58%	1.198	721.606	69%	20%	**DKPP**
	2	**9**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**		**310.000**		**18.650**				**-**				**18.650**			
	2	9	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	46	130.000	14	18.650			0	-	0%	0%	14	18.650	30%	14%	
	2	9	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	12	180.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.084.305**		**1.669.103**		**508.772**		**76.642**				**1.745.745**			**DKPP**
	2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	27.831	36	13.350	12	5.000	2,9	700	24%	14%	39	14.050	65%	50%	**DKPP**
	2	09	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	204.675	36	58.121	12	33.972	3	3.542	25%	10,43%	39	61.663	65%	30%	**DKPP**
	2	09	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.851.800	36	1.597.632	12	469.800	3	72.400	25%	15%	39	1.670.032	65%	59%	**DKPP**
	2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.333.556**		**802.067**		**359.831**		**36.603**				**838.671**			**DKPP**
	2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	202.164	6	135.115	1	57.484	0,2	3.983	20%	6,93%	6	139.097	100%	69%	**DKPP**
	2	09	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	836.630	35,99	624.213	12	277.267	2,1	32.621	18%	11,77%	38	656.834	63%	79%	**DKPP**
	2	09	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	23	92.055	65	27.740	23	10.080	0	-	0%	0%	65	27.740	100%	30%	**DKPP**
	2	9	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	202.707	1	15.000	1	15.000	0	-	0%	0%	1	15.000	25%	7%	
														Rata-rata capaian kinerja (%)			15,34%	9,41%			56,26%	35,70%	
														Predikat kinerja			SR	SR			R	SR	
						URUSAN PANGAN				**4.883.847**		**3.114.981**		**778.573**		**35.910**				**3.150.891**			
2	**2**	**09**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola**	**Persen**	**100**	**455.347**	**33,33**	**10.773**	**100**	**-**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**33,33**	**10.773**	**33%**	**2%**	**DKPP**
	2	**09**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**455.347**		**10.773**		**-**		**-**				**10.773**			**DKPP**
	2	9	2	2,01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit	0	-	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	2	9	2	2,01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	unit	12	302.500	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	2	09	2	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	35	152.847	1	10.773		-	0	-	0%	0%	1	10.773	3%	7%	**DKPP**
														Rata-rata capaian kinerja (%)							1,43%	3,52%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
3	**2**	**09**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**Skor**	**85,8**	**2.878.860**	**261,75**	**1.226.022**	**85**	**732.466**	**91**	**35.910**	**100%**	**5%**	**353**	**1.261.932**	**100%**	**44%**	**DKPP**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**09**	**3**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**				**2.247.071**		**981.335**		**212.840**		**35.910**				**1.017.245**			**DKPP**
	2	09	3	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	60	283.638	23	109.217			0	-	0%	0%	23	109.217	38%	39%	**DKPP**
	2	9	3	2,01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	18	1.747.433	9	627.619			0	-	0%	0,00%	9	627.619	50%	36%	
	2	9	3	2,01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	72	216.000	5	19.425			0	-	0%	0%	5	19.425	7%	9%	
	2	9	3	2,01	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabipaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Laporan	18	1.747.433	1	56.380	6	87.070	0	-	0%	0%	1	56.380	6%	3%	
	2	09	3	2.01	15	pemantauan Harga dan Pasokan pangan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	60	283.638	12	136.415	1	125.770	0,28	35.910	28%	29%	12	172.325	20%	61%	
	2	09	3	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis	Laporan	60	283.638	3	32.279			0	-	0%	0%	3	32.279	5%	11%	
	2	**9**	**3**	**2,02**		**Pengelolaan dan Kesiimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota**		**Laporan**	**12**	**949.640**	**9**	**99.000**		**109.010**	**0**	**-**			**9**	**99.000**			
	2	9	3	2,02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	949.640	1	99.000	9	99.990	0	-	0%	0%	1	99.000	8%	10%	
	2	9	3	2,02	5	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	949.640	0	-	9	9.020	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	2	**09**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**631.789**		**244.687**		**410.616**		**-**				**244.687**			**DKPP**
	2	9	3	2,04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	5	311.716			1	70.072	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	2	09	3	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	5	320.072	1	244.687	1	340.544	0	-	0%	0%	1	244.687	20%	76%	**DKPP**
														Rata-rata capaian kinerja (%)			4,67%	4,76%			30,93%	49,13%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase desa bebas status rawan pangan**	**Persen**	**100**	**1.349.640**	**263,44**	**1.850.510**	**97**	**23.400**	**99,31**	**-**	**102%**	**0%**	**363**	**1.850.510**	**100%**	**137%**	
							Persentase penguatan cadangan pangan daerah	**Persen**	**80**		**20**		**20**		**7,32**		**37%**		**27**		**100%**		
	2	**9**	**4**	**2,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**				**200.000**		**-**		**23.400**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	9	4	2,01	01	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	4	200.000			1	23.400	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	2	**9**	**4**	**2,02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten**	**Persen**	**100**	**1.149.640**		**1.850.510**		**-**		**-**				**1.850.510**			
	2	9	4	2,02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	2	9	4	2,02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	949.640	9	1.850.510			0	-	0%	0%	9	1.850.510	75%	195%	
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	R	
	2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat**	**Persen**	**100**	**200.000**	**300**	**27.677**	**100**	**22.707**	**100**	**-**	**100%**	**0%**	**400**	**27.677**	**100%**	**14%**	
	2	**9**	**5**	**2,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**				**200.000**		**27.677**		**22.707**		**-**				**27.677**			
	2	9	5	2,01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Dokumen	40	200.000	20	27.677	4	22.707	0	-	0%	0%	20	27.677	50%	14%	
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			50,00%	13,84%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
						UNSUR PEMERINTAH BIDANG PERIKANAN				**13.825.378**		**8.396.175**		**3.714.988**		**12.623**				**8.408.798**			
							Jumlah produksi Perikanan	**Ton**	**10.923,00**	**10.717.122**	**28.007,92**	**7.416.041**	**10.479,92**	**3.014.988**	**9.383,49**								
5	**3**	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**2.042,84**	**2.225.200**	**5.980,83**	**2.076.225**	**2.022,61**	**400.000**	**2.033,46**	**-**	**101%**	**0%**	**8.014,29**	**2.076.225**	**100%**	**93%**	
	3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayan Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**2.091.200**		**2.076.225**		**400.000**		**-**				**2.076.225**			**DKPP**
	3	25	3	2,01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	91.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	200	2.000.000	150	2.076.225	20	400.000	0	-	0%	0,00%	150	2.076.225	75%	104%	**DKPP**
	3	**25**	**3**	**2,02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 1 Daerah Kab/Kota**				**134.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	25	3	2,02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	8	134.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			25,00%	34,60%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
5	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah total produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**8.880,16**	**8.491.922**	**22.027,09**	**5.339.816**	**8.457,31**	**2.614.988**	**7.350,03**	**12.623**	**87%**	**0,48%**	**29.377**	**5.352.438**	**100%**	**63%**	
	3	**25**	**4**	**2,02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**				**465.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	II	25	4	2,02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	11	465.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**8.026.922**		**5.339.816**		**2.614.988**		**12.623**				**5.352.438**			**DKPP**
	3	25	4	2,04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	155.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	3	25	4	2,04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	4.143.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	3	25	4	2,04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	180	3.536.922	365,2	5.339.816	11	2.614.988	0,054	12.623	0,5%	0,48%	365	5.352.438	100%	151%	**DKPP**
	3	25	4	2,04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	20	92.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	3	25	4	2,04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	100	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,49%	0,48%			16,67%	25,22%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Capaian pengawasan sumberdaya perikanan yang dilakukan**	**Persen**	**100**	**920.000**		**-**	**100**	**-**	**0**	**-**	**0,0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	3	**25**	**5**	**2,01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**				**920.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	25	5	2,01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8	920.000			0	0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
																					0,00%	0,00%	
																					SR	SR	
	3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase pertumbuhan produksi pengolahan perikanan**	**Persen**	**25**	**2.188.256**	**10**	**980.135**	**5**	**700.000**	**5**	**-**	**100,0%**	**0,00%**	**15**	**980.135**	**60%**	**45%**	
	3	**25**	**6**	**2,01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**				**94.000**		**-**				**-**				**-**			
	3	25	6	2,01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	2	94.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	3	**25**	**6**	**2,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**				**207.000**		**-**				**-**				**-**			
	3	25	6	2,02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	40	207.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	3	**25**	**6**	**2,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**1.887.256**		**980.135**	100	**700.000**		**-**				**980.135**			
	3	25	6	2,03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	0,5	87.256	0	-		700.000	0	-	0,0%	0,00%	-	-	0%	0%	
	3	25	6	2,03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	225	1.800.000	145,85	980.135	58	700.000	0	-	0,0%	0,00%	146	980.135	65%	54%	
																	0,00%	0,00%			16,21%	13,61%	
																	SR	SR			SR	SR	
																	2,93%	**2,09%**			**21,83%**	**19,51%**	
																	SR	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**99.757.130**		**40.749.773**		**17.090.106**		**1.664.695**				**42.414.468**			**DLH**
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**97.753.790**		**39.643.578**		**17.022.456**		**1.664.695**				**41.308.274**			**DLH**
	2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**97.753.790**		**39.643.578**		**17.022.456**		**1.664.695**				**41.308.274**			**DLH**
1	**2**	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**30.599.412**	**297,54**	**13.314.912**	**100**	**6.074.260**		**797.072**	**0%**	**13%**	**297,54**	**14.111.984**	**100,00%**	**46,12%**	
	2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**75.469**		**17.678**		**13.099**		**-**				**17.678**			
	2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	43.125	2	7.255	1	6.494	-	-	0%	0%	2	7.255	40,00%	16,82%	DLH
	2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.344	3	10.423	1	6.605	-	-	0%	0%	3	10.423	60,00%	32,22%	DLH
	2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**12.513.362**		**7.158.301**		**3.072.629**		**499.492**				**7.657.793**			
	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.820	12.513.362	42	7.158.301	14	3.072.629	3	499.492	21%	16%	45	7.657.793	2,47%	61,20%	DLH
	2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**589.128**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	330	327.793			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	261.334			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**2.293.116**		**2.025.202**		**659.604**		**81.844**				**2.107.046**			
	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	10	35.223	12	87.883	4	18.760	-	2.340	0%	12%	12	90.223	100,00%	256,15%	DLH
	2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	10	233.279	21	325.988	7	92.926	2	22.067	29%	24%	23	348.055	100,00%	149,20%	DLH
	2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	70.232	9	105.588	1	33.720	-	-	0%	0%	9	105.588	60,00%	150,34%	DLH
	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	301.706	10	294.639	3	114.469	1	7.041	33%	6%	11	301.680	73,33%	99,99%	DLH
	2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	29.519	3	14.220	1	5.888	-	810	0%	14%	3	15.030	30,00%	50,92%	DLH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	11	01	2.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.730	1.623.158	1026	1.196.884	343	393.842	85	49.586	25%	13%	1111	1.246.470	64,22%	76,79%	DLH
	2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**3.748.732**		**166.695**		**644.105**		**-**				**166.695**			
	2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	5	2.415.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	185	278.305	17	31.032	17	51.450	-	-	0%	0%	17	31.032	9,19%	11,15%	DLH
	2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	46	270.902	1	24.341	20	192.655	-	-	0%	0%	1	24.341	2,17%	8,99%	DLH
	2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	784.525	1	111.322	1	400.000	-	-	0%	0%	1	111.322	33,33%	14,19%	DLH
	2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**8.191.152**		**2.788.930**		**934.271**		**150.285**				**2.939.216**			
	2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	74.552	36	14.230	12	7.360	3	1.000	25%	14%	39	15.230	65,00%	20,43%	DLH
	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	180	2.444.145	36	297.245	12	155.311	3	20.685	25%	13%	39	317.930	21,67%	13,01%	DLH
	2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.630.105	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.042.350	36	2.477.456	12	771.600	3	128.600	25%	17%	39	2.606.056	65,00%	64,47%	DLH
	6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**3.188.454**		**1.158.107**		**750.551**		**65.450**				**1.223.556**			
	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	258.455	6	160.346	2	54.077	-	7.790	0%	14%	6	168.136	100,00%	65,05%	DLH
	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	35	1.586.663	66	905.601	25	451.544	6	53.060	24%	12%	72	958.661	100,00%	60,42%	DLH
	6	01	01	2.09	06	Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	305.857	44	92.160	15	44.930	5	4.600	33%	10%	49	96.760	100,00%	31,64%	DLH
	6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.037.478	0	-	1	200.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			12,66%	8,68%			44,63%	51,43%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	R	
2	**2**	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)**	**Dokumen**	**13**	**2.959.181**	**5**	**1.405.189**	**3**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**5**	**1.405.189**	**38,46%**	**47,49%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hulu**	**Persen**		**1.321.327**		**452.890**		**-**		**-**				**452.890**			
	2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	274.534	1	252.543		-	-	-	0%	0%	1	252.543	100,00%	91,99%	DLH
	2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.046.793	2	200.347		-	-	-	0%	0%	2	200.347	33,33%	19,14%	DLH
	2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun**	**Dokumen**		**1.637.854**		**952.299**		**-**		**-**				**952.299**			
	2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Disusun	Dokumen	2	884.414	1	348.249		-	-	-	0%	0%	1	348.249	50,00%	39,38%	DLH
	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	4	753.440	2	604.050		-	-	-	0%	0%	2	604.050	50,00%	80,17%	DLH
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)						58,33%	57,67%	
																Predikat Kinerja						R	R	
	2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Peningkatan Indeks Kualitas Air**	**Point**	**59,77**	**7.237.748**	**165,4**	**1.662.835**	**59,67**	**687.416**		**3.904**	**0%**	**1%**	**165,4**	**1.666.739**	**100,00%**	**23,03%**	
							Peningkatan Indeks Kualitas Udara	**Point**	**87,74**		**274,83**		**87,64**				**0%**		**274,83**		**100,00%**		
							Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Point**	**42,38**		**101,19**		**40,55**				**0%**		**101,19**		**100,00%**		
	2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persen**		**7.052.476**		**1.662.835**		**687.416**		**3.904**				**1.666.739**			
	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	5	1.922.201	2	133.927	1	186.530	-	-	0%	0%	2	133.927	40,00%	6,97%	DLH
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan Dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	576.081	1	6.950	1	74.176	-	-	0%	0%	1	6.950	20,00%	1,21%	DLH
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	3100	4.554.193	1299	1.521.958	600	426.710	150	3.904	25%	1%	1449	1.525.862	46,74%	33,50%	DLH
	2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten**	**Persen**		**185.272**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	120	185.272					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									8,33%	0,30%			26,69%	10,42%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
	2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati**	**Lokasi**	**11**	**22.496.321**	**2**	**3.539.013**	**2**	**936.000**		**-**	**0%**	**0%**	**2**	**3.539.013**	**18,18%**	**15,73%**	
	2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu**	**Persen**		**22.496.321**		**3.539.013**		**936.000**		**-**				**3.539.013**			
	2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	10	1.900.820	1	348.846	1	281.000	-	-	0%	0%	1	348.846	10,00%	18,35%	DLH
	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	32,8	19.850.945	2	3.190.168	1	655.000	-	-	0%	0%	2	3.190.168	6,10%	16,07%	DLH
	2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	15	232.441	0	0			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	512.115	0	0			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			4,02%	8,61%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
	2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**	**Persen**	**100**	**690.704**	**100**	**-**	**100**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**100**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
	2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Usaha yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3**	**Persen**		**690.704**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	296	690.704					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)													0,00%	0,00%	
								Predikat Kinerja													SR	SR	
	2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**752.563**	**100**	**-**	**100**	**-**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**100**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kinerja KPA Kabupaten dan pengawas lingkungan seta terlaksananya penaatan usaha/kegiatan di kab. Rokan Hulu**	**Persen**		**752.563**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	500	203.020					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	2	11	06	2.01	02	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	400	549.543					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan**	**Persen**	**100**	**370.217**	**100**	**-**	**100**	**-**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**100**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
	2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kabupaten dalam meningkatkan kebersihan dan keteduhannya**	**Persen**		**370.217**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	175	370.217					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**ada/tidak ada**	**Ada**	**845.422**	**Tidak Ada**	**-**	**Ada**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
	2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kabupaten yang meningkat kebersihan dan keteduhannya**	**Persen**		**845.422**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	57	845.422				-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**696.882**	**299,52**	**42.106**	**100**	**47.053**		**1.400**	**0%**	**3%**	**299,52**	**43.506**	**100,00%**	**6,24%**	
	2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup**	**Persen**		**696.882**		**42.106**		**47.053**		**1.400**				**43.506**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	21	262.262	20	42.106	8	47.053	-	1.400	0%	3%	20	43.506	95,24%	16,59%	DLH
	2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	4	434.620	0	0			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	2,98%			47,62%	8,29%	
																Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**Persen**	**19,18**	**31.105.339**	**58,04**	**19.679.523**	**19,11**	**9.277.727**		**862.320**	**0%**	**9%**	**58,04**	**20.541.843**	**100,00%**	**66,04%**	
	2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah**	**Persen**		**31.105.339**		**19.679.523**		**9.277.727**		**862.320**				**20.541.843**			
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5	386.794	1	1.420.419	1	1.163.495	-	270.720	0%	23%	1	1.691.139	20,00%	437,22%	DLH
	2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	206.459	26.357.841	6	13.496.285	2	790.913	-	39.000	0%	5%	6	13.535.285	0,00%	51,35%	DLH
	2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	18	359.166	3	79.917	3	77.157	-	-	0%	0%	3	79.917	16,67%	22,25%	DLH
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		Persen	100	331.538	100	3.202.846	100	3.315.600	25	552.600	25%	17%	125	3.755.446	100,00%	1132,74%	DLH
	2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15.073	3.670.000	7350	1.480.057	2472	3.797.046	-	-	0%	0%	7350	1.480.057	48,76%	40,33%	DLH
						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota							1	133.516	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			4,17%	7,48%			37,09%	336,78%	
																Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**2.003.340**		**1.106.194**		**67.650**		**-**				**1.106.194**			
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**2.003.340**		**1.106.194**		**67.650**		**-**				**1.106.194**			
	3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**	**Persen**	**100**	**2.003.340**	**100**	**1.106.194**	**100**	**67.650**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**100**	**1.106.194**		**55,22%**	
	3	**28**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu**	**Persen**		**2.003.340**		**1.106.194**		**67.650**		**-**				**1.106.194**			
	3	28	04	2.01		Pencegahan,Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Operasi	36	419.702	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	28	04	2.01		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Lokasi	1	440.687	1	810.800	1	67.650	-	-	0%	0%	1	810.800	100,00%	183,99%	DLH
	3	28	04	2.01		Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	1345	399.716	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	3	28	04	2.01		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa	1	380.682	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	3	28	04	2.01		Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	362.554	1	295.394			-	-	0%	0%	1	295.394	100,00%	81,48%	DLH
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																	0,00%	0,00%			40,00%	53,09%	
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																	**23,79%**	**19,51%**			**23,49%**	**47,84%**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU				**56.730.173**		**14.166.533**		**13.038.015**		**1.706.490**				**15.857.023**			DISDUKCAPIL
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**56.730.173**		**14.166.533**		**13.038.015**		**1.706.490**				**15.857.023**			DISDUKCAPIL
	2	**12**				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**				**56.730.173**		**14.166.533**		**13.038.015**		**1.706.490**				**15.857.023**			DISDUKCAPIL
1	**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**49.196.751**	**100**	**13.343.997**	**100**	**12.763.198**		**1.706.490**	**0%**	**13%**	**100**	**15.034.487**	**100,00%**	**30,56%**	
	2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**678.000**		**-**	**100**	**-**		**-**				**-**			
	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	7.500			0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	15	665.500			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**30.030.977**		**9.431.988**		**9.964.437**	**14,35**	**1.429.671**				**10.861.659**			
	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	30.018.977	14	9.431.988	14	9.964.437	4	1.429.671	29%	14%	14	10.861.659	100,00%	36,18%	
	2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapoaran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	12.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	
	2	12	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**337.500**		**100.300**		**-**		**-**				**100.300**			
	2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	272	85.000	1	100.300	0	-	-	-	0%	0%	0	100.300	0,00%	118,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	252.500	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**8.707.488**		**2.132.628**		**1.558.167**	**5,23**	**81.566**				**2.214.194**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	3	32.000	4	8.507	1	6.853	1	1.592	100%	23%	5	10.099	100,00%	31,56%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	60	5.465.188	18	1.035.097	5	862.739	1	36.477	20%	4%	19	1.071.574	31,67%	19,61%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	345.300	7	36.025	1	27.545	1	3.160	100%	11%	8	39.185	32,00%	11,35%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	75	1.280.000	23	237.973	5	159.735	1	19.999	20%	13%	24	257.972	32,00%	20,15%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	25.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	671	1.560.000	192	815.026	50	501.295	5	20.338	10%	4%	197	835.364	29,36%	53,55%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.139.300**		**29.600**		**-**	**100**	**16.000**				**29.600**			
	2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	200.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	130	129.000	20	29.600	0	-	-	-	0%	0%	20	29.600	15,38%	22,95%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	140	330.300	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	400.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	80.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**6.692.986**		**1.257.563**		**942.789**		**151.062**				**1.408.625**			
	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.605	24.986	775	7.750	500	5.000	120	1.200	24%	24%	895	8.950	19,44%	35,82%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	608.000	10	159.713	2	179.989	1	29.362	50%	16%	11	189.075	110,00%	31,10%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10	120.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.940.000	48	1.090.100	48	757.800	2	120.500	4%	16%	48	1.210.600	100,00%	20,38%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.610.500**		**391.919**		**297.805**	**9,47**	**28.191**				**420.110**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	178.000	1	78.816	1	50.670	-	5.200	0%	10%	1	84.016	100,00%	47,20%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	4	492.500	16	208.693	4	186.366	-	16.931	0%	9%	16	225.624	400,00%	45,81%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	135.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	520.000	100	94.410	125	60.769	1	6.060	1%	10%	100	100.470	100,00%	19,32%	DISDUKCAPIL
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	285.000	1	10.000	0	-	-	-	0%	0%	1	10.000	100,00%	3,51%	DISDUKCAPIL
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									29,79%	12,95%			47,03%	19,13%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			R	SR	
2	**2**	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan KTP Elektronik**	**Persen**	**100**	**4.318.423**	**197,05**	**800.790**	**100**	**274.817**		**-**	**0%**	**0%**	**197,05**	**800.790**	**100%**	**18,54%**	
							Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	**Persen**	**61,44**	**-**	**96,23**		**50,00**				**0%**		**96,23**		**100%**		
							Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	**Rasio**	**1,00**		**1,93**		**1,00**				**0%**		**1,93**		**100%**		
	2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**2.588.423**		**800.790**		**274.817**		**-**	**83%**			**800.790**			
	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	25	1.788.423	10	800.790	5	274.817	-	-	0%	0%	10	800.790	40,00%	44,78%	DISDUKCAPIL
	2	12	02	2.01	04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	8	800.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**02**	**2.01**		**Penataan pendaftaran penduduk**	**Persentase penataan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**600.000**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	12	02	2.01	02	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	12	600.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**840.000**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	12	02	2.03	03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	3	240.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	02	2.03	05	Sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Laporan	12	600.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**290.000**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	12	02	2.04	03	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Laporan	8	290.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
																	0,00%	0,00%			6,67%	7,46%	
																	SR	SR			SR	SR	
3	**2**	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun**	**Persen**	**98,09**	**2.005.000**	**193,95**	**16.172**	**97,59**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**193,95**	**16.172**	**100,00%**	**0,81%**	
							Rasio pasangan berakte nikah	**Persen**	**0,55**		**0,91**		**0**										
	2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan pencatatan sipil**	**Persentase layanan dalam penerbitan pencatatan sipil**	**Persen**		**1.200.000**	**-**	**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	20	255.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	16	465.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	03	2.01	05	Pengadaan dokumen selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	12	480.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Persen**		**680.000**	-	**16.172**		**-**		**-**				**16.172**			
	2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pencatatan sipil	Laporan	4	200.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	Laporan	16	480.000	1	16.172		-	0	-	0%	0%	1	16.172	6,25%	3,37%	DISDUKCAPIL
	2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Persen**		**125.000**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	12	03	2.03	04	Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	20	125.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
																					1,04%	0,56%	
																					SR	SR	
4	**2**	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan database kependudukan SIAK**	**Ada/Tidak Ada**	**Ada**	**760.000**	**Ada**	**5.574**	**Ada**	**-**		**-**	**0%**	**0%**	**Ada**	**5.574**	**100,00%**	**0,73%**	
	2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**	**Persen**		**200.000**	-	**5.574**		**-**		**-**	**57%**			**5.574**			
	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	4	120.000	1	5.574		-	-	-	0%	0%	1	5.574	25,00%	4,65%	DISDUKCAPIL
	2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	20	80.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**			**560.000**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	28	80.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	400.000				-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Dokumen	4	80.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
																					5,00%	0,93%	
																					SR	SR	
5	**2**	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu**	**Dokumen**	**1**	**450.000**		**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**0%**	**0%**	**1**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
	2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen profil kependudukan**	**Dokumen**		**450.000**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	225.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
	2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	4	225.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
																					0,00%	0,00%	
																					SR	SR	
															Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)		**14,90%**	**6,47%**			**11,95%**	**5,62%**	
															Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**77.061.258**		**20.254.275**		**8.597.310**		**1.829.641**				**22.083.915**			
	2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**77.061.258**		**20.254.275**		**8.597.310**		**1.829.641**				**22.083.915**			
	2 13 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**36.616.022**	**180**	**9.835.878**	**100**	**6.935.719**		**1.688.941**	**0%**	**24%**	**180**	**11.524.819**	**100%**	**31%**	
	2 13 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**241.117**		**30.852**		**4.450**		**-**				**30.852**			
	2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	78.647	9	30.852	3	4.450	-	-	0%	0%	9	30.852	60%	39%	DPMPD
	2 13 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	25	131.078	-	-		-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2 13 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	31.393	-	-		-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2 13 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**		**12.380.110**		**5.114.370**		**5.638.004**		**1.364.425**				**6.478.795**			
	2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	12.380.110	42	5.114.370	14	5.638.004	4	1.364.425	29%	24%	46	6.478.795	100%	52%	DPMPD
	2 13 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**5.382.858**		**1.393.370**		**384.442**		**79.140**				**1.472.509**			
	2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	817.611	30	40.744	10	25.032	3	6.280	30%	25%	33	47.024	66%	6%	DPMPD
	2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	238	881.936	128	229.408	50	69.712	10	19.148	20%	27%	138	248.555	58%	28%	DPMPD
	2 13 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	762.603	-	-		-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	665.624	24	297.411	5	48.728	2	12.335	40%	25%	26	309.746	100%	47%	DPMPD
	2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	63	483.876	28	129.391	15	38.252	3	8.203	20%	21%	31	137.594	49%	28%	DPMPD
	2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	28.347	-	-		-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.184	1.742.861	995	696.416	470	202.718	15	33.174	3%	16%	1.010	729.590	46%	42%	DPMPD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**		**6.593.000**		**696.117**		**-**		**-**				**696.117**			
	2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	820.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	1.302.500	2	127.492	-	-	-	-	0%	0%	2	127.492	22%	10%	DPMPD
	2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	975.000	8	345.113	-	-	-	-	0%	0%	8	345.113	57%	35%	DPMPD
	2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.205.000	1	223.512	-	-	-	-	0%	0%	1	223.512	25%	19%	DPMPD
	2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1.150.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	640.500	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**%**		**2.013.938**		**1.548.589**		**705.700**		**223.058**				**1.771.647**			
	2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7.090	70.906	2.020	16.200	1.530	2.500	50	500	3%	20%	2.070	16.700	29%	24%	DPMPD
	2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	539.632	16	143.740	3	60.000	1	11.595	25%	19%	17	155.335	100%	29%	DPMPD
	2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	73	1.403.400	38	1.388.649	15	643.200	3	210.963	20%	33%	41	1.599.612	56%	114%	DPMPD
	2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**%**		**10.005.000**		**1.052.580**		**203.123**		**22.318**				**1.074.898**			
	2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	886.368	3	195.678	1	36.778	0	9.256	25%	25%	3	204.934	65%	23%	DPMPD
	2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	1.763.873	20	785.781	7	137.570	1	6.331	14%	5%	21	792.112	60%	45%	DPMPD
	2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	1.700.838	6	22.513	-	-	-	-	0%	0%	6	22.513	20%	1%	DPMPD
	2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	1.133.892	45	48.609	17	28.775	4	6.732	24%	23%	49	55.340	66%	5%	DPMPD
	2	13	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	857.423	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.417.365	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.417.365	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	827.875	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			21,07%	22,10%			33,81%	18,85%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Pengentasan desa Tertinggal**	**Persen**	**38,46**	**5.150.995**	**201**	**416.980**		**-**		**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**201**	**416.980**	**100%**	**8%**	
	2	**13**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa Berkembang**	**Desa**	**5**	**5.150.995**		**416.980**		**-**		**-**				**416.980**			
	2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	10	819.966	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	50	1.924.160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Persen	100	607.550	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	24	376.500	20	416.980	-	-	-	-	0%	0%	20	416.980	83%	111%	DPMPD
	2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	709.060	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	5	713.758	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			13,89%	18,46%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerjasama antar desa**	**Desa**	**8**	**1.953.970**	**139**	**-**	**-**	**-**	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**139**	**-**	**100%**	**0%**	
	2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**	**Desa**	**8**	**1.953.970**	**-**	**-**		**-**	-	-	**0%**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	739.060	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	491.040	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	723.870	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase peningkatan status desa mandiri**	**Persen**	**11,5**	**24.144.649**	**65,47**	**6.609.596**		**1.121.412**		**140.700**	**#DIV/0!**	**13%**	**65**	**6.750.296**	**100%**	**28%**	
							Presentase Bumdesa yang Berkembang	**Persen**	**81,74**		**166,22**						**#DIV/0!**		**166**		**100%**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Status Desa Mandiri**	**Desa**	**2**	**24.144.649**		**6.609.596**		**1.121.412**		**140.700**				**6.750.296**			
	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	5	602.550	1	60.200	-	-	-	-	0%	0%	1	60.200	20%	10%	DPMPD
	2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5	468.452	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	5	602.550	1	91.541	-	-	-	-	0%	0%	1	91.541	20%	15%	DPMPD
	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	609.173	3	511.875	1	29.139	-	-	0%	0%	3	511.875	60%	84%	DPMPD
	2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	622.625	1	285.489	-	-	-	-	0%	0%	1	285.489	100%	46%	DPMPD
	2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	10	450.738	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	5	587.248	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	5	9.807.369	3	3.286.695	1	996.600	1	137.700	75%	14%	4	3.424.395	75%	35%	DPMPD
	2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	161	2.650.000	69	1.660.594	-	-	-	-	0%	0%	69	1.660.594	43%	63%	DPMPD
	2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	5	450.738	2	164.157	-	-	-	-	0%	0%	2	164.157	40%	36%	DPMPD
	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	5	491.040	1	108.672	-	-	-	-	0%	0%	1	108.672	20%	22%	DPMPD
	2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	159	1.165.100	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	5	681.883	1	62.955	1	16.005	-	-	0%	0%	1	62.955	20%	9%	DPMPD
	2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	587.248	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	60	1.785.089	27	333.454	15	39.360	1	3.000	7%	8%	28	336.454	47%	19%	DPMPD
	2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	5	486.040	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	5	425.664	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	1.671.140	1	43.963	1	40.308	-	-	0%	0%	1	43.963	20%	3%	DPMPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	16,33%	4,29%			25,81%	18,99%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK aktif**	**Persen**	**100**	**9.195.621**	**293,82**	**3.391.821**		**540.179**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**294**	**3.391.821**	**100%**	**37%**	
							Persentase Posyandu Aktif	**Persen**	**100**		**300,00**						**#DIV/0!**		**300**		**100%**		
							Persentase LPM Berprestasi	**Persen**	**100**		**112,23**						**#DIV/0!**		**112**		**100%**		
	2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif, Jumlah LPM Berprestasi,**	**%**		**9.195.621**		**3.391.821**		**540.179**		**-**				**3.391.821**				
	2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	5	622.776	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	5	1.260.778	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	1.270.928	2	94.909	1	66.946	-	-	0%	0%	2	94.909	40%	7%	DPMPD
	2	13	5	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	5	1.048.622	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD
	2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	25	1.137.950	5	21.080	-	-	-	-	0%	0%	5	21.080	20%	2%	DPMPD
	2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	714.035	1	130.316	-	-	-	-	0%	0%	1	130.316	10%	18%	DPMPD
	2	13	5	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	10	913.760	1	55.719	-	-	-	-	0%	0%	1	55.719	10%	6%	DPMPD
	2	13	5	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	5	1.093.288	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	1.133.484	3	3.089.796	1	473.233	-	-	0%	0%	3	3.089.796	60%	273%	DPMPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			15,56%	34,03%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**12,47%**	**8,79%**			**17,81%**	**18,07%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2					**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
	2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEAYANAN DASAR**				**33.469.548**		**29.236.329**		**12.209.140**		**660.650**				**29.896.979**			
	2	**14**	**01**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**33.469.548**		**29.236.329**		**12.209.140**		**660.650**				**29.896.979**			**DPPKB**
1	**2**	**14**	**01**	**2.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**21.696.947**	**195**	**12.742.974**		**5.295.655**		**660.650**	**#DIV/0!**	**12%**	**195**	**13.403.624**	**100%**	**62%**	
	2	**14**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**Dokumen**		**52.077**		**4.074**		**-**	**-**	**-**				**4.074**			**DPPKB**
	2	14	1	2,01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	9.999	2	1.998		-	0	-	0%	0%	2	1.998	20%	20%	DPPKB
	2	14	1	2,01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	8.000				-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Dokumen	4	8.000				-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD	Dokumen	4	8.000				-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2	05	Koordinasi dan penyusunsn Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000				-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ilkhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	10.078	1	2.076		-	0	-	0%	0%	1	2.076	20%	21%	DPPKB
	2	**14**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**15.402.560**		**10.014.773**		**4.119.502**		**599.606**				**10.614.379**			**DPPKB**
	2	14	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Orang Bulan	35	15.384.561	24	10.012.774	12	4.119.502	4	599.606	33%	15%	28	10.612.380	100%	69%	DPPKB
	2	14	1	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan	5	8.000	0	-		-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	9.999	1	1.999		-		-	0%	0%	1	1.999	20%	20%	DPPKB
	2	**14**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah**			**2.265.214**		**1.012.370**		**614.677**		**-**				**1.012.370**			**DPPKB**
	2	14	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/Peneragan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	104.139	9	52.051	3	11.363	0	-	0%	0%	9	52.051	60%	50%	DPPKB
	2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Paket	5	197.478	14	157.607	12	139.961	0	-	0%	0%	14	157.607	100%	80%	DPPKB
	2	14	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Paket	31	150.000	0	-		-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang terpenuhi	Paket	5	148.600	4	65.776	2	25.108	0	-	0%	0%	4	65.776	80%	44%	DPPKB
	2	14	1	2,06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	57	195.999	8	115.734	4	51.571	0	-	0%	0%	8	115.734	14%	59%	DPPKB

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	14	1	2,06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan oerundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	28.999	4	9.998	3	4.999	0	-	0%	0%	4	9.998	40%	34%	DPPKB
	2	14	1	2,07	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah dan luar daerah	Laporan	1137	1.439.999	782	611.204	760	381.675	0	-	0%	0%	782	611.204	69%	42%	DPPKB
	2	**14**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**830.000**		**165.552**		**-**		**-**				**165.552**			**DPPKB**
	2	14	1	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	1	470.000	0	-		-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	20	150.000	10	77.313		-		-	0%	0%	10	77.313	50%	52%	DPPKB
	2	14	1	2,08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	24	210.000	6	88.239		-		-	0%	0%	6	88.239	25%	42%	DPPKB
	2	**14**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**			**2.152.504**		**1.122.337**		**372.099**		**61.044**				**1.183.381**			
	2	14	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	Laporan	914	31.000	1300	17.000	700	7.000	-	-	0%	0%	1.300	17.000	100%	55%	DPPKB
	2	14	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, TV Kabel berlangganan	Laporan	15	271.504	9	111.238	3	52.499	3	8.944	100%	17%	12	120.182	80%	44%	DPPKB
	2	14	1	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	8	200.000	0	-		-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2,09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa teknis kantor, keamanan kantor dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta tenaga kebersihan kantor	Laporan	90	1.650.000	48	994.099	12	312.600	2	52.100	17%	17%	50	1.046.199	56%	63%	DPPKB
	2	14	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**994.592**		**423.868**		**189.377**		**-**				**423.868**			
	2	14	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	unit	5	294.999	3	159.089	1	73.974	0	-	0%	0%	3	159.089	60%	54%	DPPKB
	2	14	1	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	unit	133	352.858	72	206.189	25	91.813	22	-	88%	0%	94	206.189	71%	58%	DPPKB
	2	14	1	2,09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala	unit	16	195.000	0	-		-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	5	14	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	unit	162	151.735	50	58.590	46	23.590	0	-	0%	0%	50	58.590	31%	39%	DPPKB
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-	18,31%	3,71%			36,85%	31,36%	
														Predikat kinerja		-	SR	SR			SR	SR	
	2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase TFR (Total Fertility Rate)**	**rasio**	**2,41**	**2.935.381**	**7,43**	**677.334**		**300.150**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**7,43**	**677.334**	**100%**	**23%**	
	2	**14**	**2**	**2,01**		**Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk**	**Persentase TFR (total ferteliti Rate)**			**1.682.381**		**58.374**		**-**		**-**				**58.374**			**DPPKB**
	2	14	1	2,01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	dokumen	4	163.000	0	-				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	14	1	2,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang tersusun	dokumen	2	54.828	1	23.031		-		-	0%	0%	1	23.031	50%	42%	DPPKB
	2	14	1	2,01	05	Penguatan kerja sama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah MOU yang dilakukan	dokumen	12	225.581	0	0				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2,01	06	Penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non Formal	jumlah MOU yang dilakukan	dokumen	12	187.196	-	-				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	1	2,01	07	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal/kabupaten kota	dokumen	12	209.776	-	-				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2		1	2,01	08	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non formal sesuai isu lokal/kabupaten kota	dokumen	12	198.000	0	0				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	2	2,09	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah yang akan dilakukan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal	dokumen	12	236.000	1	35.343		-		-	0%	0%	1	35.343	8%	15%	DPPKB
	2	14	2	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Banuan Pendidikan	20	196.000	0	-				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	2	2.01	11	Implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat	jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Laporan	12	212.000	-	-				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	2	2,02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah kabupaten/Kota**	**Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota**			**1.253.000**		**618.960**		**300.150**		**-**				**618.960**			**DPPKB**
	2	14	2	2,02	02	Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Jumlah Dokumen pengolahan data kependudukan yang disusun	dokumen	4	217.000	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	2	2,02	03	Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Jumlah Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	dokumen	4	180.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	2	2.01	08	Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB yang tersedia	Unit	140	278.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	2	2.01	09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga yanf terlaksana	Laporan					1	45.000	0	-	0%	0%		-			
	2	14	2	2,02	10	Pemanfaatan Data hasil pemuktahiran data keluarga	jumlah Data hasil pemuktahiran data keluarga	dokumen	12	190.000	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	2	2,02	12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Data yang tercatat dan terkumpul	dokumen	16	188.000	3	276.465	2	111.150	0	-	0%	0%	3	276.465	19%	147%	DPPKB
	2	14	2	2,02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	dokumen	48	200.000	3	310.160	2	144.000	0	-	0%	0%	3	310.160	6%	155%	DPPKB
	2	14	2	2,02	14	Penyediaan data dan informasi Keluarga	Tersedianya data dan informasi Keluarga	Dokumen			1	32.335	-	-	1	-	0%	0%	2	32.335	0	0%	DPPKB
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			5,56%	23,94%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49**	**persen**	**76,5**	**6.147.556**	**200,01**	**11.251.730**		**3.535.665**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**200**	**11.251.730**	**100%**	**183%**	**DPPKB**
	2	**14**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai keakrifan Lokal**	**persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai keakrifan Lokal**			**1.921.468**		**4.179.590**		**1.179.612**		**-**				**4.179.590**			**DPPKB**
	2	14	3	2.04	01	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	jumlah Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Organisasi	4	306.000	2	199.977	12	171.262	0	-	0%	0%	2	199.977	50%	65%	DPPKB
	2	14	3	2.04	02	komunikasi, informasi dan edukasi(KIE) program kkbpk sesuai keakrifan budaya lokal	jumlah KIE Kearifan lokal	Dokumen	4	312.000	2,95	112.000	-	-	-	-	0%	0%	3	112.000	74%	36%	DPPKB
	2	14	03	2.04	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jumlah sarana KIE	Dokumen	16	263.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	03	2.04	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah media cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dokumen	12	227.000	3	324.964	1	100.350	0	-	0%	0%	3	324.964	25%	143%	DPPKB
	2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	jumlah rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	Laporan	140	372.000	10	1.323.190	10	320.000	0	-	0%	0%	10	1.323.190	7%	356%	DPPKB
	2	14	03	2.04	07	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan bangga Kencana	jumlah Operasional dan sarana di balai Penyuluhan bangga Kencana	Laporan	64	220.935	17	2.045.809	1	588.000	0	-	0%	0%	17	2.045.809	27%	926%	DPPKB
	2	14	03	2.04	08	Pengendalian program KKBPK	jumlah Program KKBPK yang terkendali	Laporan	580	220.533	224,5	173.650	-	-	0	-	0%	0%	225	173.650	39%	79%	DPPKB
	2	**14**	**03**	**02.01**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)**	**persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**742.710**		**1.953.434**		**435.000**		**-**				**1.953.434**			**DPPKB**
	2	14	03	02.01	06	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	4	268.355	1	278.000			0	-	0%	0%	1	278.000	25%	104%	DPPKB
	2	14	03	02.01	07	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	jumlah pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Laporan	20	215.000	9	254.434		-	0	-	0%	0%	9	254.434	45%	118%	DPPKB
	2	14	03	02.02		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	jumlah honor PPKBD yang tersedia	Orang	580	259.355	576	1.421.000	290	435.000	-	-	0%	0%	576	1.421.000	99%	548%	DPPKB
	2	**14**	**03**	**02.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota**	**Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB**			**2.765.791**		**3.506.777**		**1.505.207**		**-**				**3.506.777**			**DPPKB**
	2	14	03	02.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	136	206.862	128	93.500	51	34.425	0	-	0%	0%	128	93.500	94%	45%	DPPKB
	2	14	03	02.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	orang	140	226.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	03	02.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	jumlah kesertaan penggunaan metode kontraasepsi jangka panjang (MKJP)	orang	144	277.040	57	1.962.395	3884	1.440.070	0	-	0%	0%	57	1.962.395	40%	708%	DPPKB

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	14	03	02.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	jumlah Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	laporan	120	200.000	0	0				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	03	02.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	dokumen	16	49.835	4	17.835		-		-	0%	0%	4	17.835	25%	36%	DPPKB
	2	14	03	02.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	4	195.000	2	1.312.811		-		-	0%	0%	2	1.312.811	50%	673%	DPPKB
	2	14	03	02.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	jumlah Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	orang	120	210.487	60	75.575	0	-	0	-	0%	0%	60	75.575	50%	36%	DPPKB
	2	14	03	02.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	153	220.000	2	44.661	51	30.712	0	-	0%	0%	2	44.661	1%	20%	DPPKB
	2	14	03	02.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	jumlah Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	orang	248	221.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	03	02.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	140	210.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	03	02.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	jumlah Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	16	349.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	03	02.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	jumlah Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	orang	60	198.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	03	02.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	jumlah Kesertaan KB Pria	Orang	60	202.567	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	**14**	**03**	**02.04**		**pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb**				**717.587**		**1.611.929**		**415.846**		**-**				**1.611.929**			
	2	14	03	02.04	02	Integritasl Pembangunan lintas Sektor di Kampung KB	jumlah Integritas sektor Kampung KB	dokumen	16	234.028	2	6.750		0	0	-	0%	0%	2	6.750	13%	3%	DPPKB
	2	14	03	02.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Kampung Keluarga Berkualitas	jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Kampung Kb	kampung kb	4	258.559	61	1.511.392	75	415.846	0	-	0%	0%	61	1.511.392	100%	585%	DPPKB
	2	14	03	02.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	jumlah Pembinaan Terpadu kampung KB	Laporan	16	225.000	2	93.787			0	-	0%	0%	2	93.787	13%	42%	DPPKB
	2	14	03	02.04	05	Fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) dikampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dashat di kampung KB	kampung kb			12	51.216		-	0	-	0%	0%	12	51.216	0	0%	DPPKB
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			29,83%	173,94%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
	2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)**	**persen**	**57**	**2.689.664**	**210,01**	**4.564.291**		**3.077.670**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**210**	**4.564.291**	**100%**	**170%**	
	2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembanganan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**1.846.664**		**4.564.291**		**1.044.870**		**-**				**4.564.291**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	14	04	2.01	01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	klompok	28	214.471	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.022	91	650.039	10	130.000	0	-	0%	0%	91	650.039	100%	295%	DPPKB
	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.000	145	29.960		-		-	0%	0%	145	29.960	100%	14%	DPPKB
	2	14	04	2.01	04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	580	270.170	145	140.188		-		-	0%	0%	145	140.188	25%	52%	DPPKB
	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	580	248.000	148	3.272.521	402	723.099	0	-	0%	0%	148	3.272.521	26%	1320%	DPPKB
	2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	klompok	24	215.000	0	0		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersosialisasi	Laporan	35	233.000	13	386.038	7	51.514	0	-	0%	0%	13	386.038	37%	166%	DPPKB
	2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang tersosialisasi	Laporan	35	226.000	8	85.545	1	75.457	0	-	0%	0%	8	85.545	23%	38%	DPPKB
	2	14	04	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan /Dokumen					1	64.800			0%	0%	-	-	0	0%	DPPKB

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Tingkat Daerah kabupaten /kota dalam Pembangunan keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			**843.000**		**-**		**-**		**-**					**-**			
	2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	233.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	4	202.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	203.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	54	205.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
	2	**14**	**4**	**2.02**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana**		**0**	**-**		**1.946.700**		**2.032.800**	**0**	**-**				**-**	**1.946.700**			**DPPKB**
	2	14	4	2.02	0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	laporan	10	-	10	927.000	10	924.000	0	-	0%	0%	10	927.000	0%	0%	DPPKB
	2	14	4	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Laporan	10	-	10	1.019.700	10	1.108.800	0	-	0%	0%	10	1.019.700	0%	0%	DPPKB
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			25,88%	157,00%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
														Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**4,58%**	**0,93%**			**24,53%**	**96,56%**	
														Predikat kinerja dari seluruh program			**SR**	**SR**			**SR**	**ST**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**204.202.911**		**43.748.609**		**15.988.742**		**2.682.967**				**46.431.576**				
	2	**15**				**URUSAN PERHUBUNGAN**				**204.202.911**		**43.748.609**		**15.988.742**		**2.682.967**				**46.431.576**			
1	**2**	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100**	**83.443.725**	**89,9821**	**38.012.179**	**100**	**13.260.546**		**2.677.167**	**0%**	**20%**	**89,982066**	**40.689.345**	**90%**	**49%**	
	2	**15**	**1**	**2,01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**173.500**		**24.854**	**100**	**13.932**	**0%**	**-**				**24.854**			
	2	15	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	77.500	5	9.474	2	3.738	0	-	0,00%	0,00%	5	9.474	50,00%	12,22%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	62.000	3	8.189	1	5.097	0	-	0,00%	0,00%	3	8.189	60,00%	13,21%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	34.000	2	7.191	1	5.097	0	-	0,00%	0%	2	7.191	50,00%	21,15%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**16.217.681**		**7.886.339**	**100**	**3.371.126**	**10,71%**	**655.307**				**8.541.646**			
	2	15	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	2380	16.176.681	1328	7.877.167	518	3.368.566	111	655.307	21,43%	19,45%	1.439	8.532.474	60,46%	52,75%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	4	15.000	2	4.586	0	-	0	-	0,00	0,00	2	4.586	50,00%	30,57%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	laporan	4	26.000	2	4.586	2	2.560	0	-	0,00%	0,00%	2	4.586	50,00%	17,64%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah**	**persen**	**100**	**130.000**		**11.900**	**0**	**16.628**	**0%**	**-**				**11.900**			
	2	15	1	2,03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	laporan	4	75.000	2	6.900	1	11.519	0	-	0,00%	0,00%	2	6.900	50,00%	9,20%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	4	55.000	2	5.000	1	5.109	0	-	0,00%	0,00%	2	5.000	50,00%	9,09%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.540.000**		**139.050**	**0**	**40.000**	**0%**	**-**				**139.050**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkpannya	paket	432	540.000	101	79.709	0	-	0	-	0,00	0	101	79.709	23,38%	14,76%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	8	400.000	1	10.000	1	40.000	0	-	0,00%	0,00%	1	10.000	12,50%	2,50%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	400	600.000	89	49.341	0	-	0	-	0	0	89	49.341	22,25%	8,22%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.032.187**		**1.496.755**	**100**	**462.356**	**0%**	**-**				**1.496.755**			
	2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	10	118.000	5	37.410	1	5.280	0	-	0,00%	0,00%	5	37.410	50,00%	31,70%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	10	505.150	11	216.853	6	59.934	0	-	0,00%	0,00%	11	216.853	110,00%	42,93%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	40	592.220	13	83.817	4	21.919	0	-	0,00%	0,00%	13	83.817	32,50%	14,15%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	15	710.000	7	212.950	1	69.804	0	-	0,00%	0,00%	7	212.950	46,67%	29,99%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	10	44.800	0	-	0	-	0	-	0,00	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1.770	2.062.017	1154	945.726	674	305.420	0	-	0,00%	0,00%	1.154	945.726	65,20%	45,86%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**14.930.000**		**951.696**	**0**	**-**	**0%**	**-**				**951.696**			
	2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	14	5.950.000	1	782.312	0	-	0	-	0	0	1	782.312	7,14%	13,15%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	8	240.000	3	39.528	0	-	0	-	0	0	3	39.528	37,50%	16,47%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3	240.000	20	99.960	0	-	0	-	0	0	20	99.960	666,67%	41,65%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4	800.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	2	2.700.000	3	29.896	0	-	0	-	0	0	3	29.896	150,00%	1,11%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**42.609.164**		**25.844.161**		**8.878.984**	**13,89%**	**2.021.860**				**27.866.021**			
	2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	60	78.500	36	22.000	12	12.970	0	-	0,00%	0,00%	36	22.000	60,00%	28,03%	Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	35.539.664	36	21.923.538	12	7.623.414	3	1.814.760	25,00%	23,81%	39	23.738.298	65,00%	66,79%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	48	86.000	7	10.300	0	-	0	-	0,00%	0	7	10.300	14,58%	11,98%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	60	6.905.000	32	3.888.323	12	1.242.600	2	207.100	16,67%	16,67%	34	4.095.423	56,67%	59,31%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**3.811.193**		**1.657.424**	**100**	**477.520**	**0%**	**-**				**1.657.424**			
	2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	5	230.832	3	117.918	1	41.170	0	-	0,00%	0,00%	3	117.918	60,00%	51,08%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	120	2.919.411	67	1.312.325	20	426.130	0	-	0,00%	0,00%	67	1.312.325	55,83%	44,95%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	70	260.950	48	63.135	19	10.220	0	-	0,00%	0,00%	48	63.135	68,57%	24,19%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	400.000	3	164.046	0	-	0	-	0	0	3	164.046	150,00%	41,01%	Dinas Perhubungan
														Rata-rata capaian kinerja (%)			3,32%	3,15%			70,16%	24,38%	
														Predikat kinerja			SR	SR			S	SR	
2	**2**	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas kabupaten**	**Rasio**	**24,25**	**115.129.185**	**89,13**	**5.730.330**		**2.721.170**		**5.800**	**0%**	**0%**	**89**	**5.736.130**	**100%**	**5%**	
							Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	**Unit**	**25**		**108**						**0%**		**108**		**100%**		
							Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor	**Unit**	**10600**		**16557**						**0%**		**16.557**		**100%**		
							Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	**Persen**	**12**		**41,29**						**0%**		**41**		**100%**		
							Rasio izin trayek	**Rasio**	**0,003**		**0,001**						**0%**		**0**		**33%**		
	2	**15**	**2**	**2,01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten**	**Persen**	**100**	**950.000**		**-**	**0**	**-**	**0%**	**-**				**-**		**-**	
	2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	dokumen	1	700.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	dokumen	1	250.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten**	**Persen**	**100**	**83.000.000**		**3.294.011**	**100**	**2.447.000**	**0%**	**-**				**3.294.011**			
	2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	9	4.700.000	1	29.931	0	-	0	-	0	0	1	29.931	11,11%	0,64%	Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	paket	36	67.600.000	15	677.234	27	2.075.500	0	-	0,00%	0,00%	15	677.234	41,67%	1,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	9	450.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	paket	70	10.250.000	36	2.586.846	9	371.500	0	-	0,00%	0,00%	36	2.586.846	51,43%	25,24%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola**	**Persen**	**100**	**16.479.227**		**200.633**	**100**	**45.730**	**12,71%**	**5.800**				**206.433**			
	2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	dokumen	4	700.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	unit	6	13.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.03	3	Pengembangan sarana dan prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	unit	9	1.800.000	1	39.907	0	-	0	-	0	0	1	39.907	11,11%	2,22%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	10	479.227	6	160.726	2	45.730	0,25	5.800	12,71%	13%	6	166.526	62,54%	34,75%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**	**Persen**	**100**	**107.000**		**50.283**	**100**	**12.650**	**0%**	**-**				**50.283**			
	2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	10	107.000	7	50.283	1	12.650	0	-	0,00%	0%	7	50.283	70,00%	46,99%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persen**	**100**	**9.601.996**		**911.269**	**100**	**-**	**0%**	**-**				**911.269**			
	2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	5	5.800.000	1	139.330	0	-	0	-	0	0	1	139.330	20,00%	2,40%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	64000	1.865.000	9600	334.683	0	-	0	-	0,00%	0,00%	9.600	334.683	15,00%	17,95%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	60	1.875.000	22	418.295	0	-	0	-	0	0	22	418.295	36,67%	22,31%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	20	61.996	11	18.961	0		0	-	0,00%	0,00%	11	18.961	55,00%	30,58%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten**	**Persen**	**100**	**2.601.930**		**601.111**	**100**	**150.628**	**0%**	**-**				**601.111**			
	2	**15**	**2**	**2,06**	**1**	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	5	114.600	3	73.170	2	40.810	0	-	0,00%	0,00%	3	73.170	60,00%	63,85%	
	2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	paket	8	660.000	1	49.056	0	-	0	-	0	0	1	49.056	12,50%	7,43%	Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	102	1.575.330	50	448.974	41	103.568	0	-	0,00%	0,00%	50	448.974	49,02%	28,50%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	4	252.000	2	29.910	1	6.250	0	-	0,00%	0,00%	2	29.910	50,00%	11,87%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase persetujuan hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)**	**Persen**	**100**	**710.000**		**-**	**100**	**-**	**0%**	**-**				**-**		**-**	
	2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	dokumen	1	250.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.07	3	Koordinsi dan singkronisasi penilaian hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan	4	190.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	laporan	4	270.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan**	**Persen**	**100**	**454.000**		**17.594**	**100**	**11.258**	**0%**	**-**				**17.594**			
	2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	laporan	4	270.000	0	-	1	11.258	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	4	184.000	1	17.594	0	-	0	-	0	0	1	17.594	25,00%	9,56%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten**	**Persen**	**100**	**795.032**		**625.551**	**100**	**53.905**	**0%**	**-**				**625.551**			
	2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	8	567.772	3	188.008	1	48.965	0	-	0,00%	0,00%	3	188.008	37,50%	33,11%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	7	227.260	3	437.543	1	4.940	0	-	0,00%	0,00%	3	437.543	42,86%	192,53%	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**2**	**2.12**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten**	**Persen**	**100**	**430.000**		**29.878**	**100**	**-**	**0%**	**-**				**29.878**			
	2	15	2	2.12	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	5	430.000	1	29.878	0	-	0	-	0	0	1	29.878	20,00%	6,95%	Dinas Perhubungan
								Rata-rata capaian kinerja (%)									1,27%	1,27%			24,87%	19,92%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
3	**2**	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun**	**Persen**	**70**	**5.630.000**		**6.100**		**7.026**		**-**	**0%**	**0%**	**-**	**6.100**	**0%**	**0%**	
	2	**15**	**3**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau**	**Persen**	**100**	**5.630.000**		**6.100**	**0**	**7.026**	**0%**	**-**				**6.100**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	15	3	2.13	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	dokumen	4	230.000	1	6.100	1	7.026	0	-	0,00%	0,00%	1	6.100	25,00%	2,65%	Dinas Perhubungan
	2	15	3	2.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	unit	3	4.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	6	600.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	laporan	6	300.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			6,25%	0,66%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**1,53%**	**1,47%**			**33,76%**	**14,99%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**59.102.756**		**41.207.098**		**13.362.654**		**780.242**				**41.987.340**				
	2	**16**				**URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**57.842.684**		**40.269.233**		**12.205.861**		**769.390**				**41.038.623**				
1	**2**	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**23.920.535**	**300**	**13.572.248**	**100**	**5.667.252**	**100**	**477.580**	**100%**	**8%**	**400**	**14.049.828**	**100,00%**	**58,74%**	
	2	**16**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**144.000**		**3.577**	100	**-**	100	**-**				**3.577**			
	2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	50	48.000	1	3.577	0	-	0	-	0%	0%	1	3.577	2,00%	7,45%	Diskominfo
	2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	50	48.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	50	48.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**9.802.671**		**6.516.139**		**3.392.233**		**270.103**				**6.786.242**			
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangaan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	70	9.722.671	47	6.516.139	12	3.392.233	3	270.103	25%	8%	50	6.786.242	71,43%	69,80%	Diskominfo
	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	40.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	40.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	**16**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**266.500**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	142	106.500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	160.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**3.155.160**		**3.199.072**		**895.769**		**137.512**				**3.336.584**			
	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	188.006	27	232.462	12	75.599	0	-	0%	0%	27	232.462	45,00%	123,65%	Diskominfo

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	paket	85	665.753	31	840.387	12	320.704	3	42.515	25%	13%	34	882.902	40,00%	132,62%	Diskominfo
	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	60	399.733	17	596.128	2	130.997	3	29.997	100%	23%	20	626.125	33,33%	156,64%	Diskominfo
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	185.238	26	199.655	12	46.740	0	-	0%	0%	26	199.655	43,33%	107,78%	Diskominfo
	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	40.000	2	142.274	2	10.000	0	-	0%	0%	2	142.274	25,00%	355,69%	Diskominfo
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	8.445	1.676.430	1.838	1.188.165	100	311.729	0	65.000	0%	21%	1.838	1.253.165	21,76%	74,75%	Diskominfo
	2	**16**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**unit**		**2.010.000**		**356.592**		**-**		**-**				**356.592**			
	2	16	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1.100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	365.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	365.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	180.000	2	356.592	0	-	0	-	0%	0%	2	356.592	100,00%	198,11%	Diskominfo
	2	**16**	**1**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**		**5.581.268**		**2.587.567**		**1.109.399**		**15.286**				**2.602.853**			
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4.401	44.010	401	4.010	0	-	0	-	0%	0%	401	4.010	9,11%	9,11%	Diskominfo
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	3	262.658	8	231.868	3	110.999	1	15.286	33%	14%	9	247.154	100,00%	94,10%	Diskominfo
	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	325	5.274.600	133	2.351.689	1	998.400	0	-	0%	0%	133	2.351.689	40,92%	44,59%	Diskominfo
	2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**unit**		**2.960.936**		**909.300**		**269.851**		**54.679**				**963.980**			
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	222.198	3	265.357	1	114.012	1	10.000	100%	9%	4	275.357	80,00%	123,92%	Diskominfo
	2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	27	548.738	10	433.881	6	155.839	1	44.679	17%	29%	11	478.560	40,74%	87,21%	Diskominfo
	2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	1	135.062	0	-	0	-	0%	0%	1	135.062	20,00%	18,50%	Diskominfo

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	1	75.000	0	-	0	-	0%	0%	1	75.000	20,00%	10,27%	Diskominfo
														Rata-rata capaian kinerja (%)			23,08%	8,94%			26,64%	62,08%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	R	
2	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Daerah Informatif	21.309.764	Informatif	22.179.981	Informatif	4.745.609	Informatif	271.211	100%	6%	Informatif	22.451.192	100,00%	105,36%	
							Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM	16		36,25		87,5		31,25		36%		36		100,00%		
							Persentase aduan masyarakat terlayani	Persen	100		200		100		100		100%		200		100,00%		
	2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemmerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		21.309.764		22.179.981		4.745.609		271.211				22.451.192			
	2	16	2	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	60	187.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	60	187.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	04	Penyusunan Konten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	10.000	500.000	3001	503.859	1.000	44.522	100	10.375	10%	23%	3.101	514.234	31,01%	102,85%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	1.500	1.468.600	306	2.206.192	2	1.174.306	1	52.980	50%	5%	307	2.259.172	20,47%	153,83%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	4500	1.862.318	13	1.290.201	6	109.177	1	45.276	17%	41%	14	1.335.477	0,31%	71,71%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	07	Relasi Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	dokumen	500	15.827.046	288	15.414.291	100	2.540.604	25	108.830	25%	4%	313	15.523.121	62,60%	98,08%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	15	140.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	200.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen	100	157.200	100	70.300	0	-	0	-	0%	0%	100	70.300	100,00%	44,72%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	12	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	kegiatan	4	400.000	10	2.623.913	2	877.000	1	53.750	50%	6%	11	2.677.663	100,00%	669,42%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	380.600	1	71.225	0	-	0	-	0%	0%	1	71.225	50,00%	18,71%	Diskominfo
														Rata-rata capaian kinerja (%)			30,33%	15,94%			33,13%	105,39%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE	Persen	100	12.612.385	101,05	4.517.004	86,2	1.793.000	64,44	20.600	75%	1%	165,49	4.537.604	100,00%	35,98%	
							Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Persen	100		219,34		100		64,44		64%		283,78		100,00%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**Persen**	**90**		**198,27**		70		**48,27**		**69%**		**246,54**		**100,00%**		
							persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu	**Persen**	**100**		**64,48**		80				**0%**		**64,48**		**64,48%**		
	2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**dokumen**		**8.953.600**		**3.467.548**		**1.440.000**		**-**				**3.467.548**				
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	25	40.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	45	8.913.600	119	3.467.548	29	1.440.000	0	-	0%	0%	119	3.467.548	100,00%	38,90%	Diskominfo
	2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**dokumen**		**3.658.785**		**1.049.456**		**353.000**		**20.600**				**1.070.056**				
	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	20	48.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemeriintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	963.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	10	320.000	1	58.300	0	-	0	-	0%	0%	1	58.300	10,00%	18,22%	Diskominfo
	2	16	03	2.02	10	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	15	2.287.785	6	991.156	2	353.000	1	20.600	50%	6%	7	1.011.756	46,67%	44,22%	Diskominfo
	2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	dokumen	20	40.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
														Rata-rata capaian kinerja (%)			25,00%	2,92%			22,38%	14,48%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**890.072**		**142.458**		**54.670**		**10.852**				**153.310**			
	2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Data/informasi/ statistik yang terintegrasi**	**Ketersediaan**	**ada**	**890.072**	**ada**	**142.458**	**ada**	**54.670**	**ada**	**10.852**	**100%**	**20%**	**Ada**	**153.310**	**100,00%**	**17,22%**	
							Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah	**Persen**	**100**		**300**		**100**		100		**100%**		**400**		**100,00%**		
							Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	**Persen**	**100**		**300**		**100**		100		**100%**		**400**		**100,00%**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**dokumen**		**890.072**		**142.458**		**54.670**	**0**	**10.852**				**153.310**			
	2	20	02	2,01	01	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	5	556.920	2	118.158	1	54.670	0	10.852	0%	20%	2	129.010	40,00%	23,16%	Diskominfo
	2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	5	556.920	2	118.158	0	-	0	-	0%	0%	2	118.158	40,00%	21,22%	Diskominfo
	2	20	02	2,01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	10	55.692	2	10.800	0	-	0	-	0%	0%	2	10.800	20,00%	19,39%	Diskominfo
	2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	5	208.845	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	10	68.615	2	13.500	0	-	0	-	0%	0%	2	13.500	20,00%	19,67%	Diskominfo
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	19,85%			20,00%	15,07%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**370.000**		**795.406**		**1.102.123**		**-**				**795.406**			
	2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	**Persen**	**60**	**370.000**	**130,34**	**795.406**	**40**	**1.102.123**	20	**-**	**50%**	**0%**	**150**	**795.406**	**100,00%**	**214,97%**	
	2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**dokumen**		**370.000**		**795.406**	**40**	**1.102.123**	**40**	**-**				**795.406**			
	2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	6	30.000	2	205.462	1	50.422	-	-	0%	0%	2	205.462	33,33%	684,87%	Diskominfo
	2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	10	340.000	4	589.944	2	1.051.701	0	-	0%	0%	4	589.944	40,00%	173,51%	Diskominfo
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			36,67%	429,19%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	ST	
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)									**15,68%**	**9,53%**			**27,76%**	**125,24%**	
								Predikat kinerja dari seluruh program									**SR**	**SR**			**SR**	**ST**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**57.666.337**		**17.105.759**		**8.281.950**		**636.215**					**14.690.426**			Diskoptransnaker
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**57.666.337**		**17.105.759**		**8.281.950**		**636.215**					**14.690.426**			Diskoptransnaker
	2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**9.704.886**		**4.122.250**		**3.658.347**		**-**				**1.070.701**			Diskoptransnaker
1	**2**	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah dokumen tenaga kerja**	**Dokumen**	**1**	**120.000**		**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
	2	**07**	**02**	**2.1**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Persentase Penyusunan Rencana Tenaga kerja**	**Persen**	**100**	**120.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	07	02	2.1	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	120.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)					0,00%	0,00%	
																Predikat Kinerja					SR	SR	
	2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan**	**48**	**100**	**6.072.213**	**621**	**807.189**		**1.564.727**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**621**	**807.189**	**100,00%**	**13,29%**	
	2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan**	**Orang**	**212**	**4.695.301**		**807.189**		**1.564.727**		**-**				**807.189**			
	2	07	03	2.01	02	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	168	3.645.301	90	807.189	168	1.564.727	-	-	0%	0%	90	807.189	53,57%	22,14%	Diskoptransnaker
	2	07	03	2.01	03	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	195	1.050.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**Persen**	**78**	**688.456**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	78	688.456					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Persentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Persen**	**78**	**688.456**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	07	03	2.03	02	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	78	688.456					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)					13,39%	5,54%	
																Predikat Kinerja					SR	SR	
	2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**Orang**	**510**	**1.420.100**	**494**	**-**		**-**		**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**494**	**-**	**96,86%**	**0,00%**	
	2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**684.060**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	450	684.060					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persen**	**100**	**736.040**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	45	330.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	60	406.040					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Besaran kasus yang Diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**Persen**	**36,36**	**2.092.572**	**152,57**	**3.315.061**	**100**	**2.093.620**		**-**	**0%**	**0%**	**153**	**263.513**	**100,00%**	**12,59%**	
	2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**880.872**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Keputusan Peraturan Perusahaan	Keputusan	75	293.624					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama	Perusahaan	75	293.624					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	dokumen	50	293.624					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1.211.700**		**3.315.061**	**100**	**2.093.620**		**-**				**263.513**			
	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	25	374.832					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	150	172.114	90	71.942	30	10.000	-	-	0%	0%	90	71.942	60,00%	41,80%	Diskoptransnaker
	2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	50	313.926					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	5	350.828	3	191.571	1	56.260	-	-	0%	0%	3	191.571	60,00%	54,61%	Diskoptransnaker
	2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang			16585	3.051.548	10875	2.027.360		-	0%	0%	16.585	3.051.548	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)	-	-	0,00%	0,00%			17,14%	13,77%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**46.441.301**		**12.933.509**		**4.623.603**		**636.215**				**13.569.724**			Diskoptransnaker

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	**2**	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**27.856.401**	**200**	**9.883.784**	**100**	**3.966.359**		**636.215**	**0%**	**16%**	**200**	**10.519.999**	**200,00%**	**37,77%**	
	2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**35**	**178.535**		**13.262**		**5.000**		**2.500**				**15.762**			
	2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	25.505	3	13.262	1	5.000	-	2.500	0%	50%	3	15.762	60,00%	61,80%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	25.505					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	25.505					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	25.505					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	25.505					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	25.505					5	-	0%	0%	5	-	100,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	25.505					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**12.190.284**		**6.454.957**		**2.921.324**		**493.268**				**6.948.225**			
	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	12.139.274	42	6.448.145	14	2.916.324	4	490.708	29%	17%	46	6.938.853	65,71%	57,16%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	25.505	2	6.812	139	5.000	-	2.560	0%	51%	2	9.372	40,00%	36,75%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	25.505					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**324.926**		**36.278**		**39.660**		**-**				**36.278**			
	2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	217	223.718	36	36.278	36	29.660	-	-	0%	0%	36	36.278	16,59%	16,22%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	101.208			2	10.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**2.734.420**		**1.761.660**		**549.650**		**55.246**				**1.816.906**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	58.725	16	21.124	8	4.347	-	-	0%	0%	16	21.124	40,00%	35,97%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	410	235.839	91	343.902	7	45.276	2	9.249	29%	20%	93	353.150	22,68%	149,74%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	323.926	12	276.103	3	79.913	1	14.964	33%	19%	13	291.067	65,00%	89,86%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	85	189.295	53	87.890	15	36.195	5	10.050	33%	28%	58	97.940	68,24%	51,74%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	23.683	4	3.840		-	-	-	0%	0%	4	3.840	40,00%	16,21%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.345	1.902.952	1910	1.028.802	869	383.919	80	20.984	9%	5%	1.990	1.049.786	45,80%	55,17%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**9.257.782**		**119.663**		**-**		**-**				**119.663**			
	2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	35	6.579.729					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	300	647.852	60	119.663	0	-	-	-	0%	0%	60	119.663	20,00%	18,47%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-					-	-							
	2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.015.100					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.015.100					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**1.762.593**		**815.018**		**229.799**		**35.838**				**850.855**			
	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.000	30.362	1097	10.970	300	3.000	75	750	25%	25%	1.172	11.720	39,07%	38,60%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	189.295	6	71.846	2	31.799	1	5.488	50%	17%	7	77.334	46,67%	40,85%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	121.812	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	75	1.421.124	43	732.201	11	195.000	-	29.600	0%	15%	43	761.801	57,33%	53,61%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**1.407.860**		**682.946**		**220.927**		**49.362**				**732.309**			
	2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	159.933	3	170.331	1	58.205	-	18.856	0%	32%	3	189.187	60,00%	118,29%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	572.248	11	332.215	3	132.722	1	22.506	33%	17%	12	354.721	60,00%	61,99%	Diskoptransnaker

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	203.020	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	127.525	30	105.400	17	30.000	5	8.000	29%	27%	35	113.400	35,00%	88,92%	Diskoptransnaker
	2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	345.134	1	75.000	0	-	-	-	0%	0%	1	75.000	25,00%	21,73%	Diskoptransnaker
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									16,92%	20,24%			29,26%	32,68%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
3	**2**	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase KSP/USP yang memiliki izin**	**Persen**	**23**	**318.926**	**17,6**	**-**		**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**18**	**-**	**78,01%**	**0,00%**	
	2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**60**	**172.114**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	60	172.114					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**146.812**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	25	146.812					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)													0,00%	0,00%	
								Predikat Kinerja													SR	SR	
	2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang diperiksa**	**Koperasi**	**324**	**890.872**	**79**	**91.576**	**25**	**155.017**		**-**	**0%**	**0%**	**79**	**91.576**	**24,38%**	**10,28%**	
	2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persen**		**890.872**		**91.576**	**25**	**155.017**		**-**				**91.576**			
	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	500	546.644	69	91.576			-	-	0%	0%	69	91.576	13,80%	16,75%	Diskoptransnaker
	2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	500	344.228					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannnya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha					25	155.017	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							
																Predikat Kinerja							
	2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang berkualitas**	**Persen**	**19,3**	**459.090**	**57,02**	**-**		**-**		**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**57**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
	2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**0**	**459.090**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	300	306.060					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	15	153.030					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	JumlaH Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha			3	70.909			-	-	0%	0%	3	70.909	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)					0,00%	0,00%	
																Predikat Kinerja					SR	SR	
	2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian**	**Orang**	**290**	**2.071.576**	**126**	**597.368**		**56.832**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**126**	**597.368**	**43,45%**	**28,84%**	
	2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**1.122.221**		**291.761**		**56.832**		**-**				**291.761**			
	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	298	1.122.221	90	291.761	40	56.832	-	-	0%	0%	90	291.761	30,20%	26,00%	Diskoptransnaker
	2	**17**	**05**	**2.03**		**Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**949.355**		**305.607**		**-**		**-**				**305.607**			
	2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	Orang	298	949.355	109	305.607			-	-	0%	0%	109	305.607	36,58%	32,19%	Diskoptransnaker
																Rata-Rata Capaian Kenerja (%)					33,39%	29,09%	
																Predikat Kinerja					SR	SR	
	2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan**	**Koperasi**	**10**	**10.120.802**	**6**	**-**		**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**6**	**-**	**60,00%**	**0,00%**	
	2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persen**	**10**	**10.120.802**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	10	10.120.802					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
	2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah UMKM yang dibina**	**UMKM**	**25.000**	**2.193.432**	**43.901**	**135.886**		**445.395**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**43.901**	**135.886**	**100,00%**	**6,20%**	
	2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persen**		**2.193.432**		**135.886**		**445.395**		**-**				**135.886**			
	2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100.000	255.050	4700	135.886	-	-	-	-	0%	0%	4.700	135.886	4,70%	53,28%	Diskoptransnaker
	2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	210	153.030					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	3.000	255.050					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	290	1.530.302					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapsitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan keiwrausahaan	Orang			91	393.326	154	445.395	-	-	0%	0%	91	393.326	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)				0,00%	0,00%		1,18%	13,32%	
														Predikat Kinerja				SR	SR		SR	SR	
	2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM yang dikembangkan**	**Persen**	**280**	**2.530.201**	**1390**	**2.224.895**		**-**		**-**	**100%**	**#DIV/0!**	**1.390**	**2.224.895**	**100,00%**	**87,93%**	
	2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persen**		**2.530.201**		**2.224.895**		**-**		**-**				**2.224.895**			
	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	250	2.530.201	1001	1.649.179			-	-	0%	0%	1.001	1.649.179	100,00%	65,18%	Diskoptransnaker
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha			101	575.716			-	-	0%	0%	101	575.716	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							100,00%	65,18%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
														Predikat Kinerja							ST	R	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.520.151		50.000		-		-				50.000			Diskoptransnaker
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.520.151		50.000		-		-				50.000			Diskoptransnaker
4	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	3	1.520.151		50.000		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	50.000	0,00%	3,29%	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persen	3	1.520.151		50.000		-		-				50.000			
	3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	3	1.520.151	1	50.000	0	-	-	-	0%	0%	1	50.000	33,33%	3,29%	Diskoptransnaker
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							33,33%	3,29%	
														Predikat Kinerja							SR	SR	
														Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)			**2,82%**	**3,37%**			**18,05%**	**13,17%**	
														Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**55.713.868**		**27.532.165**		**9.298.882**		**1.233.149**					**28.765.314**			DPMPTSP
	2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**55.713.868**		**27.532.165**		**9.298.882**		**1.233.149**					**28.765.314**			DPMPTSP
1	**2**	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**45.795.712**	**165,294**	**24.211.605**	**100**	**8.727.961**		**1.233.149**	**0%**	**14%**	**165**	**25.444.754**	**100%**	**56%**	
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**	**6.057.724**	**200**	**209,999**	**100**				**0%**		**200**		**100%**		
	2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**12.500**		**3.500**	**1**	**1.500**		**-**				**3.500**			
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.000	1	1.000	0	-	0	-			1	1.000	50%	20%	DPMPTSP
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.500	3	2.500	1	1.500	0	-	0,00%	0,00%	3	2.500	60%	33%	DPMPTSP
	2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**28.221.062**		**14.897.580**	**100**	**5.907.518**		**879.191**				**15.776.771**			
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	28.213.562	14	14.897.580	14	5.906.018	4	879.191	28,57%	14,89%	14	15.776.771	100%	56%	DPMPTSP
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	7.500	0	-	1	1.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP
	2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.086.749**	**50**	**163.304**	**100**	**195.910**	**0**	**-**			**0**	**163.304**			
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	288	348.075	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	195	466.900	46	124.530	76	195.910	0	-	0,00%	0,00%	46	124.530	24%	27%	DPMPTSP
	2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	325	271.774	75	38.774		-	0	-			75	38.774	0%	0%	DPMPTSP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.729.292**	**99,28**	**3.040.626**	**100**	**856.393**		**49.610**				**3.090.236**			
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	470	38.309	100	97.573	8	8.349	0	-	0,00%	0,00%	100	97.573	21%	255%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	305	1.059.859	2748	1.365.382	71	192.506	13	34.575	18,31%	17,96%	2761	1.399.957	100%	132%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	217.636	10	74.088	5	43.992	0	-	0,00%	0,00%	10	74.088	100%	34%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	115	486.400	64	224.831	21	73.055	4	12.286	19,05%	16,82%	68	237.117	59%	49%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	26.995	3	13.248	1	5.499	1	2.750	100,00%	50,00%	4	15.998	80%	59%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10	37.808	7	17.596	2	247.468	0	-	0,00%	0,00%	7	17.596	70%	47%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.225	1.862.286	797	1.247.907	230	285.524	0	-	0,00%	0,00%	797	1.247.907	25%	67%	DPMPTSP
	2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.717.392**	**100**	**522.358**	**100**	**37.500**	**0**	**37.500**	**-**		**100**	**559.858**	**1,00**		
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	1.048.000	-	-	0	**-**	**0**		0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	15	259.392	98	323.180	50	37.500	50	37.500	100,00%	100,00%	148	360.680	100%	139%	DPMPTSP
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	780.000	2	199.178		-	0	-			2	199.178	67%	26%	DPMPTSP
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	31	630.000	0	-		-	0				0	-	0%	0%	DPMPTSP
	2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**6.688.384**	**100**	**3.870.811**	**100**	**1.338.930**		**219.409**			**100**	**4.090.220**			
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.378	36	17.100	12	8.130	4	2.010	33,33%	24,72%	40	19.110	67%	53%	DPMPTSP
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	15	643.006	9	432.680	3	240.000	3	44.899	25,00%	18,71%	12	477.579	80%	74%	DPMPTSP
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto yang disediakan	Laporan	60	6.009.000	72	3.421.031	12	1.090.800	2	172.500	16,67%	15,81%	74	3.593.531	100%	60%	DPMPTSP
	2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**3.340.332**	**100**	**1.713.426**	**100**	**390.211**		**47.439**				**1.760.865**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	231.965	1	111.663	1	48.803	1	2.694	100,00%	5,52%	1	114.357	100%	49%	DPMPTSP
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	1.082.415	8	636.638	8	310.591	2	44.745	25,00%	14,41%	8	681.383	100%	63%	DPMPTSP
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	52	153.952	83	69.945	46	30.818	0	-	0,00%	0,00%	83	69.945	100%	45%	DPMPTSP
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.872.000	4	895.181	0	-	0	-	0,00%	0,00%	4	895.181	100%	48%	DPMPTSP
														Rata-rata capaian kinerja (%)			**25,88%**	**15,49%**			**66,75%**	**55,63%**	
														Predikat kinerja			**SR**	**SR**			**R**	**R**	
2	**2**	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penigkatan Nilai Investasi Kabupaten/Kota**	**Persen**	**6,09**	**1.420.151**	**228,23**	**241.319**	**5,06**	**-**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**228,23**	**241.319**	**100%**	**17%**	
	2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**2**	**493.700**	**2**	**50.000**	-	**-**		**-**			2	50.000	100%	10%	DPMPTSP
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dala Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	493.700	2	50.000	**-**	**-**	-	**-**	0,00%	0,00%	2	50.000	100%	10%	DPMPTSP
	2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha**	Dokumen	**1**	**926.451**		**191.319**		**-**		**-**				**191.319**			
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	500.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	426.451	1	191.319			0	-	0,00%	0,00%	1	191.319	50%	45%	DPMPTSP
														Rata-rata capaian kinerja (%)							**50,00%**	**18,33%**	
														Predikat kinerja							**SR**	**SR**	
3	**2**	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**Investor**	**12**	**3.504.663**	**1**	**1.456.424**	**3**	**504.949**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**1**	**1.456.424**	**8%**	**42%**	
	2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pedoman dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**Dokumen**	**16**	**3.504.663**		**1.456.424**	**2**	**504.949**		**-**				**1.456.424**			DPMPTSP
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	11	2.793.051	6	1.456.424	2	504.949	0	-	0,00%	0,00%	6	1.456.424	55%	52%	DPMPTSP
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	711.612	0	-											
														Rata-rata capaian kinerja (%)			**0,00%**	**0,00%**			**27,27%**	**26,07%**	
														Predikat kinerja			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
4	**2**	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indek Kepuasaan Masyarakat**	**Persen**	**83,5**	**2.017.020**	**268,92**	**503.398**	**82,5**	**50.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**268,92**	**503.398**	**100%**	**25%**	
							Jumlah Izin yang diterbitkan	**Jumlah Izin**	**12.085**		**19.986**		**2.532**				**0,00%**		**19.986**		**100%**		
							Jumlah Nilai Investassi PMA/PMDN	**Rupiah**	**588.500.000.000**		**4.736.983.704.559**		**552.650.000.000**				**0,00%**		**4.736.983.704.559**		**100%**		
	2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**Jumlah Izin**	**12.085**	**2.017.020**		**503.398**		**50.000**		**-**			-	**503.398**	0%	25%	DPMPTSP
	2	18	4	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi	Pelaku Usaha	3.000	1.402.956	502	203.398	200	50.000	0	-	0,00%	0,00%	502	203.398	17%	14%	
	2	18	4	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara	Pelaku Usaha	25	204.999	3500	300.000			0	-	0,00%	0,00%	3500	300.000	100%	146%	
	2	18	4	2.01	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi	Kegiatan Usaha	875	409.065					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	
																Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00%**	**0,00%**			**16,73%**	**14,50%**	
																Predikat kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
5	**2**	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (LKPM)**	**Rupiah**	**5.298.000.000**	**2.697.021**	**6.245.844.747.743**	**1.119.419**	**1.113.000.000.000**	**15.972**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**6.245.844.747.743**	**1.119.419**	**100%**	**42%**	
	2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun**	**Persen**	**100**	**2.697.021**		**1.119.419**	**100**	**15.972**		**-**				**1.119.419**			
	2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	Persen	138	376.255	0	-	0	-									
	2	18	5	2.01	0004	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	138	376.255	0	-			0	0	0,00%	0,00%	0	0	0%	0%	DPMPTSP
	2	18	5	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	1.692	1.257.095	467	804.922	316	13.562	0	-	0,00%	0,00%	467	804.922	28%	64%	DPMPTSP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	18	5	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	372	687.417	28	314.497	120	2.410	0	-	0,00%	0,00%	28	314.497	8%	46%	DPMPTSP
														Rata-rata capaian kinerja (%)			**0,00%**	**0,00%**			**7,03%**	**21,96%**	
														Predikat kinerja			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
6	**2**	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Dokumen**	**4**	**279.300**	**-**	**-**	**1**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	-	**-**	**0%**	**0%**	
	2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan**	**Dokumen**	**4**	**279.300**		**-**		**-**		**-**			-	**-**	0%	0%	DPMPTSP
	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	4	279.300				**-**	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	DPMPTSP
														Rata-rata capaian kinerja (%)							**0,00%**	**0,00%**	
														Predikat kinerja							**SR**	**SR**	
														Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**6,47%**	**3,87%**			**27,96%**	**22,75%**	
														Predikat kinerja dari seluruh program			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2					**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**71.754.586**		**21.278.922**		**10.012.794**		**733.316**				**22.012.238**			
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**24.054.956**		**6.416.618**		**3.071.065**		**9.000**				**6.425.618**			
	2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan**	**Persen**	**37,10**	**10.062.399**	**46**	**2.794.218**		**1.333.327**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**46**	**2.794.218**	**100%**	**28%**	
	2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya di Daerah Daerah**	**Persen**		**863.579**		**-**		**-**		**-**				**-**		**-**	
	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	18	589.515	0	0			0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Orang	80	274.064	0	0			0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Yang diLestarikan**	**Persen**		**7.829.712**		**1.394.218**		**633.327**		**-**				**1.394.218**			
	2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	26	6.753.520	7	872.763	4	633.327	0	-	0%	0%	7	872.763	27%	13%	DISPARBUD
	2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Laporan	80	251.250	1	49.395	0	-	0	0	0%	0%	1	49.395	1%	20%	DISPARBUD
	2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	240	824.941	75	472.060	0	-	0	0	0%	0%	75	472.060	31%	57%	DISPARBUD
	2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat Dalam Daerah**	**Persen**		**1.369.109**		**1.400.000**		**700.000**		**-**				**1.400.000**			
	2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	18	351.492	3	1.400.000	1	700.000	0	-	0%	0%	3	1.400.000	17%	398%	DISPARBUD
	2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang	Orang	200	502.500	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang	Unit	300	515.117	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			9,51%	61,01%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**Group**	**120**	**8.987.178**	**183**	**2.811.772**		**1.488.438**		**-**	**100%**	**0%**	**183**	**2.811.772**	**100%**	**31%**	
	2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah**	**Persen**		**8.987.178**		**2.811.772**		**1.488.438**		**-**		**-**		**2.811.772**		**0**	

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan	Orang	8	1.786.576	0	-		-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikasi	20	110.000	0	-		-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	92	7.090.602	148	2.811.772	48	1.488.438	0	-	0%	0%	148	2.811.772	100%	40%	DISPARBUD
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			33,33%	13,22%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah sejarah didokumentasikan**	**Dokumen**	**22**	**900.161**	**6**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**0%**	**6**	**-**	**27%**	**0%**	
	2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah**	**Persen**		**900.161**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**			
	2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	5	402.000	0	-			0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	13	196.661	0	-			0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	4	301.500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	100%	0%	DISPARBUD
								Rata-rata capaian kinerja (%)													33,33%	0,00%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
	2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**Persen**	**25,98**	**1.911.633**	**9,04**	**677.854**		**249.300**		**9.000**	**#DIV/0!**	**4%**	**9,04**	**686.854**	**35%**	**36%**	
	2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**	**Persen**		**787.468**		**36.505**		**-**		**-**				**36.505**			
	2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	61	332.953	0	-		-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	6	454.515	2	36.505		-	0	0	0%	0%	2	36.505	33%	8%	DISPARBUD
	2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**	**Persen**		**1.124.165**		**641.349**		**249.300**		**9.000**				**650.349**			
	2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3	616.615	3	641.349	3	249.300	1	9.000	33%	4%	3	650.349	100%	105%	DISPARBUD
	2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	11	507.550	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPARBUD
								Rata-rata capaian kinerja (%)									33,33%	3,61%			33,33%	28,38%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi**	**Persen**	**23,62**	**2.193.586**	**13,3**	**132.774**		**-**		**-**	**0%**	**0%**	**13,3**	**132.774**	**56%**	**6%**	
	2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Museum**	**Persen**		**2.193.586**		**132.774**		**-**		**-**				**132.774**			
	2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit	60	1.633.251	0	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPARBUD
	2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	149	560.335	21	132.774	0	-	0	-	0%	0%	21	132.774	14%	24%	DISPARBUD
								Rata-rata capaian kinerja (%)													7,05%	11,85%	

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
														Predikat kinerja							SR	SR	
	3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**47.699.630**		**14.862.304**		**6.941.729**		**724.316**				**15.586.620**		**32,68**	
	3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran serta pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja**	**Persen**	**100**	**23.595.191**	**200**	**11.660.982**	**100**	**4.655.769**		**698.116**	**0%**	**15%**	**200**	**12.359.098**	**100%**	**52%**	
	3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Dokumen Perencanaan,Pengnggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**100**	**20**	**46.748**		**95.863**		**7.139**		**-**				**95.863**			
	3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.107	4	80.549	1	2.520	0	-	0%	0%	4	80.549	80%	665%	DISPARBUD
	3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	5	12.017	2	4.511	1	2.519	0	-	0%	0%	2	4.511	40%	38%	DISPARBUD
	3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	22.624	5	10.804	2	2.100	0	-	0%	0%	5	10.804	50%	48%	DISPARBUD
	3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**10.544.844**		**6.526.714**		**2.819.920**		**530.427**				**7.057.141**			
	3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70	10.534.693	26	6.521.754	14	2.817.460	3	530.427	21%	19%	26	7.052.181	100%	67%	DISPARBUD
	3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	8	10.151	4	4.959,80	2	2.460	0	-	0%	0%	4	4.960	50%	49%	DISPARBUD
	3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**		**611.800**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	105.525	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	506.275	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**Persen**		**3.334.725**		**1.266.484**		**475.410**		**-**				**1.266.484**			
	3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	29.960	21	13.471	11	7.849	0	-	0%	0%	21	13.471	47%	45%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	429	465.979	312	189.439	89	62.442	0	-	0%	0%	312	189.439	73%	41%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	29	146.444	15	29.140	8	25.425	0	-	0%	0%	15	29.140	52%	20%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	433.062	27	63.234	9	27.865	0	-	0%	0%	27	63.234	49%	15%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	18.039	3	6.402	1	2.112	0	-	0%	0%	3	6.402	60%	35%	DISPARBUD

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3112	2.241.240	937	964.798	350	349.718	0	-	0%	0%	937	964.798	30%	43%	DISPARBUD
	3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**		**1.918.445**		**46.520**		**-**		**-**				**46.520**			
	3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	420.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	650.436	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	32	245.865	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	263.143	4	29.000,00	0	-	0	-	0%	0%	4	29.000	25%	11%	DISPARBUD
	3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	189.000	1	17.520	0	-	0	-	0%	0%	1	17.520	14%	9%	DISPARBUD
	3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**		**5.091.288**		**2.965.891**		**1.054.484**		**167.689**				**3.133.580**			
	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2794	20.991	903	11.230	296	2.960	0	-	0%	0%	903	11.230	32%	53%	DISPARBUD
	3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	534.297	12	261.647	4	158.724	4	18.889	100%	12%	16	280.536	80%	53%	DISPARBUD
	3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	250	4.536.000	148	2.693.014	49	892.800	49	148.800	100%	17%	197	2.841.814	79%	63%	DISPARBUD
	3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**2.047.340**		**759.510**		**298.816**		**-**				**759.510**			
	3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	177.850	3	213.325	1	84.519	0	-	0%	0%	3	213.325	60%	120%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	895.332	21	501.635	6	202.547	0	-	0%	0%	21	501.635	50%	56%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35	100.500	18	6.300,00			0	-	0%	0%	18	6.300	51%	6%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	107	44.391	66	38.250	23	11.750	0	-	0%	0%	66	38.250	62%	86%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	530.268	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	189.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	85.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
																	13,03%	2,79%			36,13%	50,75%	
																	SR	SR			SR	R	
	3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan dikelola**	**Persen**	**18,27**	**20.321.774**	**22,47**	**2.665.910**		**1.889.582**		**26.200**	**#DIV/0!**	**1%**	**22**	**2.692.110**	**100%**	**13%**	
	3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Daya Tarik Wisata yang dikelola**	**Persen**		**2.180.995**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	9	454.515	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	7	606.020	0	-			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	8	1.120.460	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Persen**		**960.827**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	130.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	300.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	1	329.827	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	201.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**Persen**		**16.236.428**		**2.665.910**		**1.889.582**		**26.200**				**2.692.110**			
	3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.200	7	539.847	15	297.488	0	-	0%	0%	7	539.847	58%	27%	DISPARBUD
	3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan	Lokasi	12	9.454.988	3	385.993,90	2	233.500	0	-	0%	0%	3	385.994	25%	4%	DISPARBUD
	3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	12	4.342.177	117	1.740.069	28	1.358.594	5	26.200	18%	2%	122	1.766.269	100%	41%	DISPARBUD
	3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	3	409.064	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penetapan Tanda Daftra Usaha Pariwisata**			**943.525**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	66.000	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3	378.763	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	4	498.763	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			5,95%	0,64%			13,10%	5,10%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**orang**	**1.283.334**	**2.261.873**	**3.092.124**	**535.412**		**396.378**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**3.092.124**	**535.412**	**100%**	**24%**	
	3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata di dalam dan luar negeri**	**Persen**		**2.261.873**		**535.412**		**396.378**		**-**				**535.412**			
	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik	Dokumen	43	123.812	17	85.132	11	70.000	0	-	0%	0%	17	85.132	40%	69%	DISPARBUD
	3	26	03	2.01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	20	1.380.536	6	395.446	2	176.378	0	-	0%	0%	6	395.446	30%	29%	DISPARBUD
	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	454.515	1	54.834,00	1	150.000	0	-	0%	0%	1	54.834	33%	12%	DISPARBUD
	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar	Dokumen	9	303.010	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			25,72%	27,37%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI**	**Dokumen**	**11**	**492.450**	**0**	**-**		**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	
	3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persen**		**492.450**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	40	241.200	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	11	251.250	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
														Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
	3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di kembangkan**	**orang**	**250**	**1.028.341**	**0**	**-**		**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	
	3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persen**		**901.325**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	80	266.325	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	Orang	59	125.000	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar	Orang	40	135.000	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	20	135.000	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	85.000	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Orang	30	155.000	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persen**		**127.016**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	20	127.016	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																					SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**8,72%**	**1,17%**			**19,15%**	**19,77%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				**28.314.648**		**16.266.067**		**6.126.558**		**875.049**		**14,28%**		**17.141.116**			
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**28.314.648**		**16.266.067**		**6.126.558**		**875.049**		**14,28%**		**17.141.116**			
1	**2**	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**27.870.540**		**16.056.599**		**6.037.768**		**875.049**		**14,49%**		**16.931.648**			
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**97,60**	**25.860.606**	**192,0**	**12.483.284**		**5.758.816**		**875.049**		**15,19%**	**192**	**13.358.333**	**100%**	**52%**	
	2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**17.637**		**14.885**		**5.859**		**-**		0,00%		**14.885**			
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	8.496	6	6.375	2	2.500	-	-	0%	0,00%	6	6.375	60%	75%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	9.141	3	8.510	1	3.359	-	-	0%	0,00%	3	8.510	60%	93%	**DISPUSSIP**
	2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**8.758.232**		**8.191.553**		**3.910.137**		**698.433**		**17,86%**		**8.889.987**			
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1260	8.758.232	866	8.191.553	252	3.910.137	56	698.433	22,19%	17,86%	922	8.889.987	73%	102%	**DISPUSSIP**
	2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**		**84.000**		**15.000**		**-**	-	-				**15.000**			
	2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	120	84.000	55	15.000	0	-	-	-	0,00%	0,00%	55	15.000	46%	18%	DISPUSSIP
	2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**		**3.878.885**	**0**	**2.041.063**		**683.902**	**-**	**67.249**		**9,83%**		**2.108.312**			
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	87	280.257	30	25.655	5	9.869	1	285	12,87%	2,89%	31	25.940	35,22%	9,26%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	442	1.408.972	168	636.138	50	162.803	4	11.745	7,57%	7,21%	172	647.883	38,87%	45,98%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	115.375	23	103.472	10	23.299	2	4.028	17,84%	17,29%	25	107.501	49,57%	93,18%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	202	421.143	75	414.660	50	122.384	16	38.378	31,45%	31,36%	91	453.038	44,91%	107,57%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9	21.303	5	6.878	2	5.020	-	-	0,00%	0,00%	5	6.878	55,56%	32,28%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1436	1.631.835	760	854.260	305	360.528	23	12.813	7,48%	3,55%	782	867.073	54,49%	53,13%	**DISPUSSIP**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**9.273.982**		**338.135**		**280.000**	-	-			0	**338.135**			
	2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	308	800.000	33	338.135	1	30.000	-	-	0,00%	0,00%	33	338.135	10,71%	42,27%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8.313.982	0	-	1	250.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	160.000	-	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	**DISPUSSIP**
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.517.895**		**1.308.070**		**491.392**	**-**	**88.506**				**1.396.577**			
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2648	26.480	1008	9.740	550	5.500	138	300	25,00%	5,45%	1146	10.040	43,26%	37,92%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	334.415	8	205.881	3	128.892	1	28.706	23,28%	22,27%	9	234.588	57,99%	70,15%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120	2.157.000	66	1.092.449	20	357.000	5	59.500	25,00%	16,67%	71	1.151.949	59,17%	53,41%	**DISPUSSIP**
	2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**1.329.976**		**574.578**		**387.525**	**-**	**20.860**				**595.438**			
	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	227.867	3	126.912	1	47.270	0	2.150	22,29%	4,55%	3	129.062	62,86%	56,64%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	582.594	11	320.826	4	120.420	1	18.710	21,66%	15,54%	11	339.536	56,87%	58,28%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	127	186.505	56,00	51.840	8	9.835	-	-	0,00%	0,00%	56	51.840	44,10%	27,80%	**DISPUSSIP**
	2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	333.010	3	75.000	1	210.000	-	-	0,00%	0,00%	3	75.000	33,33%	22,52%	**DISPUSSIP**
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	12,04%	9,57%			44,29%	49,89%	
														Predikat kinerja	-	-	SR	SR			SR	SR	
	2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah**	**eksemplar**	**52.405**	**891.505**	**147.180**	**1.007.511**		**29.548**	-	-	**#DIV/0!**	**0,00%**	**147180**	**1.007.511**	**100,00%**	**113,01%**	
	2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**891.505**		**1.007.511**		**29.548**	-	-				**1.007.511**			
	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	8	161.505	2	307.511	2	19.548	-	-	0,00%	0,00%	2	307.511	25,00%	190,40%	**DISPUSSIP**
	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan			1	500.000			-	-	0,00%	0,00%	1	500.000	0,00%	0,00%	**DISPUSSIP**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	6300	730.000	1420	200.000	200	10.000	-	-	0,00%	0,00%	1420	200.000	22,54%	27,40%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-	0,00%	0,00%			23,77%	108,90%	
Predikat kinerja															-	-	SR	SR			SR	ST	
	2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat**	**Persen**	**0,0041**	**229.819**	**0,0002**	**82.874**		**57.520**	-	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,0002**	**82.874**	**4,88%**	**36,06%**	
	2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**229.819**		**82.874**		**57.520**	-	-				**82.874**			
	2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	120	229.819	60	82.874	30	57.520	-	-	0,00%	0,00%	60	82.874	50,00%	36,06%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-	0,00%	0,00%			50,00%	36,06%	
Predikat kinerja															-	-	SR	SR			SR	SR	
	2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio perpustakaan persatuan penduduk**	**%**	**0,0005**	**872.611**	**0,0016**	**2.482.930**		**141.884**	-	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,0016**	**2.482.930**	**100,00%**	**284,54%**	
	2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**872.611**		**2.482.930**		**141.884**	-	**-**				**2.482.930**			
	2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	16	160.000	4	230.305	4	56.998	-	-	0%	0,00%	4	230.305	25,00%	143,94%	DISPUSSIP
	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	65.000	1	2.168.837			-	-	0%	0,00%	1	2.168.837	100%	100%	
	2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	90	315.310	18	16.198	18	30.614	-	-	0,00%	0,00%	17,6274	16.198	19,59%	5,14%	DISPUSSIP
	2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	32	332.301	15	67.589	8	54.272	-	-	0%	0,00%	15	67.589	47%	20,3%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-	0,00%	0,00%			47,87%	67,35%	
Predikat kinerja															-	-	SR	SR			SR	S	
	2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang dilestarikan**	**Naskah**	**2**	**16.000**	**0**	**-**		**50.000**	-	-	**#DIV/0!**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0,0%**	
	2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**			**16.000**		**-**		**50.000**	-	-			**-**	**-**			
	2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	8	16.000	0	-	2	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja															-	-	SR	SR			SR	SR	
	2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**444.108**		**209.468**		**88.790**	-	**-**			**-**	**209.468**			
	2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**	**%**	**60**	**358.608**	**24,43**	**209.468**		**69.956**	-	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**24**	**209.468**	**41%**	**58,4%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**38.000**		**82.414**		**41.310**	-	-			**-**	**82.414**			
	2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	15	38.000	5	82.414	10	41.310	-	-	0,00%	0,00%	5	82.414	33%	216,9%	**DISPUSSIP**
	2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**%**	**100**	**40.604**		**10.000**		**-**	-	**-**			**-**	**10.000**			
	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1000	40.604	150	10.000	0	-	-	-	0%	0,00%	150	10.000	15%	24,6%	**DISPUSSIP**
	2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**%**	**100**	**280.004**		**117.054**		**28.646**	-	**-**			**-**	**117.054**			
	2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	1	80.000	1	60.454			-	-	0%	0,00%	1	60.454	100%	75,6%	**DISPUSSIP**
	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.004	1	56.600	1	28.646	-	-	0%	0,00%	1	56.600	25%	28,3%	**DISPUSSIP**
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	0,00%	0,00%			43,33%	86,34%	
														Predikat kinerja	-	-	SR	SR			SR	T	
	2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga**	**Arsip Statis**	**5200**	**68.000**	**268**	**-**		**18.834**	-	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**268**	**-**	**5%**	**0,0%**	
	2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Persen**	**100**	**40.000**		**-**		**18.834**	-	**-**				**-**			
	2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1000	40.000	0	-	250	18.834	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
	2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Persen**	**100**	**28.000**		**-**		**-**	-	**-**				**-**			
	2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	400	12.000	0	-		-	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
	2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip	200	8.000	0	-		-	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
	2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	200	8.000	0	-		-	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
														Predikat kinerja	-	-	SR	SR			SR	SR	
	2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**Izin**	**22**	**17.500**	**0**	**-**		**-**	-	**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0,0%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**17.500**		**-**		**-**	-	**-**				**-**			
	2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	20	17.500	0	**-**			-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																					SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**1,72%**	**1,37%**			**26,16%**	**43,57%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis;																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan agar proses pencairan bisa cepat dan lancar																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU																	
						UNSUR PILIHAN																	
						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				**112.469.078**		**28.034.543**		**15.010.671**		**2.467.331**				**30.501.875**			
	3	**27**				**PERTANIAN**				**112.469.078**		**28.034.543**		**15.010.671**		**2.467.331**				**30.501.875**			**Distanhorti**
	3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**%**	**100**	**72.673.912**	**200**	**21.496.647**	**100**	**12.261.234**		**2.442.011**				**23.938.658**			
							Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	**%**	**100**	**67.105.526**		**20.687.341**	**100**	**11.980.906**	**100**	**2.396.329**	**100%**	**20%**	**100**	**23.083.671**	**100%**	**34%**	
	3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persen**	**100**	**19.000**		**4.739,400**	**100**	**4.000**		**4.000**				**8.739**			
	3	27	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.000	2	2.587	1	2.500	1	2.500	100%	100%	3	5.087	60%	42%	Distanhorti
	3	27	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.000	2	2.152	1	1.500	1	1.500	100%	100%	3	3.652	60%	52%	Distanhorti
	3	**27**	**1**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**57.152.769**		**17.623.174**	**100**	**10.799.624**		**2.200.052**				**19.823.226**			
	3	27	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14	57.152.769	14	17.623.174	14	10.799.624	3	2.200.052	21%	20%	14	19.823.226	100%	35%	Distanhorti
	3	**27**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.609.158**		**1.201.445**	**100**	**332.879**		**61.633**				**1.263.078**			
	3	27	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	23.483	2	5.660	1	1.665	-	-	0%	0%	2	5.660	40%	24%	Distanhorti
	3	27	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	461.932	10	132.659	3	41.188	1	11.540	33%	28%	11	144.199	73%	31%	Distanhorti
	3	27	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	367.541	6	94.461	3	49.189	1	10.180	33%	21%	7	104.640	47%	28%	Distanhorti
	3	27	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	407.501	2	150.328	1	55.661	1	16.489	100%	30%	3	166.817	60%	41%	Distanhorti
	3	27	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.550	-	0		-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2277	3.322.150	2.293	818.337	1211	185.176	60	23.425	5%	13%	2.353	841.762	100%	25%	Distanhorti
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**	**5.568.386**	-	**809.306**	**100**	**280.329**	**-**	**45.682**	**-**		-	**854.987**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	**27**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	**80**	**3.620.000**		**344.646**	**0**	**27.598**		**-**				**344.646**			
	3	27	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	800.000	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	400.000	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	450.000	12	7.200	0	-	-	-	0%	0%	12	7.200,000	20%	2%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	400.000	7	138.500	2	27.598	-	-	0%	0%	7	138.500,000	16%	35%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.290.000	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	120.000	1	41.016		-	-	-	0%	0%	1	41.016	6%	34%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	160.000	2	157.930	0	-	-	-	0%	0%	2	157.930	25%	99%	Distanhorti
	3	**27**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**5.324.599**		**1.857.983**	**100**	**844.402**		**130.644**				**1.988.628**			
	3	27	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	23.400	12	6.900	12	2.000	3	500	25%	25%	12	7.400	100%	32%	Distanhorti
	3	27	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	663.199	12	178.183	12	114.002	3	12.044	25%	11%	12	190.228	100%	29%	Distanhorti
	3	27	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.638.000	12	1.672.900	12	728.400	3	118.100	25%	16%	12	1.791.000	100%	39%	Distanhorti
	3	**27**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.948.386**		**464.660**	**100**	**252.731**		**45.682**				**510.341**			
	3	27	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	426.431	2	139.350	2	88.081	1	7.342	50%	8%	2	146.691	100%	34%	Distanhorti
	3	27	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	706.975	5	254.950	5	135.150	1	28.840	20%	21%	5	283.790	100%	40%	Distanhorti
	3	27	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	94.980	74	29.360	32	9.500	32	9.500	100%	100%	106	38.860	100%	41%	Distanhorti
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	500.000	2	16.000		-	-	-	0%	0%	2	16.000	100%	3%	Distanhorti
	3	27	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000	1	25.000	1	20.000	-	-	0%	0%	1	25.000	25%	25%	Distanhorti

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	27	1	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	120.000	0	0	0	0	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
														Rata-rata capaian kinerja (%)			39,88%	30,80%			53,27%	27,64%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			R	SR	
	3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Padi**	**Ton/Tahun**	**27.992,80**	**21.375.966**	**60.524,72**	**1.132.047**	**26.604,52**	**216.678**		**-**	**0%**	**0%**	**60.525**	**1.132.047**	**100%**	**5%**	
	3	**27**	**2**	**0.1**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Persen**	**100**	**18.407.075**	0	**607.862**	**0**	**41.388**		**-**			**-**	**607.862**			
	3	27	2	0.1	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6	15.407.075	5	607.862	2	41.388	-	-	0%	0%	5	607.862	83%	4%	Distanhorti
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah Benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	6	3.000.000	0	0	0	-									
	3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yanag dikelola**	**Varietas**	**6**	**2.968.891**	0	**524.185**	**3**	**175.290**		**-**				**524.185**			
	3	27	2	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6	1.366.991	6	509.171	3	175.290	-	-	0%	0%	6	509.171	100%	37%	Distanhorti
	3	27	2	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	114.400	4	15.014	0	-	-	-	0%	0%	4	15.014	67%	13%	Distanhorti
	3	27	2	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	1.487.500	0	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			62,50%	13,58%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			R	SR	
	3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persen**	**80,00**	**6.358.827**	**185,46**	**3.538.390**	**72**	**1.294.400**		**-**	**0%**	**0%**	**185**	**3.538.390**	**100%**	**56%**	
	3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan**	**Ha**	**81**	**450.000**	**0**	**-**	**0**	**187.400**		**-**			**-**	**-**			
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	80	400.000		0	33	162.950	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	50.000	0	0	1	24.450	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun**	**Unit**	**37**	**5.908.827**		**3.538.390**	**6**	**1.107.000**		**-**				**3.538.390**			
	3	27	3	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	1.200.000	2	594.502	2	200.000	-	-	0%	0%	2	594.502	33%	50%	Distanhorti
	3	27	3	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	1.100.000		0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	3	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	2.358.827	8	2.652.713	4	800.000	-	-	0%	0%	8	2.652.713	67%	112%	Distanhorti

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3	27	3	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	1.250.000	7	291.176	1	107.000	-	-	0%	0%	7	291.176	58%	23%	Distanhorti
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			26,39%	30,88%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
	3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**	**Persen**	**100**	**1.459.001**	**300**	**173.865**	**100**	**114.135**		**-**	**0%**	**0%**	**300**	**173.865**	**100%**	**12%**	
	3	**27**	**5**	**2,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani**	**Persen**	**100**	**1.459.001**	0	**173.865**	**100**	**114.135**		**-**			**-**	**173.865**			
	3	27	5	2,01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1459	1.459.001	498	173.865	100	114.135	-	-	0%	0%	498	173.865	34%	12%	Distanhorti
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			34,13%	11,92%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
	3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina**	**Persen**	**60,00**	**10.601.372**	**93,13**	**1.693.595**	**45,00**	**1.124.224**		**25.320**	**0%**	**2%**	**93**	**1.718.915**	**100%**	**16%**	
	3	**27**	**7**	**2,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina**	**Kelompok**	**199**	**10.601.372**	0	**1.693.595**	**155**	**1.124.224**		**25.320**			**-**	**1.718.915**			
	3	27	7	2,01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	11	5.790.200	22	1.201.072	11	486.744	1	25.320	9%	5%	23	1.226.392	100%	21%	Distanhorti
	3	27	7	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	145	3.142.516	245	492.523	145	172.360	-	-	0%	0%	245	492.523	100%	16%	Distanhorti
	3	27	7	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	11	318.416	0	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	7	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	32	420.000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	7	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Petanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	930.240	0	0	102	465.120	-	-	0%	0%	-	-	100%	0%	Distanhorti
								Rata-rata capaian kinerja (%)									3,03%	1,73%	-	-	60,00%	7,37%	
								Predikat Kinerja									SR	SR	-		R	SR	
								Total Rata-Rata Capian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)									**8,58%**	**6,51%**			**47,26%**	**18,28%**	
								Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : (1) Kualitas SDM dan Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Serta Persiapan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Telah disipkan menjelang Pengesahan APBD; (2) Managemen Pembangunan Baik dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi sudhah Berjalan Sinergis.

Faktor Penghambat Pencapian Kinerja; (1)Terdapatnya Keterbatasan Sarana dan Pengetahuan Aparatur didalam Inplementasi PenarapanTransaksi Non Tunai ;(2) Adanya Kekhawatiran Terjadi Defisit Anggaran Yang Menyebabkan Tidak dilaksanakan Kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD//PERBEND/2018 Tanggal 06 November 2018 Tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2018 Dalam Hal Menyikapi Kondisi dan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018; (4) Sulitnya Proses Pencairan Keuangan

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya; (1)Perlu Dilakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Target dan Lokasi Yang Telah Ditetapkan Didalam RPJMD dan Rentra OPD; (2) Memberikan Pemahaman Tentang Petunjuk Teknis Penata Usahaan Dan laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Tentang Transaksi Non Tunai

Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya;(1) Memenuhi Pencapaian target YangTelah Ditetapkan Dalam RPJMD dan Rentra OPD;(2) Memprioritaskan Pada Pencapaian ProgramYang Hasil Evaluasinya Mempunyai Kinerja Sedang-Rendah-Sangat Rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**127.539.714**		**53.088.635**		**21.801.662**		**1.462.887**				**53.621.830**			
	3	**27**				**PERTANIAN**				**127.539.714**		**53.088.635**		**21.801.662**		**1.462.887**				**53.621.830**			
1	**3**	**27**	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100**	**46.146.430**	**192,60**	**22.274.695**	**100**	**9.393.853**	**2**	**1.462.887**	**2%**	**16%**	**195**	**23.737.582**	**100%**	**51%**	
	3	**27**	01	201		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Dokumen**	**10**	**24.557**		**8.883**		**3.677**		**-**				**8.883**			**Disnakbun**
	3	27	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.775	3	3.576	1	1.726	-	-	0%	0%	3	3.576	60%	30%	Disnakbun
	3	3	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	12.781	3	5.307	1	1.951	-	-	0%	0%	3	5.307	60%	42%	Disnakbun
	3	**27**	01	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	Persen	**100**	**27.571.153**		**15.245.018**		**6.579.710**		**1.314.992**				**16.560.010**			**Disnakbun**
	3	27	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	27.560.378	42	15.241.438	12	6.576.896	4	1.314.992	33%	20%	46	16.556.430	100%	60%	Disnakbun
	3	27	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	4	10.775	2	3.580	1	2.814	-	-	0%	0%	2	3.580	0%	33%	Disnakbun
	3	27	01	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persen	100	**609.700**		**206.042**		**40.800**		**-**				**206.042**			
	3	27	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	286	137.200	54	27.000	0	-	-	-	0%	0%	54	27.000	0%	20%	Disnakbun
	3	27	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	472.500	20	179.042	6	40.800	-	-	0%	0%	20	179.042	0%	38%	Disnakbun
	3	**27**	01	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	Persen	100	**3.447.744**		**1.382.732**		**529.418**		**-**				**1.382.732**			**Disnakbun**
	3	27	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	55	71.901	25	21.434	5	10.000	-	-	0%	0%	25	21.434	45%	30%	Disnakbun
	3	27	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	540	542.055	258	243.260	72	67.213	-	-	0%	0%	258	243.260	48%	45%	Disnakbun
	3	27	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	109	397.951	55	211.654	15	44.249	-	-	0%	0%	55	211.654	50%	53%	Disnakbun
	3	27	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	130	191.453	65	143.632	11	32.858	-	-	0%	0%	65	143.632	50%	75%	Disnakbun
	3	27	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.551	2	4.096	1	1.800	-	-	0%	0%	2	4.096	40%	15%	Disnakbun

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	27	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.664	2.217.832	1.013	758.656	140	373.298	-	-	0%	0%	1.013	758.656	38%	34%	Disnakbun
	3	**27**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.781.867**		**490.373**		**314.860**		**-**				**490.373**			
	3	27	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	1	450.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	3	750.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	6	300.000	4	263.200	5	39.750	-	-	0%	0%	4	263.200	0%	88%	Disnakbun
	3	27	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	140	581.867	28	227.172	14	145.110	-	-	0%	0%	28	227.172	0%	39%	Disnakbun
	3	27	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	12	1.000.000	-	-	1	130.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	12	700.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	**27**	01	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	**6.892.571**		**3.469.997**	100	**1.043.618**		**147.895**				**3.617.891**			**Disnakbun**
	3	27	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	21.810	36	10.160	12	4.200	-	-	0%	0%	36	10.160	60%	47%	Disnakbun
	3	27	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	617.956	36	289.813	12	118.418	3	23.895	25%	20%	39	313.708	65%	51%	Disnakbun
	3	27	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.252.804	36	3.170.023	12	921.000	2	124.000	17%	13%	38	3.294.023	63%	53%	Disnakbun
	3	**27**	01	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	**3.818.839**		**1.471.651**	100	**881.769**		**-**				**1.471.651**			**Disnakbun**
	3	27	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	209.761	3	187.653	1	69.687	-	-	0%	0%	3	187.653	100%	89%	Disnakbun
	3	27	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	1.132.227	95	838.930	22	287.843	-	-	0%	0%	95	838.930	100%	74%	Disnakbun
	3	27	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	207	123.523	108	43.560	57	16.240	-	-	0%	0%	108	43.560	52%	35%	Disnakbun
	3	27	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	995.639	6	391.508	2	285.000	-	-	0%	0%	6	391.508	75%	39%	Disnakbun
	3	27	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	24	1.357.689	1	10.000	2	223.000	-	-	0%	0%	1	10.000	4%	1%	Disnakbun
								Rata-rata capaian kinerja (%)									3,41%	2,44%			38,90%	38,11%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi peternakan (Populasi sapi, kerbau, kambing dan domba)	Ekor	71.185	20.191.541	167.207	5.290.232		2.820.191	-	-	0%	0%	167.207	3.910.695	100%	19%	Disnakbun
							- Populasi sapi dan kerbau	Ekor	52.449		111.702				-		0%	0%	111.702		100%		
							- Populasi kambing dan domba	Ekor	18.736		55.505				-		0%	0%	55.505		100%		
							Jumlah populasi perkebunan rakyat (Kelapa sawit, karet dan aren	Ton/Tahun	778.728		3.275.369				-		0%	0%	3.275.369		100%		
							- Kelapa sawit	Ton/Tahun	696.855		3.125.145				-		0%	0%	3.125.145		100%		
							- Karet	Ton/Tahun	81.857		150.178				-		0%	0%	150.178		100%		
							- Aren	Ton/Tahun	16		46				-		0%	0%	46		100%		
	3	27	02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.939.556		877.307		135.439		-				877.307			
	3	27	02	201	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	1.939.556	3	877.307	1	135.439	-	-	0%	0%	3	877.307	75%	45%	Disnakbun
	3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				18.251.985		4.412.925		2.684.752		-				3.033.387			Disnakbun
	3	27	02	206	0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	4.368	6.654.174	7.253	2.468.203			-	-	0%	0%	7.253	2.468.203	100%	37%	Disnakbun
	3	27	02	206	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	81,774	1.038.512	45	253.185	19	84.750	-	-	0%	0%	45	253.185	54%	24%	Disnakbun
	3	27	02	206	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	714	10.107.099	1.498	1.379.537	1.437	2.396.862	-	-	0%	0%	1.498				
	3	27	02	206	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	6.650	452.200	3.300	312.000	2.200	203.140	-	-	0%	0%	3.300	312.000	50%	69%	Disnakbun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			69,77%	43,93%	
														Predikat kinerja			SR	SR			S	SR	
3	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya penyediaan prasarana pendukung produksi peternakan dan perkebunan	Persen	67	53.424.188	37	23.147.791		8.681.366	-	-	0%	0%	37	23.597.637	55%	44%	Disnakbun
	3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Persen	100	200.000		-		717.466	-	-				449.846			
	3	27	03	201	0004	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	1	200.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	03	201	0004	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian (DBH SAWIT)	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	ha			2.607	449.846		475.000	-	-	0%	0%	2.607	449.846	0%	0%	Disnakbun
	3	27	03	201	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (DBH SAWIT)	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen		-				242.466	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	**27**	**03**	**202**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun**			**46.373.327**		**23.147.791**		**7.963.900**		**-**						**23.147.791**			**Disnakbun**
	3	27	03	202	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	28	3.680.847	1	148.957			-	-	0%	0%	1	148.957	4%	4%	Disnakbun
	3	27	03	202	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	216	37.922.520	121	22.346.538	44	7.963.900	-	-	0%	0%	121	22.346.538	56%	59%	Disnakbun
	3	27	03	202	0007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	675.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	03	202	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	2.794.960	4	652.296			-	-	0%	0%	4	652.296	27%	23%	Disnakbun
	3	27	03	202	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	15	1.300.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	**27**	**03**	**204**		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dkembangkan**			**6.850.862**		**-**		**-**		**-**						**-**			
	3	27	03	204	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	2	153.750					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	03	204	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha	4	6.131.408					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	03	204	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan	4	565.704					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			10,78%	10,79%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4	**3**	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**Persen**	**3,87**	**2.122.778**	**45,59**	**961.933**		**239.710**		**-**	**0%**	**0%**	**46**	**961.933**	**100%**	**45%**	
	3	**27**	**04**	**201**		**Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.070.568**		**961.933**		**215.710**	**-**	**-**				**961.933**			**Disnakbun**
	3	27	04	201	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	271.254	2	867.904			-	-	0%	0%	2	867.904	100%	320%	Disnakbun
	3	27	04	201	0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	36.750	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	04	201	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	3	181.025	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	04	201	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	3	581.539	1	94.029	1	215.710	-	-	0%	0%	1	94.029	33%	16%	Disnakbun
	3	**27**	**04**	**202**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola**			**158.397**		**-**		**24.000**	**-**	**-**				**-**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	27	04	202	0003	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	36.750					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	04	202	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	3	121.647			1	24.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	**27**	**04**	**203**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola**			**384.679**		**-**		**-**	**-**	**-**				**-**				
	3	27	04	203	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	4	158.397					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	27	04	203	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	226.282					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
	3	**27**	**04**	**204**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**			**509.134**		**-**		**-**	**-**	**-**				**-**				
	3	27	04	204	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	509.134					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			19,05%	48,02%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**	**Persen**	**100**	**2.036.534**	**200**	**848.130**		**125.340**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**200**	**848.130**	**100%**	**42%**	
	3	**27**	**04**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**			**2.036.534**		**848.130**		**125.340**		**-**				**848.130**			
	3	27	04	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	320	1.470.830	105	848.130	80	49.904	-	-	0%	0%	105	848.130	33%	58%	Disnakbun
	3	27	04	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	4	565.704	-	-	1	75.436	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			16,41%	28,83%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
5	**3**	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian**	**Persen**	**100**	**1.866.516**	**300**	**311.829**		**113.848**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**300**	**311.829**	**100%**	**17%**	
	3	**27**	**06**	**201**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.142.415**		**311.829**		**113.848**		**-**				**311.829**			**Disnakbun**
	3	27	06	201	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	2	347.985	2	249.673			-	-	0%	0%	2	249.673	100%	72%	Disnakbun
	3	27	06	201	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	3	794.430	1	62.156	1	113.848	-	-	0%	0%	1	62.156	33%	8%	Disnakbun
	3	**27**	**06**	**203**		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Persentase Izin Usaha Pengecer(Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**			**724.101**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	3	27	06	203	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4	724.101					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			66,67%	39,79%	
Predikat kinerja																	SR	SR			S	SR	
	3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina**	**Kelompok**	**34**	**1.751.728**	**13**	**254.025**		**427.354**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**13**	**254.025**	**38%**	**15%**	
	3	**27**	**07**	**203**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina**		**34**	**1.751.728**		**254.025**		**427.354**		**-**				**254.025**			
	3	27	07	201	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	16	1.187.978	3	187.894			-	-	0%	0%	3	187.894	19%	16%	Disnakbun
	3	27	07	201	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	18	563.750	5	66.131	5	44.820	-	-	0%	0%	5	66.131	28%	12%	Disnakbun
	3	27	07	201	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Laporan	1	1.134.347	1	915.963	1	382.534	-	-	0%	0%	1	915.963	100%	81%	Disnakbun
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			23,26%	13,77%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**0,49%**	**0,35%**			**34,98%**	**31,89%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**78.931.319**		**29.934.408**		**14.199.079**		**810.460**				**30.744.868**			
	3	**30**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**				**34.237.392**		**19.632.841**		**7.730.029**		**9.650**				**19.642.491**			
	3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**Persen**	**8**	**507.550**	**6,37**	**-**	**-**	**-**		**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**6**	**-**	**80%**	**0%**	
	3	30	02	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**Persen**		**507.550**		**-**	**-**	**-**		**-**				**-**			
	3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4	507.550	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
																Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00%	0,00%	
																Predikat kinerja					SR	SR	
1	**3**	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik**	**Persen**	**80**	**24.747.306**	**150,75**	**14.536.821**	**57**	**7.075.000**		**-**	**0%**	**0%**	**151**	**14.536.821**	**100%**	**59%**	
	3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Unit**		**23.326.165**		**14.536.821**		**7.075.000**		**-**				**14.536.821**			
	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	51	22.108.045	81	14.536.821	37	7.075.000	-	-	0%	0%	81	14.536.821	100%	66%	DISPERINDAG
	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Unit	4	1.218.120		-	-	-	-	-	0%	0%		-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdaganganyang sudah dibina**	**Dokumen**		**1.421.140**	0	**-**		**-**		**-**			-	**-**			
	3	30	03	2.01	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Perdagangan	Dokumen	4	710.570	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	30	03	2.01	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	710.570	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
																Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%	-	-	25,00%	16,44%	
																Predikat kinerja			SR	SR	-	-	SR	SR	
2	**3**	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Persen**	**22**	**782.829**	**5**	**4.049.810**	**3**	**46.830**		**-**			**5**	**4.049.810**			
	3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali**	**Dokumen**		**620.413**		**4.010.590**		**46.830**		**-**			**-**	**4.010.590**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD)		dengan RKPD Tahun 2024		2025		Divalidasi (Triwulan I 2025)		Tahun 2025		Tahun 2025		RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**78.931.319**		**29.934.408**		**14.199.079**		**810.460**				**30.744.868**			
	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	9	142.114	1	29.710	-	-	-	-	0%	0%	1	29.710	11%	21%	DISPERINDAG
	3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	5	193.612	2	29.099			-	-	0%	0%	2	29.099	40%	15%	DISPERINDAG
	3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5	284.687	2	3.951.782	1	46.830	-	-	0%	0%	2	3.951.782	40%	1388%	DISPERINDAG
	3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**		**162.416**		**39.220**		**-**		**-**			-	**39.220**			
	3	30	04	2.03	01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	9	162.416	1	39.220	-	-	-	-	0%	0%	1	39.220	11%	24%	DISPERINDAG
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			25,56%	362,05%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	ST	
3	**3**	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk Ekspor yang dikembang**	**Produk**	**14**	**913.590**	**0**	**-**	-	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Produk**		**913.590**	**0**	**-**	-	**-**		**-**				**-**			
	3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	6	609.060	0	**-**	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	8	304.530	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
								Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00%	0,00%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
4	**3**	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku**	**Persen**	**47,81**	**5.740.349**	**44,67**	**218.962**	**32,03**	**344.529**		**9.650**	**0%**	**3%**	**45**	**228.612**	**93%**	**4%**	
	3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur**	**Unit**		**5.740.349**		**218.962**		**344.529**		**9.650**				**228.612**			
	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	3840	3.918.780	2382	128.057	1857	240.694	-	4.990	0%	2%	2.382	133.047	62%	3%	DISPERINDAG
	3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	17	1.699.757	5	90.905	4	103.835	-	4.660	0%	4%	5	95.565	29%	6%	DISPERINDAG
	3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	12	121.812	**-**	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	3,28%			30,48%	3,01%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Partisipasi Pameran dan Promosi dalam rangka Pengenalan Produk Daerah**	**Kali**	**16**	**1.545.767**	**3**	**827.248**	**4**	**263.670**		**-**	**0%**	**0%**	**3**	**827.248**	**19%**	**54%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD)		dengan RKPD Tahun 2024		2025		Divalidasi (Triwulan I 2025)		Tahun 2025		Tahun 2025		RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460				30.744.868			
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali		1.545.767		827.248		263.670		-			-	827.248			
	3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	16	1.545.767	4	827.248	4	263.670	-	-	0%	0%	4	827.248	25%	54%	DISPERINDAG
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			25,00%	53,52%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	R	
	3	31				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				44.693.927		10.301.567		6.469.050		800.810				11.102.377			
5	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	IKM	37	15.401.151	5	1.675.142	9	1.283.662		-	0%	0%	5	1.675.142	14%	11%	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dokumen		15.401.151		1.675.142		1.283.662		-			-	1.675.142			
	3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	500.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	50.000	1	48.692	-	-	-	-	0%	0%	1	48.692	100%	97%	DISPERINDAG
	3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	13	2.087.575	1	292.326	1	230.487	-	-	0%	0%	1	292.326	8%	14%	DISPERINDAG
	3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	6	10.601.003	1	251.024	-	-	-	-	0%	0%	1	251.024	17%	2%	DISPERINDAG
	3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	16	2.087.574	2	1.083.100	1	1.053.175	-	-	0%	0%	2	1.083.100	13%	52%	DISPERINDAG
	3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Dokumen	1	75.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			22,81%	27,61%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	8	609.060	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		609.060	0	-	-	-		-			-	-			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD)		dengan RKPD Tahun 2024		2025		Divalidasi (Triwulan I 2025)		Tahun 2025		Tahun 2025		RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460				30.744.868			
	3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	4	406.040	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	203.020	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
																					0,00%	0,00%	
																					SR	SR	
	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS	Dokumen	7	421.812	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		421.812	0	-		-		-			-	-			
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	100.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
						Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	2	200.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
						Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	4	121.812	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
																					0,00%	0,00%	
																					SR	SR	
6	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	28.261.904	100	8.626.425	100	5.185.388		800.810	0%	15%	100	9.427.235	100%	33%	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		100		100		100				0%		100		100%		
	3	31	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	42	70.984		17.498		13.700		2.400			-	19.898			
	3	31	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.151	1	2.500	-	-	-	-	0%	0%	1	2.500	20%	22%	DISPERINDAG

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD)		dengan RKPD Tahun 2024		2025		Divalidasi (Triwulan I 2025)		Tahun 2025		Tahun 2025		RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**78.931.319**		**29.934.408**		**14.199.079**		**810.460**				**30.744.868**			
	3	31	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	11.151	1	2.500	1	2.400	1	2.400	100%	100%	2	4.900	40%	44%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.300	-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.000	-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.500	-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	18.230	5	4.999	4	4.500	-	-	0%	0%	5	4.999	25%	27%	DISPERINDAG
	3	**31**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persen	**100**	**15.419.972**		**5.422.117**	**100**	**3.477.966**		**619.876**				**6.041.993**			
	3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	15.407.321	28	5.417.118	14	3.472.966	4	619.876	29%	18%	32	6.036.993	46%	39%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	12.651	2	5.000	2	5.000	-	-	0%	0%	2	5.000	20%	40%	DISPERINDAG
	3	**31**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi**	**Persen**	**100**	**299.624**		**-**		**102.512**		**-**				**-**			
	3	31	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	56	56.000	0	-	56	47.600	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	243.624	0	-	8	54.912	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**Persen**	**100**	**2.452.778**		**1.045.595**	**100**	**789.889**		**44.574**				**1.090.168**			
	3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	26.413	10	5.254	12	6.967	-	1.668	0%	24%	10	6.922	25%	26%	DISPERINDAG
	3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	315	234.719	132	207.064	54	174.987	-	9.970	0%	6%	132	217.035	42%	92%	DISPERINDAG
	3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	45.939	10	104.164	6	73.234	-	8.902	0%	12%	10	113.066	33%	246%	DISPERINDAG
	3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	144.996	27	66.860	11	28.271	-	2.837	0%	10%	27	69.697	49%	48%	DISPERINDAG
	3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	25.243	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1625	1.975.467	1892	662.252	1231	506.430	-	21.196	0%	4%	1.892	683.448	100%	35%	DISPERINDAG

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD)		dengan RKPD Tahun 2024		2025		Divalidasi (Triwulan I 2025)		Tahun 2025		Tahun 2025		RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**78.931.319**		**29.934.408**		**14.199.079**		**810.460**				**30.744.868**			
	3	**31**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**	**100**	**2.785.402**		**544.485**	**100**	**-**		**-**				**544.485**			
	3	31	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	600.000			-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.150.000	1	506.600	-		-	-	0%	0%	1	506.600	50%	44%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	200	1.035.402	17	37.885	-	-	-	-	0%	0%	17	37.885	9%	4%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	**31**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	**2.395.658**		**874.282**	**100**	**431.465**		**69.444**				**943.726**			
	3	31	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	9.621	4	2.000	4	2.040	1	540	25%	26%	5	2.540	25%	26%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	382.118	6	77.605	3	108.425	-	15.404	0%	14%	6	93.009	40%	24%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	-	-	-		0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.003.919	12	794.677	12	321.000	3	53.500	25%	17%	12	848.177	100%	42%	DISPERINDAG
	3	**31**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Persen**	**100**	**4.837.485**		**722.448**	**100**	**369.857**		**64.517**				**786.964**			
	3	31	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	181.913	1	77.435	1	50.960	-	1.800	0%	4%	1	79.235	100%	44%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	861.820	12	414.638	6	283.697	-	59.527	0%	21%	12	474.164	100%	55%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	1.015.100	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	470	342.412	919	130.575	71	35.200	-	3.190	0%	9%	919	133.765	100%	39%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	812.080	1	99.800	-	-	-	-	0%	0%	1	99.800	100%	12%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	609.060	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD)		dengan RKPD Tahun 2024		2025		Divalidasi (Triwulan I 2025)		Tahun 2025		Tahun 2025		RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460				30.744.868			
	3	31	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.015.100	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8,93%	13,24%			37,88%	33,95%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**1,49%**	**2,75%**			**16,67%**	**49,66%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				**316.465.270**		**123.349.067**		**68.887.369**		**6.814.058**				**128.046.128**			Sekretariat Daerah
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**316.465.270**		**123.349.067**		**68.887.369**		**6.814.058**				**128.046.128**			Sekretariat Daerah
	2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**316.465.270**		**123.349.067**		**68.887.369**		**6.814.058**				**128.046.128**			Sekretariat Daerah
1	**2**	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan**	**Persen**	**95**	**1.611.771**	**200**	**361.342**		**99.742**		**9.362**	**#DIV/0!**	**9%**	**200**	**370.704**	**100,00%**	**23,00%**	
	2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1.611.771**		**361.342**		**99.742**	**-**	**9.362**				**370.704**			
	2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Daerah Kabupaten	Dokumen	5	332.135	1	72.081			-	-			1	72.081	20,00%	21,70%	Sekretariat Daerah
	6	01	01	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten	Berita acara	100	1.279.635	30	289.261	20	99.742	5	9.362	25%	9%	35	298.623	35,00%	23,34%	Sekretariat Daerah
														0			25,00%	9,39%			27,50%	22,52%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase Penetapan tanah ulayat**	**Persen**	**95**	**933.892**	**180**	**-**		**-**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**180**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
	2	**10**	**07**	**2.01**		**Penetapan Tanah Ulayat yangLlokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Tanah Ulayat yangLlokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**933.892**		**-**	**0**	**-**		**-**				**-**			
	2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam daerah kabupaten	Laporan	4	609.060					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	6	01	0	2.01	02	Penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen penetapan batas tanahulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota ole Bupati/walikota	Dokumen	4	324.832					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)						-	0,00%	0,00%	
														Predikat Kinerja						-	SR	SR	
2	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**90**	**231.615.753**	**190**	**86.970.512**		**47.159.967**		**5.487.217**	**#DIV/0!**	**12%**	**190**	**90.340.732**	**100,00%**	**39,00%**	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**90**		**185**						**#DIV/0!**		**185**		**100,00%**		
							Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan tatausaha, rumah tangga, protokoler dan komunikasi pimpinan	**Persen**	**90**		**175**						**#DIV/0!**		**175**		**100,00%**		
							Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	**Indeks**	**BB**		**B**						**100%**		**B**		**#VALUE!**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Indeks Reformasi Birokrasi	**Indeks**	**BB**		**CC**						**100%**		**CC**		**#VALUE!**		
							Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan	**Indeks**	**90**		**295,35**						**#DIV/0!**		**295,35**		**100,00%**		
	4	**01**	**02**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu**	**Persen**		**125.000**		**12.810**		**9.732**	**-**	**-**						**12.810**			
	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	125.000	9	12.810	5	9.732	-	-	0%	0%	9	12.810	40,91%	10,25%	Sekretariat Daerah
	4	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**99**	**58.072.378**		**27.772.114**		**15.720.817**	**-**	**2.107.803**						**29.879.917**			**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	88	58.072.378	192	27.772.114	109	15.720.817	-	2.107.803	0%	13%	192	29.879.917	100,00%	51,45%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persen**	**75**	**303.891**		**4.830**		**104.388**	**-**	**-**						**4.830**			**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	8.954	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	5	294.937	2	4.830	1	104.388	-	-	0%	0%	2	4.830	40,00%	1,64%	Sekretariat Daerah
	4	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**20**	**2.652.120**		**426.607**		**9.000**	**-**	**-**						**426.607**			**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.080	1.284.000	18	9.000	18	9.000	-	-	0%	0%	18	9.000	1,67%	0,70%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	100	150.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	3.200	1.015.100	1160	417.607			-	-	0%	0%	1160	417.607	36,25%	41,14%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	400	203.020	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	4	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**38.603.527**		**12.283.341**		**5.824.034**		**604.392**						**12.887.733**			**Sekretariat Daerah**
	4	1	1	2,06	"01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10.590	2.188.214	3.253	315.284	1.512	137.312	-	-	0%	0%	3.253	315.284	30,72%	14,41%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2,06	"02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72.071	1.716.956	24.047	890.682	8.718	374.810	1.387	59.652	16%	16%	25.434	950.334	35,29%	55,35%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2,06	"04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	781.797	9.879.975	350.765	2.919.412	174.240	1.200.127	1.690	11.600	1%	1%	352.455	2.931.012	45,08%	29,67%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2,06	"05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	64.636	573.133	10.825	200.425	14.405	97.696	-	-	0%	0%	10.825	200.425	16,75%	34,97%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2,06	"08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	11.672.435	21	2.166.991	12	1.071.070	3	193.515	25%	18%	24	2.360.506	50,00%	20,22%	Sekretariat Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4	1	1	2,06	"09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.110	12.572.815	1.077	5.790.547	678	2.943.019	169	339.625	25%	12%	1.246	6.130.172	40,06%	48,76%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**65**	**11.681.345**		**2.116.997**		**145.833**		**-**				**-**			**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	3	4.100.000	0	0			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	6	4.515.000	1	500.000			-	-			1	500.000	16,67%	11,07%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	669	1.806.659	290	471.050			-	-	0%	0%	290	471.050	43,35%	26,07%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	141	462.242	62	728.655	40	131.439	-	-	0%	0%	62	728.655	43,97%	157,63%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	308	141.471	1.012	409.292	31	14.394	-	-	0%	0%	1012	409.292	100,00%	289,31%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	5	655.973	1	8.000			-	-			1	8.000	20,00%	1,22%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**36.678.376**		**15.110.876**		**7.524.005**		**1.114.484**				**16.225.360**			Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Lapran	60	96.680	24	25.800	12	14.700	-	-	0%	0%	24	25.800	40,00%	26,69%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapran	60	11.486.086	24	4.997.073	12	2.459.503	3	495.620	25%	20%	27	5.492.693	45,00%	47,82%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapran	48	2.590.536	24	1.412.453	12	793.402	3	76.964	25%	10%	27	1.489.417	56,25%	57,49%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapran	60	22.505.075	24	8.675.550	12	4.256.400	3	541.900	25%	13%	27	9.217.450	45,00%	40,96%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**23.812.633**		**9.402.878**		**4.913.015**		**286.627**				**9.689.505**			Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,09	"01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sekretariat daerah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas jabatan (sekretariat daerah	Unit	10	2.347.598	4	1.037.585	2	605.340	2	23.547	100%	4%	6	1.061.132	60,00%	45,20%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,09	"02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	250	8.997.874	96	4.142.116	52	2.398.775	40	260.180	77%	11%	136	4.402.296	54,40%	48,93%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,09	"05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	223	327.986	77	70.470	13	45.500	-	-	0%	0%	77	70.470	34,53%	21,49%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,09	"06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23.006	7.208.754	5.761	1.553.549	1.363	792.735	-	-	0%	0%	5.761	1.553.549	25,04%	21,55%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,09	"09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	1.557.936	5	1.039.350	1	200.000	-	-	0%	0%	5	1.039.350	38,46%	66,71%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	49.031	3.372.485	12.907	1.559.808	10.340	870.665	35	2.900	0%	0%	12.942	1.562.708	26,40%	46,34%	Sekretariat Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4	**01**	**01**	**2,11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persen**		**4.583.207**		**1.983.617**		**1.413.968**		**283.654**				**2.267.271**			**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2,11	"01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	10	3.544.845	4	1.623.852	2	1.221.968	2	283.654	100%	23%	6	1.907.506	60,00%	53,81%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,11	"02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	200	918.362	82	335.765	42	168.000	-	-	0%	0%	82	335.765	41,00%	36,56%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,11	"03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	120.000	2	24.000	2	24.000	-	-	0%	0%	2	24.000	100,00%	20,00%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2,12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persen**		**19.023.010**		**7.278.996**		**4.401.941**		**250.970**				**7.529.966**			Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,12	"01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	297968,902	9.530.032	91.196	4.108.911	43.513	2.250.069	5.874	224.870	13%	10%	97.070	4.333.781	32,58%	45,47%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,12	"02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	137841,876	7.099.836	37.199	1.985.861	12.887	1.516.498	2.138	20.300	17%	1%	39.337	2.006.161	28,54%	28,26%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,12	"03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	75.128	2.393.142	24.699	1.184.224	11.282	635.374	1.797	5.800	16%	1%	26.496	1.190.024	35,27%	49,73%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2,13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi**	**Persen**		**8.918.685**		**1.070.862**		**451.126**		**-**				**1.070.862**			
	4	01	01	2,13	"01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	3.193.323	2	346.950	1	155.248	-	-	0%	0%	2	346.950	40,00%	10,86%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,13	"02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	1.986.576	2	306.524	1	101.177	-	-	0%	0%	2	306.524	40,00%	15,43%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,13	"03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	1.695.833	3	178.855	1	62.503	-	-	0%	0%	3	178.855	30,00%	10,55%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,13	"04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5	1.093.288	2	142.118	1	125.020	-	-	0%	0%	2	142.118	40,00%	13,00%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,13	"05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5	949.664	2	96.415	1	7.178	-	-	0%	0%	2	96.415	40,00%	10,15%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2,14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**		**27.161.579**		**9.506.584**		**6.642.108**		**839.287**				**10.345.871**			
	4	01	01	2,14	"01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	830	17.914.438	244	3.017.987	7	1.897.694	2	238.910	29%	13%	246	3.256.897	29,64%	18,18%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,14	"02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	58	2.436.994	9	3.488.140	3	2.694.684	1	509.495	33%	19%	10	3.997.635	17,24%	164,04%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,14	"03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	100	6.810.147	32	3.000.457	6	2.049.730	1	90.882	17%	4%	33	3.091.339	33,00%	45,39%	Sekretariat Daerah
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)								-	15,10%	5,25%			37,57%	39,51%	
								Predikat Kinerja								-	SR	SR			SR	SR	
3	**4**	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Skor LPPD**	**Skor**	**320**		**0**					**1.290.613**	**#DIV/0!**	**7%**	**0**	**34.545.480**	**0,00%**	**51,40%**	
							Indeks kinerja kecamatan	**Indeks**	**90,5**		**178**						**#DIV/0!**		**178**		**100,00%**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Persentase indeks pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	**Persen**	**100**	**67.205.977**	**290**	**33.254.867**		**19.694.781**			**#DIV/0!**		**290**		**100,00%**		
							Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	**Persen**	**95**		**282,4**						**#DIV/0!**		**282,4**		**100,00%**		
							Persentase penetapan produk hukum	**Persen**	**95**		**280**						**#DIV/0!**		**280**		**100,00%**		
	4	**01**	**02**	**2 01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**		**6.551.182**		**1.661.746**		**684.233**		**85.906**				**1.747.652**			
	4	01	02	2 01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokemen	23	2.196.061	8	371.218	2	211.578	-	9.200	0%	4%	8	380.418	34,78%	17,32%	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokemen	5	3.855.121	2	851.304	1	280.861	-	28.406	0%	10%	2	879.710	40,00%	22,82%	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokemen	1	500.000	3	439.224	2	191.794	-	48.300	0%	25%	3	487.524	100,00%	97,50%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**02**	**2 02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**		**54.703.874**		**29.107.097**		**17.904.639**		**1.119.793**				**30.226.890**			Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	Dokemen	5	23.872.891	2	22.647.097	1	13.809.639	-	1.119.793	0%	8%	2	23.766.890	40,00%	99,56%	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokemen	5	29.815.883	2	6.460.000	29	4.095.000	-	-	0%	0%	2	6.460.000	40,00%	21,67%	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokemen	64	1.015.100	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**02**	**2 03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum**	**Persen**		**5.240.283**		**1.843.807**		**883.292**		**73.003**				**1.916.810**			Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah)	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk hukum	4.260	3.196.826	1584	1.056.223	900	512.212	324	73.003	36%	14%	1908	1.129.226	44,79%	35,32%	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum (Sekretariat Daerah)	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	64	1.621.742	6	170.185	2	52.560	-	-	0%	0%	6	170.185	9,38%	10,49%	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Sekretariat Daerah)	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokemen	3.560	421.715	932	617.399	900	318.520	-	-	0%	0%	932	617.399	26,18%	146,40%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**02**	**2 04**		**Fasilitasi Kerjasama Daera**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif**	**Persen**		**710.637**		**642.218**		**222.617**		**11.911**				**654.129**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4	01	02	2 04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokemen	5	355.319	2	468.537	1	135.428	-	11.911	0%	9%	2	480.448	40,00%	135,22%	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2 04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokemen	15	355.319	5	173.680	3	87.189	-	-	0%	0%	5	173.680	33,33%	48,88%	Sekretariat Daerah
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			3,60%	7,08%			37,13%	57,74%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	R	
4	**4**	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian**	**persen**	**95**	**13.473.717**	**273**	**2.487.087**		**1.798.869**		**26.866**	**#DIV/0!**	**1%**	**273**	**2.513.953**	**100%**	**18,66%**	
							Persentase pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	**persen**	**98**		**292,31**						**#DIV/0!**		**292,31**		**100,00%**		
							Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	**persen**	**100**		**207,23**						**#DIV/0!**		**207,23**		**100%**		
							Persentase jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	**persen**	**19**		**40,43**						**#DIV/0!**		**40,43**		**100%**		
							Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	**persen**	**46**		**128,86**						**#DIV/0!**		**128,86**		**100%**		
							Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	**Indeks**	**4**		**139,89**						**#DIV/0!**		**139,89**		**100,00%**		
							Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif	**persen**	**90**		**285**						**100%**		**285**		**100,00%**		
	4	**01**	**03**	**2 01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian**	**Persen**		**3.042.449**		**703.809**		**287.615**		**-**				**703.809**			
	4	01	03	2.'01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokemen	5	587.248	2	425.616	1	97.248	-	-	0%	0%	2	425.616	40,00%	72,48%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.'01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	20	819.966	5	146.576	4	134.982	-	-	0%	0%	5	146.576	25,00%	17,88%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.'01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokemen	5	556.946	2	90.838	1	39.954	-	-	0%	0%	2	90.838	40,00%	16,31%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.'01	04	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokemen	20	486.040	6	40.778	2	15.431	-	-	0%	0%	6	40.778	30,00%	8,39%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.'01	05	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokemen	20	592.248	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**03**	**2 02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah**	**Persen**		**4.022.178**		**562.213**		**286.779**		**-**				**562.213**			
	4	01	03	2 02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokemen	10	1.093.288	4	161.988	2	74.021	-	-	0%	0%	4	161.988	40,00%	14,82%	Sekretariat Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4	01	03	2 02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	1.726.273	2	146.419	1	163.636	-	-	0%	0%	2	146.419	40,00%	8,48%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2 02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	1.202.617	2	253.806	1	49.122	-	-	0%	0%	2	253.806	40,00%	21,10%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**03**	**2 03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**		**5.644.729**		**1.097.956**		**1.138.576**		**26.866**				**1.124.822**			
	4	01	03	2 03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokemen	3	2.163.033	6	312.434	3	291.027	1	23.966	33%	8%	7	336.400	100,00%	15,55%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2 03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokemen	2	1.839.434	4	611.010	2	530.970	-	2.900	0%	1%	4	613.910	100,00%	33,37%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2 03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	75	1.642.261	26	174.511	25	316.579	-	-	0%	0%	26	174.511	34,67%	10,63%	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**03**	**2 04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persen**		**764.362**		**123.109**		**85.899**		**-**				**123.109**			
	4	01	03	2 04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokemen	5	415.134	2	71.256	1	38.140	-	-	0%	0%	2	71.256	40,00%	17,16%	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2 04	03	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokemen	5	349.228	2	51.853	1	47.759	-	-	0%	0%	2	51.853	40,00%	14,85%	Sekretariat Daerah
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									2,78%	0,73%			43,82%	19,31%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
5	**5**	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase penyelesaian tapal batas daerah**	**Persen**	**95**	**1.624.160**	**180**	**275.258**		**134.010**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**180**	**275.258**	**100,00%**	**16,95%**	
	5	**04**	**02**	**2 02**		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persen**		**1.624.160**		**275.258**		**134.010**		**-**				**275.258**			
	4	06	02	2.'02	04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang dijaga dan dipelihara	Dokemen	4	1.624.160	91	275.258	1	134.010	-	-	0%	0%	91	275.258	100,00%	16,95%	Sekretariat Daerah
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			100,00%	16,95%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			ST	SR	
								Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)									**9,30%**	**4,49%**			**41,00%**	**26,01%**	
								Predikat Kinerja dari Seluruh Program									**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

0

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**				**355.481.964**		**183.790.960**		**71.880.082**		**12.113.889**				**195.904.849**			
1	**4**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD**	**Persen**	**95**	**188.856.221**	**188**	**100.624.474**		**35.688.933**		**6.905.621**	**#DIV/0!**	**19,35%**	**188**	**107.530.095**	**100%**	**57%**	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**90**		**171**						**#DIV/0!**		**171**		**100%**		
							Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	**Persen**	**100**		**295**						**#DIV/0!**		**295**		**100%**		
	4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**			**12.774**		**5.091**		**2.073**		**-**				**5.091**			
	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	7.575	9	2.874	3	1.023	-	-	0,00%	0,00%	9	2.874	60%	38%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5.199	6	2.217	2	1.050	-	-	0,00%	0,00%	6	2.217	60%	43%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**19.118.875**		**10.225.989**		**3.898.877**		**757.754**				**10.983.743**			
	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	19.106.875	42	10.222.367	14	3.896.376	4	757.754	28,57%	19,45%	46	10.980.121	66%	57%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	8.000	2	2.189	1	1.508	-	-	0,00%	0,00%	2	2.189	50%	27%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	4.000	8	1.432	4	993	-	-	0,00%	0,00%	8	1.432	50%	36%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**300.000**		**4.028**		**34.528**		**-**				**4.028**			
	4	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	150.000	1	1.088	1	2.500	-	-	0,00%	0,00%	1	1.088	7%	1%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	150.000	4	2.940	2	32.028	-	-	0,00%	0,00%	4	2.940	11%	2%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan**			**4.592.951**		**476.231**		**227.547**		**-**				**476.231**			
	4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	510	237.900	204	77.660	60	48.000	-	-	0,00%	0,00%	204	77.660	40%	33%	Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
	4	02	01	2,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	4	200.000	0	-	1	19.044	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	300.000	0	-	2	22.407	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	13	3.166.557	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	688.494	43	398.571	13	138.096	6	-	46,15%	0,00%	49	398.571	82%	58%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**7.336.687**		**5.456.068**		**1.332.942**		**115.104**				**5.571.172**			Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2.265	182.029	1026	70.644	172	16.321	-	-	0,00%	0,00%	1.026	70.644	45%	39%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.845	1.062.482	6.239	2.161.998	1.003	224.474	-	-	0,00%	0,00%	6.239	2.161.998	100%	203%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	256.636	76	58.859	37	4.394	-	-	0,00%	0,00%	76	58.859	100%	23%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	149.600	3.358.404	108.224	1.744.817	42.469	678.135	8.493	100.074	20,00%	14,76%	116.717	1.844.891	78%	55%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11.360	453.419	12.007	231.478	10.473	51.185	1.045	3.600	9,98%	7,03%	13.052	235.078	100%	52%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	90.200	164.112	20.245	25.780	12.231	18.148	-	-	0,00%	0,00%	20.245	25.780	22%	16%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	941	1.559.605	600	1.105.862	90	288.942	3	11.430	3,33%	3,96%	603	1.117.292	64%	72%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	36	150.000	12	7.790	2	7.814	-	-	0,00%	0,00%	12	7.790	33%	5%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	120	150.000	1	48.840	1	43.529	-	-	0,00%	0,00%	1	48.840	1%	33%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**			**6.730.051**		**842.338**		**1.654.071**		**-**				**842.338**			Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	3.280.000	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.200.000	1	290.700	1	399.289	-	-	0,00%	0,00%	1	290.700	20%	24%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	247.517	15	113.888	282	994.750	-	-	0,00%	0,00%	15	113.888	30%	46%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	650.000	0	-	4	48.820	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	30	150.000	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
	4	02	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	100.000	1	43.845	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	43.845	50%	44%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	400.000	0	-	2	150.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	110	552.534	201	393.905	4	21.212	-	-	0,00%	0,00%	201	393.905	100%	71%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	150.000	0	-	1	40.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**			**6.873.066**		**4.003.672**		**1.432.728**		**157.177**				**4.160.849**			Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.545	45.450	830	20.150	500	9.000	-	-	0,00%	0,00%	830	20.150	18%	44%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	920	683.116	244	285.182	48	137.928	3	22.777	6,25%	16,51%	247	307.959	27%	45%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	102.500	1	24.000	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	24.000	50%	23%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	315	6.042.000	156	3.674.341	48	1.285.800	2	134.400	4,17%	10,45%	158	3.808.741	50%	63%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi**			**5.452.202**		**2.663.444**		**421.496**		**3.398**				**2.666.842**			Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	988.127	3	141.977	1	57.843	-	-	0,00%	0,00%	3	141.977	18%	14%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130	1.443.571	70	739.408	26	150.522	2	3.398	7,69%	2,26%	72	742.806	55%	51%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	43.101	13	12.000	16	13.500	-	-	0,00%	0,00%	13	12.000	100%	28%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	415	1.290.120	294	639.883	50	72.631	-	-	0,00%	0,00%	294	639.883	71%	50%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	60.000	0,54	10.800	1	20.000	-	-	0,00%	0,00%	1	10.800	2%	18%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5	83.000	1	19.600	2	20.000	-	-	0,00%	0,00%	1	19.600	20%	24%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	1.404.283	11,64	1.072.376	1	47.000	-	-	0,00%	0,00%	12	1.072.376	90%	76%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	88	80.000	5	27.400	1	20.000	-	-	0,00%	0,00%	5	27.400	6%	34%	Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
	4	02	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	60.000	0	-	1	20.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Sesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan dan Sesejahteraan DPRD yang dilaksanakan**			**135.957.398**		**75.833.561**		**25.987.350**		**5.872.188**				**81.705.749**			Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	70	130.770.730	42	73.459.773	14	24.751.438	4	5.872.188	28,57%	23,72%	46	79.331.961	66%	61%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1.232	3.396.600	700	1.616.202	363	897.500	-	-	0,00%	0,00%	700	1.616.202	57%	48%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	225	1.790.068	117	757.587	45	338.412	-	-	0,00%	0,00%	117	757.587	52%	42%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan**			**2.482.217**		**1.114.053**		**697.321**		**-**				**1.114.053**			Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	180	90.000	90	41.985	45	20.260	-	-	0,00%	0,00%	90	41.985	50%	47%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	32	800.000	5	12.476	8	46.266	-	-	0,00%	0,00%	5	12.476	16%	2%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1200	1.392.217	534	1.059.592	240	602.535	-	-	0,00%	0,00%	534	1.059.592	45%	76%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	20	200.000	0	-	1560	28.260	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			3,44%	2,18%			39,22%	34,46%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	**4**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Persen**	**95**	**166.625.743**	**261,93**	**83.166.486**		**36.191.149**		**5.208.268**	**#DIV/0!**	**14,39%**	**262**	**88.374.754**	**100%**	**53%**	Sekretariat DPRD
							Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	**Persen**	**95**		**250,81**						**#DIV/0!**		**251**		**100%**		
	4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun**			**17.828.854**		**8.924.623**		**5.010.368**		**260.372**				**9.184.995**			Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	86.203	1	7.280	1	7.250	-	-	0,00%	0,00%	1	7.280	25%	8%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	45	16.587.612	17	8.654.434	5	4.391.305	-	260.372	0,00%	5,93%	17	8.914.806	38%	54%	Sekretariat DPRD
		02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	200.000	2	7.774	1	32.383	-	-	0,00%	0,00%	2	7.774	50%	4%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasanatau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	15	755.040	2	112.140	3	191.720	-	-	0,00%	0,00%	2	112.140	13%	15%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	200.000	1	142.996	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	142.996	100%	71%	Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
	4	02	02	2,01	06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang					600	387.710									
	4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan**			**21.300.538**		**6.703.632**		**2.990.899**		**-**				**6.703.632**			Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	6	1.984.087	2	736.821	-	-	0,00%	0,00%	6	1.984.087	60%	45%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	6	671.626	2	569.274	-	-	0,00%	0,00%	6	671.626	60%	15%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	4.643.432	3	1.854.883	1	630.080	-	-	0,00%	0,00%	3	1.854.883	60%	40%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	4.643.432	3	734.642	1	477.036	-	-	0,00%	0,00%	3	734.642	60%	16%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	3.279.754	3	1.458.394	1	577.688	-	-	0,00%	0,00%	3	1.458.394	60%	44%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan**			**8.350.637**		**820.545**		**686.799**		**-**				**820.545**			
	4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	10	938.723	0	-	2	22.556	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	10	936.312	0	-	2	13.373	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	10	937.114	0	-	2	12.982	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	10	936.208	0	-	2	37.856	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	10	937.768	0	-	2	37.856	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	10	1.146.252	0	-	2	34.056	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	10	1.393.080	0	-	2	6.618	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	4	1.125.180	2	820.545	1	521.502	-	-	0,00%	0,00%	2	820.545	50%	73%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan**			**21.025.290**		**12.273.454**		**4.449.703**		**751.165**				**13.024.619**			Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	45	1.000.000	45	323.299	2	48.750	-	-	0,00%	0,00%	45	323.299	100%	32%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	810	13.187.894	30	6.746.194	11	2.872.785	4	453.915	36,36%	15,80%	34	7.200.109	4%	55%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	15	3.547.796	9	3.821.759	3	673.606	1	297.250	33,33%	44,13%	10	4.119.009	67%	116%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	60	1.185.600	36	518.000	12	498.000	-	-	0,00%	0,00%	36	518.000	60%	44%	Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
	4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	40	1.704.000	24	843.000	8	312.000	-	-	0,00%	0,00%	24	843.000	60%	49%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	48	200.000	0	-	12	36.450	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	4	200.000	2	21.203	1	8.112	-	-	0,00%	0,00%	2	21.203	50%	11%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap**			**18.441.136**		**8.854.078**		**4.026.015**		**-**				**8.854.078**			Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	924	692.640	342	284.645	187	101.500	-	-	0,00%	0,00%	342	284.645	37%	41%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,05	02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	4	215.506	2	60.597	1	22.525	-	-	0,00%	0,00%	2	60.597	50%	28%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	17.532.990	8	8.508.836	2	3.514.280	-	-	0,00%	0,00%	8	8.508.836	53%	49%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang					600	387.710									
	4	**02**	**02**	**2,06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan**			**600.000**		**1.484**		**2.330**		**-**				**1.484**			
	4	02	02	2,06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	200.000	0	1.484	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	1.484	0%	1%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	8	400.000	0	-	2	2.330	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi**			**79.079.288**		**45.588.670**		**19.025.035**		**4.196.731**				**49.785.401**			Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	5645	78.479.288	1916	45.410.262	145	18.805.911	104	4.196.731	71,72%	22,32%	2.020	49.606.993	36%	63%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	4	200.000	2	136.734	1	157.000	-	-	0,00%	0,00%	2	136.734	50%	68%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	48	200.000	22	33.166	12	32.380	-	-	0,00%	0,00%	22	33.166	46%	17%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	48	200.000	4	8.508	12	29.744	-	-	0,00%	0,00%	4	8.508	8%	4%	Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	4,16%	2,59%			35,21%	28,36%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**3,80%**	**2,39%**			**37,22%**	**31,41%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan;

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**68.873.704**		**30.830.301**		**14.457.675**		**1.219.388**				**32.049.689**			BAPPEDA
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**68.873.704**		**30.830.301**		**14.457.675**		**1.219.388**				**32.049.689**			BAPPEDA
1						**PERENCANAAN**				**60.941.094**		**29.048.616**		**13.131.212**		**1.219.388**				**30.268.005**			BAPPEDA
	5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**49.012.546**	**200**	**23.944.595**	**100**	**9.719.460**		**1.219.388**	**13%**	**13%**	**200**	**25.163.984**	**100,00%**	**51,34%**	BAPPEDA
	5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**61.050**		**20.364**		**13.308**		**-**				**20.364**			
	5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	9.700	6	4.315	2	1.996	2	-	100%	0%	8	4.315	80,00%	44,48%	BAPPEDA
	5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	8.908	2	2.463	1	1.996	0	-	25%	0%	2,25	2.463	45,00%	27,65%	BAPPEDA
	5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	8.908	2	2.512	1	1.996	0	-	25%	0%	2,25	2.512	45,00%	28,20%	BAPPEDA
	5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	9.158	2	2.524	1	1.996	0,25	-	25%	0%	2,25	2.524	45,00%	27,56%	BAPPEDA
	5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	9.158	2	2.565	1	1.996	0,25	-	25%	0%	2,25	2.565	45,00%	28,01%	BAPPEDA
	5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	9.114	3	4.237	1	1.996	1	-	100%	0%	4	4.237	80,00%	46,48%	BAPPEDA
	5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	6.105	2	1.750	1	1.331	1	-	100%	0%	3	1.750	60,00%	28,66%	BAPPEDA
	5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**24**	**32.001.022**		**16.218.512**		**6.484.066**		**1.013.420**				**17.231.932**			
	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	31.979.654	14	16.211.633	14	6.479.407	4	1.013.420	29%	16%	14	17.225.053	100,00%	53,86%	BAPPEDA
	5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	12.210	2	3.810	1	2.662	0,25	-	25%	0%	2,25	3.810	45,00%	31,20%	BAPPEDA
	5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	9.158	2	3.069	1	1.996	0	-	25%	0%	2,25	3.069	45,00%	33,51%	BAPPEDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.526.504**		**56.815**		**465.240**		**-**				**56.815**				
	5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	60.000	0	-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	213	213.000	71	56.815	71	71.700	-	-	0%	0%	71	56.815	33,33%	26,67%	BAPPEDA
	5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	45.000	0	-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	25.000	0	-	1	15.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	86.203	0	-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	1.097.301	1,25	-	10	378.540	-	-	0%	0%	1,25	-	4,31%	0,00%	BAPPEDA
	5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.273.903**		**2.033.305**		**896.424**		**19.566**				**2.052.870**				
	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	27.130	14	24.158	5	5.516	0	-	5%	0%	14,25	24.158	57,00%	89,05%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	387.923	14	342.638	2	82.371	0,50	19.566	25%	24%	14,50	362.204	100,00%	93,37%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34	40.639	3	42.870	8	8.450	2	-	25%	0%	5	42.870	14,71%	105,49%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	46.548	4	14.505	4	40.524	1,00	-	25%	0%	5	14.505	25,00%	31,16%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	146.030	13	100.268	7	29.943	2	-	25%	0%	14,75	100.268	42,14%	68,66%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.600	19.781	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	99	51.235	25,1124	11.049	22	10.528	5,50	-	25%	0%	30,61	11.049	30,92%	21,57%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.056	3.520.618	1734	1.497.816	840	715.592	210	-	25%	0%	1944	1.497.816	47,93%	42,54%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	14.000	0	-	4	3.500	1	-	25%	0%	1	-	25,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	20.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**5.538.508**		**2.569.098**		**887.065**		**142.018**				**2.711.116**				
	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	18.315	3	10.600	1	3.990	-	-	0%	0%	3	10.600	100,00%	57,88%	BAPPEDA
	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	891.955	5	334.273	5	203.275	1,25	31.618	25%	16%	5	365.891	100,00%	41,02%	BAPPEDA
	5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	130.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.498.238	12	2.224.225	12	679.800	3	110.400	25%	16%	12	2.334.625	100,00%	51,90%	BAPPEDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.908.000**		**1.834.124**		**433.000**		**-**					**1.834.124**			
	5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	520.000	1	423.500			-	-	0%	0%	1	423.500	100,00%	81,44%	BAPPEDA
	5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	70.000	112	249.015			-	-	0%	0%	112	249.015	100,00%	355,74%	BAPPEDA
	5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	105	1.285.000	128,9	1.121.616	8	368.000	2	-	25%	0%	130,9	1.121.616	100,00%	87,29%	BAPPEDA
	5	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	55.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	550.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	300.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	128.000	3	39.993	1	65.000	0,25	-	25%	0%	3,25	39.993	54,17%	31,24%	BAPPEDA
	5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.703.559**		**1.183.799**		**540.359**		**44.385**					**1.228.184**			
	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	324.686	2,9975	100.883	1	51.444	0,25	8.070	25%	16%	3,25	108.953	64,95%	33,56%	BAPPEDA
	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	1.365.347	44,906	616.541	16	346.097	4,00	36.315	25%	10%	48,91	652.856	95,89%	47,82%	BAPPEDA
	5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	51.000	15,3154	3.500	2	7.500	-	-	0%	0%	15,32	3.500	100,00%	6,86%	BAPPEDA
	5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	880	384.386	458,25	175.598	196	85.318	-	-	0%	0%	458,25	175.598	52,07%	45,68%	BAPPEDA
	5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	138.141	1	-	1	50.000	-	-	0%	0%	1,00	-	100,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	290.000	2	166.071			-	-	0%	0%	2,00	166.071	100,00%	57,27%	BAPPEDA
	5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	125.000	4	121.206			-	-	0%	0%	4	121.206	100,00%	96,96%	BAPPEDA
	5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Laporan**	**1**	**-**		**28.579**		**-**	**-**	**-**					**28.579**			
	5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1		1	28.579			-	-	0%	0%	1	28.579	100,00%	57,27%	
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			26,08%	3,14%			49,72%	40,51%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
	5	**01**				**PERENCANAAN**				**5.474.418**		**2.336.942**		**1.488.830**		**-**				**2.336.942**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**95**	**5.474.418**	**257**	**2.336.942**	**90**	**1.488.830**		**-**	**0%**	**0%**	**257**	**2.336.942**	**100,00%**	**42,69%**	**BAPPEDA**
							Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	**Persen**	**100**		**300**		**100**	**-**		**-**	**#DIV/0!**		**300**		**100,00%**		**BAPPEDA**
							Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persen**	**100**		**300**		**100**				**0%**		**300**		**100,00%**		**BAPPEDA**
	5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**	**Persen**	**100**	**3.279.383**		**1.901.973**		**1.351.948**		**-**				**1.901.973**			
	5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	150.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	5	160.243	3	79.749	1	35.672	1,00	-	100%	0%	4,00	79.749	80,00%	49,77%	BAPPEDA
	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	100.899	5	69.148	2	96.540	1,00	-	50%	0%	6,00	69.148	100,00%	68,53%	BAPPEDA
	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	45	131.311	135	124.344	45	65.440	23	-	50%	0%	157,5	124.344	100,00%	94,69%	BAPPEDA
	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	943.510	4	413.966	2	338.278	1,00	-	50%	0%	5,00	413.966	71,43%	43,88%	BAPPEDA
	5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	5	86.454	2599	49.496	880	27.520	880	-	100%	0%	3479	49.496	100,00%	57,25%	BAPPEDA
	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	25	1.706.966	13,3785	1.165.271	6	788.498	1,50	-	25%	0%	14,88	1.165.271	59,51%	68,27%	BAPPEDA
	5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**		**1.397.037**		**246.363**		**92.256**		**-**				**246.363**			
	5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	42	637.183	116	202.530	42	61.630	11	-	25%	0%	126,50	202.530	100,00%	31,79%	BAPPEDA
	5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	45	301.709	83,6245	22.167	45	15.486	11	-	25%	0%	94,87	22.167	100,00%	7,35%	BAPPEDA
	5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	458.145	2	21.666	1	15.140	0,25	-	25%	0%	2,25	21.666	45,00%	4,73%	BAPPEDA
	5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**95**	**797.998**		**188.607**		**44.626**		**-**				**188.607**			
	5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10	296.097	6	49.090	2	13.185	0,50	-	25%	0%	6,5	49.090	65,00%	16,58%	BAPPEDA
	5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	65	501.900	4	139.517	2	31.441	1	-	0%	0%	4,5	139.517	6,92%	27,80%	BAPPEDA
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			47,50%	0,00%			68,99%	39,22%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			T	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**6.454.130**	**300**	**2.767.079**	**100**	**1.922.922**		**-**	**0%**	**0%**	**300**	**2.767.079**	**100,00%**	**42,87%**	BAPPEDA
							Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	**Persen**	**100**		**300**		**100**				**0%**		**300**		**100,00%**		**BAPPEDA**
							Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persen**	**100**		**300**		**100**				**0%**		**300**		**100,00%**		**BAPPEDA**
	5	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**1.967.341**		**797.150**		**898.287**		**-**				**797.150**			**BAPPEDA**
	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	112.820	2	9.193	1	24.200	0,25	-	25%	0%	2,25	9.193	100,00%	8,15%	BAPPEDA
	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	22	233.845	22	39.305	22	54.446	6	-	25%	0%	22	39.305	100,00%	16,81%	BAPPEDA
	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	6	126.025	18	28.000	6	30.237	2	-	25%	0%	19,5	28.000	100,00%	22,22%	BAPPEDA
	5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	79.615	3	199.006	1	18.150	0,25	-	25%	0%	3,25	199.006	100,00%	249,96%	BAPPEDA
	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	112.820	3	22.212	1	24.200	0,25	-	25%	0%	3,25	22.212	100,00%	19,69%	BAPPEDA
	5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	11	421.280	11	38.602	11	96.794	2,75	-	25%	0%	11	38.602	100,00%	9,16%	BAPPEDA
	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	11	210.550	11	23.902	11	48.396	3	-	25%	0%	11	23.902	100,00%	11,35%	BAPPEDA
	5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	670.387	8,96	436.930	4	601.864	1,00	-	25%	0%	9,96	436.930	100,00%	65,18%	BAPPEDA
	5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persen**	**100**	**1.330.452**		**684.481**		**265.230**		**-**				**684.481**			
	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	489.612	5	19.546	1	7.996	0,25	-	25%	0%	5,25	19.546	47,73%	3,99%	BAPPEDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	4	64.909	12	10.674	3	8.222	0,75	-	25%	0%	12,75	10.674	100,00%	16,44%	BAPPEDA
	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	4	81.594	9	28.290	1	19.312	0,25	-	25%	0%	9,25	28.290	100,00%	34,67%	BAPPEDA
	5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	413.174	4,9515	493.708	2	123.157	0,50	-	25%	0%	5,45	493.708	100,00%	119,49%	BAPPEDA
	5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	107.997	5	12.865	1	7.794	0	-	25%	0%	5,25	12.865	47,73%	11,91%	BAPPEDA
	5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	3	55.280	9	10.240	1	7.531	0,25	-	25%	0%	9,25	10.240	100,00%	18,52%	BAPPEDA
	5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	3	70.964	9	22.959	1	16.796	0,25	-	25%	0%	9,25	22.959	100,00%	32,35%	BAPPEDA
	5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	46.922	4	86.199	3	74.423	0,75	-	25%	0%	4,75	86.199	95,00%	183,71%	BAPPEDA
	5	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	100	**3.156.337**		**1.285.448**		**759.406**		**-**				**1.285.448**			BAPPEDA
	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	274.730	6	40.031	2	33.733	0,50	-	25%	0%	6,50	40.031	59,09%	14,57%	BAPPEDA
	5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	3	244.204	7,8736	249.257	3	358.845	0,75	-	25%	0%	8,62	249.257	100,00%	102,07%	BAPPEDA
	5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	3	366.306	7,6719	37.509	3	48.293	0,75	-	25%	0%	8,42	37.509	100,00%	10,24%	BAPPEDA
	5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	20	732.612	8,8399	592.603	1	123.378	0,25	-	25%	0%	9,09	592.603	45,45%	80,89%	BAPPEDA
	5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	244.204	6	35.015	2	35.983	0,50	-	25%	0%	6,50	35.015	59,09%	14,34%	BAPPEDA
	5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	3	256.414	6,9848	243.430	3	62.934	0,75	-	25%	0%	7,73	243.430	100,00%	94,94%	BAPPEDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	3	366.306	7,8751	29.163	3	48.293	0,75	-	25%	0%	8,63	29.163	100,00%	7,96%	BAPPEDA
	5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	20	671.561	5,9052	58.441	1	47.946	0,25	-	25%	0%	6,16	58.441	30,78%	8,70%	BAPPEDA
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									25,00%	0,00%			86,87%	48,22%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			T	SR	
	5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**100**	**7.932.610**		**1.781.684**		**1.326.463**		**-**				**1.781.684**			
	5	**05**	**02**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**100**	**7.932.610**	**298**	**1.781.684**	**100**	**1.326.463**		**-**	**0%**	**0%**	**298**	**1.781.684**	**100,00%**	**22,46%**	
							Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	**Persen**	**100**		**300**		**100**				**0%**		**300**		**100,00%**		
	5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persen**	**100**	**1.185.000**		**327.216**		**897.193**		**-**				**327.216**			BAPPEDA
						Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajiandan Penerapan		Laporan					2	508.391	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		Laporan					2	97.224	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	
						Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah		Dokumen					1	291.578	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	
	5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	28	566.000	10	132.123			-	-	0%	0%	10	132.123	35,71%	23,34%	BAPPEDA
	5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	1	60.000	0	0			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	1	60.000	0	0			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	3	300.000	2	195.093			-	-	0%	0%	2,00	195.093	66,67%	65,03%	BAPPEDA
	5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	105.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	94.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan**	**Persen**	100	**850.000**		**449.977**		**-**		**-**				**449.977**			BAPPEDA
	5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspeK Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	130.000	1	140.072			-	-	0%	0%	1	140.072	100,00%	107,75%	BAPPEDA
	5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	270.000	1	107.057			-	-	0%	0%	1	107.057	100,00%	39,65%	BAPPEDA
	5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1	160.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	160.000	1,994	202.848			-	-	0%	0%	1,99	202.848	199,40%	126,78%	BAPPEDA
	5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	0	-	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	130.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan**	**Persen**	100	**1.440.000**		**335.954**		**-**		**-**				**335.954**			
	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	230.000	1	198.870			-	-	0%	0%	1	198.870	100,00%	86,47%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	270.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	160.000	0,9896	137.084			-	-	0%	0%	0,99	137.084	98,96%	85,68%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1	160.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	-	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	1	160.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	160.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	160.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	0	-	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	140.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persen**	100	**4.457.610**		**668.537**		**-**		**-**				**668.537**			BAPPEDA
	5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen			2	161.001			-	-	0%	0%	2	161.001	0,00%	0,00%	BAPPEDA
	5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	4	933.510	1	27.318			-	-	0%	0%	1	27.318	25,00%	2,93%	BAPPEDA
	5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	1.343.000	1,8394	390.967			-	-	0%	0%	1,84	390.967	36,79%	29,11%	BAPPEDA
	5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	31	1.427.100	7	89.251			-	-	0%	0%	7	89.251	22,58%	6,25%	BAPPEDA
	5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	3	754.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
						Invensi dan Inovasi				**-**		**-**		**429.270**		**-**				**-**			BAPPEDA
						Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah		Laporan					1	93.606			0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
						Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi		Laporan					1	263.530			0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
						Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah		Laporan					1	72.135			0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																	0,00%	0,00%			34,14%	24,91%	
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																	**24,65%**	**0,79%**			**59,93%**	**38,21%**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Skor**	**71,02 Skor**		**70.02 Skor**		**70.52 Skor**										
							Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	**%**	**15,98 Persen**		**13.75 Persen**		**14.84 Persen**										
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	5	**02**				**URUSAN PENUNJANGAN KEUANGAN**				**110.239.501**		**52.978.301**		**23.261.665**		**3.205.358**		**14%**	**226**	**56.183.658**			
	5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**99.404.062**	**200**	**47.990.449**		**21.440.408**		**3.186.095**	**#DIV/0!**	**15%**	**200**	**51.176.543**	**100%**	**51%**	
							PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KERJA		**100**							**#DIV/0!**		**-**		**0%**		
	5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**10**	**43.592**	**6**	**12.872**	**2**	**10.201**	**2**	**-**				**12.872**	**0%**	**30%**	**BAPENDA**
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	21.302	3	5.942	1	5.100	0	-	0%	0%	3	5.942	60%	28%	BAPENDA
	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	22.290	3	6.930	1	5.100	0	-	0%	0%	3	6.930	60%	31%	BAPENDA
	5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**72.616.761**		**36.068.722**	**89**	**15.139.054**	**86**	**2.613.327**				**38.682.049**	0%	53%	
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	86	72.572.558	86	36.055.238	86	15.128.853	86	2.613.327	100%	17%	86	38.668.565	100%	53%	BAPENDA
	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	22.102	3	6.742	1	5.100	0	-	0%	0%	3	6.742	60%	31%	BAPENDA
	5	02	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	22.102	6	6.742	2	5.100	0	-	0%	0%	6	6.742	60%	31%	BAPENDA
	5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**634.641**		**-**	**144**	**125.850**		**-**				**-**			
	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	712	433.651		-	144	125.850	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	200.990				-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**6.212.777**		**3.862.840**	**4213**	**1.170.075**	**379**	**166.507**				**4.029.346**			
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	80	214.017	36	51.621	8	40.986	2	10.114	25%	25%	38	61.735	48%	29%	BAPENDA
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	650	824.566	375	494.389	100	178.506	24	42.595	24%	24%	399	536.984	61%	65%	BAPENDA
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	83	466.040	41	190.425	13	59.995	3	14.391	23%	24%	44	204.816	53%	44%	BAPENDA
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	225	979.110	120	530.222	25	151.624	6	36.159	24%	24%	126	566.381	56%	58%	BAPENDA
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	29.519	2	12.000	1	5.400	0	1.296	0%	24%	2	13.296	40%	45%	BAPENDA
	5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	Paket	70	146.589	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7.660	3.552.935	4519	2.584.183	4066	733.564	344	61.951	8%	8%	4.863	2.646.135	63%	74%	BAPENDA
	5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**6.076.699**		**831.620**	**119**	**2.638.986**	**-**	**-**				**831.620**			
	5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.105.000	0	-	1	605.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.900.000	0	-	4	1.392.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	352	549.015	162	162.508	60	69.600	0	-	0%	0%	162	162.508	46%	30%	BAPENDA
	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	237	798.168	79	380.473	13	123.618	0	-	0%	0%	79	380.473	33%	48%	BAPENDA
	5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	627.531	1	199.715	1	255.000	0	-	0%	0%	1	199.715	20%	32%	BAPENDA
	5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29	567.469	14	88.924	21	121.255	0	-	0%	0%	14	88.924	48%	16%	BAPENDA
	5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	529.515	0	-	19	72.513	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**9.890.108**		**5.744.153**	**36**	**1.740.112**	**9**	**284.034**				**6.028.187**			
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	60	23.282	36	13.131	12	5.100	3	1.220	25%	24%	39	14.351	65%	62%	BAPENDA
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	762.172	36	444.728	12	194.812	3	36.614	25%	19%	39	481.342	65%	63%	BAPENDA
	5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	245.654	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	8.859.000	36	5.286.294	12	1.540.200	3	246.200	25%	16%	39	5.532.494	65%	62%	BAPENDA
	5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**3.929.485**		**1.470.242**	**127**	**616.130**	**11**	**122.228**				**1.592.469**			
	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	386.394	3	189.924	1	86.350	1	20.837	100%	24%	4	210.761	20%	55%	BAPENDA
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	1.579.328	45	683.586	15	299.860	4	73.366	27%	24%	49	756.951	100%	48%	BAPENDA
	5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	195	288.816	0	-	90	30.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	147	467.732	37	266.835	17	79.920	6	28.025	35%	35%	43	294.860	29%	63%	BAPENDA
	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	496.644	3	329.897	1	70.000	0	-	0%	0%	3	329.897	100%	66%	BAPENDA
	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	406.040	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	12	304.530	0	-	3	50.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)				15,77%	10,30%			39,16%	33,93%	
													Predikat kinerja				SR	SR			SR	SR	
2	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN**	**%**	**15,98**	**10.835.438**	**26,15**	**4.987.852**		**1.821.257**		**19.263**	**#DIV/0!**	**1%**	**26,15**	**5.007.115**	**100%**	**46%**	
	5	**02**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase PAD Terhadap Total Pendapatan**	**%**	**100**	**10.835.438**		**4.987.852**	**16**	**1.821.257**	**-**	**19.263**				**5.007.115**			
	5	02	4	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	812.080	1	256.900	0	-	0	-	0%	0%	1	256.900	25%	32%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daeran serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5	1.364.330	3	521.121	1	100.000	0	-	0%	0%	3	521.121	60%	38%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	819.966	3	534.728	1	248.000	0	9.306	0%	4%	3	544.034	60%	66%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	30	1.281.977	18	745.000	6	270.000	0	-	0%	0%	18	745.000	60%	58%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	5	537.004	1	76.783	1	468.903	0	9.957	0%	2%	1	86.740	20%	16%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	5	709.060	2	451.667	1	51.000	0	-	0%	0%	2	451.667	40%	64%	BAPENDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	4	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	11	1.366.610	14	1.527.903	2	286.528	0	-	0%	0%	14	1.527.903	127%	112%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	558.305	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	546.644	0	-	1	53.349	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	6	446.644	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	491.309	2	169.980	1	123.432	0	-	0%	0%	2	169.980	50%	35%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	446.644	1	44.014	1	60.013	0	-	0%	0%	1	44.014	25%	10%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	5	959.249	3	641.520	1	160.032	0	-	0%	0%	3	641.520	60%	67%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	495.616	1	18.237	0	-	0	-	0%	0%	1	18.237	20%	4%	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,59%			39,09%	35,78%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**7,88%**	**5,44%**			**39,13%**	**34,86%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.406.472.421**		**78.274.706**		**323.048.036**		**8.426.770**				**80.737.221**			
	4	**4**				**KEUANGAN**				**1.406.472.421**		**78.274.706**		**323.048.036**		**8.426.770**				**80.737.221**			
1	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja**	**Persen**	**100**	**184.018.495**	**200**	**70.255.319**	**100**	**45.398.559**		**2.124.283**	**0%**	**5%**	**200**	**72.379.602**	**100%**	**39%**	
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	**Persen**	**100**		**200**		**100**				**0%**		**200**		**100%**		
	5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**90.619**		**28.599**		**21.544**		**-**				**28.599**			**BPKAD**
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra	Dokumen	5	5.263	2	2.000	1	1.074	0	-	0%	0%	2	2.000	40%	38%	BPKAD
	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	12.181	2	2.399	1	3.060	0	-	0%	0%	2	2.399	50%	20%	BPKAD
	5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	12.181	2	2.399	1	3.060	0	-	0%	0%	2	2.399	50%	20%	BPKAD
	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	20.302	2	4.040	1	5.100	0	-	0%	0%	2	4.040	50%	20%	BPKAD
	5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	20.302	2	4.040	1	5.100	0	-	0%	0%	2	4.040	50%	20%	BPKAD
	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	20.389	2	13.721	1	4.149	0	-	0%	0%	2	13.721	40%	67%	BPKAD
	5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**161.613.201**		**60.800.884**		**40.899.680**		**1.726.082**				**62.526.966**			**BPKAD**
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	161.521.201	14	60.768.652	14	40.879.180	4	1.726.082	29%	4%	14	62.494.734	100%	39%	BPKAD
	5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	40.000	0	-	1	10.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	26.000	2	18.718	1	5.250	0	-	0%	0%	2	18.718	40%	72%	BPKAD
	5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	26.000	4	13.514	2	5.250	0	-	0%	0%	4	13.514	40%	52%	BPKAD
	5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**40.000**		**7.000**		**10.000**		**-**				**7.000**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	20.000	1	3.500	1	5.000	0	-	0%	0%	1	3.500	25%	18%	BPKAD
	5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	4	20.000	1	3.500	1	5.000	0	-	0%	0%	1	3.500	25%	18%	BPKAD
	5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**290.000**		**130.000**		**30.000**		-				**130.000**			
	5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	30.000	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200	200.000	1	100.000		-	0	-	0%	0%	1	100.000	1%	50%	BPKAD
	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	60.000	4	30.000	4	30.000	0	-	0%	0%	4	30.000	50%	50%	BPKAD
	5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	100	**8.337.520**		**4.541.869**		**2.214.256**		**109.504**				**4.651.373**			**BPKAD**
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	59.462	2	27.318	3	13.034	1	2.949	33%	23%	3	30.267	20%	51%	BPKAD
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	170	1.559.561	12	598.614	34	317.364	1	9.946	3%	3%	13	608.560	8%	39%	BPKAD
	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	40	35.000	20	14.998		-	0	-	0%	0%	20	14.998	50%	43%	BPKAD
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	447.117	2	177.463	1	90.950	0	6.535	0%	7%	2	183.998	8%	41%	BPKAD
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	1.211.864	4	442.595	2	246.621	0	-	0%	0%	4	442.595	8%	37%	BPKAD
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	29.180	1	5.500	1	5.936	0	-	0%	0%	1	5.500	20%	19%	BPKAD
	5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	180.000	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	735	4.815.335	300	3.275.381	150	1.540.351	35	90.074	23%	6%	335	3.365.455	46%	70%	BPKAD
	5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah**	**%**	**100**	**3.719.444**		**733.477**		**319.856**		-				733.477			
	5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	Unit	5	1.950.000	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	102	80.050	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	95	789.394	37	673.477	19	219.856	0	-	0%	0%	37	673.477	39%	85%	BPKAD
	5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4	400.000	1	60.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	60.000	25%	15%	BPKAD
	5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**7.822.427**		**3.122.833**		**1.543.531**		**242.465**				**3.365.298**			**BPKAD**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	19.990	24	15.900	12	5.200	3	1.300	25%	25%	27	17.200	45%	86%	BPKAD
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1.069.937	21	372.333	12	217.731	2	40.765	17%	19%	23	413.098	38%	39%	BPKAD
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.732.500	23	2.734.600	12	1.320.600	2	200.400	17%	15%	25	2.935.000	42%	44%	BPKAD
	5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	100	**2.105.283**		**890.657**		**359.693**		**46.231**				**936.888**			
	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	Unit	1	238.444	2	109.554	1	48.509	1	5.306	100%	11%	3	114.859	100%	48%	BPKAD
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	1.028.281	2	659.770	1	212.283	1	34.526	100%	16%	3	694.296	43%	68%	BPKAD
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	71	235.538	108	121.333	71	47.900	9	6.400	13%	13%	117	127.733	100%	54%	BPKAD
	5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	203.020	0	-	1	51.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
								Rata-rata capaian kinerja (%)									12,83%	5,09%			31,12%	32,97%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
2	**5**	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**Opini**	**WTP**	**1.217.331.543**	**WTP**	**5.102.356**	**WTP**	**276.457.159**		**6.284.115**	**100%**	**2%**	**WTP**	**5.422.215**	**100%**	**0%**	**BPKAD**
							Penetapan APBD Tepat Waktu	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**				**100%**		**Tepat Waktu**		**100%**		
							Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah	**Persen**	**100**		**200**		**100**				**0%**		**200**		**100%**		
	5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persen	100	**4.643.000**	**100**	**2.017.534**	**100**	**1.071.663**		**69.951**				**2.087.485**			**BPKAD**
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	661.579	4	285.124	2	134.631	0	-	0%	0%	4	285.124	40%	43%	BPKAD
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	652.046	4	285.608	2	132.691	0	-	0%	0%	4	285.608	40%	44%	BPKAD
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	152.337	92	99.209	46	36.784	0	-	0%	0%	92	99.209	40%	65%	BPKAD
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	172.849	92	109.378	46	36.239	0	-	0%	0%	92	109.378	40%	63%	BPKAD
	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	189.555	92	63.567	46	38.574	31	25.808	67%	67%	123	89.375	53%	47%	BPKAD
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	381.414	91	167.487	46	77.618	0	-	0%	0%	91	167.487	40%	44%	BPKAD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	15	750.680	6	366.391	3	175.131	0	-	0%	0%	6	366.391	40%	49%	BPKAD
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	30	867.853	11	542.188	6	269.749	1	44.143	17%	16%	12	586.331	40%	68%	BPKAD
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	10	336.233	0	-	2	54.332		-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	20	47.150	4	8.728	4	8.173	0	-	0%	0%	4	8.728	20%	19%	BPKAD
	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	20	47.150	4	8.773	4	8.773	0	-	0%	0%	4	8.773	20%	19%	BPKAD
	5	02	02	2.01	12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10	384.155	6	81.081	2	98.969	0	-	0%	0%	6	81.081	60%	21%	BPKAD
	5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**%**	100	**2.678.899**		**1.590.609**		**545.150**		**48.765**				**1.639.373**			**BPKAD**
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60	236.148	24	190.772	12	48.054	3	12.414	25%	26%	27	203.186	45%	86%	BPKAD
	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	10	157.376	4	179.720	2	32.026	1	7.867	50%	25%	5	187.587	50%	119%	BPKAD
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	5	131.059	2	36.125	1	26.670	0	6.966	0%	26%	2	43.091	40%	33%	BPKAD
	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	5	131.059	2	36.124	1	26.670	0	7.087	0%	27%	2	43.211	40%	33%	BPKAD
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	25	601.167	2	490.123	5	122.337	0	9.162	0%	7%	2	499.285	8%	83%	BPKAD
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	10	236.053	2	180.072	2	48.036	0	5.270	0%	11%	2	185.342	20%	79%	BPKAD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	236.496	1	49.480	1	48.126	0	-	0%	0%	1	49.480	20%	21%	BPKAD
	5	02	02	2.02		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	400	949.541	117	428.193	80	193.230	0	-	0%	0%	117	428.193	29%	45%	BPKAD
	5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	%	**100**	**5.831.976**		**1.097.043**		**816.971**		**201.144**				**1.298.186**			**BPKAD**
	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	5	221.063	2	50.740	1	41.101	0	26.700	0%	65%	2	77.440	40%	35%	BPKAD
	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban	Dokumen	5	184.114	2	56.324	1	57.046	0	44.140	0%	77%	2	100.464	40%	55%	BPKAD
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semseteran	Laporan	5	415.810	2	104.042	1	79.674	0	16.254	0%	20%	2	120.295	40%	29%	BPKAD
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	10	704.030	4	241.598	2	137.253	1	81.700	50%	60%	5	323.298	50%	46%	BPKAD
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	20	994.154	8	162.731	4	198.053	0	-	0%	0%	8	162.731	40%	16%	BPKAD
	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	216.326	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	222.326	0	84.030	1	30.001	0	-	0%	0%	-	84.030	0%	38%	BPKAD
	5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	230.537	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	5	635.084	1	44.077	1	125.945	0	-	0%	0%	1	44.077	20%	7%	BPKAD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	657.028	1	43.939	1	9.140	0	-	0%	0%	1	43.939	20%	7%	BPKAD
	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	230	862.017	92	210.254	1	83.004	0	-	0%	0%	92	210.254	40%	24%	BPKAD
	5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	5	257.907	2	99.309	1	55.756	0	32.350	0%	58%	2	131.659	40%	51%	BPKAD
	5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	5	231.580	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	**02**	**02**	**2,04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayan Daerah**			**1.203.570.131**				**273.886.583**		**5.964.255**							
	5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	5	1.083.507.725	0	-	1	259.197.845	0	5.064.200	0%	2%	-	5.064.200	0%	0%	BPKAD
	5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	75.804.010	0	-	1	5.000.000	0	900.055	0%	18%	-	900.055	0%	1%	BPKAD
	5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	5	44.258.396	0	-	1	9.688.738	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**%**	100	**607.536**		**397.171**		**136.792**		**-**				**397.171**			**BPKAD**
	5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10	607.536	1	397.171	2	136.792	0	-	0%	0%	1	397.171	10%	65%	BPKAD
														Rata-rata capaian kinerja (%)			6,15%	14,85%			27,71%	36,60%	**BPKAD**
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	**BPKAD**
3	**5**	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan terukur**	**Persen**	**70**	**5.122.384**	**55**	**2.917.032**	**60**	**1.192.318**	**55**	**18.372**				**2.935.404**			**BPKAD**
	5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengeloaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**5.122.384**	**100**	**2.917.032**		**1.192.318**	**100**	**18.372**				**2.935.404**			**BPKAD**
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	5	203.199	2	243.200	1	41.351	0	18.372	0%	44%	2	261.572	40%	129%	BPKAD
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	203.199	1	28.351	1	41.351	0	-	0%	0%	1	28.351	20%	14%	BPKAD
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	184.219	1	27.433	1	37.488	0	-	0%	0%	1	27.433	20%	15%	BPKAD
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	168.428	2	100.838	1	34.275	0	-	0%	0%	2	100.838	40%	60%	BPKAD
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.684	2	267.311	1	82.202	0	-	0%	0%	2	267.311	40%	25%	BPKAD
	5	02	03	2.01	06	inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	5	105.267	2	38.686	1	21.422	0	-	0%	0%	2	38.686	40%	37%	BPKAD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	250	505.015	96	1.066.811	50	423.852	0	-	0%	0%	96	1.066.811	38%	211%	BPKAD
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.683	2	467.469	1	212.098	0	-	0%	0%	2	467.469	40%	44%	BPKAD
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	150	360.544	49	53.104	30	36.346	0	-	0%	0%	49	53.104	33%	15%	BPKAD
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	157.903	4	76.436	2	32.133	0	-	0%	0%	4	76.436	40%	48%	BPKAD
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	25	737.510	9	342.803	5	150.083	0	-	0%	0%	9	342.803	36%	46%	BPKAD
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Orang	230	391.734	17	204.591	46	79.718	0	-	0%	0%	17	204.591	7%	52%	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	3,70%			32,87%	58,09%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**6,33%**	**7,88%**			**30,57%**	**42,55%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	**03**				**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**92.444.567**		**18.743.839**		**10.299.125**		**1.173.711**				**19.917.550**			
1	**5**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**32.452.209**	**20**	**11.292.007**	**100**	**6.005.668**		**1.020.996**	**0%**	**17%**	**20**	**12.313.003**	**20%**	**38%**	
	5	**03**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**30**	**77.715**		**25.458**		**27.451**		**-**				**25.458**			
	5	03	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	22.458	4	8.585	2	4.150	0	-	0%	0%	4	8.585	40%	38%	BKPP
	5	03	01	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	13.814	2	4.515	1	2.075	0	-	0%	0%	2	4.515	40%	33%	BKPP
	5	03	01	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	13.814	2	4.515	1	17.150	0	0	0%	0%	2	4.515	40%	33%	BKPP
	5	03	01	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan	Laporan	10	27.628	4	7.843	2	4.076	0	-	0%	0%	4	7.843	40%	28%	BKPP
	5	**03**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan**	**Persen**	**100**	**14.207.997**		**6.335.180**		**3.900.162**		**755.334**				**7.090.514**			
	5	03	01	2,01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14.183.131	14	6.327.694	14	3.897.322	3	755.334	21%	19%	14	7.083.028	100%	50%	BKPP
	5	03	01	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	8.288	2	2.938	1	1.420	0	-	0%	0%	2	2.938	40%	35%	BKPP
	5	03	01	2,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	16.577	2	4.548	1	1.420	0	-	0%	0%	2	4.548	40%	27%	BKPP
	5	**03**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**373.042**		**74.380**		**59.681**		**7.490**				**81.870**			
	5	03	01	2,01	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket	130	99.938	60	60.000		-	0	-	0%	0%	60	60.000	46%	60%	BKPP
	5	03	01	2,01	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	100	46.576	150	14.380	100	12.265	0	7.490	0%	61%	150	21.870	100%	47%	BKPP
	5	03	01	2,01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	450	226.529	0	-	90	47.416	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	**03**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.058.137**		**1.298.024**		**426.220**		**48.156**				**1.346.180**			
	5	03	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	37.952	6	18.396	3	6.622	0	1.579	0%	24%	6	19.975	40%	53%	BKPP
	5	03	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket	50	415.194	20	408.442	10	118.004	2	14.736	20%	12%	22	423.178	44%	102%	BKPP
	5	03	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Paket	45	473.841	18	202.412	9	101.096	2	15.131	22%	15%	20	217.543	44%	46%	BKPP
	5	03	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	150.484	14	51.972	7	24.165	3	5.800	43%	24%	17	57.771	49%	38%	BKPP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	03	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	1	22.024	0	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1613	3.958.642	526	616.802	350	176.333	28	10.911	8%	6%	554	627.713	34%	16%	BKPP
	5	**03**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**5.900.333**		**81.406**		**55.576**		**-**				**81.406**			
	5	03	01	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	01	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	1.218.120	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	01	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	Unit	12	2.030.201	-	-	-	55.576	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	01	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	3	81.406	-	-	0	-	0%	0%	3	81.406	25%	67%	BKPP
	5	03	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.030.201	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	**03**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**3.290.886**		**2.753.345**		**1.177.878**		**194.545**				**2.947.889**			
	5	03	01	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	22.302	24	5.000	12	1.500	4	360	33%	24%	28	5.360	47%	24%	BKPP
	5	03	01	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	704.246	8	296.743	4	161.848	1	33.909	25%	21%	9	330.653	45%	47%	BKPP
	5	03	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.564.339	12	2.451.601	12	1.014.530	3	160.275	25%	16%	12	2.611.876	100%	102%	BKPP
	5	**03**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**3.544.098**		**724.215**		**358.699**		**15.471**				**739.686**			
	5	03	01	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	269.832	2	140.614	1	45.919	1	2.511	100%	5%	3	143.125	100%	53%	BKPP
	5	03	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan terpelihara, dan yang diperbaharaui perizinannya	Unit	12	644.233	24	464.701	12	187.130	3	12.960	25%	7%	27	477.661	100%	74%	BKPP
	5	03	01	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	5	359.228	10	108.900	5	50.650	0	-	0%	0%	10	108.900	100%	30%	BKPP
	5	03	01	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	1.218.120	1	10.000	1	75.000	0	-	0%	0%	1	10.000	100%	1%	BKPP
	5	03	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.052.684	0	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
														Rata-rata capaian kinerja (%)			14,67%	10,69%			45,32%	34,64%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	**5**	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi**	**Persen**	**100**	**53.032.751**	**100**	**6.648.779**	**100**	**3.839.283**	**100**	**152.715**	**100%**	**4%**	**200**	**6.801.494**	**100%**	**13%**	
							Rasio PNS pendidikan tinggi (PT)	**Rasio**	**2,21**		**86,43**		**69,05**		**86,43**		**100%**		**173**		**100%**		
							Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Rasio**	**4,17**		**54,11**		**30**		**54,11**		**100%**		**108**		**100%**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Persentase kasus pelanggaran disiplin yang dilayani	**Persen**	**0,45**		**0,32**		**0.51**		**0,32**		**#VALUE!**		**1**		**100%**		
	5	**03**	**02**	**2,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN**	**Persen**	**100**	**11.614.552**		**1.664.751**		**1.047.491**		**127.775**				**1.792.526**			
	5	03	02	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	4	627.241	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	5	9.731.241	2	1.558.753	1	948.824	0	127.775	0%	13%	2	1.686.528	40%	17%	BKPP
	5	03	02	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4	62.724	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	856.550	2	105.998	1	98.668	0	-	0%	0%	2	105.998	100%	12%	BKPP
	5	03	02	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	336.796	0	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	**03**	**02**	**2,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat**	**Dokumen**	**7510**	**4.858.688**		**1.718.949**		**568.431**		**12.600**				**1.731.549**			
	5	03	02	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	7500	1.070.866	2946	322.615	1500	132.291	151	12.600	10%	10%	3.097	335.215	41%	31%	BKPP
	5	03	02	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	10	3.787.823	4	1.396.335	2	436.140	0	-	0%	0%	4	1.396.335	40%	37%	BKPP
	5	**03**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu**	**Persen**		**27.291.391**		**2.550.956**		**1.973.472**		**-**				**2.550.956**			
	5	03	02	2,03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	1000	1.252.166	381	577.201	200	194.267	0	-	0%	0%	381	577.201	38%	46%	BKPP
	5	03	02	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*	Dokumen	4	1.045.401	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4	1.190.414	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	28	1.504.332	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	8	18.967.717	2	1.451.460	1	1.634.805	0	-	0%	0%	2	1.451.460	25%	8%	BKPP
	5	03	02	2,03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	1500	236.144	580	186.842	300	144.400	0	-	0%	0%	580	186.842	39%	79%	BKPP
	5	03	02	2,03	7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	4	418.161	1	227.488	-	-	0	-	0%	0%	1	227.488	25%	54%	BKPP
	5	03	02	2,03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	160	501.793	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,03	9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	4	607.182	1	46.460	-	-	0	-	0%	0%	1	46.460	25%	8%	BKPP
	5	03	02	2,03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	60	209.080	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	4	209.080	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	4	209.080	1	61.505		-	0	-	0%	0%	1	61.505	25%	29%	BKPP
	5	03	02	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	400	418.161	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	03	02	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	100	209.059	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	02	2,03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	4	313.620	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	**03**	**02**	**2,04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi**	**Persen**	**100**	**9.268.120**		**714.124**		**249.889**		**12.340**				**726.464**			
	5	03	02	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	8.894.631	2	541.574	1	142.177	0	-	0%	0%	2	541.574	50%	6%	BKPP
	5	03	02	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	3.750	90.472	878	34.350	750	26.721	0	-	0%	0%	878	34.350	23%	38%	BKPP
	5	03	02	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	800	122.644	200	80.809	200	28.230	0	-	0%	0%	200	80.809	25%	66%	BKPP
	5	03	02	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	100	160.373	28	57.390	20	52.760	2	12.340	10%	23%	30	69.730	30%	43%	BKPP
								Rata-rata capaian kinerja (%)									1,82%	4,22%			20,25%	18,29%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional**	**Persen**	**1,37**	**6.959.608**	**1,61**	**803.053**	**3,63**	**454.175**		**-**	**0%**	**0%**	**2**	**803.053**	**100%**	**12%**	
							Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	**Persen**	**2,97**		**0,25**		**3,8**				**0%**		**0**		**100%**		
	5	**04**	**02**	**2,01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal**	**Persen**	**100**	**5.286.966**		**803.053**		**454.175**		**-**				**803.053**			
	5	04	02	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	4	209.080	2	15.300	-	-	0	-	0%	0%	2	15.300	50%	7%	BKPP
	5	04	02	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	120	4.659.726	94	787.753	64	454.175	0	-	0%	0%	94	787.753	78%	17%	BKPP
	5	04	02	2,01	4	Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	418.161	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	**04**	**02**	**2,02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan fungsional**	**Persen**	**100**	**1.672.642**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	5	04	02	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	4	418.161	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	04	02	2,02	2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga	1	418.161	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	04	02	2,02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	120	418.161	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	04	02	2,02	5	Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	4	418.161	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			18,33%	3,46%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**5,50%**	**4,97%**			**27,97%**	**18,80%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				**76.939.943**		**34.549.267**		**20.791.501**		**1.497.674**				**36.046.941**			Inspektorat Daerah
	6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**76.939.943**		**34.549.267**		**20.791.501**		**1.497.674**				**36.046.941**			Inspektorat Daerah
	6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**76.939.943**		**34.549.267**		**20.791.501**		**1.497.674**				**36.046.941**			Inspektorat Daerah
1	**6**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**64.990.883**	**200**	**29.423.347**	**100**	**16.277.902**	**100**	**1.461.374**	**100%**	**9%**	**300**	**30.884.721**	**100,00%**	**47,52%**	
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**		**200**		**100**		**100**		**100%**		**300**		**100,00%**		
	6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**58.000**		**4.289**		**-**		**-**				**4.289**			
	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	18.000	2	1.305			-	-	0%	0%	2	1.305	22,22%	7,25%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4	8.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	24.000	3	2.984			-	-	0%	0%	3	2.984	25,00%	12,43%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**52.167.204**		**22.603.048**		**9.147.659**		**1.105.471**				**23.708.519**			
	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	52.167.204	42	22.603.048	14	9.147.659	3	1.105.471	21%	12%	45	23.708.519	100,00%	45,45%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**2.140.605**		**505.241**		**2.770.830**		**-**				**505.241**			
	6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	117.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	346	260.000	65	50.792	0	-	-	-	0%	0%	65	50.792	18,79%	19,54%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	200.000	0	-	60	80.820	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	1.563.605	57	454.449	60	2.690.010	-	-	0%	0%	57	454.449	24,78%	29,06%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**2.631.650**		**2.667.281**		**2.446.783**		**148.582**				**2.815.863**			
	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	130	126.817	66	93.055	35	50.424	-	-	0%	0%	66	93.055	50,77%	73,38%	Inspektorat Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	240	929.685	176	1.096.744	60	1.408.332	15	85.457	25%	6%	191	1.182.201	79,58%	127,16%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	75	339.592	42	175.269	15	75.835	3	17.162	20%	23%	45	192.431	60,00%	56,67%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	120.758	9	59.140	0	-	-	-	0%	0%	9	59.140	20,00%	48,97%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.428	3	11.297	1	4.500	-	-	0%	0%	3	11.297	60,00%	42,75%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	275	863.370	137	1.231.776	60	907.692	52	45.963	87%	5%	189	1.277.739	69%	147,99%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	6	225.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**1.265.000**		**76.400**		**375.600**		**-**				**76.400**			
	6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	450.000	0	-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	315.000	56	76.400	20	375.600	-	-	0%	0%	56	76.400	93,33%	24,25%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	2	300.000	0	-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	200.000	0	-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**5.035.855**		**2.669.550**		**848.899**		**141.551**				**2.811.101**			
	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.000	33	11.000	12	5.000	3	2.000	25%	40%	36	13.000	60,00%	50,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	782.855	32	371.937	12	150.299	3	31.251	25%	21%	35	403.188	58,33%	51,50%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.227.000	36	2.286.613	12	693.600	3	108.300	25%	16%	39	2.394.913	65,00%	56,66%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**1.692.569**		**897.538**		**688.131**		**65.770**				**963.308**			
	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	165.612	3	146.256	1	86.120	1	9.810	100%	11%	4	156.066	100,00%	94,24%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	9	1.019.622	27	642.839	9	574.971	2	55.960	22%	10%	29	698.799	100,00%	68,54%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	65.000	5	3.635	0	-	-	-	0%	0%	5	3.635	8,33%	5,59%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	222.335	115	84.808	30	27.040	-	-	0%	0%	115	84.808	82,14%	38,14%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000	1	20.000	0	-	-	-	0%	0%	1	20.000	25,00%	20,00%	Inspektorat Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	60.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	60.000				-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			23,35%	9,56%			37,40%	33,99%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	**6**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)**	**Level**	4	**10.592.430**	**9**	**4.599.365**	**4**	**3.552.769**		**36.300**	**0%**	**1%**	**9**	**4.635.665**	**100,00%**	**43,76%**	
							PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI	**Persen**	90		**259,03**		**85**				**0%**		**259,03**		**100,00%**		
							PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH REKOMENDASI HASIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA	**Persen**	90		**206**		**80**				**0%**		**206**		**100,00%**		
	6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persen**		**8.463.980**		**4.012.463**		**2.818.369**		**36.300**				**4.048.763**			
	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	37	1.351.600	20	487.969	8	182.310	-	-	0%	0%	20	487.969	54,05%	36,10%	Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	99	992.620	32	345.565	25	417.460	-	-	0%	0%	32	345.565	32,32%	34,81%	Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	172	442.000	67	169.960	34	303.375	-	-	0%	0%	67	169.960	38,95%	38,45%	Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	75	883.700	44	732.026	15	347.479	-	-	0%	0%	44	732.026	58,67%	82,84%	Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	390	3.341.710	204	1.586.093	80	1.273.745	5	4.800	6%	0%	209	1.590.893	53,59%	47,61%	Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	8	135.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	20	1.317.350	14	690.850	4	294.000	1	31.500	25%	11%	15	722.350	75,00%	54,83%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persen**		**2.128.450**		**586.902**		**734.400**		**-**				**586.902**			
	6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	120.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	65	2.008.450	22	586.902	15	734.400	0	-	0%	0%	22	586.902	33,85%	29,22%	Inspektorat Daerah
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			4,46%	1,58%			38,49%	35,99%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
3	**6**	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING DAN ASISTENSI**	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Level**	**4**	**1.356.630**	**9**	**526.555**	**4**	**960.830**		**-**	**0%**	**0%**	**9**	**526.555**	**100,00%**	**38,81%**	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	**Perangkat Daerah**	**29**		**75**		**29**				**0%**		**75**		**100,00%**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Jumlah PD/Unit yang Menerapkan Zona Integritas (ZI)	**Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan**	**69**		**165**		**69**				**0%**		**165**		**100,00%**		
							Jumlah PD/Unit yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi	**Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan**	**46**		**147**		**10**				**0%**		**147**		**100,00%**		
	6	**01**	**03**	**2 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persen**		**140.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	6	01	03	2 01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	8	70.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	03	2 01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	70.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**03**	**2 02**		**Pendamping dan Asistensi**	Persentase PD yang Mendapatkan Pendamping dan Asistensi	**Persen**		**1.216.630**		**526.555**		**960.830**		**-**				**526.555**			
	6	01	03	2 02	01	Pendamping Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	29	180.000	16	157.200	8	783.100	-	-	0%	0%	16	157.200	55,17%	87,33%	Inspektorat Daerah
	6	01	03	2 02	02	Pendamping, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Perangkat Daerah	29	168.020	50	80.647	29	31.000	0	-	0%	0%	50	80.647	100,00%	48,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	03	2 02	03	Koordinas,Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	270.000	10	215.908	3	118.130	-	-	0%	0%	10	215.908	83,33%	79,97%	Inspektorat Daerah
	6	01	03	2 02	04	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	46	598.610	8	72.800	11	28.600	-	-	0%	0%	8	72.800	17,39%	12,16%	Inspektorat Daerah
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			42,65%	37,91%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
														Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)			**9,27%**	**3,71%**			**39,51%**	**35,96%**	
														Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN RAMBAH				24.285.119		8.595.216		3.165.083		454.662				9.049.878			
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	18.495.485	200	7.603.481		2.921.688		454.662	#DIV/0!	16%	200	8.058.142	200%	44%	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925		7.401		1.066		0				7.401			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.263	6	3.790	2	586	0	-	0%	0%	6	3.790	60%	72%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ilkhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	2.632	3	3.611	1	480	0	-	0%	0%	3	3.611	60%	137%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	2.030	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.349.853		5.599.227		2.215.504		409.943				6.009.171			
	7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SPJ gaji dan tunjangan	14	12.268.645	14	5.598.689	14	2.215.504	4	409.943	29%	19%	14	6.008.632	100%	49%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4	40.604	0	0		0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dokumen	4	40.604	1	538			0	-	0%	0%	1	538	25%	1%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	178.658		0		0		0				0			
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut	Stel	172	97.450	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	81.208	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.381.554		596.947		178.473		0				596.947			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	3	14.538	9	6.445	3	4.589	0	-	0%	0%	9	6.445	300%	44%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	43	294.680	36	168.344	6	33.541	0	-	0%	0%	36	168.344	84%	57%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	4	448.091	9	135.525	3	58.480	0	-	0%	0%	9	135.525	225%	30%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	50	297.117	30	116.632	10	26.599	0	-	0%	0%	30	116.632	60%	39%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan / Surat Kabar Yang Tersedia	Jenis	2	27.408	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	903	299.720	276	170.001	99	55.264	0	-	0%	0%	276	170.001	31%	57%	Kecamatan Rambah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**2.349.387**		**1.239.704**		**439.534**		**44.718**				**1.284.423**			
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	- Lembar - Kilogram	1840	20.555	999	9.730	333	2.250	0	-	0%	0%	999	9.730	54%	47%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	4	202.030	12	91.868	4	46.484	4	8.618	100%	19%	16	100.486	100%	50%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	107.753	1	1.790		0	0	-	0%	0%	1	1.790	50%	2%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	13	2.019.048	13	1.136.317	13	390.800	1	36.100	8%	9%	13	1.172.417	100%	58%	Kecamatan Rambah
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.523.620**		**27.075**		**24.619**		**0**				**27.075**			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	Unit	40	16.242	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	40	86.238	10	27.075	5	24.619	0	-	0%	0%	10	27.075	25%	31%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	4	710.570	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	4	710.570	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**702.489**		**133.125**		**62.493**		**0**				**133.125**			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	Unit	1	197.661	3	81.199	1	36.455	0	-	0%	0%	3	81.199	100%	41%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	Unit	3	182.718	3	40.546	1	26.038	0	-	0%	0%	3	40.546	100%	22%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	16	121.812	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	50	17.580	13	11.380			0	-	0%	0%	13	11.380	26%	65%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	1	182.718	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
																	9,73%	3,31%			55,54%	29,76%	
																	SR	SR			SR	SR	
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**191.662**	**260,34**	**27.512**		**25.122**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**260,34**	**27.512**	**100%**	**14%**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**90.152**		**27.512**		**25.122**		**-**				**27.512**			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	90.152	3	27.512	1	25.122	0	-	0%	0%	3	27.512	60%	31%	Kecamatan Rambah
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persen		**101.510**		**0**		**0**		**0**				**0**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	4	101.510			0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			30,00%	15,26%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**3.855.949**	**300**	**716.127**		**202.958**		**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**300**	**716.127**	**100%**	**19%**	
	7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**367.763**		**132.366**		**161.956**		**0**				**132.366**			
	7	01	03	2,01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	367.763	**1**	132.366	1	161.956	0	-	0%	0%	1	132.366	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**3.034.163**		**497.099**		**41.002**		**0**				**497.099**			
	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan	5	22.727	3	10.920	1	3.860	0	-	0%	0%	3	10.920	60%	48%	Kecamatan Rambah
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan	4	1.840.618	2	393.014		0	0	-	0%	0%	2	393.014	50%	21%	Kecamatan Rambah
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	12	1.170.817	4	93.166	1	37.142	0	-	0%	0%	4	93.166	33%	8%	Kecamatan Rambah
	7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**454.023**		**86.662**		**0**		**0**				**86.662**			
	7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Kegiatan PKK di Kecamatan Rambah yang dilaksanakan	Kegiatan	15	454.023	6	86.662			0	-	0%	0%	6	86.662	40%	19%	Kecamatan Rambah
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			36,67%	19,29%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	**Persen**	**100**	**1.094.500**	**200**	**200.000**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**200.000**	**100%**	**18%**	
	7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persen**	**100**	**1.094.500**		**200.000**		**0**		**0**				**200.000**			
	7	01	04	2,01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu)	Kegiatan	5	1.052.684	2	200.000		0	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	19%	Kecamatan Rambah
	7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	4	41.816	0	0	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
								Rata-rata capaian kinerja (%)													20,00%	9,50%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
5	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**138.154**	**300**	**45.980**		**15.315**		**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**300**	**45.980**	**100%**	**33%**	
	7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**138.154**		**45.980**		**15.315**		**0**				**45.980**			
	7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	5	138.154	3	45.980	1	15.315	0	-	0%	0%	3	45.980	60%	33%	Kecamatan Rambah
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	33,28%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	**Persen**	**100**	**509.368**	**200**	**2.116**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**2.116**	**100%**	**0%**	
	7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persen**	**100**	**509.368**		**2.116**		**0**		**0**				**2.116**			
	7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	4	101.510	1	1.380			0	-	0%	0%	1	1.380	25%	1%	Kecamatan Rambah
	7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Pemerintahan Desa	Kegiatan	4	81.208	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan	20	101.510	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	1	6	2,01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	4	81.208	1	736			0	-	0%	0%	1	736	25%	1%	Kecamatan Rambah
	7	1	6	2,01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	12	62.724	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan	16	81.208	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
														Rata-rata capaian kinerja (%)							8,33%	0,38%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
														Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**2,43%**	**0,83%**			**35,09%**	**17,91%**	
														Predikat kinerja dari seluruh program			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN TAMBUSAI**				**21.610.273**		**9.984.886**		**3.599.818**		**495.922**				**9.991.167**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**16.299.279**	**100**	**8.380.561**	**100**	**3.061.134**	**0**	**495.922**	**-**	**16,20**	**100**	**8.876.484**	**100,00**	**54,46**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**20**	**9.925**	**2**	**390**	**-**	**0**	**0**	**0**			**2**	**390**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	390			0	-	-	-	2	390	20%	7%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632					0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030					0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**12.610.606**	**100**	**6.435.232**	**100**	**2.517.049**	**25**	**441.522**			**125**	**6.876.755**			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	12.600.485	42	6.435.232	14	2.517.049	3	441.522	21%	18%	45	6.876.755	100%	55%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.060					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.060					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**118.326**		**0**		**0**		**0**			**0**	**-**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	138	108.276					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10.050					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.161.698**	**100**	**656.555**	**100**	**177.806**	**0**	**0**			**100**	**656.555**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	27.460	17	14.938	9	4.413	0	-	0%	0%	17	14.938	38%	54%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	200	546.529	52	215.437	40	49.187	0	-	0%	0%	52	215.437	26%	39%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	406.202	12	240.531	6	101.905	0	-	0%	0%	12	240.531	40%	59%	Kecamatan Tambusai
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	22.950	31	102.499	11	6.840	0	-	0%	0%	31	102.499	56%	447%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	28.238	5	14.553	1	4.401	0	-	0%	0%	5	14.553	100%	52%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	130.320	296	68.598	85	11.060	0	-	0%	0%	296	68.598	100%	53%	Kecamatan Tambusai

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**2.398.724**	**100**	**1.288.384**	**100**	**366.278**	**0**	**54.400**			**100**	**1.342.784**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.789	45	24.190	24	8.730	0	-	0%	0%	45	24.190	75%	66%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	170.269	48	35.046	24	31.148	0	-	0%	0%	48	35.046	80%	21%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.191.666	48	1.229.148	24	326.400	6	54.400	25%	17%	54	1.283.548	90%	59%	Kecamatan Tambusai
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**965.001**		**156.638**	**100**	**57.214**	**0,00**	**0**			**0**	**156.638**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**529.700**		**23.607**		**39.327**		**0**			**0**	**23.607**			
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	134.429					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	34	78.338	2	9.647			0	-	0%	0%	2	9.647	6%	12%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	120.702	2	13.960	7	39.327	0	-	0%	0%	2	13.960	13%	12%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	93.300					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	102.931					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**435.302**	**100**	**133.031**	**100**	**17.888**	**0**	**0**			**100**	**133.031**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	157.067	3	79.601	1	16.388	-	-	0%	0%	3	79.601	100%	51%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	18.272					0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	37.395					0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	34.793	7	13.430	4	1.500	0	-	0%	0%	7	13.430	17%	39%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	187.775	1	40.000			0	-	-	-	1	40.000	25%	21%	Kecamatan Tambusai
								Rata-rata capaian kinerja (%)									3,57%	2,63%			32,81%	38,71%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**192.975**	**181,75**	**49.820**	**100**	**27.340**		**-**	**-**	**-**	**182**	**49.820**	**100%**	**26%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**91.464**	**100**	**49.820**	**100**	**27.340**	**0**	**-**	**-**	**-**	**100**	**49.820**	**100%**	**54%**	
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	91.464	3	49.820	1	27.340	0	-	0%	0%	3	49.820	60%	54%	Kecamatan Tambusai
	7	1	3	2,02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**101.510**		**0**		**0**		**0**				**0**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	3	2,02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	60.906					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	3	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	40.604					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0%	0%			20,00%	18,16%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.689.018**	**299,54**	**1.175.197**	**100**	**454.130**	**0,00**	**0**	**-**	**-**	**299,54**	**662.884**	**100%**	**25%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**299.250**	**100**	**97.145**	**100**	**101.270**	**0**	**0**			**100,00**	**132.066**			
	7	1	3	2,01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	299.250	4	97.145	2	101.270	0	-	0%	0%	4	97.145	50%	32%	Kecamatan Tambusai
	7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**2.326.985**		**1.060.302**	**100**	**352.860**	**0**	**0**			**-**	**513.069**			
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	35.508	3	17.171	1	5.244	0	-	0%	0%	3	17.171	100%	48%	Kecamatan Tambusai
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	15	1.330.552	4	547.233	2	134.900	0	-	0%	0%	4	547.233	27%	41%	Kecamatan Tambusai
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	958.825	4	495.898	2	212.716	0	-	0%	0%	4	495.898	29%	52%	Kecamatan Tambusai
	7	1	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	2.100	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**62.783**	**100**	**17.750**		**0**		**0**			**100,00**	**17.750**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	62.783	1	17.750			0	-	0%	0%	1	17.750	50%	28%	Kecamatan Tambusai
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			42,54%	33,66%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**1.197.062**	**200**	**200.000**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200,00**	**222.670**	**200%**	**19%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**1.197.062**	**100**	**200.000**				**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**	**200.000**	**100%**	**17%**	
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	10	1.197.062	4	200.000			0	-	0%	0%	4	200.000	40%	17%	Kecamatan Tambusai
								Rata-rata capaian kinerja (%)													40,00%	16,71%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**125.127**	**200**	**22.670**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200,00**	**22.670**	**200%**	**18%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**125.127**	**100**	**22.670**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**	**22.670**	**100%**	**18%**	
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	125.127	1	22.670			0	-	0%	0%	1	22.670	20%	18%	Kecamatan Tambusai
								Rata-rata capaian kinerja (%)													20,00%	18,12%	
								Predikat kinerja													SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**141.810**	**200**	**0**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**0**	**200%**	**0%**	
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**141.810**	**0**	**0**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**0**	**0%**	**0%**	
	7	1	6	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	6	30.301					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	81.208	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	18	30.301					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																					SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**1,19%**	**0,88%**			**25,89%**	**20,89%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : KECAMATAN ROKAN IV KOTO

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN ROKAN IV KOTO**				**16.675.589**		**9.136.689**		**3.295.833**		**472.488**				**9.609.178**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**13.370.201**	**288,72**	**7.270.984**	**100**	**2.951.204**	**-**	**472.488**	**0%**	**16%**	**289**	**7.743.472**	**100%**	**58%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**7.895**	**100**	**6.615**	**3**	**1.597**	**0**	**0**			**100**	**6.615**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	3.852	2	1.058	0	-	0%	0%	6	3.852	60%	73%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,01	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	2.763	1	538	0	-	0%	0%	3	2.763	60%	105%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**10.506.704**	**100**	**5.570.011**	**100**	**2.309.137**	**28**	**411.488**			**128**	**5.981.499**			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	10.493.481	14	5.561.816	14	2.307.034	4	411.488	29%	18%	18	5.973.305	100%	57%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	3	4.101	1	1.098	0	-	0%	0%	3	4.101	60%	78%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	7.959	3	4.094	1	1005	0	-	0%	0%	3	4.094	60%	51%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**15.000**	**0**	**0**	**100**	**14.700**		**0**			**-**	**0**			
	7	1	1	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	15	15.000	0	-	13	14.700	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**703.627**	**100**	**388.429**	**100**	**133.085**	**0**	**0**			**100**	**388.429**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	26.317	12	15.319	4	5.315	0	-	0%	0%	12	15.319	60%	58%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	231.457	18	100.845	6	30.688	0	-	0%	0%	18	100.845	60%	44%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	157.903	9	104.103	3	34.465	0	-	0%	0%	9	104.103	60%	66%	Kecamatan Rokan IV Koto
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	116.738	30	67.325	10	22.245	0	-	0%	0%	30	67.325	60%	58%	Kecamatan Rokan IV Koto

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	12.024	6	4.440	2	2.358	0	-	0%	0%	6	4.440	100%	37%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	495	159.188	292	96.397	253	38.014	0	-	0%	0%	292	96.397	59%	61%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**2.136.975**		**1.305.929**	**100**	**492.685**	**100**	**61.000**			**100**	**1.366.929**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1200	12.024	1.258	12.580	505	5.050	0	-	0%	0%	1.258	12.580	100%	105%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	78.951	2	26.655	2	16.035	0	-	0%	0%	2	26.655	100%	34%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.046.000	12	1.266.694	12	471.600	3	61.000	25%	13%	15	1.327.694	100%	65%	Kecamatan Rokan IV Koto
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**900.456**	**100**	**387.163**	**100**	**75.738**	**0,00**	**0**			**100**	**387.163**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**444.944**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			**-**	**0**			
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	232.124					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	105.955					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	86.865					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**455.513**	**100**	**387.163**	**100**	**75.738**	**0**	**0**			**100**	**387.163**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	91.642	1	111.002	1	27.800	0	-	0%	0%	1	111.002	100%	121%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	215.627	2	106.545	2	41.478	0	-	0%	0%	2	106.545	100%	49%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	13.477	3	11.588			0	-	0%	0%	3	11.588	60%	86%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	26.953	16	26.170	6	6.460	0	-	0%	0%	16	26.170	100%	97%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	107.814	1	131.858			0	-	0%	0%	1	131.858	100%	122%	Kecamatan Rokan IV Koto
																	3,15%	1,81%			62,46%	56,94%	
																	SR	SR			R	R	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**194.065**	**264,968**	**96.151**	**100**	**26.206**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**264,97**	**96.151**	**100%**	**50%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**194.065**	**100**	**96.151**	**100**	**26.206**	**0**	**-**			**100**	**96.151**			
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	194.065	3	96.151	1	26.206	0	-	0%	0%	3	96.151	60%	50%	Kecamatan Rokan IV Koto
																Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%	0,00%			60,00%	49,55%	
																Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**1.601.034**	**297,62**	**1.087.194**	**100**	**212.340**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**297,62**	**1.087.194**	**100%**	**68%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**131.721**	**100**	**140.394**	**100**	**119.097**	**0**	**0**			**100**	**140.394**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	131.721	2	140.394	2	119.097	0	-	0%	0%	2	140.394	25%	107%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**1.439.313**	**100**	**850.818**	**100**	**93.243**	**0**	**0**			**100**	**850.818**			
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	26.953	2	7.363	1	5.551	0	-	0%	0%	2	7.363	40%	27%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	1.078.137	3	717.186	1	64.000	0	-	0%	0%	3	717.186	60%	67%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	334.222	3	126.269	1	23.692	0	-	0%	0%	3	126.269	60%	38%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**30.000**	**100**	**95.982**	**0**	**0**	**0**	**0**			**100**	**95.982**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	30.000	2	95.982			0	-	0%	0%	2	95.982	100%	320%	Kecamatan Rokan IV Koto
																Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%	0,00%			57,00%	111,63%	
																Predikat kinerja	SR	SR			R	ST	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**426.549**	**200**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**200.000**	**100%**	**47%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**426.549**	**100**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**100**	**200.000**			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	426.549	2	200.000	0	-	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	47%	Kecamatan Rokan IV Koto
																Rata-rata capaian kinerja (%)					40,00%	46,89%	
																Predikat kinerja					SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	75.470	300	33.678	100	12.904	0	0	0%	0%	300	33.678	100%	45%	
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	75.470	100	33.678	100	12.904	0	0			100	33.678			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	75.470	3	33.678	1	12.904	0	-	0%	0%	3	33.678	60%	45%	Kecamatan Rokan IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			60,00%	44,62%	
Predikat kinerja																	SR	SR			R	SR	
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	107.814	300	61.520	100	17.440	0	0	0%	0%	300	61.520	100%	57%	
	7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	107.814	100	61.520	100	17.440	0	0			100	61.520			
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	107.814	3	61.520	1	17.440	0	-	0%	0%	3	61.520	60%	57%	Kecamatan Rokan IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			60,00%	57,06%	
Predikat kinerja																	SR	SR			R	R	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**0,63%**	**0,36%**			**56,58%**	**61,11%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**R**	**R**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN KEPENUHAN**	**3.307.576**			**22.926.980**		**10.032.579**		**3.327.672**		**491.420**				**10.523.999**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**18.860.552**	**292,58**	**8.318.532**	**100**	**3.118.704**	**100,00**	**491.420**	**100%**	**16%**	**393**	**8.809.952**	**100%**	**47%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**20**	**9.925**	**7**	**5.376**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		**5.376**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.154			0	-	0%	0%	4	2.154	40%	41%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.222			0	-	0%	0%	3	3.222	60%	122%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**12.538.020**	**100**	**5.797.623**	**100**	**2.318.032**	**25**	**427.438**	**25%**	**18%**		**6.225.061**			
	7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	312	12.456.812	42	5.794.567	14	2.318.032	4	427.438	29%	18%	46	6.222.005	15%	50%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	40.604	1	1.500			0	-	0%	0%	1	1.500	25%	4%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	4	40.604	1	1.556			0	-	0%	0%	1	1.556	25%	4%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**44.302**		**13.730**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		**13.730**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	46	24.000	26	13.730			0	-	0%	0%	26	13.730	57%	57%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20.302	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.452.229**	**100**	**802.916**	**100**	**183.752**	**100**	**0**	**100%**	**0%**		**802.916**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	14.538	5	5.666			0	-	0%	0%	5	5.666	100%	39%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	43	291.905	19	192.589	9	26.233	0	-	0%	0%	19	192.589	44%	66%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	448.091	7	242.569	4	44.057	0	-	0%	0%	7	242.569	100%	54%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	370.567	21	237.071	10	82.262	0	-	0%	0%	21	237.071	100%	64%	Kecamatan Kepenuhan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	27.408	1	3.960			0	-	0%	0%	1	3.960	50%	14%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	550	299.720	453,6154	121.060	416	31.200	0	-	0%	0%	454	121.060	82%	40%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**2.728.049**		**1.479.294**	**100**	**547.964**	**100**	**63.981**	**100%**	**12%**		**1.543.276**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	34.518	12	25.500	4	7.000	0	-	0%	0%	12	25.500	60%	74%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	231.794	3	117.645	1	49.956	0	9.881	0%	20%	3	127.526	75%	55%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	101.510	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.360.227	33	1.336.150	12	491.008	4	54.100	33%	11%	37	1.390.250	100%	59%	Kecamatan Kepenuhan
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**2.088.027**		**219.594**	**100**	**68.957**	**100**	**0**	**100%**	**0%**		**219.594**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.515.774**		**72.335**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		**72.335**			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	16.242	2	17.255			0	-	0%	0%	2	17.255	25%	106%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	97.450	5	10.080			0	-	0%	0%	5	10.080	25%	10%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	710.570	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	691.513	1	45.000			0	-	0%	0%	1	45.000	25%	7%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**572.253**		**147.258**	**100**	**68.957**	**100**	**0**	**100%**	**0%**		**147.258**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	71.443	3	81.593	1	48.957	0	-	0%	0%	3	81.593	100%	114%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	182.718	6	24.285			0	-	0%	0%	6	24.285	100%	13%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	16	121.812	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	13.562	16	17.080			0	-	0%	0%	16	17.080	32%	126%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	182.718	1	24.300	1	20.000	0	-	0%	0%	1	24.300	100%	13%	Kecamatan Kepenuhan
														Rata-rata capaian kinerja (%)			6,19%	4,92%			49,63%	41,98%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**236.856**	**278,08**	**77.582**	**100**	**28.952**		**-**	**0%**	**0%**	**278**	**77.582**	**100%**	**33%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**135.346**	**100**	**77.582**	**100**	**28.952**		**-**	**0%**	**0%**		**77.582**			
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	135.346	3	77.582	1	28.952	0	-	0%	0%	3	77.582	60%	57%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**101.510**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	7	1	2	2,02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	101.510					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			30,00%	28,66%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.141.512**	**294,1283**	**1.373.642**	**100**	**159.920**	**100,00**	**0**	**100%**	**0%**	**394**	**1.373.642**	**100%**	**64%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**437.664**	**100**	**223.958**	**100**	**137.549**	**100**	**0**				**223.958**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	437.664	4	223.958	2	137.549	0	-	0%	0%	4	223.958	50%	51%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**1.479.380**	**100**	**1.047.028**	**100**	**22.370**		**0**				**1.047.028**			
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	73.630	3	41.636	1	10.222	0	-	0%	0%	3	41.636	60%	57%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	840.832	3	668.943			0	-	0%	0%	3	668.943	60%	80%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	564.919	3	336.450	1	12.149	0	-	0%	0%	3	336.450	60%	60%	Kecamatan Kepenuhan
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**224.468**		**102.656**		**0**		**0**				**102.656**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakata	3	102.656	1	102.656			0	-	0%	0%	1	102.656	33%	100%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	3	2,03	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	121.812					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			43,89%	57,81%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	R	
4	7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**1.093.288**	**200**	**200.000**	**100**	**0**		**0**	**0%**	**#DIV/0!**	**200**	**200.000**	**100%**	**18%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**1.093.288**	**100**	**200.000**	**100**	**0**		**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**200.000**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	1.052.684	2	200.000			0	-	0%	0%	2	200.000	40%	19%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	4	2,01	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	40.604	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
																Rata-rata capaian kinerja (%)					20,00%	9,50%	
																Predikat kinerja					SR	SR	
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**63.161**	**300**	**24.410**	**100**	**20.096**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300**	**24.410**	**100%**	**39%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**63.161**	**100**	**24.410**	**100**	**20.096**	**0**	**0**	**0%**	**0%**		**24.410**			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	63.161	2	24.410	1	20.096	0	-	0%	0%	2	24.410	40%	39%	Kecamatan Kepenuhan
																Rata-rata capaian kinerja (%)					40,00%	38,65%	
																Predikat kinerja					SR	SR	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**531.611**	**200**	**38.412**	**100**	**0**		**0**	**0%**	**#DIV/0!**	**200**	**38.412**	**100%**	**7%**	
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**531.611**	**100**	**38.412**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		**38.412**			
	7	1	6	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	101.510	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	105.268	2	38.412			0	-	0%	0%	2	38.412	40%	36%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	20	101.510	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	6	2,01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	4	81.208	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	6	2,01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	12	60.906	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	16	81.208	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
																Rata-rata capaian kinerja (%)					6,67%	6,08%	
																Predikat kinerja					SR	SR	
																Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**1,55%**	**1,23%**			**31,70%**	**30,45%**	
																Predikat kinerja dari seluruh program			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN**				**23.394.081**		**10.455.335**		**3.288.328**		**472.611**				**16.958.863**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**19.762.102**	**200**	**8.790.728**	**100**	**3.099.489**	**-**	**472.611**	**0%**	**15%**	**200**	**15.707.576**	**200,00%**	**79,48%**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**100**	**15.361**	**1**	**5.302**	**1**	**2.984**		**-**			**1**	**5.113.683**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.526	1	5.302	1	2.984	-	-	0%	0%	1	5.302	20,00%	95,95%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5.526					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.310					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100**	**10.022.537**	**100**	**4.518.424**	**100**	**2.033.942**	**-**	**348.961**			**100**	**6.203.239**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	5	10.005.296	3	4.512.171	1	2.029.848	1	348.961	100%	17%	4	4.861.132	80,00%	48,59%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	8.620	1	2.136	1	2.137	-	-	0%	0%	1	2.136	20,00%	24,78%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	8.620	2	4.116	1	1.957	-	-	0%	0%	2	4.116	40,00%	47,75%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100**	**409.462**		-		-		-				**-**			**#DIV/0!**
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	150.854					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	258.608					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100**	**1.619.313**	**100**	**1.235.426**	**100**	**256.360**	-	**-**			**100**	**1.235.426**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah/Kotak/Meter	320	28.755	102	106.593	35	8.415	-	-	0%	0%	102	106.593	31,88%	370,69%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah/Kotak/Rim	8940	303.862	2.385	326.990	587	84.688	-	-	0%	0%	2.385	326.990	26,68%	107,61%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	Dus/Kotak/Bungkus	30.425	554.994	9.095	425.488	3.007	71.878	-	-	0%	0%	9.095	425.488	29,89%	76,67%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Rim/Lembar/Buah	101.955	335.927	35.413	215.813	15.012	68.698	-	-	0%	0%	35.413	215.813	34,73%	64,24%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar/lembar	5650	28.098	1.133	16.521			-	-	0%	0%	1.133	16.521	20,05%	58,80%	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DalamDaerah	Orang, Hari, Kali	1350	367.676	914	144.021	174	22.682	-	-	0%	0%	914	144.021	67,70%	39,17%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**1.794.114**	**100**	**210.132**	**0**	**0**	**-**	**0**			**100**	**210.132**			
	7	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	300.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	105.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	215.506	21	59.455			-	-	0%	0%	21	59.455	35,00%	27,59%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	258.608	12	120.677			-	-	0%	0%	12	120.677	30,00%	46,66%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	457.500	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	457.500	1	30.000			-	-	0%	0%	1	30.000	50,00%	6,56%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100	**4.368.839**	**100**	**2.300.991**	**100**	**761.003**	-	**123.651**			**100**	**2.424.641**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (materai 10.000 dan materai 6.000)	Lembar	36.740	36.745	1977	33.650	900	9.000	-	-	0%	0%	1.977	33.650	5,38%	91,58%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	72.931	28	27.001	4	24.003	1	3.151	25%	13%	29	30.151	48,33%	41,34%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	16	215.506	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60	4.043.657	36	2.240.340	12	728.000	3	120.500	25%	17%	39	2.360.840	65,00%	58,38%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100	**1.532.476**	**100**	**730.586**	**100**	**45.200**	**-**	**-**			**100**	**730.586**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	190.648	3	107.006	1	34.480	-	-	0%	0%	3	107.006	60,00%	56,13%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	64.652	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	43.101	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	48.791	40	28.580	15	10.720	-	-	0%	0%	40	28.580	40,00%	58,58%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	754.272	3	595.000			-	-	0%	0%	3	595.000	75,00%	78,88%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	258.608	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	172.405	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)									10,71%	3,35%			25,15%	45,16%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**109.206**	**185,91**	**52.552**	**100**	**31.872**		**-**	**0%**	**0%**	**185,91**	**52.552**	**100,00%**	**48,12%**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**	**Persen**	100	**109.206**	**100**	**52.552**	**100**	**31.872**		**-**	**0%**	**0%**	**100,00**	**52.552**	**100,00%**	**48,12%**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (musrenbang kecamatan)	Kegiatan	5	109.206	3	52.552	1	31.872	-	-	0%	0%	3	52.552	60,00%	48,12%	Kecamatan Kunto Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	48,12%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.110.281**	**300**	**1.381.995**	**100**	**153.366**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**300**	**968.676**	**100,00%**	**45,90%**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**420.251**	**100**	**148.805**	**100**	**148.727**	**-**	**-**			**100**	**368.485**			
	7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	420.251	2	148.805	2	148.727	-	-	0%	0%	2	148.805	22,22%	35,41%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			100	**1.657.689**	**100**	**1.028.286**	**100**	**4.639**	**-**	**-**			**100**	**395.286**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	27.628	3	14.776	1	4.639	-	-	0%	0%	3	14.776	60,00%	53,48%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit	5	1.077.498	4	633.000			-	-	0%	0%	4	633.000	80,00%	58,75%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	552.563	3	380.510			-	-	0%	0%	3	380.510	60,00%	68,86%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**32.340**	**100**	**204.904**		**-**		**-**			**100**	**204.904**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	32.340	2	204.904			-	-	0%	0%	2	204.904	100,00%	633,59%	Kecamatan Kunto Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			64,44%	170,02%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	ST	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**1.105.126**	**200**	**200.000**	**0**	**-**		**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**200.000**	**100%**	**18%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**		**1.105.126**	**100**	**200.000**	**0**	**-**		**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100**	**200.000**	**100,00%**	**18,10%**	
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1.105.126	2	200.000			-	-	0%	0%	2	200.000	100%	18%	Kecamatan Kunto Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00%	18,10%	
								Predikat kinerja													ST	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**132.753**	**200**	**-**		**-**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**200**	**-**	**200%**	**0,00%**		
	7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**		**132.753**		**-**		**-**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**		
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah DokumenTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	132.753					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kunto Darussalam
														Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**174.613**	**300**	**30.060**	**100**	**3.600**	**100**	**-**	**100%**	**0%**	**400**	**30.060**	**400%**	**17,22%**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**		**174.613**	**100**	**30.060**	**100**	**3.600**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**100**	**30.060**	**#DIV/0!**	**17,22%**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	88.410	3	30.060	1	3.600	-	-	0%	0%	3	30.060	60,00%	34,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	86.203					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			30,00%	17,00%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
														Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**2,68%**	**0,84%**			**46,60%**	**49,73%**	
														Predikat kinerja dari seluruh program			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN UJUNGBATU

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN**				**28.551.836**		**13.667.407**		**4.515.582**		**825.030**				**14.492.437**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**21.156.441**	**198,4**	**11.170.228**	**100**	**4.046.755**	**0**	**810.119**	**0%**	**20%**	**198**	**11.980.347**	**100%**	**57%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**2.000**	**4**	**3.490**	**100**	**1.488**	**0**	**-**				**3.490**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.000	3	3.490	2	1.488	0	-	0%	0%	3	3.490	100%	349%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**17.720.252**	**100**	**9.182.842**	**100**	**3.572.197**	**25**	**742.185**				**9.925.027**			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	444	17.710.102	902	9.180.127	14	3.570.870	4	742.185	29%	21%	906	9.922.312	100%	56%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4.060	1	1.225	1	1.327	0	-	0%	0%	1	1.225	25%	30%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.090	1	1.490	0	0	0	-	0%	0%	1	1.490	25%	24%	Kecamatan Ujung Batu
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**31.200**		**0**		**0**		**0**				**0**			
	7	1	1	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	52	31.200					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.067.118**	**100**	**976.273**	**100**	**163.125**		**21.676**				**997.949**			**0%**
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	33.240	13	38.856	5	4.250	0	-	0%	0%	13	38.856	100%	117%	8%
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	382.046	60	204.508	40	44.718	10	10.878	25%	24%	70	215.386	100%	56%	2%
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	903.795	15	424.569	5	44.130	1	9.598	20%	22%	16	434.167	100%	48%	7%
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	329.909	14	161.226	10	43.828	0	-	0%	0%	14	161.226	100%	49%	7%
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	28.162	6	13.871	2	4.800	1	1.200	50%	25%	7	15.071	100%	54%	17%

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2497	389.965	1113	133.243	165	21.399	0	-	0%	0%	1.113	133.243	45%	34%	0%
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.335.872**		**1.007.622**	**100**	**309.945**		**46.257**				**1.053.880**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	41.058	6	15.950	4	4.000	0	-	0%	0%	6	15.950	100%	39%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	193.036	5	78.306	2	67.145	0	6.457	0%	10%	5	84.763	83%	44%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	50	101.500	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.000.278	36	913.366	12	238.800	3	39.800	25%	17%	39	953.166	100%	95%	Kecamatan Ujung Batu
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**2.018.480**	**100**	**352.358**	**100**	**54.960**		**4.733**				**357.091**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.529.648**	**100**	**223.052**	**0**	**0**	**0**	**0**				**223.052**			
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	341.147					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	192	315.983	12	90.253			0	-	0%	0%	12	90.253	6%	29%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	368.088	10	132.799			0	-	0%	0%	10	132.799	50%	36%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	504.430					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**488.832**	**100**	**129.306**	**100**	**54.960**	**0**	**4.733**				**134.039**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	205.520	4	101.186	1	41.000	1	4.733	100%	12%	5	105.919	100%	52%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	33.000				0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	32.480				0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	175	55.432	66	28.120	16	13.960	0	-	0%	0%	66	28.120	38%	51%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	162.400				0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
								Rata-rata capaian kinerja (%)									17,76%	9,26%			50,87%	46,50%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	SR	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**334.200**	**283,43**	**93.732**	**100**	**21.452**	**0**	**7.052**	**0%**	**33%**	**#REF!**	**100.784**	**100%**	**30%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**293.600**	**100**	**93.732**	**100**	**21.452**	**0**	**7.052**				**100.784**				
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	293.600	3	93.732	1	21.452	0	7.052	0%	33%	3	100.784	60%	34%	Kecamatan Ujung Batu
	7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**40.600**		**-**		**-**		**-**					**-**			
	7	1	2	2,02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	20.300					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	20.300					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	32,87%			20,00%	11,44%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**3.673.453**	**300**	**1.843.890**	**100**	**392.414**		**3.126**	**0%**	**1%**	**300**	**1.847.015**	**100%**	**50%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**439.396**	**100**	**127.290**	**100**	**119.129**	**100**	**0**	**100%**	**0%**		**127.290**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	439.396	1	127.290	2	119.129	0	-	0%	0%	1	127.290	13%	29%	Kecamatan Ujung Batu
	7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**3.143.869**	**100**	**1.548.319**	**100**	**273.285**		**3.126**				**1.551.445**			
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	29.360	1	16.376	1	6.133	1	3.126	100%	51%	2	19.502	100%	66%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1.145.040	3	662.026			0	-	0%	0%	3	662.026	100%	58%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	1.969.469	9	869.917	3	267.152	0	-	0%	0%	9	869.917	64%	44%	Kecamatan Ujung Batu
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**90.188**	**100**	**168.281**		**0**	**0**	**0**				**168.281**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	90.188	2	168.281			0	-	0%	0%	2	168.281	50%	187%	Kecamatan Ujung Batu
								Rata-rata capaian kinerja (%)									33,33%	16,99%			65,36%	76,79%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	T	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**1.174.400**	**200**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**200.000**	**100%**	**17%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**1.174.400**	**100**	**200.000**	**0**	**0**		**0**			**100**	**200.000**			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	1.174.400	2	200.000	0	-	0	-	0%	0%	2	200.000	100%	17%	Kecamatan Ujung Batu
								Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00%	17,03%	
								Predikat kinerja													ST	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**77.423**	**200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**-**	**100%**	**0%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**77.423**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**-**	**-**			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokuem	1	77.423	0	-	0	0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																					SR	SR	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**117.440**	**300**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**300**	**7.200**	**100%**	**6%**	
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**117.440**	**100**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**			**100**	**7.200**			
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	117.440	2	7.200	0	0	0	-	0%	0%	2	7.200	100%	6%	Kecamatan Ujung Batu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00%	6,13%	
Predikat kinerja																					ST	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**17,03%**	**19,71%**			**56,04%**	**26,32%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**S**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KABUN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN KABUN**				**6.914.282**		**7.337.229**		**2.725.849**		**497.049**				**7.834.278**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**6.150.179**	**298,9**	**6.918.121**	**100**	**2.581.793**	**-**	**488.157**	**0%**	**19%**	**299**	**7.406.278**	**100%**	**120%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**10.527**	**11**	**10.688**	**4**	**4.209**	**0**	**0**				**10.688**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	5.434	2	1.262	0	-	0%	0%	6	5.434	60%	103%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.078	1	1.683	0	-	0%	0%	3	3.078	60%	117%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	2	2.176	1	1.263	0	-	0%	0%	2	2.176	40%	83%	Kecamatan Kabun
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.595.713**	**100**	**5.657.665**	**100**	**2.112.282**	**0**	**429.491**				**6.087.155**			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	42	5.652.442	14	2.109.337	3	429.491	21%	20%	45	6.081.933	54%	132%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.061	1	1.262	0	-	0%	0%	3	3.061	60%	116%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.161	1	1.683	0	-	0%	0%	2	2.161	40%	82%	Kecamatan Kabun
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**42.625**	**0**	**0**	**100**	**28.400**		**0**				**-**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38	17.120			35	28.400	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	25.505					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**368.454**	**100**	**434.457**	**100**	**132.730**	**0**	**17.228**				**451.685**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	3	18.323	2	3.853	0	-	0%	0%	3	18.323	60%	116%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	16	113.626	5	32.693	0	6.440	0%	20%	16	120.066	64%	111%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	8	123.596	4	32.360	0	3.590	0%	11%	8	127.186	100%	121%	Kecamatan Kabun
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	17	64.626	6	31.542	1	7.198	17%	23%	18	71.824	100%	136%	Kecamatan Kabun

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.054	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	594	114.286	248	32.282	0	-	0%	0%	594	114.286	100%	145%	Kecamatan Kabun
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**906.492**	**100**	**643.731**	**100**	**252.076**	**0**	**37.023**				**680.754**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	4	7.000	4	2.000	0	-	0%	0%	4	7.000	100%	93%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.634	2	119.039	1	49.676	0	10.023	0%	20%	2	129.062	100%	245%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	27	517.693	12	200.400	3	27.000	25%	13%	30	544.693	100%	64%	Kecamatan Kabun
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**226.369**	**100**	**171.579**	**100**	**52.096**	**0**	**4.416**				**175.995**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**56.568**	**100**	**25.600**	**100**	**0**	**0**	**0**				**25.600**			
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266	18	10.500			0	-	0%	0%	18	10.500	100%	79%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202	2	15.100			0	-	0%	0%	2	15.100	14%	114%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.100					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**169.800**	**100**	**145.979**	**100**	**52.096**	**0**	**4.416**				**150.395**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	79.594	3	84.131	1	42.371	0	4.416	0%	10%	3	88.547	100%	111%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.613	2	12.063			0	-	0%	0%	2	12.063	100%	114%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959	1	1.620			0	-	0%	0%	1	1.620	100%	20%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	15	29.325	10	9.725	0	-	0%	0%	15	29.325	50%	158%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.063	2	18.840			0	-	0%	0%	2	18.840	100%	36%	Kecamatan Kabun
								Rata-rata capaian kinerja (%)									3,71%	6,94%			61,61%	88,40%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	T	
2	7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**74.288**	**271,19**	**37.983**	**100**	**20.572**	**100**	**8.892**	**100%**	**43%**	**371**	**46.875**	**100%**	**63%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**53.063**	**100**	**37.983**	**100**	**20.572**	**100**	**8.892**				**46.875**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	53.063	3	37.983	1	20.572	0,5	8.892	50%	43%	4	46.875	70%	88%	Kecamatan Kabun
	7	**1**	**2**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	**Persen**	**100**	**21.225**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	5	10.613					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
	7	1	2	2,04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	10.613					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			50,00%	43,22%			23,33%	29,45%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**79.594**	**300**	**133.859**	**100**	**114.256**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300**	**133.859**	**100%**	**168%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**64.594**		**123.701**	**100**	**114.256**	**0**	**0**				**123.701**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	64.594	4	123.701	2	114.256	0	-	0%	0%	4	123.701	50%	192%	Kecamatan Kabun
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**15.000**	**100**	**10.158**		**0**		**0**				**10.158**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000	1	10.158			0	-	0%	0%	1	10.158	100%	68%	Kecamatan Kabun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			75,00%	129,61%	
														Predikat kinerja			SR	SR			S	ST	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**530.627**	**200**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**200.000**	**100%**	**38%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**530.627**	**100**	**200.000**	**0**	**0**		**0**				**200.000**			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	530.627	2	200.000			0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Kabun
														Rata-rata capaian kinerja (%)							40,00%	37,69%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**53.063**	**300**	**24.779**	**100**	**3.948**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300**	**24.779**	**100%**	**47%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**53.063**	**100**	**24.779**	**100**	**3.948**	**0**	**0**				**24.779**			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	53.063	3	24.779	1	3.948	0	-	0%	0%	3	24.779	60%	47%	Kecamatan Kabun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			60,00%	46,70%	
														Predikat kinerja			SR	SR			R	SR	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**26.531**	**300**	**22.487**	**100**	**5.280**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300**	**22.487**	**100%**	**85%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**26.531**	**100**	**22.487**	**100**	**5.280**	**0**	**0**				**22.487**			
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.531	3	22.487	1	5.280	0	-	0%	0%	3	22.487	60%	85%	Kecamatan Kabun
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			60,00%	84,76%	
Predikat kinerja																	SR	SR			R	T	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**10,74%**	**10,03%**			**53,32%**	**69,43%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**R**	**S**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TANDUN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN TANDUN**				**11.899.756**		**4.775.496**		**1.941.809**		**301.049**				**5.076.545**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**10.842.210**	**100**	**4.428.483**	**100**	**1.774.557**		**284.444**	0%	16%	100	**4.712.927**	100%	43%	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**10.944**		**2.815**		**0**		**0**				**2.815**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.526	3	2.815	0		0	-	0%	0%	3	2.815	30%	51%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.763					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.655					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**7.460.547**		**3.297.987**		**1.387.580**		**239.273**				**3.537.260**			
	7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.451.712	42	3.297.987	14	1.387.580	3	239.273	21%	17%	45	3.537.260	54%	47%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4.526				0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4.310				0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**225.917**		**0**		**0**		**0**				**0**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	109.892				0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	116.025				0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**898.648**		**454.739**		**173.917**		**16.903**				**471.642**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	18.301	9	9.913	1	7.977	0	-	0%	0%	9	9.913	60%	54%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	265.749	60	132.586	4	51.000	1	10.903	25%	21%	61	143.489	61%	54%	Kecamatan Tandun

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	147.438	11	92.544	4	48.800	1	6.000	25%	12%	12	98.544	80%	67%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	250.535	12	133.756	4	51.730	0	-	0%	0%	12	133.756	60%	53%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	16.708	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	463	199.918	273	85.940	5	14.410	0	-	0%	0%	273	85.940	59%	43%	Kecamatan Tandun
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.014.664**		**529.220**		**178.530**		**28.268**				**557.488**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2197	21.978	1313	11.910	1	5.000	0	-	0%	0%	1.313	11.910	60%	54%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	109.888	6	34.636	12	28.930	3	4.168	25%	14%	9	38.804	90%	35%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	882.797	12	482.674	12	144.600	3	24.100	25%	17%	12	506.774	100%	57%	Kecamatan Tandun
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**1.231.490**		**143.721**				**0**				**143.721**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**519.471**		**16.480**		**0**		**0**				**16.480**			
	7	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	300.000		0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	55.000		-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38	38.157	2	4.680			0	-	0%	0%	2	4.680	5%	12%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	76.314	1	11.800			0	-	0%	0%	1	11.800	8%	15%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000		-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**712.019**		**127.241**		**34.530**		**0**				**127.241**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	183.000	12	114.658	12	26.490	0	-	0%	0%	12	114.658	100%	63%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	40	27.846	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	37.073	6	12.583	3	8.040	0	-	0%	0%	6	12.583	10%	34%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	464.100	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
Rata-rata capaian kinerja (%)																	11,04%	7,45%			29,86%	24,65%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**77.359**	**186,36**	**44.014**	**100**	**46.105**		**16.605**	0%	36%	100	**60.619**	100%	78%	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**77.359**		**44.014**		**46.105**		**16.605**				**60.619**			
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	77.359	3	44.014	2	46.105	1	16.605	50%	36%	4	60.619	80%	78%	Kecamatan Tandun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			50,00%	36,02%			80,00%	78,36%	
														Predikat kinerja			SR	SR			T	T	
3	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**311.460**	**200**	**103.000**	**100**	**121.147**		**0**	**0%**	**0%**	**100**	**103.000**	**100%**	**33%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**278.460**		**79.000**		**121.147**		**0**				**79.000**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	278.460	2	79.000	1	121.147	0	-	0%	0%	2	79.000	25%	28%	Kecamatan Tandun
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**33.000**		**24.000**		**0**		**0**				**24.000**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	33.000	1	24.000			0	-	0%	0%	1	24.000	100%	73%	Kecamatan Tandun
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			62,50%	50,55%	
														Predikat kinerja			SR	SR			R	R	
4	7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**541.788**	**200**	**200.000**	**100**	**0**		**0**	0%	#DIV/0!	100	**200.000**	100%	37%	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**541.788**		**200.000**		**0**		**0**				**200.000**			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	541.788	2	200.000	0	-	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	37%	Kecamatan Tandun
														Rata-rata capaian kinerja (%)							40,00%	36,91%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
5	7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**62.288**	**0**	**0**	**100**	**0**		**0**	0%	0%	-	**0**	0%	0%	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**62.288**		**0**		**0**		**0**				**0**			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	62.288	0	-		0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
														Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00%	0,00%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
6	7	1	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**64.652**	**100**	**0**	**100**	**0**		**0**	0%	0%	100	**0**	100%	0%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**64.652**		**0**		**0**		**0**				**0**			
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	64.652	0	-		0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																					SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**20,35%**	**14,49%**			**35,39%**	**31,75%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH SAMO

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								**0**									
	7	**1**				**KECAMATAN RAMBAH SAMO**				**11.941.522**		**5.913.336**		**2.130.935**		**335.111**				**6.258.232**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**10.972.185**	**254,30**	**5.424.721**	**100**	**1.953.535**	**-**	**321.417**	**0%**	**16%**	**254,30**	**5.979.008**	**100%**	**54%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**19**	**9.925**	**9**	**4.594**	**3**	**2.042**		**0**				**5.664**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.624	2	1.040		-	0%	0%	4	2.624	40%	50%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	1.970	1	494	0	-	0%	0%	3	1.970	60%	75%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	4	2.030	2	1.070	1	508	0	-	0%	0%	2	1.070	50%	53%	Kecamatan Rambah Samo
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**7.530.219**		**3.901.818**	**100**	**1.400.836**	**25**	**252.773**				**4.386.391**			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	7.519.692	42	3.899.056	14	1.398.781	3	252.773	21%	18%	45	4.151.829	100%	55%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	2	1.296	1	1.040	0	-	0%	0%	2	1.296	40%	25%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263	2	1.466	1	1.016	0	-	0%	0%	2	1.466	40%	28%	Kecamatan Rambah Samo
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**65.604**	**100**	**16.298**		**0**		**0**				**16.298**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	35	25.000	24	12.730			0	-	0%	0%	24	12.730	69%	51%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	40.604	1	3.568			0	-	0%	0%	1	3.568	13%	9%	Kecamatan Rambah Samo
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**838.122**	**100**	**435.019**	**100**	**138.755**	**0**	**18.649**				**453.669**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	31.796	23	15.455	5	6.361	2	1.541	40%	24%	25	16.995	100%	53%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	268.076	46	121.672	35	30.685	6	4.853	17%	16%	52	126.525	100%	47%	Kecamatan Rambah Samo

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	213.377	24	137.956	20	39.524	4	8.590	20%	22%	28	146.546	100%	69%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	144.290	16	79.982	6	32.039	1	3.000	17%	9%	17	82.982	100%	58%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	15.790	2	1.980	1	1.800	0	-	0%	0%	2	1.980	67%	13%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1070	164.792	484	77.974	377	28.346	9	666	2%	2%	493	78.640	46%	48%	Kecamatan Rambah Samo
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.367.138**	**100**	**872.857**	**100**	**299.892**	**0**	**47.000**				**919.857**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1844	18.400	831	8.280	380	3.800	100	1.000	26%	26%	931	9.280	50%	50%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	94.737	2	50.656	1	20.092	0	-	0%	0%	2	50.656	50%	53%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	1.254.000	35	813.922	12	276.000	3	46.000	25%	17%	38	859.922	100%	69%	Kecamatan Rambah Samo
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**1.161.178**	**100**	**194.135**	**100**	**112.010**	**100,00**	**2.995**				**197.129**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**840.684**	**100**	**61.087**	**100**	**64.950**	**100**	**0**				**61.087**			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	44.642	6	17.650	6	23.550	0	-	0%	0%	6	17.650	30%	40%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	65.169	3	43.437	3	10.800	0	-	0%	0%	3	43.437	38%	67%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	609.060	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4	121.812	2	32.240	1	30.600	0	-	0%	0%	2	32.240	50%	26%	Kecamatan Rambah Samo
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**320.494**	**100**	**133.048**	**100**	**47.060**	**0**	**2.995**				**136.043**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	141.081	3	72.904	1	23.600	1	2.995	100%	13%	4	75.899	100%	54%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	72.505	3	40.064	1	700	0	-	0%	0%	3	40.064	100%	55%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28	28.423	6	9.500	3	3.000	0	-	0%	0%	6	9.500	21%	33%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	17.580	17	10.580	7	4.460	0	-	0%	0%	17	10.580	34%	60%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60.906	0	0	1	15.300	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
														Rata-rata capaian kinerja (%)			11,69%	6,40%			57,59%	43,83%	
														Predikat kinerja			SR	SR			R	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	68.077	267,00	33.485	100	26.794		13.694	0%	51%	267,00	47.179	267%	69%	
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	68.077	100	33.485	100	26.794	100	13.694				47.179			
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	68.077	1	33.485	1	26.794	0,5	13.694	50%	51%	1	47.179	100%	69%	Kecamatan Rambah Samo
								Rata-rata capaian kinerja (%)									50,00%	51,11%			100,00%	69,30%	
								Predikat kinerja									SR	R			ST	S	
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	247.932	231,81	223.084	100	122.256		0	0%	0%	231,81	-	100%	0%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	200.828		0		0		0				-			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	200.828					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	47.105	100	223.084	100	122.256	0	0				223.084			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	47.105	2	223.084	1	122.256	0	-	0%	0%	2	223.084	100%	474%	Kecamatan Rambah Samo
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			50,00%	236,80%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	ST	
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	500.000	300	200.000		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	300,00	200.000	100%	40%	
	7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	500.000	100	200.000		0		0				200.000			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	3	500.000	2	200.000			0	-	0%	0%	2	200.000	67%	40%	Kecamatan Rambah Samo
								Rata-rata capaian kinerja (%)													66,67%	40,00%	
								Predikat kinerja													S	SR	
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	101.605	300	24.798	100	19.950		0	0%	0%	300	24.798	100%	24%	
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	101.605	100	24.798	100	19.950		0				24.798			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	101.605	2	24.798	1	19.950	0	-	0%	0%	2	24.798	100%	24%	Kecamatan Rambah Samo
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			100,00%	24,41%	
								Predikat kinerja									SR	SR			ST	SR	
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	51.722	200	7.247	100	8.400	0	0	0%	0%	200	7.247	100%	14%	
	7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	51.722	100	7.247	100	8.400		0				7.247			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	51.722	1	7.247	1	8.400	0	-	0%	0%	1	7.247	100%	14%	Kecamatan Rambah Samo
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			100,00%	14,01%	
Predikat kinerja																	SR	SR			ST	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**12,34%**	**11,50%**			**79,04%**	**71,39%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH HILIR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7 1	KECAMATAN RAMBAH HILIR				12.042.386		6.116.812		2.085.533		305.356				6.422.168			
1	7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	11.161.568	294,08	5.676.758	100	1.867.397	0	305.356	0%	16%	294	5.982.114	294%	54%	
	7 1 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.425	11	6.220	4	2.502	0	0				6.220			
	7 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	3.667	2	1.762	0	-	0%	0%	6	3.667	60%	70%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	1.796	1	393	0	-	0%	0%	3	1.796	60%	68%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.530	2	756	1	346	0	-	0%	0%	2	756	50%	30%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,02 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	8.037.765	100	4.241.306	100	1.565.808	25	287.736				4.529.042			
	7 1 1 2,02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	392	8.027.138	42	4.237.508	14	1.563.408	3	287.736	21%	18%	45	4.525.244	11%	56%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,02 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.313	2	1.896	1	1.288	0	-	0%	0%	2	1.896	40%	36%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.313	2	1.901	1	1.112	0	-	0%	0%	2	1.901	40%	36%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	81.238	100	16.800	0	0	0	0				16.800			
	7 1 1 2,05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	26	20.332	24	16.800			0	-	0%	0%	24	16.800	92%	83%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	60.906					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	977.599	100	662.021	100	99.108	0	0				662.021			
	7 1 1 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	24.762	8	15.807	4	3.851	0	-	0%	0%	8	15.807	100%	64%	Kecamatan Rambah Hilir
	7 1 1 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	45	328.641	54	184.335	42	25.000	0	-	0%	0%	54	184.335	100%	56%	Kecamatan Rambah Hilir

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	352.482	11	219.146	6	33.830	0	-	0%	0%	11	219.146	100%	62%	Kecamatan Rambah Hilir
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	142.044	23	127.636	11	22.126	0	-	0%	0%	23	127.636	100%	90%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.632	2	4.860	1	1.200	0	-	0%	0%	2	4.860	100%	38%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	748	117.037	266	110.237	174	13.100	0	-	0%	0%	266	110.237	36%	94%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**799.394**	**100**	**393.449**	**100**	**122.888**	**0**	**17.620**				**411.069**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	35.475	36	18.940	12	5.000	0	-	0%	0%	36	18.940	60%	53%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	63.100	36	26.693	12	27.288	3	2.520	25%	9%	39	29.213	65%	46%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18	81.208	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	619.611	36	347.816	12	90.600	3	15.100	25%	17%	39	362.916	49%	59%	Kecamatan Rambah Hilir
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**1.255.146**	**100**	**356.963**	**100**	**77.092**	**100**	**0**				**356.963**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**734.813**	**100**	**160.029**	**100**	**21.792**	**0**	**0**				**160.029**			
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	125.753						-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	121.812	9	31.500	5	11.200	0	-	0%	0%	9	31.500	100%	26%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	101.510	6	128.529	2	10.592	0	-	0%	0%	6	128.529	100%	127%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,07	7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	162.416					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	121.812					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	101.510					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**520.333**	**100**	**196.934**	**100**	**55.300**	**0**	**0**			**100**	**196.934**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	171.552	3	143.664	1	46.340	0	-	0%	0%	3	143.664	100%	84%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	81.208	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	142.114	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	23.949	19	21.270	8	8.960	0	-	0%	0%	19	21.270	34%	89%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	101.510	2	32.000			0	-	0%	0%	2	32.000	20%	32%	Kecamatan Rambah Hilir
								Rata-rata capaian kinerja (%)									3,76%	2,33%			48,86%	44,75%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**59.149**	**271,121**	**32.318**	**100**	**19.321**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**271**	**32.318**	**271%**	**55%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**59.149**	**100**	**32.318**	**100**	**19.321**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**100**	**32.318**	**100%**	**55%**	
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	59.149	3	32.318	1	19.321	0	-	0%	0%	3	32.318	60%	55%	Kecamatan Rambah Hilir
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	54,64%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	R	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**236.997**	**286,19**	**172.275**	**100**	**189.264**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**286**	**172.275**	**286%**	**73%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**199.158**	**100**	**101.645**	**100**	**189.264**	**0**	**0**				**101.645**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	199.158	2	101.645	2	189.264	0	-	0%	0%	2	101.645	25%	51%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**37.838**	**100**	**70.629**		**0**		**0**				**70.629**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	37.838	2	70.629			0	-	0%	0%	2	70.629	100%	187%	Kecamatan Rambah Hilir
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			62,50%	118,85%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	ST	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**500.000**	**300**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**300**	**200.000**	**300%**	**40%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**500.000**	**100**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**200.000**			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	500.000	2	200.000			0	-	0%	0%	2	200.000	40%	40%	Kecamatan Rambah Hilir
								Rata-rata capaian kinerja (%)													40,00%	40,00%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**42.865**	**300**	**17.161**	**100**	**6.520**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300**	**17.161**	**300%**	**40%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**42.865**	**10**	**17.161**	**100**	**6.520**	**0**	**0**				**17.161**			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	42.865	3	17.161	1	6.520	0	-	0%	0%	3	17.161	75%	40%	Kecamatan Rambah Hilir
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			75,00%	40,03%	
								Predikat kinerja									SR	SR			S	SR	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**41.808**	**300**	**18.301**	**100**	**3.030**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300**	**18.301**	**300%**	**44%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**41.808**	**100**	**18.301**	**100**	**3.030**	**0**	**0**				**18.301**			
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	41.808	4	18.301	1	3.030	0	-	0%	0%	4	18.301	100%	44%	Kecamatan Rambah Hilir
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			100,00%	43,77%	
Predikat kinerja																	SR	SR			ST	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**0,75%**	**0,47%**			**64,39%**	**57,01%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**R**	**R**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN BANGUN PURBA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7 1	**KECAMATAN BANGUN PURBA**				**9.276.486**		**3.833.149**		**1.456.219**		**208.031**				**4.039.180**			
1	**7 1 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**8.350.919**	**281,36**	**3.470.169**	**100**	**1.289.192**		**183.226**	**0%**	**14%**	**281,36**	**3.653.395**	**100%**	**44%**	
	7 1 1 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**9.925**	**10**	**8.789**	**4**	**5.665**		**0**	**0%**	**0%**	**10,00**	**8.789**			
	7 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	5.102	2	3.080	0	-	0%	0%	6,00	5.102	60%	97%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.110	1	1.530	0	-	0%	0%	2,00	2.110	40%	80%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	2	1.576	1	1.055	0	-	0%	0%	2,00	1.576	40%	78%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,02 1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**6.467.972**		**2.189.283**	**100**	**836.146**	**25**	**125.626**	**25%**	**15%**	**25,00**	**2.314.909**			
	7 1 1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	6.457.445	40	2.189.283	14	833.856	3	125.626	21%	15%	43,00	2.314.909	100%	36%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263			1	1.235	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263			1	1.055	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.000**		**0**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**			
	7 1 1 2,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	5.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**438.481**	**100**	**365.486**	**100**	**126.636**	**0**	**14.000**	**0%**	**11%**	**100,00**	**379.486**			
	7 1 1 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	13	9.691	5	1.755	0	-	0%	0%	13	9.691	100%	61%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	146.888	33	107.033	21	28.268	0	4.500	0%	16%	33	111.533	100%	76%	Kecamatan Bangun Purba
	7 1 1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	105.268	11	92.456	5	37.840	0	3.000	0%	8%	11	95.456	100%	91%	Kecamatan Bangun Purba

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	78.951	29	91.002	10	37.948	0	4.000	0%	11%	29	95.002	100%	120%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.632	1	2.640			0	-	0%	0%	1	2.640	100%	21%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	472	78.951	386	62.664	81	20.826	0	2.500	0%	12%	386	65.164	82%	83%	Kecamatan Bangun Purba
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.219.008**	**100**	**755.972**	**100**	**268.896**	**-**	**43.600**	**0%**	**16%**	**100,00**	**799.572**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	10.527	12	6.040	4	2.000	0	-	0%	0%	12,00	6.040	20%	57%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	52.634	14	23.868	12	17.296	3	4.000	25%	23%	17,00	27.868	28%	53%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.155.847	32	726.064	12	249.600	3	39.600	25%	16%	35,00	765.664	100%	66%	Kecamatan Bangun Purba
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**210.532**	**100**	**150.640**	**100**	**51.849**	**-**	**2.000**	**0%**	**4%**	**100,00**	**152.640**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**28.949**	**100**	**26.730**	**100**	**19.480**	**100**	**0**	**100%**	**0%**	**200,00**	**26.730**			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	13.159	33	11.430	11	7.680	0	-	0%	0%	33,00	11.430	100%	87%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	15.790	2	15.300	2	11.800	0	-	0%	0%	2,00	15.300	22%	97%	Kecamatan Bangun Purba
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**181.583**	**100**	**123.910**	**100**	**32.369**	**0**	**2.000**	**0%**	**6%**	**100,00**	**125.910**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	92.105	3	84.138	1	28.089	0	2.000	0%	7%	3,00	86.138	100%	94%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	13.159	1	4.312			0	-	0%	0%	1,00	4.312	100%	33%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.895	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	15.790	5	9.260	5	4.280	0	-	0%	0%	5,00	9.260	24%	59%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.634	1	26.200			0	-	0%	0%	1,00	26.200	100%	50%	Kecamatan Bangun Purba
																Rata-rata capaian kinerja (%)			3,97%	5,98%			61,57%	58,15%	
																Predikat kinerja			SR	SR			R	R	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**236.854**	**259,264**	**36.966**	**100**	**7.306**		**7.306**	**0%**	**100%**	**259,26**	**44.272**	**100%**	**19%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	7	1	2	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**236.854**	**100**	**36.966**	**100**	**7.306**		**7.306**	**0%**	**100%**	**100,00**	**44.272**	**100%**	**19%**	
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	236.854	3	36.966	1	7.306	1	7.306	100%	100%	4,00	44.272	80%	19%	Kecamatan Bangun Purba
																Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	100,00%			80,00%	18,69%	
																Predikat kinerja			ST	ST			T	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**93.571**	**300**	**102.891**	**100**	**54.902**	**0**	**15.500**	**0%**	**28%**	**300,00**	**118.390**	**100%**	**127%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**78.951**	**100**	**88.271**	**100**	**54.902**	**0**	**15.500**				**103.771**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	78.951	4	88.271	2	54.902	0	15.500	0%	28%	4,00	103.771	50%	131%	Kecamatan Bangun Purba
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**14.620**	**100**	**14.620**	**0**	**0**	**0**	**0**				**14.620**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	14.620	1	14.620			0	-	0%	0%	1,00	14.620	100%	100%	Kecamatan Bangun Purba
																Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	28,23%			75,00%	115,72%	
																Predikat kinerja			SR	SR			S	ST	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**516.191**	**300**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**300,00**	**200.000**	**100%**	**39%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**516.191**	**100**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**100,00**	**200.000**	**100%**	**39%**	
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	516.191	2	200.000	1	100.000	0	-	0%	0%	2,00	200.000	40%	39%	Kecamatan Bangun Purba
																Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			40,00%	38,75%	
																Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**52.634**	**300**	**17.101**	**100**	**3.219**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300,00**	**17.101**	**100%**	**32%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**52.634**	**100**	**17.101**	**100**	**3.219**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**100,00**	**17.101**	**100%**	**32%**	
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	52.634	3	17.101	1	3.219	0	-	0%	0%	3,00	17.101	60%	32%	Kecamatan Bangun Purba
																Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			60,00%	32,49%	
																Predikat kinerja			SR	SR			R	SR	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**26.317**	**300**	**6.022**	**100**	**1.600**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300,00**	**6.022**	**100%**	**23%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**26.317**	**100**	**6.022**	**100**	**1.600**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**100,00**	**6.022**	**100%**	**23%**	
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.317	3	6.022	1	1.600	0	-	0%	0%	3,00	6.022	60%	23%	Kecamatan Bangun Purba
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			60,00%	22,88%	
Predikat kinerja																	SR	SR			R	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**17,33%**	**22,37%**			**62,76%**	**47,78%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7 1	**KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**				**14.041.021**		**5.187.100**		**2.078.504**		**226.021**				**5.413.121**			
1	**7 1 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**13.061.807**	**287,80**	**4.752.577**	**100**	**1.914.428**	**-**	**226.021**	**0%**	**12%**	**287,80**	**4.978.598**	**100%**	**38%**	
	7 1 1 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**9.925**	**11**	**10.172**	**4**	**3.378**	**0**	**0**				**10.172**			
	7 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	4.419	2	1.854	0	-	0%	0%	6	4.419	60%	84%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.291	1	922	0	-	0%	0%	3	3.291	60%	125%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	2	2.462	1	602	0	-	0%	0%	2	2.462	40%	121%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,02 1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**7.358.887**	**100**	**2.887.572**	**100**	**1.382.601**	**25**	**175.533**				**3.063.105**			
	7 1 1 2,02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.349.564	42	2.880.000	14	1.380.569	3	175.533	21%	13%	45	3.055.534	54%	42%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,02 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	3	4.656	1	1.110	0	-	0%	0%	3	4.656	60%	88%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	4.060	2	2.916	1	922	0	-	0%	0%	2	2.916	40%	72%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**66.450**	**100**	**21.332**		**0**	**0**	**0**				**21.332**			
	7 1 1 2,05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38	26.250	11	21.332			0	-	0%	0%	11	21.332	29%	81%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	40.200					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.074.050**	**100**	**693.860**	**100**	**149.413**	**0**	**0**				**693.860**			
	7 1 1 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	10.317	11	17.462	3	4.359	0	-	0%	0%	11	17.462	100%	169%	Kecamatan Tambusai Utara
	7 1 1 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	358.370	36	182.108	20	40.582	0	-	0%	0%	36	182.108	100%	51%	Kecamatan Tambusai Utara

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	272.119	11	227.062	4	42.000	0	-	0%	0%	11	227.062	100%	83%	Kecamatan Tambusai Utara
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	247.171	14	172.237	4	50.922	0	-	0%	0%	14	172.237	100%	70%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12.632	6	7.152			0	-	0%	0%	6	7.152	100%	57%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2200	173.440	363	87.840	77	11.550	-	-	0%	0%	363	87.840	17%	51%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.643.532**		**892.014**	**100**	**317.979**	**25**	**50.487**				**942.501**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	13.159	12	8.600	4	3.000	0	-	0%	0%	12	8.600	60%	65%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	105.034	3	49.092	1	35.379	0	3.987	0%	11%	3	53.079	100%	51%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	1.525.339	36	834.322	12	279.600	3	46.500	25%	17%	39	880.822	100%	58%	Kecamatan Tambusai Utara
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**2.908.962**		**247.627**	**100**	**61.058**	**100,00**	**0**				**247.627**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.745.972**		**64.246**	**100**	**11.269**	**0**	**0**				**64.246**			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120	243.624	30	21.446			0	-	0%	0%	30	21.446	25%	9%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	406.040	7	42.800	3	11.269	0	-	0%	0%	7	42.800	35%	11%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	487.248	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	609.060	1	40.000			0	-	0%	0%	1	40.000	8%	7%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.162.990**	**100**	**183.381**	**100**	**49.789**	**0**	**0**				**183.381**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	199.954	2	100.691	1	39.219	0	-	0%	0%	2	100.691	100%	50%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	23.512	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120	24.362	1	6.000	8	1.500	0	-	0%	0%	1	6.000	1%	25%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	450	103.081	47	44.290	20	9.070	0	-	0%	0%	47	44.290	10%	43%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	812.080	1	32.400			0	-	0%	0%	1	32.400	100%	4%	Kecamatan Tambusai Utara
														Rata-rata capaian kinerja (%)			2,58%	2,26%			53,79%	54,44%	
														Predikat kinerja			SR	SR			R	R	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**110.875**	**254,11**	**48.019**	**100**	**33.290**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**254,11**	**48.019**	**100%**	**43%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**110.875**	**100**	**48.019**	**100**	**33.290**	**0**	**-**				**48.019**			
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	110.875	3	48.019	1	33.290	0	-	0%	0%	3	48.019	60%	43%	Kecamatan Tambusai Utara
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	43,31%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	SR	
3	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**166.303**	**300**	**135.066**	**100**	**123.073**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300,00**	**135.066**	**100%**	**81%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**134.707**	**100**	**123.470**	**100**	**123.073**	**0**	**0**				**123.470**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	134.707	4	123.470	2	123.073	0	-	0%	0%	4	123.470	50%	92%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**31.596**	**100**	**11.596**		**0**		**0**				**11.596**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	31.596	1	11.596			0	-	0%	0%	1	11.596	100%	37%	Kecamatan Tambusai Utara
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			75,00%	64,18%	
								Predikat kinerja									SR	SR			S	R	
4	7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**526.342**	**300**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**300,00**	**200.000**	**100%**	**38%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**526.342**	**100**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**200.000**			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	526.342	2	200.000			0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Tambusai Utara
								Rata-rata capaian kinerja (%)													40,00%	38,00%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
5	7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**78.425**	**300**	**33.038**	**100**	**7.713**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**300,00**	**33.038**	**100%**	**42%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**78.425**	**100**	**33.038**	**100**	**7.713**	**0**	**0**				**33.038**			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	78.425	3	33.038	1	7.713	0	-	0%	0%	3	33.038	60%	42%	Kecamatan Tambusai Utara
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	42,13%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**97.268**	**300**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**300,00**	**18.400**	**100%**	**19%**	
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**97.268**	**100**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**				**18.400**			
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	97.268	3	18.400			0	-	0%	0%	3	18.400	60%	19%	Kecamatan Tambusai Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																					60,00%	18,92%	
Predikat kinerja																					R	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**0,64%**	**0,56%**			**58,13%**	**43,49%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**				**6.914.282**		**3.057.118**		**1.532.135**		**148.801**				**3.230.451**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**6.150.179**	**266,96**	**2.560.911**	**100**	**1.352.077**	**100,00**	**130.571**	**100,00%**	**9,66%**	**366,96**	**2.715.660**	**100%**	**44%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**10.527**	**4**	**16.301**	**4**	**6.905**	**4**	**0**			**8**	**16.301**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	10.443	2	3.538	0	-	0,00%	0,00%	6	10.443	60%	198%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.847	1	1.683	0	-	0,00%	0,00%	3	3.847	60%	146%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	2	2.011	1	1.683	0	-	0,00%	0,00%	2	2.011	40%	76%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.595.713**	**100**	**1.389.264**	**100**	**971.762**	**25**	**90.767**			**125**	**1.480.031**			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	42	1.383.830	14	968.250	4	90.767	28,57%	9,37%	46	1.474.597	55%	32%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.958	1	1.829	0	-	0,00%	0,00%	2	2.958	40%	112%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.477	1	1.683	0	-	0,00%	0,00%	2	2.477	40%	94%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**42.625**	**100**	**5.692**		**0**		**0**			**100**	**291.648**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38	17.120	13	5.692			0	-	0,00%	0,00%	13	5.692	34%	33%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	25.505	1	696			0	-	0,00%	0,00%	1	696	25%	3%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**368.454**	**100**	**477.498**	**100**	**160.899**	**100**	**15.504**			**200**	**285.260**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	10	10.932	5	3.927	0	-	0,00%	0,00%	10	10.932	100%	69%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	37	111.815	25	40.084	5	7.002	20,00%	17,47%	42	118.818	100%	110%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	8	149.410	4	49.400	1	6.100	25,00%	12,35%	9	155.510	100%	148%	Kecamatan Bonai Darussalam
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	20	85.328	6	30.556	1	152	16,67%	0,50%	21	85.480	100%	162%	Kecamatan Bonai Darussalam

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.054	1	2.200	0	0	0	-	0,00%	0,00%	1	2.200	50%	27%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	507	117.813	246	36.932	15	2.250	6,09%	6,09%	522	120.063	100%	152%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**906.492**	**100**	**472.847**	**100**	**156.069**	**100**	**24.300**			**200**	**497.147**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	490	6.860	300	3.000	50	500	16,67%	16,67%	540	7.360	100%	98%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.634	3	36.550	1	10.269	0	-	0,00%	0,00%	3	36.550	100%	69%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	36	429.437	12	142.800	3	23.800	25,00%	16,67%	39	453.237	100%	54%	Kecamatan Bonai Darussalam
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**226.369**	**100**	**199.309**	**100**	**56.442**	**11**	**6.210**			**111**	**75.015**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**56.568**	**100**	**37.508**	**100**	**6.633**	**100**	**0**			**200**	**37.508**			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266	22	27.328	2	6.633	0	-	0,00%	0,00%	22	27.328	100%	206%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202	4	10.180			0	-	0,00%	0,00%	4	10.180	29%	77%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.100					0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000					0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**169.800**	**100**	**161.802**	**100**	**49.809**	**100**	**6.210**			**200**	**107.767**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	79.594	1	90.205	1	35.519	1	6.210	100,00%	17,48%	2	96.415	100%	121%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.613	2	9.352			0	-	0,00%	0,00%	2	9.352	100%	88%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959	1	2.000			0	-	0,00%	0,00%	1	2.000	100%	25%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	22	24.045	12	14.290	0	-	0,00%	0,00%	22	24.045	73%	129%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.063	1	36.200			0	-	0,00%	0,00%	1	36.200	100%	68%	Kecamatan Bonai Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)									14,00%	5,68%			69,46%	88,50%	
								Predikat kinerja									SR	SR			S	T	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**74.288**	**236,517**	**49.436**	**100**	**23.680**	**76,947**	**10.740**	**76,95%**	**45,35%**	**313,46**	**66.740**	**100%**	**90%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**53.063**	**100**	**45.060**	**100**	**23.680**	**0**	**10.740**			**100**	**62.364**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	53.063	3	45.060	1	23.680	0,5	10.740	50,00%	45,35%	4	55.800	70%	105%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	**1**	**2**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	**Persen**	**100**	**21.225**	**100**	**4.376**		**-**		**-**			**100**	**4.376**			
	7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	5	10.613	1	2.188			0	-	0,00%	0,00%	1	2.188	20%	21%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	2	2,04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	10.613	1	2.188			0	-	0,00%	0,00%	1	2.188	20%	21%	Kecamatan Bonai Darussalam
														Rata-rata capaian kinerja (%)			50,00%	45,35%			36,67%	48,80%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**79.594**	**300**	**191.151**	**100**	**145.858**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**300**	**191.151**	**100%**	**240%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**64.594**	**100**	**155.585**	**100**	**145.858**	**0**	**0**			**100**	**155.585**			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	64.594	3	155.585	2	145.858	0	-	0,00%	0,00%	3	155.585	38%	241%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**15.000**	**100**	**35.566**		**0**		**0**			**100**	**35.566**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000	1	35.566					0,00%	0,00%	1	35.566	100%	237%	Kecamatan Bonai Darussalam
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			68,75%	238,99%	
														Predikat kinerja			SR	SR			S	ST	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**530.627**	**300**	**198.737**		**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**300**	**198.737**	**100%**	**37%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**530.627**	**100**	**198.737**		**0**		**0**			**100**	**198.737**			
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	530.627	2	198.737			0	-	0,00%	0,00%	2	198.737	40%	37%	Kecamatan Bonai Darussalam
														Rata-rata capaian kinerja (%)							40,00%	37,45%	
														Predikat kinerja							SR	SR	
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**53.063**	**200**	**30.282**	**100**	**6.200**		**0**	**0,00%**	**0,00%**	**200**	**30.282**	**100%**	**57%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**53.063**	**100**	**30.282**	**100**	**6.200**		**0**			**100**	**30.282**			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	53.063	2	30.282	1	6.200	0	-	0,00%	0,00%	2	30.282	40%	57%	Kecamatan Bonai Darussalam
														Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			40,00%	57,07%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	R	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**26.531**	**300**	**26.600**	**100**	**4.320**	**100**	**1.280**	**100,00%**	**29,63%**	**400**	**27.880**	**100%**	**105%**	
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**26.531**	**100**	**26.600**	**100**	**4.320**	**100**	**1.280**				**27.880**			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.531	3	26.600	1	4.320	0	1.280	0,00%	29,63%	3	27.880	60%	105%	Kecamatan Bonai Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	29,63%			60,00%	105,08%	
Predikat kinerja																	SR	SR			S	ST	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**12,80%**	**16,13%**			**52,48%**	**95,98%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**R**	**ST**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7 1	**KECAMATAN**				**12.004.284**		**6.101.330**		**2.184.815**		**329.817**				**6.431.147**			
1	7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**100**	**10.654.385**	**200**	**5.646.354**	**100**	**2.017.747**	**100**	**312.292**	**100%**	**15%**	**300**	**5.958.647**	**100,00%**	**55,93%**	
	7 1 1 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**21.804**	**5**	**4.331**	**1**	**1.150**		**-**				**4.331**			
	7 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.504	2	2.042			0	-	0%	0%	2	2.042	20,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sdan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD	Tersedianya Dokumen penyusuna Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	10	5.525	3	2.290	1	1.150	0	-	0%	0%	3	2.290	30,00%	41,44%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,01 7	Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10.775					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7.297.011**	**100**	**4.311.109**	**100**	**1.596.390**		**215.668**				**4.526.777**			
	7 1 1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.276.401	42	4.310.110	14	1.594.884	3	215.668	21%	14%	45	4.525.778	321,43%	62,20%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10	5.525	1	1.000	1	1.506	0	-	0%	0%	1	1.000	10,00%	18,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	15.085					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**97.000**		**-**		**-**		**25.516**				**25.516**			
	7 1 1 2,05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	42.000					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	55.000					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**861.280**	**100**	**465.146**	**100**	**103.820**		**25.516**				**490.662**			
	7 1 1 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	45	10.983	24	10.176			0	-	0%	0%	24	10.176	53,33%	92,65%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	120	197.313	33	89.038			0	-	0%	0%	33	89.038	27,50%	45,13%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	32	60.108	3	5.360			0	-	0%	0%	3	5.360	9,38%	8,92%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	19	254.821	27	154.263	4	42.580	1	9.632	25%	23%	28	163.895	100,00%	64,32%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	74	145.890	39	80.004	20	41.500	5	9.644	25%	23%	44	89.648	59,46%	61,45%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7 1 1 2,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	27.614	6	15.100	2	4.000	0	-	0%	0%	6	15.100	60,00%	54,68%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1414	164.551	324	111.206	121	15.740	48	6.240	40%	40%	372	117.446	26,31%	71,37%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.196.880**	**100**	**679.753**	**100**	**227.235**		**37.900**				**717.653**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.592	15.914	24	5.900	330	3.300	0	-	0%	0%	24	5.900	1,51%	37,07%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	44.646	3	19.721	1	7.335	0	1.800	0%	25%	3	21.521	60,00%	48,20%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	10.000	5	2.000			0	-	0%	0%	5	2.000	25,00%	20,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	55	1.126.320	36	652.132	12	216.600	3	36.100	25%	17%	39	688.232	70,91%	61,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**829.512**		**-**		**15.000**		**-**				**-**			
	7	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	300.000					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	67.495					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	78.813					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	58.101			6	15.000	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	187.178					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	137.924					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**350.899**	**100**	**186.014**	**100**	**74.153**		**7.693**				**193.707**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	160.216	4	94.484	1	32.063	1	5.693	100%	18%	5	100.176	100,00%	62,53%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	22.112	3	13.139	1	5.090	0	-	0%	0%	3	13.139	60,00%	59,42%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	74.651	25	23.510	17	17.000	2	2.000	12%	12%	27	25.510	54,00%	34,17%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	93.920	2	54.882	1	20.000	0	-	0%	0%	2	54.882	20,00%	58,43%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
														Rata-rata capaian kinerja (%)			16,52%	11,32%			39,60%	33,51%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**92.312**	**267,6**	**46.969**	**100**	**47.375**		**17.525**	**0%**	**37%**	**268**	**64.494**	**100,00%**	**69,87%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**92.312**	**100**	**46.969**	**100**	**47.375**	100	**17.525**				**64.494**			
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	92.312	3	46.969	1	47.375	0	17.525	0%	37%	3	64.494	60,00%	69,87%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	36,99%			60,00%	69,87%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	S	
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	272.589	300	129.143	100	84.500		-	0%	0%	300	129.143	100,00%	47,38%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	244.465	100	54.207	100	84.500		-				54.207			
	7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	244.465	2	54.207	2	84.500	0	-	0%	0%	2	54.207	25,00%	22,17%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			28.123		74.936		-		-				74.936			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ dan PKK di kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	28.123	2	74.936			0	-	0%	0%	2	74.936	100,00%	266,46%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			62,50%	144,31%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	ST	
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	532.963	300	200.000		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	300	200.000	100,00%	37,53%	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	532.963	100	200.000		-		-				200.000			
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	532.963	3	200.000			0	-	0%	0%	3	200.000	60,00%	37,53%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)													60,00%	37,53%	
								Predikat kinerja													R	SR	
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	111.659	300	34.764	100	15.360		-	0%	0%	300	34.764	100,00%	31,13%	
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	111.659	100	34.764	100	15.360		-				34.764			
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	111.659	3	34.764	1	15.360	0	-	0%	0%	3	34.764	60,00%	31,13%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	31,13%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	SR	
4	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	340.377	300	44.100	100	19.833		-	0%	0%	300	44.100	100,00%	12,96%	
	7	1	6	2,01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	340.377	100	44.100	100	19.833		-				44.100			
	7	1	6	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	47.750					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	96.697	2	35.875	1	19.833	0	-	0%	0%	2	35.875	40,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan 1 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	23.500	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	6	2,01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	4	47.436	1	8.225			0	-	0%	0%	1	8.225	25,00%	17,34%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	6	2,01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	4	66.807					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	58.187					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			13,00%	10,89%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**3,30%**	**9,66%**			**49,18%**	**54,54%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**R**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN HULU

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN KEPENUHAN HULU**				**9.445.286**		**4.747.078**		**1.842.636**		**165.560**				**4.912.638**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**8.625.922**	**295,21**	**4.315.149**	**100**	**1.676.202**		**165.560**	**0%**	**10%**	**295**	**4.480.709**	**100%**	**52%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**9.925**		**7.611**	**4**	**3.314**		**0**				**7.611**			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	2.830	2	1.560	0	-	0%	0%	6	2.830	60%	54%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	2.891	1	1.152	0	-	0%	0%	3	2.891	60%	110%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.030	2	1.890	1	602	0	-	0%	0%	2	1.890	50%	93%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.641.861**		**2.723.101**	**100**	**1.156.360**	**100**	**117.715**				**2.840.816**			
	7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	5.631.334	37	2.715.891	14	1.154.856	4	117.715	29%	10%	41	2.833.606	100%	50%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	3	3.652	1	602	0	-	0%	0%	3	3.652	60%	69%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263	3	3.558	1	902	0	-	0%	0%	3	3.558	60%	68%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**30.332**	**40**	**6.000**		**0**		**0**				**6.000**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	20.332	40	6.000			0	-	0%	0%	40	6.000	100%	30%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**543.192**		**430.346**	**100**	**162.235**	**100**	**0**				**430.346**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	26.317	8	13.129	3	3.403	0	-	0%	0%	8	13.129	100%	50%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	162.121	28	111.380	20	45.855	-	-	0%	0%	28	111.380	100%	69%	Kecamatan Kepenuhan Hulu

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	131.586	7	119.816	3	42.360	0	-	0%	0%	7	119.816	100%	91%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	78.951	9	68.754	4	40.785	0	-	0%	0%	9	68.754	100%	87%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12.632	4	5.018			0	-	0%	0%	4	5.018	100%	40%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1790	131.586	1056	112.249	199	29.832	0	-	0%	0%	1.056	112.249	59%	85%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.962.203**	**100**	**939.951**	**100**	**289.002**	**25**	**47.845**				**987.796**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1326	12.632	867	8.520	300	3.000	0	-	0%	0%	867	8.520	65%	67%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	42.107	3	18.603	1	8.802	0	1.645	0%	19%	3	20.248	100%	48%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19	1.907.464	36	912.828	12	277.200	3	46.200	25%	17%	39	959.028	100%	50%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**438.408**	**100**	**208.141**	**100**	**65.291**		**0**				**208.141**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**188.540**	**100**	**57.000**	**100**	**21.369**		**0**				**57.000**			
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1	30.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	60.906			2	5.600	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	52.634	5	45.000	2	15.769	0	-	0%	0%	5	45.000	50%	85%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	20.000	1	12.000			0	-	0%	0%	1	12.000	33%	60%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**249.868**		**151.141**	**100**	**43.922**		**0**				**151.141**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	105.268	3	101.595	1	36.197	0	-	0%	0%	3	101.595	100%	97%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	15.790	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	5.263	2	2.500			0	-	0%	0%	2	2.500	8%	47%	Kecamatan Kepenuhan Hulu

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	26.317	19	16.030	5	7.725	-	-	0%	0%	19	16.030	76%	61%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	97.228	2	31.016			0	-	0%	0%	2	31.016	100%	32%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
								Rata-rata capaian kinerja (%)									2,98%	2,53%			62,29%	53,46%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	R	
2	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**52.634**	**268,69**	**22.947**	**100**	**21.940**		**-**	**0%**	**0%**	**269**	**22.947**	**100%**	**44%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**52.634**	**100**	**22.947**	**100**	**21.940**		**-**	**0%**	**0%**	**100**	**22.947**	**100%**	**44%**	
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	52.634	3	22.947	1	21.940	0	-	0%	0%	3	22.947	60%	44%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	43,60%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	SR	
3	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**145.270**	**300**	**152.442**	**100**	**131.974**		**0**	**0%**	**0%**	**300**	**152.442**	**100%**	**105%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**0**	**100**	**64.300**	**100**	**131.974**		**0**	**0%**	**0%**	**100**	**64.300**	**100%**	**#DIV/0!**	
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			2	64.300	2	131.974	0	-	0%	0%	2	64.300	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**145.270**		**88.142**		**0**		**0**			**-**	**88.142**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	10	145.270	2	88.142			0	-	0%	0%	2	88.142	20%	61%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			20,00%	60,67%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	R	
4	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**516.191**	**300**	**199.986**		**0**	**100**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**400**	**199.986**	**100%**	**39%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**516.191**	**100**	**199.986**		**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100**	**199.986**	**100%**	**39%**	
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	516.191	2	199.986			0	-	0%	0%	2	199.986	40%	39%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
								Rata-rata capaian kinerja (%)													40,00%	38,74%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
5	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**52.634**	**300**	**28.532**	**100**	**7.000**		**0**	**0%**	**0%**	**300**	**28.532**	**300%**	**54%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**52.634**	**100**	**28.532**	**100**	**7.000**		**0**	**0%**	**0%**	**100**	**28.532**	**100%**	**54%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	52.634	3	28.532	1	7.000	0	-	0%	0%	3	28.532	60%	54%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			60,00%	54,21%	
Predikat kinerja																	SR	SR			R	R	
6	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**52.634**	**300**	**28.021**	**100**	**5.520**		**0**	**0%**	**0%**	**300**	**28.021**	**100%**	**53%**	
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**52.634**	**100**	**28.021**	**100**	**5.520**		**0**	**0%**	**0%**	**100**	**28.021**	**100%**	**53%**	
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	52.634	3	28.021	1	5.520	0	-	0%	0%	3	28.021	60%	53%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			60,00%	53,24%	
Predikat kinerja																	SR	SR			R	R	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**0,60%**	**0,51%**			**50,38%**	**50,65%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**R**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	c	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7	**1**				**KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO**				**8.720.976**		**3.668.362**		**1.674.545**		**182.635**				**3.850.997**			
1	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**7.811.089**	**289,06**	**3.312.237**	**100**	**1.551.207**	**0**	**182.635**	**0%**	**12%**	**289**	**3.494.873**	**100%**	**45%**	
	7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**16.617**	**12**	**8.713**	**4**	**4.558**	**0**	**0**				**8.713**			
	7	1	1	2,01	Me	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	2.885	2	2.043	0	-	0%	0%	6	2.885	60%	55%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5.263	4	3.122	1	1.067	0	-	0%	0%	4	3.122	40%	59%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	6.090	2	2.707	1	1.447	0	-	0%	0%	2	2.707	25%	44%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.457.208**		**1.854.587**	**100**	**1.066.625**	**25**	**145.585**				**2.000.172**			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	4.445.854	42	1.850.368	14	1.064.135	3	145.585	21%	14%	45	1.995.953	100%	45%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	1	1.212	1	1063	0	-	0%	0%	1	1.212	20%	23%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.091	2	3.007	1	1427	0	-	0%	0%	2	3.007	50%	49%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**23.000**	**100**	**16.640**	**0**	**0**		**0**				**16.640**			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	18.000	20	16.640			0	-	0%	0%	20	16.640	67%	92%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	5.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**799.134**	**100**	**388.382**	**100**	**139.780**	**0**	**0**				**388.382**			
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	802	26.258	176	16.245	164	5.276	0	-	0%	0%	176	16.245	22%	62%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8930	202.626	3.105	96.470	1.731	30.815	0	-	0%	0%	3.105	96.470	35%	48%	Kecamatan Pendalian IV Koto

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	c	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12500	219.109	5.772	124.409	3.318	56.145	0	-	0%	0%	5.772	124.409	46%	57%	Kecamatan Pendalian IV Koto
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50982	152.505	29.390	79.320	20.218	33.642	0	-	0%	0%	29.390	79.320	58%	52%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	20.302	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	640	178.335	344	71.938	93	13.902	0	-	0%	0%	344	71.938	54%	40%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.535.307**	**100**	**825.305**	**100**	**259.693**	**0**	**37.050**				**862.355**			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1767	15.853	579	8.200	250	2.500	0	-	0%	0%	579	8.200	33%	52%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	46.454	6	11.494	2	17.193	0	-	0%	0%	6	11.494	60%	25%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	1.473.000	36	805.610	12	240.000	3	37.050	25%	15%	39	842.660	49%	57%	Kecamatan Pendalian IV Koto
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**979.823**	**100**	**218.611**	**100**	**80.552**	**0**	**0**				**218.611**			
	7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**504.948**	**100**	**95.818**	**100**	**39.592**	**0**	**0**				**95.818**			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	52	101.510	54	42.194	44	11.200	0	-	0%	0%	54	42.194	100%	42%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	37	53.624	5	28.392	0	-	0%	0%	37	53.624	100%	44%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	119.210					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	162.416					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**474.875**	**100**	**122.793**	**100**	**40.960**	**0**	**0**				**122.793**			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	137.262	3	73.493	1	29.457	0	-	0%	0%	3	73.493	100%	54%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	49.451	4	15.480	2	5.803	0	-	0%	0%	4	15.480	27%	31%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20.302	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	73.056	14	33.820	8	5.700	0	-	0%	0%	14	33.820	35%	46%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	194.803	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
														Rata-rata capaian kinerja (%)			2,44%	5,89%			41,50%	37,59%	
														Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	c	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**55.688**	**264,83**	**30.725**	**100**	**19.451**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**265**	**30.725**	**100%**	**55%**	
	7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**55.688**	**100**	**30.725**	**100**	**19.451**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**100**	**30.725**	**100%**	**55%**	
	7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	55.688	3	30.725	1	19.451	0	-	0%	0%	3	30.725	60%	55%	Kecamatan Pendalian IV Koto
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			60,00%	55,17%	
								Predikat kinerja									SR	SR			R	R	
3	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**206.045**	**299**	**125.399**	**100**	**103.887**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**299**	**125.399**	**100%**	**61%**	
	7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**172.131**	**100**	**104.988**	**100**	**103.887**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**100**	**104.988**	**100%**	**61%**	
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	172.131	4	104.988	2	103.887	0	-	0%	0%	4	104.988	50%	61%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**33.914**	**100**	**20.411**	**0**	**0**	**0**	**0**				**20.411**			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	33.914	1	20.411			0	-	0%	0%	1	20.411	50%	60%	Kecamatan Pendalian IV Koto
								Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			50,00%	60,59%	
								Predikat kinerja									SR	SR			SR	R	
4	7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**526.342**	**300**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**300**	**200.000**	**100%**	**38%**	
	7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**526.342**	**100**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100**	**200.000**	**100%**	**38%**	
	7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	526.342	2	200.000			0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Pendalian IV Koto
								Rata-rata capaian kinerja (%)													40,00%	38,00%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
5	7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**60.906**	**200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**-**	**100%**	**0%**	
	7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**60.906**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	60.906	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
								Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00%	0,00%	
								Predikat kinerja													SR	SR	
6	7	1	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**60.906**	**200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**200**	**-**	**100%**	**0%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	c	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**60.906**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	60.906	0	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																					SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	**0,81%**	**1,96%**			**31,92%**	**31,89%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU				**42.155.014**		**88.034.269**		**11.798.786**		**865.830**				**88.900.099**			Bakesbangpol
	8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**42.155.014**		**88.034.269**		**11.798.786**		**865.830**				**88.900.099**			Bakesbangpol
	8	**01**				**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**42.155.014**		**88.034.269**		**11.798.786**		**865.830**				**88.900.099**			Bakesbangpol
1	**8**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**19.405.743**	**200**	**8.945.521**		**3.253.963**		**678.269**	**#DIV/0!**	**21%**	**200**	**9.623.790**	**100,00%**	**49,59%**	
	8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**60.750**		**13.133**		**19.278**		**19.278**				**32.411**			
	8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	14.816	1	948	4	19.278	4	19.278	100%	100%	5	20.226	50,00%	136,51%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	45.934	12	12.185	0		-	-	0%	0%	12	12.185	100,00%	26,53%	Bakesbangpol
	8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**11.793.689**		**5.214.889**		**2.365.952**		**400.905**				**5.615.794**			
	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	11.766.357	40	5.214.889	14	2.365.952	4	400.905	29%	17%	44	5.615.794	62,86%	47,73%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	13.666	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5	13.666	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**105.300**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40	45.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	Orang	6	60.300			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**1.317.381**		**876.594**		**319.961**		**91.092**				**967.686**			
	8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	20	38.265	36	11.690	0	-	-	-	0%	0%	36	11.690	100,00%	30,55%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	215	153.135	127	74.504	42	29.521	-	-	0%	0%	127	74.504	59,07%	48,65%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	33.000	15	26.179	11	17.358	3	5.786	27%	33%	18	31.965	90,00%	96,86%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	102.222	32	51.214	10	21.070	-	-	0%	0%	32	51.214	58,18%	50,10%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5.063	1	275		-	-	-	0%	0%	1	275	20,00%	5,43%	Bakesbangpol

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	8	01	01	2.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.421	985.695	495	712.732	12	252.012	3	85.306	25%	34%	498	798.038	20,57%	80,96%	Bakesbangpol
	8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**2.555.000**		**1.092.276**		**-**		**-**				**1.092.276**			
	8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	**1**	500.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	425.000	4	776.900	0	-	-	-	0%	0%	4	776.900	100,00%	182,80%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	600.000	40	77.116	0	-	-	-	0%	0%	40	77.116	66,67%	12,85%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	90.000	17	188.260			-	-	0%	0%	17	188.260	100,00%	209,18%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	10	500.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	440.000	1	50.000	0	-	-	-	0%	0%	1	50.000	10,00%	11,36%	Bakesbangpol
	8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**2.199.990**		**1.132.732**		**319.812**		**44.400**				**1.177.132**			
	8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.934	19.133	743	9.700		-	-	-	0%	0%	743	9.700	38,42%	50,70%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	65.597	0	-	1	36.012	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	30	32.799	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	105	2.082.461	45	1.123.032	12	283.800	3	44.400	25%	16%	48	1.167.432	45,71%	56,06%	Bakesbangpol
	8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**1.373.633**		**615.897**		**228.960**		**122.594**				**738.491**			
	8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	191.325	3	137.310	1	58.036	1	26.190	100%	45%	4	163.500	80,00%	85,46%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	20	727.643	12	404.285	4	170.924	2	96.404	50%	56%	14	500.689	70,00%	68,81%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	27.332	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	27.332	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	400.000	1	74.302	0	-	-	-	0%	0%	1	74.302	100,00%	18,58%	Bakesbangpol
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			35,58%	30,13%			41,84%	43,54%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	**8**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**	**Orang**	**800**	**3.346.243**	**360**	**3.039.933**		**1.178.255**		**44.863**	**#DIV/0!**	**4%**	**360**	**3.084.796**	**45,00%**	**0,00%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persen**		**3.346.243**		**3.039.933**		**1.178.255**		**44.863**				**3.084.796**				
	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	10	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Organisasi	10	1.093.288	104	2.361.164	4	1.138.821	1,0	44.863	25%	4%	105	2.406.027	100,00%	220,07%	Bakesbangpol
	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kali	10	1.979.632	104	678.769	2	39.434	-	-	0%	0%	104	678.769	100,00%	34,29%	Bakesbangpol
	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	5	273.322	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
														Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			12,50%	1,97%			66,67%	84,79%	
														Predikat Kinerja			SR	SR			S	T	
3	**8**	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partai Politik yang Berperan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi Masyarakat**	**Persen**	**100**	**8.903.739**	**220**	**71.868.969**		**3.194.437**		**23.201**	**#DIV/0!**	**1%**	**220**	**71.892.170**	**100,00%**	**807,44%**	
	8	**01**	**03**	**2 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persen**	**100**	**8.903.739**		**71.868.969**		**3.194.437**		**23.201**				**71.892.170**			
	8	01	03	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan	4	1.206.000	2	146.342	0	-	-	-	0%	0%	2	146.342	50,00%	12,13%	Bakesbangpol
	8	01	03	2 01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase	100	6.097.739	300	71.343.423	100	3.140.482	10	23.201	10%	1%	310	71.366.624	100,00%	1170,38%	Bakesbangpol

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	8	01	03	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kali	5	1.600.000	4	379.204	1	53.955	-	-	0%	0%	4	379.204	80,00%	23,70%	Bakesbangpol
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									5,00%	0,37%			76,67%	402,07%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			T	ST	
4	**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif**	**ORMAS/LSM**	**125**	**3.197.758**	**75**	**453.056**		**367.188**		**-**	**#DIV/0!**	**0%**	**75**	**453.056**	**60,00%**	**14,17%**	
	8	**01**	**04**	**2 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**ORMAS/LSM**		**3.197.758**		**453.056**		**367.188**		**-**				**453.056**			
	8	01	04	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	46	1.950.000	54	388.400	25	97.532	-	-	0%	0%	54	388.400	100,00%	19,92%	Bakesbangpol
	8	01	04	2 01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	50	218.658	10	7.750		-	-	-	0%	0%	10	7.750	20,00%	3,54%	Bakesbangpol
	8	01	04	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	125	1.029.100	9	56.906	25	269.656	-	-	0%	0%	9	56.906	7,20%	5,53%	Bakesbangpol
								Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			42,40%	9,66%	
								Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
5	**8**	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sasial dan Budaya yang Ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**2.022.583**	**200**	**229.505**		**164.607**		**16.500**	**#DIV/0!**	**10%**	**200**	**246.005**	**100,00%**	**12,16%**	
	8	**01**	**05**	**2 01**		**Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persen**	**100**	**2.022.583**		**229.505**		**164.607**		**16.500**				**246.005**			
	8	01	05	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kegiatan	5	437.315	2	72.314	1	30.905	1	16.500	100%	53%	3	88.814	60,00%	20,31%	Bakesbangpol
	8	01	05	2 01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama	Kali	5	1.093.288	1	67.936	1	100.039	-	-	0%	0%	1	67.936	20,00%	6,21%	Bakesbangpol

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	8	01	05	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah	Kecamatan	80	491.980	32	89.255	16	33.663	-	-	0%	0%	32	89.255	40,00%	18,14%	Bakesbangpol
																	33,33%	17,80%			40,00%	14,89%	
																	SR	SR			SR	SR	
6	**8**	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)**	**Persen**	**100**	**5.278.949**	**140**	**3.497.285**		**3.640.336**		**102.997**	**#DIV/0!**	**3%**	**140**	**3.600.282**	**100,00%**	**68,20%**	
							Persentase daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya, Ekonomi dan agama/SARA yang dapat diredam		**100**		**300**						**#DIV/0!**		**300**		**100,00%**		
	8	**01**	**06**	**2 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persen**	**100**	**2.186.576**		**467.243**	**20**	**168.800**	20	**21.600**				**488.843**			
	8	01	06	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	1	78.744		-	-	-	0%	0%	1	78.744	20,00%	14,40%	Bakesbangpol
	8	01	06	2 01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	06	2 01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
	8	01	06	2 01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	102	388.499	100	168.800	25	21.600	25%	13%	127	410.099	100,00%	75,02%	Bakesbangpol
	8	**01**	**06**	**2 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dapat di Redam**	**Persen**	**100**	**3.092.372**		**3.030.042**	**100**	**3.471.536**		**81.397**				**3.111.439**			
	8	01	06	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persen	100	1.275.251	198	408.054	100	357.563	25	81.397	0%	0%	223	489.451	100,00%	38,38%	Bakesbangpol

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	8	01	06	2 01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Persentase Pelaksanaan Rakor FORKOPIMDA	Persen	100	1.817.121	300	2.621.988	100	3.113.973	-	-	0%	0%	300	2.621.988	100,00%	144,29%	Bakesbangpol
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																	8,33%	4,27%			53,33%	45,35%	
Predikat Kinerja																	SR	SR			R	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																	**15,79%**	**9,09%**			**53,48%**	**100,05%**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																	**SR**	**SR**			**R**	**ST**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

2.2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:
  1. Anggaran kegiatan yang sudah ditentukan oleh BPKAD setiap triwulannya.
  2. Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas.
  3. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian.
  4. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung capaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
  5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
  6. Kurangnya ketersediaan data guna menunjang pembangunan pada masing-masing perangkat daerah.
  7. Adanya beberapa jadawal pelaksanaan kegiatan yang bergeser.
  8. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat.
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah telah terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
- Faktor penyebab melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah adanya tuntutan dan kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.2.2.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dikarenakan terdapat beberapa program dan kegiatan yang hingga awal tahun 2025 tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai sehingga menghambat pelaksanaan beberapa program dan kegiatan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hulu saat ini adalah Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan aspek Geografi, aspek

Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, Aspek lainnya yang tidak kalah penting yaitu aspek Daya Saing daerah, Selanjutnya permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu , berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut.

2.3.1. Aspek Geografi

Permasalahan pembangunan terhadap geografi (ruang) di Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut:

1) Ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata-rata wilayah 72 mdpl, dapat ditanami komoditas tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) di Kabupaten Rokan Hulu, namun sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari provinsi lain, Pengembangan komoditas tersebut, masih sangat tergantung dengan penyedian air melalui curah hujan,
2) Penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain, Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670,098,57 Ha atau hampir 81,43 persen dari total luas Kabupaten Rokan Hulu, Namun kenyataan masih banyak masyarakat Rokan Hulu yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 75.890 jiwa (9,62) tahun 2024 artinya hasil perkebunan hanya banyak dinikmati oleh koorporasi,
3) Kabupaten Rokan Hulu memiliki sungai-sungai utama, yaitu Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato, Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi, Aliran dasar ini mendukung aliran

sungai pada saat kemarau, Di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai, Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

2.3.2. Aspek Demografi

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dari aspek demografi sebagai berikut :

1) Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan kab, Rokan hulu adalah sebesar 9,62 persen dengan jumlah penduduk 586.994 jiwa atau meningkat jumlah penduduk sebanyak 13.474 jiwa (bps) namun jumlah penduduk miskin tetap dihitung sebanyak 75.890 jiwa, Padahal jika 9,62 persen dari 586.994 penduduk miskin kab, Rokan hulu seharusnya 56.468 jiwa (data tidak valid),
2) Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,01persen, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 31,99 persen. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (dependency ratio) sebesar 47,03 persen, yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun), terdapat sekitar 47 orang yang berada di luar usia produktif, yaitu penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat, Disisi lain juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap penyedian lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi pencaker.

2.3.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya adalah

1) Perekonomian Rokan Hulu sangat bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,70 persen pada tahun 2024, Pembangunan daerah harus dapat menghasilkan perubahan struktural yang seimbang, Perubahan struktural

terus terjadi pada perekonomian daerah, akan tetapi perubahan yang terjadi menghasilkan adanya ketimpangan antar sektor yang kemudian menumbuhkan struktur ekonomi yang rapuh; struktur ekonomi yang dapat dengan mudah dipengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di suatu sektor tanpa dapat digantikan oleh sektor lainnya, Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan sangat bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sumber PDRB utama, Ketimpangan kontribusi pertanian yang mencapai 54,70 persen terhadap PDRB perlu diwaspadai, sebab apabila terjadi goncangan pada sektor ini, seperti melemahnya harga komoditas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, akan berdampak sangat besar pada perekonomian daerah secara keseluruhan, Penurunan kesejahteraan masyarakat menjadi ancaman sewaktu-waktu apabila perekonomian daerah terlalu bergantung pada satu sektor,

2) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 menempati posisi kedelapan terbesar setelah kabupaten kampar yang berada diposisi ketujuh, Kabupaten Rokan Hulu mampu tumbuh sebesar 4,12 persen, pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 4,12 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang pertumbuhannya sempat melambat, Hal ini dikarenakan beberapa komponen PDRB pengeluaran yang semula mengalami kontraksi di tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan di tahun 2022, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat meningkat kembali terlebih dengan naiknya harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit menyebabkan pengeluaran rumah tangga mulai bergeser pada kebutuhan non makanan seperti pembelian kendaraan pribadi, biaya kesehatan dan pendidikan beserta penunjangnya seperti alat komunikasi maupun jasa komunikasi, Konsumsi pemerintah mulai merangkak naik seiring pulihnya ekonomi dan kebijakan pemerintah, Selain itu, meningkatnya pembelian kendaraan untuk usaha/kantor dan pelaksanaan kembali kegiatan pembangunan/perbaikan besar bangunan tempat tinggal menyebabkan naiknya nilai PDRB komponen pembentukan modal tetap bruto pada tahun 2023.
3) Laju inflasi di Kabupaten Rokan Hulu belum di hitung oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk melihat Laju Inflasi di Kabupaten Rokan Hulu metode yang di gunakan melihat Kabupaten/ kota yang struktur PDRB nya mirip dengan kabupaten Rokan Hulu (sister city), untuk di Provinsi Riau struktur

PDRB nya yang mendekati Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Dumai, Namun, sejak tahun 2024, Kampar juga masuk dalam perhitungan inflasi di provinsi Riau dengan Tingkat inflasi sebesar 3,25 persen. Selain itu, Kampar merupakan wilayah pengukuran inflasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan tingkat inflasi Kampar, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga di Kampar lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hulu juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Untuk itu, pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hulu agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat.

4) Selama periode 2020-2024, Indeks Gini Rasio Kabupaten Rokan Hulu berada pada kisaran antara 0,314-0,272 dengan trend yang cenderung fluktuatif namun menunjukkan penurunan secara keseluruhan. Nilai Indeks Gini tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori ketimpangan rendah. Klasifikasi kategori ketimpangan rendah perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan agar dapat ditingkatkan Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangkan perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.
5) Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu menempati peringkat ke-8 (dari 12 kabupaten/kota) di Provinsi Riau pada tahun 2024, Nilai IPM sebesar 73,07 jauh di bawah rata-rata IPM di Provinsi Riau menunjukkan lemahnya indikator pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu, Rendahnya nilai IPM menunjukkan lemahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu, Lemahnya kualitas sumber daya ini terlihat pada rendahnya Usia Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, yaitu menempati urutan ke tujuh di Provinsi Riau, dengan UHH sebesar 73,67 tahun,

Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 12,94 juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau, Tidak jauh berbeda Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,94 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau.

6) Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi, yaitu sebesar 9,62 persen dari total keseluruhan penduduk, Ini artinya ada setidaknya 75.890 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang hidup di bawah garis kemiskinan, Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau.

2.3.4. Aspek Pelayanan Umum

2.3.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan wajib pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan urusan wajib pendidikan diantaranya sebagai berikut:,

- Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,46 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 97,41 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,07. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 100,78 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,39. Tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 100,23 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,92 persen. Terakhir tahun 2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 102,33 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,67 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTS dapat diartikan pula penduduk usia sekolah tersebut tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMP/MTS di Kabupaten Rokan Hulu
- Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,46 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 101,67 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,81 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 102,52 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 90,31 persen. Tahun 2023 untuk tingkat SD/MI sebesar

100,27 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 50,66 persen. Terakhir tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,33 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 80,99 persen. Nilai APM tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah, khususnya tingkat SMP/MTs sebesar 19,01 persen, yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan.

- Masih tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebanyak 267 orang yang ditunjukkan oleh Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah yaitu sebesar 8,94 persen. Hal ini disebabkan oleh Masih adanya anak usia sekolah yang dipekerjakan, Masih ada masyarakat yang memandang kurang pentingnya pendidikan dan Masih rendahnya partisipasi masyarakat masuk dalam PKBM, untuk itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, yang ditunjukkan oleh Masih terdapat sekolah yang sarana prasarananya belum terpenuhi, Rendahnya nilai rapor pendidikan dan Rendahnya capaian SPM bidang pendidikan Hal ini disebabkan oleh Masih ada sekolah yang melaporkan ruang kelas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan Masih ada daerah sulit/terpencil yang minim sarana prasarananya.
- Belum Terpenuhinya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ditunjukkan oleh Masih banyaknya Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang masih berstatus belum ASN dan Rendahnya capaian SPM bidang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi ASN masih belum maksimal.
- Distribusi dan Kompetensi Guru tidak Merata ditunjukkan oleh Masih terdapat Tenaga pendidik yang belum berpendidikan S.1/ D.IV dan Guru terkonsentrasi pada sekolah di wilayah-wilayah strategis (Perkotaan dan desa-desa sekitaran dan ibu kota kecamatan). Hal ini disebabkan oleh Sulitnya Dinas Pendidikan untuk melakukan distribusi guru dengan berbagai masalah non teknis.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Permasalahan utama yang menyangkut urusan kesehatan meliputi kurang memadainya tenaga kesehatan dan fasilitas sarana prasarana kesehatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, Lebih rinci, berikut ini adalah beberapa permasahalan terkait urusan wajib kesehatan:

- berdasarkan hasil dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2025, prevalensi stunting diKabupaten Rokan Hulu tahun 2024 tercatat sebesar 21,4 persen. Angka tersebut masih berada dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 20,1

persen. Sementara itu Presiden telah menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen.

- Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 adalah sebanyak 53 orang balita atau 0,10 persen dari 50.617 balita yang ditimbang berdasarkan laporan bulan penimbangan dan pemantauan status gizi, dibandingkan tahun 2023 prevalensi gizi buruk sebanyak 36 orang atau 0,07 persen dari 47.103 balita, Artinya terjadi peningkatan kasus gizi buruk di Kabupaten Rokan Hulu jika dibandingkan pada tahun 2023, Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, melahirkan dan Ibu menyusui di Kabupaten Rokan Hulu.
- Masih rendahnya penanganan komplikasi kebidanan ditunjukkan oleh Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani dikabupaten Rokan Hulu tahun 2024 sebesar 7,8 persen .
- Keterbatasan jumlah dokter di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 adalah sebanyak 109 orang atau 0,18 mengalami peningkatan di banding tahun 2023 dengan rasio sebesar 0,07. Ini berarti bahwa pada tahun 2024 hanya terdapat sekitar 0,18 dokter per seribu penduduk.
- Meningkatnya penemuan berbagai penyakit seperti Kusta, Diare dan Penyakit Acute flacid paralysis (AFP), Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu semakin rentan terhadap beberapa jenis penyakit.
- Rendahnya cakupan sarana prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu yang sesuai standar. Pada tahun 2024 di kabupaten Rokan Hulu jumlah Puskesmas sebanyak 23 unit dengan rincian puskesmas perawatan 11 unit dan non perawatan 12 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 4 per 100,000 penduduk, Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 25.522 penduduk atau setiap 100,000 penduduk ada $\pm$ 4 -5 puskesmas.

3. Urusan Wajib pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki permasalahan utama yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, yaitu sebesar 334 atau 0,15 pada tahun 2024, sedangkan kondisi jalan di kabupaten Rokan Hulu dalam kondisi rusak berat 1,240,52 km, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu cenderung menurun terlihat dari berkurangnya panjang jalan yang berada pada kondisi baik artinya ada lebih banyak jaringan jalan dalam kondisi rusak dibandingkan jalan dengan kondisi baik, Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahalnya biaya transportasi, Rendahnya Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada akhirnya akan

mempengaruhi investasi di Rokan Hulu, Perusahaan akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya operasional yang tinggi, Sementara untuk urusan pekerjaan umum permasalahan lainya adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yaitu sebesar 80,64 persen pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk meningkatkan akses kepada masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum; adapun langkah yang dibuat meliputi peningkatan kapasitas pelayanan /cakupan layanan; pembangunan prasarana air minum bagi masyarakat di perkotaan dan masyarakat perdesaan serta optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai, Adapun permasalahan dasarnya adalah kurang optimalnya prasarana infrastruktur air minum seperti pipa distribusi yang kurang panjang sehingga belum maksimal dalam menjangkau daerah-daerah rawan air yang cukup jauh dari ibu kota kecamatan, selanjutnya prasarana yang sudah ada sudah cukup lama sehingga perlu pemeliharaan yang sangat inten.

4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Pemukiman memiliki permasalahan utama yaitu belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh (luas pemukiman kumuh yang tertangani 0,012). Permasalahan ini juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Di sisi lain faktor kemiskinan pada masyarakat berpenghasilan rendah juga merupakan salah satu faktor. Luasnya wilayah dan sebaran permukiman juga menjadi kendala dalam pemenuhan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman penduduk yang ada. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah melakukan pemenuhannya secara bertahap dan berkelanjutan.

5. Urusan Wajib Sosial

- Permasalahan utama menyangkut urusan wajib sosial adalah kurang memadainya jumlah SDM untuk memberdayakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta keterbatasan anggaran Dinas Sosial dalam memberikan bantuan yang berkelanjutan kepada seluruh Fakir Miskin, KAT dan PPKS, Permasalahan ini terlihat jelas dari Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan pada tahun 2024 sebanyak 18.517 orang, jika dibandingkan jumlah PPKS yang menerima bantuan pada tahun 2023 sebesar 42.209.

- Kurang validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga penyaluran bantuan terhadap Fakir Miskin, KAT dan PPKS tidak tepat sasaran.
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar, lansia terlantar dan disabilitas di luar panti dimana masih ada anak terlantar, lansia terlantar dan disabilitas diluar panti yang belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
- Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Rokan Hulu khususnya keluarga fakir miskin dan penyandang disabilitas karena rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial.

2.3.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi daerah terkait tenaga kerja diantaranya:

- Kualitas SDM masih lemah, Hal ini dilihat dari rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3.
- Angkatan kerja di Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi lulusan SMK dan SMA yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Skill/ kemampuan lulusan SMK dan SMA kurang bisa bersaing di dunia kerja. Pekerjaan yang dilakukan cenderung tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup
- Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 68,13 persen.
- Lapangan kerja yang tersedia belum terbuka optimal disamping itu gaji yang ada tergolong rendah, disisi lain besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rokan Hulu tahun 2024 adalah yang keempat terendah di Provinsi Riau

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Persentase perempuan pada lembaga pemerintahan dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR masih rendah yaitu sebesar 6,66 persen, Ini menggambarkan bagaimana lemahnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- Selain itu permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah angka rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 0,010 yang cenderung

meningkat pada tahun 2024 dibandingkan rasio KDRT pada tahun 2023 sebesar 0,002, namun angka ini masih perlu ditekan hingga mendekati 0 persen.

- Sementara itu pada tahun 2024 capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang dari nilai 52,15 menjadi 55,00. IDG Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah jika dibandingkan IDG Provinsi Riau dan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional.

3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

- Rendahnya ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu (rata-rata Ketersediaan pangan utama per Tahun 2024 sebesar 26.100,00 atau 4,44 persen).
- Masih ada desa rentan rawan pangan di daerah karena sarana dan prasarana pangan di desa masih sedikit.
- Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan produk pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan pokok selain beras.

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi daerah terkait urusan lingkungan hidup diantaranya:

- Rendahnya nilai peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2024 adalah 35,49 point disebabkan penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan akibat adanya alih fungsi hutan dan lahan.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan lingkungan hidup terutama; sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah
- Masih adanya permasalahan lingkungan yang perlu ditangani, yakni terkait pembuangan limbah industri ke aliran sungai sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air.
- Belum terpenuhinya persentase Ruang Terbuka Hijau secara minimal yakni sebesar 30 persen dari kawasan perkotaan. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Rokan Hulu terdata hanya sebesar 118,89 ha atau sebesar 0,76 persen sedangkan luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 15.668 ha sesuai RTRW Kabupaten Rokan Hulu, seharusnya luasan minimal RTH yang ada sebesar 4.700 ha

- Belum optimalnya pengelolaan daur ulang sampah. Hanya tersedia 1 (satu) TPA sesuai standar (untuk 4 kecamatan) yakni TPA Tanjung Belit dipasir pengaraian, sedangkan TPA Ujung Batu belum memenuhi standar temasuk luas area. Pada daerah ini Jumlah volume sampah sebesar 17.732,5m3 sementara kapasitas daya tampung sebesar 10.623,69 m3 sehingga masih dibutuhkan TPA yang ramah lingkungan untuk menampung sampah yang ada serta pengembangan sarana dan prasarananya.
- Persentase timbunan sampah yang tertangani pada tahun 2024 masih sebesar 23,32 persen, hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana penanganan sampah. Disisi lain persentase cakupan area pelayanan persampahan masih rendah yaitu sebesar 3,73 persen dan hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten.

5. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 masih sebesar 0,58 persen, hal ini menjadi masalah karena belum terdata secara optimal disebabkan masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah walaupun secara hukum agama sudah menikah, selain itu juga dikarenakan belum terdatanya seluruh penduduk yang memiliki akta nikah tetapi belum melaporkan/mengupdate Nomor Akte Nikah nya kedalam Server Adminduk Kabupaten Rokan Hulu
- Belum optimalnya akses dan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di UPTD Kecamatan dikarenakan terbatasnya akses aplikasi SIAK di UPTD Kecamatan, sumber daya manusia pengelola aplikasi SIAK di UPTD Kecamatan masih kurang serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan SIAK di UPTD Kecamatan masih minim.

6. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih ada desa dengan status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 17 desa berkembang, 65 desa maju 56 desa mandiri..
- Masih rendahnya Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu 88 desa telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa dengan kondisi baik dengan rata-rata mencapai 63,31 persen.
- Belum optimalnya sinergitas lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga adat dengan pemerintah desa, yang mana hal ini disebabkan oleh minimnya

keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga adat desa oleh pemerintahan desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan serta kurangnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga adat desa itu sendiri

7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi permasalahan utama adalah Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, Jumlah Akseptor KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49, dan Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak mengalami perkembangan selama lima tahun terakhir, Hal ini pula yang membuat kinerja capaian Jumlah Peserta KB Baru pada tahun 2024 tidak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

8. Urusan Wajib Perhubungan

Permasalahan utama terkait urusan perhubungan adalah Kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dapat terlihat dari persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang melakukan uji KIR pada tahun 2024 sebesar 35,94 persen. Permasalahan lain adalah Masih perlu dilakukan upaya yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pengemudi kendaraan berat, serta penerapan teknologi dan pengawasan yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL), Belum optimalnya transportasi antar moda yang melayani pergerakan orang dan barang antar desa dalam kabupaten dan antar kabupaten dengan kabupaten dan/atau provinsi lainnya karena tingginya ketergantungan pada transportasi pribadi dimana masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil, Permasalahan lain untuk urusan wajib perhubungan adalah Ketidaksesuaian Jumlah Izin Trayek dengan Kebutuhan yang hanya 25 izin trayek.

9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- Masih terdapat 23 desa yang low signal dan blankspot dari 139 desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dikarenakan kurangnya infrastruktur telekomunikasi seperti menara di daerah yang lemah signal tersebut. Disisi

lain terdapat sebaran penduduk pada beberapa wilayah yang tidak memenuhi syarat untuk berdirinya Stasiun Pemancar-Penerima Dasar/ Base Transceiver Station (BTS) termasuk topografi yang sulit dan biaya infrastruktur yang tinggi serta keterbatasan akses jaringan listrik atau backhaul.

- Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) masih berada pada angka 3,46 atau masuk dalam kategori cukup, Nilai ini masih berada dibawah kategori baik, sangat baik dan memuaskan, Nilai SPBE ini berhubungan langsung dengan kualitas managemen informasi berbasis elektronik, tentang bagaimana pemerintah menyajikan informasi yang akurat, terintegrasi dan lengkap untuk dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan.

10. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sebanyak 212 koperasi, tidak signifikan dengan peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT karena kurangnya pengawas dan anggota koperasi yang mewajibkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- Belum maksimalnya penertiban dan pengawasan koperasi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sehingga masih terdapat koperasi liar yang bergerak di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

11. Urusan Wajib Penanaman Modal

- Rendahnya daya serap tenaga kerja Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (PMDN/ PMA) dimana pada tahun 2024 rasionya hanya sebesar 3,04 dari 6.660 perusahaan yang terdaftar dan 25.217 tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut yang terdata pada aplikasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) di daerah
- Terjadinya penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebesar 113,98 persen pada tahun 2024, dibandingkan dengan nilai realisasi PMDN pada tahun 2023 yang mencapai 147,82 persen

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir tidak menunjukkan adanya perkembangan yang lebih baik, Jumlah organisasi pemuda yang aktif stagnan diangka 4 pada tahun 2020 - 2024, Sementara itu jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir juga stagnan di angka 32, Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya peran organisasi pemuda sebagai perannya dalam pembangunan daerah, Selain itu,

pembinaan terhadap organisasi olahraga juga dinilai masih kurang jika dilihat dari kontribusi atlit berprestasi tingkat nasional dan internasional, Permasalahan lainnya adalah jumlah atlet pelajar yang dibina selama lima tahun terakhir stagnan di angka 215 sementara jumlah seluruh atlit pelajar 1040, Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya pembinaan atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu cabang olah raga, untuk peningkatan prestasi.

13. Urusan Wajib Kebudayaan

Beberapa permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah:

- Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk tidak sebanding dengan jumlah grup kesenian penduduk yang semakin bertambah.
- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan tenaga ahli dibidang kebudayaan yang masih kurang disebabkan belum adanya pelatihan sertifikasi tenaga ahli dibidang kebudayaan yang intensif
- Kurangnya pendokumentasian terkait kebudayaan Rokan Hulu. Hal ini ditunjukkan oleh alat bukti artefak yang tidak tersimpan dan tidak terdokumentasikan dengan baik Menurunya jumlah apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan.
- Kurangnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki museum, disamping itu pembugaran terhadap cagar budaya di Kabupaten Rokan Hulu masih belum optimal
- Berkurangnya regenerasi pelaku budaya. Kurangnya minat masyarakat dan generasi muda untuk mengenal dan belajar tentang budaya
- Pengesahan hak terhadap produk seni dan budaya masih kurang. Belum adanya produk seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu yang dipatenkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
- Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan

14. Urusan Wajib Perpustakaan dan kearsipan

- Pada tahun 2024 Indeks pambangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 32,99 masuk kedalam kategori sedang dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 69,24
- Belum memadainya koleksi perpustakaan dan sistem layanan perpustakaan digital berbasis teknologi, inklusi sosial dan gender.

- Masih minimnya perpustakaan sekolah yang terakreditasi, dikarenakan jumlah dan kapasitas/ kompetensi pustakawan di sekolah masih minim dan rendah.
- Sementara itu persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku selama kurun lima tahun belum menunjukkan perkembangan yang signifkan, tahun 2024 hanya 6 (enam) perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

15. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

- Sementara itu untuk indikator jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terlihat cenderung belum optimal dari tahun ketahun. yaitu sebesar 1 kelompok pengrajin tahun 2024.
- Banyak alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum bertanda tera sah.
- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB di Rokan Hulu sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 5,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
- Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB di Rokan Hulu sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 25,70 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 25,97 persen.
- Masih terdapat Industri Kecil Menengah (IKM) yang produknya belum mendapatkan perizinan seperti barcode, PIRT, label halal

16. Urusan Pilihan Pariwisata

Beberapa permasalahan terkait urusan pariwisata adalah:

- Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata serta belum tertatanya pengembangan kawasan objek wisata di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan dokumen perencanaan pengembangan pembangunan di kawasan objek wisata belum lengkap dan permasalahan status kawasan

- Belum optimalnya promosi pariwisata di daerah, kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan minimnya kerjasama dengan organisasi pariwisata
- Rendahnya kontribusi sektor wisata terhadap PDRB, Padahal sektor wisata merupakan salah satu sektor yang kehadiran berdampak langsung pada masyarakat
- Pengembangan Ekonomi Kreatif belum optimal karena minimnya pembinaan dan dukungan fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif pariwisata

2.3.5. Aspek Daya Saing Daerah

- Struktur ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih bergantung pada sektor primer, Kontribusi sektor primer terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 54,22 persen dan pada tahun 2024 sebesar 54,70 persen, Sektor primer merupakan sektor yang sangat rentan terhadap goncangan perekonomian dan perubahan harga komoditas, Maka kurang baik jika proporsi PDRB lebih timpang pada sektor primer, Pemerintah harus lebih gencar untuk menggeser struktur ekonomi dengan menghidupkan sektor industri baru dan jasa-jasa, Sehingga antara sektor primer, sekunder dan tersier lebih seimbang proporsinya dalam perekonomian.
- Dari sisi pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Rokan Hulu terlihat bahwa pengeluaran untuk Tembakau menjadi pengeluaran utama setelah makanan dan minuman jadi, Pengeluaran untuk tembakau – rokok, jauh lebih besar dibanding pengeluaran untuk daging, ikan, buah-buahan, sayuran, telur dan susu, Hal ini memerlukan perhatian serius mengingat konsumsi daging per kapita Rokan Hulu masih tergolong rendah, terutama bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lebih maju, Rendahnya konsumsi daging, buah dan sayur telah menempatkan kita sebagai negara dengan tingkat stunting yang tinggi dan gizi yang kurang dibanding negara-negara lain, Pengeluaran untuk tembakau sudah seharus dapat dikonversi untuk konsumsi yang lebih sehat dan produktif. Secara umum, struktur pengeluaran masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan rokok, yang meningkat dari 55,33 persen pada 2023 menjadi 58,06 persen pada 2024. Porsi pengeluaran yang tinggi pada kelompok makanan mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini mengindikasikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan non-primer masih relatif rendah, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat perlu terus diperkuat

2.3.6. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah. Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 memiliki tema ” Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan Ekonomi Inklusif yang berkelanjutan”. Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026, sebagai berikut:

a) Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang
b) Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah
c) Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif
d) Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial
e) Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis.

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.355
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
Berdasarkan Permasalahan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
1	Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah,PeningkatanInvestasi danPengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	1. Belum optimalnya peran BUMDesa sebagai pilar ekonomi di Desa 2. Dari total panjang jalan dikabupaten 1.875,41km, memiliki kondisi kerusakan berat mencapai 1,240,52 km 3. Belum mencukupinya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas 4. Belum maksimalnya sistem angkutan pedesaan, untuk mobilitas arus barang dan orang 5. Belum adanya angkutan perkotaan 6. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 7. Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata 8. Belum optimalnya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Rokan Hulu seperti Atraksi (Attraction) Aksesibilitas (Accessibilitas)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
		Amenitas atau Fasilitas (Amenities) dan Ancillary Services (Organisasi Kepariwisataan) 9. Kuantitas dan Kualitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih Kurang 10. Lambatnya perkembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal 11. Belum optimalnya pembinaan terhadap Koperasi;
2	Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	1. Persentase Rumah Tangga yang mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak yaitu sebesar 93,45 2. Rendahnya nilai peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu sebesar 35,49 tahun 2024 3. Masih tingginya dominasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 54,89 persen yang masih memiliki nilai tambah rendah, 4. Masih Rendahnya Produksi dan Produktivitas sektor pertanian 5. Timbulan sampah yang ditangani dan persentase jumlah yang ditangani masih 23,32 persen ditahun 2024 maupun tahun sebelumnya masih rendah 6. Belum optimalnya bangunan Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Rokan Hulu dimana panjang saluran irigasi dalam kondisi rusak ringan 2.470,87 meter dan rusak berat 9.097,38 meter yang memerlukan rehabilitasi kawasan irigasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi padi 7. Populasi ternak masih belum mencapai target daerah yaitu baru mencapai sekitar (70,43 persen) 8. Masih terjadi peningkatan kasus penyakit hewan pada ternak, mencapai 298 kasus pada tahun 2024
3	Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	1. Bahaya terpaparnya paham radikalisme terhadap umat beragama 2. Kurangnya pendokumentasian terkait kebudayaan Rokan Hulu 3. Kuantitas dan kualitas SDM dibidang kebudayaan yang masih rendah 4. Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana bidang Kebudayaan 5. Minimnya pelestarian dan pengelolaan benda-benda cagar budaya 6. Masih minimnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
4	Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	1. Masih banyaknya bangunan sekolah SD berkondisi tidak baik 152 sekolah dari 378 SD 2. Masih banyaknya bangunan SMP/MTS berkondisi tidak baik 49 sekolah dari 141 sekolah 3. Distribusi dan Kompetensi Guru tidak Merata 4. Belum Terpenuhinya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan 5. Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikat pada pendidikan dasar

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
		6. Masih kurangnya tenaga dokter hanya 109 org idealnya 1 : 2,500 jumlah penduduk 7. Prevalensi stunting di beberapa Desa yang perlu ditangani lebih lanjut 8. Masih Ada beberapa desa yang masih jauh dari fasilitas puskesmas (23 Puskesmas) 9. Meningkatnya Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu,sebesar 0,10 persen atau 53 orang perlu penanganan serius 10. Belum optimalnya penanganan Cakupan balita pneumonia masih 1,65 persen 11. Angka Kematian Bayi meningkat pada tahun 2024 tercatat 6,93 persen per 1000 kelahiran hidup (68 kematian) dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,24 persen per 1000 kelahiran hidup (35 kematian) perlu menjadi perhatian pada pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita 12. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2024 tercatat 72,1 persen (1.192 Jumlah penderita baru TBC BTA) 13. Meningkatnya Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (1.422 kasus) 14. Masih tingginya anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah yaitu sebanyak 72 orang 15. Keterwakilan perempuan dilegislatif belum memenuhi kuota meskipun sudah ada regulasi untuk afirmasinya yaitu sebesar 6,66 16. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 9,62 % dari jumlah penduduk
5	Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	1. Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis digital 2. Belum terintegrasinya semua sistem informasi pemerintah daerah sehingga menyulitkan terhadap percepatan monitoring evaluasi pencapaian target kinerja 3. Belum terlaksananya konsep keterpaduan layanan sebagaimana yang tertuang dalam SPBE 4. Belum optimalnya penerapan dan standarisasi keamanan siber yang mengakibatkan kebocoran informasi dan insiden siber

2.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang akan dihadapi dan sesuai dengan visi dan misi periode 2025-2029 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026, maka permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan yang akan terus mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sepanjang lima tahun ke depan antara lain adalah:

1. Tingkat Kemiskinan
   - Luasnya cakupan wilayah pemukiman penduduk yang tergolong miskin yang ditangani;
   - Terbatasnya sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan;
   - Belum sinergisnya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan antar OPD;
   - Belum maksimalnya pertumbuhan sektor usaha yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
2. Tingkat Pengangguran
   - Terbatasnya jumlah lapangan kerja baru, Lapangan kerja baru umumnya adalah kegiatan usaha keluarga, yang membutuhkan jumlah pekerja yang terbatas, Sebagian dari tenaga kerja yang dipekerjakan pada kegiatan usaha ekonomi keluarga adalah anggota keluarga sendiri;
   - Tidak sesuainya jenis pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan jenis pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang baru tercipta, Akibatnya, sebagian dari lapangan kerja yang baru tercipta diberikan kepada tenaga kerja yang berasal dari daerah lain yang memiliki jenis pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan;
   - Terbatasnya kegiatan pelatihan teknis yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah bagi para pencari kerja.
3. Infrastruktur
   - Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan;
   - Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan;
   - Kurang optimalnya prasarana infrastruktur air minum sehingga belum maksimal dalam menjangkau daerah-daerah rawan air yang cukup jauh dari ibu kota kecamatan;
   - Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum;
   - Pemenuhan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Rokan Hulu yang terpadu dan merata keseluruh wilayah kecamatan serta pemenuhan aksebilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa.
   - Kinerja sistem drainase perkotaan masih rendah dikarenakan pembangunan perlengkapan jalan belum terpenuhi dari panjang jalan yang dibangun

4. Pendidikan
   - Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
   - Belum meratanya penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
   - Persentase angka putus sekolah yang cukup tinggi;
   - Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan, terindikasi dari persentase ruang kelas dalam kondisi rusak;
   - Ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan;
   - Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikat pada pendidikan dasar
   - Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Kesehatan
   - Kurangnya tenaga medis sampai kepelosok perdesaan;
   - Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesesehatan kurang optimal;
   - Masih rendahnya penanganan komplikasi kebidanan;
   - Prevalensi stunting di beberapa desa yang masih cukup tinggi.
   - Masih banyak masyarakat yang menjadi penderita penyakit TBC BTA
   - Masih banyaknya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita dikecamatan yang belum ditangani

6. Perumahan
   - Masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pembangunan rumah layak huni.
   - Masih banyak terdapat pemukiman kumuh
7. Penataan ruang
   - Kurang dipatuhinya dan tingginya intensitas pelanggaran terhadap RTRW;
   - Belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW;
   - Masih adanya permasalaahan kawasan hutan yang harus diintegrasikan kedalam peta pola ruang dimana pengintegrasian tersebut menunggu instruksi dan arahan dari pihak provinsi.
   - Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang dan pemenuhan integrasi layanan informasi geospasial yang berakibat terjadinya penyimpangan pemanfaatan pola ruang.
   - Terjadinya penyimpangan pemanfaatan pola ruang karena belum adanya peraturan kepala daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/ Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada seluruh ibukota kecamatan

sebagai turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

8. Sosial
   - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar, lansia terlantar dan disabilitas di luar panti;
   - Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Rokan Hulu khususnya keluarga fakir miskin dan penyandang disabilitas
   - Penerima bantuan sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena pengusulan penerima bansos kurang objektif dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak di update sesuai kondisi di lapangan
9. Persampahan
   - Masih kurangnya fasilitas-fasilitas persampahan dan personil kebersihan,
10. Ruang Terbuka Hijau
    - Belum terpenuhinya persentase Ruang Terbuka Hijau minimal memiliki proporsi 30 persen dari Kawasan perkotaan
11. Ketahanan pangan
    - Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan Daerah;
    - Cadangan pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan pangan masyarakat belum memadai;
    - Masih adanya desa rentan rawan pangan;
    - Belum berkembangnya lembaga distribusi pangan masyarakat;
    - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman belum optimal;
    - Penerapan metode penyuluhan belum berjalan maksimal;
    - Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengakses teknologi dan permodalan serta masih lemahnya kelembagaan petani;
    - Transfer dan adopsi teknologi oleh petani belum berjalan dengan baik;
    - Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan penyuluhan belum memadai.
12. Pariwisata
    - Belum memiki tempat wisata unggulan maupun lintas destinasi wisata unggulan yang menjadi pilihan untuk dikunjungi masyarakat,

- Minimnya pelestarian dan pengelolaan benda-benda cagar budaya,
- Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata serta belum tertatanya pengembangan kawasan objek wisata
- Kurangnya pembinaan pelaku-pelaku seni budaya,

13. Penyelenggaraan PTSP
    - Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah terintegrasi secara online akan tetapi belum terlaksana secara optimal dikarenakan pelaku usaha masih harus mengurus syarat ke perangkat daerah terkait
    - Masih belum optimalnya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP
14. Reformasi Birokrasi
    - Belum optimalnya Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Skor EPPD), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
    - Memberikan pelayanan publik yang maksimal dan membuat birokrasi berbelit-belit menjadi pendek.

Rencana program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pengendalian evaluasi apakah perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan hasil pembangunan daerah selama lima tahun periode Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Evaluasi perencanaan pembangunan daerah telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan dari pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ini adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah nasional, konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah daerah, konsistensi antara rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana jangka menengah daerah, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan,

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Riau. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Konektivitas Wilayah, hal ini

sejalan dengan Tema RKPD tahun 2026, yaitu **"Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan"** dengan prioritas pertama Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang.

Pada tahun 2026 diharapkan akan terjadi pengembangan struktur perekonomian dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan ke sektor-sektor lainnya, sehingga sektor-sektor strategis ekonomi lokal lainnya bisa tumbuh.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 5,03%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang juga di angka 5,03%. Angka ini masih berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2% dan menunjukkan tren stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam dekade terakhir di kisaran 5%. Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB, sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, serta komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan *peer countries* seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%).

Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif sepanjang tahun 2024. Wilayah Jawa dan Sumatera tetap menjadi kontributor utama penopang pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,92% dan 4,45%. Aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan konsisten menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Sumatera.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah – panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan

infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Adapun Pembangunan Nasional Tahun 2026 diarahkan pada "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan arah kebijakan mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan produktivitas ekonomi melalui hilirisasi dan digitalisasi, serta pembangunan yang inklusif dengan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, penyediaan rumah layak huni, dan percepatan pengentasan kemiskinan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Tema Pembangunan Provinsi Riau di tahun 2026 adalah "**Perkuatan Fondasi Tranformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan"**. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokan menjadi 4 (empat) sub tema, antara lain :

1. Transformasi Sosial:
   - Pendidikan;
   - Kesehatan;
   - Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial);
   - Agama dan Budaya.
2. Transformasi Ekonomi:
   - Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perikanan);
   - Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi); dan

- Inovasi.

3. Transformasi Tata Kelola
   - Peningkatan Kapasitas ASN;
   - Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT.
4. Infrastruktur Penguatan Ekonomi
   - Peningkatan Infrastruktur (Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri).

3.1.3 PDRB dan Struktur Ekonomi

3.1.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Rokan Hulu dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor lapangan usaha. Ada 5 (lima) sektor dominan yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri pengolahan; (3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) Pertambangan dan Penggalian; dan (5) Konstruksi.

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2022–2024 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2022–2024
Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persentase)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,03	3,77	1,68
Pertambangan dan Penggalian	1,84	1,57	2,46
Industri Pengolahan/Manufacturing	4,35	3,29	2,22
Pengadaan Listrik dan Gas	5,24	6,96	7,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,53	4,93	3,15
Konstruksi	6,96	7,98	5,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,7	11,36	5,00
Transportasi dan Pergudangan	16,14	6,09	7,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,24	3,89	10,14
Informasi dan Komunikasi	3,84	5,65	7,19

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	3,68	3,46
Real Estat	4,56	3,13	3,90
Jasa Perusahaan	12,78	6,35	7,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,67	4,14	15,96
Jasa Pendidikan	3,91	3,57	4,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,12	9,51	5,45
Jasa lainnya	10,51	6,18	6,17
PDRB	5,02	4,12	2,71

Sumber: BPS Rokan Hulu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2022 hingga 2024 sangat bervariasi, ada sektor yang mengalami kenaikan dan ada sektor yang mengalami penurunan. Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,71 persen. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,12 persen. Hal ini dipengaruhi oleh melambatnya aktivitas ekonomi di beberapa sektor lapangan usaha yang menjadi penopang perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Perlambatan tersebut merupakan efek berlanjut dari el nino. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan perkebunan sawit yang melakukan *replanting* sehingga produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami penurunan. Pengurangan penggunaan pupuk oleh petani sawit akibat mahalnya harga pupuk juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya TBS yang dihasilkan. Melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini kemudian mengakibatkan perlambatan di sejumlah kategori lapangan usaha yang berkaitan seperti kategori Industri Pengolahan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan pengembangan sektor-sektor lainnya untuk memperkecil ketimpangan antar sektor.

3.1.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menurut pengeluaran adalah perhitungan PDRB menurut komponen pengeluaran yang terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Ekspor–Impor. Perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut pengeluaran tahun 2024 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup sekitar dua pertiga PDRB Kabupaten Rokan Hulu yaitu rata-rata sebesar 59,51 persen. Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tumbuh melambat sebesar 2,71 persen. Hal ini disebabkan penurunan aktivitas pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit karena adanya replanting di sejumlah perusahaan. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran 2022–2024 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2022–2024 dan Kabupaten Rokan Hulu (persentase)

PDRB Menurut Pengeluaran	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	4,99	4,7	4,44
Konsumsi LNPRT	4,39	5,89	13,07
Konsumsi Pemerintah	1,08	-0,04	5,51
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,78	4,68	3,16
Perubahan Inventori	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-
PDRB	5,02	4,12	2,71

Sumber: BPS Rokan Hulu

3.1.4 Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Dampak dari inflasi juga mempengaruhi daya beli masyarakat karena menurunnya besaran jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang nominal tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin menurun daya beli masyarakat ketika pendapatan tidak berubah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Di Provinsi Riau angka inflasi di hitung hanya pada 4 Kabupaten/Kota antara lain: Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kampar. Untuk melihat inflasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan menggunakan angka inflasi pada Kabupaten Kampar. Pertimbangan menggunakan angka Inflasi Kabupaten Kampar adalah karena kedekatan jarak/ berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu dibanding dengan kota lainnya yang menghitung angka inflasi. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Laju Inflasi (%) Kabupaten Kampar (Sister City) Tahun 2022-2024

Indikator Makro	Realisasi		
	2022	2023	2024
Inflasi (%)	-	-	0,69

Sumber: BPS Provinsi Riau

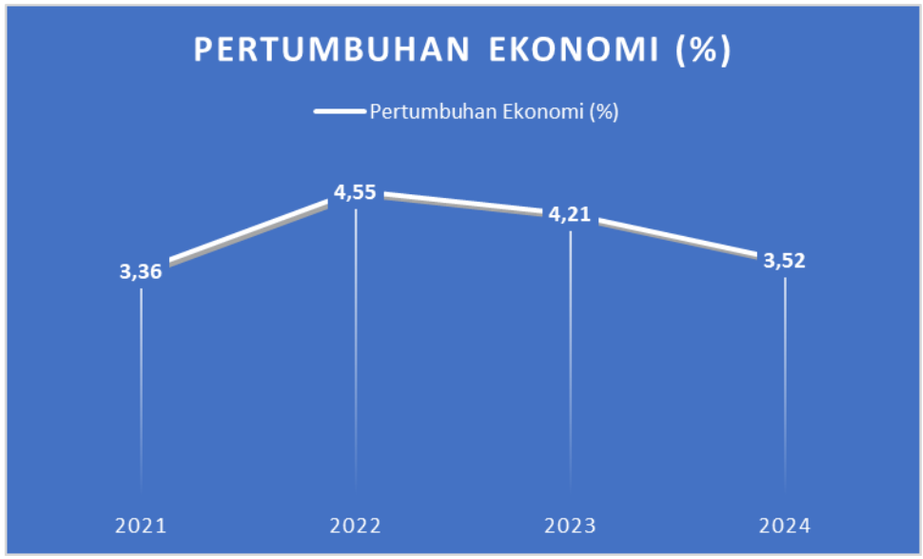
Inflasi Kabupaten Kampar baru dihitung mulai tahun 2024, oleh karena itu data inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2022-2023 belum tersedia. Berdasarkan data pada tabel diatas, inflasi yang terjadi di Kabupaten Kampar sebagai rujukan Kabupaten Rokan Hulu berada pada posisi angka rendah. Kondisi yang demikian ini memberikan indikasi bahwa tingkat harga-harga barang dan jasa sepanjang tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu relatif berada dalam keadaan stabil. Berkenaan dengan itu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi sangat penting terutama untuk menjaga jangan sampai terjadi berkurangnya secara signifikan pasokan barang-barang yang beredar di pasar.

3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkiraan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion dan trade creation*). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

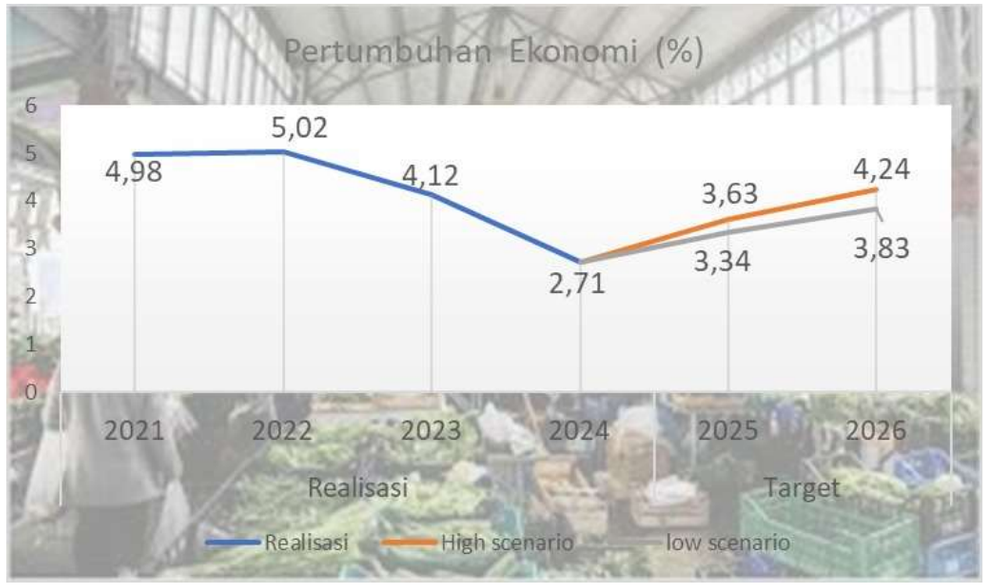
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2024 secara kumulatif adalah 3,52% (y-on-y), yang dihitung dari data triwulan IV-2024. Angka ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 4,21%. Sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta dari sisi pengeluaran adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT). Secara spasial, Provinsi Riau memberikan kontribusi sebesar 5,05 persen terhadap perekonomian nasional. Riau berada di posisi keenam dalam kontribusi PDRB terbesar di Indonesia, dan menjadi provinsi dengan PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2021-2024:



Gambar 3.1
Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Riau Tahun 2021–2024

Pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pada tahun 2026, kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan pada penguatan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, perdagangan, serta jasa penunjang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah.

Selain itu, kebijakan ekonomi tahun 2026 juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah guna menurunkan biaya logistik dan memperlancar pergerakan barang serta jasa. Kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026 diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu secara menyeluruh. Berikut disajikan grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu.



Gambar 3.2
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2021-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,98 persen, dan mengalami kenaikan menjadi 5,02 persen pada tahun 2022. Kemudian tahun 2023, kembali mengalami penurunan menjadi 4,12 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 kembali mengalami perlambatan sebesar 2,71 persen. Perlambatan tersebut merupakan efek berlanjut dari el nino. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan perkebunan sawit yang melakukan replanting sehingga produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami penurunan. Pengurangan penggunaan pupuk oleh petani sawit akibat mahalnya harga pupuk juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya TBS yang dihasilkan. Melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini kemudian mengakibatkan perlambatan di sejumlah kategori lapangan usaha yang berkaitan.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2025 dan 2026 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu diprediksi perlahan akan mengalami peningkatan seiring dengan stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit dan *Crude Palm Oil*

(CPO) yang berdampak pada daya beli masyrakat. Lebih rinci perkembangan dan target pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021–2024 dan Target 2025-2026
Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Capaian				Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,02	4,12	2,71	3,34-3,63	3,83-4,24

Sumber: data BPS Rokan Hulu dan proyeksi (data diolah)

3.1.6 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 menggunakan data administrasi kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 85,14 juta rupiah dan terus naik hingga tahun 2024 mencapai 95,45 juta rupiah. Indikator PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata mampu menciptakan PDRB atau ’nilai tambah’ sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan hal serupa, selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan nilai produktivitas ‘*riil*’ penduduk yang digambarkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 48,71 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 50,62 juta rupiah.

Kenaikan angka PDRB per kapita ini menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2025 dan 2026 PDRB per Kapita diproyeksi mengalami kenaikan. Hal ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan 2026 yang diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB perkapita memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan, namun harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud. Lebih rinci mengenai PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026

	2022	2023*)	2024**)	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
ADHB	49.107.077,95	52.156.580,21	56.646.717,88	58.062.885,83	59.978.961,06
ADHK 2010	28.093.709,87	29.250.575,96	30.042.437,62	31.045.855,04 - 31.132.978,10	32.234.911,28 - 32.453.016,38
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	85,14	89,13	95,45	101,77 – 107,79	109,06-115,36
ADHK 2010	48,71	49,99	50,62	51,41	53,05
Pertumbuhan PDRB per Kapita	3,47	2,62	1,27	1,56	3,19
Jumlah Penduduk (orang)	582.679	573.520	586.994	598.734	606.218
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,5	-1,57	2,35	2,00	1,25

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha tahun 2020-2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan proyeksi (data diolah)
**) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

3.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen adalah sebagai acuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya.

Perkembangan TPT Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 adalah sebesar 2,25 persen, kemudian tahun 2022 naik menjadi 3,62 persen dan pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 3,45 persen, selanjutnya pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi 2,73 persen. Penurunan angka pengangguran tersebut merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta berkembangnya UMKM dan usaha perdagangan/jasa yang didukung dengan akses permodalan dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 3.3
Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 dan 2026 diproyeksi akan kembali turun mendekati capaian TPT tahun 2024 seiring dengan pulihnya ekonomi. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian di Rokan Hulu dan dengan adanya kemajuan teknologi yang akan berdampak pada penciptaan peluang kerja secara mandiri karena banyak penduduk yang melakukan usaha sendiri atau secara online sehingga pengangguran dapat diatasi dan tingkat penganguran terbuka dapat terus turun.

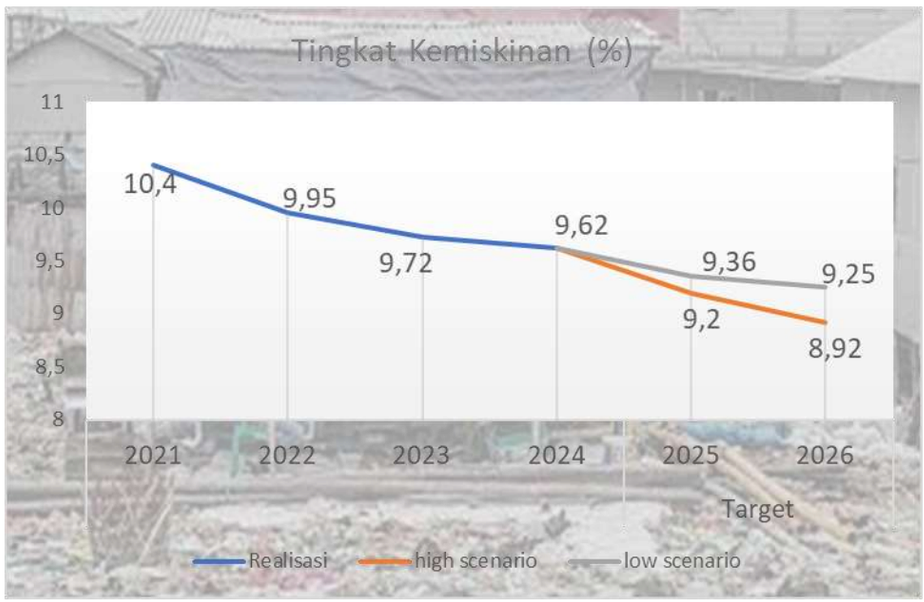
Tabel 3.6
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021–2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026 Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Realisasi				Target	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25	3,62	3,45	2,73	3,20 – 2,95	3,11 – 2,86

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi (data diolah)

3.1.8 Kemiskinan

Berdasarkan data rilis BPS, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin di Rokan Hulu pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,78 poin menjadi 9,62 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 10,4 persen.



Gambar 3.4
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2026

Penurunan ini didorong oleh membaiknya pendapatan masyarakat terutama pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Di sisi lain, penguatan berbagai program perlindungan sosial seperti bantuan pangan, PKH, dan BLT Dana Desa berhasil menjaga daya beli rumah tangga miskin. Upaya pemberdayaan UMKM melalui bantuan permodalan dan peningkatan akses pasar turut mendorong tumbuhnya pendapatan masyarakat kecil. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur desa telah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperluas peluang usaha. Sinergi program penanggulangan kemiskinan

ekstrem juga memberikan dampak signifikan bagi kelompok rumah tangga rentan. Secara keseluruhan, kombinasi faktor struktural dan intervensi pemerintah tersebut berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan pada tahun 2024.

Pada tahun 2025 dan 2026, tingkat kemiskinan diproyeksi akan mengalami penurunan seiring dengan pulihnya perekonomian dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2021–2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026 Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Capaian				Target	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	73,35	74,73	73,81	75,89	73,17-72,32	72,35 – 71,64
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,4	9,95	9,72	9,62	9,36 - 9,20	9,25 - 8,92

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi (data diolah)

Persentase kemiskinan dapat menurun meskipun jumlah penduduk miskin meningkat ketika pertumbuhan penduduk berlangsung lebih cepat dibandingkan penurunan jumlah penduduk miskin itu sendiri, atau ketika terjadi pergeseran rumah tangga rentan menuju kelompok miskin akibat kenaikan garis kemiskinan dan tekanan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan terjadi, namun belum cukup kuat untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah.

3.1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Berdasarkan data rilis BPS Kabupaten Rokan Hulu, Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami kenaikan. Tahun 2021, IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 69,67 poin, naik menjadi 73,07 poin pada tahun 2024. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 telah menggunakan metode baru. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya seluruh komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.



Gambar 3.5
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026

Selanjutnya IPM tahun 2025 dan 2026 di proyeksi akan terus naik karena adanya perbaikan dalam indikator-indikator penting, yaitu dibidang kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Secara rinci perkembangan dan proyeksi IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Perkembangan IPM tahun 2021–2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026
Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	Capaian				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,67	70,31	71,02	73,07	73,57 - 73,99	74,00 - 74,42
Umur Harapan Hidup (UHH)	70,18	70,51	70,84	73,67	74,17 - 74,60	74,61 - 75,03
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,54	8,55	8,81	8,94	9,00 - 9,05	9,05 - 9,11
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,86	12,88	12,94	13,03 - 13,10	13,10 - 13,18
Pengeluaran per Kapita	9.406	9.840	10.055	10.586	10.658 -	10.721 -

Uraian	Capaian				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					10.719	10.782

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi (data diolah)

3.1.10 Rasio Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah. Perkembangan rasio gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026

Indikator Makro	Realisasi				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gini Rasio (nilai)	0,296	0,268	0,259	0,272	0,269 – 0,266	0,266 – 0,259

Sumber: BPS Rokan Hulu dan Proyeksi (data diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut terintegrasi dalam satu dokumen yang dikenal sebagai dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam dokumen APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dokumen APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana

pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Struktur APBD Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas: 1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; 2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Realisasi dan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2027

Uraian	Realisasi		Tahun Berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026	2027*)
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.540.528.998,22	161.501.247.627,49	305.002.780.897,00	266.423.096.948,00	233.820.291.495,72
Pajak Daerah	67.829.112.388,92	57.924.527.651,00	191.643.532.803,00	162.459.474.154,00	122.179.881.321,99
Retribusi Daerah	8.533.083.042,00	5.772.558.665,00	8.374.200.000,00	8.474.200.000,00	6.307.830.712,33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.398.005.508,00	16.364.094.205,00	4.962.867.378,00	5.962.867.378,00	18.943.484.554,06
Lain-lain PAD yang Sah	69.780.328.059,30	81.440.067.106,49	100.022.180.716,00	89.526.555.416,00	86.389.094.907,34
PENDAPATAN TRANSFER	1.697.148.794.040,00	1.626.331.769.122,00	1.718.638.770.203,00	1.487.377.111.262,00	1.686.583.973.750,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.486.045.853.910,00	1.521.657.333.523,00	1.593.742.375.000,00	1.371.974.602.600,00	1.594.434.127.572,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.102.940.130,00	104.674.435.599,00	124.896.395.203,00	115.402.508.662,00	92.149.846.177,59
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.574.663,00	0,00	7.822.151.300,00	0	0
Jumlah Pendapatan	**1.845.813.897.701,22**	**1.787.833.016.749,49**	**2.031.463.702.400,00**	**1.753.800.208.210,00**	**1.920.404.265.245,97**
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.194.920.933.139,95	1.281.469.864.116,90	1.477.479.110.166,00	1.417.774.182.306,00	1.275.542.850.164,64
Belanja Pegawai	603.842.271.673,00	736.418.524.678,00	905.445.763.908,00	933.964.647.374,00	745.290.942.194,11
Belanja Bunga					8.634.370.370,00

Uraian	Realisasi		Tahun Berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026	2027*)
Belanja Barang dan Jasa	532.662.237.285,95	472.107.792.675,90	535.951.678.133,00	470.807.254.932,00	440.426.837.262,26
Belanja Subsidi			200.000.000,00	200.000.000,00	
Belanja Hibah	57.407.324.181,00	72.868.346.763,00	35.638.668.125,00	12.737.280.000,00	75.076.330.538,27
Belanja Bantuan Sosial	1.009.100.000,00	75.200.000,00	243.000.000,00	65.000.000,00	114.369.800,00
BELANJA MODAL	356.642.073.590,00	309.473.866.741,35	276.605.802.395,00	266.629.326.919,00	418.687.625.212,13
Belanja Modal Tanah	-				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.670.206.258,00	26.809.356.967,35	34.337.999.042,00	100.194.850.686,00	95.799.354.769,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.342.140.106,00	96.874.483.346,00	55.516.522.792,00	95.242.559.540,00	112.144.323.783,41
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.512.051.262,00	179.392.804.580,00	178.923.655.001,00	71.171.916.693,00	1.922.673.132.879,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.038.713.964,00	6.063.721.848,00	7.599.810.560,00	20.000.000,00	8.070.813.779,69
Belanja Modal Aset Lainnya	78962000	333.500.000,00	227.815.000,00	0,00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.153.526.845,00	783.993.000,00	13.497.282.184,32	61.678.581.335,00	9.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	9.153.526.845,00	783.993.000,00	13.497.282.184,32	61.678.581.335,00	9.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	255.207.270.537,00	258.652.043.853,00	273.970.630.380,00	238.459.630.949,00	270.507.123.202,20
Belanja Bagi Hasil	7.205.792.096,00	7.800.736.003,00	20.001.773.280,00	17.093.367.416,00	12.054.769.873,04

Uraian	Realisasi		Tahun Berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026	2027*)
Belanja Bantuan Keuangan	248.001.478.441,00	250.851.307.850,00	253.968.857.100,00	221.366.263.533,00	258.452.353.329,16
Jumlah Belanja	**1.815.923.804.111,95**	**1.850.379.767.711,25**	**2.041.552.825.125,32**	**1.984.541.721.509,00**	**1.957.737.598.578,97**
Total Surplus/(Defisit)	29.890.093.589,27	-62.546.750.961,76	-10.089.122.725,32	-230.741.513.299,00	-37.333.333.333,00
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.434.516.941,81	73.335.873.687,08	10.089.122.725,32	233.241.513.299,00	53.333.333.333,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.434.516.941,81	73.334.873.687,08	10.089.122.725,32	52.546.025.150,00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah				34.587.000.000,00	53.333.333.333,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah				146.108.488.149,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	700.000.000,00		2.500.000.000,00	16.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	43.434.516.941,81	72.635.873.687,08	10.089.122.725,32	230.741.513.299,00	37.333.333.333,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	73.324.610.531,08	10.089.122.725,32	0	0	-
TOTAL APBD	**1.815.923.804.111,95**	**1.850.379.767.711,25**	**2.041.552.825.125,32**	**1.987.041.721.509,00**	**1.957.737.598.578,97**

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu
*Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029*

Pada tahun 2026 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu diproyeksikan sebesar Rp. 1.984.541.721.509,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 266.423.096.948,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.487.377.111.262,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 0,- dan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 230.741.513.299,00,-.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penerimaan pembiayaan. Selama kurun waktu tahun 2023-2024, pendapatan transfer menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap APBD sebesar 90,68 persen diikuti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,45 persen, kemudian Penerimaan Pembiayaan sebesar 3,16 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya sebesar 0,01 persen.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 13,42 persen dan 11,94 persen pada tahun 2027. Untuk lebih jelasnya proporsi sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023-2024 dan proyeksi 2025-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2027

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026*)	2027**)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	8,18	8,73	14,94	13,42	11,94
Pendapatan Transfer (%)	93,46	87,89	84,18	74,95	86,15
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	0,01	0,00	0,38	0,00	0,00
Penerimaan pembiayaan (%)	2,39	3,93	0,49	11,63	1,91
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab.Rokan Hulu
Keterangan : *) Ranhir RKPD dan Proyeksi
**) Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara

teknis tentang keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah dan memperkuat lain-lain pendapatan daerah yang sah serta mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan khususnya dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk meningkatan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengeloloan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2026 yang meliputi:

A. Intensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
   1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
   2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;

3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*on-line system)* serta peningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
5. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Infrastruktur, Sumber daya manusia);
6. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
7. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak *self assessment;*
8. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat PD/unit kerja;
9. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/rertibusi;
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, melaksanakan transaksi non tunai/*cashless* untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan;
11. Melakukan kajian ilmiah untuk peningkatan PAD (kerjasama dengan akademisi/Tenaga Ahli).

B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
2. Penambahan Unit Pelayanan di tingkat Kecamatan potensi yang jauh dari jangkauan serta serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
3. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;

4. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah.
5. Menggali sumber potensi pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan).

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pendapatan transfer berkurang sebesar (4,17) persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 0,- di tahun 2024. Hal tersebut menyebabkan total pendapatan mengalami penurunan meskipun pendapatan asli daerah di tahun 2024 meningkat sebesar 8,72 persen karena proporsi kontribusinya terhadap pendapatan yang rendah.

Pendapatan daerah pada tahun 2025 memakai data dan angka pada RKPD Perubahan tahun 2025 yang telah disahkan menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Sedangkan tahun 2027 diproyeksikan berdasarkan target pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2027

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026	2027*)
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.540.528.998,22	161.501.247.627,49	305.002.780.897,00	266.423.096.948,00	233.820.291.495,72
Pajak Daerah	67.829.112.388,92	57.924.527.651,00	191.643.532.803,00	162.459.474.154,00	122.179.881.321,99
Retribusi Daerah	8.533.083.042,00	5.772.558.665,00	8.374.200.000,00	8.474.200.000,00	6.307.830.712,33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.398.005.508,00	16.364.094.205,00	4.962.867.378,00	5.962.867.378,00	18.943.484.554,06
Lain-lain PAD yang Sah	69.780.328.059,30	81.440.067.106,49	100.022.180.716,00	89.526.555.416,00	86.389.094.907,34
PENDAPATAN TRANSFER	1.697.148.794.040,00	1.626.331.769.122,00	1.718.638.770.203,00	1.487.377.111.262,00	1.686.583.973.750,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.486.045.853.910,00	1.521.657.333.523,00	1.593.742.375.000,00	1.371.974.602.600,00	1.594.434.127.572,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.102.940.130,00	104.674.435.599,00	124.896.395.203,00	115.402.508.662,00	92.149.846.177,59
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.574.663,00	0,00	7.822.151.300,00	0	0
Jumlah Pendapatan	1.845.813.897.701,22	1.787.833.016.749,49	2.031.463.702.400,00	1.753.800.208.210,00	1.920.404.265.245,97

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab. Rokan Hulu (data diolah)
*Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029*

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur belanja daerah adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan belanja yang dianggarkan meliputi:

1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, honorarium PNS, honorarium non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
2) Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran jasa atas penggunaan dana, terutama berupa bunga dari pinjaman atau utang;
3) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa diantaranya untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
4) Belanja Subsidi adalah pengeluaran daerah untuk memberikan subsidi finansial kepada badan usaha (BUMN, BUMD, swasta) yang menyediakan layanan dasar masyarakat agar layanan tersebut tetap terjangkau. Ada mekanisme audit dan pertanggungjawaban yang ketat sebelum dan setelah subsidi diberikan.

5) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa, SMP-SD, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan;
6) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya untuk perlindungan sosial.

B. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi:
1) Belanja Modal Tanah;
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

D. Belanja Transfer, merupakan belanja yang dianggarkan meliputi:
1) Belanja Bagi Hasil, dan
2) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Pembangunan Daerah diarahkan untuk menjamin terlaksananya 5 (lima) prioritas pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026. Adapun lima prioritas yang dimaksud adalah:

1. Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang;
2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah;
3. Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis dan Kondusif;

4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial;
5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis.

Belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memprioritaskan alokasi kepada program yang secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan di atas. Untuk mewujudkan kelima prioritas pembangunan tersebut, maka program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi prioritas dapat ditingkatkan anggarannya sehingga fokus pembangunan pada tahun 2026 dapat tercapai.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026, maka Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
3. Pengentasan kemiskinan;
4. Percepatan penurunan stunting;
5. Pemberdayaan pelaku usaha ekonomi daerah khususnya di sektor pertanian, koperasi, UMKM, IKM dan BUMDes;
6. Menumbuhkembangkan produk berbasis potensi daerah dalam rangka mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
7. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berimbang antara pedesaan dan perkotaan;
8. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan pelaku usaha pertanian dan sarana dan prasana pendukungnya;
9. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda;
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima melalui kemudahan perizinan, administrasi kependudukan dan pelayanan dasar lainnya.
11. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan. Sedangkan

mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;

12. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui: Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan prioritas pembangunan tahun 2026.

Pada tahun 2026, belanja daerah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di proyeksikan sebesar Rp 1,984 triliun dengan komposisi belanja operasi sebesar 1.417 triliun rupiah, belanja modal sebesar 266,994 milyar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 61,678 milyar rupiah, dan belanja transfer sebesar 238,459 milyar rupiah. Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2023-2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023–2027

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026	2027*)
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.194.920.933.139,95	1.281.469.864.116,90	1.477.479.110.166,00	1.417.409.257.706,00	1.275.542.850.164,64
Belanja Pegawai	603.842.271.673,00	736.418.524.678,00	905.445.763.908,00	933.964.647.374,00	745.290.942.194,11
Belanja Bunga	-	-	-	-	8.634.370.370,00
Belanja Barang dan Jasa	532.662.237.285,95	472.107.792.675,90	535.951.678.133,00	470.442.330.332,00	440.426.837.262,26
Belanja Subsidi	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Belanja Hibah	57.407.324.181,00	72.868.346.763,00	35.638.668.125,00	12.737.280.000,00	75.076.330.538,27
Belanja Bantuan Sosial	1.009.100.000,00	75.200.000,00	243.000.000,00	65.000.000,00	114.369.800,00
BELANJA MODAL	356.642.073.590,00	309.473.866.741,35	276.605.802.395,00	266.994.251.519,00	418.687.625.212,13
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.670.206.258,00	26.809.356.967,35	34.337.999.042,00	100.149.775.286,00	95.799.354.769,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.342.140.106,00	96.874.483.346,00	55.516.522.792,00	95.552.559.540,00	112.144.323.783,41
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.512.051.262,00	179.392.804.580,00	178.923.655.001,00	71.271.916.693,00	1.922.673.132.879,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.038.713.964,00	6.063.721.848,00	7.599.810.560,00	20.000.000,00	8.070.813.779,69
Belanja Modal Aset Lainnya	789.620,00	333.500.000,00	227.815.000,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.153.526.845,00	783.993.000,00	13.497.282.184,32	61.678.581.335,00	9.000.000.000,00

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026	2027*)
Belanja Tidak Terduga	9.153.526.845,00	783.993.000,00	13.497.282.184,32	61.678.581.335,00	9.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	255.207.270.537,00	258.652.043.853,00	273.970.630.380,00	238.459.630.949,00	270.507.123.202,20
Belanja Bagi Hasil	7.205.792.096,00	7.800.736.003,00	20.001.773.280,00	17.093.367.416,00	12.054.769.873,04
Belanja Bantuan Keuangan	248.001.478.441,00	250.851.307.850,00	253.968.857.100,00	221.366.263.533,00	258.452.353.329,16
Jumlah Belanja	**1.815.923.804.111,95**	**1.850.379.767.711,25**	**2.041.552.825.125,32**	**1.984.541.721.509,00**	**1.957.737.598.578,97**

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab. Rokan Hulu (data diolah)
*Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029*

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pola-pola pembiayaan lainya dari pihak ketiga dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Adapun beberapa pola pembiayan untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman Daerah

   Cakupan pinjaman daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, terdiri dari :

   a. Pinjaman Jangka Pendek (< 1 Tahun), Pinjaman jangka pendek dengan waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.

b. Pinjaman Jangka Menengah (> 1 Tahun), Pinjaman jangka menengah, jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya. Pinjaman jangka menengah, seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Kepala Daerah di Daerah yang bersangkutan dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di Daerah yang tidak mengahsilkan penerimaan Daerah.
c. Pinjaman Jangka Panjang (> 1 Tahun), Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (1) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman jangka panjang, diperuntukkan menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/ atau sarana daerah, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan/ atau memberikanm manfaat ekonomi dan sosial.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

   Dasar hukum terkait KPBU ada dua peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastrutur dan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, KPBU dilakukan dengan tujuan, antara lain :

   a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta.
   b. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.
   c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrstruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
e. Mendorong kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan Usaha.

Pada Komponen penerimaaan pembiayaan, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2026 dan 2027 direncanakan akan melakukan pinjaman ke PT. SMI yang akan digunakan untuk belanja pembangunan gedung dan peralatan medis Rumah Sakit Umum Daerah. Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp. 73,335 milyar yang bersumber dari selisih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, yaitu melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- pada BUMD yaitu PT. Rokan Hulu Jaya. Tahun 2026 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar 233.241.513.299 milyar rupiah. Lebih rinci terkait pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023–2027

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2023	2024	2025	2026	2027*)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.434.516.941,81	73.335.873.687,08	10.089.122.725,32	233.241.513.299,00	53.333.333.333,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.434.516.941,81	73.335.873.687,08	10.089.122.725,32	52.546.025.150,00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah				34.587.000.000,00	53.333.333.333,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah				146.108.488.149,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	700.000.000,00	-	2.500.000.000,00	16.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	43.434.516.941,81	72.635.873.687,08	10.089.122.725,32	230.741.513.299,00	37.333.333.333,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	73.324.610.531,08	10.089.122.725,32	-	-	-

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu (data diolah)
*Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029*

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan daerah adalah penjabaran dari tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah sekumpulan program unggulan yang dipilih secara khusus untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan.

Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang bertujuan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 harus sinergi dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi Riau guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026 diarahkan pada penyelesaian isu-isu strategis yang dilandaskan pada pencapaian visi dan misi pembangunan Rokan Hulu periode 2025-2029.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan

merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029, yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Religius melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan".** Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Konektivitas Wilayah.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana.
3. Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial.
5. Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029

Visi: "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Religius melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan"			
NO	**MISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**
1	**Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah**	1.1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	
			1.1.1. Meningkatnya lapangan pekerjaan
			1.1.2. Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal
			1.1.3.Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			1.1.4. Meningkatnya investasi daerah
			1.1.5. Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata Rokan Hulu
		1.2. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah	
			1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur
			1.2.2. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
			1.2.3. Meningkatnya konektivitas daerah
2	**Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana**	2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah	
			2.1.1. Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah
			2.1.2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
		2.2. Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan	
			2.2.1. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
			2.2.2. Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air
			2.2.3. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana
3	**Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya**	3.1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis	
			3.1.1. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			3.1.2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila
4	**Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial**	4.1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan	
			4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
			4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			4.1.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu
			4.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
5	**Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum**	5.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	
			5.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
			5.1.2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
			5.1.3. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
			5.1.4. Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Rumusan tema RKP tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, dengan 8 Prioritas Nasional (PN) yang menguraikan 8 Misi (Asta Cita) dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

1) PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

2) PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4) PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5) PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6) PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7) PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8) PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, tema pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah “Perkuatan Fondasi Tranformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”. Dalam penyusunan tema tersebut, disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2029, juga mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2026.

Adapun tujuan pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi
2. Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari
4. Mewujudkan infrastruktur yang handal
5. Menurunkan angka kemiskinan
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
7. Penguatan ekosistem riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan daerah
8. Meningkatkan ketahanan sosial budaya mayarakat berlandaskan pada kebudayaan melayu yang agamis

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026 disamping mengacu pada Visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tema rencana Pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Provinsi di tahun berkenaan. Dalam mempercepat pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi, yaitu dengan menyelaraskan tema, prioritas dan arah kebijakan nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Konsistensi Tema, Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
Tema	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Perkuatan Fondasi Tranformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan
Prioritas	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Transformasi Sosial	Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur	Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang
	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Transformasi Sosial	Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Transformasi Ekonomi	Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
			Berkesinambungan sesuai Tata Ruang
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Transformasi Tata Kelola	Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif
	Memperkuat penyelasaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Transformasi Sosial	Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah
Arah Kebijakan			
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah; b. Peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan untuk masyarakat miskin (semua siswa miskin harus bersekolah sampai jenjang tertinggi); c. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; d. Dukungan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM; e. Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; f. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan: g. Pengembangan budaya gemar membaca	a. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan pemerataannya b.Peningkatan kualitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan c. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah; d. Fasilitasi dan dukungan terhadap pendidikan keagamaan e. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan perpustakaan
	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; b. Pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas	a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan rujukan b. Peningkatan kejahteraan keluarga c. Meningkatkan

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
		hidup masyarakat miskin; c. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; d. Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan; e. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting; f. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui peningkatan akses pangan bergizi; g. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis; h. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat.	kualitas pelayanan RSUD d. Pemenuhan penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan e. Meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat f. Peningkatan kualitas dan pemerataan kesehatan dan gizi masyarakat g. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting h. Memperkuat pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat i. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kepemudaan dan olahraga
	Penguatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air		a. Meningkatkan ketersediaan layanan irigasi b. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah c. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan air minum/ bersih
	Pemenuhan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	a. Pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah; b. Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau	a. Memantapkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten b. Memfasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya
	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Meningkatkan upaya mitigasi bencana
	Percepatan penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	a. Pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. Peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur masyarakat miskin; c. Pemerataan pembangunan dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan; d. Pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin	a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa b. Memperbaiki iklim dan promosi Investasi
	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat	a. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan akses masyarakat terhadap lapangan kerja b. Meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan c. Meningkatkan Aksesibilitas, amenitas, atraksi, promosi destinasi wisata, dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif
	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	a. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan; b. Peningkatan kualitas perlindungan anak	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak
	Penguatan ketahanan pangan	Penguatan ketahanan pangan	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah
	Pemenuhan pemerataan penguasaan		

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah		
	Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital		Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Peningkatan infrastruktur dasar	Memfasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya
	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	a. Peningkatan ketangguhan keluarga; b. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. Pengaturan fertilitas melalui program KB dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan advokasi	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
	Pemenuhan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah	Memantapkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten
	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	
	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	a. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM termasuk daya saing produk dan jasanya b. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM termasuk

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
			daya saing produk dan jasanya
	Pemenuhan pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah	
	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	a. Peningkatan pembangunan keolahragaan; b. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	
	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		
	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah		Meningkatkan ketersediaan sanitasi aman bagi masyarakat
	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang Agamis	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat
	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Pengembangan budaya gemar membaca	
	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa		Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, komunikasi, informasi, data, sandi, dan arsip
	Penguatan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan		Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan
	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Penataan amenitas, peningkatan SDM pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata	Meningkatkan Aksesibilitas, amenitas, atraksi, promosi destinasi wisata, dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif
	Peningkatan Produksi Pertanian		
	Peningkatan pengelolaan hutan Lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi		
	Penguatan pencapaian Ketahanan Energi	Mendorong ketahanan dan transisi energi	

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan PAD dari pajak daerah
	Percepatan pertumbuhan sektor industry pengolahan nonmigas	a. Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah b. Penguatan ekosistem ekonomi syariah	
	Pemenuhan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi		
	Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	a. Peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja ASN; b. Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas; c. Penguatan kerjasama dalam pembangunan daerah; d. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; e. Dukungan peningkatan kenyamanan, keamanan, toleransi dan kesejahteraan rakyat.	a. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah b. Meningkatkan profesionalitas ASN

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tema, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Riau dengan RKPD Kabupaten Rokan Hulu sudah selaras. Berikut perbandingan sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026:

Tabel 4.3
Sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

No	Sasaran	Target		
		RKP Nasional 2026	RKPD Provinsi Riau 2026	RKPD Kabupaten Rokan Hulu 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,8 – 6,3	4,4 - 4,7	3,83 – 4,24
2	PDRB per kapita (juta)	5.870(US$)	189,1 - 194,2	109.06 – 115.36
3	Kontribusi PDRB	-	5,1	5,22
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,50 – 7,50	4,65 - 5,65	8,92 – 9,25
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,44 – 4,96	3,38 - 3,62	2,86 -3,11
6	Indeks Rasio Gini (poin)	0,377 – 0,380	0,284 - 0,297	0,259-0,266
7	Indeks Modal Manusia	0,57	0,58	74.00-74.42 (IPM)
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,14	50,57	60,06
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,67	72,06	69,59

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dengan mempedomani tema dan prioritas kebijakan RKP tahun 2026 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2026 “Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan” untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan dan sub prioritas yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) prioritas pembangunan, antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM;
   a) Pemenuhan Prasarana Dasar;
   b) Pendidikan;
   c) Kesehatan;
   d) Kesetaraan Gender;
2. Peningkatan Tata Kelola;
   a) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;
3. Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan;
   a) Pemenuhan Infrastruktur;
   b) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Penguatan Ekonomi;
   a) Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe);
   b) Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan);
   c) Penguatan Ekonomi Masyarakat;
   d) Pariwisata Berbudaya Melayu.

Dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Provinsi Riau tahun 2026, Pemerintah Provinsi Riau telah

menetapkan Program Prioritas yang mendukung secara langsung terhadap hal sebagaimana dimaksud.

Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan dalam RPJMD dan analisa permasalahan pada bab II RKPD, terdapat beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1) Perekonomian Rokan Hulu tahun 2024 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,70 persen, rapuh terhadap krisis karena ketimpangan antar sektor yang tinggi; 2) Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 75.890 ribu jiwa, hal ini menunjukkan luasnya cakupan wilayah pemukiman penduduk yang tergolong miskin yang ditangani; 3) Tingginya prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 tercatat sebesar 21,4 persen. Angka tersebut masih berada dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 20,1 persen. Sementara itu Presiden telah menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen; 4) Masih tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebanyak 267 orang yang ditunjukkan oleh Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah yaitu sebesar 8,94 persen. Hal ini disebabkan oleh Masih adanya anak usia sekolah yang dipekerjakan, masih ada masyarakat yang memandang kurang pentingnya pendidikan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat masuk dalam PKBM, untuk itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 5) Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu adalah 1.875,41 km, jenis permukaan jalan kabupaten, mayoritas memiliki jenis permukaan kerikil dengan panjang 949,568 km, permukaan aspal sepanjang 467,785 km yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jalan dengan jenis permukaan tanah sepanjang 413,024 km dan permukaan lainnya sepanjang 45,033 km.

Berdasarkan paparan prioritas nasional, provinsi dan isu strategis tersebut diatas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 meliputi:

1. Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang;
2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah;

3. Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif;
4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial;
5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan tahunan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Setiap prioritas pembangunan telah dikaitkan dengan misi terkait, sehingga seluruh program, kegiatan, dan target kinerja pada tahun perencanaan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah serta menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Keterkaitan Visi, Misi, Prioritas, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Keterkaitan Visi, Misi, Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

Visi: "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan"					
NO	**PRIORITAS**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
Misi 1: Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Konektivitas Wilayah					
1	**Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang**	1.1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,83 – 4,24
				PDRB per Kapita (juta rupiah) (Juta Rupiah)	109.06 - 115.36
				Rasio Gini (Rasio)	0,259-0,266
			1.1.1. Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,86 -3,11
			1.1.2. Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	26,78-27,80
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	16,32

Visi: "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan"					
NO	**PRIORITAS**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
			1.1.3.Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat	Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	64.186,36
				Persentase Desa Mandiri (%)	51,98
			1.1.4. Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	6.305,33
			1.1.5. Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata Rokan Hulu	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.29-0.31
		1.2. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah		Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur (%)	49,59
			1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	3,51
			1.2.2. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	77,57
			1.2.3. Meningkatnya konektivitas daerah	Rasio konektifitas (Rasio)	43,47
Misi 2: Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana					
2	**Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah**	2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah		Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB (%)	0,597
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	63,12
			2.1.1. Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	16.810,2
			2.1.2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	7,7
		2.2. Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana (IRB) (*)	154,53

Visi: "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan"					
NO	**PRIORITAS**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
			2.2.1. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	75,04
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	91,64
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	29,97
			2.2.2. Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	17,03
			2.2.3. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani (%)	100
Misi 3: Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya					
3	**Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif**	3.1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis		Persentase Pemajuan Budaya Daerah (%)	30
			3.1.1. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina (%)	79,56
			3.1.2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6,2
Misi 4: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial					
4	**Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial**	4.1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks) (Indeks)	74.00-74.42
			4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.02-13.16
				Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun)	9,05-9,16
			4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74.21-75.67

Visi: "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan"					
NO	**PRIORITAS**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	19,36
			4.1.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu	Tingkat Kemiskinan (Persentase)	8,92 – 9,25
				Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%)	40,03
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	4,25
			4.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,49
				Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Kategori)	Madya
Misi 5: Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum					
5	**Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis**	5.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	75,3
			5.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,8
				Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	B
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	82,151
				Nilai Survey Penilaian Integritas (Nilai)	74,78
				Indeks Sistem Merit (Indeks)	267
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	51,88
			5.1.2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,2
			5.1.3. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi (%)	2.5-3.0
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.12-0.13

Visi: "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan"					
NO	**PRIORITAS**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
			5.1.4. Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daera h (%)	100
				Persentase Pencapaian Aksi HAM (%)	76,13

Sinergitas kebijakan dan sasaran pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi tahun 2026 terhadap kebijakan dan sasaran kabupaten tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Sinergitas Kebijakan Nasional, Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas						**TRANSFORMASI SOSIAL**						**Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial**					
Pendidikan	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	9,45		**Pendidikan**	**Meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi**	**Indeks Modal Manusia**	**Indeks**	**0,58**		**Pendidikan**	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan**	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Indeks)	Indeks	74.00 - 74,42	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36				**Indeks Pembangunan Gender**	**Indeks**	**89,29 - 89,40**							
		Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	Nilai	396 404 416			***Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat***	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,06 - 10,06	1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah) 2. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk		***Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan***	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13.02-13.16	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan pemerataannya 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca Numerasi	Nilai	 65,89 58,86				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63 - 13,64	Masyarakat Miskin (Semua Siswa Miskin Harus bersekolah sampai jenjang tertinggi – Riau Cerdas) 3. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas 4. Dukungan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM 5. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas 6. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan 7. Pengembangan Budaya Gemar Membaca			Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun)	Tahun	9.05-9.16	3. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan 4. Fasilitasi dan dukungan terhadap pendidikan keagamaan 5. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan perpustakaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Persen	34,92													

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	11,49													
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	68,5	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan												
Kesehatan	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,68		**Kesehatan**	***Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dan produktif***	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,58	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 2. Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin 3. Peningkatan	**Kesehatan**	***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyaraka***	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	74.21-75.67	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan rujukan 2.Peningkatan kejahteraan keluarga 3. Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD 4. Pemenuhan penyelenggaraan

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)		2,1							kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 4. Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan 5. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting 6. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 7. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis 8. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat 9. Peningkatan Pembangunan Keolahragaan 10. Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	Persen	19,36	pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan 5. Meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat 6. Peningkatan kualitas dan pemerataan kesehatan dan gizi masyarakat 7. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting 8. Memperkuat pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat 9. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kepemudaan dan olahraga
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		109													

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	17,5													
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		252													
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,7	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua												
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,421	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak		***Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif***	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,44	1. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan 2. Peningkatan kualitas perlindungan anak 3. Peningkatan ketangguhan keluarga 4. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia 5. Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan	**Perlindungan Perempuan dan Anak**	***Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak***	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks	0,49	1. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,11-92,21										Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Kategori)	kategori	Madya	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	73,83	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	81,32							
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	72,33													
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	67,24													
		Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	Persen	94,5													
		Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	Persen	69,5													
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan						**Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial)**	**Menurunkan angka kemiskinan**	**Tingkat kemiskinan**	**Persen**	**4,62 - 5,63**							
Kemiskinan	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5-7,5				**Rasio Gini**	**Poin**	**0,296 - 0,299**							
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,00-0,50			***Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah***	penduduk miskin desa	Persen	6,10	1. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan	**Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial)**	***Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu***	Tingkat Kemiskinan (Persentase)	Persen	8.92-9.25	1. Meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan 2. Meningkatkan perlindungan sosial

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah	Persen	18,2			***Meningkatkan pemberdayaan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat***	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	0,89	1. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%)	Persen	40,03	pekerja disabilitas 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4. Pengembangan wilayah dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	34,99				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,39 - 3,60				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	4,25	5. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui dukungan usaha produktif, pelatihan kerja, dan fasilitasi akses permodalan 6. Peningkatan cakupan dan kepesertaan jaminan sosial bagi masyarakat rentan melalui fasilitasi dan sinergi lintas sektor. 7. Penguatan perlindungan sosial adaptif dan inklusif bagi kelompok rentan melalui pemanfaatan data Regsosek yang tepat sasaran dan efisien 8. Penguatan dana sosial syariah dalam mendukung perlindungan sosial
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	10,4	Percepatan penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi		***Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif***	Persentase Penduduk yang memiliki setidaknya satu jaminan sosial (Q1)	Persen	25,74	1. Pemenuhan Hak Dasar , Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin						
	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	68,66													

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur												**Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif**					
	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	66,15		**Agama dan Budaya**	**Meningkatkan ketahanan sosial budaya mayarakat berlandaskan pada kebudayaan melayu yang agamis**	**Indeks harmoni**	**Indeks**	**6,6**		**Agama dan Budaya**	**Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis**	**Persentase Pemajuan Budaya Daerah (%)**	**Persen**	**30**	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,99	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)		***Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau***	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,77 - 60,86	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis		***Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan***	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina (%)	Persen	79,56	1. Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah 2. Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	77,14			***Meningkatnya kerukunan sosial antar masyarakat dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman***	Indeks harmoni sosial	Indeks	6,6	1. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 2.Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat		***Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila***	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	Indeks	6,2	1. Meningkatkan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia																	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia		82,12 – 85,66	Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila			Indeks harmoni religius	Indeks	6,6							
		Indeks HAM		2,8													
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan						**TRANSFORMASI EKONOMI**						**Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang**					
	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	Persen	23,91	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	**Peningkatan Produktifitas (Pertanian dan Perikanan)**	**Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing**	**PDRB per kapita**	**Juta Rp per tahun**	**179,62 - 191,10**		**Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi)**	**Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**Persen**	**3.83-4.24**	
	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	Persen	57,5													
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru								**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,18 - 4,60**				**PDRB per Kapita (juta rupiah (Juta Rupiah)**	**Juta Rupiah**	**109.06 - 115.36**	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3,33	Peningkatan Produksi Pertanian									**Rasio Gini (Rasio)**	**Poin**	**0,259 - 0,266**	
	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global	Peringkat	2	Meningkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif		***Meningkatnya kemandirian ekonomi dan daya saing daerah***	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,44	1. Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah 2. Peningkatan Pendapatan Daerah 3. Penguatan ekosistem ekonomi syariah		***Meningkatnya lapangan pekerjaan***	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2.86 -3.11	1. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan akses masyarakat terhadap lapangan kerja
		Indonesia Blue Economy Index	Indeks	41,26									***Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal***	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Poin	26.78-27.80	1. Memfasilitasi pembangunan industri hilir berbasis pertanian dan perikanan untuk menjadi nilai tambah ekonomi 2. Memfasilitasi pengembangan kegiatan perdagangan termasuk berorientasi ekspor
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Peringkat	41										Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	Persen	16,32	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi							***Peningkatan daya saing investasi***	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	32,92 - 33,09	1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah		***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat***	Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	64186,36	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM termasuk daya saing produk dan jasanya 2. Penguatan ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa 4. Menata UPT Transmigrasi menjadi Desa Definitif
	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	37,95	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja									Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	51,98	
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	Persen	1,12									***Meningkatnya investasi daerah***	Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	6.305,33	1. Penguatan iklim dan promosi Investasi

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	3,15			***Meningkatnya nilai tambah pariwisata***	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	Juta Rupiah	5.535,32	1. Penataan amenitas, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata		***Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata Rokan Hulu***	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Poin	0.29-0.31	1. Meninngkatkan Aksesibilitas, amenitas, atraksi, promosi destinasi wisata, dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif
		Rasio Kewirausahaan	Persen	3,18								**Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah**					
	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Rasio PDB Pariwisata	Persen	4,60-4,70	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		***Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani***	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,46	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat	**Peningkatan Produktifitas (Pertanian dan Perikanan)**	**Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah**	**Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB (%)**	Persen	0,597	
		Devisa Pariwisata	Milliar USD	22,00-24,70				Nilai Tukar Petani	Indeks	175,67	2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin		***Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah***	PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	16.810,20	1. Memfasilitasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan 2. Meningkatkan ketersediaan layanan irigasi
	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Persen	7,40-8,00									***Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau***	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Persen	7,7	1. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri												**Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah**					
	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDB Industri Pengolahan	Persen	21,2	Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	**Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi)**	**Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari**	**Indeks Ekonomi Hijau Daerah**	**Indeks**	**59,35**		**Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Bencana**	**Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan**	**Indeks resiko bencana (IRB)**	**Indeks**	**154,53**	
	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	29,44	Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		***Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah***	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,06	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Mendorong Ketahanan dan Transisi Energi		***Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup***	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Poin	69,59	1. Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		Ekspor Barang dan Jasa	Persen	22,7				Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca	Indeks	50,57				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	Persen	91,64	2. Meningkatkan ketersediaan sanitasi aman bagi masyarakat 3. Meningkatkan layanan pengelolaan sampah dan limbah
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru														Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	Persen	29,97	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,67	Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas								***Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air***	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	Persen	17,03	1. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan air minum/ bersih
		Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	60			***Mengurangi risiko bencana daerah***	Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	137,68	1. Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana		***Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana***	Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani (%)	Persen	100	1. Meningkatkan upaya mitigasi bencana 2. Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	28 (17 terdaur ulang)													
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Persen	19,07													
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan	Persen	27,35													
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur												**Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis**					
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	Persen	0,136	Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan												

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
					Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar												
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas						**Inovasi**	**Penguatan ekosistem riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan daerah**	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**56,35**		**Tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis IT dan inovasi, serta peningkatan kapasitas ASN**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**Indeks**	**75,3**	
	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peringkat Indeks Inovasi Global		52	peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional		***Meningkatnya hasil riset dan inovasi untuk pembangunan daerah***	Indeks kapabilitas inovasi	Indeks	2,75	1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital		***Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik***	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	Angka	51,88	1. Meningkatkan kualitas inovasi daerah
		Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	Persen	0,31			***Meningkatnya kerjasama pembangunan***	Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan	Persen	70	1. Penguatan Kerjasama dalam pembangunan daerah						
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan						**TRANSFORMASI TATA KELOLA**						**Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis**					
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks	72,8		**Peningkatan Kapasitas ASN**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**Indeks reformasi birokrasi**	**Indeks**	**84,74**		**Tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis IT dan inovasi, serta peningkatan kapasitas ASN**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**Indeks**	**75,3**	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
		Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Indeks	94			***Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional***	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	78,70	1. Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN		***Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik***	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	1,8	1. Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, komunikasi, informasi, data, sandi, dan arsip 2. Mendorong percepatan transformasi digital melalui penguatan infrastruktur, peningkatan literasi, dan pemerataan akses teknologi informasi 3. Meningkatkan tata kelola organisasi, kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengawasan 4. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah 5. Meningkatkan tata kelola integritas dan pengawasan 6. Meningkatkan profesionalitas ASN
	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,7				Nilai survey indeks berakhlak	Poin	73,64				Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	Predikat	B	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
		Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	40				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefenisi				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	Indeks	82,151	
		Indeks Integritas Partai Politik	Indeks	65,00 - 66,99		**Implementasi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis IT**	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel**	Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks	52,55	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas			Nilai Survey Penilaian Integritas (Nilai)	Nilai	74,78	
	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	Return on Asset (RoA) BUMN		3,26				Nilai survey kepuasan masyarakat	Poin	73,04				Indkes Sistem Merit (Indeks)	Indeks	267	
	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	Persen	12,22-13,35				Nilai SAKIP	Poin	75,30							

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan																
		Rasio Perpajakan terhadap PDB	Persen	10,45-11,40				Kategori hasil pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Kategori	A			***Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik***	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	Indeks	4,2	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan investasi 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tingkat Inflasi	Persen	2,50 ± 1,00									***Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah***	Tingkat Inflasi (%)	Persen	2.5-3.0	1. Mengendalikan inflasi daerah 2. Meningkatkan PAD dari Pajak daerah 3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
														Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0.12-0.13	
													Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (%)	Persen	100	1. Meningkatkan keadilan dan ketaatan hukum di daerah 2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah
														Persentase pencapaian aksi HAM (%)	Persen	76,13	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi						**INFRASTRUKTUR**						**Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang**					
	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok Infrastruktur terhadap PDB	Persen	47	Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik	**Peningkatan Infrastruktur (Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri)**	**Mewujudkan infrastruktur yang handal**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**76,19**		**Infrastruktur Jalan, Hunian Layak dan Layanan Transportasi darat dan Intermoda**	**Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah**	**Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur (%)**	**Persen**	**49,59**	

NASIONAL						PROVINSI						KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PRIORITAS**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2026**	**ARAH KEBIJAKAN**
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru							***Meningkatnya layanan transportasi***	Rasio konektivitas transportasi	Poin	0,50	Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah		***Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur***	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	Indeks	**3,51**	1. Memantapkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten
	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan		42,24	Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air		***Meningkatnya aksesibilitas***	Tingkat kemantapan jalan	Persen	71,61			***Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan***	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persen	**77,57**	1. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh termasuk fasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya 2. Memfasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		17			***Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar***	Indeks layanan infrastruktur dasar	Indeks	76,19	1. Peningkatan Infrastruktur Dasar 2. Peningkatan Akses Pelayanan dasar Infrastruktur masyarakat miskin 3. Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah 4. Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau		***Meningkatnya konektifitas daerah***	Rasio konektifitas (Rasio)	Rasio	43,47	1. Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dan intermoda

Selanjutnya di dalam RKPD tahun 2026 juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disebutkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD. Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Rokan hulu, Bappeda kabupaten Rokan hulu telah menyiapkan aplikasi perencanaan (SIPD-RI). Garis besar substansi permasalahan yang termuat dalam Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 yang telah di paripurnakan oleh DPRD dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan sesuai tata ruang;
2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah;
3. Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif;
4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial;
5. Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis transformasi digital serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, taat hukum, dan demokratis.

Hasil reses yang telah dilakukan dan diparipurnakan oleh DPRD, disampaikan kepada Bappeda terdiri dari 2.451 usulan. Dari usulan tersebut yang dientri dan diusulkan DPRD ke Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIPD-RI sebanyak 1.478 usulan kegiatan. Kemudian Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu ini ditelaah dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta melihat dari ketersediaan kapasitas riil anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pada dokumen RKPD tahun 2026 ini juga memuat dukungan program prioritas terhadap prioritas pembangunan yang sudah di tetapkan. Terdapat beberapa program prioritas yang digunakan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah, salah satunya seperti Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Secara detail dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**Rp 122.860.397.250,00**	**-**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			***Rp 122.860.397.250,00***	**-**
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Rp 8.852.912.250,00	-
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Rp 100.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Rp 8.151.300.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Rp 220.939.500,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Rp 40.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Rp 261.745.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rp 2.607.696.750,00	-
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Rp 2.565.900.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Rp 33.027.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp 67.964.629.750,00	-
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Rp 83.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Rp 89.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Rp 1.530.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Rp 1.645.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Rp 214.338.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengadaan Mebel Sekolah	*Rp 200.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Rp 62.464.400.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Rp 951.190.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Rp 61.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Rp 600.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Rp 72.543.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp 43.435.158.500,00	-
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Rp 200.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Rp 940.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Rp 635.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengadaan Mebel Sekolah	*Rp 200.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Rp 2.840.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Rp 30.559.700.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Rp 67.760.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Rp 41.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Rp 5.510.001.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	*Rp 2.154.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Rp 200.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Rp 8.769.750,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**Rp 211.092.218.769,00**	**-**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			***Rp 827.203.000,00***	-
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 827.203.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Rp 827.203.000,00*	*Dinas Kesehatan*
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			***Rp 209.627.628.769,00***	-
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 155.925.718.149,00	-
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Rp 233.668.800,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Rp 3.560.478.200,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengembangan Puskesmas	*Rp 504.718.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengembangan Rumah Sakit	*Rp 149.826.853.149,00*	*Dinas Kesehatan*
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Rp 1.800.000.000,00*	*Dinas Kesehatan*
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 53.701.910.620,00	-
				Operasional Pelayanan Puskesmas	*Rp 3.467.564.200,00*	*Dinas Kesehatan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Rp 62.906.400,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Rp 2.196.228.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Rp 699.190.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Rp 33.343.127.600,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Rp 19.110.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Rp 14.498.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Rp 412.437.200,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Rp 4.091.682.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Rp 60.100.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Rp 1.387.558.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Rp 1.627.944.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Rp 437.120.000,00*	*Dinas Kesehatan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Rp 200.118.800,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Rp 1.739.450.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Rp 14.500.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Rp 804.905.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Rp 256.581.820,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Rp 14.575.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Rp 14.550.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Rp 62.140.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Rp 923.593.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Rp 1.547.024.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Rp 203.645.000,00*	*Dinas Kesehatan*
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Rp 101.362.600,00*	*Dinas Kesehatan*
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			***Rp 73.062.000,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Rp 73.062.000,00	-
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Rp 73.062.000,00*	*Dinas Kesehatan*
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			***Rp 564.325.000,00***	-
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Rp 162.756.000,00	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Rp 162.756.000,00*	*Dinas Kesehatan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Rp 248.973.000,00	-
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Rp 248.973.000,00*	*Dinas Kesehatan*
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Rp 152.596.000,00	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Rp 152.596.000,00*	*Dinas Kesehatan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**Rp 88.611.224.899,00**	**-**
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			***Rp 22.584.778.000,00***	-
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rp 22.584.778.000,00	-
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 17.034.778.000,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 5.550.000.000,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			***Rp 39.263.200,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 39.263.200,00	-
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Rp 39.263.200,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			***Rp 14.415.600.000,00***	-
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 14.415.600.000,00	-
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	*Rp 500.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Rp 10.100.000.000,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Rp 3.515.600.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Rp 300.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			***Rp 1.951.728.899,00***	-
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Rp 1.951.728.899,00	-
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Rp 1.951.728.899,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			***Rp 4.954.443.540,00***	-
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 4.255.993.540,00	-
				Normalisasi/Restorasi Sungai	*Rp 1.427.018.540,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	*Rp 1.528.975.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	*Rp 300.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Rehabilitasi Embung	*Rp 1.000.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 698.450.000,00	-
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Rp 600.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 98.450.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			***Rp 314.836.260,00***	-
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Rp 79.265.400,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Rp 27.120.200,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Rp 25.025.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Rp 27.120.200,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Rp 185.570.860,00	-
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*Rp 91.843.800,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Rp 93.727.060,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 50.000.000,00	-
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Rp 50.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			***Rp 43.868.505.000,00***	-
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rp 43.868.505.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pembangunan Jalan	*Rp 3.150.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pembangunan Jembatan	*Rp 6.100.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pemeliharaan Berkala Jalan	*Rp 9.840.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pemeliharaan Rutin Jalan	*Rp 9.250.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Rp 200.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	*Rp 600.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Rp 700.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Rehabilitasi Jalan	*Rp 6.928.505.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Rehabilitasi Jembatan	*Rp 500.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Rekonstruksi Jalan	*Rp 6.000.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Rp 600.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			***Rp 482.070.000,00***	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Rp 37.300.000,00	-
				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	*Rp 37.300.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Rp 79.420.000,00	-
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Rp 79.420.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Rp 50.000.000,00	-
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	*Rp 50.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Rp 315.350.000,00	-
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	*Rp 166.774.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	*Rp 72.000.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	*Rp 54.521.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	*Rp 22.055.000,00*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**Rp 12.365.913.200,00**	-
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			***Rp 191.308.800,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Rp 191.308.800,00	-
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Rp 191.308.800,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			***Rp 203.167.000,00***	-
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 167.533.400,00	-
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Rp 167.533.400,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 35.633.600,00	-
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Rp 8.827.600,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Rp 8.712.400,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	*Rp 9.154.000,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	*Rp 8.939.600,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			***Rp 11.425.000.000,00***	-
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Rp 11.425.000.000,00	-
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Rp 11.425.000.000,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			***Rp 546.437.400,00***	-
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Rp 546.437.400,00	-
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Rp 395.932.800,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Rp 150.504.600,00*	*Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**Rp 5.230.803.656,00**	**-**
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			***Rp 3.070.513.676,00***	-
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 109.186.500,00	-
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Rp 109.186.500,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Rp 240.368.300,00	-
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Rp 160.362.000,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Rp 80.006.300,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Rp 288.184.600,00	-
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Rp 128.187.200,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Rp 50.000.000,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Rp 109.997.400,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Rp 2.432.774.276,00	-
				Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	*Rp 30.000.000,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Rp 2.402.774.276,00*	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			***Rp 570.000.880,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 570.000.880,00	-
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 570.000.880,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			***Rp 1.590.289.100,00***	-
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Rp 59.781.000,00	-
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Rp 59.781.000,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 1.064.449.150,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Rp 210.140.000,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 268.031.800,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Rp 353.256.050,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Rp 108.013.600,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Rp 125.007.700,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Rp 466.058.950,00	-
				Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	*Rp 2.308.000,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	*Rp 60.486.900,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Rp 16.470.400,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Rp 202.231.700,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Rp 66.784.250,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Rp 7.890.000,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Rp 109.887.700,00*	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**Rp 731.716.950,00**	**-**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			***Rp 247.332.950,00***	-
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp 247.332.950,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	*Rp 78.108.800,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 142.320.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 26.904.150,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			***Rp 64.510.000,00***	-
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 6.250.000,00	-
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Rp 6.250.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Rp 58.260.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penyediaan Makanan	*Rp 46.375.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Penyediaan Sandang	*Rp 11.885.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			***Rp 245.284.500,00***	-
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Rp 52.876.500,00	-
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Rp 52.876.500,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 192.408.000,00	-
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Rp 4.500.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Rp 187.908.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			***Rp 174.589.500,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Rp 141.317.500,00	-
				Pemberian Layanan Kedaruratan	*Rp 43.200.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Rp 22.162.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Penyediaan Alat Bantu	*Rp 14.000.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Penyediaan Permakanan	*Rp 58.455.500,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Penyediaan Sandang	*Rp 3.500.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rp 33.272.000,00	-
				Penyediaan Permakanan	*Rp 33.272.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**Rp 485.398.100,00**	**-**
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			***Rp 190.398.100,00***	-
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Rp 190.398.100,00	-
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 29.999.900,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
						Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Rp 150.796.800,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 9.601.400,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			***Rp 295.000.000,00***	-
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Rp 295.000.000,00	-
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Rp 295.000.000,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*
Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**Rp 676.283.050,00**	**-**

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			***Rp 71.130.750,00***	-
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 16.482.000,00	-
				Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 16.482.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 54.648.750,00	-
				Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 54.648.750,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			***Rp 118.141.500,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 10.810.900,00	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	*Rp 10.810.900,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 20.983.600,00	-
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 20.983.600,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 86.347.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 86.347.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			***Rp 385.610.800,00***	-
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp 91.670.000,00	-
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 91.670.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 44.560.000,00	-
				Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	*Rp 44.560.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 249.380.800,00	-
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 100.180.800,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 2.700.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 13.500.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 90.000.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 39.500.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 3.500.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			***Rp 101.400.000,00***	-
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp 39.150.000,00	-
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 39.150.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 24.800.000,00	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 24.800.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 37.450.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 16.440.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	*Rp 810.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 1.500.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 18.000.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 700.000,00*	*Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**Rp 504.650.050,00**	**-**
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			***Rp 131.848.200,00***	-
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 82.000.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 82.000.000,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Rp 49.848.200,00	-
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Rp 49.848.200,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			***Rp 38.216.600,00***	-
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Rp 38.216.600,00	-
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 38.216.600,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			***Rp 334.585.250,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Rp 48.179.250,00	-
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Rp 48.179.250,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Rp 286.406.000,00	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Rp 61.738.400,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Rp 129.510.000,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Rp 53.697.600,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	*Rp 41.460.000,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
Penguatan pelestariat adat dan budaya daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis agamis dan kondusif	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**Rp 126.330.000,00**	**-**
		PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			***Rp 61.466.000,00***	-
			Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Rp 61.466.000,00	-
				Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 61.466.000,00*	*Sekretariat Daerah*
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			***Rp 64.864.000,00***	-
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 64.864.000,00	-
				Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 64.864.000,00*	*Sekretariat Daerah*
Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**Rp 6.205.018.220,00**	**-**

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			***Rp 63.460.000,00***	-
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Rp 63.460.000,00	-
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 63.460.000,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			***Rp 273.990.000,00***	-
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Rp 273.990.000,00	-
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Rp 273.990.000,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			***Rp 4.973.915.270,00***	-
			Pengelolaan Sampah		Rp 4.973.915.270,00	-
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di	*Rp 1.895.929.300,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		
				Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Rp 1.401.812.190,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Rp 1.676.173.780,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			***Rp 893.652.950,00***	-
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rp 893.652.950,00	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Rp 183.098.000,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*Rp 671.990.950,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	*Rp 38.564.000,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**Rp 576.055.560,00**	**-**
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			***Rp 576.055.560,00***	-
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Rp 576.055.560,00	-
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Rp 576.055.560,00*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**Rp 1.619.785.000,00**	**-**
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			***Rp 791.127.600,00***	-
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Rp 791.127.600,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Rp 791.127.600,00*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa*
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			***Rp 828.657.400,00***	-
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 828.657.400,00	-
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Rp 535.839.400,00*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Rp 292.818.000,00*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa*
Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**Rp 3.634.120.000,00**	**-**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			***Rp 2.039.400.000,00***	-
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Rp 2.039.400.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Rp 927.000.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Rp 1.112.400.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			***Rp 1.436.920.000,00***	-
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Rp 280.000.000,00	-
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Rp 40.000.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Rp 240.000.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Rp 150.000.000,00	-
				Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Rp 150.000.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Rp 108.750.000,00	-
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Rp 108.750.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Rp 898.170.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Rp 53.100.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Rp 845.070.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			***Rp 157.800.000,00***	-
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 157.800.000,00	-
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Rp 87.000.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Rp 70.800.000,00*	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**Rp 11.834.970.920,00**	**-**
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			***Rp 11.988.000,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Rp 11.988.000,00	-
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Rp 11.988.000,00*	*Dinas Perhubungan*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			***Rp 11.822.982.920,00***	-
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Rp 10.257.500,00	-
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Rp 10.257.500,00*	*Dinas Perhubungan*
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Rp 237.411.000,00	-
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Rp 8.260.000,00*	*Dinas Perhubungan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Rp 42.885.000,00*	*Dinas Perhubungan*
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Rp 186.266.000,00*	*Dinas Perhubungan*
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Rp 23.260.000,00	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 23.260.000,00*	*Dinas Perhubungan*
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Rp 10.605.250,00	-
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Rp 10.605.250,00*	*Dinas Perhubungan*
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp 193.999.750,00	-
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Rp 6.999.750,00*	*Dinas Perhubungan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Rp 172.000.000,00*	*Dinas Perhubungan*
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Rp 15.000.000,00*	*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 56.020.500,00	-
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Rp 7.056.000,00*	*Dinas Perhubungan*
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 48.964.500,00*	*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Rp 11.280.228.920,00	-
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Rp 9.443.588.920,00*	*Dinas Perhubungan*
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Rp 1.836.640.000,00*	*Dinas Perhubungan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Rp 11.200.000,00	-
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	*Rp 11.200.000,00*	*Dinas Perhubungan*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**Rp 4.950.045.000,00**	**-**
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			***Rp 1.929.272.000,00***	-
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 1.929.272.000,00	-
				Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	*Rp 475.272.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
				Penyediaan Akses Internet	*Rp 1.454.000.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			***Rp 3.020.773.000,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 3.020.773.000,00	-
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Rp 113.750.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
				Pelayanan Informasi Publik	*Rp 86.377.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Rp 155.560.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
				Penyusunan Konten	*Rp 161.131.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
				Relasi Media	*Rp 2.503.955.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**Rp 364.601.800,00**	**-**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			***Rp 82.410.000,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Rp 82.410.000,00	-
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Rp 82.410.000,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			***Rp 20.000.000,00***	-
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 20.000.000,00	-
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Rp 20.000.000,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			***Rp 42.191.800,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Rp 42.191.800,00	-
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 42.191.800,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			***Rp 220.000.000,00***	-
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Rp 220.000.000,00	-
				Pengembangan Usaha Mikro	*Rp 220.000.000,00*	*Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**Rp 603.947.750,00**	**-**

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			***Rp 144.392.000,00***	-
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 144.392.000,00	-
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Rp 144.392.000,00*	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			***Rp 104.040.000,00***	-
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 104.040.000,00	-
				Pengawasan Penanaman Modal	*Rp 104.040.000,00*	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			***Rp 355.515.750,00***	-
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 355.515.750,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 355.515.750,00*	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**Rp 3.099.996.000,00**	**-**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			***Rp 2.431.366.000,00***	-
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Rp 1.799.999.000,00	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Rp 1.650.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
				Seleksi Atlet Daerah	*Rp 149.999.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Rp 257.000.000,00	-
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Rp 57.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	*Rp 200.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 374.367.000,00	-
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 374.367.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			***Rp 168.630.000,00***	-
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 100.000.000,00	-
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Rp 100.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Rp 68.630.000,00	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Rp 68.630.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			***Rp 500.000.000,00***	-
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Rp 500.000.000,00	-
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Rp 500.000.000,00*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**Rp 40.791.000,00**	**-**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			***Rp 40.791.000,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp 40.791.000,00	-
				Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	*Rp 40.791.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**Rp 44.164.000,00**	**-**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			***Rp 44.164.000,00***	-
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 44.164.000,00	-
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Rp 44.164.000,00*	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
Penguatan pelestariat adat dan budaya daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis agamis dan kondusif	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**Rp 2.162.230.450,00**	**-**

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			***Rp 432.687.200,00***	-
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Rp 432.687.200,00	-
				Pelindungan Cagar Budaya	*Rp 72.000.000,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
				Pengembangan Cagar Budaya	*Rp 360.687.200,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			***Rp 1.317.515.250,00***	-
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 417.515.250,00	-
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Rp 417.515.250,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 900.000.000,00	-
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	*Rp 900.000.000,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			***Rp 412.028.000,00***	-
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 412.028.000,00	-
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Rp 412.028.000,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**Rp 175.467.400,00**	**-**
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			***Rp 20.176.000,00***	-
			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Rp 20.176.000,00	-
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	*Rp 20.176.000,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			***Rp 155.291.400,00***	-
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 106.522.400,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Rp 22.676.400,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Rp 58.582.000,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Rp 25.264.000,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 48.769.000,00	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Rp 20.000.000,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 28.769.000,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**Rp 51.560.050,00**	**-**
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			***Rp 51.560.050,00***	-
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Rp 24.207.600,00	-
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rp 24.207.600,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Rp 27.352.450,00	-
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 27.352.450,00*	*Dinas Perpustakaan dan Arsip*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**Rp 1.092.675.670,00**	**-**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			***Rp 532.645.470,00***	-
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Rp 532.645.470,00	-
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 532.645.470,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			***Rp 247.973.200,00***	-
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1		Rp 247.973.200,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Rp 247.973.200,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			***Rp 312.057.000,00***	-
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Rp 312.057.000,00	-
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 312.057.000,00*	*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**Rp 697.769.500,00**	**-**
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			***Rp 237.769.500,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Rp 237.769.500,00	-
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Rp 237.769.500,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			***Rp 460.000.000,00***	-
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Rp 460.000.000,00	-
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Rp 60.000.000,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Rp 300.000.000,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Rp 100.000.000,00*	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**Rp 4.239.479.500,00**	**-**

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			***Rp 72.595.000,00***	-
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Rp 72.595.000,00	-
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Rp 72.595.000,00*	*Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura*
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			***Rp 148.250.000,00***	-
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 24.000.000,00	-
				Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	*Rp 24.000.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Rp 124.250.000,00	-
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 124.250.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			***Rp 2.784.869.500,00***	-
			Pembangunan Prasarana Pertanian		Rp 2.223.250.000,00	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Rp 2.073.250.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Rp 150.000.000,00*	*Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura*
			Pengembangan Prasarana Pertanian		Rp 561.619.500,00	-
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Rp 361.619.500,00*	*Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura*
				Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	*Rp 200.000.000,00*	*Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			***Rp 1.104.795.000,00***	-
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Rp 20.750.000,00	-
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Rp 20.750.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Rp 1.084.045.000,00	-
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Rp 162.830.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Rp 838.325.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Rp 82.890.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			***Rp 110.570.000,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Rp 110.570.000,00	-
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Rp 110.570.000,00*	*Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura*
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			***Rp 18.400.000,00***	-
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 18.400.000,00	-
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	*Rp 18.400.000,00*	*Dinas Peternakan dan Perkebunan*
Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**Rp 392.456.400,00**	**-**
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			***Rp 392.456.400,00***	-
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		Rp 392.456.400,00	-
				Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	*Rp 392.456.400,00*	*Dinas Lingkungan Hidup*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**Rp 3.054.006.950,00**	**-**
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			***Rp 225.998.750,00***	-
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Rp 225.998.750,00	-
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Rp 225.998.750,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			***Rp 2.154.500.000,00***	-
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Rp 2.154.500.000,00	-
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Rp 2.154.500.000,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			***Rp 517.436.200,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 10.512.000,00	-
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Rp 10.512.000,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Rp 506.924.200,00	-
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Rp 491.847.000,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Rp 15.077.200,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			***Rp 156.072.000,00***	-
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Rp 156.072.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Rp 112.902.000,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Rp 43.170.000,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**Rp 1.087.488.900,00**	**-**
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			***Rp 1.087.488.900,00***	-
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Rp 1.087.488.900,00	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Rp 85.800.000,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Rp 1.001.688.900,00*	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**SEKRETARIAT DAERAH**				**Rp 18.225.900.182,00**	**-**
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			***Rp 17.256.876.082,00***	-
			Administrasi Tata Pemerintahan		Rp 393.027.200,00	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Rp 125.619.800,00*	*Sekretariat Daerah*
				Penataan Administrasi Pemerintahan	*Rp 120.945.400,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Rp 146.462.000,00*	*Sekretariat Daerah*
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Rp 627.555.000,00	-
				Fasilitasi Bantuan Hukum	*Rp 97.720.800,00*	*Sekretariat Daerah*
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Rp 477.388.200,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pendokumentasian Produk Hukum dan *Pengelolaan Informasi Hukum*	*Rp 52.446.000,00*	*Sekretariat Daerah*
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Rp 92.208.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Rp 92.208.000,00*	*Sekretariat Daerah*
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Rp 16.144.085.882,00	-
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Rp 14.399.085.882,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Rp 1.745.000.000,00*	*Sekretariat Daerah*
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			***Rp 969.024.100,00***	-
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Rp 109.287.000,00	-
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Rp 37.709.600,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Rp 18.293.200,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Rp 53.284.200,00*	*Sekretariat Daerah*
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Rp 207.774.800,00	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Rp 81.206.000,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Rp 110.400.800,00*	*Sekretariat Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Rp 16.168.000,00*	*Sekretariat Daerah*
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Rp 79.042.000,00	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Rp 40.366.000,00*	*Sekretariat Daerah*
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Rp 38.676.000,00*	*Sekretariat Daerah*
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Rp 572.920.300,00	-
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Rp 219.424.000,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Rp 237.360.000,00*	*Sekretariat Daerah*
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Rp 116.136.300,00*	*Sekretariat Daerah*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**SEKRETARIAT DPRD**				**Rp 22.996.530.000,00**	**-**
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			***Rp 22.996.530.000,00***	-
			Fasilitasi Tugas DPRD		Rp 11.001.869.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Rp 32.380.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Rp 29.744.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Rp 10.890.029.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Rp 49.716.000,00*	*Sekretariat DPRD*
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp 2.330.000,00	-
				Pengawasan Kode Etik DPRD	*Rp 2.330.000,00*	*Sekretariat DPRD*
			Pembahasan Kebijakan Anggaran		Rp 2.139.473.800,00	-
				Pembahasan APBD	*Rp 444.496.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pembahasan APBD Perubahan	*Rp 439.761.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pembahasan KUA dan PPAS	*Rp 474.151.800,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Rp 354.727.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Rp 426.338.000,00*	*Sekretariat DPRD*
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Rp 2.343.155.000,00	-
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan *Naskah Akademik*	*Rp 63.956.000,00*	*Sekretariat DPRD*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Rp 2.241.198.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Rp 34.186.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyusunan dan Pembahasan Program *Pembentukan Peraturan Daerah*	*Rp 3.815.000,00*	*Sekretariat DPRD*
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp 708.337.200,00	-
				Pembahasan Laporan Keterangan *Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Rp 637.304.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Rp 6.618.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Rp 16.832.400,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Rp 9.441.200,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Rp 8.428.400,00*	*Sekretariat DPRD*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Rp 9.648.400,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Rp 10.032.400,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	*Rp 10.032.400,00*	*Sekretariat DPRD*
			Peningkatan Kapasitas DPRD		Rp 3.446.283.400,00	-
				Orientasi DPRD	*Rp 32.846.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pendalaman Tugas DPRD	*Rp 1.901.599.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Rp 498.000.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Rp 312.000.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Rp 23.250.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyusunan Program Kerja DPRD	*Rp 4.982.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Rp 673.606.400,00*	*Sekretariat DPRD*
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Rp 3.355.081.600,00	-
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Rp 101.500.000,00*	*Sekretariat DPRD*
				Pelaksanaan Reses	*Rp 2.839.951.600,00*	*Sekretariat DPRD*
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Rp 22.525.000,00*	*Sekretariat DPRD*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	*Rp 391.105.000,00*	*Sekretariat DPRD*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**PERENCANAAN**				**Rp 1.436.330.600,00**	**-**
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			***Rp 1.061.091.700,00***	-
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Rp 249.595.600,00	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Rp 14.063.200,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Rp 59.793.600,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Rp 66.599.200,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Rp 25.493.800,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Rp 27.223.200,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Rp 14.123.200,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Rp 24.683.200,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Rp 17.616.200,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Rp 523.562.000,00	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Rp 17.480.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Rp 22.450.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Rp 373.562.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Rp 13.910.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Rp 27.310.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Rp 34.960.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Rp 16.180.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Rp 17.710.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Rp 287.934.100,00	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Rp 14.771.600,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Rp 10.612.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Rp 160.382.500,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Rp 30.715.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Rp 22.884.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Rp 20.068.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Rp 15.714.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Rp 12.787.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			***Rp 375.238.900,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 37.430.000,00	-
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Rp 13.610.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Rp 13.060.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 10.760.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 24.231.800,00	-
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Rp 7.320.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Rp 16.911.800,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Rp 313.577.100,00	-
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Rp 21.952.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Rp 34.456.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 153.508.600,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Rp 19.300.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Rp 76.560.500,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Rp 7.800.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**KEUANGAN**				**Rp 312.983.660.384,00**	**-**
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			***Rp 9.076.381.800,00***	-
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp 9.076.381.800,00	-
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Rp 10.716.800,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Rp 8.619.709.600,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Rp 11.762.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Pengamanan Barang Milik Daerah	*Rp 122.980.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Penilaian Barang Milik Daerah	*Rp 191.182.400,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Rp 14.671.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Rp 58.762.400,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Penyusunan Standar Harga	*Rp 32.926.800,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Rp 13.670.800,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			***Rp 301.413.291.384,00***	-
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Rp 331.670.100,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Rp 81.441.500,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Rp 50.538.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Rp 40.224.600,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Rp 82.548.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Rp 12.629.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	*Rp 25.673.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Rp 38.616.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Rp 299.967.400,00	-
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Rp 10.260.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Rp 93.952.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Rp 8.133.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Rp 7.965.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Rp 143.784.400,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Rp 14.187.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Rp 8.439.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Rp 13.247.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Rp 610.388.600,00	-
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Rp 71.996.200,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Rp 111.292.600,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Rp 197.951.600,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Rp 72.303.800,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Rp 10.897.200,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Rp 28.997.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Rp 72.433.800,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Rp 10.361.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Rp 8.591.400,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Rp 25.564.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Rp 33.053.000,00	-
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Rp 33.053.000,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp 300.138.212.284,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Rp 221.366.263.533,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Rp 17.093.367.416,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Rp 61.678.581.335,00*	*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			***Rp 2.493.987.200,00***	-
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Rp 2.493.987.200,00	-
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Rp 135.009.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Rp 180.000.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Rp 54.742.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Penagihan Pajak Daerah	*Rp 78.165.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Rp 51.173.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Rp 203.999.400,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Rp 51.000.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Rp 384.028.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Rp 270.000.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Rp 48.373.000,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Rp 168.899.600,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Rp 868.598.200,00*	*Badan Pendapatan Daerah*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**KEPEGAWAIAN**				**Rp 2.111.934.500,00**	**-**
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			***Rp 2.111.934.500,00***	-
			Mutasi dan Promosi ASN		Rp 595.369.300,00	-
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Rp 5.100.000,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
				Pengelolaan Promosi ASN	*Rp 590.269.300,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Rp 587.054.000,00	-
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Rp 61.560.000,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Rp 525.494.000,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
			Pengembangan Kompetensi ASN		Rp 727.442.800,00	-
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	*Rp 469.352.000,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	*Rp 59.608.000,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
				Pengelolaan Assessment Center	*Rp 86.808.800,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Rp 111.674.000,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp 202.068.400,00	-
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Rp 54.622.400,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pembinaan Disiplin ASN	*Rp 20.402.800,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Rp 86.071.000,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	*Rp 40.972.200,00*	*Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**Rp 392.080.000,00**	**-**
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			***Rp 392.080.000,00***	-
			Invensi dan Inovasi		Rp 81.959.000,00	-
				Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	*Rp 30.000.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	*Rp 51.959.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		Rp 310.121.000,00	-
				Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Rp 250.000.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Rp 50.121.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
				Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	*Rp 10.000.000,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**INSPEKTORAT DAERAH**				**Rp 2.926.889.700,00**	**-**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			***Rp 2.530.071.700,00***	-
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Rp 475.005.700,00	-
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Rp 475.005.700,00*	*INSPEKTORAT*
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Rp 2.055.066.000,00	-
				Kerja Sama Pengawasan Internal	*Rp 258.400.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Rp 278.250.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Pengawasan Desa	*Rp 664.875.000,00*	*INSPEKTORAT*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Rp 422.055.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Rp 103.770.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Reviu Laporan Keuangan	*Rp 196.546.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Reviu Laporan Kinerja	*Rp 131.170.000,00*	*INSPEKTORAT*
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			***Rp 396.818.000,00***	-
			Pendampingan dan Asistensi		Rp 396.818.000,00	-
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Rp 137.020.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Rp 109.436.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Rp 68.510.000,00*	*INSPEKTORAT*
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Rp 81.852.000,00*	*INSPEKTORAT*
Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis	**KECAMATAN**				**Rp 6.211.263.100,00**	**-**

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			***Rp 5.493.649.000,00***	-
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp 3.342.679.000,00	-
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Rp 1.243.772.000,00*	*Kecamatan Kepenuhan*
					Rp 200.000.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
					Rp 200.000.000,00	Kecamatan Rambah
					Rp 200.000.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
					Rp 200.000.000,00	Kecamatan Tambusai
					Rp 243.772.000,00	Kecamatan Ujung Batu
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Rp 2.037.489.600,00*	*Kecamatan Kepenuhan*
					Rp 271.726.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
					Rp 620.128.400,00	Kecamatan Rambah
					Rp 276.800.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
					Rp 131.001.400,00	Kecamatan Tambusai
					Rp 352.879.000,00	Kecamatan Ujung Batu
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Rp 61.417.400,00*	*Kecamatan Kepenuhan*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
					Rp 10.221.600,00	Kecamatan Kunto Darussalam
					Rp 6.678.000,00	Kecamatan Rambah
					Rp 8.860.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
					Rp 22.902.000,00	Kecamatan Tambusai
					Rp 6.722.600,00	Kecamatan Ujung Batu
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp 2.048.143.000,00	-
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Rp 2.048.143.000,00*	*Kecamatan Bangun Purba*
					Rp 162.727.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
					Rp 162.146.700,00	Kecamatan Kabun
					Rp 133.774.000,00	Kecamatan Kepenuhan
					Rp 173.889.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Rp 173.812.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
					Rp 156.630.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
					Rp 63.930.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
					Rp 135.695.000,00	Kecamatan Rambah
					Rp 36.857.000,00	Kecamatan Rambah Hilir

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
					Rp 153.228.800,00	Kecamatan Rokan IV Koto
					Rp 121.895.000,00	Kecamatan Tambusai
					Rp 95.477.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
					Rp 163.550.500,00	Kecamatan Tandun
					Rp 168.710.000,00	Kecamatan Ujung Batu
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Rp 102.827.000,00	-
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Rp 102.827.000,00*	*Kecamatan Rambah Samo*
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			***Rp 155.690.000,00***	-
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 155.690.000,00	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Rp 142.994.000,00*	*Kecamatan Bangun Purba*
					Rp 9.360.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
					Rp 15.600.000,00	Kecamatan Kabun

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
					Rp 12.480.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Rp 9.360.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
					Rp 12.400.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
					Rp 21.254.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
					Rp 11.700.000,00	Kecamatan Rambah Samo
					Rp 4.200.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
					Rp 18.000.000,00	Kecamatan Tambusai
					Rp 10.560.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
					Rp 12.480.000,00	Kecamatan Ujung Batu
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan *Peraturan Kepala Desa*	*Rp 12.696.000,00*	*Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			***Rp 433.171.300,00***	-
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp 433.171.300,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Rp 433.171.300,00*	*Kecamatan Bangun Purba*
					Rp 18.549.600,00	Kecamatan Bonai Darussalam
					Rp 21.269.000,00	Kecamatan Kabun
					Rp 38.977.800,00	Kecamatan Kepenuhan
					Rp 28.952.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Rp 13.403.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
					Rp 37.600.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
					Rp 41.075.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
					Rp 27.191.200,00	Kecamatan Rambah
					Rp 10.886.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
					Rp 33.701.200,00	Kecamatan Rambah Samo
					Rp 12.644.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
					Rp 30.199.600,00	Kecamatan Tambusai
					Rp 26.716.400,00	Kecamatan Tambusai Utara
					Rp 21.041.800,00	Kecamatan Tandun
					Rp 38.146.000,00	Kecamatan Ujung Batu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			***Rp 128.752.800,00***	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp 128.752.800,00	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Rp 128.752.800,00*	*Kecamatan Bangun Purba*
					Rp 7.430.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
					Rp 10.075.000,00	Kecamatan Kabun
					Rp 8.940.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Rp 7.458.800,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
					Rp 23.284.000,00	Kecamatan Rambah
					Rp 15.315.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
					Rp 6.300.000,00	Kecamatan Rambah Samo
					Rp 19.950.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
					Rp 11.500.000,00	Kecamatan Tambusai
					Rp 7.780.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
Penguatan pelestariat adat dan budaya daerah serta peningkatan	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**Rp 7.128.379.500,00**	**-**

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis agamis dan kondusif						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			***Rp 169.002.000,00***	-
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Rp 169.002.000,00	-
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Rp 169.002.000,00*	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			***Rp 40.000.000,00***	-
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Rp 40.000.000,00	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Rp 40.000.000,00*	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			***Rp 877.047.000,00***	-
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rp 877.047.000,00	-
				Pembentukan Paskibraka	*Rp 756.454.000,00*	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Rp 120.593.000,00*	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			***Rp 2.901.431.500,00***	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Rp 2.901.431.500,00	-
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Rp 2.897.229.500,00*	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Rp 2.452.000,00*	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Rp 1.750.000,00*	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			***Rp 3.140.899.000,00***	-
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Rp 3.140.899.000,00	-
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Rp 3.140.899.000,00*	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
Grand Total					**Rp 863.024.533.960,00**	

4.3 Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Strategi yang ingin dilaksanakan pada tahun 2026 adalah dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan organisasi masyarakat, pemeliharaan masyarakat kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, penanganan konflik, serta pengembangan wawasan kebangsaan. Kemudian arah kebijakan yang direncanakan adalah pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, arah kebijakan selanjutnya mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keamanan dalam kerukunan umat beragama serta pelaksanaan kegiatan tentang nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang tertuang didalam bab ini memberikan gambaran dan penjelasan tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya penganggaran harus didasarkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang efektif dan efesien karena perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat dicapai. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk masyarakat dan pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi money follow program prioritas dengan kata lain tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas Perangkat Daerah dan lintas kewilayahan. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam menyusun RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yaitu:

1. Holistik–Tematik: pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama, dimana pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2. Integratif: pendekatan yang menyatukan berbagai aspek kedalam satu proses yang mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu Perangkat Daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas;

3. Spasial: pendekatan yang digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah untuk diintegrasikan dan diselaraskan dengan usulan yang diajukan.

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Jadi, perencanaan pembangunan dengan tiga pendekatan diatas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diyakini mampu memacu kerjasama yang kuat antar Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan pendekatan holistik-tematik dan integratif mensyaratkan Perangkat Daerah bersinergi dan berbagai peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas.

Selanjutnya, strategi penyusunan program yang berbasis pada norma pembangunan yang terdiri dari: (1) pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait, (2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah, (3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, (4) pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem dan (5) pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan bagi masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026. Upaya pemulihan ekonomi Pasca Pandemi masih terus dilakukan, penekanan pendanaan juga diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan kemiskinan, penanganan stunting, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan

berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang, Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah, Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis dan Kondusif, Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial dan Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis.

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
20. Dinas Peternakan dan Perkebunan
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Pendapatan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
28. Inspektorat Daerah
29. Kecamatan Rambah
30. Kecamatan Tambusai
31. Kecamatan Rokan IV Koto
32. Kecamatan Kepenuhan
33. Kecamatan Kunto Darussalam
34. Kecamatan Ujung Batu
35. Kecamatan Kabun
36. Kecamatan Tandun
37. Kecamatan Rambah Samo
38. Kecamatan Rambah Hilir
39. Kecamatan Bangun Purba
40. Kecamatan Tambusai Utara
41. Kecamatan Bonai Darussalam
42. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
43. Kecamatan Kepenuhan Hulu
44. Kecamatan Pendalian IV Koto
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Rokan Hulu

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2026	PERSENTASE (%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	684.886.506.994,00	34,51
2	Dinas Kesehatan	424.262.279.035,00	21,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.494.846.634,00	3,50
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	76.391.927.682,00	3,85
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.397.140.186,00	1,08
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.089.934.423,00	0,46
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.174.130.607,00	0,26
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.708.385.923,00	0,29
9	Dinas Lingkungan Hidup	14.207.895.857,00	0,72
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.711.672.821,00	0,59
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9.019.850.919,00	0,45
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.548.126.927,00	0,43
13	Dinas Perhubungan	18.448.969.537,00	0,93
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.336.681.137,00	0,47
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.282.299.414,00	0,22
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.019.691.713,00	0,35
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.924.666.266,00	0,35
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.170.134.383,00	0,21
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	12.473.893.944,00	0,63
20	Dinas Peternakan dan Perkebunan	11.356.317.381,00	0,57
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.634.897.725,00	0,44
22	Sekretariat Daerah	59.660.870.839,00	3,01
23	Sekretariat DPRD	55.481.633.862,00	2,80
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.397.565.750,00	0,47
25	Badan Pendapatan Daerah	19.118.014.677,00	0,96
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	346.329.066.933,00	17,45
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.807.553.753,00	0,39
28	INSPEKTORAT	12.877.206.295,00	0,65
29	Kecamatan Rambah	3.858.642.488,00	0,19
30	Kecamatan Tambusai	3.516.227.083,00	0,18
31	Kecamatan Rokan IV Koto	3.331.809.973,00	0,17
32	Kecamatan Kepenuhan	3.852.489.346,00	0,19
33	Kecamatan Kunto Darussalam	3.463.210.965,00	0,17
34	Kecamatan Ujung Batu	4.826.722.611,00	0,24
35	Kecamatan Kabun	2.408.877.873,00	0,12
36	Kecamatan Tandun	1.899.670.299,00	0,10
37	Kecamatan Rambah Samo	1.930.757.557,00	0,10
38	Kecamatan Rambah Hilir	1.972.495.801,00	0,10
39	Kecamatan Bangun Purba	1.434.847.015,00	0,07
40	Kecamatan Tambusai Utara	2.044.568.030,00	0,10
41	Kecamatan Bonai Darussalam	1.401.416.083,00	0,07
42	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.645.380.990,00	0,08
43	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1.957.463.626,00	0,10
44	Kecamatan Pendalian IV Koto	1.978.096.188,00	0,10
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.806.883.964,00	0,49
Grand Total		**1.984.541.721.509,00**	**100,00**

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program dan kegiatan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah, Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029, Adapun program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 5.2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KAB. ROKAN HULU TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						**684.886.506.994,00**							**418.265.510.148,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**681.786.510.994,00**							**408.739.835.148,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**681.786.510.994,00**							**408.739.835.148,00**	
1,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**558.926.113.744,00**						**-**	**402.413.214.648,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.527.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	24.527.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**558.926.113.744,00**	-	-	-	-	-	-	**402.413.214.648,00**	-
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	550.497.376.604,00			-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-	-	402.223.214.648,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4860 Orang/bulan	550.497.376.604,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU, DAK NON FISIK-TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T AMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK NON FISIK-TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T UNJANGAN KHUSUS GURU	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		402.223.214.648,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.037.061.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				70 Paket	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	435.781.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3500 Paket	84.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				62001 Paket	159.278.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				500 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				592 Laporan	350.001.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.837.138.390,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	373.338.390,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				306 Laporan	6.460.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	530.010.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.004.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	40.006.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		-	-	-	-	-	-	**558.926.113.744,00**	-	-	-	-	-	-	**402.413.214.648,00**	-
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**122.860.397.250,00**						**-**	**6.326.620.500,00**	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SD**	**100 38.25**	**0 153.74**	**100 36.04**	**100 36.48**	**122.860.397.250,00**	-	-	-	-	-	-	**6.326.620.500,00**	-
			Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi	**58.11 62.42**	**34.28 48.83**	**54.70 54.87**	**56.38 56.70**									
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	-			100 Persen	67.964.629.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat	-	1.183.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				11 Unit	1.645.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	214.338.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				720 Orang	951.190.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				100 Satuan Pendidikan	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				372 Satuan Pendidikan	62.464.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				7 Orang	61.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	89.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	72.543.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	1.530.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	83.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	600.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	43.435.158.500,00			-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-	-	4.699.054.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	635.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				337 Peserta Didik	5.510.001.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				160 Orang	67.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				100 Satuan Pendidikan	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				165 Satuan Pendidikan	30.559.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				5 Orang	41.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				100 Orang	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		75.914.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	940.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				7100 Paket	2.840.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		4.040.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	2.154.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	8.852.912.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	367.798.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	261.745.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1267 Orang	220.939.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				479 Satuan Pendidikan	8.151.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				5 Orang	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				100 Orang	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				100 Konten Digital	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				100 0		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		214.542.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	2.607.696.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				21 Satuan Pendidikan	2.565.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	8.769.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	33.027.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		76.628.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.099.996.000,00**							**9.525.675.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**3.099.996.000,00**							**9.525.675.000,00**	
1,	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**168.630.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	**168.630.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	68.630.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				150 Orang	68.630.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**2.431.366.000,00**						**-**	**7.825.675.000,00**	
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga]	**Persentase Cabang Olahraga yang Diikuti**	**100**	**80**	**100**	**100**	**2.431.366.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.825.675.000,00**	-
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	374.367.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	374.367.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.799.999.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	5.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	149.999.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				1500 Orang	1.650.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	257.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	675.675.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	57.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		475.675.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3,	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**500.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	**Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan**	**99**	**90**	**90**	**93**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**700.000.000,00**	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur	-	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Aparatur		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN						**338.735.723.619,00**							**173.880.140.346,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**338.735.723.619,00**							**173.880.140.346,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**338.735.723.619,00**							**173.880.140.346,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**127.643.504.850,00**						**-**	**133.461.070.347,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**127.643.504.850,00**	-	-	-	-	-	-	**133.461.070.347,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.423.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.423.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	123.088.220.465,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	124.994.808.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1.508 Orang/bulan	123.085.220.465,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		124.986.558.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-			100 Persen	343.086.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	582.221.035,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		6.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	23.909.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		82.302.385,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	29.971.650,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		99.385.550,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		112.882.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	245.706.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		281.325.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	4.066.660.685,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	7.337.616.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9 Laporan	1.169.980.685,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.893.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		6.004.416.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	140.113.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	535.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.115.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		33.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	99.998.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		501.875.000,00	DINAS KESEHATAN
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**209.627.628.769,00**						**-**	**40.234.092.547,00**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	**Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (treatment Success Rate)**	**100 62.50**	**100 58.28**	**100 50.00**	**100 52.50**	**209.627.628.769,00**	-	-	-	-	-	-	**40.234.092.547,00**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota*	-			100 Persen	155.925.718.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	6.830.957.397,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	504.718.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1.800.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	149.826.853.149,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN, PINJAMAN DAERAH DARI LKBB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3.560.478.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		4.355.957.397,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen Paket	233.668.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persentase	53.701.910.620,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	33.403.135.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14,633 Orang	1.387.558.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		39.194.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13,800 Orang	60.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		37.697.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13,116 Orang	412.437.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		38.095.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77,245 Orang	14.498.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		37.092.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79,289 Orang	804.905.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		105.017.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395,302 Orang	256.581.820,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		33.792.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40,464 Orang	14.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		28.193.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				118,527 Orang	14.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		30.442.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5,229 Orang	14.575.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		42.099.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				946 Orang	437.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		38.764.220,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14,994 Orang	1.739.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		27.742.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20,234 Orang	200.118.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		37.081.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	19.110.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		6.732.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	4.091.682.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		29.392.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1.627.944.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		22.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	923.593.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		61.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	1.547.024.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	2.196.228.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		35.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				8 Dokumen	33.343.127.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		31.811.613.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan				24 Paket	699.190.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		20.042.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	3.467.564.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	62.906.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		72.402.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	101.362.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		503.052.220,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	62.140.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		35.937.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	203.645.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		33.467.500,00	DINAS KESEHATAN
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**73.062.000,00**						-	**27.962.660,00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**	**100**	**78**	**85**	**90**	**73.062.000,00**	-	-	-	-	-	-	**27.962.660,00**	-
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	73.062.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	27.962.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	73.062.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		27.962.660,00	DINAS KESEHATAN
4,	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**564.325.000,00**						-	**103.972.440,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman]	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman**	**100**	**25**	**100**	**100**	**564.325.000,00**	-	-	-	-	-	-	**103.972.440,00**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	-			5 Dokumen	162.756.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	29.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				5 Dokumen	162.756.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		29.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	-			1 Dokumen	152.596.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	33.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				7 Dokumen	152.596.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		33.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah*	-			40 Unit	248.973.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	40.997.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				40 Unit	248.973.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		40.997.440,00	DINAS KESEHATAN
5,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**827.203.000,00**						-	**53.042.352,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat yang diberdayakan Bidang Kesehatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**827.203.000,00**	-	-	-	-	-	-	**53.042.352,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	-			12 Dokumen	827.203.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	53.042.352,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	827.203.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		53.042.352,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD KABUPATEN ROKAN HULU						**50.000.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**50.000.000.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**50.000.000.000,00**						-	**0,00**	
		-	-	-	-	-	-	**50.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	50.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	RSUD KABUPATEN ROKAN HULU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	50.000.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	RSUD KABUPATEN ROKAN HULU
		PUSKESMAS BANGUN PURBA						**1.432.317.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.432.317.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.432.317.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.432.317.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.432.317.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS BANGUN PURBA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.432.317.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BANGUN PURBA
		PUSKESMAS BONAI DARUSSALAM						**1.333.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.333.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.333.000.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.333.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.333.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS BONAI DARUSSALAM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.333.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BONAI DARUSSALAM
		PUSKESMAS KABUN						**876.820.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**876.820.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**876.820.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**876.820.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	876.820.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS KABUN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	876.820.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KABUN
		PUSKESMAS KEPENUHAN						**2.455.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.455.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.455.000.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.455.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	2.455.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS KEPENUHAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.455.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KEPENUHAN
		PUSKESMAS KEPENUHAN HULU						**933.493.963,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**933.493.963,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**933.493.963,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**933.493.963,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	933.493.963,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS KEPENUHAN HULU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	933.493.963,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KEPENUHAN HULU
		PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM						**2.112.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.112.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.112.000.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.112.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	2.112.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.112.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM
		PUSKESMAS PAGARAN TAPAH						**619.762.236,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**619.762.236,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**619.762.236,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**619.762.236,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	619.762.236,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS PAGARAN TAPAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	619.762.236,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PAGARAN TAPAH
		PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO						**914.004.478,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**914.004.478,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**914.004.478,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**914.004.478,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	914.004.478,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	914.004.478,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO
		PUSKESMAS RAMBAH						**3.078.638.200,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.078.638.200,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.078.638.200,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.078.638.200,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	3.078.638.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS RAMBAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.078.638.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS RAMBAH
		PUSKESMAS RAMBAH HILIR I						**1.773.651.508,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.773.651.508,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.773.651.508,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.773.651.508,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.773.651.508,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS RAMBAH HILIR I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.773.651.508,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS RAMBAH HILIR I
		PUSKESMAS RAMBAH HILIR II						**1.543.043.685,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.543.043.685,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.543.043.685,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.543.043.685,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.543.043.685,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS RAMBAH HILIR II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.543.043.685,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS RAMBAH HILIR II
		PUSKESMAS RAMBAH SAMO I						**1.700.611.716,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.700.611.716,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.700.611.716,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.700.611.716,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.700.611.716,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS RAMBAH SAMO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.700.611.716,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS RAMBAH SAMO I
		PUSKESMAS RAMBAH SAMO II						**1.586.600.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.586.600.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.586.600.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.586.600.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.586.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS RAMBAH SAMO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.586.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS RAMBAH SAMO II
		PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I						**1.546.267.536,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.546.267.536,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.546.267.536,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.546.267.536,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.546.267.536,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.546.267.536,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I
		PUSKESMAS ROKAN IV KOTO II						**518.088.290,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**518.088.290,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**518.088.290,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**518.088.290,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	518.088.290,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS ROKAN IV KOTO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	518.088.290,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS ROKAN IV KOTO II
		PUSKESMAS TAMBUSAI						**3.001.941.120,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.001.941.120,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.001.941.120,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.001.941.120,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	3.001.941.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.001.941.120,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI
		PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA I						**2.383.700.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.383.700.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.383.700.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.383.700.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	2.383.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.383.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA I
		PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II						**1.734.274.784,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.734.274.784,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.734.274.784,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.734.274.784,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	1.734.274.784,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.734.274.784,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II
		PUSKESMAS TANDUN I						**957.576.900,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**957.576.900,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**957.576.900,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**957.576.900,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	957.576.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS TANDUN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	957.576.900,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TANDUN I
		PUSKESMAS TANDUN II						**902.700.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**902.700.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**902.700.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**902.700.000,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	902.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS TANDUN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	902.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TANDUN II
		PUSKESMAS UJUNG BATU						**3.157.964.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.157.964.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.157.964.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.157.964.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	3.157.964.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS UJUNG BATU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.157.964.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS UJUNG BATU
		PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM II						**498.100.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**498.100.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**498.100.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**498.100.000,00**						-	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	498.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	498.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM II
		PUSKESMAS TAMBUSAI II						**467.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**467.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**467.000.000,00**							**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**467.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	467.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	467.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TAMBUSAI II
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**69.494.846.634,00**							**105.266.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69.494.846.634,00**							**105.266.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**69.494.846.634,00**							**105.266.000.000,00**	
1,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.559.391.834,00**						-	**18.057.500.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**74.00**	**71.90**	**72.25**	**72.60**	**15.559.391.834,00**	-	-	-	-	-	-	**18.057.500.000,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi perencanaan, penganggaran, laporan dan evaluasi yang disusun tepat waktu*	-			2 Dokumen	11.105.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah	-	20.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.840.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen Laporan		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen Laporan	3.426.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Pemerintah		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu*	-			1 Dokumen	8.321.537.584,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah	-	9.022.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/bulan	8.317.473.584,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.032.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Dokumen Laporan	2.032.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Pemerintah	-	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Pemerintah		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen layanan penyediaan barang persediaan, peralatan dan perlengkapan kantor*	-			1 Dokumen	1.196.159.650,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah	-	1.606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.024.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.040.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	783.993.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		1.008.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Buah Paket	33.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1200 Exemplar Dokumen	5.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Pemerintah		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				581 Laporan	278.201.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Baru yang Diadakan*	-			4 Unit	45.075.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Pemerintah	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit Unit	45.075.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Pemerintah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran*	-			1 Dokumen	3.167.406.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	-	Aparatur Pemerintah	-	4.279.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Eksemplar Laporan	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	-	Aparatur Pemerintah		14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				139200 KWh- 300 M3 Laporan	240.206.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		265.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.917.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			1 Dokumen	2.798.107.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah	-	3.055.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54.820.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	2.743.287.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Pemerintah		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**4.954.443.540,00**						-	**5.430.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	**Persentase luas layanan irigasi**	**24.44**	**24.44**	**24.44**	**24.44**	**4.954.443.540,00**	-	-	-	-	-	-	**5.430.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Panjang Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Daerah Kabupaten Yang Meningkat*	-			14,5 KM	4.255.993.540,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	4.620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				14,5 KM	1.427.018.540,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,198 KM	1.528.975.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Panjang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Kabupaten Yang Dilaksanakan*	-			4 KM	698.450.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Petani Pemakai Air	-	810.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	600.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Petani Pemakai Air		660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				1 Lembaga	98.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Petani Pemakai Air		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**4.315.600.000,00**						**-**	**4.625.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan]	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.315.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.625.000.000,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Daerah Kabupaten yang Terlaksana*	-			1854,75 Meter	4.315.600.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	4.625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1854,75 Sistem Drainase Perkotaan	3.515.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		3.855.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				0 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	-	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**43.868.505.000,00**						**-**	**75.828.500.000,00**	
		[Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Tingkat Kemantapan jalan**	**27.34**	**24.02**	**24.84**	**25.34**	**43.868.505.000,00**	-	-	-	-	-	-	**75.828.500.000,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Dikelola*	-			707,195 KM	43.868.505.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	75.828.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				7 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				500 KM	600.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				151,875 KM	9.250.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		10.976.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				25 KM	3.150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				24,28 KM	6.928.505.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		7.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				4 KM	9.840.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		10.625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				40 Meter	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2 KM	6.000.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		33.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				6 Dokumen KM	600.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				2 Jembatan	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				18 Unit Meter	6.100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		7.137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5,	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**314.836.260,00**						-	**590.000.000,00**	
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	**Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil**	**72.29**	**34.79**	**35.88**	**47.29**	**314.836.260,00**	-	-	-	-	-	-	**590.000.000,00**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih dan difasilitasi Sertifikasi*	-			100 Orang	185.570.860,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	91.843.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	93.727.060,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang Tersedia*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Kabupaten yang Ditingkatkan*	-			3 Dokumen	79.265.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				10 Paket Pekerjaan	25.025.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				2 Bangunan Konstruksi	27.120.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				10 Badan Usaha	27.120.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**482.070.000,00**						**-**	**735.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	**Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERKADA** **Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten**	**2** **Ada**	**5** **Ada**	**4.5** **Ada**	**4** **Ada**	**482.070.000,00**	-	-	-	-	-	-	**735.000.000,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana*	-			24 Dokumen	315.350.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	54.521.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	166.774.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	22.055.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana*	-			24 Dokumen	37.300.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				24 Dokumen	37.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana*	-			1 Dokumen	79.420.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	79.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						**76.391.927.682,00**							**37.820.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**76.391.927.682,00**							**37.820.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**34.675.770.099,00**							**12.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**1.951.728.899,00**						-	**2.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Jumlah rumah tangga yang terlayani program penyediaan air minum**	**17195**	16695	**16695**	**16795**	**1.951.728.899,00**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan*	-			671 SR	1.951.728.899,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				16 Unit	1.951.728.899,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**39.263.200,00**						-	**700.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	**4.39**	**1.39**	**1.89**	**2.39**	**39.263.200,00**	-	-	-	-	-	-	**700.000.000,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani*	-			50 SR	39.263.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	39.263.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**10.100.000.000,00**						-	**1.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya Drainase Lingkungan Dalam Kondisi Baik]	**Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik**	**55.14**	**35.62**	**38.88**	**42.13**	**10.100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.500.000.000,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang drainase lingkungan yang dikelola dan dikembangkan*	-			30000 Meter	10.100.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				12900 M	10.100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**22.584.778.000,00**						-	**8.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**	**99.17**	**86.52**	**88.51**	**90.55**	**22.584.778.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000.000,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	-			5 Unit	22.584.778.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	8.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				8 Bangunan Gedung	5.550.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				14 Dokumen	17.034.778.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**41.716.157.583,00**							**25.620.000.000,00**	
1,	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**29.350.244.383,00**						-	**9.400.000.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**29.350.244.383,00**	-	-	-	-	-	-	**9.400.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	11.258.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.679.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.579.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	20.008.212.241,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	4.629.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				826 Orang/bulan	20.002.812.441,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		4.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.699.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	757.754.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	4.759.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	108.155.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	118.912.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		4.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.498.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				527 Laporan	498.188.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	130.144.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	115.144.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	7.571.093.442,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				866 Laporan	5.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3.093.793.442,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				409 Laporan	4.471.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	871.781.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	24.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	846.941.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2,	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**203.167.000,00**						**-**	**330.000.000,00**	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	**Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**100**	**100**	**100**	**100**	**203.167.000,00**	-	-	-	-	-	-	**330.000.000,00**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi progam pemerintah yang didata*	-			6 Unit	35.633.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi progam pemerintah*	-			7 Unit	167.533.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	167.533.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3,	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**191.308.800,00**						**-**	**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	**Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**2**	**10**	**1**	**2**	**191.308.800,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan*	-			1 Ha	191.308.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Unit	191.308.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4,	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**546.437.400,00**						-	**820.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni]	**pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh**	**35**	**24**	**33**	**35**	**546.437.400,00**	-	-	-	-	-	-	**820.000.000,00**	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan diluar pemukiman kumuh*	-			33 Persen	546.437.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	820.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	150.504.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				5 Unit	395.932.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		470.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5,	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**11.425.000.000,00**						-	**15.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	**Persentase lokasi perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang ditangani**	**75.17**	**71.03**	**71.72**	**72.41**	**11.425.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15.000.000.000,00**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun*	-			300 Kegiatan	11.425.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik	-	15.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				300 Lokasi	11.425.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur dan Publik		15.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**21.397.140.186,00**							**23.788.904.789,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.397.140.186,00**							**23.788.904.789,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**21.397.140.186,00**							**23.788.904.789,00**	
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.236.850.206,00**						**-**	**21.922.118.539,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**19.236.850.206,00**	-	-	-	-	-	-	**21.922.118.539,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	26.899.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	25.786.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.230.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	17.911.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		19.530.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.758.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		4.755.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	14.016.553.346,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	16.067.206.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3808 Orang/bulan	14.015.124.546,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		16.065.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.428.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.206.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	21.110.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.576.359,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	11.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	9.860.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.576.359,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	729.514.950,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.055.549.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.497.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		5.771.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.996.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	29.995.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		30.386.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	37.696.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		27.950.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				131 Laporan	634.330.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		991.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	4.297.013.880,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	4.430.188.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				880 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		6.399.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	83.213.880,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		68.184.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2448 Laporan	4.210.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		4.355.604.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	145.758.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	341.811.180,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.228.640,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	100.530.190,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		341.811.180,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.590.289.100,00**						-	**1.387.386.250,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum]	**Persentase Penyelenggaran tibumtranmas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.590.289.100,00**	-	-	-	-	-	-	**1.387.386.250,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	-			100 Persen	1.064.449.150,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	1.001.600.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	268.031.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		282.602.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	210.140.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		202.785.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				56 laporan	353.256.050,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		232.376.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	125.007.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		151.237.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Unit	108.013.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		132.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati*	-			100 Persen	466.058.950,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik	-	385.785.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				450 laporan	16.470.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik		17.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				60 Laporan	7.890.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik		8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				5 laporan	2.308.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				450 Dokumen	60.486.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik		74.307.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				16 Laporan	109.887.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik		112.085.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				80 Laporan	202.231.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik		132.860.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				38 Laporan	66.784.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Publik		38.432.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	**1.590.289.100,00**	-	-	-	-	-	-	**1.387.386.250,00**	-
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembinaan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten*	-			2 Orang	59.781.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	59.781.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3,	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**570.000.880,00**						-	**479.400.000,00**	
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**68.89 88.46**	**53.19 84.62**	**57.78 84.62**	**60.00 86.36**	**570.000.880,00**	-	-	-	-	-	-	**479.400.000,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten*	-			100 Persen	570.000.880,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Memperkuat peningkatan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	-	479.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota				30 Laporan	570.000.880,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Memperkuat peningkatan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran		479.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**9.089.934.423,00**							**11.278.436.939,85**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.089.934.423,00**							**11.278.436.939,85**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**9.089.934.423,00**							**11.278.436.939,85**	
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.019.420.747,00**						**-**	**7728322729.85**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.019.420.747,00**	-	-	-	-	-	-	**7.728.322.729,85**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 dokumen	2.260.624,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Kab. Rokan Hulu	-	2.260.624,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.260.624,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Kab. Rokan Hulu		2.260.624,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	5.254.875.847,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Kab.Rokan Hulu	-	6.014.315.846,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	5.254.875.847,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Kab.Rokan Hulu		6.014.315.846,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 persen	175.319.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu	-	461.011.588,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.157.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		9.225.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.462.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		32.779.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	16.882.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		16.389.513,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15.072.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		31.140.075,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				245 Laporan	119.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		371.478.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	97.225.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu	-	98.225.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	97.225.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		98.225.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 persen	247.100.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu	-	798.190.568,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				510 Laporan	5.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		6.863.968,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	88.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		109.140.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	152.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		682.186.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 persen	242.639.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu	-	354.318.403,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		42.137.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	200.399.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Aparatur Kab.Rokan Hulu		312.181.203,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**3.070.513.676,00**						**-**	**3.550.114.210,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	**Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana** **Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** **Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.070.513.676,00**	-	-	-	-	-	-	**3.550.114.210,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*	-			100 persen	109.186.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu	-	210.202.010,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	109.186.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		210.202.010,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	-			100 persen	240.368.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu	-	338.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				400 Orang	160.362.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		255.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				16 Kawasan	80.006.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		83.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	-			100 persen	288.184.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu	-	293.187.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	109.997.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	128.187.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		128.187.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			100 persen	2.432.774.276,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu	-	2.708.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	2.402.774.276,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		2.677.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik Kabupaten Rokan Hulu		31.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.174.130.607,00**							**9.313.900.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.497.847.557,00**							**7.622.900.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.497.847.557,00**							**7.622.900.000,00**	
1,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.766.130.607,00**						-	**4.040.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.766.130.607,00**	-	-	-	-	-	-	**4.040.400.000,00**	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.965.006.334,00			-	-	Aparatur	-	3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.965.006.334,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	322.463.440,00			-	-	Aparatur	-	567.900.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.490.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		9.900.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	23.996.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		40.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	29.995.640,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		73.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1529 Laporan	224.981.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		395.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	387.598.833,00			-	-	Aparatur	-	159.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		5.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	65.998.833,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		90.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				59 Laporan	318.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		64.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	91.062.000,00			-	-	Aparatur	-	313.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.664.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		43.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	51.397.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		270.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**247.332.950,00**						**-**	**420.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	**Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial**	**11 92**	**0 75**	**5 78**	**5 81**	**247.332.950,00**	-	-	-	-	-	-	**420.000.000,00**	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	247.332.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik	-	420.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan														
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial				17 Orang	78.108.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		120.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi				1 Lembaga	142.320.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		150.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				16 Orang	26.904.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		150.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**174.589.500,00**						-	**982.500.000,00**	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	**Persentase Anak Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)** **Persentase Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)** **Persentase Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)** **Persentase Tuna Sosial Terlantar (Terutama Gelandangan dan Pengemis) Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)**	**100** **98**	**100** **97.49**	**100** **97.50**	**100** **97.60**	**174.589.500,00**	-	-	-	-	-	-	**982.500.000,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	-			100 Persen	141.317.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik	-	482.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				112 Orang	58.455.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		167.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		20.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	14.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		26.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	22.162.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		209.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	43.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*	-			100 Persen	33.272.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	33.272.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumber daya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikandan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		500.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**245.284.500,00**						**-**	**880.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	**persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan**	**20 22 92**	**0 76**	**10 12 78**	**12 14 81**	**245.284.500,00**	-	-	-	-	-	-	**880.000.000,00**	-
			Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial													
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi													
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar*	-			100 Persen	52.876.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				64 Orang	52.876.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		150.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	192.408.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik	-	730.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		125.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	187.908.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		605.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**64.510.000,00**						-	**1.300.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**64.510.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.300.000.000,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	58.260.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik	-	1.105.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	46.375.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		755.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	11.885.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		350.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	6.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik	-	195.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	6.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		195.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**676.283.050,00**							**1.691.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**676.283.050,00**							**1.691.000.000,00**	
1,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**118.141.500,00**						-	**674.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	**118.141.500,00**	-	-	-	-	-	-	**674.000.000,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	10.810.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	312.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.810.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		312.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD** **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**15** **47.40**	**0** **11.45**	**12.5** **45.70**	**13** **46.04**	**118.141.500,00**	-	-	-	-	-	-	**674.000.000,00**	-
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	20.983.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Publik	-	105.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				56 orang	20.983.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Publik		105.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	86.347.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	257.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				12 Lembaga	86.347.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		257.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**101.400.000,00**						**-**	**307.000.000,00**	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**14:137**	**0:0**	**19.58:19.28**	**18.07:17.77**	**101.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**307.000.000,00**	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota*	-			100 Persen	39.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	120.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				5 Lembaga	39.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		120.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	37.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	157.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	18.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				2 Orang	700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				3 orang	810.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	16.440.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		77.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		80.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	24.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				50 orang	24.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		30.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**71.130.750,00**						**-**	**280.000.000,00**	
		[Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**70**	**0**	**55**	**58**	**71.130.750,00**	-	-	-	-	-	-	**280.000.000,00**	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	16.482.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	175.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Lembaga	16.482.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		175.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	54.648.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	105.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				80 Lembaga	54.648.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		105.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**385.610.800,00**						**-**	**430.000.000,00**	
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak]	**Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**385.610.800,00**	-	-	-	-	-	-	**430.000.000,00**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	91.670.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	115.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				10 Kegiatan	91.670.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		115.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	249.380.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	245.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				52 Orang	100.180.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		115.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				50 Orang	90.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	2.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	39.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				52 Orang	13.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		130.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				14 Orang	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			0 Persen	44.560.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				50 Orang	44.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		70.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						**5.708.385.923,00**							**7.905.887.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.615.710.253,00**							**6.605.887.500,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**4.615.710.253,00**							**6.605.887.500,00**	
1,	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.111.060.203,00**						**-**	**5.579.387.500,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.111.060.203,00**	-	-	-	-	-	-	**5.579.387.500,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	2.674.000,00			-	-	Aparatur	-	6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.558.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.116.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	3.242.139.133,00			-	-	Aparatur	-	3.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44/14 Orang/bulan	3.242.139.133,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		3.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah*	-			100 persen	389.766.400,00			-	-	Aparatur	-	1.070.037.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	14.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		13.692.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	53.846.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		64.785.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	27.010.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		29.295.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		52.815.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	244.510.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		909.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	27.458.850,00			-	-	Aparatur	-	45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	27.458.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	217.171.820,00			-	-	Aparatur	-	635.355.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		6.100.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.971.820,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		45.255.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	178.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		584.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	231.850.000,00			-	-	-	-	222.495.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.520.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	196.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		177.975.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**334.585.250,00**						-	**706.500.000,00**	
		[Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**95.00**	**90.98**	**91.67**	**92.33**	**334.585.250,00**	-	-	-	-	-	-	**706.500.000,00**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan*	-			34 Laporan	286.406.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	629.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	53.697.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		412.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	61.738.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		147.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	41.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	129.510.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan yang dilakukan*	-			100 Persen	48.179.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	77.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	48.179.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		77.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3,	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**131.848.200,00**						-	**270.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	**Persentase desa rentan rawan pangan**	**0**	**0.69**	**0**	**0**	**131.848.200,00**	-	-	-	-	-	-	**270.000.000,00**	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan*	-			1 Dokumen	49.848.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	49.848.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten*	-			100 Persen	82.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	82.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4,	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**38.216.600,00**						-	**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38.216.600,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	-			100 Persen	38.216.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	38.216.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.092.675.670,00**							**1.300.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.092.675.670,00**							**1.300.000.000,00**	
1,	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**247.973.200,00**						-	**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**2.125.640**	**2.005.989**	0.021.4.00	**2.042.840**	**247.973.200,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten*	-			100 Persen	247.973.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				15 Unit	247.973.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**532.645.470,00**						**-**	**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**9.240.380**	**7.350.030**	8.453.310	**8.880.160**	**532.645.470,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*	-			100 Persen	532.645.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40 Unit	532.645.470,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**312.057.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	**Angka Konsumsi Ikan**	**53.00**	**43.60**	**49.00**	**49.50**	**312.057.000,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina*	-			51 Orang	312.057.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi				48 Pelaku Usaha	312.057.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**14.103.495.857,00**							**15.824.643.528,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.711.039.457,00**							**15.466.922.417,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**13.711.039.457,00**							**15.466.922.417,00**	
1,	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.506.021.237,00**						**-**	**5.146.283.229,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**97**	**97.5**	**98**	**7.506.021.237,00**	-	-	-	-	-	-	**5.146.283.229,00**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	9.766.000,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	16.532.506,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.849.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		9.447.146,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.917.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		7.085.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			2 Laporan 364 Orang/bulan	2.987.847.922,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	2.773.046.453,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	2.987.847.922,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		2.773.046.453,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			2 Dokumen 320 Laporan 3 Paket 3 Paket 2 Paket 2 Paket	359.927.300,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	495.216.823,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	7.023.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		7.715.957,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	65.017.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		52.001.292,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.890.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		15.655.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	59.998.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		66.092.234,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.648.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		6.370.563,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				390 Laporan	199.351.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		347.380.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			2 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	3.862.111.365,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	1.385.218.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Satuan Kerja Perangkat Daerah		4.779.328,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	155.311.365,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		531.545.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.702.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		848.893.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			35 Unit 1 Unit 16 Unit 3 Unit	286.368.650,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	476.268.919,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54.076.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		55.777.570,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	209.931.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		354.267.979,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	22.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		66.223.370,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**893.652.950,00**						**-**	**1.525.278.478,00**	
		[Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup]	**Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik** **Titik Pantau Dengan Kualitas Udara Baik**	**75**	**75**	**75**	**75**	**893.652.950,00**	-	-	-	-	-	-	**1.525.278.478,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	893.652.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas	-	1.525.278.478,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	183.098.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas		414.833.182,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	38.564.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas		17.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	671.990.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas		1.092.595.296,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**273.990.000,00**						-	**4.617.666.349,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**100**	**100**	**100**	**100**	**273.990.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.617.666.349,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			32.80 Ha	273.990.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum, pemerintah daerah (melalui dinas terkait), pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal	-	4.617.666.349,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				32,80 Ha	273.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum, pemerintah daerah (melalui dinas terkait), pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal		4.617.666.349,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4,	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**63.460.000,00**						-	**56.599.172,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup]	**Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**63.460.000,00**	-	-	-	-	-	-	**56.599.172,00**	-
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola*	-			6 Pengaduan	63.460.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum	-	56.599.172,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola				6 Pengaduan	63.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum		56.599.172,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**4.973.915.270,00**						-	**4.121.095.189,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Persentase pengelolaan persampahan yang tertangani**	**22.90**	**18.83**	**22.60**	**22.40**	**4.973.915.270,00**	-	-	-	-	-	-	**4.121.095.189,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah*	-			100 Persen	4.973.915.270,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan), dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat	-	4.121.095.189,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3300 Unit	1.676.173.780,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK AIR TANAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan), dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				24200 Ton	1.401.812.190,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan), dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat		1.656.095.189,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				24200 Ton	1.895.929.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan), dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat		1.365.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**392.456.400,00**							**357.721.111,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**392.456.400,00**							**357.721.111,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**392.456.400,00**						-	**357.721.111,00**	
		[Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya]	**Nilai efektifitas pengelolaan TAHURA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**392.456.400,00**	-	-	-	-	-	-	**357.721.111,00**	-
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan*	-			1345.42 Ha	392.456.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas	-	357.721.111,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan				1.345,42 Ha	392.456.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas		357.721.111,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**11.711.672.821,00**							**15.098.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.711.672.821,00**							**15.098.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**11.711.672.821,00**							**15.098.000.000,00**	
1,	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.135.617.261,00**						-	**14.548.000.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.135.617.261,00**	-	-	-	-	-	-	**14.548.000.000,00**	-
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	-			123 Orang	8.980.589.667,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	ASN	-	12.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				123 Orang/bulan	8.980.589.667,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	ASN		12.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			5 Paket/Lapo ran	1.690.088.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat	-	1.741.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.845.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.279.568.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		990.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	35.682.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	67.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Masyarakat		161.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1128 Laporan	291.292.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	364.789.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat	-	396.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	167.989.044,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		181.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	193.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Unit	100.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat	-	310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.320.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	39.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	23.880.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**576.055.560,00**						**-**	**550.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**34** **70.00**	**30** **54.85**	**30** **57.36**	**30** **60.00**	**576.055.560,00**	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk*	-			5 Dokumen	576.055.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				5 Dokumen	576.055.560,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA						**9.019.850.919,00**							**6.726.725.098,68**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.019.850.919,00**							**6.726.725.098,68**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**9.019.850.919,00**							**6.726.725.098,68**	
1,	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.400.065.919,00**						**-**	**5.976.472.135,68**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.400.065.919,00**	-	-	-	-	-	-	**5.976.472.135,68**	-
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	6.034.654.539,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa	-	4.766.417.135,68	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	6.034.654.539,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		4.766.417.135,68	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	372.719.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa	-	382.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	23.668.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		70.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				55 Paket	52.861.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		75.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	41.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		55.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	37.645.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		45.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	216.695.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi*	-			100 %	902.600.380,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa	-	667.105.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		5.555.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	64.320.380,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		75.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	833.280.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		585.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi*	-			100 %	90.091.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa	-	160.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	49.611.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		50.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	40.480.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**791.127.600,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa]	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya** **Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	**100**	**0** **100**	**0** **100**	**100** **18.28**	**791.127.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Status Desa Mandiri*	-			11 Desa	791.127.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Pemerintaha n Desa (Aparatur Desa)	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				21 Laporan	791.127.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Pemerintaha n Desa (Aparatur Desa)		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
3,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**828.657.400,00**						**-**	**750.252.963,00**	
		[Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan]	**Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyaratan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**828.657.400,00**	-	-	-	-	-	-	**750.252.963,00**	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi*	-			100 %	828.657.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Pemerintaha n Desa dan Lembaga Kemasyaraka tan	-	750.252.963,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	292.818.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Pemerintaha n Desa dan Lembaga Kemasyaraka tan		249.324.681,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	535.839.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Pemerintaha n Desa dan Lembaga Kemasyaraka tan		500.928.282,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**8.548.126.927,00**							**8.049.865.285,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.548.126.927,00**							**8.049.865.285,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**8.548.126.927,00**							**8.049.865.285,00**	
1,	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.914.006.927,00**						-	**4.483.000.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.914.006.927,00**	-	-	-	-	-	-	**4.483.000.000,00**	-
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	4.455.404.057,00			-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	3.450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.455.404.057,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		3.450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah*	-			100 Persen	282.351.950,00			-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	475.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3.498.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.999.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.998.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				510 Laporan	184.855.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		325.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	90.298.620,00			-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	408.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	52.498.620,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		61.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	34.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		335.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	85.952.300,00			-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.112.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	45.840.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**157.800.000,00**						**-**	**190.000.000,00**	
		[Menciptakan penduduk tumbuh seimbang]	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ ASFR 15-19)**	**8.5**	**16.1**	**13.4**	**11.6**	**157.800.000,00**	-	-	-	-	-	-	**190.000.000,00**	-
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota*	-			100 Persen	157.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik	-	190.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	87.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	70.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**1.436.920.000,00**						**-**	**349.865.285,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)]	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)**	**70.00**	**62.63**	**63.86**	**65.09**	**1.436.920.000,00**	-	-	-	-	-	-	**349.865.285,00**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai keakrifan Lokal*	-			100 Persen	280.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik	-	139.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Laporan	240.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		83.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	-			100 Persen	108.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik	-	70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				145 Orang	108.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	Publik		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota*	-			100 Persen	898.170.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik	-	140.865.285,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				39 Laporan	53.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		66.865.285,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2495 Orang	845.070.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		74.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb*	-			100 Persen	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				20 Unit	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**2.039.400.000,00**						**-**	**3.027.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)]	**Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga**	**80**	**45**	**50**	**60**	**2.039.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.027.000.000,00**	-
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Persentase Peran serta Organisasi Tingkat Daerah kabupaten /kota dalam Pembangunan keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			100 Persen	2.039.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik	-	3.027.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	927.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		927.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	1.112.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial	publik		2.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**18.448.969.537,00**							**36.386.388.612,03**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.448.969.537,00**							**36.386.388.612,03**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**18.448.969.537,00**							**36.386.388.612,03**	
1,	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.613.998.617,00**						**-**	**14.926.585.612,03**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**94.55**	**100**	**100**	**6.613.998.617,00**	-	-	-	-	-	-	**14.926.585.612,03**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	6.710.000,00			-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan	-	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen		Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.972.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		4.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	5.456.598.683,00			-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan	-	5.690.585.612,03	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/bulan	5.444.690.683,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		5.684.585.612,03	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	11.908.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	218.860.150,00			-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan	-	513.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.960.150,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	45.005.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	16.745.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	52.342.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114 Laporan	100.808.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		365.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	672.729.784,00			-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan	-	8.160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	151.229.784,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		7.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	511.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		495.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	257.100.000,00			-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan	-	555.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.170.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	215.930.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur Dinas Perhubungan		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2,	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**11.822.982.920,00**						**-**	**21.454.803.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal** **Persentase kendaraan angkutan orang/barang yang laik jalan**	**43.10** **60.00**	**0** **6.67**	**10.67** **37.10**	**19.56** **38.30**	**11.822.982.920,00**	-	-	-	-	-	-	**21.454.803.000,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten*	-			0,8	11.280.228.920,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan	-	20.162.303.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Unit	9.443.588.920,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		10.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				13 Unit	1.836.640.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PBJT-KO NSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		9.662.303.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan baik*	-			0,65	10.605.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan	-	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	10.605.250,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*	-			1	23.260.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan	-	87.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	23.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		87.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	-			1	193.999.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/barang	-	390.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				600 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/barang		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	172.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/barang		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	6.999.750,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/barang		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten*	-			1	237.411.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan	-	630.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				39 Laporan	186.266.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				1 Laporan	8.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				2 Laporan	42.885.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten*	-			1	11.200.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	11.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase Penyelenggaraan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	-			1	10.257.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/barang	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.257.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/barang		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten*	-			1	56.020.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan	-	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	7.056.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	48.964.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna jalan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3,	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**11.988.000,00**						-	**5.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air]	**Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun**	**100.00**	**0**	**0**	**20.00**	**11.988.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.000,00**	-
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*	-			100 %	11.988.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna angkutan sungai	-	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	11.988.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat pengguna angkutan sungai		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**9.336.681.137,00**							**12.191.741.560,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.336.681.137,00**							**12.191.741.560,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**9.251.726.137,00**							**11.966.549.560,00**	
1,	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.301.681.137,00**						-	**4.834.426.760,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.301.681.137,00**	-	-	-	-	-	-	**4.834.426.760,00**	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persentase	3.355.879.962,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.564.816.089,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.355.879.962,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.564.816.089,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persentase	216.683.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	647.110.671,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		49.499.890,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		97.356.380,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		87.941.315,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		43.498.510,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1689 Laporan	119.183.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		368.814.576,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	-	-	-	-	-	**4.301.681.137,00**	-	-	-	-	-	-	**4.834.426.760,00**	-
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persentase	657.010.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.445.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.301.681.137,00**	-	-	-	-	-	-	**4.834.426.760,00**	-
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	126.010.575,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				67 Laporan	528.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.379.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.107.600,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	177.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.119.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		50.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	31.988.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		126.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2,	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**3.020.773.000,00**						**-**	**4.947.522.800,00**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)**	**95**	**0**	**70**	**75**	**3.020.773.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.947.522.800,00**	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persentase	3.020.773.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat	-	4.947.522.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				100 Laporan	2.503.955.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		4.015.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				4 Komunitas	113.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				900 Permohonan	86.377.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		382.522.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				300 Media	155.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				2000 Konten	161.131.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3,	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**1.929.272.000,00**						-	**2.184.600.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	**Implementasi tata kelola SPBE**	**100**	**0**	**50**	**60**	**1.929.272.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.184.600.000,00**	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persentase	1.929.272.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat	-	2.184.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				45 Perangkat Daerah	1.454.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		2.085.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				4 Dokumen	475.272.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		99.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**40.791.000,00**							**175.692.000,00**	
1,	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**40.791.000,00**						-	**175.692.000,00**	
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)]	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**3.25**	**2.36**	**2.40**	**2.50**	**40.791.000,00**	-	-	-	-	-	-	**175.692.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persentase	40.791.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat	-	175.692.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	40.791.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		175.692.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**44.164.000,00**							**49.500.000,00**	
1,	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**44.164.000,00**						**-**	**49.500.000,00**	
		[Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah]	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**	**47.50**	**43.25**	**44.00**	**45.00**	**44.164.000,00**	-	-	-	-	-	-	**49.500.000,00**	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			60 Persentase	44.164.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat	-	49.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	44.164.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan masyarakat		49.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						**4.282.299.414,00**							**4.618.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.282.299.414,00**							**4.618.500.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**485.398.100,00**							**523.000.000,00**	
1,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**295.000.000,00**						**-**	**320.000.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	**Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan**	**80**	**10**	**40**	**80**	**295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**320.000.000,00**	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	-			100 Persen	295.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Publik	-	320.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	295.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Publik		320.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**190.398.100,00**						-	**203.000.000,00**	
		[Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi]	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**37**	**38**	**35**	**35**	**190.398.100,00**	-	-	-	-	-	-	**203.000.000,00**	-
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota"*	-			100 Persen	190.398.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Publik	-	203.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				30 Perkara	9.601.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Publik		11.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	29.999.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Publik		32.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				748 Orang	150.796.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Publik		160.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**3.796.901.314,00**							**4.095.500.000,00**	
1,	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.432.299.514,00**						-	**3.697.500.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.432.299.514,00**	-	-	-	-	-	-	**3.697.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	2.888.738.707,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	3.100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.888.738.707,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		3.100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	313.057.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur	-	360.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.492.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		4.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		41.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				844 Laporan	215.565.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	158.397.207,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur	-	162.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		4.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	29.997.207,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		32.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	125.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		126.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	72.106.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur	-	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.112.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		42.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	31.993.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	aparatur		33.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2,	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**42.191.800,00**						**-**	**44.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**48.14**	**0**	**0**	**41.26**	**42.191.800,00**	-	-	-	-	-	-	**44.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	-			100 Persen	42.191.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	44.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				35 Unit Usaha	42.191.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		44.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3,	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**20.000.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	**Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan**	**10.89**	**0**	**0**	**8.60**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4,	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**82.410.000,00**						**-**	**84.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	**Pertumbuhan Wirausaha**	**0.19**	**0**	**0**	**0.08**	**82.410.000,00**	-	-	-	-	-	-	**84.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan"*	-			100 Persen	82.410.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	84.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				45 Orang	82.410.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		84.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
5,	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**220.000.000,00**						**-**	**240.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	**220.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**240.000.000,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*	-			100 Persen	220.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	240.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				400 Unit Usaha	220.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		240.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**7.019.691.713,00**							**10.342.706.718,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.019.691.713,00**							**10.342.706.718,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7.019.691.713,00**							**10.342.706.718,00**	
1,	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.415.743.963,00**						**-**	**9.302.563.226,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.415.743.963,00**	-	-	-	-	-	-	**9.302.563.226,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.472.660.413,00			-	-	-	-	6.318.730.016,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	5.472.660.413,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.318.730.016,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	239.014.600,00			-	-	-	-	1.097.157.455,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				94 Paket	6.795.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.126.495,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				61 Paket	80.577.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		302.830.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	14.712.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.105.984,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				23 Paket	51.874.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.940.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				645 Laporan	85.054.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		586.154.976,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	64.926.550,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	64.926.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	573.750.000,00			-	-	-	-	1.505.832.784,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.844.499,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	257.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		174.008.285,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	312.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.321.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.392.400,00			-	-	-	-	380.842.971,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.468.091,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	28.272.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		314.374.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**144.392.000,00**						-	**0,00**	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**144.392.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	144.392.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	publik	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	144.392.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	publik		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**355.515.750,00**						-	**853.453.172,00**	
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**1**	**0**	**1**	**1**	**355.515.750,00**	-	-	-	-	-	-	**853.453.172,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	355.515.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	publik	-	853.453.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	355.515.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	publik		853.453.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**104.040.000,00**						**-**	**186.690.320,00**	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	**Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN** **Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100 3000000**	**5619731 70**	**2500000 80**	**2600000 85**	**104.040.000,00**	-	-	-	-	-	-	**186.690.320,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.040.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	publik	-	186.690.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				82 Kegiatan Usaha	104.040.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	publik		186.690.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**6.924.666.266,00**							**7.477.116.709,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.162.230.450,00**							**2.235.453.495,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.162.230.450,00**							**2.235.453.495,00**	
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1.317.515.250,00**						**-**	**1.449.266.775,00**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	**Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Terhadap Masyarakat**	**8.52**	**1.8**	**2.43**	**3.65**	**1.317.515.250,00**	-	-	-	-	-	-	**1.449.266.775,00**	-
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan*	-			100 Persen	417.515.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	459.266.775,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	417.515.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		459.266.775,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah*	-			100 Persen	900.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	990.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	900.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		990.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2,	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**412.028.000,00**						**-**	**310.230.800,00**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	**Persentase Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**7.59**	**46**	**2.17**	**3.25**	**412.028.000,00**	-	-	-	-	-	-	**310.230.800,00**	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah*	-			100 Persen	412.028.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	310.230.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				22 Lembaga	412.028.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		310.230.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3,	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**432.687.200,00**						**-**	**475.955.920,00**	
		[Meningkatnya warisan budaya yang di lestarikan]	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan** **Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**4.64** **60.00**	**0** **5.25**	**2.11** **26.67**	**2.95** **33.33**	**432.687.200,00**	-	-	-	-	-	-	**475.955.920,00**	-
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten*	-			100 Persen	432.687.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik	-	475.955.920,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	72.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		79.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	360.687.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Publik		396.755.920,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.762.435.816,00**							**5.241.663.214,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**4.762.435.816,00**							**5.241.663.214,00**	
1,	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.064.666.316,00**						-	**4.474.116.764,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.064.666.316,00**	-	-	-	-	-	-	**4.474.116.764,00**	-
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	2.576.924.366,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	2.834.616.802,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.576.924.366,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		2.834.616.802,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 Persen	441.772.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	488.933.457,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	3.499.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		6.832.717,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				79 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		26.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	29.969.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		32.966.340,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		44.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				356 Laporan	344.304.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		378.734.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	960.858.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	1.056.944.240,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		3.300.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	161.658.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		177.824.240,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				44 Laporan	796.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		875.820.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 Persen	85.111.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur	-	93.622.265,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.114.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		44.125.840,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	44.996.750,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Aparatur		49.496.425,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**460.000.000,00**						**-**	**506.000.000,00**	
		[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**9**	**12.47**	**7.22**	**5**	**460.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**506.000.000,00**	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata*	-			100 Persen	460.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	506.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	60.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		66.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**237.769.500,00**						**-**	**261.546.450,00**	
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**100**	**0**	**20**	**40**	**237.769.500,00**	-	-	-	-	-	-	**261.546.450,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri*	-			100 Persen	237.769.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	261.546.450,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	237.769.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		261.546.450,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						**4.170.134.383,00**							**6.306.690.961,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.170.134.383,00**							**6.306.690.961,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.118.574.333,00**							**6.233.027.061,00**	
1,	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.943.106.933,00**						**-**	**5.747.822.861,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.943.106.933,00**	-	-	-	-	-	-	**5.747.822.861,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen				-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparaturur	-	6.859.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparaturur		3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.359.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparaturur		3.359.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.209.161.065,00			-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	4.209.161.065,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	3.209.161.065,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		4.209.161.065,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	258.498.556,00			-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	799.135.038,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.501.716,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	38.994.440,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	29.998.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		42.844.180,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		158.750.858,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.808.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				159 Laporan	144.196.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		362.540.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	30.000.000,00			-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	347.714.112,00			-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	349.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	130.514.112,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		132.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	214.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		214.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	91.663.800,00			-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur	-	233.467.758,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.484.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		47.270.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	32.079.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		101.197.758,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	10.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2,	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**155.291.400,00**						**-**	**480.906.000,00**	
		[Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan]	**Nilai tingkat kegemaran membaca**	**77**	**65.40**	**66**	**67**	**155.291.400,00**	-	-	-	-	-	-	**480.906.000,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	48.769.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat	-	300.906.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	28.769.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		240.906.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	106.522.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat	-	180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	58.582.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	22.676.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				4 Lokus	25.264.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**20.176.000,00**						-	**4.298.200,00**	
		[Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**100**	**0**	**20**	**40**	**20.176.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.298.200,00**	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	20.176.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Masyarakat	-	4.298.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	20.176.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial	Masyarakat		4.298.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**51.560.050,00**							**73.663.900,00**	
1,	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**51.560.050,00**						-	**73.663.900,00**	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	**Tingkat ketersedian arsip**	**73.50**	**72.50**	**72.60**	**72.90**	**51.560.050,00**	-	-	-	-	-	-	**73.663.900,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	24.207.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	38.663.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Laporan	24.207.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		38.663.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	27.352.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	27.352.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**12.473.893.944,00**							**15.518.493.950,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.473.893.944,00**							**15.518.493.950,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**12.473.893.944,00**							**15.518.493.950,00**	
1,	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.579.109.444,00**						-	**14.259.231.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.579.109.444,00**	-	-	-	-	-	-	**14.259.231.000,00**	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.215.200,00			-	-	-	-	4.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.715.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.465.391.389,00			-	-	-	-	11.702.577.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142/14 Orang/bulan	10.465.391.389,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.702.577.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	566.440.360,00			-	-	-	-	1.196.764.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.208.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	89.998.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	61.241.760,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.664.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	75.660.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550 Laporan	331.331.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	443.502.495,00			-	-	-	-	1.086.990.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.390.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	114.002.495,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	324.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		927.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.560.000,00			-	-	-	-	268.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	53.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		103.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	45.140.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**711.619.500,00**						**-**	**1.057.781.450,00**	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B**	**87**	**0**	**0**	**87**	**711.619.500,00**	-	-	-	-	-	-	**1.057.781.450,00**	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota*	-			1010 Ha 1 Dokumen	561.619.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik	-	617.781.450,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				30 Ha	361.619.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		397.781.450,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun*	-			11 Unit	150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik	-	440.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		440.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**72.595.000,00**						**-**	**79.854.500,00**	
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**72.595.000,00**	-	-	-	-	-	-	**79.854.500,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani*	-			100 Persen	72.595.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik	-	79.854.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	72.595.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		79.854.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**110.570.000,00**						**-**	**121.627.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina** **Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang diTingkatkan**	**100** **20**	**100** **17.08**	**100** **20**	**100** **20**	**110.570.000,00**	-	-	-	-	-	-	**121.627.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina*	-			159 Kelompok	110.570.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik	-	121.627.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	110.570.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Publik		121.627.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN						**11.356.317.381,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.356.317.381,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**11.356.317.381,00**							**0,00**	
1,	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.011.622.381,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.011.622.381,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	2.725.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.225.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	7.054.749.631,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/bulan	7.052.169.631,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.580.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	349.290.700,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.675.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				67 Paket	71.614.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.851.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	23.184.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				615 Laporan	223.966.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	537.532.250,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	123.532.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	409.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	67.324.800,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.302.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	31.022.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
2,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.104.795.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan perkebunan]	**Peningkatan Populasi Peternakan (sapi, kerbau, kambing dan domba)** **Peningkatan produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit)**	**1.145 6556.67**	**1.296 6556.67**	**1.145 6556.67**	**1.145 6556.67**	**1.104.795.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	-			100 Persen	20.750.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	20.750.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain*	-			100 Persen	1.084.045.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Kelompok Tani dan Mayarakat	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				10 Ton	82.890.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Kelompok Tani dan Mayarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				61 Ekor	838.325.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Kelompok Tani dan Mayarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2000 Dosis	162.830.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Kelompok Tani dan Mayarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**2.073.250.000,00**						-	**0,00**	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan perkebunan]	**Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan**	**90**	**50**	**65**	**70**	**2.073.250.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun*	-			100 Persen	2.073.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Kelompok Tani	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				12 Unit	2.073.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Kelompok Tani		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
4,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**148.250.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	**Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)** **Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**100** **5**	**0** **100**	**0** **100**	**100** **5**	**148.250.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	124.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	124.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola*	-			100 Persen	24.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				2 Laporan	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
5,	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**18.400.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian]	**Persentase pengawasan izin usaha pertanian**	**75**	**50**	**50**	**55**	**18.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	18.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Perusahaan	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	18.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah	Perusahaan		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**8.634.897.725,00**							**13.905.864.114,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.634.897.725,00**							**13.905.864.114,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**3.054.006.950,00**							**7.893.720.750,00**	
1,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**2.154.500.000,00**						**-**	**5.779.988.610,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisiensi, merata dan terintegrasi]	**Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik**	**80.00**	**57**	**60.83**	**64.67**	**2.154.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.779.988.610,00**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	-			27 Unit	2.154.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	5.779.988.610,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	2.154.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		5.779.988.610,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**517.436.200,00**						**-**	**148.883.663,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	**Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten**	**6.3**	**6.9**	**6.7**	**6.6**	**517.436.200,00**	-	-	-	-	-	-	**148.883.663,00**	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali*	-			Laporan 2	506.924.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	103.550.309,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	15.077.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		39.666.588,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	491.847.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		63.883.721,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Laporan	10.512.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	45.333.354,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	10.512.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		45.333.354,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**156.072.000,00**						-	**1.533.396.978,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**43.08**	**25.78**	**28.98**	**32.06**	**156.072.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.533.396.978,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku*	-			1701 Unit	156.072.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	1.533.396.978,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1200 Unit	112.902.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		1.080.064.538,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				4 Orang	43.170.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		453.332.440,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**225.998.750,00**						**-**	**431.451.499,00**	
		[Meningkatnnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	**Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah**	**6**	**3**	**3**	**4**	**225.998.750,00**	-	-	-	-	-	-	**431.451.499,00**	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah*	-			4 Kali	225.998.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	431.451.499,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 UMKM	225.998.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		431.451.499,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**5.580.890.775,00**							**6.012.143.364,00**	
1,	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.493.401.875,00**						**-**	**4.878.812.264,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.493.401.875,00**	-	-	-	-	-	-	**4.878.812.264,00**	-
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			9 Dokumen	5.887.800,00			-	-	Aparatur	-	7.366.652,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.458.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		2.833.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.429.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		4.533.324,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya layanan Administrasi Keuangan*	-			100 Persen	3.915.563.112,00			-	-	Aparatur	-	3.486.247.571,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46/14 Orang/bulan	3.912.951.112,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		3.483.414.243,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2.612.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		2.833.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*	-			100 persen	252.526.100,00			-	-	Aparatur	-	611.764.086,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	4.049.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		5.971.645,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				49 Paket	36.225.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		53.067.231,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	22.439.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		10.386.299,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	24.077.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		32.781.936,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				442 Laporan	165.734.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		509.556.975,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia*	-			100 persen	238.614.863,00			-	-	Aparatur	-	537.458.253,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.540.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		2.266.662,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	114.674.863,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		86.392.476,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	122.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		448.799.115,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			100 persen	80.810.000,00			-	-	Aparatur	-	235.975.702,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		41.128.342,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	43.690.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		194.847.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**1.087.488.900,00**						-	**1.133.331.100,00**	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	**Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1.087.488.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.133.331.100,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah*	-			6 Dokumen	1.087.488.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik	-	1.133.331.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	85.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		566.665.550,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1.001.688.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang	Publik		566.665.550,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**59.660.870.839,00**							**68.865.933.818,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**126.330.000,00**							**425.181.080,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**126.330.000,00**							**425.181.080,00**	
1,	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**64.864.000,00**						-	**349.435.010,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	**Persentase pelaksanaan fasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan**	**100**	**95**	**96**	**97**	**64.864.000,00**	-	-	-	-	-	-	**349.435.010,00**	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota*	-			95 Persen	64.864.000,00			-	-	-	-	349.435.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Berita Acara	64.864.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		349.435.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
2,	**2.10.17**	**PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN**						**61.466.000,00**						-	**75.746.070,00**	
		-	-	-	-	-	-	**61.466.000,00**	-	-	-	-	-	-	**75.746.070,00**	-
	2.10.17.7.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	-	-			-	61.466.000,00			-	-	-	-	75.746.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.17.7.01.0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	61.466.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.746.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**59.534.540.839,00**							**68.440.752.738,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**59.534.540.839,00**							**68.440.752.738,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**41.308.640.657,00**						-	**50.000.790.992,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Indeks Kematangan Organisasi** **Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan** **Nilai Sakip Perangkat Daerah** **Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik** **Persentase terlaksananya fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar** **Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik**	**45** **81** **90** **91** **96** **96.6**	**43.26** **75.20** **80** **85** **90** **96.17**	**43.28** **76** **82** **86** **91** **96.2**	**43.30** **77** **84** **87** **92** **96.25**	**41.308.640.657,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.790.992,00**	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu*	-			90 Persen	9.732.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.732.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.800.444.483,00			-	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	13.005.980.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	15.800.444.483,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		13.005.980.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			90 Persen	117.605.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	67.262.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	117.605.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		67.262.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			95 Persen	2.170.161.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	9.454.004.972,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2359,5 Paket	156.071.048,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		499.039.185,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16063 Paket	177.678.440,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		445.739.121,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				174240 Paket	165.193.760,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.253.204.687,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14405 Paket	51.538.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		130.707.382,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.110.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		3.257.986.914,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				745 Laporan	508.730.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.867.327.683,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			95 Persen	999.293.709,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	549.704.118,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	94.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		412.022.522,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	398.308.709,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		105.417.926,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				65 Unit	506.735.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		32.263.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	5.699.291.297,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	8.265.072.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.745.481.297,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.619.490.838,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.095.860.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		723.065.242,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.850.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		4.900.516.390,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			95 Persen	4.244.648.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	5.430.655.364,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	174.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		535.387.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	1.694.910.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.052.034.722,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		74.799.853,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4840 Unit	362.675.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.644.012.247,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.045.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		355.299.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	**41.308.640.657,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.790.992,00**	-
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				10340 Unit	947.263.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		769.121.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Persentase terlaksananya fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik**	**45 81 90 91 96 96.6**	**43.26 75.20 80 85 90 96.17**	**43.28 76 82 86 91 96.2**	**43.30 77 84 87 92 96.25**	**41.308.640.657,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.790.992,00**	-
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-			100 Persen	1.530.474.720,00			-	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.015.705.488,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.288.474.720,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		779.865.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	218.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		209.439.588,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		26.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			95 Persen	3.982.877.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	4.338.344.746,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				70306,082 Paket	2.578.966.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.173.397.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				33056,716 Paket	1.290.652.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.619.172.507,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				18012,423 Paket	113.259.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		545.774.632,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi*	-			100 Persen	384.662.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	2.232.662.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	118.060.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		849.998.325,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	121.535.350,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		498.665.684,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	68.978.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		453.332.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	43.299.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		249.332.842,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	32.789.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		181.332.976,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	-			95 Persen	6.369.448.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	5.613.897.805,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				150 Laporan	2.316.476.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		3.505.015.693,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				15 Laporan	2.606.188.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		555.775.372,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				20 Laporan	1.446.783.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.553.106.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**17.256.876.082,00**						**-**	**15.517.496.304,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah]	**Persentase Capaian SPM Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)**	**2.90 90.06 95.5**	**2.77 90 92.03**	**2.78 90.01 92.1**	**2.80 90.02 92.3**	**17.256.876.082,00**	-	-	-	-	-	-	**15.517.496.304,00**	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan*	-			95 Persen	393.027.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.924.190.227,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	120.945.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	146.462.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		879.190.227,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	125.619.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	**Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran**	**91.2**	**85.56**	**86.49**	**87.42**	**17.256.876.082,00**	-	-	-	-	-	-	**15.517.496.304,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	-			95 Persen	16.144.085.882,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	12.121.984.509,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	14.399.085.882,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		5.444.397.668,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1.745.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		6.677.586.841,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Produk Hukum]	**Indeks Reformasi Hukum**	**88.6**	**87.88**	**88**	**88.2**	**17.256.876.082,00**	-	-	-	-	-	-	**15.517.496.304,00**	-
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum*	-			95 Persen	627.555.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.390.288.394,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				900 Dokumen	477.388.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		834.716.488,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				15 Kasus	97.720.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		440.096.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				900 Dokumen	52.446.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		115.475.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah]	**Persentase Capaian SPM Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)**	**2.90 90.06 95.5**	**2.77 90 92.03**	**2.78 90.01 92.1**	**2.80 90.02 92.3**	**17.256.876.082,00**	-	-	-	-	-	-	**15.517.496.304,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif*	-			95 Persen	92.208.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	81.033.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	92.208.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		81.033.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
3,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**969.024.100,00**						-	**2.922.465.442,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian]	**Persentase pelaksanaan koordinasi penyediaan data harga bahan pokok penting Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD**	**94.5 95**	**93**	**93.2**	**93.5**	**969.024.100,00**	-	-	-	-	-	-	**2.922.465.442,00**	-
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian*	-			95 Persen	207.774.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	453.332.441,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	81.206.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		135.999.732,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	110.400.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		186.999.632,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	16.168.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		130.333.077,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Serta Kebijakan Pembangunan]	**Persentase kegiatan dengan penyerapan anggarannya >= 90% Tingkat Kematangan UKPBJ**	**90.06 Level 4**	**90 Level 2**	**90.01 Level 3**	**90.02 Level 3**	**969.024.100,00**	-	-	-	-	-	-	**2.922.465.442,00**	-
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*	-			98 Persen	109.287.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	917.288.793,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	37.709.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		249.332.842,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	53.284.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		393.689.825,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	18.293.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		274.266.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan*	-			Baik Predikat 19 Persen 100 Persen 46 Persen	572.920.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.376.177.887,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	116.136.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		518.028.646,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	237.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		434.357.077,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	219.424.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		423.792.164,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian]	**Persentase pelaksanaan koordinasi penyediaan data harga bahan pokok penting Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD**	**94.5 95**	**93**	**93.2**	**93.5**	**969.024.100,00**	-	-	-	-	-	-	**2.922.465.442,00**	-
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam*	-			90 Persen	79.042.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	175.666.321,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	38.676.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		96.333.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	40.366.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		79.333.177,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**55.481.633.862,00**							**81.852.553.071,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**55.481.633.862,00**							**81.852.553.071,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**55.481.633.862,00**							**81.852.553.071,00**	
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**32.485.103.862,00**						-	**35.652.248.246,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah** **Persentase layanan keuangan yang difasilitasi**	**100** **97.00**	**100** **94.75**	**100** **95.00**	**100** **95.00**	**32.485.103.862,00**	-	-	-	-	-	-	**35.652.248.246,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			100 %	1.172.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.805.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	618.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	554.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.155.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	3.507.202.048,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	4.323.139.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.505.697.248,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		4.319.839.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	740.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	764.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	9.427.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	1.230.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.377.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	124.714.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	260.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		52.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	9.022.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	91.692.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		152.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	1.135.862.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.672.952.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				466 Paket	14.787.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.431.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				585 Paket	76.858.480,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		235.990.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	590.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		57.003.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29920 Paket	678.895.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		745.951.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1136 Paket	51.185.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		100.711.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1480 Dokumen	6.790.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		36.451.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	288.942.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		346.412.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	7.814.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	-			100 %	10.855.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD	-	122.727.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.855.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD		122.727.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			100 %	1.118.616.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.370.045.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				900 Laporan	9.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		9.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	127.416.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		151.745.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	982.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.208.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi*	-			100 %	283.865.268,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.200.618.375,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		223.677.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	148.093.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		320.639.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	13.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		12.733.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	52.794.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		286.555.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		23.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		311.912.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Uni t	10.357.968,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan*	-			100 %	25.649.797.566,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD	-	25.802.615.166,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				14 Orang/Bulan	24.751.438.566,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		24.759.313.566,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				270 Paket	499.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		645.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	398.859.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		397.601.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan*	-			100 %	644.391.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat	-	786.645.225,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				45 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		24.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	41.916.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	597.975.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		541.895.225,00	SEKRETARIAT DPRD
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**22.996.530.000,00**						-	**46.200.304.825,00**	
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	**Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Persentase persetujuan penetapan ranperda menjadi**	**90.00 95.35**	**80.00 85.33**	**81.67 87.00**	**83.33 88.67**	**22.996.530.000,00**	-	-	-	-	-	-	**46.200.304.825,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun*	-			92.5 %	2.343.155.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat	-	5.645.609.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	3.815.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		25.467.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	2.241.198.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		5.354.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	34.186.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	63.956.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		210.892.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan*	-			100 %	2.139.473.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat	-	4.731.177.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	474.151.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		969.969.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	426.338.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		969.969.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	444.496.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		1.031.377.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	439.761.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		1.031.377.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	354.727.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		728.483.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan*	-			95 %	708.337.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat	-	1.914.310.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2 Laporan	9.648.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		208.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2 Laporan	9.441.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		207.969.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2 Laporan	9.428.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		208.147.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2 Laporan	10.032.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		207.946.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	10.032.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		208.292.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	16.832.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		254.600.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	6.618.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		309.424.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	637.304.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		309.424.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan*	-			95 %	3.446.283.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD	-	12.136.468.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				2 Dokumen	32.846.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		53.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				13 Dokumen	1.901.599.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		3.227.240.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	498.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		498.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	312.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	23.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		422.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	4.982.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	673.606.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		7.880.203.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap*	-			95 %	3.355.081.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat	-	4.923.645.375,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				60 Laporan	101.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		153.846.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	22.525.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		63.669.375,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2.839.951.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		4.354.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				300 Orang	391.105.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur, DPRD, Masyarakat		351.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan*	-			95 %	[illegible]			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD	-	110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	[illegible]	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi*	-			95 %	11.001.869.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD	-	16.739.093.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				60 Dokumen	10.890.029.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		16.574.093.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	49.716.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	32.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	29.744.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	DPRD		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**9.397.565.750,00**							**15.783.287.294,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.397.565.750,00**							**15.783.287.294,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**9.005.485.750,00**							**14.497.863.594,00**	
1,	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.569.155.150,00**						**-**	**10.852.681.176,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.569.155.150,00**	-	-	-	-	-	-	**10.852.681.176,00**	-
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			14 Orang/Bulan	5.648.848.723,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	7.658.840.805,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	5.648.848.723,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		7.658.840.805,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			1 Dokumen 7 Orang	145.000.000,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda	-	321.352.361,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	71.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	73.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda		291.352.361,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			870 Laporan 4 Paket 7 Paket 5 Paket 2 Paket	993.403.500,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	1.002.717.413,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.870.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		6.233.396,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	103.341.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		86.163.694,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.340.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		12.279.333,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	34.672.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				870 Laporan	827.180.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		865.040.990,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			5 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	663.364.977,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	1.426.750.809,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		4.831.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	199.774.977,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		235.295.511,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	459.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		1.186.623.768,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	-			10 Unit 1 Unit	118.537.950,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	443.019.788,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		85.112.105,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	78.417.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur Sipil Negara (ASN)		357.907.683,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2,	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**375.238.900,00**						**-**	**1.351.022.400,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD** **Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**375.238.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.351.022.400,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)* *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah* *Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*	-			45 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara 5 Dokumen 1 Dokumen 885 Usulan	313.577.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya	-	752.558.722,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	34.456.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		38.774.649,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	19.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		32.389.885,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				45 Berita Acara	21.952.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		31.773.820,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	76.560.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		248.895.624,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				885 Usulan	7.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		20.919.592,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)				5 Dokumen	153.508.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		379.805.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	-			1 Buku 1 Dokumen 42 Orang	37.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	-	387.953.916,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	13.610.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)		168.087.318,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				42 Orang	13.060.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)		89.137.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	10.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)		130.729.473,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Daerah]	**Persentase Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD per tahun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**375.238.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.351.022.400,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	-			2 Laporan 2 Laporan	24.231.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya	-	210.509.762,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	7.320.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		78.109.735,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	16.911.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		132.400.027,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3,	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.061.091.700,00**						**-**	**2.294.160.018,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.061.091.700,00**	-	-	-	-	-	-	**2.294.160.018,00**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Dokumen PerPencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,*	-			1 Laporan 1 Dokumen 11 Laporan 22 Laporan 11 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 6 Laporan	523.562.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya	-	545.073.888,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	34.960.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		29.282.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				22 Laporan	22.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		65.884.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				6 Laporan	17.710.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		36.602.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	13.910.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		21.961.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	27.310.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		29.282.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	17.480.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		117.128.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	16.180.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		58.559.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	373.562.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		186.373.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.061.091.700,00**	-	-	-	-	-	-	**2.294.160.018,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 3 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	287.934.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya	-	308.152.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	22.884.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		42.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	14.771.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		20.767.230,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	15.714.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		23.367.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	160.382.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		147.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	20.068.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		30.928.810,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	10.612.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		15.831.640,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	12.787.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		14.069.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	30.715.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		13.438.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.061.091.700,00**	-	-	-	-	-	-	**2.294.160.018,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan*	-			2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	249.595.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya	-	1.440.933.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	27.223.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		72.472.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	14.063.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		64.420.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	24.683.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		96.630.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	66.599.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		193.261.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	14.123.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		64.420.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	59.793.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		675.941.420,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	17.616.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		96.630.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	25.493.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya		177.156.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**392.080.000,00**							**1.285.423.700,00**	
1,	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**392.080.000,00**						-	**1.285.423.700,00**	
		[Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah]	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**392.080.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.285.423.700,00**	-
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah* *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan*	-			1 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan	310.121.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat	-	1.041.876.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat		808.129.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				2 Laporan	50.121.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat		222.746.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah														
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat		11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**392.080.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.285.423.700,00**	-
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah* *Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi*	-			1 Laporan 1 Laporan	81.959.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat	-	243.547.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat		195.147.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi														
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				1 Laporan	51.959.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat		48.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**19.118.014.677,00**							**21.884.781.962,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**19.118.014.677,00**							**21.884.781.962,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**19.118.014.677,00**							**21.884.781.962,00**	
1,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.624.027.477,00**						-	**19.673.560.322,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**16.624.027.477,00**	-	-	-	-	-	-	**19.673.560.322,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	10.200.800,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA,	-	-	10.406.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Dokumen	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA,	-		5.203.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.203.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	14.021.429.777,00			-	-	-	-	15.994.670.336,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	14.011.228.977,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.984.264.336,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.203.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.203.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 persen	1.208.284.900,00			-	-	-	-	1.290.816.604,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	51.502.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.030.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				140 Paket	173.862.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		182.105.701,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	70.739.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		104.060.401,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				55 Paket	179.190.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		208.641.104,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1837 Laporan	732.991.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		743.979.198,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 persen	1.102.912.000,00			-	-	-	-	1.956.222.762,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.203.020,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	230.812.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		161.501.742,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	867.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.789.518.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 persen	281.200.000,00			-	-	-	-	421.444.620,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	86.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		88.451.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	194.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		332.993.280,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2,	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.493.987.200,00**						**-**	**2.211.221.640,00**	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**13.46**	**9.03**	**11.94**	**12.23**	**2.493.987.200,00**	-	-	-	-	-	-	**2.211.221.640,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah*	-			100 persen	2.493.987.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	2.211.221.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	868.598.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		208.120.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	135.009.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		332.993.280,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	168.899.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		171.699.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	270.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		266.332.810,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	51.173.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		114.466.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	51.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		156.090.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				11 Obyek Pajak	384.028.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		286.166.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	180.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		114.466.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	78.165.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		125.913.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	48.373.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		114.466.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	203.999.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		206.039.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan]	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.493.987.200,00**	-	-	-	-	-	-	**2.211.221.640,00**	-
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	54.742.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		114.466.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**346.329.066.933,00**							**282.401.850.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**346.329.066.933,00**							**282.401.850.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**346.329.066.933,00**							**282.401.850.000,00**	
1,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**35.839.393.749,00**						-	**38.189.350.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**35.839.393.749,00**	-	-	-	-	-	-	**38.189.350.000,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	5.272.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur	-	5.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.081.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		1.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.190.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		4.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	33.279.992.023,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur	-	34.510.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50/14 Orang/bulan	33.269.492.023,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		34.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		5.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		5.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	1.571.741.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur	-	1.778.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.184.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	313.282.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		321.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	71.999.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		92.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	249.080.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		251.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	924.196.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	887.618.226,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur	-	1.625.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.110.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		4.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	219.908.226,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		221.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	663.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		1.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	94.770.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur	-	270.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.090.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	49.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2,	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**301.413.291.384,00**						**-**	**243.287.500.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola keuangan]	**Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah Persentase silpa terhadap APBD**	**100 2 40 58 95**	**0.48 100 34.15 40.28 87.87**	**100 1.64 48.22 49.27 80**	**100 2 40 50 85**	**301.413.291.384,00**	-	-	-	-	-	-	**243.287.500.000,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Derah*	-			100 %	610.388.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	950.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	71.996.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		137.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	72.303.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		135.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	8.591.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	10.361.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		36.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	28.997.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	72.433.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	111.292.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	197.951.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	10.897.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	25.564.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	-			100 %	299.967.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	558.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	10.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		49.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	14.187.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		33.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	8.133.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	7.965.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				5 Laporan	93.952.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		124.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	13.247.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		49.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	8.439.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		49.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	143.784.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		197.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	-			100 %	331.670.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	649.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	40.224.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		49.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	38.616.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	82.548.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	81.441.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	50.538.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	12.629.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	25.673.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	-			100 %	300.138.212.284,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	241.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	221.366.263.533,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		220.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	61.678.581.335,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		11.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	17.093.367.416,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		10.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*	-			100 %	33.053.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	33.053.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3,	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**9.076.381.800,00**						**-**	**925.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**5**	**6.88**	**5**	**5**	**9.076.381.800,00**	-	-	-	-	-	-	**925.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	9.076.381.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	925.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	32.926.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	14.671.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	11.762.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	10.716.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	122.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	191.182.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				30 Dokumen	8.619.709.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	13.670.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				5 Laporan	58.762.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		155.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**7.807.553.753,00**							**13.277.195.587,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.807.553.753,00**							**13.277.195.587,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**7.807.553.753,00**							**13.277.195.587,00**	
1,	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.695.619.253,00**						-	**3.000.292.414,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.695.619.253,00**	-	-	-	-	-	-	**3.000.292.414,00**	-
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD (Laporan)* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1/1 Dokumen 1/1 Dokumen 14/14 Orang/bulan Orang / bulan	4.570.992.487,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	-	2.944.277.975,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/14 Orang/bulan	4.570.992.487,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		2.944.277.975,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan*	-			2 Laporan 200 Orang 80 Paket 200 Orang	38.049.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				100 Orang	37.665.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	384.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			1 Dokumen 200 Laporan 9 Paket 7 Paket 3 Paket 10 Paket	291.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3.530.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	24.011.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	30.028.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	40.167.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	193.613.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	722.247.816,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	173.847.816,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	545.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			1 Unit 5 Unit 2 Unit 1 Unit	72.979.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	-	56.014.439,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.785.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		56.014.439,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	32.194.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2,	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**2.111.934.500,00**						**-**	**10.276.903.173,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian]	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya** **Persentase layanan administrasi kepegawaian** **Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik** **Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya**	**100** **25** **80**	**0**	**0**	**100** **25** **80**	**2.111.934.500,00**	-	-	-	-	-	-	**10.276.903.173,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Lembaga	587.054.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	-	2.261.125.718,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	525.494.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		2.050.534.105,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	61.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		210.591.613,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	-			1 Dokumen 2 Dokumen 700 Dokumen	595.369.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	-	1.016.474.567,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1500 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		225.649.107,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	590.269.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan		790.825.460,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah ASN Fungsional yang Dibina* *Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* *Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat* *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	-			1000 Orang 300 Orang 10 Orang 200 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen	727.442.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	-	5.040.470.369,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	111.674.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		262.632.606,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	86.808.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		270.454.013,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	469.352.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		4.399.202.145,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	59.608.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		108.181.605,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		-	-	-	-	-	-	**2.111.934.500,00**	-	-	-	-	-	-	**10.276.903.173,00**	-
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* *Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa* *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	-			3 Orang 200 Orang 60 Orang 1 Laporan 1 Dokumen 20 Dokumen 15 Laporan	202.068.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	-	1.958.832.519,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	54.622.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		1.874.246.307,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		[Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian]	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya** **Persentase layanan administrasi kepegawaian** **Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik** **Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya**	**100** **25** **80**	**0**	**0**	**100** **25** **80**	**2.111.934.500,00**	-	-	-	-	-	-	**10.276.903.173,00**	-
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				750 Orang	40.972.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		19.063.925,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	20.402.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		31.729.059,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	86.071.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		33.793.228,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		INSPEKTORAT						**12.877.206.295,00**							**17.629.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.877.206.295,00**							**17.629.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**12.877.206.295,00**							**17.629.000.000,00**	
1,	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.950.316.595,00**						**-**	**14.344.000.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**99.98**	**100**	**100**	**9.950.316.595,00**	-	-	-	-	-	-	**14.344.000.000,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 persen	12.399.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.199.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	6.199.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		8.000.000,00	I N S P E K T O

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	8.331.793.790,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	12.000.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65/14 Orang/bulan	8.331.793.790,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		12.000.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran*	-			100 persen	60.703.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	420.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	60.703.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		420.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	989.745.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	592.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		35.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	64.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		249.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	30.031.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		88.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	892.214.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 persen	452.639.205,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.027.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	177.839.205,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	271.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 persen	103.036.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	290.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	62.916.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		250.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**2.530.071.700,00**						**-**	**2.890.000.000,00**	
		[Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai PKPT** **Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat**	**100** **95**	**0**	**70**	**100** **70**	**2.530.071.700,00**	-	-	-	-	-	-	**2.890.000.000,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal*	-			100 persen	2.055.066.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.290.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	103.770.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		370.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				29 Laporan	422.055.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		280.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				36 Laporan	131.170.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		130.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				15 Laporan	196.546.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		240.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				85 Laporan	664.875.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		870.000.000,00	INSPEKTO
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	258.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.000.000,00	INSPEKTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	278.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		360.000.000,00	I N S P E K T O
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			100 persen	475.005.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	600.000.000,00	I N S P E K T O
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	475.005.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		600.000.000,00	INSPEKTORAT
3,	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**396.818.000,00**						**-**	**395.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	**Persentase PD dengan kategori AKIP minimal BB** **Persentase Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan ZI**	**100**	**0**	**27.6** **64.5**	**47.6** **64.4**	**396.818.000,00**	-	-	-	-	-	-	**395.000.000,00**	-
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi undefined*	-			100 persen undefined undefined	396.818.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	395.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				9 perangkat daerah	109.436.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		65.000.000,00	I N S P E K T O
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				29 perangkat daerah	81.852.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	I N S P E K T O
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	137.020.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		95.000.000,00	I N S P E K T O
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				11 perangkat daerah	68.510.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		180.000.000,00	INSPEKTO
		KECAMATAN RAMBAH						**3.858.642.488,00**							**3.755.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.858.642.488,00**							**3.755.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.858.642.488,00**							**3.755.700.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.309.924.488,00**						**-**	**3.256.900.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.309.924.488,00**	-	-	-	-	-	-	**3.256.900.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD* *umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 Laporan 12 Dokumen 50 orang/bulan	2.762.734.876,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.811.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.761.734.876,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.800.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		11.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			3 Dokumen 170 Laporan 4 paket 10 paket 3 paket 43 paket	125.557.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	284.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.001.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		3.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		63.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		93.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		62.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				197 Laporan	22.056.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		63.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			4 unit	260.473.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	24.300.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	159.408.360,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		4.200.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	101.065.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		20.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah*	-			1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	101.683.752,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	47.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40476 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		5.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				44 Laporan	46.483.752,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		42.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	52.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		0,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit 10 Unit	54.474.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	88.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.991.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		41.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	19.482.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		47.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10.886.000,00**						-	**19.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**100**	**60**	**100**	**100**	**10.886.000,00**	-	-	-	-	-	-	**19.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			1 Laporan	10.886.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	19.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	10.886.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		19.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**522.517.000,00**						-	**450.800.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rambah]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**50**	**100**	**100**	**522.517.000,00**	-	-	-	-	-	-	**450.800.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			1 Laporan	36.857.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat	-	94.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	36.857.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		94.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*	-			1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	485.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat	-	356.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	8.860.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		4.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang	Masyarakat		110.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	276.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		242.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15.315.000,00**						**-**	**29.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**0**	**100**	**100**	**15.315.000,00**	-	-	-	-	-	-	**29.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	-			1 Laporan	15.315.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat	-	29.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	15.315.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Masyarakat		29.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
		KECAMATAN TAMBUSAI						**3.516.227.083,00**							**4.054.242.356,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.516.227.083,00**							**4.054.242.356,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.516.227.083,00**							**4.054.242.356,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.772.320.083,00**						**-**	**3.385.063.356,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.772.320.083,00**	-	-	-	-	-	-	**3.385.063.356,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	2.534.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.623.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.436.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.082.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	865.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		541.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.469.192.583,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.580.708.456,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.466.708.583,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.578.646.456,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	865.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.031.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.618.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.031.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	128.492.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	284.712.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.995.500,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		5.694.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		120.202.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	37.496.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		84.216.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		47.581.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				192 Laporan	25.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		27.019.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	122.946.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	470.455.900,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		7.628.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	31.146.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		35.302.900,00	KECAMATAN TAMBUSAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	88.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		427.525.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	49.365.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	47.564.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.990.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		32.564.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		5.000.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	9.375.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		10.000.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**26.716.400,00**						**-**	**18.963.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tambusai]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**81.50**	**93.25**	**93.60**	**26.716.400,00**	-	-	-	-	-	-	**18.963.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	26.716.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	18.963.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	26.716.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		18.963.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**698.850.600,00**						-	**603.666.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambusai]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**698.850.600,00**	-	-	-	-	-	-	**603.666.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat*	-			100 Persen	95.477.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	77.495.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	95.477.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		77.495.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 Persen	603.373.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	526.171.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	6.722.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Tambusai Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		7.362.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	243.772.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Tambusai Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		277.890.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	352.879.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Tambusai Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		240.919.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**7.780.000,00**						-	**25.943.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tambusai]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**0**	**100**	**100**	**7.780.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25.943.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya urusan pemerintahan umum*	-			100 Persen	7.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	25.943.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	7.780.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		25.943.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**10.560.000,00**						**-**	**20.607.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tambusai]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**0**	**100**	**100**	**10.560.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.607.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	10.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	20.607.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	10.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		20.607.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
		KECAMATAN ROKAN IV KOTO						**3.331.809.973,00**							**3.201.441.260,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.331.809.973,00**							**3.201.441.260,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.331.809.973,00**							**3.201.441.260,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.796.311.973,00**						**-**	**2.789.147.260,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.796.311.973,00**	-	-	-	-	-	-	**2.789.147.260,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	1.596.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.623.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.058.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	538.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		541.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.425.622.773,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	2.148.724.019,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.422.887.573,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.145.955.019,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1.676.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.687.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	140.534.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	141.215.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.322.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		5.410.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	53.798.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		53.867.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.425.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		23.455.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	24.639.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		24.743.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				222 Laporan	33.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		33.740.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	156.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	427.854.241,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.425.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		16.228.241,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		409.201.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	72.337.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	69.731.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.077.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		19.120.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	44.800.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		44.987.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	8.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		5.624.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**30.199.600,00**						-	**40.488.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rokan IV Koto]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**83.03**	**93.25**	**93.60**	**30.199.600,00**	-	-	-	-	-	-	**40.488.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	30.199.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	40.488.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	30.199.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		40.488.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**475.798.400,00**						-	**333.566.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rokan IV Koto]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**475.798.400,00**	-	-	-	-	-	-	**333.566.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat*	-			100 Persen	121.895.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	33.280.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	121.895.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		33.280.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 Persen	353.903.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	300.286.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	22.902.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		5.624.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		224.933.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	131.001.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		69.729.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**11.500.000,00**						**-**	**15.746.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rokan IV Koto]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15.746.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya urusan pemerintahan umum*	-			100 Persen	11.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	15.746.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		15.746.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**18.000.000,00**						**-**	**22.494.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rokan IV Koto]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**18.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**22.494.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	18.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	22.494.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		22.494.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
		KECAMATAN KEPENUHAN						**3.852.489.346,00**							**4.488.029.023,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.852.489.346,00**							**4.488.029.023,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.852.489.346,00**							**4.488.029.023,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.167.699.346,00**						-	**3.680.655.023,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.167.699.346,00**	-	-	-	-	-	-	**3.680.655.023,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.380.283.676,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.634.800.672,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.380.283.676,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.634.800.672,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	529.776.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	504.041.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	86.328.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		88.331.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	253.890.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		257.892.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	150.818.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		157.818.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				298 Laporan	38.740.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		0,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	215.520.670,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	528.579.751,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		7.800.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.620.670,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		53.621.751,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	157.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		467.158.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	42.118.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	13.232.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.890.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		0,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	12.228.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		13.232.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**28.952.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kepenuhan]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**98.10**	**93.25**	**93.60**	**28.952.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	28.952.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	0,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	28.952.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN KEPENUHAN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**655.838.000,00**						**-**	**807.374.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**655.838.000,00**	-	-	-	-	-	-	**807.374.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	173.889.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	257.497.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	173.889.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		257.497.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			100 Persen	481.948.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	549.876.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	10.221.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		14.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		399.900.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	271.726.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		135.976.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN
		KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM						**3.463.210.965,00**							**4.325.867.078,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.463.210.965,00**							**4.325.867.078,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.463.210.965,00**							**4.325.867.078,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.429.774.565,00**						**-**	**3.333.140.078,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.429.774.565,00**	-	-	-	-	-	-	**3.333.140.078,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.149.956.965,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.027.536.078,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.144.603.365,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.022.904.078,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.676.900,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.316.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.676.900,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.316.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	138.604.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	350.031.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.020.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		6.326.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		66.843.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		122.086.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		73.896.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	35.084.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		80.880.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	106.203.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	913.635.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		8.084.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13.203.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		16.043.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		889.508.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	35.010.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	41.938.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.010.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		41.938.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**37.600.000,00**						**-**	**32.900.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kunto Darussalam]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**85.91**	**93.25**	**93.60**	**37.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**32.900.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	37.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	32.900.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	37.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		32.900.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**983.436.400,00**						-	**953.827.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**983.436.400,00**	-	-	-	-	-	-	**953.827.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	156.630.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	148.727.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	156.630.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		148.727.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			100 Persen	826.806.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	805.100.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	6.678.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		5.000.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		100.100.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	620.128.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		700.000.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.400.000,00**						-	**6.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kunto Darussalam]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	12.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	6.000.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	12.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		6.000.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
		KECAMATAN UJUNG BATU						**4.826.722.611,00**							**5.231.702.789,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.826.722.611,00**							**5.231.702.789,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.826.722.611,00**							**5.231.702.789,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.051.496.311,00**						**-**	**4.371.950.789,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.051.496.311,00**	-	-	-	-	-	-	**4.371.950.789,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.661.555.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	3.631.212.789,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.661.555.211,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		3.631.212.789,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	128.586.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	429.183.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.002.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		6.997.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		80.418.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		190.241.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		69.443.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				192 Laporan	25.084.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		82.084.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	194.344.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	256.626.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		8.653.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	67.144.500,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.633.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	124.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		207.340.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	67.010.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	54.929.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.010.600,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		43.261.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	32.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		11.668.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**32.818.700,00**						-	**61.801.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Ujung Batu]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**97.13**	**93.25**	**93.60**	**32.818.700,00**	-	-	-	-	-	-	**61.801.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	32.818.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	61.801.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	32.818.700,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		61.801.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**736.807.600,00**						-	**773.230.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ujung Batu]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**736.807.600,00**	-	-	-	-	-	-	**773.230.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	145.820.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	111.473.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	145.820.400,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		111.473.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			100 Persen	590.987.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	661.757.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	6.033.200,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		6.181.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		241.021.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	384.954.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		414.555.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.600.000,00**						**-**	**24.721.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Ujung Batu]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**24.721.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	5.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	24.721.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		24.721.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
		KECAMATAN KABUN						**2.408.877.873,00**							**2.436.493.460,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.408.877.873,00**							**2.436.493.460,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.408.877.873,00**							**2.436.493.460,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.214.706.073,00**						**-**	**2.387.808.460,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.214.706.073,00**	-	-	-	-	-	-	**2.387.808.460,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	2.564.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.623.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.338.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.082.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.023.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		541.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.874.025.573,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.028.512.460,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.871.970.373,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.027.430.460,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.109.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		541.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	945.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		541.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	133.348.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	93.018.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		3.246.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		24.320.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.498.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		21.637.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	34.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		15.146.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275 Laporan	35.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		28.669.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	159.475.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	244.640.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.501.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49.675.500,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		40.028.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	106.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		203.111.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	45.293.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	20.015.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.993.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		16.228.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		3.787.000,00	KECAMATAN KABUN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**38.977.800,00**						**-**	**10.819.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kabun]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**85.00**	**93.25**	**93.60**	**38.977.800,00**	-	-	-	-	-	-	**10.819.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	38.977.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	10.819.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	38.977.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		10.819.000,00	KECAMATAN KABUN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**133.774.000,00**						-	**21.637.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kabun]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**133.774.000,00**	-	-	-	-	-	-	**21.637.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	133.774.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	21.637.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	133.774.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		21.637.000,00	KECAMATAN KABUN
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**8.940.000,00**						-	**10.819.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kabun]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.940.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.819.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	8.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	10.819.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	8.940.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		10.819.000,00	KECAMATAN KABUN
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.480.000,00**						-	**5.410.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kabun]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.480.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.410.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	12.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	5.410.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	12.480.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		5.410.000,00	KECAMATAN KABUN
		KECAMATAN TANDUN						**1.899.670.299,00**							**2.016.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.899.670.299,00**							**2.016.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.899.670.299,00**							**2.016.800.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.692.814.299,00**						**-**	**1.835.800.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.692.814.299,00**	-	-	-	-	-	-	**1.835.800.000,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemanuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.443.652.864,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.400.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.443.652.864,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.400.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	130.664.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	230.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.986.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		9.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	24.972.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		64.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.520.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		55.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	34.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		66.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230 Laporan	32.186.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		36.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	84.730.635,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	179.300.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		5.500.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.930.635,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		29.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	52.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		144.800.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	33.766.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	26.500.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.766.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		26.500.000,00	KECAMATAN TANDUN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**38.146.000,00**						-	**56.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tandun]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**86.36**	**93.25**	**93.60**	**38.146.000,00**	-	-	-	-	-	-	**56.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	38.146.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	56.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	38.146.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		56.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**168.710.000,00**						-	**125.000.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tandun]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**168.710.000,00**	-	-	-	-	-	-	**125.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	168.710.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	125.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	168.710.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		125.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
		KECAMATAN RAMBAH SAMO						**1.930.757.557,00**							**2.338.164.886,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.930.757.557,00**							**2.338.164.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.930.757.557,00**							**2.338.164.886,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.791.136.557,00**						-	**2.226.855.886,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.791.136.557,00**	-	-	-	-	-	-	**2.226.855.886,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	2.195.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.784.970,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.701.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.189.980,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	494.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		594.990,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.511.598.657,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.701.303.930,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.510.558.857,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.700.113.950,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.039.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.189.980,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	112.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	198.815.100,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		7.188.500,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		71.214.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		48.241.600,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	34.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		34.914.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		37.257.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	129.162.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	276.662.986,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		4.444.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.962.900,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		21.418.986,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	106.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		250.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	35.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	48.288.900,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		31.896.700,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		16.392.200,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**12.644.000,00**						-	**15.391.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah Samo]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**88.00**	**93.25**	**93.60**	**12.644.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15.391.200,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	12.644.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	15.391.200,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12.644.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		15.391.200,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**102.827.000,00**						-	**56.053.800,00**	
		-	-	-	-	-	-	**102.827.000,00**	-	-	-	-	-	-	**56.053.800,00**	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	102.827.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	56.053.800,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga K emasyarakat an	102.827.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		56.053.800,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**19.950.000,00**						**-**	**24.585.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah Samo]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**19.950.000,00**	-	-	-	-	-	-	**24.585.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	19.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	24.585.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	19.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		24.585.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**4.200.000,00**						**-**	**15.279.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rambah Samo]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15.279.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	4.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	15.279.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		15.279.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
		KECAMATAN RAMBAH HILIR						**1.972.495.801,00**							**2.127.468.266,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.972.495.801,00**							**2.127.468.266,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.972.495.801,00**							**2.127.468.266,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.767.565.801,00**						**-**	**2.056.019.266,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.767.565.801,00**	-	-	-	-	-	-	**2.056.019.266,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	2.476.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.631.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	938.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.538.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		549.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.567.862.896,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.667.052.699,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.566.178.896,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.664.888.699,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	978.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	705.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	112.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	210.996.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		5.060.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		85.238.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		72.448.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	34.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		24.194.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		24.056.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	49.739.105,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	141.079.567,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		7.291.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.339.105,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		12.970.567,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		120.818.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	34.987.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	35.260.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.987.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		35.260.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**33.701.200,00**						-	**12.158.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**85.70**	**93.25**	**93.60**	**33.701.200,00**	-	-	-	-	-	-	**12.158.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	33.701.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	12.158.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	33.701.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		12.158.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**153.228.800,00**						-	**40.934.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**153.228.800,00**	-	-	-	-	-	-	**40.934.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	153.228.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	40.934.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	153.228.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		40.934.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**6.300.000,00**						-	**9.293.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah Hilir]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.300.000,00**	-	-	-	-	-	-	**9.293.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	6.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	9.293.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		9.293.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**11.700.000,00**						-	**9.064.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rambah Hilir]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.700.000,00**	-	-	-	-	-	-	**9.064.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	11.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	9.064.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		9.064.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
		KECAMATAN BANGUN PURBA						**1.434.847.015,00**							**1.731.249.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.434.847.015,00**							**1.731.249.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.434.847.015,00**							**1.731.249.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.236.780.415,00**						-	**1.640.882.000,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.236.780.415,00**	-	-	-	-	-	-	**1.640.882.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	2.004.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.828.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.298.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.220.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	705.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		608.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	986.754.383,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.234.170.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	984.750.383,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.231.738.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	705.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.216.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.298.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.216.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	92.435.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	95.362.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.106.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		3.647.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	22.160.200,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		30.338.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	26.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		24.811.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	28.768.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		18.283.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		18.283.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	128.150.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	281.564.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.482.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	17.750.700,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		12.156.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	107.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		266.926.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	27.436.332,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	27.958.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		24.311.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.016.332,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		3.647.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**18.549.600,00**						-	**54.698.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bangun Purba]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**79.81**	**93.25**	**93.60**	**18.549.600,00**	-	-	-	-	-	-	**54.698.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	18.549.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	54.698.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	18.549.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		54.698.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**162.727.000,00**						-	**18.283.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bangun Purba]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**162.727.000,00**	-	-	-	-	-	-	**18.283.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	162.727.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	18.283.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	162.727.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		18.283.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**7.430.000,00**						**-**	**11.308.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bangun Purba]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.430.000,00**	-	-	-	-	-	-	**11.308.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum*	-			100 Persen	7.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	11.308.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	7.430.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		11.308.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**9.360.000,00**						**-**	**6.078.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Bangun Purba]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.360.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.078.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	9.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	6.078.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		6.078.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
		KECAMATAN TAMBUSAI UTARA						**2.044.568.030,00**							**2.224.543.359,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.044.568.030,00**							**2.224.543.359,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.044.568.030,00**							**2.224.543.359,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.836.775.730,00**						**-**	**2.131.460.359,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.836.775.730,00**	-	-	-	-	-	-	**2.131.460.359,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	1.298.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.082.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.298.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.480.603.230,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	1.510.603.359,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.480.603.230,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.510.603.359,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	151.987.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	228.695.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.033.300,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.121.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	38.710.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		84.192.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	43.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		55.930.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	30.624.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		50.803.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				248 Laporan	37.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		35.649.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	167.885.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	337.805.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		2.705.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	35.285.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		21.589.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		313.511.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	35.001.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	53.275.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.001.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		53.275.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.041.800,00**						**-**	**22.789.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tambusai Utara]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**80.14**	**93.25**	**93.60**	**21.041.800,00**	-	-	-	-	-	-	**22.789.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	21.041.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	22.789.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	21.041.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		22.789.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**163.550.500,00**						**-**	**34.182.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambusai Utara]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**163.550.500,00**	-	-	-	-	-	-	**34.182.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	163.550.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	34.182.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	163.550.500,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		34.182.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.720.000,00**						**-**	**16.120.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tambusai Utara]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.720.000,00**	-	-	-	-	-	-	**16.120.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	10.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	16.120.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		16.120.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.480.000,00**						**-**	**19.992.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tambusai Utara]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.480.000,00**	-	-	-	-	-	-	**19.992.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	12.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	19.992.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	12.480.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		19.992.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
		KECAMATAN BONAI DARUSSALAM						**1.401.416.083,00**							**1.258.517.940,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.401.416.083,00**							**1.258.517.940,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.401.416.083,00**							**1.258.517.940,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.192.325.383,00**						**-**	**1.213.529.940,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.192.325.383,00**	-	-	-	-	-	-	**1.213.529.940,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	990.488.083,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	932.596.940,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	990.488.083,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		932.596.940,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	135.441.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	75.786.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.999.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		3.246.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	23.998.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		24.124.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		21.637.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	33.994.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		10.712.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				253 Laporan	37.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		16.067.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	31.402.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	186.277.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.501.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.002.500,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		10.819.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		173.957.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	34.993.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	18.870.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.993.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		18.870.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.269.000,00**						**-**	**11.247.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bonai Darussalam]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**76.95**	**93.25**	**93.60**	**21.269.000,00**	-	-	-	-	-	-	**11.247.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	21.269.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	11.247.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	21.269.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		11.247.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**162.146.700,00**							**16.870.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bonai Darussalam]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**162.146.700,00**	-	-	-	-	-	-	**16.870.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	162.146.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	16.870.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	162.146.700,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		16.870.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.075.000,00**							**11.247.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bonai Darussalam]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.075.000,00**	-	-	-	-	-	-	**11.247.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	10.075.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	11.247.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.075.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		11.247.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**15.600.000,00**							**5.624.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Bonai Darussalam]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.624.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	15.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	5.624.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		5.624.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM						**1.645.380.990,00**							**2.149.728.245,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.645.380.990,00**							**2.149.728.245,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.645.380.990,00**							**2.149.728.245,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.483.141.990,00**						-	**2.008.048.245,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.483.141.990,00**	-	-	-	-	-	-	**2.008.048.245,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	2.234.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	2.238.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.020.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.022.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.214.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.216.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.152.201.892,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.557.056.900,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.146.959.892,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.551.789.900,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.212.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.216.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.030.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		4.051.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	167.363.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	167.796.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.223.400,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.266.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	38.448.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		38.653.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	52.892.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		52.944.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	32.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		32.093.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				358 Laporan	41.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		41.840.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	121.320.098,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	240.852.345,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		3.600.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.821.345,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		9.821.345,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		227.431.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	40.021.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	40.105.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.186.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		35.244.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4.835.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		4.861.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**41.075.000,00**						**-**	**19.858.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Pagaran Tapah	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**85.10**	**93.25**	**93.60**	**41.075.000,00**	-	-	-	-	-	-	**19.858.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	41.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	19.858.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	41.075.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		19.858.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**63.930.000,00**						-	**64.446.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**63.930.000,00**	-	-	-	-	-	-	**64.446.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	63.930.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	64.446.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	63.930.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		64.446.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**23.284.000,00**						-	**23.353.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**23.284.000,00**	-	-	-	-	-	-	**23.353.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	23.284.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	23.353.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	23.284.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		23.353.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**33.950.000,00**						-	**34.023.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	**33.950.000,00**	-	-	-	-	-	-	**34.023.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	33.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	34.023.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	12.696.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		12.751.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33.950.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**34.023.000,00**	-
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	21.254.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		21.272.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
		KECAMATAN KEPENUHAN HULU						**1.957.463.626,00**							**12.187.682.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.957.463.626,00**							**12.187.682.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.957.463.626,00**							**12.187.682.900,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.753.429.826,00**						-	**12.125.368.900,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.753.429.826,00**	-	-	-	-	-	-	-	**12.125.368.900,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	3.213.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	1.623.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.564.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.082.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	649.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		541.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.553.147.676,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	11.589.963.900,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.551.303.676,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		11.587.799.900,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	865.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.082.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	978.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		1.082.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	84.379.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	107.983.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.643.750,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		5.410.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	26.838.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		32.253.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	24.630.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		27.046.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	23.268.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		16.228.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	8.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		27.046.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	90.537.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	404.162.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		2.597.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16.137.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		8.565.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	71.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		393.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	22.152.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur	-	21.637.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.152.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur		21.637.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**13.403.000,00**						-	**10.817.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kepenuhan Hulu]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**84.50**	**93.25**	**93.60**	**13.403.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.817.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	13.403.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	10.817.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	13.403.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		10.817.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**173.812.000,00**						**-**	**29.859.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan Hulu]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**173.812.000,00**	-	-	-	-	-	-	**29.859.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	173.812.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	29.859.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	173.812.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		29.859.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**7.458.800,00**						**-**	**10.819.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kepenuhan Hulu]	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.458.800,00**	-	-	-	-	-	-	**10.819.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	7.458.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	10.819.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	7.458.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		10.819.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**9.360.000,00**						**-**	**10.819.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan Hulu]	**Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.360.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.819.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	9.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	10.819.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		10.819.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
		KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO						**1.978.096.188,00**							**1.501.371.716,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.978.096.188,00**							**1.501.371.716,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.978.096.188,00**							**1.501.371.716,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.815.209.988,00**						**-**	**1.446.247.716,00**	
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.815.209.988,00**	-	-	-	-	-	-	**1.446.247.716,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	2.325.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	2.164.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.346.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	978.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.568.215.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	916.367.716,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.565.150.988,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		913.739.316,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.652.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.082.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.412.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		1.546.400,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	125.370.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	166.598.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		5.397.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		47.247.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.470.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		45.427.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	34.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		31.872.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				186 Laporan	27.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		36.655.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	74.397.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	307.436.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		3.287.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18.597.400,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		9.548.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	52.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		294.601.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	44.900.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-	-	53.682.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.947.600,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		28.458.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	4.753.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		10.164.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	7.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	-		15.060.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**27.191.200,00**						-	**11.446.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Pendalian IV Koto]	**Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik**	**95.00**	**83.08**	**93.25**	**93.60**	**27.191.200,00**	-	-	-	-	-	-	**11.446.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan*	-			100 Persen	27.191.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	11.446.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	27.191.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		11.446.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**135.695.000,00**						-	**43.678.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**135.695.000,00**	-	-	-	-	-	-	**43.678.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-			100 Persen	135.695.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik	-	43.678.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	135.695.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis	Aparatur dan Publik		43.678.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**9.806.883.964,00**							**10.531.365.550,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**9.806.883.964,00**							**10.531.365.550,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**9.806.883.964,00**							**10.531.365.550,00**	
1,	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.678.504.464,00**						-	**3.714.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	**Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.678.504.464,00**	-	-	-	-	-	-	**3.714.700.000,00**	-
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.119.753.364,00			-	-	-	-	2.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.119.753.364,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	302.025.800,00			-	-	-	-	345.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	3.475.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				114 Paket	23.988.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	29.964.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	39.406.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	205.192.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.205.500,00			-	-	-	-	312.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.205.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	159.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.519.800,00			-	-	-	-	257.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.484.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	31.035.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		191.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**877.047.000,00**						-	**963.333.110,00**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**877.047.000,00**	-	-	-	-	-	-	**963.333.110,00**	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya kebijakan tentang ideologi,wawasan kebangsaan dan kararkter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu*	-			160 orang	877.047.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Meningkatkan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	-	963.333.110,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	120.593.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Meningkatkan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan		113.333.110,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				30 Orang	756.454.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Meningkatkan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan		850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3.140.899.000,00**						-	**3.226.666.220,00**	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.140.899.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.226.666.220,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Tersusunnya kebijakan parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan bantuan keuangan kepada partai politik*	-			10 parpol	3.140.899.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Partai Politik dan masyarakat	-	3.226.666.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				11 Dokumen	3.140.899.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Partai Politik dan masyarakat		3.226.666.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**169.002.000,00**						-	**175.000.000,00**	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**25**	**100**	**100**	**169.002.000,00**	-	-	-	-	-	-	**175.000.000,00**	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	169.002.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	MAsyarakat	-	175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	169.002.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	MAsyarakat		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**40.000.000,00**						-	**125.000.000,00**	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**40.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**125.000.000,00**	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase penanganan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	-			16 kecamatan	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Masyarakat dan Ormas	-	125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15 Orang	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Masyarakat dan Ormas		125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6,	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**2.901.431.500,00**						-	**2.326.666.220,00**	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.901.431.500,00**	-	-	-	-	-	-	**2.326.666.220,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	2.901.431.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Masyarakat	-	2.326.666.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Masyarakat		226.666.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 1 Laporan	2.452.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Masyarakat		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	2.897.229.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif	Masyarakat		1.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**1.984.437.321.509,00**							**1.507.220.485.818,56**	

Lebih lengkap mengenai indikator kinerja serta target kinerja untuk masing-masig program prioritas diatas dapat dilihat pada lampiran matrik Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026.

Selain program prioritas, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah, terdapat juga proporsi anggaran urusan pelayanan mandatory dan lainnya, diantaranya adalah Proporsi Belanja SPM, Tematik Stunting, Kemiskinan Ekstrim, Pendidikan dan Pelatihan ASN dan Penanganan Pandemi *Covid-19* serta Penanganan Stunting di Daerah, Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Proporsi Belanja SPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NO	ABJAD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.769.750,00
2	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000,00
3	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	261.745.000,00
4	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.769.750,00
5	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	33.027.000,00
6	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	89.769.750,00
7	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.530.000.000,00
8	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.645.000.000,00
9	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000,00
10	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.769.750,00
11	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	940.000.000,00
12	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	635.000.000,00
13	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.840.000.000,00
14	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.510.001.000,00
15	A	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000,00
16	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	83.769.750,00

NO	ABJAD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
						Kapasitas Bidang Pendidikan	
17	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8.769.750,00
18	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.769.750,00
19	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.543.750,00
20	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8.769.750,00
21	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8.769.750,00
22	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.769.750,00
23	A	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	8.769.750,00
24	A	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8.769.750,00
25	A	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.769.750,00
26	A	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	8.769.750,00
27	A	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	8.769.750,00
28	A	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	220.939.500,00
29	A	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	8.769.750,00
30	A	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	8.769.750,00
31	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.769.750,00
32	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	8.769.750,00
33	A	SPM Bidang	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan	214.338.000,00

NO	ABJAD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Pendidikan		dan Olah Raga		Kreativitas Siswa	
34	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8.769.750,00
35	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	951.190.000,00
36	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	8.769.750,00
37	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.769.750,00
38	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	8.769.750,00
39	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8.769.750,00
40	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.760.000,00
41	A	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	8.769.750,00
42	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	437.120.000,00
43	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.118.800,00
44	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.739.450.000,00
45	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.500.000,00
46	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	804.905.000,00
47	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	256.581.820,00

NO	ABJAD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
48	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.575.000,00
49	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.550.000,00
50	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.498.000,00
51	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	412.437.200,00
52	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.100.000,00
53	B	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.387.558.000,00
54	C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	39.263.200,00
55	C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.951.728.899,00
56	D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.712.400,00
57	D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	167.533.400,00
58	D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.827.600,00
59	D	SPM Bidang	Penyediaan dan rehabilitasi	Dinas Perumahan dan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	9.154.000,00

NO	ABJAD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Kawasan Pemukiman	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Akibat Bencana	
60	D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	8.939.600,00
61	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	109.186.500,00
62	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	160.362.000,00
63	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	128.187.200,00
64	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00
65	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	109.997.400,00
66	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	570.000.880,00
67	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	353.256.050,00
68	E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.013.600,00
69	F	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	46.375.000,00

NO	ABJAD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
70	F	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	11.885.000,00
71	F	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	43.200.000,00
72	F	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.162.000,00
73	F	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	14.000.000,00
74	F	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	58.455.500,00
75	F	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	3.500.000,00
TOTAL							25.535.922.049,00

Tabel 5.4
Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif dalam Penanganan stunting
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
1	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**		**8.744.725.700,00**
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	116.079.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	8.769.750,00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.151.300.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	220.939.500,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.527.200,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	123.110.250,00
2	**Dinas Kesehatan**		**141.021.564.236,00**
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	233.668.800,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas	3.467.564.200,00
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	85.526.555.416,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.196.228.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	73.062.000,00
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	248.973.000,00
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.560.478.200,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.343.127.600,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.498.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	412.437.200,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.091.682.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.100.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.387.558.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.627.944.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	804.905.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	256.581.820,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	62.140.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	923.593.000,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.547.024.000,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	203.645.000,00
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.596.000,00
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	827.203.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
3	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**		**13.509.671.299,00**
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	39.263.200,00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.960.728.899,00
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	11.505.000.000,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.679.200,00
4	**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**118.631.650,00**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.904.150,00
		Penyediaan Permakanan	91.727.500,00
5	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**		**515.446.850,00**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	48.179.250,00
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	312.057.000,00
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	61.738.400,00
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53.697.600,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.558.000,00
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	38.216.600,00
6	**Dinas Lingkungan Hidup**		**4.978.764.270,00**
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.895.929.300,00
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.401.812.190,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.676.173.780,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.849.000,00
7	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**3.306.325.000,00**
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	150.000.000,00
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	927.000.000,00
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	87.000.000,00
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.112.400.000,00
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	845.070.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.855.000,00
8	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		**706.433.100,00**
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.610.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.480.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.450.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21.952.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	373.562.000,00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	153.508.600,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.310.000,00
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	76.560.500,00
Grand Total			**172.901.562.105,00**

Tabel 5.5
Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
1	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**				**121.333.349.750,00**	**374.367.000,00**	**121.707.716.750,00**
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak Langsung		26.309.250,00		26.309.250,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penunjang		116.079.000,00		116.079.000,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Penunjang		26.309.250,00		26.309.250,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tidak Langsung		200.000.000,00		200.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tidak Langsung		2.470.000.000,00		2.470.000.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tidak Langsung		100.000.000,00		100.000.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung		2.280.000.000,00		2.280.000.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Tidak Langsung		26.309.250,00		26.309.250,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Langsung		214.338.000,00		214.338.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Penunjang		17.539.500,00		17.539.500,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak Langsung		400.000.000,00		400.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Langsung		2.840.000.000,00		2.840.000.000,00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tidak Langsung		8.151.300.000,00		8.151.300.000,00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tidak Langsung		2.565.900.000,00		2.565.900.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tidak Langsung		62.464.400.000,00		62.464.400.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tidak Langsung		30.559.700.000,00		30.559.700.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Penunjang		26.309.250,00		26.309.250,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Langsung		261.745.000,00		261.745.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Langsung		5.510.001.000,00		5.510.001.000,00
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penunjang			374.367.000,00	374.367.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Tidak Langsung		2.154.000.000,00		2.154.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tidak Langsung		800.000.000,00		800.000.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Penunjang		123.110.250,00		123.110.250,00
2	**Dinas Kesehatan**			**827.203.000,00**	**204.852.633.569,00**	**248.973.000,00**	**205.928.809.569,00**
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Tidak Langsung		233.668.800,00		233.668.800,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Penunjang		62.906.400,00		62.906.400,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penunjang		2.196.228.000,00		2.196.228.000,00
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Penunjang			248.973.000,00	248.973.000,00
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tidak Langsung		3.560.478.200,00		3.560.478.200,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Penunjang		33.343.127.600,00		33.343.127.600,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penunjang		19.110.000,00		19.110.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Langsung		14.498.000,00		14.498.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Langsung		412.437.200,00		412.437.200,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penunjang		4.091.682.000,00		4.091.682.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Langsung		60.100.000,00		60.100.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Langsung		1.387.558.000,00		1.387.558.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penunjang		1.627.944.000,00		1.627.944.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Langsung		437.120.000,00		437.120.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Langsung		200.118.800,00		200.118.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Langsung		1.739.450.000,00		1.739.450.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Langsung		14.500.000,00		14.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Langsung		804.905.000,00		804.905.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		pada Usia Pendidikan Dasar					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Langsung		256.581.820,00		256.581.820,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Langsung		14.575.000,00		14.575.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Langsung		14.550.000,00		14.550.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Penunjang		62.140.000,00		62.140.000,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Penunjang		1.547.024.000,00		1.547.024.000,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Penunjang		203.645.000,00		203.645.000,00
		Pengembangan Puskesmas	Tidak Langsung		504.718.000,00		504.718.000,00
		Pengembangan Rumah Sakit	Tidak Langsung		149.826.853.149,00		149.826.853.149,00
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penunjang		162.756.000,00		162.756.000,00
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penunjang		152.596.000,00		152.596.000,00
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penunjang	827.203.000,00			827.203.000,00
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tidak Langsung		101.362.600,00		101.362.600,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tidak Langsung		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**53.598.563.540,0**		**185.570.860,00**	**53.784.134.400,00**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
				0			
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Langsung			91.843.800,00	91.843.800,00
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Penunjang	79.420.000,00			79.420.000,00
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Tidak Langsung	1.427.018.540,00			1.427.018.540,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak Langsung	600.000.000,00			600.000.000,00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Tidak Langsung	500.000.000,00			500.000.000,00
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Penunjang	166.774.000,00			166.774.000,00
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Penunjang	72.000.000,00			72.000.000,00
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Penunjang	37.300.000,00			37.300.000,00
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Langsung			93.727.060,00	93.727.060,00
		Pembangunan Jalan	Tidak Langsung	3.150.000.000,00			3.150.000.000,00
		Pembangunan Jembatan	Tidak Langsung	6.100.000.000,00			6.100.000.000,00
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tidak Langsung	3.515.600.000,00			3.515.600.000,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Tidak Langsung	9.840.000.000,00			9.840.000.000,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Tidak Langsung	9.250.000.000,00			9.250.000.000,00
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tidak Langsung	200.000.000,00			200.000.000,00
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penunjang	54.521.000,00			54.521.000,00
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Tidak Langsung	600.000.000,00			600.000.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penunjang	98.450.000,00			98.450.000,00
		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Tidak Langsung	1.528.975.000,00			1.528.975.000,00
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Penunjang	50.000.000,00			50.000.000,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Penunjang	300.000.000,00			300.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penunjang	700.000.000,00			700.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penunjang	300.000.000,00			300.000.000,00
		Rehabilitasi Embung	Tidak Langsung	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00
		Rehabilitasi Jalan	Tidak Langsung	6.928.505.000,00			6.928.505.000,00
		Rehabilitasi Jembatan	Tidak Langsung	500.000.000,00			500.000.000,00
		Rekonstruksi Jalan	Tidak Langsung	6.000.000.000,00			6.000.000.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tidak Langsung	600.000.000,00			600.000.000,00
4	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**			**12.828.738.299,00**	**194.227.400,00**		**13.022.965.699,00**
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tidak Langsung	39.263.200,00			39.263.200,00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tidak Langsung	1.951.728.899,00			1.951.728.899,00
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Langsung		167.533.400,00		167.533.400,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Langsung	395.932.800,00			395.932.800,00
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Langsung	191.308.800,00			191.308.800,00
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tidak Langsung	10.100.000.000,00			10.100.000.000,00
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penunjang		8.827.600,00		8.827.600,00
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penunjang		8.712.400,00		8.712.400,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Penunjang		9.154.000,00		9.154.000,00
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Langsung	150.504.600,00			150.504.600,00
5	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**			**478.171.800,00**	**570.000.880,00**		**1.048.172.680,00**
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tidak Langsung	210.140.000,00			210.140.000,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Penunjang	268.031.800,00			268.031.800,00
		Pemadaman dan Pengendalian	Penunjang		570.000.880,00		570.000.880,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				**3.070.513.676,00**		**3.070.513.676,00**
		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Penunjang		30.000.000,00		30.000.000,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tidak Langsung		160.362.000,00		160.362.000,00
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		2.402.774.276,00		2.402.774.276,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		128.187.200,00		128.187.200,00
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tidak Langsung		80.006.300,00		80.006.300,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Langsung		50.000.000,00		50.000.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penunjang		109.997.400,00		109.997.400,00
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Tidak Langsung		109.186.500,00		109.186.500,00
7	**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**108.730.900,00**	**1.001.536.200,00**	**173.724.150,00**	**1.283.991.250,00**
		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		16.482.000,00		16.482.000,00
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	91.670.000,00			91.670.000,00
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan	Tidak		39.150.000,00		39.150.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Langsung				
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Langsung			4.500.000,00	4.500.000,00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Langsung		187.908.000,00		187.908.000,00
		Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Langsung		78.108.800,00		78.108.800,00
		Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Langsung			142.320.000,00	142.320.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Penunjang	10.810.900,00			10.810.900,00
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tidak Langsung	6.250.000,00			6.250.000,00
		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		100.180.800,00		100.180.800,00
		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		16.440.000,00		16.440.000,00
		layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		2.700.000,00		2.700.000,00
		layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		810.000,00		810.000,00
		Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		13.500.000,00		13.500.000,00
		Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan	Tidak Langsung		1.500.000,00		1.500.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Tingkat Kabupaten/Kota					
		layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		90.000.000,00		90.000.000,00
		layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		18.000.000,00		18.000.000,00
		layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		39.500.000,00		39.500.000,00
		layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		700.000,00		700.000,00
		layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		3.500.000,00		3.500.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Langsung		43.200.000,00		43.200.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung		22.162.000,00		22.162.000,00
		pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		86.347.000,00		86.347.000,00
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Langsung			26.904.150,00	26.904.150,00
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Langsung		52.876.500,00		52.876.500,00
		Penyediaan Alat Bantu	Langsung		14.000.000,00		14.000.000,00
		Penyediaan Makanan	Langsung		46.375.000,00		46.375.000,00
		Penyediaan Permakanan	Langsung		91.727.500,00		91.727.500,00
		Penyediaan Sandang	Langsung		15.385.000,00		15.385.000,00
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Langsung		20.983.600,00		20.983.600,00
8	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**				**418.254.200,00**	**1.140.854.920,00**	**1.559.109.120,00**
		Pelaksanaan Pengadaan,	Penunjang		82.000.000,00		82.000.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penunjang			48.179.250,00	48.179.250,00
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Langsung			312.057.000,00	312.057.000,00
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tidak Langsung		61.738.400,00		61.738.400,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung			532.645.470,00	532.645.470,00
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Penunjang		129.510.000,00		129.510.000,00
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penunjang		53.697.600,00		53.697.600,00
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung			247.973.200,00	247.973.200,00
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penunjang		49.848.200,00		49.848.200,00
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Penunjang		41.460.000,00		41.460.000,00
9	**Dinas Lingkungan Hidup**			**4.973.915.270,00**			**4.973.915.270,00**
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Tidak Langsung	1.895.929.300,00			1.895.929.300,00
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Tidak Langsung	1.401.812.190,00			1.401.812.190,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	1.676.173.780,00			1.676.173.780,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
10	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**576.055.560,00**		**576.055.560,00**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Penunjang		576.055.560,00		576.055.560,00
11	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**					**535.839.400,00**	**535.839.400,00**
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tidak Langsung			535.839.400,00	535.839.400,00
12	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**1.152.870.000,00**		**1.152.870.000,00**
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Tidak Langsung		150.000.000,00		150.000.000,00
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tidak Langsung		87.000.000,00		87.000.000,00
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Penunjang		70.800.000,00		70.800.000,00
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tidak Langsung		845.070.000,00		845.070.000,00
13	**Dinas Perhubungan**			**11.351.786.670,00**			**11.351.786.670,00**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Penunjang	11.988.000,00			11.988.000,00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	48.964.500,00			48.964.500,00
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	9.443.588.920,00			9.443.588.920,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tidak Langsung	1.836.640.000,00			1.836.640.000,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Tidak	10.605.250,00			10.605.250,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Langsung				
14	**Dinas Komunikasi dan Informatika**			**1.615.131.000,00**			**1.615.131.000,00**
		Penyediaan Akses Internet	Tidak Langsung	1.454.000.000,00			1.454.000.000,00
		Penyusunan Konten	Penunjang	161.131.000,00			161.131.000,00
15	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja**				**150.796.800,00**	**669.203.200,00**	**820.000.000,00**
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung			42.191.800,00	42.191.800,00
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Langsung		150.796.800,00		150.796.800,00
		Pengembangan Usaha Mikro	Tidak Langsung			220.000.000,00	220.000.000,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Tidak Langsung			20.000.000,00	20.000.000,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Tidak Langsung			82.410.000,00	82.410.000,00
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung			9.601.400,00	9.601.400,00
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Langsung			295.000.000,00	295.000.000,00
16	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**					**872.028.000,00**	**872.028.000,00**
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita	Tidak			60.000.000,00	60.000.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Langsung				
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tidak Langsung			300.000.000,00	300.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Tidak Langsung			412.028.000,00	412.028.000,00
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penunjang			100.000.000,00	100.000.000,00
17	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**			**83.846.000,00**			**83.846.000,00**
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Tidak Langsung	58.582.000,00			58.582.000,00
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Tidak Langsung	25.264.000,00			25.264.000,00
18	**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**			**150.000.000,00**		**110.570.000,00**	**260.570.000,00**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tidak Langsung			110.570.000,00	110.570.000,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tidak Langsung	150.000.000,00			150.000.000,00
19	**Dinas Peternakan dan Perkebunan**			**2.073.250.000,00**		**1.084.045.000,00**	**3.157.295.000,00**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tidak Langsung	2.073.250.000,00			2.073.250.000,00
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tidak Langsung			162.830.000,00	162.830.000,00
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tidak Langsung			838.325.000,00	838.325.000,00
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tidak Langsung			82.890.000,00	82.890.000,00
20	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**225.998.750,00**	**225.998.750,00**
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Tidak Langsung			225.998.750,00	225.998.750,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Kabupaten/Kota					
21	**Sekretariat Daerah**					**207.774.800,00**	**207.774.800,00**
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Penunjang			81.206.000,00	81.206.000,00
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Penunjang			110.400.800,00	110.400.800,00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Penunjang			16.168.000,00	16.168.000,00
22	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**				**221.366.263.533,00**		**221.366.263.533,00**
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tidak Langsung		221.366.263.533,00		221.366.263.533,00
23	**Kecamatan Rambah**			**245.717.000,00**		**276.800.000,00**	**522.517.000,00**
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tidak Langsung	200.000.000,00			200.000.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tidak Langsung			276.800.000,00	276.800.000,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	36.857.000,00			36.857.000,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tidak Langsung	8.860.000,00			8.860.000,00
24	**Kecamatan Tambusai**			**345.971.600,00**		**352.879.000,00**	**698.850.600,00**
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tidak Langsung	243.772.000,00			243.772.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tidak Langsung			352.879.000,00	352.879.000,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	95.477.000,00			95.477.000,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tidak Langsung	6.722.600,00			6.722.600,00
25	**Kecamatan Rokan IV Koto**			**344.797.000,00**		**131.001.400,00**	**475.798.400,00**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tidak Langsung	200.000.000,00			200.000.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tidak Langsung			131.001.400,00	131.001.400,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	121.895.000,00			121.895.000,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tidak Langsung	22.902.000,00			22.902.000,00
26	**Kecamatan Kepenuhan**			**384.111.200,00**		**271.726.800,00**	**655.838.000,00**
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tidak Langsung	200.000.000,00			200.000.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tidak Langsung			271.726.800,00	271.726.800,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	173.889.600,00			173.889.600,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tidak Langsung	10.221.600,00			10.221.600,00
27	**Kecamatan Kunto Darussalam**			**363.308.000,00**		**620.128.400,00**	**983.436.400,00**
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tidak Langsung	200.000.000,00			200.000.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tidak Langsung			620.128.400,00	620.128.400,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	156.630.000,00			156.630.000,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tidak Langsung	6.678.000,00			6.678.000,00
28	**Kecamatan Ujung Batu**			**351.853.600,00**		**384.954.000,00**	**736.807.600,00**
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tidak Langsung	200.000.000,00			200.000.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat di	Tidak			384.954.000,00	384.954.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Kelurahan	Langsung				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	145.820.400,00			145.820.400,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tidak Langsung	6.033.200,00			6.033.200,00
29	**Kecamatan Kabun**			**133.774.000,00**			**133.774.000,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	133.774.000,00			133.774.000,00
30	**Kecamatan Tandun**			**168.710.000,00**			**168.710.000,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	168.710.000,00			168.710.000,00
31	**Kecamatan Rambah Hilir**			**153.228.800,00**			**153.228.800,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	153.228.800,00			153.228.800,00
32	**Kecamatan Bangun Purba**			**162.727.000,00**			**162.727.000,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	162.727.000,00			162.727.000,00
33	**Kecamatan Tambusai Utara**			**163.550.500,00**			**163.550.500,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	163.550.500,00			163.550.500,00
34	**Kecamatan Bonai Darussalam**			**162.146.700,00**			**162.146.700,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	162.146.700,00			162.146.700,00
35	**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**			**63.930.000,00**			**63.930.000,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	63.930.000,00			63.930.000,00
36	**Kecamatan Kepenuhan Hulu**			**173.812.000,00**			**173.812.000,00**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU			
				Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	TOTAL
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	173.812.000,00			173.812.000,00
37	**Kecamatan Pendalian IV Koto**			**135.695.000,00**			**135.695.000,00**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penunjang	135.695.000,00			135.695.000,00
Grand Total				**91.442.668.879,00**	**554.686.501.568,00**	**7.866.438.680,00**	**653.995.609.127,00**

Tabel 5.6 *Proporsi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026*

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
1	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**				**127.441.763.250,00**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			122.860.397.250,00
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		8.852.912.250,00
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8.769.750,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		67.964.629.750,00
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	83.769.750,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		43.435.158.500,00
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8.769.750,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.431.366.000,00
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		1.799.999.000,00
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1.650.000.000,00
				Seleksi Atlet Daerah	149.999.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		257.000.000,00
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	57.000.000,00
				Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	200.000.000,00
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		374.367.000,00
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	374.367.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			500.000.000,00
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		500.000.000,00
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			1.650.000.000,00
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		1.650.000.000,00
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1.650.000.000,00
2	**Dinas Kesehatan**				**73.062.000,00**
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			73.062.000,00
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		73.062.000,00
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	73.062.000,00
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**185.570.860,00**
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			185.570.860,00
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		185.570.860,00
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	91.843.800,00

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
				Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	93.727.060,00
4	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**				**369.726.450,00**
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			369.726.450,00
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		353.256.050,00
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	353.256.050,00
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		16.470.400,00
				Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.470.400,00
5	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja**				**20.000.000,00**
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			20.000.000,00
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000,00
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	20.000.000,00
6	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**				**73.500.000,00**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			73.500.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		73.500.000,00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.500.000,00

Tabel 5.7
Proporsi Anggaran Subkegiatan Mendukung Prioritas Nasional
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			3.800.234.500,00
		Dinas Peternakan dan Perkebunan		3.178.045.000,00
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.073.250.000,00
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	162.830.000,00
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	838.325.000,00
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	82.890.000,00
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20.750.000,00
		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		622.189.500,00
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	110.570.000,00
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	361.619.500,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	150.000.000,00
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			10.157.602.569,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		5.175.740.453,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.116.000,00
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.000.000,00
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	48.179.250,00
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	312.057.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.458.850,00
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	61.738.400,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.010.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.242.139.133,00
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	129.510.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.971.820,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.200.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.450.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.400.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.400.000,00
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53.697.600,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.846.400,00
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	247.973.200,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.510.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.558.000,00
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	49.848.200,00
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	38.216.600,00
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	41.460.000,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		4.762.435.816,00
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	237.769.500,00
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60.000.000,00
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.969.400,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.576.924.366,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.658.400,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	796.200.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.114.400,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.996.750,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.304.000,00
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00
		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		219.426.300,00
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	78.108.800,00
			Pemberian Layanan Kedaruratan	43.200.000,00
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.162.000,00
			Penyediaan Alat Bantu	14.000.000,00
			Penyediaan Permakanan	58.455.500,00
			Penyediaan Sandang	3.500.000,00
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			415.686.240.930,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		335.681.100,00
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	160.362.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.882.600,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.072.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.157.500,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.462.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.745.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		11.135.617.261,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.880.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.682.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.700.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.980.589.667,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.989.044,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.800.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.320.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.950.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.845.750,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.279.568.800,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.292.000,00
		Dinas Kesehatan		336.450.312.819,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.423.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00
			Operasional Pelayanan Puskesmas	3.467.564.200,00
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	62.906.400,00
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.196.228.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	73.062.000,00
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	248.973.000,00
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.560.478.200,00
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	699.190.000,00
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.343.127.600,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	19.110.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.498.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	412.437.200,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.091.682.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.100.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.387.558.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.627.944.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	437.120.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.118.800,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.739.450.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.500.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	804.905.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	256.581.820,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.575.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.550.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	62.140.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	923.593.000,00
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	203.645.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengembangan Rumah Sakit	149.826.853.149,00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	162.756.000,00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.596.000,00
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	827.203.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.971.650,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	101.362.600,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	123.085.220.465,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.169.980.685,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.893.680.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.115.500,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.998.250,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.909.300,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.706.000,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.800.000.000,00
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		67.764.629.750,00
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	83.769.750,00
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.769.750,00
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	89.769.750,00
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	8.769.750,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.530.000.000,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.645.000.000,00
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8.769.750,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.769.750,00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	214.338.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8.769.750,00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.464.400.000,00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	951.190.000,00
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	8.769.750,00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	61.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000,00
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.543.750,00
4	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			2.410.490.050,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		238.184.600,00
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	128.187.200,00
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	109.997.400,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		2.162.230.450,00
			Pelindungan Cagar Budaya	72.000.000,00
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	900.000.000,00
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	417.515.250,00
			Pengembangan Cagar Budaya	360.687.200,00
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	412.028.000,00
		Kecamatan Bonai Darussalam		10.075.000,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.075.000,00
5	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			101.003.813.707,00
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		7.807.553.753,00
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	61.560.000,00
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	525.494.000,00
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	469.352.000,00
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.622.400,00
			Pembinaan Disiplin ASN	20.402.800,00
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	59.608.000,00
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	37.665.000,00
			Pengelolaan Assessment Center	86.808.800,00
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5.100.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	86.071.000,00
			Pengelolaan Promosi ASN	590.269.300,00
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	40.972.200,00
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	111.674.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.028.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.167.600,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.570.992.487,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.847.816,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.400.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.785.550,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.194.400,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.530.400,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.011.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.613.000,00
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	384.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		313.577.100,00
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21.952.000,00
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	34.456.000,00
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	153.508.600,00
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.300.000,00
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	76.560.500,00
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	7.800.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika		9.264.573.537,00
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	113.750.000,00
			Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.791.000,00
			Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	475.272.000,00
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	44.164.000,00
			Pelayanan Informasi Publik	86.377.000,00
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	155.560.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Penyediaan Akses Internet	1.454.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.355.879.962,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.010.575,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.000.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.183.000,00
			Penyusunan Konten	161.131.000,00
			Relasi Media	2.503.955.000,00
		Kecamatan Bangun Purba		448.092.632,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.360.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	705.600,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.549.600,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.430.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.016.332,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	162.727.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.400.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.768.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.750.700,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.400.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.420.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.106.800,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.160.200,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.298.400,00
		Kecamatan Bonai Darussalam		1.391.341.083,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.600.000,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	21.269.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	162.146.700,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.500.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.994.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	990.488.083,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.002.500,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.400.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.993.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.800,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.998.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.950.000,00
		Kecamatan Kabun		2.408.877.873,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.480.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.025.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.109.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	945.600,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.977.800,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.940.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.300.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	133.774.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.498.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.970.373,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.675.500,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.800.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.993.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.850.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.538.400,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Kecamatan Kepenuhan Hulu		1.957.463.626,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.360.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	649.200,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	865.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	978.400,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.403.000,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.458.800,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	173.812.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.630.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.268.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.551.303.676,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.137.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.400.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.152.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.643.750,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.838.200,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.564.000,00
		Kecamatan Kunto Darussalam		2.629.774.565,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.676.800,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.676.800,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.500.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.144.603.365,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.203.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.010.600,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi	2.020.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.084.000,00
		Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		1.645.380.990,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.254.000,00
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.696.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.214.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.212.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.030.000,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.075.000,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.284.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.930.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.892.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.146.959.892,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.820.098,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.186.800,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.835.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.223.400,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.448.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.800.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.020.800,00
		Kecamatan Pendalian IV Koto		1.978.096.188,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	978.800,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.652.800,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.412.200,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	27.191.200,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	135.695.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.470.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.565.150.988,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.597.400,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.947.600,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.753.200,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.200,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.900.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.346.800,00
		Kecamatan Rambah Hilir		1.972.495.801,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.700.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.538.400,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	978.400,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	705.600,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.701.200,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.300.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	153.228.800,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.500.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.566.178.896,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.339.105,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.400.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.987.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	938.400,00
		Kecamatan Rokan IV Koto		3.331.809.973,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	538.400,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.058.400,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.676.800,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.199.600,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.500.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	131.001.400,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.460.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	121.895.000,00
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.902.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.425.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.639.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.422.887.573,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.420.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.800.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.077.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.800.800,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.322.400,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.798.200,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.350.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.058.400,00
		Kecamatan Tambusai		3.501.852.083,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.560.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	865.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	865.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.618.400,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	26.716.400,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.780.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	243.772.000,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	352.879.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95.477.000,00
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.722.600,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.496.800,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.466.708.583,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.146.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.800.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.990.200,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.500,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.458.400,00
		Kecamatan Tambusai Utara		2.044.568.030,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.480.000,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.041.800,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.720.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	163.550.500,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.380.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.624.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.480.603.230,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.285.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.600.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.001.200,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.033.300,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.710.600,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.240.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.298.400,00
		Kecamatan Ujung Batu		4.826.722.611,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.600.000,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32.818.700,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	384.954.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145.820.400,00
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.033.200,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.500.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.555.211,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.144.500,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.200.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.010.600,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.002.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.084.000,00
		Sekretariat DPRD		55.481.633.862,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.692.000,00
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00
			Fasilitasi Fraksi DPRD	41.916.000,00
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	32.380.000,00
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	63.956.000,00
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	597.975.400,00
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	29.744.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.890.029.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	554.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	740.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	764.800,00
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	101.500.000,00
			Orientasi DPRD	32.846.000,00
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	398.859.000,00
			Pelaksanaan Reses	2.839.951.600,00
			Pembahasan APBD	444.496.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pembahasan APBD Perubahan	439.761.000,00
			Pembahasan KUA dan PPAS	474.151.800,00
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	637.304.000,00
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	354.727.000,00
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	426.338.000,00
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.241.198.000,00
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.000.000,00
			Pemeliharaan Mebel	13.500.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.794.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.357.968,00
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	9.022.000,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.814.000,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.377.000,00
			Pendalaman Tugas DPRD	1.901.599.000,00
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.855.000,00
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.250.000,00
			Pengawasan Kode Etik DPRD	2.330.000,00
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.618.000,00
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	16.832.400,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9.441.200,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.428.400,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9.648.400,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10.032.400,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10.032.400,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.790.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	678.895.200,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.185.400,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.505.697.248,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.416.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	982.200.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.120.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.093.300,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	498.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.787.700,00
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	499.500.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.858.480,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	590.000,00
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	312.000.000,00
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4.500.000,00
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.751.438.566,00
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	23.250.000,00
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	34.186.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.942.000,00
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.815.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	618.800,00
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	49.716.000,00
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	22.525.000,00
			Penyusunan Program Kerja DPRD	4.982.000,00
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	673.606.400,00
			Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	391.105.000,00
Grand Total				533.058.381.756,00

5.2 Usulan Dana Alokasi Khusus dan APBN

Berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri atas 3 jenis, yaitu:

1. DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
2. DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah;
3. Hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DAK ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pengalokasian DAK itu didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal; arahan presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rekap usulan program dan kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBN dengan jumlah pagu usulan sebesar Rp. 1.071.490.142.884,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Program dan Kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui APBN Tahun 2026

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
1	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**				**35.950.000.000**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**35.950.000.000**
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				**30.350.000.000**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		**kegiatan**	**20**	**2.000.000.000**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
	SD Negeri 11 Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 035 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 033 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 017 Tandun	Kec. Tandun	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 037 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 023 Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 014 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 021 Tambusai	Kec. Tambusai	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 004 Tambusai	Kec. Tambusai	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 039 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		**ruang**	**20**	**2.000.000.000**
	SD Negeri 017 Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	ruang	6	600.000.000
	SD Negeri 017 Tandun	Kec. Tandun	ruang	3	300.000.000
	SD Negeri 037 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	2	200.000.000
	SD Negeri 013 Tambusai	Kec. Tambusai	ruang	2	200.000.000
	SD Negeri 21 Rambah	Kec. Rambah	ruang	4	400.000.000
	SD Negeri 23 Rambah hilir	Kec. Rambah Hilir	ruang	3	300.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		**ruang**	**38**	**7.600.000.000**
	SD Negeri 011 Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	ruang	6	1.200.000.000
	SD Negeri 035 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	2	400.000.000
	SD Negeri 033 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	6	1.200.000.000
	SD Negeri 037 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	4	800.000.000
	SD Negeri 036 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	4	800.000.000
	SD Negeri 028 Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	ruang	2	400.000.000
	SD Negeri 021 Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	ruang	2	400.000.000
	SD Negeri 002 Bonai Darussalam	Kec. Bonai Darussalam	ruang	1	200.000.000
	SD Negeri 005 Bonai Darussalam	Kec. Bonai Darussalam	ruang	1	200.000.000
	SD Negeri 014 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	ruang	4	800.000.000
	SD Negeri 039 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	6	1.200.000.000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		**kegiatan**	**5**	**1.000.000.000**
	SD Negeri 011 Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	kegiatan	1	200.000.000

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
	SD Negeri 035 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 033 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 017 Tandun	Kec. Tandun	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 039 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		**kegiatan**	**5**	**1.000.000.000**
	SD Negeri 011 Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 035 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 033 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 017 Tandun	Kec. Tandun	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 039 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	Penyediaan infrastruktur TIK		**kegiatan**	**5**	**1.750.000.000**
	SD Negeri 011 Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	kegiatan	1	350.000.000
	SD Negeri 035 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	350.000.000
	SD Negeri 033 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	350.000.000
	SD Negeri 017 Tandun	Kec. Tandun	kegiatan	1	350.000.000
	SD Negeri 039 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	350.000.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		**kegiatan**	**5**	**1.000.000.000**
	SD Negeri 011 Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 035 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 033 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 017 Tandun	Kec. Tandun	kegiatan	1	200.000.000
	SD Negeri 039 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				**5.600.000.000**
	Pengadaan Mebeleur Sekolah		**kegiatan**	**2**	**400.000.000**
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		**kegiatan**	**2**	**400.000.000**
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	kegiatan	1	200.000.000

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		**ruang**	**5**	**1.000.000.000**
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	3	600.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	ruang	2	400.000.000
	Pembangunan Toilet		**unit**	**2**	**200.000.000**
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	100.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	100.000.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		**unit**	**2**	**400.000.000**
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	200.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	200.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				**1.800.000.000**
	Pembangunan ruang guru		unit	2	
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	350.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	350.000.000
	Ruang Kepala Sekolah		unit	2	
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	200.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	200.000.000
	Pembangunan Ruang TU		unit	2	
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	350.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	350.000.000
	Pembangunan Laboratorium		**unit**	**2**	**700.000.000**
	Pembangunan Laboratorium IPA				
	SMP Negeri 13 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	350.000.000
	SMP Negeri 16 Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	1	350.000.000
2	**KEMENTERIAN KESEHATAN**				**69.260.000.000**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**69.260.000.000**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**69.260.000.000**
	Pembangunan Puskesmas				**000.000.000**
	Pembangunan Puskesmas Baru (Puskesmas Kepenuhan II) dan sarana prasarananya Desa Kepenuhan Baru (SP 2)	Kec. Kepenuhan	unit	1	5.000.000.000
	Pembangunan Puskesmas Baru	Kec. Rokan	unit	1	5.000.000.000

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
	(Puskesmas Rokan IV Koto III) dan sarana prasarananya Desa Lubuk Bendahara	IV Koto			
	Revitalisasi Puskesmas Tandun I	Kec. Tandun	unit	1	2.000.000.000
	Renovasi dan Penambahan Ruangan Puskesmas Pagaran Tapah	Kec. Pagaran Tapah Darussalam	unit	1	2.000.000.000
	Renovasi dan Penambahan Ruangan Puskesmas Rambah Hilir II	Kec. Rambah Hilir	unit	1	2.250.000.000
	Renovasi Puskesamas Pembantu	Desa Rambah Hilir Timur, Bengkolan Salak, Sekabau Jaya, Sei Kandis, Pasir Makmur dan Giti	unit	6	1.800.000.000
	Pembangunan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				**6.010.000.000**
	Pengadaan Pusling Roda Empat dan Ambulance Puskesmas	Puskesmas Tambusai I, Tambusai II, Tambusai Utara II, Rambah Hilir I, Rambah Samo I, Bangun Purba, Tambusai Utara I	Unit	8	6.010.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				**45.000.000.000**
	Pengadaan Alat Kesehatan : CatLab	RSUD Rokan Hulu	Unit	1	30.000.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Rokan Hulu	Paket	1	15.000.000.000
3	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**				**609.010.500.000**
	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG				**88.872.000.000**
	Pembangunan Tembok Penahan Tebing				**88.872.000.000**
	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh Dipasir Pandak	Kabupaten Rokan Hulu	M'	750	29.500.000.000
	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Surau Munai Kecamatan Rambah Hilir	Kabupaten Rokan Hulu	M'	800	16.000.000.000
	Pembangunan Tembok Penahan TebingSungai Rokan Kiri di dekat Istana Raja Rokan Kec. Rokan IV Koto	Kabupaten Rokan Hulu	M'	400	8.000.000.000
	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam	Kabupaten Rokan Hulu	M'	400	8.000.000.000
	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Surau Alhidayah Pagaran Tapah Kec. Pagaran tapah	Kabupaten Rokan Hulu	M'	300	6.000.000.000
	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Sosa Untuk Pengamanan Benteng Tujuh Lapis di Dalu - Dalu Kec. Tambusai	Kabupaten Rokan Hulu	M'	250	21.372.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**514.011.500.000**
	Rekonstruksi Jalan				**501.511.500.000**
	Rekonstruksi jalan pada ruas jalan Kota tengah - Kepenuhan Baru	Kec. Kepenuhan	Km	4	16.000.000.000
	Rekontruksi jalan pada ruas jalan poros simpang harapan	Kec. Tambusai	Km	2,5	10.000.000.000

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
		Utara			
	Rekontruksi Jalan pada Ruas Jalan Padang Bulan - Pasir Intan	Kec. Bangun Purba	Km	5	20.000.000.000
	Rekontruksi Jalan pada Ruas Jalan Km. 11 Mahato - Km. 24 Bandar Selamat	Kec. Tambusai Utara	Km	11	89.680.000.000
	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Poros Desa Sikebau Jaya	Kec. Rokan IV Koto	Km	2.17	8.680.000.000
	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Pekan Lama (Sosial) - Surau Munai	Kec. Rambah Hilir	Km	2.89	12.123.550.000
	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ujung Gurap - Surau Munai	Kec. Rambah Hilir	Km	2.96	12.535.600.000
	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Okak - Sempurna Alam	Kec. Rambah Samo	Km	0.6	4.890.000.000
	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Simpang Batas - Sialang Rindang	Kec. Tambusai	Km	3	12.705.000.000
	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Tanjung Berani - Pasir Agung DK.I C	Kec. Bangun Purba	Km	5.71	24.181.850.000
	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Surau Gading - Sei. Salak Marga Mulya	Kec. Rambah Samo	Km	3.3	13.975.500.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lingkar Tangun	Kec. Bangun Purba	Km	0.86	3.440.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Pasir Jaya - Rambah Jaya - Pasir Intan	Kec. Bangun Purba	Km	4.97	19.880.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Bangun Jaya - Pagar Mayang	Kec. Tambusai Utara	Km	5.5	22.000.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kepenuhan Baru - Kepenuhan Raya	Kec. Kepenuhan	Km	2.44	9.760.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kepenuhan Baru - Kepenuhan Makmur	Kec. Kepenuhan	Km	7	28.000.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lubuk Bendahara Barat - Alahan - Tanjung Medan	Kec. Rokan IV Koto	Km	8.7	34.800.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Tandun - Kumain	Kec. Tandun	Km	2.3	9.200.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Dalu - Dalu - Pekan Tebih	Kec. Tambusai	Km	10	40.000.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kota Lama - Muara Dilam - Trifa	Kec. Kunto Darussalam	Km	19	76.000.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Trans Polri - Sangkir Indah	Kec. Ujung Batu	Km	3.54 Km	14.160.000.000
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kabun - Koto Rana (Bts Kampar)	Kec. Kabun	Km	2	8.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Perumahan Pemda	Kec. Rambah	Km	1,37	3.500.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Pawan – Menaming	Kec. Rambah	Km	2	4.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Pawan - Air Panas - Huta Sikapir	Kec. Rambah	Km	2	4.000.000.000
	Pembangunan Jembatan				**12.500.000.000**
	Pembangunan Jembatan Sei Batang Kumu II pada ruas jalan bangun jaya - pagar mayang	Kec. Tambusai Utara	M'	50	10.000.000.000
	Pembangunan jembatan gantung sei batang lubuh pada ruas jalan pekan tebih - muara jaya	Kec. Kepenuhan Hulu	M'	100	2.500.000.000
	BIDANG CIPTA KARYA				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				**6.127.000.000**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota				**6.127.000.000**
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				**6.127.000.000**
	Pembangunan Bak Reservoar IPA IKK Tambusai	IPA IKK Tambusai	Kegiatan	1	3.127.000.000
	Pembangunan Bak Reservoar IPA IKK Rambah	IPA IKK Rambah	Kegiatan	1	3.000.000.000
4	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**				**27.740.000.000**
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**7.740.000.000**
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				**7.740.000.000**
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				**3.740.000.000**
	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Kec. Rambah Hilir	Unit	44	3.740.000.000
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi				**4.000.000.000**
	Pembangunan PSU pada Kawasan Relokasi di Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Kec. Rambah Hilir	Kegiatan	1	4.000.000.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				**20.000.000.000**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				**20.000.000.000**
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				**20.000.000.000**
	Pembangunan Kawasan Kumuh dengan Luas di Atas 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Danau Dipo Boncah Balong, Kec. Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Kegiatan	1	20.000.000.000
5	**KEMENTERIAN PERTANIAN**				**134.145.000.000**
	BIDANG PERTANIAN				**13.880.000.000**
	PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS				**13.880.000.000**
	Pengolahan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan				**10.500.000.000**
	Pengembangan Budidaya: Padi Lahan Kering/Gogo, kedelai, jadung, padi sawah				**10.500.000.000**
	Pengembangan Budidaya Padi Lahan Kering/Gogo	Seluruh Kec. Di Kab. Rokan Hulu	Ha	1852	6.154.196.000
	Pengembangan budidaya jagung	Kec. Rambah Samo, Kec. Rambah, Kec.Tambusai, Kec. Kepenuhan, Kec. Kepenuhan Hulu, dan Kec. Kunto Darussalam.	Ha	200	582.600.000
	Pengembangan budidaya padi sawah	Kec. Rambah, Kec. Rambah Samo, Kec. Bangun Purba, Kec.	Ha	500	1.739.000.000

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
		Kepenuhan, Kec. Kepenuhan Hulu dan Kec. Rokan IV Koto,			
	Pengolahan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan				**660.000.000**
	Pengembangan Budidaya: Padi Lahan Kering/Gogo, kedelai, jadung, padi sawah				**660.000.000**
	Cabe Merah	Desa Koto Tinggi Kec. Rambah, Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara, Desa Mahato Kec, Tambusai Utara	Ha	30	899.970.000
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian				**1.320.000.000**
	Pembangunan Irigasi Perpompaan				**600.000.000**
	Pembangunan Irigasi Perpompaan	Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan, Desa Mahato Kec. Tambusai Utara	Unit	5	600.000.000
	Pembangunan Embung Pertanian				**360.000.000**
	Pembangunan Embung Pertanian	Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir, Desa Pasir Jaya Kepenuhan	Unit	3	360.000.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier				**360.000.000**
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Desa Menaming, Desa Pasir Makmur, Desa Rambah Baru, Desa Pasir Maju	Unit	4	360.000.000
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian				**1.400.000.000**
	Penyediaan Alsintan Pra Panen				**1.400.000.000**
	Traktor Roda 4	Desa Mondang Sei Kumango, Desa Batas, Desa Pasir Agung	unit	3	1.050.000.000
	Traktor Roda 2	Kec. Bangun Purba, Kec. Rambah, Kec. Rambah Samo, Kec. Rambah Hilir, Kec. Kepenuhan Hulu, Kec. Rokan IV Koto,	unit	14	490.000.000
	Cultivator	Kec. Tambusai utara, Kec.	unit	6	120.000.000

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
		Rambah			
	Pompa Air 3 Inch	Kec. Rambah	unit	3	60.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**119.800.000.000**
	Pengembangan sarana pertanian				**119.800.000.000**
	Pencetakan sawah				**119.800.000.000**
	Cetak sawah	Kec. Tambusai Utara dan Kec. Bonai Darussalam	Ha	5990	119.800.000.000
	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (PKH)				**12.500.000.000**
	Penyediaan bantuan Ternak Kerbau	Kec. Bangun Purba	ekor	500	12.500.000.000
	BIDANG PERKEBUNAN				**172.945.000.000**
	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Kawasan Perkebunan	Kab. Rokan Hulu	Km	240	168.000.000.000
	Pengadaan Kendaraan Roda 3	Kab. Rokan Hulu	Unit	20	1.200.000.000
	Pengadaan Mesin Pencacah (Coper)	Kab. Rokan Hulu	Unit	15	225.000.000
	Pengadaan Alat Pasca Panen Kelapa Sawit	Kab. Rokan Hulu	Paket	32	3.040.000.000
	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab. Rokan Hulu	kegiatan	16	480.000.000
6	**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**4.398.000.000**
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				**5.128.876.884**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				**5.128.876.884**
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				**5.128.876.884**
	Pengembangan sarana dan prasarana Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti		kegiatan	1	5.128.876.884
	Gapura Kawasan Objek Wisata	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	1	182.407.225
	Pekerjaan Cafetaria UMKM	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	2	1.246.548.147
	Rumah Singgah / Cottage	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	15	1.540.273.695
	Jalan Akses Wisata Hutan	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	kegiatan	1	1.265.936.035
	Pekerjaan Gapura Masuk Kawasan Komplek Situs Pemakaman	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	1	23.909.984
	Rumah Makam 6x12	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	1	175.692.407
	Rumah Makam 6x8	Destinasi Wisata Religi	Unit	2	256.483.679

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET FISIK	USULAN PAGU ANGGARAN
		Rantau Benuang Sakti			
	Jalan Akses Wisata Dalam Komplek Pemakaman (Paving Blok)	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	kegiatan	1	437.625.712
7	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**				**6.800.000.000**
	BIDANG PERDAGANGAN				**6.800.000.000**
	Tugas Pembantuan Bidang Sarana Perdagangan Pasar Selasa Bandar Selamat	Kec. Tambusai Utara	Kegiatan	1	3.500.000.000
	- Pembangunan Pasar	Pasar Selasa bandar Selamat Kecamataan Tambusai Utara	Unit	1	3.500.000.000
	Tugas Pembantuan Bidang Sarana Perdagangan Pasar Okak	Kec. Rambah Samo	Kegiatan	1	3.300.000.000
	- Pembangunan Pasar	Pasar Okak Kecamatan Rambah Samo	Unit	1	3.300.000.000
JUMLAH					**1.071.490.142.884**

5.3 Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2026

Program dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2026 sebesar Rp. 413.829.582.300,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9
Program dan Kegiatan yang diusulkan Pendanaannya melalui APBD Provinsi Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target	USULAN PAGU ANGGARAN
I	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**				
(1)	**Urusan Pendidikan**				**7.600.000.000**
1	**Program Pengelolaan Pendidikan**				**7.600.000.000**
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				**7.600.000.000**
	Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (MCK)				**1.400.000.000**
	MCK SD Negeri 014 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	Kegiatan	1	200.000.000
	MCK SD Negeri 020 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	Kegiatan	1	200.000.000
	MCK SD Negeri 011 Bonai Darussalam	Kec. Bonai Darussalam	Kegiatan	1	200.000.000
	MCK SD Negeri 002 Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Kegiatan	1	200.000.000
	MCK SD Negeri 014 Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Kegiatan	1	200.000.000
	MCK SD Negeri 005 Kepenuhan Hulu	Kec. Kepenuhan Hulu	Kegiatan	1	200.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target	USULAN PAGU ANGGARAN
	MCK SD Negeri 006 Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	Kegiatan	1	200.000.000
	Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Kelas Baru				**2.600.000.000**
	Ruang Kelas Baru SD Negeri 014 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	Ruang	2	400.000.000
	Ruang Kelas Baru SD Negeri 020 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	Ruang	2	400.000.000
	Ruang Kelas Baru SD Negeri 011 Bonai Darussalam	Kec. Bonai Darussalam	Ruang	1	200.000.000
	Ruang Kelas Baru SD Negeri 002 Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Ruang	2	400.000.000
	Ruang Kelas Baru SD Negeri 014 Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Ruang	2	400.000.000
	Ruang Kelas Baru SD Negeri 005 Kepenuhan Hulu	Kec. Kepenuhan Hulu	Ruang	2	400.000.000
	Ruang Kelas Baru SD Negeri 006 Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	Ruang	2	400.000.000
	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel Sekolah				**1.400.000.000**
	Mebel SD Negeri 014 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	Kegiatan	1	200.000.000
	Mebel SD Negeri 020 Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	Kegiatan	1	200.000.000
	Mebel SD Negeri 011 Bonai Darussalam	Kec. Bonai Darussalam	Kegiatan	1	200.000.000
	Mebel SD Negeri 002 Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Kegiatan	1	200.000.000
	Mebel SD Negeri 014 Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Kegiatan	1	200.000.000
	Mebel SD Negeri 005 Kepenuhan Hulu	Kec. Kepenuhan Hulu	Kegiatan	1	200.000.000
	Mebel SD Negeri 006 Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	Kegiatan	1	200.000.000
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				**2.200.000.000**
	Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 005 Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	Ruang	4	800.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 021 Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	Ruang	3	600.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 011 Tambusai	Kec. Tambusai	Ruang	4	800.000.000
II	**DINAS KESEHATAN**				
(2)	**Urusan Kesehatan**				**95.000.000.000**
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**95.000.000.000**
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				**91.000.000.000**
	Sub Kegiatan: Pembangunan Puskesmas				**10.000.000.000**
	Pembangunan Puskesmas Tambusai Utara 3 Km. 24	Kec. Tambusai Utara	unit	1	10.000.000.000
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				**3.000.000.000**
	Revitalisasi ruang Rawat Inap Puskesmas Kunto Darussalam I	Kec. Kunto Darussalam	unit	1	3.000.000.000
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				**78.000.000.000**
	Lanjutan Pembangunan Gedung RSUD Rokan Hulu 6 Lantai	RSUD Rokan Hulu	unit	1	78.000.000.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan				**4.000.000.000**
	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				**4.000.000.000**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target	USULAN PAGU ANGGARAN
	Pengadaan Alat Pemeriksaan Kualitas Air (LABKESDA)	Kec. Rambah	unit	1	2.000.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tambusai II Desa Suka Maju Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	paket	1	2.000.000.000
III	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**				
(3)	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**283.915.429.500**
1	**Program Penyelenggaraan Jalan**				**280.915.429.500**
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan				**280.915.429.500**
	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan				**119.700.000.000**
	Peningkatan Jalan Silam (Batas Kab. Rokan Hulu) - Tandun	Kec. Kabun, Rambah dan Tandun	km	3	9.000.000.000
	Peningkatan Jalan Tandun – Pasir Pengaraian	Kec. Ujung Batu, Rambah Samo dan Rambah	km	3	30.000.000.000
	Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar (Rigit Pavement)	Kec. Rokan IV Koto	km	5	35.000.000.000
	Peningkatan Jalan Talang Danto (Batas Kab. Rokan Hulu) - Tandun (Rigit Pavement)	Kec. Tandun	km	1,5	10.500.000.000
	Peningkatan Jalan Senama Nenek (Batas Kab. Rohul) – Simpang Bagan 7 - Sontang	Kec. Kunto Darusalam dan Bonai Darussalam	km	4	17.600.000.000
	Peningkatan Jalan Sontang – Simpang Jurong – Bonai (Batas Kab. Bengkalis)	Kec. Bonai Darussalam	km	3	17.600.000.000
	Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Km. 11 Mahato - Km.24 Bandar Selamat	Kec. Tambusai Utara	km	10,5	40.500.000.000
	Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Bangun Jaya - Pagar Mayang	Kec. Tambusai Utara	km	4	16.000.000.000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan				**60.000.000.000**
	Pemeliharaan Berkala Jalan Silam (Batas Kab. Rokan Hulu) - Tandun	Kec. Kabun dan Tandun	km	5	10.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan Tandun – Pasir Pengaraian	Kec. Tandun, Ujung Batu, Rambah Samo dan Rambah	km	4	8.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar (Rigit Pavement)	Kec. Rokan IV Koto	km	3	6.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan Talang Danto (Batas Kab. Rokan Hulu) - Tandun	Kec. Tandun	km	1	2.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Senama Nenek (Batas Kab. Rohul) – Simpang Bagan 7 - Sontang	Kec. Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam	km	5	10.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sontang – Simpang Jurong – Bonai (Batas Kab. Bengkalis)	Kec. Bonai Darussalam	km	5	10.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pasir Pengaraian – Batas Sumatera Utara	Kec. Rambah, Rambah Hilir dan Tambusai	km	5	10.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalu-Dalu – Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir)	Kec. Tambusai dan Tambusai Utara	km	2	4.000.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target	USULAN PAGU ANGGARAN
	Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Hangtuah Kec. Rambah	Kec. Rambah	km	3	3.600.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Pawan - Air Panas - Gua Sikapir Kec. Rambah	Kec. Rambah	km	2	2.500.000.000
	Sub Kegiatan: Pembangunan Jembatan				**96.215.429.500**
	Pembangunan Jembatan Sei. Rokan pada Ruas Jalan Lingkar Ujung Batu - Sukadamai (Lanjutan)	Kec. Ujung Batu	m	135	48.940.429.500
	Pelebaran Jembatan Sei. Lintam pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kec. Ujung Batu	unit	1	10.137.500.000
	Pelebaran Jembatan Sei. Batang Samo pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kec. Kepenuhan Hulu	unit	1	6.000.000.000
	Pelebaran Jembatan Sei. Kumu pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut	Kec. Rambah Hilir	unit	1	10.137.500.000
	Pelebaran Jembatan Sei. Sosah pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut	Kec. Tambusai	unit	1	15.000.000.000
	Pelebaran Jembatan Sei. Teriak pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kec. Ujung Batu	unit	1	6.000.000.000
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan				**5.000.000.000**
	Rehabilitasi Jembatan Sei Rokan pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kec. Ujung Batu	m	152	5.000.000.000
	Pembangunan Jembatan Sei. Rokan pada Ruas Jalan Lingkar Ujung Batu - Sukadamai (Lanjutan)	Kec. Ujung Batu	m	135	49.000.000.000
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**				**3.000.000.000**
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				**3.000.000.000**
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				**3.000.000.000**
	Pembersihan/Normalisasi Bendung Kaiti Samo	Kec. Rambah Samo	Ha	2.154	3.000.000.000
III	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**				
(4)	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**23.965.000.000**
1	**Program Pengembangan Perumahan**				**1.900.000.000**
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				**1.900.000.000**
	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				**1.900.000.000**
	Land Clearing (Pembersihan Lokasi) tanah untuk relokasi bagi Korban Bencana di Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir	kegiatan	1	200.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah	unit	5	425.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target	USULAN PAGU ANGGARAN
	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Babussalam, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Desa Babussalam, Kec. Rambah	unit	5	425.000.000
2	**Program Kawasan Permukiman**				**7.700.000.000**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				**7.700.000.000**
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				**7.700.000.000**
	Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba	Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba	kegiatan	1	1.500.000.000
	Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Tulang Gajah, Kec. Rambah	Kawasan Tulang Gajah, Kec. Rambah	kegiatan	1	1.500.000.000
	Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu	Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu	kegiatan	1	1.500.000.000
	Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu	Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu	kegiatan	1	1.500.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba	Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba	unit	5	425.000.000
	Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Tulang Gajah, Kec. Rambah	Kawasan Tulang Gajah, Kec. Rambah	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu	Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu	Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu	unit	5	425.000.000
3	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**				**14.365.000.000**
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				**14.365.000.000**
	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				**14.365.000.000**
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Payung Sekaki Kec. Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Suka Maju Kec. Rambah	Kec. Rambah	unit	10	850.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah	Kec. Rambah	unit	10	850.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Menaming Hulu Kec. Rambah	Kec. Rambah	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa	Kec. Rambah	unit	10	850.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target	USULAN PAGU ANGGARAN
	Rambah Tengah Barat Kec. Rambah				
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Belit Kec. Rambah	Kec. Rambah	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Rambah Kec. Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pasir Jaya Kec. Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah	Kec. Rambah	unit	10	850.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bangun Purba Timur Kec. Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	unit	15	1.275.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah	Kec. Rambah	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tangun Kec. Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu	Kec. Kepenuhan Hulu	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tebih Kec. Kepenuhan Hulu	Kec. Kepenuhan Hulu	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu	Kec. Kepenuhan Hulu	unit	4	340.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Batas Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Kota Lama Kec. Kunto Darussalam	Kec. Kunto Darussalam	unit	10	850.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Rokan Kec. Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	unit	10	850.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tandun Kec. Tandun	Kec. Rokan IV Koto	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Tambusai Tengah Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	unit	10	850.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Giti Kec. Kabun	Kec. Kabun	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lubuk Bendahara Kec. Tandun	Kec. Rokan IV Koto	unit	5	425.000.000
	Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu	Kec. Ujung Batu	unit	5	425.000.000
IV	**Dinas Pariwisata**				
(5)	**Urusan Pariwisata**				**1.550.000.000**
1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**				**1.550.000.000**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				**1.550.000.000**
	Sub Kegiatan : Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				**1.200.000.000**
	Study Kelayakan, Master Pland dan DED Kawasan Objek Wisata Air Panas Suaman	Kec. Rambah	dokumen	3	800.000.000
	Perencanaan Objek Wisata Puncak Danau Sipogas	Kec. Rambah	dokumen	1	400.000.000
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				**350.000.000**
	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kab. Rokan Hulu	kegiatan	1	350.000.000
V	**Dinas Kebudayaan**				
(6)	**Urusan Kebudayaan**				**1.799.152.800**
1	**Program Pengembangan Kebudayaan**				**858.180.000**
	Pengelolaan Kebudayaan Yang				**435.300.000**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target	USULAN PAGU ANGGARAN
	Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				**435.300.000**
	Kajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Kab. Rokan Hulu	objek	2	435.300.000
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**422.880.000**
	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				**422.880.000**
	Pendokumentasian dan Kajian Nilai-nilai Tradisi Budaya Melayu Rokan Hulu	Kab. Rokan Hulu	objek	2	422.880.000
2	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**				**940.972.800**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				**250.354.500**
	Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya				**250.354.500**
	Penetapan Cagar Budaya (Gedung SD 001 Rambah, Kantor KPU, Rumah Dinas Sekda)	Kab. Rokan Hulu	Cagar budaya	3	250.354.500
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				**690.618.300**
	Sub Kegiatan : Pelindungan Cagar Budaya				**690.618.300**
	Pelindungan Cagar Budaya yang dilindungi	Kab. Rokan Hulu	Cagar budaya	3	565.618.300
	Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya	Kab. Rokan Hulu	orang	5	125.000.000
JUMLAH					**413.829.582.300**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja merupakan hasil, keluaran, atau dampak yang dicapai dari suatu kegiatan, program, atau sasaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Sementara itu, indikator kinerja berperan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan, yang dapat berupa keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak (impact).

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran *strategis* organisasi yang bermanfaat untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		KET
			2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1.	Persentase Pemajuan Budaya Daerah	%	30	30	
2.	Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB	%	0,594	0,597	
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	Indeks	73.57-73.99	74.00-74.42	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,20	75,30	
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.34-3.63	3.83-4.24	
6.	Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur	%	48,25	49,59	
7.	Indeks resiko bencana (IRB)	Indeks	154,87	154,53	
8.	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	101.77-107.79	109.06-115.36	
9.	Rasio Gini	Rasio	0.266-0.269	0.259-0.266	
10.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	61,00	63,12	
11.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	0	1,8	
12.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8,19	7,70	
13.	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	82,41	82,92	
14.	Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani	%	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		KET
			2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
15.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina	%	77,13	79,56	
16.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0.27-0.29	0.29-0.31	
17.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	9.20-9.51	8.92-9.25	
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.95 -3.20	2.86 -3.11	
19.	Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun	Tahun	8.82-8.93	9.05-9.16	
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.90-13.04	13.02-13.16	
21.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.71-75.22	74.21-75.67	
22.	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	100	100	
23.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	26.44-27.61	26.78-27.80	
24.	Nilai PDRB ADHB	Milyar Rupiah	60.416,54	64.186,36	
25.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Milyar Rupiah	6.088,00	6.305,33	
26.	PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Milyar Rupiah	16.392,99	16.810,20	
27.	Rasio konektifitas	Rasio	41,83	43,47	
28.	Tingkat Inflasi	%	2.5 -3.0	2.5-3.0	
29.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,19	4,20	
30.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,495	0,490	
31.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69,32	69,59	
32.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	3,48	3,51	
33.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,1	6,2	
34.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	14,37	17,03	
35.	Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	
36.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	20,38	19,36	
37.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten	%	36,6	40,03	
38.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	%	91,14	91,64	
39.	Persentase Desa Mandiri	%	49,64	51,98	
40.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.10-0.11	0.12-0.13	
41.	Persentase Pencapaian Aksi HAM	%	75,5	76,13	
42.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	
43.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	16,07	16,32	
44.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	29,57	29,97	
45.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	81,359	82,151	
46.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	3,36	4,25	
47.	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	74	74,78	
48.	Indeks sistem merit	Indeks	263	267	
49.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,00	51,88	

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara objektif, memantau capaian pembangunan, mengevaluasi efektivitas program/kegiatan, dan menjadikan dasar dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan tahun yang akan datang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum Indikator kinerja daerah dibagi dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Geografi dan Demografi;
2 . Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
3 . Aspek Pelayanan Umum;
4 . Aspek Daya Saing Daerah; dan
5 . Indikator Kinerja Kunci

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Secara rinci, indikator kinerja daerah tahun 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	90,75	93,95	94,45	
2	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	78	79,14	80,92	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,49	2,40	2,46	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	97,21	98	98	
2	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SMP	%	48,83	54,87	56,38	
3	Persentase Penanganan Konflik SARA	%	100	100	100	
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,60	65,70	65,80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	%	52,46	58,97	60,60	
6	Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	0	4,36	5,11	
7	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SMP	%	63,10	67,48	68,58	
8	Indeks Kabupaten/ Kota Zakat	Indeks	0,73	0,75	0,77	
9	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SMP	%	34,28	36,04	36,48	
10	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	%	58,92	64,14	65,44	
11	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SD	%	63,96	68,17	69,22	
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	32,99	47,99	54,99	
13	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SD	%	54,93	56,34	56,70	
14	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SD	%	52,46	54,70	56,83	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	22,41	22.70-23.34	23.51-24.15	
2	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	%	5,10	5,17	5,17	
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	0	76,67	77,57	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,13	68,5	69,1	
5	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	0	2,27	2,95	
6	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	1,79	1,85	1,91	
7	Jumlah IKM Bersertifkat Halal	IKM	26	31	36	
8	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi / Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	43,61	45	45,40	
9	Rasio Kewirausahaan	Persentase	7,22	12,58	12,73	
10	Angka Ketergantungan	%	47,03	50	49,5	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	0	90	90,375	
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,88	88	88,2	
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,42	3,47	3,51	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**					
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					
1	Nilai Akip Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Indeks	73,35	75	78	
2	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui	Lembaga	13	17	20	
3	Persentase Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik	%	24,97	30	35	
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI (APS)	%	91,47	92,89	94,31	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
5	Persentase pengembangan dan sastra	%	0	10	15	
6	Indeks Pemerataan Guru	%	20	30	40	
7	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	153,74	100	100	
8	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS (APS)	%	0	87,78	90,22	
9	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	100	100	100	
10	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (APS)	%	64,61	65,51	66,41	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					
1	Nilai Akip Dinas Kesehatan	Indeks	73,81	73,82	73,83	
2	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	3,43	3,46	3,50	
3	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0	2,23	2,23	
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	25	100	100	
5	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	63,4	63,4	70	
6	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	87	91	100	
7	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	
8	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	4	23,4	23,4	
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	17,4	17,4	17,4	
10	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	79,19	81,25	83,32	
11	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	83,3	70	75	
12	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	57,63	60,00	60,00	
13	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	18,18	0	0	
14	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persentase	90	90	95	
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	80,69	75	7.779	
16	Cakupan penemuan kasus TB	%	85,70	90	90	
17	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	1,48	12,4	11,4	
18	Persentase Masyarakat yang diberdayakan Bidang Kesehatan	%	100	100	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
1	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks	71,90	72,25	72,60	
2	Tingkat Kemantapan jalan	%	24,02	24,84	25,34	
3	Jumlah rumah tangga yang terlayani program penyediaan air minum	Sambungan Rumah (SR)	16.595	16.695	16.795	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	1,39	1,89	2,39	
5	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	0	0	100	
6	Persentase luas layanan irigasi	%	24,44	24,44	24,44	
7	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	%	35,62	38,88	42,13	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
8	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil	%	34,79	35,88	47,29	
9	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	86,52	88,51	90,55	
10	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERKADA	*	Ada	Ada	Ada	
11	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	
12	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten	%	5	4,5	4	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
1	Nilai Akip Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	69,65	69,95	70,25	
2	Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kawasan	10	1	2	
3	Persentase lokasi perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang ditangani	%	71,03	71,72	72,41	
4	pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh	Unit	24	33	35	
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	Nilai Akip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	68	69	69,50	
2	Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Indeks	74,50	76,00	77,00	
3	Persentase Penyelenggaran tibumtranmas	%	100	100	100	
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase	84,62	84,62	86,36	
5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	
6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	53,19	57,78	60,00	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
1	Nilai Akip Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	72,45	72,48	72,48	
2	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	%	76	78	81	
3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM)	%	100	100	100	
4	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0	12	14	
5	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	0	10	12	
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	100	100	100	
7	Persentase Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	97,49	97,50	97,60	
8	Persentase Anak Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	100	100	100	
9	Persentase Tuna Sosial Terlantar (Terutama Gelandangan dan Pengemis) Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	100	100	100	
10	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat	%	0	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	kompetensinya dalam pelayanan sosial					
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	38	35	35	
2	Persentase pelaksanaan program ketenagakerjaan sesuai dengan RTK Mikro	%	0	0	30	
3	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Orang	10	40	80	
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	0	0	16	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1	pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berpersfektif gender dan hak anak sesuai standar	%	0	30	40	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0:0	19.58:19.28	18.07:17.77	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11,45	12,5	13	
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	0	55	58	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	0	45,70	46,04	
6	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	%	100	100	100	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					
1	Nilai Akip Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Indeks	76,50	76,00	76,50	
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	0,69	0	0	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,98	91,67	92,33	
5	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	20	20	22	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	0	100	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
1	Nilai Akip Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	71,9	72	72,1	
2	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	*	Ada	Ada	Ada	
3	Persentase RTH	Persentase	100	100	100	
4	Persentase pengelolaan persampahan yang tertangani	%	18,83	22,60	22,40	
5	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	%	100	100	100	
6	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	
7	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun	%	100	100	100	
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	
9	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
1	Nilai Akip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	70,70	70,75	70,80	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	54,85	57,36	60,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
3	Jumlah Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen	1	1	1	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	97,77	97,80	98,00	
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30	30	30	
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
1	Nilai Akip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks	73,75	74,05	74,35	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	0	18,28	
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	100	100	100	
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyaratan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD)	%	100	100	100	
6	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	100	100	100	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1	Nilai Akip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks	67,00	69,00	70,00	
2	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga	%	45	50	60	
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ ASFR 15-19)	Angka	16,1	13,4	11,6	
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	%	62,63	63,86	65,09	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
1	Nilai Akip Dinas Perhubungan	Indeks	70,30	70,50	70,70	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	6,67	10,67	19,56	
3	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	%	0	0	20,00	
4	Persentase kendaraan angkutan orang/barang yang laik jalan	%	0	37,10	38,30	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
1	Nilai Akip Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks	70,90	71,25	71,50	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	0	70	75	
3	Implementasi tata kelola SPBE	Persentase	0	50	60	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					
1	Nilai Akip Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Indeks	69,70	70,00	70,30	
2	Persentase Koperasi Aktif	%	0	0	66,69	
3	Persentase UMKM yang di Kembangkan	%	0	0	0,16	
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	0	0	0,08	
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi	0	0	41,26	
6	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Orang	0	0	8,60	
7	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	0	0	30	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
1	Nilai Akip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	75,10	75,15	75,50	
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	70	80	85	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Investor	0	1	1	
5	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	5.619.731	2.500.000	2.600.000	
6	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Izin	80	83	85	
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	0	100	100	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,04	0,04	0,05	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1	1,15	1,25	
3	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	%	90	90	93	
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,36	2,40	2,50	
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
1	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Indeks	43,25	44,00	45,00	
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
1	Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	%	0	0	2,26	
2	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	5,25	26,67	33,33	
3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Terhadap Masyarakat	%	1,8	2,43	3,65	
4	Persentase Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	46	2,17	3,25	
5	Jumlah Sejarah lokal yang didokumentasikan	*	0	0	1	
6	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	0	2,11	2,95	
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					
1	Nilai Akip Dinas Perpustakaan dan Arsip	Indeks	69,95	69,98	70	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	0	20	40	
3	Nilai tingkat kegemaran membaca	Skor	65,40	66	67	
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					
1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	30	35	40	
2	Tingkat ketersedian arsip	%	72,50	72,60	72,90	
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	30	35	40	
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.005,989	2.021,610	2.042,840	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.350,030	8.453,310	8.880,160	
3	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	50	50	50	
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
1	Nilai Akip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Indeks	72,45	72,48	72,48	
2	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	0	0	11,76	
3	persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	0	20	
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	12,47	7,22	5	
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					
1	Nilai Akip Dinas Peternakan dan Perkebunan	Indeks	71,25	71,25	71,35	
2	Nilai Akip Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks	71,90	71,95	72,00	
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	0	0	87	
5	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)	%	100	100	100	
6	Peningkatan produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit)	Ton/Tahun	6.556,67	6.556,67	6.556,67	
7	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan	%	50	65	70	
8	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina	%	1	1	1	
9	Persentase pengawasan izin usaha pertanian	%	50	50	55	
10	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	0	0	5	
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang diTingkatkan	%	100	100	100	
12	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	%	17,08	20	20	
13	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	%	100	100	100	
14	Peningkatan Populasi Peternakan (sapi, kerbau, kambing dan domba)	Ekor	1,296	1,145	1,145	
BB	**3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**					
1	Nilai efektifitas pengelolaan TAHURA	%	100	100	100	
BC	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	25,78	28,98	32,06	
2	Nilai Ekspor Barang	Juta Rupiah	6.502,67	6.822,41	7.142,14	
3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	6,9	6,7	6,6	
4	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali	3	3	4	
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi	%	0,37	7,89	8,88	
6	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	%	57	60,83	64,67	
BD	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					
1	Nilai Akip Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks	71,80	71,90	72,00	
2	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	%	1	1	1	
3	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	0	100	100	
BE	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**					
1	Nilai Akip Pemerintah Daerah	Indeks	64,07	65	66,5	
2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 2	Level 3	Level 3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
3	Persentase Capaian SPM	%	92,03	92,1	92,3	
4	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik	%	80	82	84	
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	43,26	43,28	43,30	
6	Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Skor	2,77	2,79	2,80	
BF	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**					
1	Nilai Akip Sekretariat DPRD	Indeks	70,80	71,00	71,20	
2	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	85,33	87,00	88,67	
3	Persentase persetujuan penetapan ranperda menjadi perda	%	80,00	81,67	83,33	
BG	**5.01 - PERENCANAAN**					
1	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	24,37	24,87	25,37	
2	Nilai Akip Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indeks	75,40	78,50	81,60	
3	Persentase Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD per tahun	%	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	
8	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	
BH	**5.02 - KEUANGAN**					
1	Nilai Akip Badan Pendapatan Daerah	Indeks	71,05	71,50	71,80	
2	Nilai Akip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks	66	68	70	
3	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100	100	100	
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	34,15	49,27	40	
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9,03	11,94	12,23	
6	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	70	75	80	
7	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	40,28	48,22	50	
8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	87,87	80	85	
9	Persentase silpa terhadap APBD	%	0,48	1,64	2	
10	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	
11	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	6,88	5	5	
BI	**5.03 - KEPEGAWAIAN**					
1	Nilai Akip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks	72,45	74	75	
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	0	25	
3	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	0	0	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
4	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	0	0	25	
5	Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	0	0	100	
BJ	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
1	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	0	0	25	
2	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	0	0	25	
BK	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase	100	100	100	
BL	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**					
1	Nilai Akip INSPEKTORAT	Indeks	79	80	81	
2	Persentase PD dengan kategori AKIP minimal BB	%	0	64,5	64,4	
3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai PKPT	%	0	70	100	
4	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	0	70	70	
5	Persentase Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan ZI	%	0	27,6	47,6	
BM	**7.01 - KECAMATAN**					
1	Nilai Akip Kecamatan Bangun Purba	Indeks	67,00	67,20	67,70	
2	Nilai Akip Kecamatan Pendalian IV Koto	Indeks	67,00	67,20	67,70	
3	Nilai Akip Kecamatan Kepenuhan Hulu	Indeks	67,00	67,20	67,70	
4	Nilai Akip Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Indeks	67,00	67,20	67,70	
5	Nilai Akip Kecamatan Bonai Darussalam	Indeks	67,00	67,20	67,70	
6	Nilai Akip Kecamatan Tambusai Utara	Indeks	67,00	67,20	67,70	
7	Nilai Akip Kecamatan Rambah Hilir	Indeks	67,00	67,20	67,70	
8	Nilai Akip Kecamatan Rambah Samo	Indeks	67,00	67,20	67,70	
9	Nilai Akip Kecamatan Tandun	Indeks	67,00	67,20	67,70	
10	Nilai Akip Kecamatan Kabun	Indeks	67,00	67,20	67,70	
11	Nilai Akip Kecamatan Ujung Batu	Indeks	67,00	67,20	67,70	
12	Nilai Akip Kecamatan Kunto Darussalam	Indeks	67,00	67,20	67,70	
13	Nilai Akip Kecamatan Kepenuhan	Indeks	67	67,2	67,7	
14	Nilai Akip Kecamatan Rokan IV Koto	Indeks	67	67,20	67,70	
15	Nilai Akip Kecamatan Rambah	Indeks	67,00	67,20	67,70	
16	Nilai Akip Kecamatan Tambusai	Indeks	67,00	67,20	67,70	
17	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	50	100	100	
18	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu	%	0	100	100	
19	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	%	60	100	100	
20	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	0	100	100	
21	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	%	0	100	100	
BN	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
1	Nilai Akip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks	70,14	71	72	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	25	100	100	
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	
6	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	

6.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:SPM ditetapkan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas :

a. SPM Bidang Pendidikan;
b. SPM Bidang Kesehatan;
c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;dan
f. SPM Bidang Sosial

Selengkapnya capaian SPM tahun 2024 dan target kinerja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.3
Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN (TAHUN 2024)	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
A.	**BIDANG PENDIDIKAN**				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PRATAMA**	**90,40%**	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN (TAHUN 2024)	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		16938	89,76%	100
2 .	Pendidikan Dasar				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	94194	94.27 %	100
	SD				
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	99,12	99,12%	100
	2 . Kemampuan literasi	Nilai	63,96	63,96%	100
	3 . Kemampuan numerasi	Nilai	52,46	52,46%	100
	SMP				
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	99,12	99,12%	100
	2 . Kemampuan literasi	Nilai	63,01	63,01%	100
	3. Kemampuan numerasi	Nilai	58,92	58,92%	100
3 .	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Orang	22688	87.16 %	100
B.	**BIDANG KESEHATAN**				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS MADYA**	**80.16 %**	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	8819	77.59 %	100
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	9854	89.30 %	100
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	9333	86.86 %	100
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	37111	76.85 %	100
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	11566	58.28 %	100
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	250532	69.04 %	100
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	141230	93.83 %	100
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	61368	60.39 %	100
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	Jumlah Warga Negara penderira diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	5258	100.00 %	100
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	774	89.12 %	100

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN (TAHUN 2024)	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	8930	100.00 %	100
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	10944	60.71 %	100
C.	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**	**100.00 %**	
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	239360	100.00 %	100
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	239360	100.00 %	100
D.	**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS MADYA**	**89,81%**	
1 .	Penyediaan & RehabiitasiRumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	rumah	2	95.00 %	100
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota				
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	rumah		84,62%	100
E.	**BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			**TUNTAS UTAMA**	**96,67%**	
1 .	Pelayanan Ketentraman danKetertiban Umum (TRANTIBUM)				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Orang	280	96.67 %	100
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			**TUNTAS UTAMA**	**90,33%**	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	7	85.00 %	100
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1,7	100.00 %	100

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN (TAHUN 2024)	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1,265	96.00 %	100
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			**TUNTAS UTAMA**	**98,87%**	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	188	98,87%	100
F.	**BIDANG SOSIAL**				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**	**96.50 %**	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti				
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	244	97.49 %	100
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	Orang	378	100,00%	100
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	310	100.00 %	100
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	28	85.00 %	100
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Orang	1631	100.00 %	100

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Pencapaian target pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026.

Seluruh Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini disusun oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar secara yuridis formal untuk menyusun dokumen perencanaan ini. Hal ini lebih di *stream-line* dengan dokumen-dokumen perencanaan penganggaran yang akan tergambar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026.

Tindak lanjut dari RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 ini adalah yaitu bahwa Bupati Rokan Hulu dan para penyelenggara pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu akan membahas lebih lanjut agar dapat melaksanakan

program pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua rakyat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

BUPATI ROKAN HULU,

Ttd

A N T O N

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008